PW ISNU Jawa Timur
PC ISNU Ponorogo

Trajectory Visi Kemanusiaan Sarjana NU

Produksi Wacana Kebangsaan, Revitalisasi Gagasan Islam Publik Inklusif dan Serpihan-serpihan Wacana Alternatif

Kata Pengantar:
Prof. (HC). Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum. (Ketua Umum PP ISNU)
Prof. M. Mas'ud Said, M.M., Ph.D. (Ketua PW ISNU Jawa Timur)

Editor:
Anjar Kususiyanah, M.Hum.
Dr. Muhammad Muchlish Huda, M.Pd.I.

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
CABANG PONOROGO
JAWA TIMUR

TRAJECTORY VISI KEMANUSIAAN SARJANA NU

Publica Indonesia Utama
2024

Editor:
Anjar Kususiyanah, M.Hum.
Dr. Muhammad Muchlish Huda, M.Pd.I.

TRAJECTORY VISI KEMANUSIAAN SARJANA NU

Produksi Wacana Kebangsaan, Revitalisasi Gagasan Islam Publik Inklusif, dan Serpihan-Serpihan Wacana Alternatif

Kata Pengantar

Prof. (HC). Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.
(Ketua Umum PP ISNU)
Prof. M. Mas'ud Said, M.M., Ph.D.
(Ketua PW ISNU Jawa Timur)

Publica Indonesia Utama
2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xxx + 534 Hlm; 15,5 X 23 cm
ISBN: 978-623-8541-73-3
Cetakan Pertama, September 2024

Trajectory Visi Kemanusiaan Sarjana NU

Penulis : M. Mas'ud Said | Farhan | Khabib Fajar Pratama | Adi Ari Hamzah | Arik Dwijayanto | Noval Setiawan | Fitah Husurur | Edy M. Ya'kub | Muchammad Machrus Zaman | Ela Indah Dwi Syayekti | Wafiq Kamilatul Lailiyah | Muhammad Fadhlurrohman | Kardi | Mukhlas Habibi | Muhammad Muchlish Huda | Samsul Hadi | K.A Rahman | Mulyadi | Firman Afrian Pratama | Agung Yusup | Elsa Monica | Sahila Nur Mahfudah | Muhamad Afif Effindi | Dedi Ardiansyah | Afni Ma'rufah | Anjar Kususiyanah | M. Arwan I'tikaf | Eko Priaji | Roin Roiya Hanifah | Ginanjar Prastyanto | Abu Abas | Kusnul Ciptanila Yuni K | Siti Masruroh | Muhammad Fahim Sultoni | Intan Amalia Humala Ababil | Fatihatul Anhar Azzulfa | Mahfud Aziz Dhulkurnaen Husein | Abid Rohmanu | Murdianto | Rinesti Witasari | Maratus Saudah | Afidatul Asmar | Abdul Azis Fatkhurrohman | Lukman Santoso | Muhamad Zulkhoirian Syahri | Dwita Nurulita | Arifatul Mufitda | Muh. Rijalul Fikri | Rojif Mualim | Oga Sugianto | Aishhsalma | Rahmad Ikbal Devid | Agus Setyawan
Editor : Anjar Khususiyanah, M.Hum., Dr. Muhammad Muchlish Huda, M.Pd.I.
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain sampul : Tim Kreatif Publica Institute

Diterbitkan oleh:
Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR
KETUA UMUM PP ISNU

Prof (HC). Dr. Ali Masykur Musa, M.Si,. M.Hum.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, kami memberikan apresiasi atas hadirnya buku berjudul *"**Trajectory Visi Kemanusiaan Sarjana NU: Produksi Wacana Kebangsaan, Revitalisasi Gagasan Publik-Inklusif, dan Serpihan Wacana Alternatif**"*. Buku ini merupakan hasil pemikiran dan refleksi para sarjana Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dalam merespons berbagai tantangan zaman melalui perspektif Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Karya ini lahir dari keprihatinan dan semangat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan peradaban dunia. Di era globalisasi, industrialisasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah diatasi. Isu-isu seperti radikalisme, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan pergeseran nilai-nilai tradisional menuntut respons yang bijaksana dan strategis.

Sebagai contoh, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga tahun 2022 terdapat peningkatan aktivitas radikalisme di media sosial, yang mencapai 600 ribu konten bermuatan ekstremisme. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Di bidang sosial ekonomi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada Maret 2022 mencapai 9,54%, setara dengan 26,16 juta orang. Angka ini mencerminkan perlunya upaya bersama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan

ekonomi yang masih tinggi.

Dalam hal lingkungan, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait deforestasi dan degradasi ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan bahwa deforestasi netto Indonesia tahun 2021 -2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Kerusakan lingkungan ini mengancam keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Buku ini menggali dan mengelaborasi visi kemanusiaan NU yang mengedepankan nilai-nilai universal Islam. Sejak didirikan pada tahun 1926, NU selalu menekankan pentingnya kemaslahatan umat secara global. Hal ini tercermin dalam tema Muktamar Satu Abad NU, *"Merawat Jagat, Membangun Peradaban"*, yang menegaskan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

NU, meskipun berakar pada tradisionalisme, selalu menunjukkan sikap kosmopolitan dan inklusif. Misalnya, pada tahun 1926, NU melalui Komite Hijaz mengajukan permohonan kepada Raja Ibnu Saud untuk menjaga kebebasan bermadzhab di Tanah Suci. Meskipun mayoritas warga NU bermazhab Syafi'i, keterbukaan terhadap penganut mazhab lain selalu dijunjung tinggi, hal ini menunjukkan komitmen NU terhadap persatuan umat Islam.

Dalam era digital, NU berupaya memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan umat. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang, atau sekitar 77% dari total penduduk. Potensi ini dimanfaatkan oleh NU melalui berbagai program digital. Dalam upaya mendigitalisasi administrasi dan layanan, Nahdlatul Ulama (NU) meluncurkan beberapa platform digital terbaru, seperti Digdaya Persuratan NU, yang merupakan aplikasi untuk mempermudah pengelolaan surat-menyurat di lingkungan NU dengan fitur tanda tangan elektronik dan stempel digital (Digdaya NU). Selain itu, NU Online Super App menghadirkan berbagai fitur layanan digital, mulai dari berita keagamaan, informasi NU, hingga marketplace UMKM berbasis NU (NU Online). Kedua aplikasi ini merupakan bagian dari upaya besar NU dalam beradaptasi dengan era digital dan memfasilitasi umat.

Pemberdayaan ekonomi umat menjadi fokus utama NU. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga

kerja nasional. NU melalui program " **OPOP** (*One Pesantren One Product*) bertujuan untuk mendorong pesantren agar memiliki produk unggulan yang bisa dipasarkan secara lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Program ini sukses membantu pengembangan UMKM berbasis pesantren dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan.

Pemanfaatan *e-commerce* dan *platform* digital lainnya memungkinkan UMKM yang dikelola warga NU untuk bersaing di pasar nasional dan internasional. Melalui kerjasama dengan berbagai marketplace, produk-produk UMKM NU seperti kerajinan tangan, produk halal, dan kuliner khas daerah dapat diakses oleh konsumen secara lebih luas. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, tetapi juga memperkenalkan budaya lokal ke kancah global.

Konsep Islam Nusantara yang diperkenalkan pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015 menjadi salah satu kontribusi penting NU dalam diskursus keislaman global. Islam Nusantara menekankan penerapan ajaran Islam yang harmonis dengan budaya lokal, mengedepankan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan kemanusiaan. Konsep ini telah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional, dan dianggap relevan dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan radikalisme.

Berkaitan dengan konservasi lingkungan, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBINU) telah meluncurkan sejumlah inisiatif penting, salah satunya adalah **Program Padat Karya Pemberdayaan Lingkungan**. Program ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, yang berfokus pada peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan warga NU. Program ini mencakup edukasi dan aksi nyata dalam menjaga dan memulihkan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepedulian terhadap alam . Menyadari bahwa kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama di pedesaan, NU mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis melalui konsep fikih lingkungan.

Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidak dapat diatasi secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dan organisasi internasional. Melalui

buku ini, kami berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif dan menjadi inspirasi bagi upaya bersama dalam menghadapi tantangan tersebut.

Apresiasi setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini bisa berada di tangan pembaca yang budiman. Semoga karya ini dapat menjadi referensi wacana dan pemikiran dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua dalam upaya membangun peradaban yang lebih baik dan berkeadilan, *amin*!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,
Ketua Umum PP ISNU

KATA PENGANTAR
KETUA PW ISNU JAWA TIMUR

Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, M.A., Ph.D

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam semangat kajian dan pengembangan pemikiran. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam.

Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, kami mempersembahkan antologi buku berjudul "***Trajectory Visi Kemanusiaan Sarjana NU; Produksi Wacana Kebangsaan, Revitalisasi Gagasan Islam Publik Inklusif dan Serpihan-Serpihan Wacana Alternatif***". Buku ini merupakan hasil karya para sarjana dan cendekiawan NU (Nahdlatul Ulama) yang telah berkomitmen untuk memperluas cakrawala pemikiran dan kontribusi mereka dalam wacana kebangsaan serta pemikiran Islam yang inklusif.

Sebagai Ketua PW ISNU Jawa Timur, saya merasa terhormat dan bahagia karena dapat menyaksikan karya-karya luar biasa ini. Buku ini hadir di tengah dinamika sosial dan politik baik dalam konteks lokal maupun global yang terus berkembang, memberikan perspektif dan wawasan baru dalam memahami visi kemanusiaan yang menjadi landasan perjuangan kita sebagai warga Nahdliyyin kepada dunia. Melalui tulisan-tulisan dalam antologi ini, para penulis mengajak kita untuk mengeksplorasi berbagai ide dan gagasan yang bukan hanya relevan tetapi juga diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Sebagai wujud kebanggaan tersebut saya juga menulis satu chapter berkaitan dengan isu kontribusi kaum Nahdliyyin dalam merawat jagat dan membangun peradaban.

Antologi ini tidak hanya sebatas sebagai dokumentasi akademik, tetapi juga sebagai refleksi dan kontribusi nyata dalam mendiskusikan

ulang upaya kita dalam rangka merevitalisasi gagasan Islam publik yang lebih inklusif. Dalam setiap bab dan artikel, kita akan menemukan serpihan-serpihan wacana alternatif yang menggugah dan menginspirasi, mengarahkan kita untuk terus berpikir kritis dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, dan semua pihak yang peduli terhadap pengembangan wacana kebangsaan dan pemikiran Islam wasathiyah secara global mengenai berbagai isu yang aktual. Semoga apa yang telah dipaparkan dalam buku ini mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya membangun tatanan masyarakat yang lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua penulis, editor, dan pihak-pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini. Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi umat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,
Ketua PW ISNU Jawa Timur

PROLOG

Kosmopolitanisme-Kultural; Diskursus Lintasan Visi Kemanusiaan Sarjana NU

Dr. Muhammad Muchlish Huda, M.Pd.I
(Editorial Team Antologi/Sekretaris PC ISNU Ponorogo)

Pendahuluan: NU dan Tradisionalisme-Kultural Islam Indonesia

Islam di Indonesia selalu menarik untuk ditelaah. Hal ini mengingat perjalanan sejarah dan diskursus Islam di Indonesia yang dinamis. Isu utama yang menjadi dinamika muslim di Indonesia dinilai oleh banyak pihak masih belum bisa sepenuhnya keluar dari kontestasi antara tradisionalisme dan gerakan Islam modernisme. Tipologi Islam yang dipopulerkan oleh antropolog Amerika Clifford Geertz melalui "the Religion of Java" tak bisa dipungkiri ikut membentuk diskursus tersebut. Pada 1960-an, ia mengkategorikan pola keberagamaan muslim di Indonesia menjadi tiga kategori, santri dan abangan dan priyayi, meskipun yang disebut terakhir tidak terlalu spesifik berkaitan dengan religiusitas masyarakat Jawa.

Santri didefinisikan sebagai pemeluk Islam dengan kesalehan spiritual dan memegang erat ritus-ritus dan tradisionalisme Islam. Pada perjalanannya, identitas santri ini melekat pada dunia pesantren dengan segala hal ihwal tradisionalisme yang ada di dalamnya.[1] Seyyed Hossen Nasr menjelaskan panjang lebar mengenai

---

1 Mengenai Tradisionalisme Santri yang notabenenya adalah penghuni Pesantren, Clifford Geertz dalam *"The Religion Of Java"* nya memaparkan hal tersebut secara jelas. Banyak aspek khas santri dalam hal ini -penekanan pada "perusahaan" takut kepada Tuhan, dan Negara Islam yang didasarkan atas Qur'an dan Hadits, mengambil jalan analisa bahasa Arab dan bukan analisa bahasa Hindu-Jawa, pemisahan antara "jasmani" dan "rohani" dan bukan "batin" dan "lahir". Dalam hal ini, Islam hampir-hampir menjadi "ilmu kejawen" yang lain. Periksa: Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Pr'ryayi dalam Masyarakat Jawa.* Terj. Aswab Mahasin. (Jakarta: PT Dunia Pustaka

tradisionalisme Pesantren tersebut.[2] Sementara abangan mewakili masyarakat dengan stigmatisasi laku yang tidak menaruh perhatian besar pada ritus-ritus peribadatan dan spiritualisme Islam. Abangan mewakili masyarakat yang menghayati kepercayaan leluhur mereka. Peta karakteristik Islam di Indonesia yang digunakan oleh banyak rajana dan peneliti berangkat dari tiga tipologi tersebut.

Nahdlatul Ulama (NU) dalam tipologi Geertz termasuk dalam kategori muslim santri. Ormas Islam Independen terbesar di dunia[3] ini selain karena pendiri organisasinya menjadi pelopor berdirinya beberapa pesantren di Nusantara, NU juga identik dengan perlawanannya terhadap modernisme dan puritanisme. Identitas tradisional-kultural yang melekat pada NU juga tidak lepas dari akar pemikiran dan kredo ajaran Islam yang tidak hanya berhenti pada dua sumber utama al-Qur'an dan Hadits sebagaimana organisasi keIslaman lainnya. NU memiliki pandangan mengenai pentingnya tradisi dan ijma' ulama' (konsensus ulama) yang menjadi bingkai dan pondasi penting manhaj pemikiran dan ritus amaliahnya. Disamping itu, NU juga dikenal dengan spirit pendekatan sufisme dalam aktifitas keagamaannya. Spirit keberagamaan yang menurut Karel Steenbrink juga melatarbelakangi masuknya Islam di Indonesia.[4]

Jaya, 1981) hlm 492.

2 Dunia pesantren, dengan meminjam kerangka Seyyed Hossein Nasr adalah dunia tradisional Islam. Segala hal ihwal mengenai Islam tradisional diwariskan oleh peradaban Islam kepada dunia pesantren dengan berbagai macam bentuk dan coraknya. Bahkan -dalam konteks keIndonesiaan- label "tradisional" yang melekat pada diri pesantren, pada beberapa kasus secara massif membentuk opini publik mengenai Islam yang terkungkung dalam kerangka berfikir yang *literalis formalis* minus modernisasi dan kontekstualisasi. Sementara Pendidikan Tinggi adalah tempat dimana isu-isu mutakhir lahir. Periksa: Seyyed Hossein Nasr, *Traditional Islam in the Modern World,* (London: KPI, 1987), hlm 15

3 NU memiliki 60 juta anggota di Indonesia dan sekitar 30 juta lebih di seluruh dunia. Lihat: A.R. Arifianto: "Practicing What it Preaches; Understanding Contradiction Between Pluralist Theology Religious Intolerance Within Indonesia's Nahdlatul Ulama". *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies.* Vol. 55. No. 22017: 257

4 Islam yang pertama kali datang ke Indonesia ini adalah Islam versi sufiisme. Pendapat ini merupakan pendapat umum para sarjana Barat. Tesis ini didasarkan pada alasan bahwasannya dakwah Islam setelah abad ke-2 hijriyah terus mengalami kemunduran, dan baru pada abad ke-7 hijriyah (13 Masehi) mulai bergema dan aktif kembali setelah mendapatkan sumbangan kekuatan dari ahli tasawwuf dan ahli tarekat. Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang*

Dua yang disebutkan terakhir ini menjadi fundamen penting kiprah NU dalam perjalanannya mengisi ruang relasi Negara bangsa dan agama di Indonesia bahkan dalam lingkup global. Oleh karena itulah, stigmatisasi sebagai organisasi tradisional-kultural melekat pada NU.[5]

Dalam konteks teologis, NU adalah organisasi Muslim Sunni atau ahlussunnah wal jamaah (Aswaja). Secara manhaj pemikiran, NU adalah jalan tengah atau wasathiyah moderat. Yang dimaksud dengan wasathiyah atau moderat adalah antara rasionalisme-ekstrim dan skriptualisme-garis keras. Gagasan jalan tengah yang diambil oleh NU terinspirasi oleh konseptualisasi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari (84-936) dan Abu Mansur al-Maturidi (853-944). Sementara itu dalam konteks kalam dan teologis, NU mengikuti salah satu dari empat madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali) meskipun mayoritas mengikuti Syafi'i. Sementara itu dalam tasawuf mengikuti jalan sufisme Abu Hamid al-Ghazali dan Junayd Al-Baghdadi. Bangunan akidah, praktek hukum, kalam dan teologi Nahdlatul Ulama tersebut di atas merepresentasikan konservatisme Islam dan tradisionalismenya. Sekilas hal tersebut akan berbenturan dengan gagasan kosmopolitanisme yang mengandaikan tatanan keyakinan modern dan inklusif.

Sebenarnya tidak semua aspek yang ada dalam Nahdlatul Ulama merepresentasikan segala hal ihwal mengenai tradisionalisme-kultural. Beche Bt Mamma dalam risetnya menunjukkan bahwa NU memiliki andil besar dalam kerangka perkembangan Indonesia era modern. Peran tersebut diambil oleh NU dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik[6] dan diskursus wacana ijtihad.

Islam di Indonesia Abad ke-19, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hlm 173.

5 Tradisionalisme dan Konservatisme NU dinilai karena organisasi ini secra konsisten terus mempraktekkan apa yang telah dirancang oleh para wali Jawa berabad-abad yang lalu sebagai bentuk terbaik penggabungan Islam dan budaya lokal Nusantara. Greg Barton, "Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual Ulama; The Meeting if Islamic Traditionalism and Modernism in Neo-Modernist Thought. *Islam and Christian-Muslim Relations.* Vol. 8. No. 3. 1997. 323-350.

6 Tidak bisa tidak, NU memiliki kontribsi besar dalam menjaga stabilisasi politik dan stabilitas negara Indonesia. Dengan ideology *ahlussunnah wal jamaah* yang menjadi kredo keyakinan warga NU, organisasi ini konsen pada sikap moderatisme beragama dan dengan tegas mengambil posisi berlawanan dengan fundamentalisme yang mengancam keamanan dan stabilitas Negara republic Indonesia. lebih jelas mengenai kontribusi NU dalam menjaga stabilitas politik dan stabilitas Negara Indonesia, lihat: Faisal Ismail, "The Nahdlatul Ulama:

Dinamika perkembangan wacana kepesantrenan memberikan kontribusi penting dan signifikan dalam gagasan Indonesia era modern. Dalam bidang politik, penerimaan NU terhadap pancasila sebagai pilar ideologis Negara Indonesia serta penerimaannya terhadap piagam Jakarta dinilai oleh Beche sebagai sumbangsih penting dalam dinamika politik Indonesia era modern. Yang tidak kalah penting, gagasan dan konsep ijtihad yang dibangun oleh NU menjadi salah satu aspek inklusifitas organisasi ini pada perubahan dan kebaruan.[7] Pertanyaan yang penting diajukan kemudian adalah, bagaimanakah masa depan tradisionalisme-kultural yang dibangun oleh NU bisa kompatibel dan bersejajar dengan wacana global yang semakin kosmopolit dan cenderung mengarah pada sekularisme dan privatisasi agama?

Kosmopolitanisme Sebagai Tatanan Baru Dunia Modern

Setidaknya ada tiga konsepsi alternatif model tatanan dunia global yang secara spesifik berkaitan dengan agama-agama yang dipaparkan oleh Jose Casanova. Pertama adalah konsep kosmopolitanisme yang dibangun di atas teori pembangunan dan berbasis pada gagasan modernisasi. Konsep ini dianggap sebagai ekspansi global modernitas barat dan diyakini oleh banyak pemerhati sebagai proses universal perkembangan manusia. Dalam konteks modernitas barat yang berbasis pada sains ini, agama mengalami proses privatisasi. Agama-agama yang menolak privatisasi dipandang sebagai fundamentalism berbahaya yang mengancam struktur modernitas sekuler yang berbeda.

Kedua, terjadinya benturan peradaban atau clash of civilization yang pernah digambarkan oleh Huntington yang mempertahankan komponen analitis modernitas barat tetapi bersamaan dengan itu

---

Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State", *Journal of Indonesian Islam*. Vol. 5. No. 2. 2011.

7 Keikutsertaan NU dalam dinamika politik Indonesia terjadi ketika oranisasi ini bergabung dengan Masyumi, meskipun kemudian NU keluar dari Masyumi dan kembali pada *khittah* organisasi pada 1952 berdasarkan keputusan PRNU tanggal 5/6 April 1952. Informasi lebih lengkap mengenai langkah politik praktis NU baca: Beche Bt Mamma, "The Role of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in Building the Modern Indonesia, *"Jurnal Ilmiah Kosmopolitan"* Vol. 3. No 2. Desember 2015. Baca juga: Greg Fealy & R. Bush, "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia's Nahdlatul Ulama: Interest, Politics, and *Khittah*" in. A.Reid & M. Gilsenan (eds), *Islamic Legitimacy in a Plural Asia* (London & New York: Routledge, 154), 166.

pula dipisahkan dari klaim normatif universalis. Dalam konteks benturan peradaban ini, yang dimaksud dengan modernitas adalah pencapaian khusus peradaban barat yang didasarkan pada tradisi Yahudi-Kristen. Agama-agama dunia adalah sebuah fakta mengenai kepercayaan manusia dan merupakan peradaban yang tidak kompatibel dan ditakdirkan untuk berbenturan satu sama lain demi hegemoni global.[8] Ketiga adalah Model multiple modernities. Model ini disajikan sebagai kerangka analitis alternatif yang menggabungkan beberapa klaim kosmopolitanisme universalis, terlepas dari asumsi sekularisnya, dengan pengakuan relevansi terus-menerus dari agama-agama dunia untuk tatanan global yang muncul. Dalam konkteks multiple modernities ini, kosmopolitanisme diyakini menjadi jalan keluar untuk menghindari benturan peradaban yang diramalkan oleh Huntington di atas.

Kosmopolit adalah gagasan bahwa semua manusia merupakan anggota dari suatu komunitas global. Gagasan ini meyakini bahwa manusia harus menjadi warga dunia dalam sebuah komunitas universal. Namun begitu perlu ditekankan mengenai perbedaan antara cosmopolitanism sebagai sebuah idologi dan cosmopolitanity sebagai suatu realitas kosmopolitan. Kosmopolitanisme sebagai sebuah ideologi mengandaikan kepercayaan terhadap nilai dan moral universal/universal morality. Kosmopolitanisme sebagai sebuah ideologi misalnya bisa juga berbentuk penerimaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap konsep universal declaration of human right. Sementara itu kosmopolitanitas sebagai sebuah realitas kosmopolit adalah bahwa perbedaan antar individu tidak ditentukan pada kesukuan atau batas geografis sebuah wilayah tertentu, akan tetapi berdasarkan kontribusinya pada nilai-nilai dan universalisme global. Gagasan kosmopolitanitas secara praktis mengupayakan adanya standar moral secara universal dalam bentuk platform ekspresi budaya dan tolerasnsi bersama.

Gagasan kosmopolit ini menolak faham superioritas kesukuan atau politik mayoritas-minoritas. Seseorang disebut being cosmopolit ketika ia memandang dirinya sebagai warga dunia dan sekaligus aktif dalam diskursus dan perkembangan wacana dalam komunitas global. Meskipun begitu, kosmopolit tidak berarti harus menerima

---

8 Jose Casanova, "Cosmopolitanism; The Clash of Civilization and Multiple Modernities", *Sage Journal: Current Sociology.* Volume 59. Issue 2. March 2011.

budaya lain dan mencerabut identitas kediriannya, justru dengan identitas kediriannya tersebut seorang kosmopolitan berkontribusi memberikan warna pada komunitas global dengan tetap inklusif dan terbuka terhadap identitas atau keyakinan lain yang berbeda.[9]

Dalam konteks kosmopolitanisme, ia bisa juga berbentuk sikap, pengetahuan atau pergaulan dalam lingkup global yang inklusif dan terbuka dengan penekanan bukan pada entitas partikular tetapi pada peradaban secara luas yang lebih holistik dan universal. Sehingga keluasan pengetahuan dan pergaulannya tersebut menghubungkannya dengan wacana dunia yang beragam. Gagasan cosmopolitan juga diperbincangkan dalam Islam. Abdurrahman Wahid menulis sebuah buku mengenai Islam cosmopolitan. Dalam buku ini yang dimaksud dengan Islam kosmopolit adalah Islam yang mendukung dan mengandung nilai-nilai universal. Untuk mendukung nilai-nilai universal tersebut, penerapan syari'ah Islam harus berpatokan pada maqashid syari'ah yang merupakan konsep dan gagasan universal tentang perlindungan jiwa (nyawa), nalar, keyakinan (agama), keturunan dan modal kapital. Apapun latar belakang kelompok, keyakinan, ras, suku dan kewarganegaraan seseorang, maka lima gagasan universal tersebut di atas harus terlindungi.[10]

NU: Berakar Pada Tradisionalisme-Kultural Menuju Gagasan Islam Kosmopolit

Kosmopolitanisme menjadi isu dan gagasan yang akhir-akhir ini mengemuka. Hal ini tidak terlepas dari massifnya perkembangan dunia digital yang semakin mengaburkan jarak geografis antar manusia di berbagai penjuru dunia. Digitalisasi menghubungkan berbagai peradaban manusia yang berbeda. Kondisi inilah yang mengandaikan gagasan kosmopolitanisme dengan tujuan hidup bersama sebagai warga dunia yang tanpa sekat antar berbagai ras, suku, kelompok, agama dan kepercayaan. NU sendiri tidak secara

---

9 Untuk mandalami kosmopolitanisme utamanya di Asia Tenggara baca misalnya explorasi Khairudin Al Juneid yang mengkomparasikan risetnya pada tiga Negara, Singapore, Malaysia dan Indonesia. Khairudin Al Juneid, *Muslim Cosmopolitanism; Southeast Asian Islam in Comparative Perspective,* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016)

10 Abdurrahman Wahid, *Islam kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm 76.

eksplisit tidak mewacanakan gagasan tersebut, akan tetapi Gus Dur yang dianggap representasi dari intelektual NU mewacanakan kosmopolitanisme dalam diskursus yang lebih luas menyangkut Islam dalam sebuah buku yang dieditori oleh Ahmad Suaedy berjudul "Islam Kosmopolitan; Nilai Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan".

Meskipun begitu, secara implisit gerakan yang dibangun oleh NU juga tidak kemudian meniscayakan samasekali gagasan kosmopolitanisme. Dalam bukunya "Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama", Ahmad Baso menjelaskan bagaimana NU memiliki bangunan gagasan pemikiran modern yang sebenarnya juga mengarah pada gagasan kosmopolit. Menurutnya, Khittah NU memiliki dua alternatif pengertian. Pertama yakni pengertian khittah yang bersifat spesifik dan partikular (far'i-juz'i) yakni naskah khittah Nahdlatul Ulama rumusan komisi khittah yang disahkan dalam muktamar Situbondo. Kedua adalah khittah yang bersifat universal atau holistik ('am-kulliy) yang menjadi cita-cita dan idealita perjuangan NU bagi agama dan bangsa sejak awal berdirinya sampai sekarang. Khittah NU harus difahami dalam konteks politik nasional maupun panggung global yang kosmopolit. Menurut Baso, slogan kembali ke khittah NU 1926 berarti kembali pada cita-cita dan pandangan politik NU baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks global.[11]

Percikan gagasan kosmopolitanisme mewarnai dinamika perjalanan lahirnya NU sebagai sebuah organisasi sekaligus gerakan tradisionalisme-kultural Islam. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, NU juga tampil mewarnai dinamika tersebut dengan identitas tradisionalisme-kulturalnya dan di saat yang sama secara inklusif berjejaring dengan diskursus wacana keIslaman secara global yang mampu menerima perbedaan dan keberagaman secara moderat. Gagasan tradisionalisme dan moderatisme[12] yang diusung NU ini

---

11 Ahmad Baso, *Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama,* (Jakarta: Yayasan Garuda Bumandhala, 2021). Mengenai Muktamar Situbondo, lihat: Martin Van Bruinessen, "Back to Situbondo? Nahdlatul Ulama Attitutdes towards Abdurrahman Wahid's Precsidency and His Fall", In H. Nordholt and I. Abdullah (eds), *Indonesia in Search of Transition,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 15-46.

12 NU menjadi agent persebaran moderatisme Islam di Indonesia dan secara global. Peran ini memang menjadi identitas gerakan NU dalam semua lini sejak ia didirikan di tahun 1926. Lihat: Faried. F. Saenong, "Nahdlatul Ulama (NU): A

menjadi penantang serius gerakan modernisme yang datang dari Mesir dan mulai masuk ke Indonesia dengan menghantam ritus-ritus keagamaan yang menjadi kultur keberagamaan kaum nahdliyyin. NU juga menjadi penantang faham wahabi yang sejak 1925 bersama dengan klan Ibnu Sa'ud menguasai Hijaz dengan dua kota sucinya Makkah dan Madinah. Sebagaimana diketahui bersama pasca penguasaan tersebut, pada 1932 Hijaz berganti nama menjadi al mamlakah al arabiyyah al-sa'udiyah dengan ibukota Riyadh.

Sebagaimana diketahui bahwa jatuhnya Hijaz ke tangan Wahabi dan klan Ibnu Sa'ud berdampak besar pada banyak hal termasuk dilarangnya faham dan ajaran ahlussunnah wal jamaah dan kemudian dirubah menjadi faham wahabi. Pemerintah Saudi juga melarang warganya untuk bermadzhab, termasuk melarang ziarah ke makam para sahabat. Puncaknya adalah rencana penggusuran makam Rasulullah dan para sahabatnya karena dianggap sebagai sumber kemusyrikan.[13]

Perubahan konstelasi dunia Arab, utamanya wacana penggusuran makam Nabi Muhammad menjadi gejolak yang luar biasa di kalangan umat muslim seluruh dunia, termasuk para ulama ahlussunnah wal jama'ah di tanah air. Peristiwa itu kemudian memicu lahirnya Komite Hijaz yang misi utamanya adalah memberikan masukan kepada pemerintah Saudi agar mempertimbangkan kembali rencana penggusuran makam Rasulullah dan para sahabat tesebut. Pada perjalanannya kemudian, karena komite Hijaz belum memiliki wadah organisasi, maka dibentuklah sebuah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Tidak bisa dipungkiri, bahwa Nahdlatul Ulama lahir salah satunya adalah sebagai bentuk respon para ulama terhadap dinamika perkembangan dan konstelasi diskursus wacana Islam internasional. Berdasarkan dinamika perjalanan sejarah berdirinya NU tersebut tidak berlebihan jika dikatakan bahwa NU memiliki gen wawasan kosmopolit sejak lahir.

Selain aktif dalam diskursus wacana global, gen kosmopolitanisme NU juga tampak dalam point krusial usulan Komite Hijaz yang mengutus KH. Wahab Hasbullah untuk membujuk

---

Grassroots Movement Advocating Moderate Islam". *Handbook of Islamic Sects and Movement.* M. Afzal Upal & Carole M. Cusack, (Brill: Publisher Brill, 2021), hlm 129-150.

13 Zaki Mubarak (Ed), *Kontekstualisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Berbagai Sendi Kehidupan*, (Tasikmalaya: Pustaka Turats, 2021)

raja Ibnu Saud perihal penggusuran makam Nabi Muhammad. Point krusial tersebut adalah meminta raja Ibn Saud untuk tetap memberlakukan kebebasan bermadzhab seperti madzhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali di Saudi. Meskipun mayoritas warga NU menganut madzhab Syafi'i, akan tetapi NU menunjukkan inklusifitas dan keterbukaanya terhadap penganut madzhab selain Syafi'i. Usulan Komite Hijaz ini sekali lagi menunjukkan bahwa dengan tradisionalisme-kulturalnya yang mengakar, pada kancah global NU tetap tampil kosmopolit dalam kerangka ikut andil mewarnai wacana dan diskursus keIslaman dunia.

Jika ditarik lagi ke belakang, jauh sebelum berdirinya NU pada tahun 1926, organisasi ini memiliki jejak epistemologis dan jejak ideologis panjang. Peran KH Hasyim Asyari dan Kyai Wahab Chasbullah terutama dalam berdirinya NU patut untuk diperbincangkan. Hubungan keduanya adalah hubungan guru dan murid. KH. Hasyim Asy'ari menyarankan kepada KH. Wahab Chasbullah untuk belajar ke Makkah setelah menyelesaikan studinya di Tebuireng Jombang pada 1908. Di makkah KH Wahab Chasbullah dan para ulama muslim sezamannya termasuk Abdul Halim, Ahmad Sanusi, dan Mas Mansur ikut mendirikan Syarikat Islam cabang Makkah.[14]

Pada saat yang hampir sama dan agak lebih awal, organisasi Islam modernis Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta. Organisasi ini dimulai oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Berbeda dengan NU yang lebih kultural, Muhammadiyah didirikan sebagai organisasi keagamaan yang puritan, reformis dan modernis. Tujuannya adalah memurnikan islam dari takhayyul, bid'ah dan khurafat. Muhammadiyah disebut sebagai reformis karena terinspirasi dari pembaharu Muhammad Abduh yang menganggap reformasi Islam sebagai prinsip dasar. Sementara NU telah menegaskan diri sejak awal sebagai gerakan organisasi Islam kultural sehingga baik NU maupun Muhammadiyah memiliki garis pergerakan yang berseberangan.[15]

Ketika kembali ke Surabaya pada tahun 1914 KH. Wahab Chasbullah mendirikan Nahdlatul Wathan yang dicanangkan sebagai

---

14 D. Effendi, *A Renewal Witouth Breaking Tradition: The Emmergence of a new Discourse in Indonesia's Nahdlatul Ulama During the Abdurrahman Wahid Era,* (Yogyakarta: Interfidei, 2008).

15 Farid. F. Saenong, "Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam", 130.

lembaga keagamaan pertama yang berwatak nasionalis moderat di Nusantara. Dalam waktu dua tahun, Nahdlatul Wathan telah memiliki sebuah madrasah dengan bangunan dua lantai di Surabaya. Cabang-cabangnya tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Malang, Gresik, Jombang, Semarang dan tempat lain. Lembaga pengembangan pendidikan intelektual Tashwirul Afkar juga lahir di masa-masa itu.[16] Pergerakan KH. Wahab Chasbullah tersebut mengarah pada jejaring ulama dan cendekiawan dalam lingkup global. KH. Wahab Chasbullah memulai gerakan tersebut bertolak dari Makkah sebagai pentas global untuk kemudian mengakar di Nusantara.

Dari sinilah NU dinilai sebagai organisasi yang sejak lahir memiliki gen kosmopolit. Pergerakan KH. Wahab Chasbullah tidak bisa dipungkiri menjadi jejak epistemologis dan jejak ideologis paling awal terhadap upaya yang dilakukannya dengan KH. Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU pada tahun-tahun selanjutnya. Pengurus Cabang Istimewa NU (PCI-NU) yang berada di berbagai negara bisa didefinisikan sebagai langkah being cosmopolit dan sekaligus agen persebaran moderatisme global. Tantangan terbesar being cosmopolit bagi NU adalah politik mayoritas-minoritas. Mengingat mayoritas muslim Indonesia adalah warga NU, jika NU tetap konsisten menjadi ormas Islam yang being cosmopolit, maka mau tidak mau NU harus bersikap inklusif dan terbuka, mulai menghindari pandangan eksklusifisme terhadap golongan lain dan lebih mengarusutamakan gagasan kemanusiaan dalam kancah global.

Penutup

Percikan gagasan kosmopolitanisme-kultural mewarnai dinamika perjalanan lahirnya NU sebagai sebuah organisasi sekaligus gerakan tradisionalisme-kultural Islam. Akar gagasan pemikiran kosmopolit NU bisa terlacak dari beberapa hal. Pertama, manhaj pemikiran jalan tengah atau wasathiyah-moderat yang berdiri di tengah-tengah antara rasionalisme-ekstrim dan skriptualisme-garis keras menjadi platform dasar pergerakan NU di semua lini. Kedua,

---

16 Martin Van Bruinessen, "Traditions for the Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse within NU", Greg Barton and Greg Fealy (Eds), *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia.* Clayton, VIS: Monash Asia Institute, 163-89. Lihat juga: A. Feilland, "Nahdlatul Ulama in Indonesia", In J. Esposito and E. Shahin (eds), *The Oxford Handbook of Islam and Politics.* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

gagasan tradisionalisme-kultural NU ikut andil dalam mewarnai wacana dan diskursus keIslaman global utamanya melalui Komite Hijaz dalam konteks wacana penggusuran makam Nabi Muhammad. Melalui bangunan konservatisme yang menjadi platform teologisnya Komite Hijaz sebagai cikal bakal NU memberikan masukan kepada Ibnu Saud untuk memberlakukan kebebasan bermadzhab.

Ketiga akar gagasan kosmopolit NU tercermin melalui khittah NU yang bersifat universal atau holistik ('am-kulliy). Khittah tersebut harus difahami dalam konteks politik nasional maupun panggung global yang kosmopolit. Slogan kembali ke khittah NU 1926 berarti kembali pada cita-cita dan pandangan politik NU baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks global. Ketiga point tersebut menjadi akar gagasan kosmopolitanisme-kultural NU karena ketiganya mengandaikan ruang ekspresi bersama yang lebih universal dan inklusif.

Daftar Pustaka

Al-Juneid, Khairudin. 2016. *Muslim Cosmopolitanism; Southeast Asian Islam in Comparative Perspective.* Edinburgh: Edinburgh University Press.

Arifianto, A.R. 2017. "Practicing What it Preaches; Understanding Contradiction Between Pluralist Theology Religious Intolerance Within Indonesia's Nahdlatul Ulama". *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies.* Vol. 55. No. 2.

Barton, Greg. 1997. "Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual Ulama; The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in Neo-Modernist Thought. *Islam and Christian-Muslim Relations.* Vol. 8. No. 3.

Baso, Ahmad. 2021. *Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama.* Jakarta: Yayasan Garuda Bumandhala.

Bruinessen, Martin Van. 1996. "Traditions for the Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse within NU", Greg Barton and Greg Fealy (Eds), *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia.* Clayton, VIS: Monash Asia Institute, 163-89.

Bruinessen, Martin Van. 2002. "Back to Situbondo? Nahdlatul Ulama Attitutdes towards Abdurrahman Wahid's Precsidency and His Fall", In H. Nordholt and I. Abdullah (eds), *Indonesia in Search of Transition.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Casanova, Jose. 2011. "Cosmopolitanism; The Clash of Civilization and Multiple Modernities", *Sage Journal: Current Sociology.* Volume 59. Issue 2.

Effendi, Djohan. 2008. *A Renewal Witouth Breaking Tradition: The Emmergence of a new Discourse in Indonesia's Nahdlatul Ulama During the Abdurrahman Wahid Era.* Yogyakarta: Interfidei.

Fealy, Greg & Robin Bush. 2014. "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia's Nahdlatul Ulama: Interest, Politics, and *Khittah*" in. A. Reid & M. Gilsenan (eds), *Islamic Legitimacy in a Plural Asia.* London & New York: Routledge.

Feilland, A. 2013. "Nahdlatul Ulama in Indonesia", In J. Esposito and E. Shahin (eds), *The Oxford Handbook of Islam and Politics.* Oxford: Oxford University Press.

Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Pr'ryayi dalam Masyarakat Jawa.* Terj. Aswab Mahasin. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Ismail, Faisal. 2011. "The Nahdlatul Ulama: Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State", *Journal of Indonesian Islam.* Vol. 5. No. 2.

Mamma, Beche Bt. 2015. "The Role of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in Building the Modern Indonesia, *"Jurnal Ilmiah Kosmopolitan"* Vol. 3. No 2.

Mubarak, Zaki (Ed). 2021. *Kontekstualisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Berbagai Sendi Kehidupan*. Tasikmalaya: Pustaka Turats.

Nasr, Seyyed Hossein. 1987. *Traditional Islam in the Modern World.* London: KPI

Saenong, Faried. F. 2021. "Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam". *Handbook of Islamic Sects and Movement.* M. Afzal Upal & Carole M. Cusack. Brill: Publisher Brill.

Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19.* Jakarta: Bulan Bintang.

Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Umum PP ISNU vi
Kata Pengantar Ketua PW ISNU Jawa Timur.................................... x
Prolog xii
Daftar Isi xxv

Diaspora Nahdliyyin dan Gagasan Kosmopolitanisme NU 1

Sisi Kemanusiaan NU Dalam Merawat Jagat Dan Membangun Peradaban
Mas'ud Said 2

Dampak Diplomasi Kultural Nahdlatul Ulama Terhadap Hubungan Internasional Prespektif Global
Adi Ari Hamzah.. 9

Refleksi Dakwah dan Silsilah Nasab Kiai Kharismatik Wilayah Tapalkuda
Farhan.. 21

Santri Intelegensia
Khabib Fajar Pratama 34

Era Digital dan Dampaknya Terhadap Perubahan Kultur Warga NU...45

Menavigasi Arus Digital: Transformasi Dakwah NU di Era Media Sosial
Arik Dwijayanto 46

Sirkulasi Digital: Transformasi Kultur warga NU pada Era Teknologi
Noval Setiawan.. 64

Era Digital dan Dinamika Kultural Warga NU: Transformasi dan Tantangan dalam Dunia Digital
Fitah Husurur 76

Pancasila dan Tantangan Digitalisasi di Abad Kedua 2045
Edy M Ya'kub 88

Transfigurasi Nahdliyin Prespektif Digital Kultur
Muchammad Machrus Zaman 95

Menyelaraskan Hidup Warga NU Di Era Digital
Ela Indah Dwi Syayekti 104

Majelis Sabilu Taubah: Bukti Nyata Adanya Pengaruh Digitalisasi dalam Dakwah dan Implementasi Amaliyah NU
Wafiq Kamilatul Lailiyah 114

Transformasi Kultural Warga Nahdlatul Ulama di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Keagamaan dan Sosial
Muhammad Fadhlurrohman 121

Sinergitas Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (APPTNU) Dalam Upaya Pengembangan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LTNU) Di Era Digital Global
Kardi 134

Era Digital dan Transformasi Kultur Warga Nahdlatul Ulama: Tantangan, Strategi Adaptasi, dan Implikasi
Mukhlas Habibi 146

Sekolah, Pesantren dan Visi Pendidikan Tinggi NU dalam Merespon Revolusi Industri 5.0 160

Sekolah di Persimpangan Jalan; Antara Komersialisasi, Neoliberalisme Pendidikan dan Arena Reproduksi Kesenjangan Sosial
Muhammad Muchlish Huda 161

Menyosong Pendidikan Pesantren Integratif Dalam Merespon Tantangan Era Society 5.0
Samsul Hadi 174

Pengelolaan Pesantren Mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah
K.A. Rahman, Firman Afrian Pratama, Agung Yusup, Mulyadi . 185

Urgensi Nilai Etika dan Moral Pendidikan Pesantren Salafiyah Modern Menghadapi Revolusi Industri 5.0
Elsa Monica, Sahila Nur Mahfudah..192

Framework Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Berbasis Revolusi Industri 5.0
Muhamad Afif Effindi...203

Pendidikan Karakter Di Dalam Pesantren : Responsif Terhadap Tantangan Revolusi Industri 5.0
Dedi Ardiansyah..212

Peran Pesantren dalam Membangun Masyarakat Berkarakter di Era Revolusi Industri 5.0
Afni Ma'rufah...224

Mengintegrasikan Tradisi dan Inovasi: Pendekatan Modern dalam Pendidikan Salafi
M. Arwan I'tikaf..238

Indonesia Emas: Antara Tantangan dan Cita-Cita
Eko Priaji..250

Merdeka atau Menderita?
Roin Roiya Hanifah...254

Kebijakan Publik dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Keummatan 257

Teori Pembangunan Berwawasan Nu
Ginanjar Prastyanto...258

Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia: Strategi, Tantangan, dan Potensi Keuangan Syariah
Abu Abas..275

Arsitektur Kebijakan Publik untuk Ekonomi Inklusif: Pendekatan Keumatan dalam Era Digital
Kusnul Ciptanila Yuni..283

Strategi KOIN NU Sebagai Gerakan Berinfaq dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat
Siti Masruroh..301

NU dalam Bingkai Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.........314

Tradisi NU, Fiqh Sosial, dan Hukum (Fondasi Keadilan untuk Masyarakat Modern)
Anjar Kususiyanah 315

Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik, Hukum, dan HAM: Paradigma, Dinamika, dan Implementasi di Indonesia
Muhammad Fahim Sultoni 326

Eksistensi Media Sosial Dalam Menyuarakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kalangan Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri
Intan Amalia Humala Ababil, Fatihatul Anhar Azzulfa, Mahfud Aziz Dhulkurnaen Husein..332

Rekayasa Toleransi: Hukum sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Perspektif Kesarjanaan NU
Abid Rohmanu..350

Gerakan Mahasiswa dan Momentum Historis
Murdianto 366

Tantangan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di Era Kontemporer
Rinesti Witasari 372

Perempuan Kepala Keluarga Sebagai Realitas Tidak Tercatat
Alfira Deviana 377

Analisis Teori Sosial Terhadap Keputusan Wanita Di Ponorogo Menjadi Tenaga Kerja Wanita
Mar'atus Saudah 386

Kompabilitas Nilai Aswaja Terhadap Produksi Wacana Kebangsaan Sarjana NU 400

Aswaja sebagai Penyangga Ideologi Kebangsaan: Upaya Sarjana NU dalam Memperkokoh Identitas Nasional
Afidatul Asmar...401

Idealitas Jalan Tengah: Evaluasi Moderasi Beragama dalam Bingkai Aswaja
Abdul Azis Fatkhurrohman 411

Konsep Negara Bangsa dan Ancaman Berdimensi Ideologi 421

Intelektual Muda NU Inklusif: Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045
Lukman Santoso 422

Menelisik Ancaman Berdimensi Ideologi dan Menata Kembali Etika Moral Bangsa
Zulkhoirian Syahri, Dwita Nurulita 437

NU dan Tantangan Konservasi Budaya Islam Nusantara.............447

Upaya Pemberdayaan Nilai-Nilai NU: Aswaja sebagai Wadah Pelestarian Budaya Islam Nusantara dalam Kontroversi di Masyarakat
Muh. Rijalul Fikri dan Arifatul Mufitda... 448

Revitalisasi Gagasan Islam Publik-Inklusif Nu Melalui Konservasi Budaya Islam Nusantara
Rojif Mualim 457

Transformasi Budaya Islam Nusantara Di Tengah Tantangan Modernitas: Peran Nahdlatul Ulama
Roni Susanto, Muhamad Afif Ulin Nuhaa...................................... 468

Pohon Aksara Jawa: Cara Indah Menghafal Aksara Jawa
Oga Sugianto 478

Wacana Ekologi, Isu Lingkungan, Climate Change dan Problematika Kesehatan..482

Bi'ah Progresif; Penerapan Fikih Ekologi dalam Mewujudkan Pilar Sustainable Development Goals (SDGS) Menuju Indonesia Emas
Aishhsalma, Rahmad Ikbal Devid 483

Santri dan Kapitalisme Rokok (Sebuah Catatan Kritis dari Lirboyo)
Agus Setyawan.. 496

Biografi Penulis...517

N
U
١٣٤٤
1926
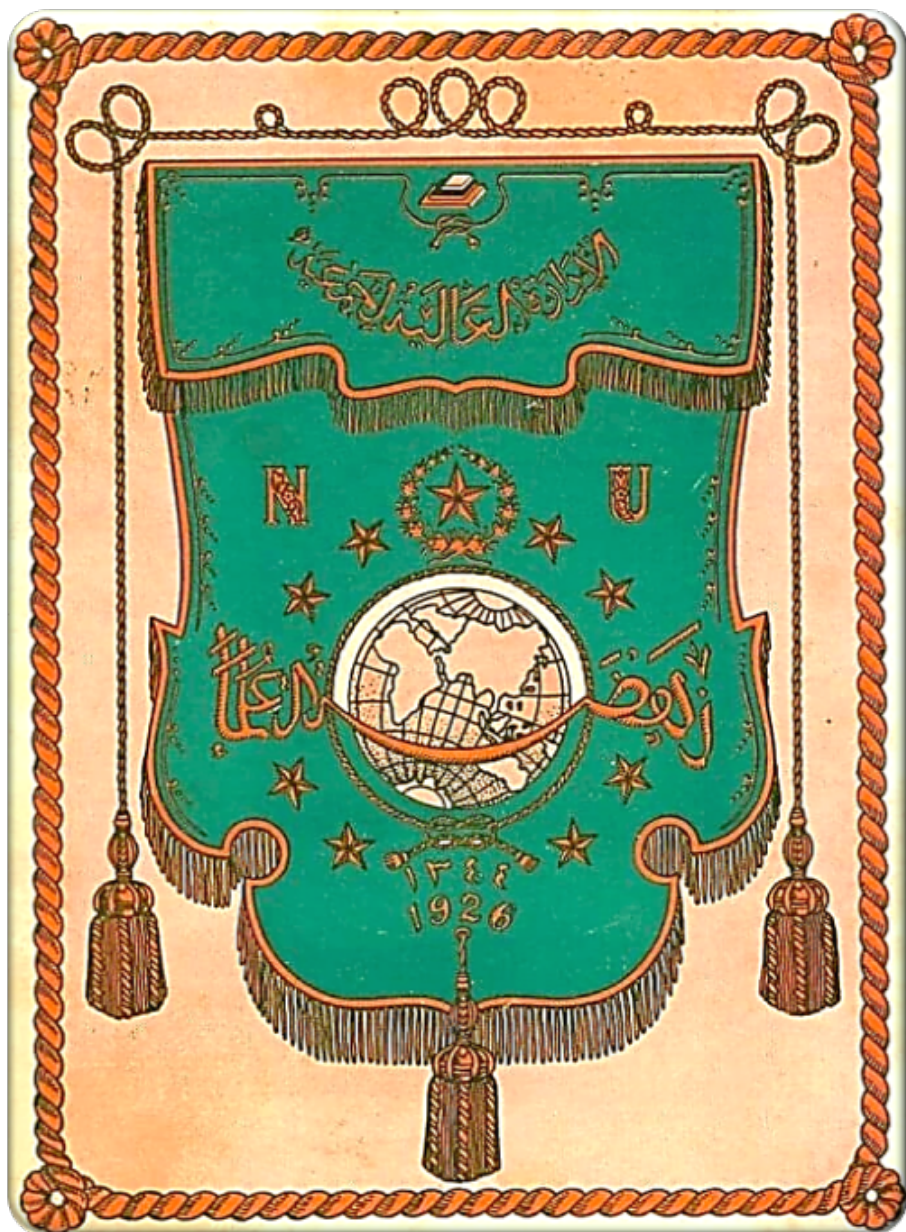
DIASPORA NAHDLIYYIN DAN GAGASAN KOSMOPOLITANISME NU

Pergerakan diaspora Nahdliyyin di berbagai belahan dunia telah memunculkan gagasan kosmopolitanisme yang memperkaya nilai-nilai NU dalam konteks global. Fenomena ini bukan hanya sekadar perpindahan fisik, melainkan juga pertukaran gagasan yang memperkuat identitas kebangsaan dan memperluas pengaruh nilai-nilai Aswaja dalam tatanan dunia secara global.

Sisi Kemanusiaan NU Dalam Merawat Jagat Dan Membangun Peradaban

Mas'ud Said

Perhelatan puncak acara peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Sidoarjo Jawa Timur disambut antusias oleh umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia dan bahkan perwakilan dunia tumplek bleg di bumi Mojopahit Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan konfirmasi kehadiran jamaah NU mulai dari rombongan Pengurus Besar, Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia, Pengurus Cabang, pengurus cabang NU internasional, sampai pengurus ranting NU. Peringatan Satu Abad NU menyedot perhatian dunia. Perhelatan ini dihadiri oleh para pimpinan badan otonom, pimpinan dan anggota lembaga NU, perwakilan dari berbagai negara, pejabat sipil, masyarakat biasa, dan jamaah pengajian, serta dilengkapi dengan seminar dan konferensi, perhelatan seni, istighotsah, majelis manaqib di kampung-kampung, dan shalawatan dengan total diperkirakan lebih dari 1 juta orang.

Salah satu perkembangan signifikan dalam sejarah NU dapat terlihat dalam formasi kepengurusan baru NU di bawah kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Achyar dan KH Yahya Cholil Staquf, yang mengajukan tema "Merawat Jagat, Membangun Peradaban" dengan maksud menguatkan khidmat Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umat di seluruh dunia. Salah satu hal yang akan diperjuangkan NU adalah pembangunan kemanusiaan (humanity), pembangunan akhlak manusia Indonesia, dan arah pembangunan sifat agama di ranah publik yang berbasis keunggulan manusia, serta falsafah membangun negara yang menonjolkan sisi kemanusiaan. Tema kemanusiaan dan memanusiakan manusia ini bukanlah hal yang baru karena para muassis NU juga menjadikan sisi kemanusiaan dalam qanun asasi berdirinya NU. Demikian pula KH Abdurrahman Wahid pada masa kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU dan para rais juga adalah pejuang kemanusiaan.

Dari latar belakang dan fakta-fakta sejarah tersebut, jelas terlihat NU sedang membangun sisi yang sangat elementer, yaitu humanitarianisme yang menjadikannya sebagai jamiyah yang sangat peduli pada sisi ini. Formasi kepengurusan PBNU pimpinan

KH Yahya Staquf mengaspirasi banyak elemen dan tokoh strategis, sekaligus memperdalam basis di kalangan pesantren tua dan pesantren modern, unsur tokoh-tokoh perempuan, tokoh pondok pesantren utama, unsur profesional, serta pemangku kewilayahan di Nusantara. Dapat dipastikan kemeriahan itu ditunjang PBNU juga dengan menjadikan pimpinan dan unsur dzurriyah pendiri NU, unsur ulama-ulama kharismatik sebagai bagian integral kepengurusan baik di jajaran Mustasyar, Syuriah, A'wan Syuriah, dan tanfidziyah, disamping unsur kader profesional yang sedikit menghilangkan sekat latar belakang politik agar mereka saling mengontrol satu sama lainnya.

Susunan pengurus dan program-program utama NU untuk memperjuangkan sebagai khairu ummah dimaksudkan sebagai bagian dari kehendak untuk merajut kembali rumah besar NU yang lebih luas sekaligus memperdalam pondasi pengembangan umat dan perluasan kader yang lebih heterogen, disesuaikan dengan tantangan ke depan yang lebih kompleks, lebih mondial, dunia tanpa batas, borderless, yang menjadi pilar Indonesia yang adil, dunia yang toleran, dan berkepribadian menuju bangsa yang sejahtera. NU harus melihat tantangan dan berkontribusi menyambut aspirasi umat ke depan, dimana dunia yang lebih membutuhkan kehadiran perjuangan untuk membangun dan mengembangkan Islam yang ramah, membangun persatuan umat, kesejahteraan, dan siap menjadi rahmat bagi penduduk dunia melalui internalisasi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang baik akhlaknya dan berwibawa dalam kehidupan nyata.

Nahdlatul Ulama tampak ingin menghidupkan kembali ruh perjuangannya. Salah satu tantangan NU memasuki usianya ke-100 tahun di abad kedua ialah pengkaderan dan proliferasi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah pada aras yang lebih luas di dunia internasional dan menjadikan kemanusiaan sebagai basis tatanan dunia baru. Nahdlatul Ulama sadar bahwa pada tataran pelaksanaan Aswaja An Nahdliyah dalam masyarakat mondial, tidak hanya dikuatkan dengan berbagai cara dan bentuk ritual keagamaan atau majelis-majelis kultural yang selama ini terpupuk baik dalam masyarakat NU, namun harus dihidupkan dalam tatanan dunia, dimana sikap tasammuh, nilai tawazzun, sikap tawassuth, toleran yang berkeadilan, sebagai bagian hidup, - the way of life - keagamaan dan kemasyarakatan dunia.

NU dan Sisi Dakwah dan Sistem Kemasyarakatan Multikultural

Multikulturalisme disimpulkan oleh ahli ahli tafsir dan hadist sebagai bagian dari pelaksanaan keimanan dan ke-Islaman. Agama Islam adalah agama keselamatan dan kemanusiaan, ajarannya sangat erat hubungannya dengan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah paham yang menganggap bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, perbedaan adalah God made, ciptaan Tuhan, sunnatullah, bukan kehendak manusia apalagi pemerintah atau pimpinan agama tertentu. Multikulturalisme memberi ruang bagi perbedaan untuk eksis dan mendapat space di ruang publik dan hak yang sama untuk menjadi diri mereka sendiri di satu pihak dan kehendak untuk saling menghormati.

Multikulturalisme adalah rumah untuk mengikis perbedaan menjadi kesatuan yang utuh sebagai manusia. Multikulturalisme menjadi mainstream sebagian besar penganut agama terutama Agama Islam dan dilaksanakan oleh bangsa bangsa modern. Multikulturalisme diakui oleh agama-agama besar dunia dan kultur di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Indonesia dengan berbagai etnik di satu pihak dan Islam sebagai agama yang damai menyatukan antar ummat sangat membutuhkan nilai multikulturalisme ini. Berbeda dengan negara lain semisal China dan Arab Saudi, prinsip dasar yang dianut dan ditetapkan di Indonesia ialah keharusan untuk saling menghormati, saling menghargai dan saling memberi jaminan agar umat yang lain bisa dengan tenang dan hidup berdampingan rukun dan damai sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Bahkan Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu laboratorium di dunia untuk masalah mengukuhkan persatuan melalui jiwa multikulturalisme.

Multikulturalisme adalah paham yang mengedepankan kebersamaan, saling menghormati perbedaan, memberi peluang hidupnya sebuah situasi ke-bhinnekaan baik dari segi asal muasal, etnik, religi maupun sosial budaya. Multikulturalisme mengedepankan pemahaman bahwa secara alamiah Tuhan menciptakan manusia bersuku suku dan memberikan penghormatan satu dengan lainnya. Seorang ahli bernama D. Ivision menjelaskan bahwa multikulturalisme ialah sebuah keadaan yang merujuk pada (1). negara atau masyarakat atau dunia dimana tinggal disana beberapa suku dan kebudayaan yang berbeda yang dipandang

relevan secara politik. (2) program atau kebijakan yang mendukung pada keadaan yang menjadikan masyarakat majemuk bisa hidup berdampingan yang aman secara politik. (D. Ivison, in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001).

Selanjutnya dikatakan bahwa multikulturalisme membutuhkan jaminan atas hak hak individual dan jaminan atas hak hak masyarakat yang hal tersebut melekat pada nilai kebudayaan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Negara multikultural ialah negara dimana semua unsur kebudayaan mendapat pengakuan, memperoleh perlindungan dan dijamin hak haknya secara merata dan tidak memberi previledge kepada kelompok terbesar yang dominan dalam masyarakat tersebut. Dari beberapa perspektif NU adalah organisasi keagamaan yang mendorong multikulturalisme itu.

Masalahnya ialah kadang indoktrinasi agama dalam tataran publik dibarengi dengan persaingan dan menegasikan kelompok beragama lainnya. Lebih masalah lagi bagi negara bila 'pemimpin agama' menyarankan bentrok fisik -dalam kondisi yang lain damai-sebagai bagian dari bentuk perjuangan agama, sebagai jihad?. Di Indonesia, masih ada kelompok yang meyakini bahwa agama yang dianut harus merupakan agama yang paling unggul. Bahwa Perbedaan itu tak bisa menyurutkan dakwah dan terpisahnya keyakinan agama dengan kewajiban negara atau sistem sosial yang disepakati bersama. Sebagai organisasi keagamaan dunia yang terus tumbuh berkembang, NU terus menguatkan sistem pengkaderan dan optimalisasi kader atau keluarga besar NU. PBNU juga memiliki tantangan untuk membangun sistem transformasi digital dakwah yang lebih profesional. Transformasi digital dan penguasaan information technology juga mendesak dalam sistem administrasi organisasi, sistem kepemimpinan dan sistem komunikasi dan sistem dakwah.

NU Menyonsong Tata Dunia baru Yang Manguatkan Humanitarianisme

NU kali ini memasuki era baru memperkuat TV online, digital newsletter, NU Online, networking, dan sistem informasi melalui saluran-saluran media sosial yang lebih solid dan berkelanjutan. Apabila kita lihat positioning NU dalam konten dakwah dan pemberitaan, kelihatan sekali bahwa NU sedang membangun dirinya dan Indonesia serta tatanan dunia baru yang berciri pengembangan

kemanusiaan. Hal besar yang menjadi fokus khidmat NU adalah penguatan puluhan lembaga pendidikan pesantren di desa-desa, di kota-kota, dan di pedalaman. Pengembangan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan Perguruan Tinggi NU akan menjadi fokus khidmat lima tahun ke depan, disamping sistem pengkaderan formal dan optimalisasi kader profesional, serta menyapa mereka yang ada di berbagai jenjang pimpinan eksekutif di Istana Negara, di berbagai jabatan di lembaga legislatif, di berbagai kementerian, dan berbagai provinsi serta lembaga-lembaga negara maupun kader yang tersebar di berbagai partai politik.

Tentu NU akan terus mendorong mereka untuk terus bergerak namun dalam tataran manhaj jamiyah yang benar, dimana NU merupakan jam'iyah yang menaungi kader-kader dan lembaga yang berafiliasi NU, dan bukan kecenderungan sebaliknya. Dapat dipastikan bahwa NU akan menghadapi tantangan efisiensi kepemimpinan formal berjenjang mulai dari Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting, Pengurus Wakil Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang Istimewa di luar negeri, maupun penguatan Badan Otonom NU, Lembaga dan Lembaga khusus NU, serta mengembangkan pengkaderan lebih sistematis. NU telah mengubah dan mengembangkan pelatihan secara lebih masif dan sistematis, baik secara struktural, pengkaderan keulamaan, model pengkaderan penggerak organisasi, kader fungsional, dan kaderisasi formal nasional berjenjang bersertifikat, yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan strategis yang disengaja dan didesain secara sistematis untuk melahirkan generasi pengganti yang handal dan berkarakter.

Generasi yang handal dalam hal ini ialah pimpinan yang memiliki perilaku khas NU, memiliki pengetahuan (knowledge) ke-NU-an yang mendalam, memiliki track record positif dalam pengalaman (experiences), dan kepribadian yang utuh dengan kemampuan membaca lingkungan strategisnya. Pengkaderan dalam tataran ini hanya bisa dilakukan dengan mutu yang berkualitas dan berkelanjutan. NU bagaikan menemukan momentum dan menapaki babak baru dalam pembangunan pengembangan dunia pendidikan pesantren dan kampus-kampus unggul yang handal yang berkualitas nasional. Berbagai perkembangan dan inovasi dilakukan baik secara akademik maupun non-akademik, menguatkan akreditasi dan keluaran yang lebih bermutu sebagai pengejawantahan dan cita-cita

tasywirul afkar. Dalam rangka meningkatkan kelembagaan kualitas perguruan tinggi, NU membentuk LPTNU, Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disamping Lembaga Pendidikan Maarif yang lebih dulu ada menaungi lembaga pendidikan dasar dan menengah.

Baik LP Maarif dan LPTNU membangun dan mengembangkan diri untuk bisa bersaing secara obyektif dengan kolega-koleganya, yaitu sekolah negeri dan universitas negeri dan swasta yang sudah ada. Muslimat NU yang berjumlah 31 juta orang sekarang menjadi salah satu motor bagi penyemaian kader pada lembaga pendidikan TK, SD, Ibtidaiyah dan sederajat, SMP, SMA sederajat serta poliklinik, layanan kesehatan, dan jamiyah-jamiyah pengajian di seluruh kampung dan desa-desa. NU sedang menyemai ilmuwan dan profesional, pengabdi ummat yang lebih berkualitas. Kampus-kampus PTNU sedang membangun infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan secara lebih memadai dan meningkatkan akreditasi nasional dan internasional. Beberapa diantaranya merupakan basis Ahlusunnah Wal Jamaah dalam dunia modern yang mengutamakan sisi kurikulum multikulturalisme dan kemanusiaan.

NU telah lama memiliki jaringan internasional dan networking yang kuat, insya Allah menemukan momentum untuk mengerahkan seluruh beserta kualitas keulamaannya serta pengalamannya yang prima untuk membangun NU yang lebih manfaat bagi umat dan membangun sisi kemanusiaannya. Secara spiritual dengan kuatnya NU Indonesia dan Islam yang ramah di rumah dunia yang mondial yang damai akan tumbuh subur untuk kemaslahatan umat dan dunia. Insya Allah.

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama (NU) memasuki abad kedua dengan semangat baru untuk merawat jagat dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan multikulturalisme. Dengan tema "Merawat Jagat, Membangun Peradaban," NU berkomitmen memperkuat peran keagamaan dan sosialnya melalui pengembangan sistem kepemimpinan, pendidikan, dan dakwah yang lebih profesional serta digital. NU juga berupaya memperkokoh posisi sebagai jamiyah yang peduli pada kemanusiaan dan keadilan, baik di ranah nasional maupun internasional. Melalui optimalisasi pengkaderan, pendidikan pesantren, dan lembaga pendidikan tinggi, NU terus berinovasi untuk menghadapi tantangan global. Dengan

mengedepankan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang ramah, NU siap menjadi inspirasi bagi dunia dalam membangun masyarakat yang toleran, adil, dan sejahtera.

Dampak Diplomasi Kultural Nahdlatul Ulama Terhadap Hubungan Internasional Prespektif Global

Adi Ari Hamzah

Diplomasi kultural telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam memperkuat hubungan antarbangsa, terutama dalam konteks globalisasi. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memainkan peran signifikan dalam diplomasi kultural melalui penyebaran nilai-nilai moderasi, toleransi, dan perdamaian. Peran NU dalam diplomasi ini tidak hanya terbatas pada hubungan antarumat Islam, tetapi juga merambah ke ranah global, menciptakan dialog antarperadaban dan memperkuat kerjasama internasional. Artikel ini akan menganalisis bagaimana diplomasi kultural yang dijalankan oleh NU berdampak terhadap hubungan internasional, khususnya dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia serta mendukung stabilitas dan harmoni global melalui pendekatan nilai-nilai keislaman yang inklusif dan humanis.

Pendekatan Historis

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy’ari bersama para ulama dan santri yang berasal dari pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Penamaan “Nahdlatul Ulama” sendiri berarti “Kebangkitan Ulama”, yang mencerminkan tujuan utama organisasi ini untuk membangkitkan peran ulama dalam masyarakat Islam dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia.[1]

1) **Konteks Kolonial:** Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Dalam konteks ini, NU lahir sebagai reaksi terhadap penindasan kolonial dan sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam. NU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai pergerakan sosial yang berupaya memperjuangkan hak-hak umat Islam dalam

1 Hasyim Asy'ari, "Kitab Kuning dan Perjuangan Nahdlatul Ulama," Pustaka Al-Kautsar, 2011.

berbagai aspek kehidupan.

2) **Pesantren dan Tradisi:** NU lahir dari lingkungan pesantren yang mengajarkan ajaran Islam tradisional. Pesantren-pesantren ini memainkan peran sentral dalam pendidikan agama dan sosial, serta dalam pembentukan identitas Islam lokal di Indonesia. NU mempertahankan dan melestarikan tradisi Islam Sunni yang diambil dari ajaran mazhab Syafi'i dan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), yang merupakan mayoritas di Indonesia.
3) **Perkembangan Politik:** NU juga aktif dalam politik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, NU terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. NU menjadi salah satu kekuatan utama dalam pembentukan negara dan pengembangan sistem pemerintahan, serta berperan dalam pemilihan presiden dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945.[2]

Pendekatan Filosofis

1) **Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja):** Filosofi NU berakar pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, yang merupakan paham utama dalam Islam Sunni. Ajaran ini menekankan pada pemahaman dan pengamalan agama yang moderat, berorientasi pada konsensus dan tradisi ulama. Filosofi ini mengedepankan sikap toleransi, akhlak yang baik, dan menjaga harmoni sosial.
2) **Tradisi dan Modernitas:** NU berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara tradisi Islam dan modernitas. Meskipun NU mempertahankan tradisi pesantren dan metode pembelajaran klasik, organisasi ini juga beradaptasi dengan perubahan zaman dan berusaha menjawab tantangan modern dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk keterlibatan dalam berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi.
3) **Sosial dan Pendidikan:** Filosofi NU juga mencakup komitmen terhadap pengembangan sosial dan pendidikan. NU memiliki jaringan pesantren dan lembaga pendidikan yang luas, dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

2 M. Quraish Shihab, "Menjaga Tradisi dan Modernitas," Lembaga Pengkajian Al-Qur'an, 2020.

memperjuangkan hak-hak sosial dan pendidikan umat Islam.

4) **Kesetaraan dan Toleransi:** NU mengajarkan pentingnya kesetaraan dan toleransi antarumat beragama dan dalam masyarakat. Filosofi ini mendorong anggotanya untuk terlibat dalam dialog dan kerjasama lintas agama dan budaya, serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harmonis.[3]

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pandangan yang cukup luas mengenai isu kemanusiaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah pandangan umum NU mengenai isu kemanusiaan.

Pandangan NU tentang Isu Kemanusiaan

Keadilan Sosial dan Ekonomi NU menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi sebagai bagian dari ajaran Islam. NU mendorong pemerataan ekonomi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang kurang beruntung. Di tingkat nasional, NU seringkali terlibat dalam berbagai program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan kurang beruntung.[4]

1. Pendidikan dan Kesehatan Pendidikan dan kesehatan merupakan dua aspek penting dalam pandangan NU tentang kemanusiaan. NU mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan kesehatan untuk menyediakan akses yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.[5]
2. Kebhinnekaan dan Toleransi NU sangat menghargai kebhinnekaan dan toleransi. NU menganjurkan sikap saling menghormati antarumat beragama dan antar kelompok sosial. Ini termasuk mendukung pluralisme dan mengedepankan dialog antaragama sebagai cara untuk mencapai kedamaian dan harmoni sosial.[6]
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia NU mendukung perlindungan hak asasi manusia dan seringkali terlibat dalam kampanye melawan pelanggaran hak asasi manusia. NU juga mendukung

---

3 A. Hasymi, "*Sejarah dan Perkembangan Nahdlatul Ulama,*" Jurnal Sejarah Islam, vol. 5, no. 2, 2018.

4 Nahdlatul Ulama, *"Teks Resmi: Ijtima' Ulama NU"*, 2019.

5 Nahdlatul Ulama, *"Pendidikan dan Kesehatan dalam Perspektif NU"*, 2021.

6 Wahid, Abdurrahman, *"Islam dan Pluralisme: Studi Kasus NU"*, 2020.

penyelesaian damai dalam konflik dan krisis yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia.[7]

4. Isu Internasional Di tingkat internasional, NU berkomitmen untuk mendukung perdamaian dunia dan penyelesaian konflik internasional dengan pendekatan dialog dan diplomasi. NU juga aktif dalam forum-forum internasional untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan kerjasama antarbangsa.[8]

Peran intelektual dan sarjana Nahdlatul Ulama (NU)

Mengartikulasikan visi kemanusiaan sangat signifikan dalam konteks pemikiran dan gerakan sosial di Indonesia. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki sejarah panjang dalam menyumbangkan pemikiran yang memadukan ajaran Islam dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Sarjana dan intelektual NU memainkan peran kunci dalam menyusun dan menyebarluaskan visi kemanusiaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.

1) Pengembangan Pemikiran Islam yang Inklusif: Intelectual dan sarjana NU telah berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran Islam yang inklusif dan moderat, yang menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Mereka sering mengkaji ajaran Islam dalam konteks perkembangan zaman dan tantangan sosial kontemporer. Misalnya, dalam menghadapi isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan konflik, mereka menawarkan solusi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam tetapi juga relevan dengan realitas sosial.[9]
2) Keterlibatan dalam Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: Sarjana NU sering terlibat dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan bentuk konkret dari visi kemanusiaan mereka. Melalui lembaga pendidikan NU, seperti pesantren, universitas, dan sekolah-sekolah, mereka berusaha untuk menyediakan pendidikan yang tidak hanya

---

7 Nahdlatul Ulama, *"Kebijakan NU dalam Hak Asasi Manusia"*, 2022.

8 Abdullah, Taufiq, *"NU dalam Diplomasi Internasional: Membangun Jembatan Kemanusiaan"*, 2023.

9 Pustaka NU dan Pemikiran Islam Inklusif: A. Shihab, *Islam dan Humanisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

berkualitas tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka mengajarkan pentingnya etika, toleransi, dan tanggung jawab sosial kepada generasi muda.[10]

3) Penelitian dan Publikasi: Penelitian dan publikasi oleh sarjana NU juga berperan dalam mengartikulasikan visi kemanusiaan. Mereka menerbitkan buku, artikel, dan jurnal yang membahas berbagai aspek kehidupan sosial dan politik dari perspektif Islam yang berorientasi pada kemanusiaan. Publikasi ini membantu dalam menyebarluaskan ide-ide yang mendukung harmoni sosial dan perbaikan sosial.[11]
4) Dialog Antaragama dan Multikulturalisme: Sarjana NU juga aktif dalam dialog antaragama dan upaya mempromosikan multikulturalisme di Indonesia. Mereka memahami pentingnya keragaman budaya dan agama dalam konteks sosial Indonesia yang majemuk. Melalui forum-forum dialog dan kolaborasi dengan kelompok agama dan etnis lain, mereka berusaha untuk mengatasi potensi konflik dan mempromosikan kedamaian serta saling pengertian.[12]
5) Penyusunan Kebijakan Sosial: Beberapa sarjana NU terlibat dalam penyusunan kebijakan sosial dan publik. Mereka memberikan kontribusi pemikiran dalam perumusan kebijakan yang memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Dengan latar belakang akademis dan pengalaman sosial mereka, mereka membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya efektif tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.[13]

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam pengembangan dan implementasi konsep kemanusiaan universal. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana NU mengembangkan konsep kemanusiaan universal dan peran sarjana NU dalam hal ini:

---

10 Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: M. Hasyim, *Pendidikan NU: Kontribusi dalam Pembentukan Karakter*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Pendidikan Islam, 2020.

11 Penelitian dan Publikasi: S. Alamsyah, *Intelectual Muslim dan Visi Kemanusiaan*, Bandung: Penerbit Mizan, 2018.

12 Dialog Antaragama dan Multikulturalisme: I. Nugroho, *Dialog Antaragama dalam Perspektif NU*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2022.

13 Penyusunan Kebijakan Sosial: B. Rachmat, *Kebijakan Sosial dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Pustaka Cendekia, 2017.

Konstruksi Pengembangan Konsep Kemanusiaan Universal oleh NU

1. **Pemahaman Islam yang Moderat**: NU mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif. Konsep kemanusiaan universal dalam pandangan NU berakar dari ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. NU berusaha untuk menyebarkan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang mempromosikan perdamaian dan toleransi.
2. **Pendidikan dan Dakwah**: Melalui lembaga pendidikan dan dakwahnya, NU mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama, dan toleransi antarumat beragama. Pendidikan di pesantren-pesantren NU sering kali mencakup materi tentang pentingnya mengembangkan sikap humanis dan menghargai hak asasi manusia.
3. **Gerakan Sosial dan Kemanusiaan**: NU aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk bantuan bencana, program kesehatan, dan pendidikan. Ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip kemanusiaan universal yang mengutamakan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. **Dialog Antaragama**: NU terlibat dalam dialog antaragama untuk mempromosikan saling pengertian dan toleransi. Konsep kemanusiaan universal di sini terlihat dari upaya NU untuk menciptakan harmoni antar umat beragama dan meminimalkan konflik.

Dampak Diplomasi Kultural Nahdlatul Ulama Terhadap Hubungan Internasional Prespektif Global

Globalisasi dan modernitas memiliki dampak signifikan terhadap visi kemanusiaan Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal dengan pendekatan moderat dan inklusif terhadap berbagai isu sosial. Pengaruh ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, termasuk pemikiran tentang pluralisme, hak asasi manusia, dan bagaimana NU merespons tantangan global dan perubahan zaman.

Pengaruh Globalisasi dan Modernitas pada Visi Kemanusiaan NU

1) **Pluralisme dan Toleransi**: Globalisasi telah memfasilitasi kontak antara berbagai budaya dan agama, yang memperluas cakrawala pemikiran masyarakat global. Bagi NU, ini memperkuat komitmen mereka terhadap pluralisme, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam ala NU. Globalisasi mengarah pada peningkatan interaksi lintas budaya dan agama, yang mendorong NU untuk mempertegas dan mengembangkan visi pluralisme mereka, baik dalam teori maupun praktik.[14]
2) **Hak Asasi Manusia**: Modernitas membawa fokus yang lebih besar pada hak asasi manusia, termasuk hak-hak individu yang sebelumnya mungkin kurang diperhatikan. Dalam konteks NU, ini berarti adanya penekanan yang lebih besar pada perlindungan hak-hak individu dan kelompok, serta penerimaan terhadap konsep hak asasi manusia sebagai bagian dari ajaran Islam yang relevan dengan kondisi kontemporer.[15]
3) **Modernisasi Sosial dan Ekonomi**: Proses modernisasi membawa perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi struktur masyarakat tradisional. NU, yang awalnya berakar pada tradisi Islam Jawa, perlu menyesuaikan pendekatannya untuk menangani isu-isu modern seperti pendidikan, teknologi, dan pembangunan ekonomi. Ini juga mencerminkan bagaimana NU mengadaptasi ajaran mereka untuk tetap relevan dalam konteks masyarakat yang semakin modern dan terhubung.[16]

Tinjauan terhadap Karya-karya Sarjana NU tentang Pluralisme dan Hak Asasi Manusia

Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Sebagai salah satu pemikir utama NU, Gus Dur memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran tentang pluralisme dan hak asasi manusia. Dalam banyak karya dan pernyataannya, Gus Dur menekankan pentingnya toleransi

---

14 **Gus Dur dan Pluralisme**: Abdurrahman Wahid, "Islam, Pluralisme, dan Hak Asasi Manusia," dalam *Pluralisme dan Demokrasi: Pemikiran Gus Dur*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 42-60.

15 **Hak Asasi Manusia dalam Islam**: Abdurrahman Wahid, *Membumikan Islam: Kumpulan Pikiran dan Gagasan*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 123-145.

16 **Pengaruh Globalisasi pada NU:** Nurcholish Madjid, "Islam dan Pluralisme: Menjawab Tantangan Globalisasi," dalam *Islam dan Modernitas*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 89-102.

dan inklusivitas sebagai bagian dari ajaran Islam yang sejati.

1. **Pluralisme**: Gus Dur berargumen bahwa Islam secara mendasar mendukung pluralisme dan toleransi terhadap perbedaan. Ia berpendapat bahwa keberagaman adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus diterima dan dihargai. Pandangannya tentang pluralisme didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pada persaudaraan umat manusia dan perlunya saling menghormati antara berbagai kelompok etnis dan agama.
2. **Hak Asasi Manusia**: Gus Dur juga dikenal karena pandangannya yang progresif tentang hak asasi manusia. Ia percaya bahwa hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Gus Dur, hak asasi manusia tidak bertentangan dengan ajaran Islam melainkan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam agama Islam.

Dengan demikian, NU, melalui pemikiran tokoh-tokohnya seperti Gus Dur, menunjukkan respons yang adaptif terhadap globalisasi dan modernitas, berusaha menjaga prinsip-prinsip dasar Islam sambil mengakomodasi perubahan dan tantangan zaman.

Untuk memperkuat peran sarjana Nahdlatul Ulama (NU) dalam isu-isu kemanusiaan baik di tingkat lokal maupun global, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. **Pendidikan dan Pelatihan Khusus**: Sarjana NU perlu diberikan pendidikan dan pelatihan khusus yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan pengentasan kemiskinan. Program-program ini dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi NU atau bekerja sama dengan lembaga internasional.[17]
2. **Kolaborasi dengan Organisasi Internasional**: Memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB, Amnesty International, dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya untuk terlibat dalam proyek-proyek kemanusiaan. Sarjana NU bisa berperan sebagai jembatan antara organisasi internasional dan komunitas lokal.[18]

---

17 *World Bank. (2021). "Building Human Capital through Education and Training Programs." Retrieved from* World Bank.

18 *United Nations. (2022). "International Cooperation for Humanitarian Assistance." Retrieved from* UN.

3. **Advokasi dan Penyuluhan**: Sarjana NU harus aktif dalam advokasi dan penyuluhan mengenai isu-isu kemanusiaan di tingkat lokal. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, workshop, dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya isu-isu tersebut.[19]
4. **Peningkatan Penelitian dan Publikasi**: Mendorong sarjana NU untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan dan mempublikasikan temuan mereka dalam jurnal internasional dan media massa. Ini akan membantu menyebarkan informasi dan mempengaruhi kebijakan global.[20]
5. **Pengembangan Jaringan dan Kemitraan**: Sarjana NU perlu membangun jaringan dengan akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan di seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait isu-isu kemanusiaan. Jaringan ini bisa membantu dalam memperluas dampak kerja mereka.[21]
6. **Inisiatif Lokal dengan Perspektif Global**: Mendorong sarjana NU untuk melaksanakan inisiatif lokal dengan perspektif global, seperti program-program berbasis komunitas yang juga mempertimbangkan dampak dan konteks global. Ini akan memastikan bahwa solusi yang diusulkan relevan secara lokal dan efektif secara global.[22]
7. **Penggunaan Media Sosial dan Digital**: Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarluaskan pesan-pesan kemanusiaan, mobilisasi dukungan, dan mempengaruhi opini publik. Sarjana NU dapat memanfaatkan platform ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas.[23]
8. **Keterlibatan dalam Kebijakan Publik**: Mendorong sarjana NU untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang berhubungan dengan isu-isu kemanusiaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini termasuk memberikan

---

19 *UNHCR. (2023). "Advocacy and Awareness-Raising for Refugee Rights." Retrieved from UNHCR.*

20 *Global Journal of Human Rights. (2023). "Research on Human Rights Issues." Retrieved from* GJHR.

21 *Network of Human Rights Experts. (2024). "Building Networks for Effective Human Rights Advocacy." Retrieved from* NHRE.

22 *International Development Research Centre. (2022). "Local Solutions with Global Impact." Retrieved from IDRC.*

23 *Pew Research Center. (2023). "The Role of Social Media in Human Rights Advocacy." Retrieved from Pew Research.*

masukan dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.[24]

Dengan langkah-langkah ini, sarjana NU dapat berperan lebih aktif dan efektif dalam menghadapi tantangan kemanusiaan di berbagai level.

---

24 *Footnote: Policy Research Institute. (2024). "Engaging Academics in Public Policy Development." Retrieved from* PRI

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufiq, *"NU dalam Diplomasi Internasional: Membangun Jembatan Kemanusiaan"*, 2023.

A. Hasymi, "*Sejarah dan Perkembangan Nahdlatul Ulama,*" Jurnal Sejarah Islam, vol. 5, no. 2, 2018.

Dialog Antaragama dan Multikulturalisme: I. Nugroho, *Dialog Antaragama dalam Perspektif NU*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2022.

Footnote: Policy Research Institute "Engaging Academics in Public Policy Development." Retrieved from PRI2024

Gus Dur dan Pluralisme: Abdurrahman Wahid, "Islam, Pluralisme, dan Hak Asasi Manusia," dalam *Pluralisme dan Demokrasi: Pemikiran Gus Dur*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 42-60.

Hasyim Asy'ari, "Kitab Kuning dan Perjuangan Nahdlatul Ulama," Pustaka Al-Kautsar, 2011.

M. Quraish Shihab, "Menjaga Tradisi dan Modernitas," Lembaga Pengkajian Al-Qur'an, 2020.

Hak Asasi Manusia dalam Islam: Abdurrahman Wahid, *Membumikan Islam: Kumpulan Pikiran dan Gagasan*, Jakarta: Gramedia, 2005

Nahdlatul Ulama, *"Teks Resmi: Ijtima' Ulama NU"*, 2019.

Nahdlatul Ulama, *"Pendidikan dan Kesehatan dalam Perspektif NU"*, 2021.

Wahid, Abdurrahman, *"Islam dan Pluralisme: Studi Kasus NU"*, 2020.

Nahdlatul Ulama, *"Kebijakan NU dalam Hak Asasi Manusia"*, 2022.

Pustaka NU dan Pemikiran Islam Inklusif: A. Shihab, *Islam dan Humanisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: M. Hasyim, *Pendidikan NU: Kontribusi dalam Pembentukan Karakter*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Pendidikan Islam, 2020.

Penelitian dan Publikasi: S. Alamsyah, *Intelectual Muslim dan Visi Kemanusiaan*, Bandung: Penerbit Mizan, 2018.

Penyusunan Kebijakan Sosial: B. Rachmat, *Kebijakan Sosial dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Pustaka Cendekia, 2017.

Pengaruh Globalisasi pada NU: Nurcholish Madjid, "Islam dan Pluralisme: Menjawab Tantangan Globalisasi," dalam *Islam dan Modernitas*, Jakarta: LP3ES, 2007

World Bank. "Building Human Capital through Education and Training Programs." Retrieved from World Bank. *2021*

United Nations. "International Cooperation for Humanitarian Assistance." Retrieved from UN. *2022*

UNHCR."Advocacy and Awareness-Raising for Refugee Rights." Retrieved from UNHCR2023

Global Journal of Human Rights "Research on Human Rights Issues." Retrieved from GJHR.*2023*

Network of Human Rights Experts."Building Networks for Effective Human Rights Advocacy." Retrieved from NHRE.2024

International Development Research Centre. "Local Solutions with Global Impact." Retrieved from IDRC.2022

Pew Research Center."The Role of Social Media in Human Rights Advocacy." Retrieved from Pew Research.2023

Refleksi Dakwah dan Silsilah Nasab Kiai Kharismatik Wilayah Tapalkuda

Farhan

Belum banyak masyarakat nahdliyyin yang menelusuri dakwah para santri KH. Kholil Bangkalan Almaduri yang menjadi pendakwah di daerah-daerah, seperti wilayah tapalkuda. Apalagi mau melacak silsilah keilmuan dan silsilah nasab dari para santri generasi awal sebelum terbentuknya NU tahun 1926. Hal ini wajar, dikarenakan pada masa-masa itu, penjajahan Belanda pasca perang Jawa (1825-1830) telah menyisakan kenangan yang tidak mudah dilupakan bagi masyarakat santri yang tersebar di wilayah Jawa dan Nusantara pada umumnya.

Salah satu santri yang melegenda di Probolinggo adalah KH. Hasan Sepuh Genggong, yang lahir 1840 dan wafat tahun 1955 (usia 115). Sebelum belajar di Makkah, kedua orangtuanya adalah guru pertamanya, kemudian belajar di pesantren pohjentrek, Pasuruan yang diasuh oleh Kiai Muhammad Tamim. Selama di tanah suci, guru-gurunya sebagian berasal dari Indonesia; Syeikh Nawawi Al-Bantani (1851-1900), Kiai Marzuki dan Kiai Mukri. (Ali, 2015).

Abdurrahman dalam karyanya berjudul "*Reproducing Charisma: A Study of Religious Pilgrimage to Hasan Genggongs Cemetery in Pajarakan Probolinggo*" menyebutkan bahwa: Sepulang dari Mekkah, Hasan Genggong menjadi menantu Kiai Zainal Abidin Al-Maghrobi (perintis pesantren Genggong). Kiai Hasan menikah dengan Nyai Ruwaidah, dan mulai saat itu juga aktif membantu mengajar para santri. Setelah Kiai Zainal Abidin meninggal dunia tahun 1890, Kiai Hasan menggantikan kedudukannya sebagai pimpinan pesantren. Selain itu, beliau juga aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Banyak cerita mistis yang menggambarkan keunggulannya dalam pertarungan menentang kolonialisme.

Lebih dari 60 tahun kepemimpinannya di Pesanten Zainul Hasan Genggong, banyak kiai terkemuka lahir di bawah bimbingannya. Mereka adalah KH. As'ad Syamsul Arifin di pesantren Seletreng, Situbondo, KH. Hasan Abdul Wafi di pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, KH. Husnan di Bondowoso, KH. Ali Wafa di Pesantren

Karang Asem, Malang, KH. Baihaqi Ilyas di pesantren Hasaniyah, Jember, KH. Ali Alatas di Malaysia, dan KH. Mujib Marhum di Singapura. (Abdurrahman, 2017). Dikisahkan bahwa KH. Hasan Sepuh wafat dalam usia 100 tahun lebih. Beliau adalah ketua PCNU pertama di Probolinggo sejak tahun 1930 hingga 1955. (Fauzi, 2020).

Jaringan Ulama (Kyai) Nusantara sejatinya sudah terjalin cukup kuat sejak masa Walisongo, mereka menyebarkan Islam secara merata dari Banten Jawa Barat sampai Banyuwangi Jawa Timur. Agus Sunyoto menyebutkan bahwa para walisongo tersebut menjadikan media pernikahan sebagai penguat tersebarnya Islam di Jawa, selain faktor pendukung yang lain. Sunan Ampel merupakan guru sekaligus mertua Sunan Giri, demikian halnya sunan gunung djati merupakan mertua dari sunan Drajat putra sunan Ampel. Jalinan pernikahan tersebut lambat laun menguatkan jaringan pendakwah di wilayah Jawa, melalui kehadiran pesantren-pesantren sebagai warisan utama walisongo (Sunyoto, 2016). Sebagian besar penerus walisongo sampai generasi sekarang menjadi penerus dakwah di wilayah jawa dan nusantara.

KH. Hasan Sepuh Genggong merupakan salah satu diantara keturunan Sunan Giri yang ada di Probolinggo, demikian halnya KH As'ad Syamsul Arifin Situbondo merupakan salah satu keturunan cucu Sunan Kudus, pangeran ketandur yang medan dakwahnya di Madura. KH. As'ad Syamsul Arifin selain berguru kepada orangtuanya juga mendapatkan bimbingan dari KH. Hasan Sepuh, walaupun pautan usia yang cukup jauh, KH. As'ad dan KH. Hasan Genggung sama-sama murid dari KH. Kholil Bangkalan. Bahkan pada tahun 1924, mendapatkan perintah langsung dari KH. Kholil menemui KH. Hasyim Asy'ari di Jombang sebanyak dua kali untuk menyampaikan tongkat dan juga tasbih sebagai simbol perkenan KH. Kholil agar KH. Hasyim mendirikan Jamiyyah Nahdlatul Ulama'. Alhasil, pada akhir Januari 1926 didirikanlah organisasi Nahdlatul Ulama. Di wilayah tapalkuda, para kyai pendiri pesantren dan pengurus NU generasi awal yang pernah berguru kepada Syaikhona Kholil, seperti: KH. Zaini Mun'im Pesantren Nurul Jadid, KH. Ahmad Shiddiq Jember dan lainnnya.

Asumsi dalam artikel ini didasarkan pada pernyataan Agus Sunyoto yang menyatakan bahwa Walisongo telah meletakkan dasar-dasar Islam ke dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak abad ke-15, hingga kemudian diwariskan secara turun temurun melalui

generasi sesudahnya hingga era kekinian (Sunyoto, 2016). Tidak mengherankan bila PBNU merupakan keturunan para walisongo dengan warisan utama pesantren-pesantren tersebar di seluruh Jawa. Di wilayah Tapalkuda, para perintis & pengasuhnya merupakan keturunan Madura yang masih memiliki ketersambungan nasab dengan walisongo, baik dari jalur ayah-ibu atau kakek-nenek- masih tersambung dengan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati dan seterusnya.

Diaspora Indonesia di Mancaranegara

Diaspora dalam pandangan Rogers Brubaker diakarkan pada kata *homeland* yang berarti tanah air (kampung halaman). Menurutnya, diaspora disini memiliki tiga elemen dasar; 1) orientation to a homeland atau orientasi pada tanah kelahiran; 2) *dispersion in space* atau penyebaran ruang; dan 3) *boundary maintenance* atau mengelola batas (Brubaker, 2005). Diaspora Indonesia di mancanegara telah terjadi sejak ratusan lalu, utamanya masa penjajahan Belanda. Misalnya, menurut Asyrifh, pada periode 1890-1939, dikirim buruh kontrak dari Indonesia ke Suriname dalam dua tahap; tahap pertama pada 21 Mei 1890 tenaga kerja dikirim menggunakan kapal SS Koningin Emma dan tahap kedua pada 18 Juni 1894 dikirim dengan kapal SS Voorwarts (Nuryananda, 2015).

Pengaruh diapora juga menyimbolkan beragam tradisi. Pada masa kolonialisme negara Inggris bahkan juga tertarik kepada barang-barang adat Jawa, seperti gamelen jawa. Sejak tahun 1816, gubernur Inggris saat itu Thomas S. Raffles setelah kembali ke Inggris membawa dua gamelan dan barang lain untuk diperkenalkan di Barat. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Inggris dengan mendatangkan Gamelan Rawatmeja. Bahkan, pemerintah negara Inggris telah memasukkan kajian Gamelan musik ke dalam kerikulum pendidikan formal mereka. Kultur dan beberapa kesenian dikembangkan di Inggris hingga saat ini, baik oleh imigran Indonesia di London maupun peranakan Indonesia di Inggris yang menikah disana (Hermiasih, 2015).

Pasca perang Jawa 1830, sebagian besar santri asal Jawa dan Sumatra berangkat ke Mancanegara untuk menimba ilmu pengetahuan agama secara lebih mendalam. Kendatipun mereka adalah santri pelajar aktif di pesantren-pesantren yang sudah ada di Jawa. Misalanya, KH. Mohammad Hasan Genggong Pajarakan

Probolinggo, Menurut Fauzi, selama masa pengembaraannya dalam menuntut ilmu di Mekkah, memiliki banyak sahabat, antara lain; Hadrotussyeikh Hasyim Asy`ari di Tebuireng, KH. Nawawi Sidogiri di Pasuruan, KH. Nahrowi di Bondowoso, KH. Abdul Aziz di Probolinggo, KH. Syamsul Arifin Sukorejo di Situbondo, KH. Sholeh Pesantren di Banyuwangi, KH. Sa'id Poncogati di Bondowoso, dan lainnya (Fauzi, 2020).

Mereka merupakan komunitas diaspora Indonesia di Makkah yang sama-sama menuntut ilmu pengetahuan secara silih berganti dengan para kerabat dan keturunannya. Demikian, yang dilakukan para pendahulu dan sesudahnya selama belajar di Mekkah. Pada Abad ketujuh belas terjalin pusat jaringan ulama Nusantara di Timur Tengah, menurut Azra dalam Nurdinah, selain ulama Al-Jawi, KH. Imam Nawawi bin Umar Banten, KH. Kholil Bangkalan, KH. Hasan Sepuh Genggong dan lainya, juga para santri-ulama dari luar jawa seperti Nur Al-Din Al-Raniri, Muhammad Yusuf Al-Maqqassari, Abd Al-Ra‟‟uf Al-Sinkili. Dalam perkembangan Islam di Nusantara kemudian, mereka sangat berpengaruh di masa kemudian baik di Jawa maupun diluar Jawa, mereka meneguhkan keselarasan antara syariat dan tasawuf, yang cenderung menghidupkan ortodoksi tradisi Sunni (Muhammad, 2012).

Diaspora Madura dalam Sejarah Sistem Kerajaan

Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, Mataram Islam terbelah menjadi dua bagian wilayah kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Satu abad sebelumnya, mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung (1613-1624) berhasil memperluas kekuasaan yang membentang dari Cirebon hingga Jawa Timur dan ke luar Jawa, seperti pulau Madura, Jambi dan Palembang di Sumatra, kota Banjar di pulau Kalimantan, dan kota Makassar (Burdah, 2017). Wilayah-wilayah taklukan Sultan Agung di Jawa Timur antara lain, Wirasaba (1615), Lasem (1616), Pasuruan (1617), Gresik (1618), Tuban (1619), Madura (1624), Surabaya (1625), Blambangan (1639). Dalam semua penaklukannya, Sultan Agung juga melakukan misi penguatan dakwah Islam.

Penaklukan Madura misalnya, Raden Praseno bangsawan Madura dijadikan sebagai tawanan perang, Praseno di bawa ke Yogyakarta kemudian dijadikan menantu oleh Sultan Agung, maka siasat tersebut berhasil menjadikan madura secara mutlak sebagai

bawahan Mataram Islam (Asep Achmad Hidayat, 2023). Selama menjadi tawanan, Raden Praseno justru diberikan bekal pengetahuan Agama Islam secara lebih mendalaam, bahkan kemudian Sultan Agung mengangkatnya menjadi raja (adipati) pada 23 Desember 1624 untuk seluruh wilayah Madura (barat) bergelar Pangeran Cakraningrat (Asep Achmad Hidayat, 2023). Raden Praseno sepanjang sejarahnya tetap setia kepada Mataram Islam hingga wafat tahun 1648, bahkan jasadnya dikebumikan di Imogiri, Yogyakarta.

Madura barat selama sekitar 3,5 abad telah memiliki 13 raja. Disebutkan oleh Hermawan dalam judul "Menelusuri Para Raja Madura dari Masa Pra-Islam Hingga Masa Kolonial";

Tabel 1: Daftar nama raja-raja Islam di wilayah Madura Barat

(Sumber: Wawan Hermawan, 2019: 239-252)

No	Nama/Gelar	Periode
1	Pangeran Pratanu / Panembahan Lemah Duwur	1531-1592
2	Raden Koro/ Pangeran Tengah	1592-1620
3	Pangeran Mas	1621-1624
4	Raden Prasena/Cakraningrat I	1624-1648
5	Raden Oendakan/ Cakraningrat II	1648-1707
6	Raden Tumenggung Surodiningrat/ Cakraningrat III	1707-1718
7	Pangeran Sidengkep/ Cakraningrat Iv	1718-1745
8	Pangeran Sidomoekti / Cakraningrat V	1745-1770
9	Raden Tumunggung Mangkoediningrat/ Cakraadiningrat VI	1770-1780
10	Soelthan Abdoe/ Soelthan Bangkalan I/ Cakraadiningrat VII	1780-1815
11	Soelthan Abdoel Kadiroen/ S.B. II	1815-1847
12	Raden Yoesoef/ Cakraadiningrat VII	1847-1862
13	Raden Isma'il / Cakraadiningrat VIII	1862-1882

Pangeran Pratanu selain dijuluki panembahan Lemah Duwur juga dijuluki pangeran Onggu'. Setelah menerima islam pada tahun 1527 diwilayah kekuasaan Demak. Raden Pratanu menikah dengan salah satu anak Joko Tingkir (Hadiwijaya) yang menjadi penguasa Pajang setelah demak runtuh. Joko Tingkir adalah murid sunan Kalijaga yang memiliki ilmu agama cukup matang dan bijaksana dalam pemerintahannya (1554-1583); selama pemerintahannya ada 7 daerah yang berada dibawah kekuasaanya; arya pangiri di Demak, panji wiryakrama di Surabaya, Raden Pratanu di Sumenep, pangeran Benawa di Blora, Arya Pamalad di Tuban, Ki Ageng Pemanahan di Mentaok, Kotagede Yogyakarta, ki Panjawi di Pati Jawa Tengah. Kepemimpin Sultan Pajang di warnai dengan kondisi masyarakat multikultur yang unik dengan tradisi keagamaannya (Riyadi, 2019).

Sementara itu, penguasa ke-4, Raden Praseno dengan istrinya adik Sultan Agung tidak memiliki keturunan. Dari istrinya yang lain bernama syarifah Ambami (Ratu Ibu) yang memiliki tiga keturunan; antara lain Raden Oendakan (Cakraningrat II). Ratu Ibu dari nasab jalur kakek-neneknya masih bersambung dengan Sunan Ampel dan sunan Giri (Sunyoto, 2016). Syarifah Ambami binti Pangeran Ronggo bin pangeran Mas Peganten bin Pangeran Waringin binti Nyai Ageng Sawo binti Sunan Giri putra Syeikh Maulana Ishaq/suami dari Dewi Sekardadu putri kerajaan Blambangan.

Diaspora Madura memang identik dengan budaya suku Madura sebagai migran. Mereka tetap mempertahankan eksistensinya di antara etnis lainnya. Mereka saling berinteraksi dengan yang lain hingga dapat memahami dan memaknai keberadaannya sebagai etnis Madura. Orang Madura biasa tinggal bersama membentuk suatu komunitas dan biasanya memiliki pekerjaan yang seragam, sehingga pilihan profesi pekerjaan komunitas Madura tidak hanya sebagai mata pencaharian, tetapi juga menjadi sebuah identitas atau simbol bagi etnis Madura (Wahyuni, 2013).

Dikisahkan bahwa pangeran Cakraningrat Sampang pernah melakukan imigrasi kepada warganya sebanyak 250.000 orang madura ke pulau Jawa bagian Timur. Tujuannya untuk penguasaan sebagian pulau Jawa bagian ujung timur tersebut. Penyebaran Madura di Tapalkuda utamanya di Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso mayarakatnya mayoritas mempergunakan bahasa Madura. Diaspora Madura di Tapalkuda (yang juga disebut wilayah pandalungan timur ini) telah mengalami penggunaan bahasa Madura

yang variatif, yang sedikit banyak mengalami perbedaan dengan bahasa asal di Pulau Madura. Sehingga, peranakan pribumi Jawa sebagian juga mempergunakan bahasa Madura, termasuk dikalangan para kyai (ulama) pondok pesantren. Menurut Hairul, Bahasa sudah tercampur-baur di masyarakat pandhalungan, kemudian terjadi hybridasi bahasa pada saat interaksi limgual masyarakat, sehingga kemudian tercipta bahasa baru yang khas pandhalungan (Hairul, 2022).

Ratusan pondok pesantren yang telah berdiri sejak masa penjajahan Belanda hingga masa kekinian tersebar merata disepanjang wilayah tapalkuda, mayoritas dari keluarga pendiri dan pengasuh pondok pesantren tersebut genaloginya bersambung dengan suku madura dan atau peranakan madura di Tapalkuda. Tapalkuda ini meliputi sebagian timur Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi.

Genealogi Nasab dan Keilmuan

Dalam catatan sejarah sebelum perang Jawa berlangsung, menurut Dartiningsih, pelan tapi pasti masyarakat Madura bermigrasi ke wilayah Tapalkuda sejak 1806. Mereka banyak menetap di desa yang jadi komunitas Madura-an; sebanyak 25 di Pasuruan, 22 desa di Puger (Jember), satu desa di Panarukan (Situbondo) dan tiga desa di Probolinggo (Dartinigsih, 2020) Umumnya, di desa yang mereka tempati umumnya adalah tempat-tempat yang kemudian hari menjadi tempat belajar santri pondok pesantren.

Sebagaimana dipahami bahwa pesantren tertua di wilayah Tapalkuda adalah daerah Pasuruan, pondok pesantren Sidogiri didirikan tahun 1745 oleh Sayyid Sulaiman keturunan trah Sunan Gunung Djati. Sayyid Sulaiman adalah salah satu leluhur jalur Ibundanya KH. Kholil Bangkalan Al-Maduri (1834-1925). Dalam karya Syafaah disebutkan bahwa Beliau berasal dari keluarga ulama: "Ayahnya bernama K.H. Abdul Lathif yang mempunyai garis keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Kakeknya bernama Kiai Hamim, yang merupakan putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman." (Syafaah, 2017). Keturunan lainnya yang menjadi panutan masyarakat dikemudian hari antara lain; KH. Ahmad Shiddiq Jember

(1926-1991), KH. Abdul Hamid Pasuruan (1914-1982), dan lainnya.

Mereka mewariskan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan keislaman secara teoritis maupun praktis. Semua aspek diajarkan oleh para Kiyai terhadap para santri sepanjang masa belajar santri di pesantren bahkan diluar pesantren (ketika menjadi santri alumni). Karena dipesantren-pesantren inilah tradisi-tradisi Islam Nusantara yang diwariskan dari para walisongo secara turun temurun ini dalam istilah Gusdur -pesantren merupakan subkultur Nusantara', yang menjadi salah satu ikon Tradisi Islam Nusantara. Selaras dengan Azra, bahwa semua pesatren yang telah berdiri di seluruh wilayah Nusantara memiliki sedikitnya 3 fungsi pokok; sebagai transformasi pengetahun Islam, pemeliharaan tradisi-tradisi Islam, dan pembinaan/kaderisasi calon Ulama (pewaris para Nabi) (Azra, 1999).

Nasab KH. Hasan Sepuh Genggong Pajarakan Probolinggo (1840-1955)

KH. Mohammad Hasan (Ahsan) bin Syamsuddin (kyai Miri) bin Kiai Qoiduddin bin Abdullah bin 'Alawi bin Abdullah bin 'Alawi bin Abdur Rahim (buju' Toket) bin Abdullah bin Sulaiman bin Muhammad Fadlilllah bin Zainal 'Abidin bin Muhammad Ainul Yaqin/Raden Paku/Prabu Satmata/ Sunan Giri (Arief Umar dkk., 1989). Dari Jalur Ibunya KH. Hasan Sepuh bin Nyai Miri (hj. Khodijah) binti Nyai Qomariz Zaman binti Nyai Rima binti Nyai Berima binti Nyai Poteran binti Bintoro Sa'ud.

Selama berada di Makkah, KH. Hasan Sepuh Genggong berguru kepada para syeikh baik yang asli Mekkah maupun yang berasal dari Nusantara yang sudah berdomisili di sana, antara lain; KH. Moh. Nawawi bin Umar Banten, KH. Marzuki Mataram, KH. Mukri Sundah, Sayyid Bakri bin Sayyid Moh. Syatho al-Misri, Habib Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Syekh Sa`id al-Yamani Mekkah, dan Habib Ali bin Ali al-Habsyi (Fauzi, 2020).

KH. Hasan Sepuh Genggong adalah pengurus NU perdana yang memimpin di Pajarakan Probolinggo empat tahun setelah NU diresmikan (1930-1955). Mertuanya, KH. Zaenal Abidin Al-Maghrobi perintis pondok Genggong pada 1839 M meninggal tahun 1890-an, setelah itu dilanjutkan oleh menantunya KH. Hasan Sepuh.

Nasab KH. As'ad Syamsul Arifin Situbondo (1897-1990)

KHR. As'ad bin KHR. Syamsul Arifin bin R. Ruham bin R.Nuri (Ihsan) bin R. Nuruddin bin R. Zubair Tsani bin R. Zubair Awwal bin R. Abdul Alim bin R. Hamzah bin R. Zainal Abidin bin R. Khatib bin R. Musa bin Raden Qosim (Sunan Drajat) bin Raden Rahmat (Sunan Ampel). (Maskuri, 2020).

Di antara guru-guru Kiai As'ad ketika belajar di Mekah antara lain; Syeikh Abbas al-Maliki; Syeikh Hasan al-Yamani; Syeikh Muhammad Amin al-Quthbi; Syeikh Hasan al-Massad; Syeikh Bakir (K.H. Bakir asal Yogyakarta); Syeikh Syarif as-Sinqithi. Beberapa pesantren di Jawa-Madura yang menjadi tempat belajarnya; pesantren Banyuanyar Pamekasan (didirikan KH. Itsbat tahun 1785), pesantren Langitan, pesantren Sidogiri (KH. Nawawi), pesantren Buduran (KH. Khozin), pesantren Lasem (KH. Ma'shum Ahmad) dan pesantren Demangan Syaikhona Kholil Bangkalan. Setelah ayahnya wafat tahun 1951, beliau menggantikan ayahnya sebagai pengasuh pesantren hingga wafat tahun 1990. 26 tahun kemudian KHR. As'ad Syamsul Arifin oleh Presiden Joko Widodo dianugerahi Pahlawan Nasional pada 9 November 2016.

Nasab KH. Zaini Mun'im Paiton Probolinggo (1906-1976). KH. Zaini Mun'im (Mughni) bin Kiai Abdul Mun'im bin Kiai Mudarik bin kiai Ismail bin Kiai Mahalli (adalah pendiri pesantren Kembang Kuning Pamekasan tahun 1619) bin Kiai Nuruddin bin sampai Bendoro Saod (Tumenggung Tirtonegoro/Adipati Sumenep) sampai pada pangeran ketandur cucu dari sunan kudus (Maskuri, 2020).

Sedang dari jalur ibunda, Lora Mughni adalah keturunan para Raja Pamekasan melalui jalur KH. Bujuk Azhar (Ratoh Sidabulangan), penguasa Kraton Pamekasan Madura. Ibunda Lora Mughni berasal dari Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Madura. Kehidupan keluarganya terkenal sebagai keluarga santri.

Guru-gurunya antara lain; Syaikhona Kholil al-Bangkalani; RKH. Abdul Hamid bin Itsbat (Banyuanyar Madura); RKH. Abdul Majid bin Abd Hamid (Banyuanyar Madura); KH. Shanhaji (Paman); KH. Muntaha (menantu Kiai Kholil); KH. Nawawi (Sidogiri); KH. Hasyim Asy'ari (Jombang); KHR. Syamsul Arifin (Situbondo); KH. Hazin (Pondok Pesantren Siwalan Sidoarjo); KH. Muhammad Baqir asal Yogyakarta); Syekh Umar Hamdani aI-Maghribi, Syekh Alwi al-Maliki (mufti Maliki di Makkah); Syekh Sa'id al-Yamani (mufti Syafi"i di Makkah), Syekh Umar Bayunid (mufti Syafi'i di Makkah), Syekh

Yahya Sangkurah asal Malaysia, dan Syekh Syarif; Muhammad bin Ghulam As-Singkiti (Maskuri, 2020).

Para kiai yang mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, diharapkan bisa menjadi pemimpin pesantren setelah ia meninggal. Bila ada, anak laki-lakinya yang lain dapat mendirikan suatu pesantren baru atau dapat membantu dan atau menggantikan kedudukan mertuanya. Para kiai kiai juga mengawinkan anak perempuannya dengan para santri terpilih yang sudah lulus dalam ujian ilmunya, umumnya masih keluarga keturunan kiai, dengan demikian, mereka dapat di persiapkan sebagai calon potensial untuk menjadi pemimpin pesantren dikemudian hari. Kekerabatan bagi para kiai memainkan peranan yang secara komparatif lebih kuat dalam membentuk tingkah laku ekonomi, politik dan keagamaan mereka dibandingkan dengan rata-rata orang pedesaan di Jawa. Para kiai saling menjalin ikatan kekerabatan dengan komunitas yang terus diperkuat (Bertens, 2001).

Kiai memiliki status dan kemasyhuran bukan hanya disebabkan karena kepribadian yang dimilikinya, melainkan ada kiai (sepuh) yang mengajari dan membimbing baik secara rohani maupun jasmani. Kiai (pendiri dan pengasuh) pada dasarnya mewakili watak pesantren dan juga karakteristik Kiai-gurunya dimanapun belajar. Keabsahan (*authenticity*) atas ilmu yang dipelajari dan dikuasainya dimiliki sebagai murid/santri Kiai –sepu/masyhur- yang dibuktikan melalui mata rantai tranmisi keilmuan yang ditulis dengan rapi dan dapat dibenarkan oleh para Kiai (senior/sepu) lainnya yang juga sama-sama masyhur dan seangkatannya dengan dirinya (Dhofir, 2011).

Kesimpulan

Para santri (kiai) telah menunjukkan eksitensinya dalam pergerakan perebutan kemerdekaan baik pasca perang Jawa hingga masa pasca proklamasi. Jaringan para kiai di tapalkuda sejak era 1830-an menujukkan peran cukup signifikan. Silsilah nasab dari jalur ibu dan ayah serta kakek-nenek mereka saling tersambung ke dalam jejaring keturunan para walisongo yang notabene merupakan para pendiri pesantren dan diwariskan secara turun temurun hingga generasi berikutnya. Diaspora Madura di Tapalkuda semakin mencapai puncak penguatannya pasca pendirian NU tahun 1926 dengan jalingan jejaring pesantren yang didirikan hingga masa

kemerdekaan

Melalui aktivitasnya dalam pengembangan ilmu di dalam dan mancanegara secara berkesinambungan telah menunjukkan diaspora Indonesia (Nusantara) selama belajar di Makkah. Melalui genealogi keilmuannya mereka memiliki pengaruh luar biasa dalam memberikan konstribusi pemikiran dalam ranah kemanusiaan (global). Keberhasilan dakwah dan kepemimpinan kiai NU di Tapalkuda dalam menyebarkan Islam tidak sebatas di daerah pedesaan dan perkotaan namun telah menjangkau lapisan masyarakat nahdliyyin di seluruh nusantara bahkan di mancanegara.

Geneologi keilmuan dan genealogi keilmuan para Kyai NU merupakan faktor pendorong diaspora Nahdliyyin di tengah masyarakat kosmopilitan yang semakin penuh dengan tantangan dalam semua aspek kehidupan, baik sosial budaya ekonomi politik dan lainnya. Hubungan agama dan negara harus terus menjadi perhatian para kiai dan santri pesantren dalam menjaga dan menciptakan cita-cita luhur para leluhur utamanya walisongo yang telah meneladankan perjuangan dakwah Islam ke semua wilayah Jawa dan Nusantara, demi menegakkan kebenaran Islam sebagai pencerahan sepanjang masa.

Dalam konteks Diaspora, para Nahdliyyin harus siap dan terus merawat keutuhan masyarakat dan negara (NKRI) 'Menjaga tradisi lama dan mengambil tradisi baru yang lebih baik' di tengah beragam arus kepentingan global yang akan mengikis budaya-budaya lokal (*lokal wisdom*). Maka, semua tradisi dan budaya lokal yang tersebar di semua daerah komunitas muslim, harus terus dirawat, dilestarikan dan diajarkan kepada semua generasi milenial. "Merawat Jagad; membangun peradaban dari lokal hingga global. Seperti yang telah dicontohkan KH. Hasan Sepuh Genggong, KH. As'ad Syamsul Arifin dan KH. Zaini Mun'im, dan juga telah diteladankan oleh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Guru Bangsa dan Tokoh Pluralis yang Fenomenal. Benar, apa yang dinyatakan Agus Sunyoto, "Walisongo telah meletakkan dasar-dasar Islam ke dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak abad ke-15, hingga kemudian diwariskan secara turun temurun melalui generasi sesudahnya hingga era kekinian"

Daftar Pustaka

Abdurrahman. (2017). Reproducing Charisma: A Study of Religious Pilgrimage to Hasan Genggongs Cemetery in Pajarakan Probolinggo. *Islamic Studies Journal for Social Tranformation*, 98-113.

Ali, M. &. (2015). Reports on Ongoing and Past Research Project Laboratorium Bantenologi's Biographies of Ulama and Religious Leaders in Banten 1810-2000. *Kawalu: Journal of Local Culture*, 84-88.

Arief Umar dkk. (1989). *150 Tahun Menebar Ilmu di Jalan Allah.* Probolinggo: PT. Rakhmad Abadi.

Asep Achmad Hidayat, U. F. (2023). Sejarah Cakraningrat I Dari Tawanan Perang Hingga Menjadi Korban Pemberontakan 1624-1648. *Jurnal El Tarikh Journal of History, Culture,and Islamic Civilization (JHCC)*, 95-106.

Azra, A. (1999). *Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Bertens, K. (2001). *Filsafat Barat Kontemporer Prancis.* Jakarta: Gramedia.

Brubaker, R. (2005). The Diaspora. *Ethnic and Racial Studies*, 1-19.

Burdah, I. (2017). The Politics Of Mataram Kingdom During The Reign Of Sultan Agung. *Journal Of Indonesian Islam*, 267-306.

Dartinigsih, B. E. (2020). *Budaya dan Masyarakat Madura*. Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata.

Dhofir, Z. (2011). *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Fauzi, A. &. (2020). Menelusuri Jejak dan Kiprah Mohammad Hasan Genggong dalam Membangun Kepemimpinan Spiritual-Transformatif. *Jurnal Islam Nusantara*, 17-31.

Hairul, M. (2022). Diaspora Bahasa Madura dalam Masyarakat Pandhalungan Bondowoso. *paramasastra*, 84-96.

Hermiasih, L. (2015). Diaspora Indonesia dan Gamelan Jawa di Inggris: Dampak Relokasi Tradisi Terhadap Pembentukan Identitas dan Komunitas. *Jurnal Kajian Seni Vol. 01, No. 02, April*, 130-148.

Mahamid, M. N. (2023). Politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda perspektif kebijakan cultuurstesel di Madiun. *Agastya: Jurnal*

Sejarah Dan Pembelajarannya 13.2, 183-196.

Maskuri, S. R. (2020). Genealogi Pengajaran Islam dan Nasionalisme Agama KH. Zaini Mun'im dan KHR. As'ad Syamsul Arifin. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 140-162.

Muhammad, N. (2012). Karakteristik Jaringan Ulama Nusantara Menurut Pemikiran Azyumardi Azra. *Jurnal Subtantia*, 73-87.

Nuryananda, P. F. (2015). IDN-Global dan Pendewasaan Diaspora Indonesia. *Global & policy Vol. 3, No. 2, Juli-Desember*, 89-100.

Riyadi, M. I. (2019). *Multikulturalisme pada zaman kesultanan pajang abad ke-16 M: telaah terhadap serat Nitisruti.* Bantul: Trussmedia Grafika.

Sunyoto, A. (2016). *Atlas Walisongo.* Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN dan Lesbumi PBNU.

Syafaah, A. (2017). Menelusuri Jejak dan Kiprah Kiai Kholil Al-Bangkalani. *Tamadun*, 22-39.

Wahyuni, Y. A. (2013). Diaspora Madura: Analisis Modal Sosial dalam Usaha Sektor Informal oleh Migran Madura Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 52-63.

Santri Intelegensia

Khabib Fajar Pratama

"*The Great Shifting* dapat diterima dengan mudah oleh mereka yang berpandangan terbuka dan terbiasa beradaptasi dengan perubahan, tetapi akan selalu ditentang oleh mereka yang terbelenggu dalam kebesaran masa lalu". Rhenald Kasali dalam pengantar bukunya *The Great Shifting.*

Sebagaimana yang dimaksud oleh Rhenald Kasali di atas bahwa dampak besar *shifting* merupakan efek dari *disruption. Disruption* (inovasi atau cara baru yang menggantikan cara lama) tidak hanya menciptakan keharusan *Shifting* (beradaptasi terhadap susuatu yang baru), melainkan juga menciptakan efek psikologis yang besar bagi orang-orang yang berani mengambil langkah untuk berubah dan berkembang (Kasali, 2018). Akan lebih banyak dampak yang tak terduga bagi orang-orang yang memilih bertahan dengan masa lalu dan tidak berani mengambil langkah perubahan. Rhenald Kasali mencantumkan ultimatum dalam cover bukunya yakni *"Lebih Baik Pegang Kendali daripada di Kendalikan".*

Para sarjana yang telah berhasil melewati kawah candradimuka pendidikan tinggi tidak kemudian telah dinyatakan usai tugas belajarnya. Justru setelah usai dinyatakan sebagai seorang sarjana, maka sejak itu pula tugas mencerdaskan kehidupan bangsa telah melekat kepadanya. Sarjana Nahdlatul Ulama di era teknologi dan informasi ini mengemban tugas dakwah dan kaderisasi intelektual yang penuh tantangan. Dimana, tantangan terberatnya ialah banyak dijumpai celah-celah yang berpotensi merusak akhlak dan karakter para intelektual. Sehingga, mereka harus pandai-pandai dalam bersikap dan bertindak. Tidak hanya itu, para sarjana saat ini juga menghadapi era industri 5.0. Dimana *shifting* (perpindahan) besar-besaran sedang terjadi di segala lini. Tugas diri sendiri adalah turut menjadi aktor kemajuan era industri dan informasi serta disisi lain harus tetap *waras* secara etika dan moralnya. Kewarasan dalam etika dan moral intelektual inilah yang menjadi perhatian bersama untuk tetap dijaga bersama serta diwariskan kepada kader-kader sarjana muda Nahdlatul Ulama. Banyaknya masalah yang harus direnungkan oleh para agen intelektual Nahdliyin tidak kemudian

menjadi suatu hal komplek yang sulit diatasi. Justru dengan banyaknya wadah-wadah organisasi otonom yang ada dalam struktur Nahdlatul Ulama, idealnya mampu mengorganisir problematika masyarakat yang komplek menjadi lebih sederhana dan lebih konkrit dalam menjalankan langkah-langkah penyelesaian permasalahan masyarakat yang ada.

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang telah disahkan pada Muktamar ke-32 NU di Makassar 2010 silam, merupakan salah satu organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang juga hadir untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam (Azizah, 2022). Kaum terpelajar NU yang ternaungi dalam ISNU merupakan laboratorium intelektual NU yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana, *output* yang dihasilkan haruslah ilmiah. Artinya, karakter umum yang melekat pada para ilmuawan ini mampu menjelajahi fenomena sosial, mengumpulkan pengetahuan baru dan membuat produk-produk gagasan yang mampu meningkatkan kualitas ummat dan bangsa. Namun perlu diingat, sebagai agen intelektual yang *berdarah hijau* (Nahdliyin), ISNU juga mengemban tugas dakwah keagamaan untuk merawat dan memperbaiki etika serta moral masyarakat. Hal demikianlah yang harus menjadi pembeda antara intelektual lain dengan intelektual yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama.

Jihad Santri Jihad Intelektual

Bonus demografi Indonesia merupakan masa dimana penduduk usia produktif – *yakni 14-64 tahun* – akan lebih besar dibanding usia non-produktif – *65 tahun keatas* – dengan proporsi lebih dari 60% dari jumlah total penduduk Indonesia. Menurut laporan Kominfo tersebut, momentum bonus demografi harus dihadapi dengan perencanaan yang matang guna menyongsong program mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Bonus demografi menjadi kesempatan yang strategis bagi Indonesia untuk segera menyiapkan perbekalan kualitas SDM usia produktif yang akan menjadi agen intelektual yang akan mengisi tonggak kepemimpinan masa depan bangsa. Disisi lain, kondisi ini juga harus menjadi perhatian kepada para organisasi kader yang ada di Indonesia untuk turut menyiapkan kader-kader militan yang siap berkontribusi untuk Indonesia Emas tersebut.

Percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berusia produktif beriringan dengan agenda besar pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (*Sustainable Development Goals*). Agenda besar ini merupakan langkah pemerintah untuk menciptakan generasi produktif yang berkualitas. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, jihad *khubbul wathon minal iman* merupakan resolusi yang telah difatwakan langsung oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratulsyaikh Hasyim Asyar'i hingga melekat dalam sanubari masyarakat Nahdliyin hingga saat ini. Perlu diingat bahwa *Alvara Research Center* pernah melakukan survei nasional bertajuk *"Potret Keberagaman Muslim Indonesia*" terhadap 1.626 penduduk muslim Indonesia yang berusia di atas 17 tahun untuk 34 Provinsi di Indonesia pada bulan Desember 2016. Hasil survei tersebut salah satunya berisi kesimpulan mengenai penduduk muslim Indonesia yang 50,3% mengaku berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, sementara 14,9% mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah serta sisanya tersebar ke ormas-ormas yang lain maupun tidak berafiliasi ke ormas manapun (Nugroho, 2019). Secara kuantitas, Nahdlatul Ulama memiliki bonus demografi yang lebih banyak secara kuantitasnya. Hal itu jika berhasil dikelola dengan baik, akan menjadi daya ungkit bagi kejayaan Aswaja dan Kejayaan NKRI.

Resolusi jihad yang dikumandangkan K.H. Hasyim Asyar'i saat itu berkonteks pada jihad fisik melawan penjajah dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Ketika Indonesia telah berhasil lepas dari penjajahan, resolusi jihad warisan K.H. Hasyim Asyar'i terus dikumandangkan hingga hari ini. Namun, resolusi jihad saat ini bukanlah untuk melawan penjajah secara fisik, melainkan untuk melawan penjajahan intelektual. Sejarah panjang Nahdlatul Ulama dalam kontribusinya mengisi kemerdekaan tidak akan berhenti sampai hari akhir. Karena bagi Nahdliyin, cinta tanah air merupakan bagian dari jihad Iman dan Islam, yakni kesesuaian antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Sebagaimana Hadratussyaikh Hasyim Asyar'i pernah menyampaikan *"Agama dan Nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari Agama dan keduanya saling menguatkan".*

Lembaga pendidikan mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi merupakan *lokus* medan budaya yang akan banyak menciptakan praktik intelektualisme. Tradisi belajar hingga level setinggi-tingginya telah dicontohkan oleh para Ulama NU sejak

sebelum dan awal berdirinya. Sebagaimana yang diketahui dalam sejarahnya, Nahdlatul 'Ulama dalam waktu yang cukup lama sejak berdirinya di tahun 1.926 hingga 1960-an, memang belum mengalami mobilisasi intelektual dengan baik. Dalam artian, belum banyak masyarakat Nahdliyin terpelajar yang menempuh belajar sampai Perguruan Tinggi. Namun sekitar tahun 1.970-an, mahasiswa muslim yang berkultural NU mulai banyak mengisi Perguruan Tinggi, meskipun masih menjadikan Timur Tengah sebagai pusat orientasi intelektual sebagaimana kiai-kiai Indonesia pada abad-abad sebelumnya. Tradisi belajar di Timur Tengah dapat kita jumpai seperti K.H. Hasyim Asyar'i, Wahab Hasbullah, Bisri Syamsuri, Achmad Siddiq, Ali Ma'shum hingga generasi Abdurrahman Wahid dan Said Aqiel Siradj (Mustofa, 2018).

Menjelang tahun sekitar 1980-an, masyarakat terpelajar NU mulai melebarkan orientasi pendidikannya, tidak hanya ke Timur Tengah namun juga mulai banyak yang belajar ke Barat. Kondisi ini menjadikan Nahdlatul Ulama semakin dewasa dalam memandang kehidupan beragamanya. Kondisi itu trutama saat NU menghadapi masalah perbedaan pendapat, masalah modernisasi dan tata cara *amar ma'ruf nahi munkar* yang baik dan benar. Hal ini menjadikan cara pandang NU semakin selaras dengan semangat dan nilai-nilai aswaja yang telah menjadi rujukan NU dalam beragama, yakni *Tawazun* (bertindak seimbang), *Tawassuth* (berperilaku moderat), *Tasamuh* (bersikap toleran), dan *I'tidal* (berpihak pada kebenaran).

Jihad intelektual bukanlah urusan mudah. Layaknya jihad fisik (berperang di jalan Allah), jihad intelektual juga membutuhkan keringat, membutuhkan proses latihan yang ketat dan berat, bahkan tak jarang membutuhkan pengorbanan. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa "*jika kita tidak mau merasakan pedihnya belajar, maka bersiaplah merasakan pedihnya kebodohan*". Tugas agen intelektual adalah melawan kebodohan, yakni kebodohan yang ada dalam diri sendiri dengan senantiasa belajar. Selain demikian, yang perlu dikuatkan ialah bagaimana peranannya dalam keikutsertaan membantu orang lain melawan kebodohan dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya.

Prosesi intelektual bukan sekedar proses menuntut ilmu (*input*) yang berujung pada proses pengamalan ilmu (*output*). Lebih dari itu, ada proses pengolahan (*meramu*) ilmu sebelum suatu ilmu itu diamalkan dan dipraktikkan. Proses *meramu* ilmu ini bukanlah pilih-

memilih dalam mempelajari suatu ilmu. Namun, proses *meramu* ilmu ini adalah proses pengolahan, pencocokan dan penyaringan suatu ilmu. Proses *meramu* ini berguna untuk menyelaraskan antara kajian keilmuan yang didapat supaya tidak bertentangan dengan aqidah-aqidah Islam. Dilain sisi, proses ini juga untuk menciptakan suatu produk ilmu yang mudah dimengerti dan bermanfaat oleh banyak kalangan.

Keharusan berpikir (belajar) merupakan warisan 'Ulama yang tak boleh sirna. Agen intelektual Nahdliyin dalam hal ini diwadahi oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul 'Ulama (ISNU) merupakan wadah mobilisasi para sarjana Nahdliyin dalam usahanya untuk turut berkontribusi membangun peradaban ummat dan bangsa dan usaha untuk meningkatkan kualitas SDM sarjana NU melalui kaderisasi sarjana terus dimassifkan. Salah satu wujudnya ialah dalam pernaan mendorong kader-kader NU untuk menuntaskan pendidikan hingga Perguruan Tinggi dan berprestasi dalam bidang keahliannya masing-masing. Pemberian beasiswa untuk kader NU yang berpestasi setiap tahunnya tak pernah libur. Disisi lain, kegiatan-kegiatan ilmiah, seminar nasional, dan perkumpulan dan diskusi-diskusi juga diselenggarakan guna memantik potensi intelektualisme para kader dan sarjana NU. Proses jihad intelektual adalah proses mulia yang sejak dulu ditempuh oleh para 'Ulama di dunia. Karena dengan ilmulah manusia akan terangkat derajatnya, karena dengan ilmulah suatu organisasi akan terangkat derajatnya. Sebagaimana hal tersebut telah tertulis dalam Al-Qur'an Al-Mujadalah ayat 11; "*Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu*".

Istiqomah Dalam Dzikir Dan Pikir

Dakwah merupakan upaya dalam rangka mendorong manusia untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Agama telah menyariatkan bahwa manusia sebagai pemimpin di bumi (*Kholifah fil-Ard*) yang harus mampu mengendalikan pengetahuan yang telah dianugerahkan kepadanya agar dapat bermanfaat dalam mengelola dan menjaga bumi dengan sebaik-baiknya (Utomo, 2023). Maka dengan demikian, para agen intelektual Nahdliyin harus mampu menjalankan dzikir dan pikir secara seimbang. Kedua elemen (dzikir dan pikir) ini ibarat mata pisau dan *gagangnya*. Percuma memiliki mata pisau yang tajam jika ganggang pemegangnya rapuh,

tentu tidak akan bisa memotong daging. Apalagi jika memiliki pisau yang tidak memiliki *gagang*, tentunya pisau tersebut berbahaya untuk digunakan. Disisi lain, apabila tetap menggunakannya untuk memotong sesuatu, maka akan melukai tangan sendiri. Begitu pula sebaliknya akan percuma jika memiliki *gagang* pisau yang kuat dan bagus namun mata pisaunya tumpul. Sehingga, ibarat keselarasan, laku pikir dan dzikir harus berjalan beriringan.

Tempat pertemuan antara dzikir dan pikir ialah filsafat sains (Utomo, 2023). Dimana dalam tujuan dikembangkannya ilmu melalui *laku* pikir ialah untuk kemaslahatan ummat manusia tanpa mengabaikan aspek etika dan nilai moral. Dilain sisi, etika dan nilai moral merupakan perasaan kemanusiaan (*sense of human*) yang dapat digali melalui *laku* dzikir. Produk *pikir* para ulama dapat kita serap ilmunya hingga saat ini. Bahkan, produk *dzikir*nya pun masih dapat kita serap juga melalui amalan-amalan seperti pelagai rotib, sholawat dan ijazah-ijazah lainnya yang berguna untuk melatih olah dzikir kita. Penggalian ilmu pengetahuan melalui *laku* dzikir dan pikir berimbang merupakan tirakat yang biasa ditempuh oleh para ulama kita terdahulu.

Teori imam Waki' Ibn Jarrah yang menyatakan "*al-ilmu nur, wa nurrullahi la yuhda lil-asyi*" Ilmu itu Cahaya. Yang mana, cahaya Allah tidak akan turun kepada para pelaku maksiat. Bagi masyarakat Nahdliyin, mengikuti titah dan jejak ulama (*nggandul sarunge kyai*) merupakan budaya dalam merawat dan mendikte diri sendiri supaya tetap ber*dzikir* dan ber*pikir.* Upaya ini umum dilakukan sebagai bentuk ikhtiar supaya senantiasa berada dalam rel Agama, utamanya bagi para agen intelektual yang memiliki daya *pikir* lebih. Mereka harus bisa menyeimbangkan diri untuk senantisa berada dalam rel *dzikir* yang bertindak sebagai cahaya dalam perjalanan mencari ilmu pengetahuan. Manusia yang senantiasa *dzikir* akan dapat mengontrol tubuhnya untuk tetap disiplin ucapan, perbuatan dan buah pikirnya secara lahiriyah dan batiniah. Dzikir dilakukan melalui hati, sedangkan pikir dilakukan melalui akal. Objek dzikir adalah Allah, sedangkan objek pikir adalah segala fenomena dan tanda-tanda kekuasaan-Nya (Alam).

Arogansi intelektual kerap menjadi momok menakutkan yang timbul akibat kuatnya daya *pikir* dan lemahnya daya *dzikir.* kondisi ini telah digambarkan dalam Al-Qur'an sejak pertama kali manusia (Nabi Adam. AS) diciptakan. Dijelaskan bahwa iblis – dulu bernama

'Azazil yang merupakan golongan malaikat paling mulia dan utama – kagum dengan diri sendiri karena diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Lalu iblis yang membangkang yang mengaibatkannya dikutuk oleh Allah karena merasa lebih unggul dari Adam. Sikap *merasa* (jumawa) yang berasal dari nenek moyang iblis inilah yang harus dihindari oleh manusia, utamanya oleh agen intelektual. Tiga sifat yang bisa kita ambil untuk kita hindari dari peristiwa tersebut ialah; 1. menganggap diri lebih baik dari orang lain, 2. menolak kebenaran, 3. meremehkan atau merendahkan orang lain (Utomo, 2023). Tiga karakter inilah sumber kemaksiatan manusia yang dengan tegas harus dihindari.

Dalam kondisi apapun, ilmu pengetahuan tetap menjadi nilai tertinggi yang mampu mengangkat derajat manusia. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali menyimpulkan terdapat tujuh macam kenikmatan yang berpotensi menyebabkan manusia menjadi sombong. Dimana, Imam Al-Ghazali menempatkan urutan pertama yang paling berbahaya adalah adanya nikmat ilmu pengetahuan namun yang memerolehnya berlaku sombong. Sedangkan keenam lainnya yang berpotensi menyebabkan kesombongan ialah amal ibadah (riya'), kebangsawanan, kecantikan dan ketampanan, harta dan kekayaan, kekuatan dan kekuasaan, dan terakhir ialah banyak pengikut.

Arogansi intelektual juga pernah terjadi pada sosok Nabi Musa. ketika umatnya bertanya siapakah manusia yang paling tinggi ilmunya? Spontan Nabi Musa menjawab bahwa dirinyalah yang paling tinggi ilmunya. Lantas Allah menegur Nabi Musa dengan memerintahkannya untuk menemui Nabi Khidir. Dalam kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir diperlihatkan bahwa ketinggian ilmu Nabi Musa – sebelumnya *merasa* paling tinggi ilmunya – tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Nabi Khidir. Kisah selengkapnya dapat dilihat dalam tafsir surah Al-Kahfi: 65-82.

Sebagai agen intelektual yang beretika dan bermoral tinggi, sudah selayaknya menghindari sikap arogansi intelektual yang berbahaya ini. Sebab, dampak yang bisa ditimbulkan sangatlah berbahaya. Dapat kita lihat contohnya pada beberapa pejabat tinggi yang telah dianugerahkan kekuasaan dan wewenang, namun produk-produknya justru menyengsarakan rakyat. Adapula saintis yang menemukan suatu penemuan baru dimana *mudhorot*nya lebih besar daripada *maslahat*nya - namun tetap diterjang demi mendapatkan

keuntungan untuk diri sendiri dan golongannya. Tentunya dalam konteks ini, kita tidak bisa menyamakan peran pendakwah dengan peran agen intelektual. Pendakwah dengan ciri khas cara dakwahnya tentu memiliki tujuan mulianya masing-masing. Yangmana, dalam hal ini mereka memberikan wawasan dan kesadaran beragama terhadap masyarakat. Sementara agen intelektual – dilain sisi juga berkewajiban berdakwah - juga memiliki tugas sebagai pemikir sekaligus eksekutor dalam tanggung jawabnya meninggikan derajat manusia, entah melalui jalur politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Teringat nasihat Syekh Nawawi al-Bantani dalam Nashaihul 'ibad yang menerangkan bahwa tidak akan bermanfaat ilmu yang banyak kecuali telah mengamalkan tiga perkara:

1. Tidak mencintai kesenangan dunia sebab ia bukanlah tempat bagi orang-orang beriman.
2. Tidak berteman dengan setan sebab ia bukanlah teman bagi orang-orang beriman.
3. Tidak menyakiti seseorang sebab menyakiti orang lain bukanlah perbuatan orang beriman. (al-Bantani, 2017)

Hari Santri Nasional (HSN) bukanlah hari libur, bukan pula sekedar huru-hara perayaan simbolis. Bermula pada17 September 1945, ketika K.H. Hasyim 'Asyari mengeluarkan fatwa jihad di kalangan kiai dan santri untuk melawan penjajah guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa tersebut kemudian disepakati dalam rapat di kantor Pengurus Besar NU (PBNU) di Bubutan, Surabaya pada 21-22 Oktober 1945 yang kemudian diperingati menjadi Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Mengutip pendapat Kiai Abdul Haris Ansori, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Sidomulyo, beliau mengatakan bahwa santri adalah manusia yang selalu menginginkan agar kehidupannya menjadi lebih baik. Beliau menambahkan bahwa santri adalah semua yang ada di dunia terutama kaum muslimin yang selalu menginginkan setiap harinya untuk menjadi lebih baik dengan belajar dan bertanya kepada siapapun yang dianggap dituakan dan faham yaitu guru atau ahlinya. *Fas'alu ahladz dzikri inkuntum la ta'lamun* "bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui" An-Nahl Ayat 43.

Hari Santri Nasional harus menjadi *charge* bagi masyarakat Indonesia untuk senantiasa aktif meningkatkan kualitas diri guna melawan *kejahiliyah*-han (penjajahan intelektual). Resolusi Jihad modern adalah jihad intelektual. Jihad tersebut meningkatkan kualitas diri dengan senantianya mencintai ilmu pengetahuan (pendidikan) dan senantiasa berpikir serta berinovasi untuk kemaslahatan ummat maupun bangsa (penelitian). Disisi lain, jihad ini turut hadir ditengah masyarakat sebagai bagian dari bentuk pengamalan dari ilmu yang telah dipelajari (pengabdian kepada masyarakat). Gambaran tersebut merupakan pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selalu dijadikan pedoman bagi sarjana Nahdlatul 'Ulama sebagai bentuk bakti pada negeri.

Daftar Pustaka

al-Bantani, S. N. (2017). *Nashaihul ‘ibad.* Jakarta Selatan: Wali Pustaka.

al-Hamidy, A. D. (2008). *Sarung & Demokrasi Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan.* Surabaya: Khalista bekerjasama dengan Lajnah Ta’lif wa Nasyr (LTN-NU) Jawa Timur.

Ali, P. D. (2010). *Pelopor Pendidikan Silam Paling Berpengaruh.* Jakarta: Al-Kautsar.

Azizah, A. (2022). Strategi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Dalam Pengembangan Dakwah Di Kabupaten Done. *Repositori. iain-bone*.

Az-Zuhaili, P. D. (2014). *Ensiklopedia Akhlak Muslim.* Jakarta Selatan: Mizan Publika.

Detikcom, T. (2023, Oktober 22). *Resolusi Jihad 22 Oktober 1945: Isi Naskah dan Cikal Bakal Hari Santri*. Retrieved from DetikNews: https://news.detik.com/berita/d-6995889/resolusi-jihad-22-oktober-1945-isi-naskah-dan-cikal-bakal-hari-santri

Dr. Hj. Mardiyah, M. (2015). *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi.* Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

Kasali, R. (2018). *The Great Shifting.* Jakarta: Gramedia.

Kominfo. (2020, Juni 27). Retrieved from Kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/27423/komitmen-pemerintah-wujudkan-bonus-demografi-yang-berkualitas/0/berita#:~:text=Bonus%20demografi%20yang%20dimaksud%20adalah,dihadapi%20dengan%20perencanaan%20yang%20matang.

Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan.* Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Mulkiah, S. &. (2023). Dzikir dan Fikir Dalam Perspektif Imam Al Gozali. *PANDAWA: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Vol 5, No. 2; 1-20.

Mustafa, M. D. (2012). Dakwah Dan Pengembangan Intelektualitas. *Al-Misbah*, Vol. 8 No 1: 1-20.

Mustofa, M. L. (2018). *Etika Keagamaan Nahdlatul Ulama.* Malang: Edulitera.

Nugroho, N. S. (2019). *CYBER NU; Beraswaja di Era Digital.* Kudus: PARIST PENERBIT.

Ramadhan, D. (2023, Oktober 22). *Warta*. Retrieved from NUOnline: https://lampung.nu.or.id/warta/jihad-santri-lawan-kebodohan-dan-wujudkan-indonesia-emas-2045-Pn07x

Utomo, B. (2023). Tantangan Dakwah Menghadapi Arogansi Intelektual dalam Prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Ad-Da'wah*, Vol. 21 No. 1.

ERA DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN KULTUR WARGA NU

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan warga NU, mulai dari pola komunikasi hingga transformasi sosial. Kehadiran teknologi digital tidak hanya mengubah cara berinteraksi, tetapi juga membentuk ulang nilai-nilai dan tradisi keagamaan, sehingga menuntut adaptasi dan reinterpretasi dalam menjaga relevansi NU di tengah dinamika perubahan zaman.

Menavigasi Arus Digital: Transformasi Dakwah NU di Era Media Sosial

Arik Dwijayanto

Ruang dakwah yang dulu hanya mengenal pengajian melalui tatap muka di pesantren atau di dalam masjid maupun melalui *majelis ta'lim* yang rutin diselenggarakan secara berkala saat ini sudah mengalami pergeseran dengan pengajian berbasis online. Masyarakat secara individu mencari ruang dakwah sendiri melalui Youtube, Facebook, Instagram maupun situs web. Kesempatan belajar agama melalui platform digital memberikan peluang kepada siapapun khususnya para milenial untuk mempelajari secara daring di media sosial yang mereka pilih. Dampaknya pemahaman keagamaan mereka tergantung pada konten dakwah yang mereka pelajari. Jika konten dakwah yang mereka pelajari berkarakter Islam moderat maka pemikiran dan perilaku keagamaan mereka juga menjadi moderat. Namun, jika konten dakwah yang mereka kaji cenderung berkarakter ekstrim maka pemikiran dan perilaku keislaman mereka bisa menjadi ekstrimis.[1]

Meskipun Nahdlatul Ulama cukup terlambat menyikapi era digital, jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam lainnya yang mengoptimalkan sosial media sebagai sarana dakwah.[2] Namun demikian, para pendakwah muda Nahdlatul Ulama segera menyadari bahwa ketertinggalan tersebut dengan lebih aktif memproduksi konten dakwah digital melalui media sosial. *Diantara banyak pendakwah Nahdlatul Ulama, salah satunya Gus Iqdam termasuk pendakwah muda yang popular bagi milenial dan Gen Z. Melalui Majelis Sabilu Taubah konten-konten dakwah Gus Iqdam disyiarkan secara daring di berbagai media sosial. Pada akun Youtube Gus Iqdam Official memiliki subscriber sebanyak 1,33 juta dengan 110 juta penonton (viewers). Pendakwah lain yang sudah familiar di masyarakat muslim tradisional yakni KH. Anwar*

1 Fridiyanto, M. Kholis Amrullah, and Muhammad Rafi'i, "Digitalisasi Nahdlatul Ulama : Dari Laku Tradisional Menuju Revolusi Digital," *AD-DHUHA : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2020).

2 Aris Risdiana, Reza Bakhtiar Ramadhan, and Imam Nawawi, "Transformasi Dakwah Berbasis 'Kitab Kuning' Ke Platform Digital," *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 1–28, https://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.682.

Zahid, Pengasuh Pesantren Sabilunnajah Bojonegoro. Melalui akun Youtube @Anzachannel KH Anwar Zahid memiliki 2,87 juta subsciber dengan 469 juta viewers. Begitu juga dengan Gus Miftah, Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji dari Yogyakarta yang aktif berdakwah menggunakan media sosial. Di akun Instagramnya, Gus Miftah memiliki follower 2.4 juta sedangkan di channel Youtube, Gus Miftah memiliki subscriber 1,13 juta dengan 135 juta viewers. Hal ini menunjukkan digitalisasi dakwah yang dilakukan para dai tersebut mendapat sambutan positif khususnya milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi dan media sosial.

Selain para dai yang aktif berdakwah melalui media sosial, gerakan digitalisasi dakwah juga dipelopori milenial NU dari kalangan pesantren yang dikenal sebagai Arus Informasi Santri (AIS) Nusantara. AIS Nusantara merupakan wadah berkumpulnya para santri yang aktif di gerakan dakwah virtual sehingga menciptakan wajah baru dakwah khas pesantren melalui media sosial. Para santri yang tergabung dalam Arus Informasi Santri (AIS) Nusantara secara aktif memberikan konten-konten dakwah yang menyejukkan dengan menampilkan citra Islam yang ramah, hal ini merupakan gerakan kesadaran para milenial NU dalam merespon perubahan zaman dengan mempopulerkan dakwah para kyai pesantren melalui berbagai platform media sosial yang juga sebagai gerakan untuk menangkal penyebaran radikalisme di media sosial.[3]

Selain AIS Nusantara, para milenial NU yang aktif menampilkan gerakan dakwah digital menggunakan poster/meme tergabung dalam komunitas SDC atau Santri Design Community. SDC dibentuk karena kegelisahan melihat desain media dakwah (brosur, pamphlet, meme, spanduk dan sejenisnya) di NU yang kurang menarik padahal desain merupakan pintu utama yang menjadikan orang tertarik mengikuti kegiatan NU. SDC juga mewadahi para milenial NU tidak hanya mahir dalam keilmuan agama tetapi juga mahir mendesain konten-konten kreatif sehingga ikut aktif terlibat dalam dinamika dakwah digital saat ini khususnya pada masa pandemi.[4]

---

3 Muhammad Candra Syahputra, "Jihad Santri Millennial Melawan Radikalisme Di Era Digital: Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara Di Media Sosial," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 69–80, https://doi.org/10.33852/jurnalin.v1nnnyttooodd345treasz4i1.187.

4 Wawancara daring dengan Dodik Nur Cahyo, Ketua Komunitas Santri Desain (SDC), 25 Maret 2023.

Namun demikian muncul pertanyaan mendasar: Mengapa digitalisasi dakwah NU belum mampu bersaing dengan kelompok Islamis lainnya? Bagaimana upaya milenial, aktivis dan tokoh NU dalam menguatkan moderasi dakwah digital? artikel ini berupaya untuk menjawab pertanyaan diatas dengan mengeskplorasi peran aktivis NU dalam digitalisasi dakwah melalui media sosial dan memetakan kelemahan serta kekuatan dakwah digital para tokoh dan aktivis NU. Kajian ini juga menganalisis tantangan dan peluang Nahdlatul Ulama dalam memproduksi konten dakwah digital. Digitalisasi dakwah dengan konten yang kreatif, segar dan menyejukkan harus menjadi cirikhas (branding) bagi para pegiat dakwah NU khususnya dari kalangan milenial dan Gen Z yang sudah terbiasa berjejaring dengan teknologi dan media sosial.

Ragam Dakwah Digital Generasi Muda NU

Media sosial bukan benda mati yang pasif tetapi perangkat aktif dalam produksi makna dan perang ideologi. Media sosial juga menjadi alat untuk menyebarkan ideologi keagamaan selain sebagai lahan untuk memeroleh keuntungan bisnis. Beberapa channel Dakwah di Youtube dan Instagram menunjukkan bukti betapa dakwah di era digital ini semakin menunjukkan aspek individualisme dan wajah agama yang lebih emosional. Amr Khaled menyebutkan bahwa perkembangan baru Islam di dunia digital lebih banyak didominasi oleh generasi muda Islam yang jauh lebih mumpuni dibidang bisnis daripada pengetahuan agama itu sendiri.[5]

Aktivitas dakwah pada masa ini sudah lazim disyiarkan secara online. Hal ini semakin memperkuat legitimasi dakwah digital dan mendorong muslim tradisional (kyai-santri) harus mengubah model gerakan dakwahnya. Sebagaimana umumnya, para dai menyampaikan materi dakwah sesuai dengan kapasitas, latar belakang dan paham keagamaan mereka. Menguatnya dakwah digital justru semakin memperjelas afiliasi, pola pikir dan paham keagamaan yang disampaikan para dai selama ini. Mereka (dai) membahas topik tertentu yang dikaitkan fenomena yang sedang viral dengan berbagai perspektif yang beragam.[6]

---

5 Risdiana, Ramadhan, and Nawawi, "Transformasi Dakwah Berbasis 'Kitab Kuning' Ke Platform Digital."

6 Achmad Fairozi, "Digitalisasi Dakwah ; Upaya Meningkatkan Daya Saing Islam Ramah di Era Pandemi Digitizing Da'Wah ; Efforts to Increase the

Beberapa akun Youtube para pendakwah NU

AIS Nusantara

Kegiatan virtual tidak dapat terhindarkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini. Bagi kalangan santri yang dikenal tradisional nyatanya mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dakwah. Arus Informasi Santri Nusantara (AIS Nusantara) hadir di tengah arus digitalisasi dalam rangka mewarnai jagad media sosial dengan menyuguhkan dakwah ala santri dan menyampaikan Islam ramah ala santri. Ada beberapa portal

Competitiveness of Cordial Islam in the Pandemic Era" 13, no. 2 (2020).

website media sosial dan yang digawangi oleh anggota AIS Nusantara, di antaranya instagram, facebook, twitter, telegram, whatsapp, line, dan instan messanger yang sedang berkembang saat ini.[7]
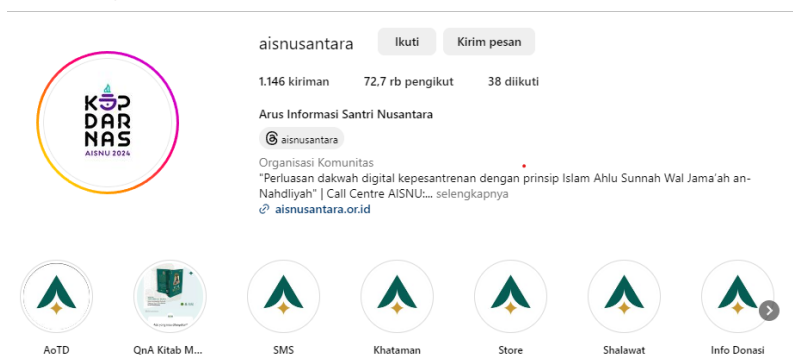
Akun AIS Nusantara di Instagram Sumber: @aisnusantara

Peluang dakwah digital ini telah dibaca oleh Arus Informasi Santri Nusantara (AIS Nusantara) yang merupakan komunitas digital atau komunitas virtual yang menjadi wadah berkumpulnya para pegiat dakwah digital dari kalangan santri untuk mendiskusikan konten dan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan dengan sentuhan khas pesantren, serta narasi Islam damai. Kegiatannya menggunakan media sosial sebagai media dakwah dengan sasaran generasi milenial. Keanggotannya dimotori oleh santri yang aktif di dunia virtual ataupun pegiat media sosial baik santri yang masih menetap di pesantren ataupun santri yang sudah keluar atau alumni pesantren. Dakwah digital yang dilakukan oleh AIS Nusantara ini menciptakan pandangan baru dalam memanfaatkan media baru untuk berdakwah. Komunitas dakwah digital ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti karena secara harfiah bisa dikatakan sebagai komunitas dunia yang semu, karena hidup di dunia maya. Apalagi komunitas virtual tersebut membawa misi dakwah dari pesantren yang selama ini cenderung dilakukan secara konvensional dan oleh orang yang lebih tua. Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, komunitas virtual semacam ini pada akhirnya bisa diperhitungkan di masyarakat, dan dapat menunjukkan eksistensinya khususnya di

7 Athik Hidayatul Ummah, "Dakwah Digital Dan Generasi Milenial," *Tasâmuh* 18 (2020): 54–78.

kalangan santri dan pesantren. [8]

Dengan visi digitalisasi dakwah pondok pesantren, berdirinya AIS Nusantara bertujuan untuk mengisi ruang kekosongan pada medan dakwah sosial media. Konten keagamaan yang AIS Nusantara tawarkan disesuaikan untuk warganet usia muda (milenial). Penyajian informasi juga dibuat lebih variatif dengan menggunakan ragam format yang lebih eye-catching dan modern. AIS berupaya untuk mampu menyediakan narasi penyeimbang radikalisme dan pemahaman keagamaan yang ekstrim di media sosial. Ini selaras dengan misi AIS Nusantara yaitu: (1) menyajikan referensi ibadah ala aswaja, (2) menyajikan konten yang sejuk dan rahmatan lil alamiin, (3) menjadi pusat informasi dan silaturrahmi santri dan pesantren di seluruh Indonesia, (4) mendorong pesantren di seluruh nusantara memiliki akun media sosial sebagai pusat dakwah dan komunikasi pesantren. Ide komunitas virtua lini berawal dari perhatian seorang santri akan media sosial ala santri yang memiliki banyak penggemar (netizen) di instagram yang antusias dan penasaran dengan cerita tentang santri dan pesantren. Hingga bermunculan akun instagram dari pesantren yang diinisiasi oleh santri dan alumni untuk berbagi cerita seputar dunia pesantren. Banyak akun santri dengan gaya dan ciri khas masing-masing seperti akun @galerisnatri, @alasantri, @ santrikeren @cahpondok, dan lain sebagainya. [9]

Para admin santri kemudian berkumpul melalui group Whatsapp pada tanggal 3 April 2016 sekaligus menjadi awal terbentuknya komunitas ini. Pada tanggal 26 Oktober 2016 di Yogyakarta, sekitar 50 admin sosial media berkumpul dan sepakat meresmikan sebuah wadah digital dengan nama AIS, yang pada saat itu memiliki kepanjangan Admin Instagram Santri (AIS). Tujuannya adalah sebagai wadah silaturrahmi antar admin dan sharing seputar cara mengelola media sosial. Lalu, pada Kopdarnas (Kopi Darat Nasional) ke-2 AIS Nusantara pada bulan April 2017 di Pondok Pesantren Sabilurrasyad Malang Jawa Timur, kepanjangan AIS Nusantara berubah menjadi Arus Informasi Santri Nusantara.

---

8 Muhammad Rizal Firdaus, "Peran Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara Dalam Implementasi Moderasi Beragama Di Media Sosial," *Journal of Islamic Management* 3, no. 1 (2023): 48–65.

9 Mohamad Abdul Hanif and Nur Azka Inayatussahara, "Transformation of Santri Challenging the Millennial Era: A Case Study of AIS Nusantara Community," in *Ushuluddin International Conference (USICON)*, vol. 2, 2018.

Hal itu dikarenakan semakin banyak anggota yang bukan saja admin instagram, melainkan aktivis di media sosial lain seperti: facebook, twitter, youtube, fanspage, hingga admin situs web pesantren.[10]

Kepanjangan nama baru ini menjadi spirit baru agar komunitas ini mampu menjadi arus besar yang mengalirkan berbagai informasi keislaman yang ramah dan cinta damai, khususnya informasi dunia pesantren dan santri. AIS Nusantara mengusung tagline dengan Indonesia Lebih Nyantri. Tagar tersebut bertujuan agar khalayak lebih mengenal seluk beluk kehidupan santri dan pondok pesantren. Pada akhirnya masyarakat (terutama generasi muda) banyak yang berniat belajar "nyantri" di pondok pesantren. Sehingga ke depan generasi Indonesia memiliki latar belakang santri atau background pendidikan pondok pesantren. Tidak hanya membangun narasi Islam melalui tagar dan video, AIS Nusantara juga mengunggah meme, foto, gambar, dan kata-kata yang mengandung dakwah atau pengetahuan agama Islam ala Ahlussunnah wal Jamaan An-Nahdliyah dan dibumbui dengan humor yang menjadi khasnya. Komunitas virtual ini digandrungi oleh para santri milenial. "Ngaji Sosmed" yang dilakukan di berbagai daerah semakin meningkatkan semangat santri untuk melek teknologi dan berdakwah digital. Namun di sisi lain, masih ada tantangan yang dihadapi, di antaranya masih ada beberapa pesantren yang membatasi diri dari dunia digital. Padahal menyebarkan dakwah melalui dunia virtual saat ini menjadi solusi yang tepat.[11]

SDC (Santri Design Community)

Konsep desain komunikasi visual adalah salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mendesain dakwah yang kreatif dan menarik. Konsep ini juga menawarkan strategi alternatif untuk memvisualkan secara digital praktik atau aktivitas dakwah yang dilakukan secara tradisional ataupun konvensional. Artinya para da'i tidak perlu meninggalkan cara lama dalam berdakwah, hanya perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pendekatan komunikasi

---

10 Syahputra, "Jihad Santri Millennial Melawan Radikalisme Di Era Digital: Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara Di Media Sosial."

11 Hanif and Inayatussahara, "Transformation of Santri Challenging the Millennial Era: A Case Study of AIS Nusantara Community"; Abdulloh Hamid and Santi Andriyani, "Digital Literasi Santri Milenial; Studi Kasus Admin Instagram Santri (Ais) Nusantara," *Membangun Masyarakat Kampus Yang Berpaham Ahlussunnah Waljamaah*, n.d., 29.

visual. Jika selama ini para da'i hanya menjadi penonton dan penyimak berbagai dakwah yang ada di media sosial, maka kini para da'i harus bisa terlibat langsung sebagai konten kreator yang aktif mempublikasikan dakwahnya di media sosial.[12]

Diantara komunitas santri yang aktif mengemas dakwah digital dalam bentuk konten kreatif melalui poster dakwah adalah Santri Design Community (SDC). SDC merupakan sebuah komunitas inovatif yang menjembatani dunia santri dengan industri kreatif modern. Didirikan oleh sekelompok santri yang memiliki passion di bidang desain, SDC telah berkembang menjadi wadah pengembangan bakat dan kreativitas bagi generasi muda NU di seluruh Indonesia. Komunitas ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis seperti desain grafis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai religius dalam setiap karyanya. Melalui berbagai kegiatan seperti madrasah desain, dan workshop, SDC berhasil membuktikan bahwa para santri mampu bersaing dalam industri kreatif tanpa meninggalkan akar budaya dan spiritualnya.[13]

Logo SDC (Santri Design Community) Sumber: https://www.facebook.com/santridesign.sdc

Kiprah SDC dalam industri kreatif dan masyarakat telah memberikan dampak yang signifikan. Komunitas ini aktif mengikuti kompetisi desain baik tingkat regional maupun nasional, sekaligus

12 Ari Wibowo, "Digitalisasi Dakwah Di Media Sosial Berbasis Desain Komunikasi Visual" Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 02, No. 02 (2020): 179–98.

13 Muhammad Mu'ti Nuril Fahmi, "Karya Desain Komunikasi Visual Sebagai Penyampai Pesan Dakwah (Analisis Semiotika Konten Instagram Santri Design Community)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

menjalin kerjasama dengan beragam ahli desain profesional untuk program magang. SDC juga terlibat dalam berbagai aktivitas dakwah, seperti merancang materi visual untuk event dakwah. Inovasi teknologi tidak luput dari perhatian SDC, dengan upaya pengembangan aplikasi mobile dan eksplorasi teknologi AR/VR untuk edukasi Islam. Melalui publikasi, pengelolaan kanal YouTube, dan partisipasi dalam diskusi publik, SDC terus mempromosikan pentingnya peran santri dalam kreatifitas dakwah digital termasuk dalam bentuk Meme Dakwah.[14]

Fenomena meme merupakan proses penyampaian pesan dalam bentuk baru. Meme adalah gambar atau foto yang diberi teks atau bahasa, sehingga menghasilkan suatu makna baru. Gambar yang ada dalam meme menuturkan kisahnya, lalu diinterpretasikan oleh pengguna lainnya. Meme muncul karena fenomena meme merupakan proses penyampaian pesan dalam bentuk baru. Meme adalah gambar atau foto yang diberi teks atau bahasa, sehingga menghasilkan suatu makna baru. Gambar yang ada dalam meme menuturkan kisahnya, lalu diinterpretasikan oleh pengguna lainnya. Meme muncul karena ingin menyampaikan pesan melalui bentuk yang baru dengan menggabungkan komunikasi nonverbal (ekspresi) dan komunikasi verbal (bahasa), sehingga menghasilkan suatu makna atau pesan. Menurut Bauckhage (2011), meme biasanya berkembang melalui komentar, imitasi, parody, atau bahkan hasil pemberitaan di media. Sementara menurut Shifman (2013), pada umumnya frasa meme diterapkan untuk menggambarkan propagasi pada konten seperti humor, rumor, video, atau dari situs web satu orang ke lainnya melalui internet. Meme bisa menyebar dalam bentuk aslinya, namun juga bisa turunan atau pembaruan.[15]

Santri Design Community (SDC) telah memainkan peran penting dalam mengembangkan dakwah digital melalui kreasi poster dakwah yang disebarkan di berbagai platform media sosial. Dengan memadukan keahlian desain grafis dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, SDC berhasil menciptakan konten visual yang menarik dan bermakna untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada audiens yang lebih luas, khususnya generasi

---

14 Wildan Kholid Syaifuddin, "Strategi Branding Instagram@ Santri Design Community Sebagai Brand Awareness" (IAIN Ponorogo, 2022).

15 Ummah, "Dakwah Digital Dan Generasi Milenial."

muda yang akrab dengan dunia digital.[16]

Poster-poster dakwah yang dihasilkan oleh SDC tidak hanya estetis secara visual, tetapi juga kaya akan substansi. Mereka berhasil mengemas ajaran-ajaran Islam, hadits, dan nilai-nilai moral dalam format yang mudah dicerna dan share-able di platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Desain yang eye-catching, pemilihan warna yang harmonis, serta tipografi yang menarik menjadi ciri khas poster dakwah SDC, membuatnya mudah dikenali dan diminati oleh netizen. SDC juga memanfaatkan momen-momen penting dalam kalender Islam untuk menciptakan seri poster dakwah tematik. Misalnya, selama bulan Ramadhan, mereka memproduksi poster harian yang berisi motivasi puasa, anjuran berbuat baik, dan penjelasan singkat tentang ibadah-ibadah khusus di bulan suci. Hal ini membantu memperkuat semangat beribadah umat Muslim sekaligus memberikan edukasi agama yang mudah diakses. [17]

Dalam upaya memperluas jangkauan dakwah digital, SDC aktif berkolaborasi dengan influencer Muslim dan organisasi dakwah lainnya. Mereka menyediakan desain poster yang dapat digunakan secara gratis oleh para dai dan aktivis sosial media, sehingga pesan-pesan positif dapat tersebar lebih luas. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan visibilitas konten dakwah di tengah arus informasi yang begitu deras di media sosial.[18]

SDC juga membuka kesempatan bagi anggotanya untuk mengasah kreativitas melalui kompetisi desain poster dakwah internal. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas output, tetapi juga memastikan variasi tema dan gaya visual yang dapat menjangkau berbagai segmen audiens. Poster-poster terbaik kemudian dikurasi dan dijadwalkan untuk diunggah secara reguler, memastikan konsistensi dalam penyebaran pesan dakwah.[19]

Dampak dari upaya SDC dalam dakwah digital melalui poster ini cukup signifikan. Mereka berhasil menciptakan tren positif di

16 Ummah.

17 Asna Istya Marwantika, “The Rise of New Santri on Instagram@ Santridesign: Community Branding and Mainstreaming of Moderate Da’wah,” *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian Dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2022): 14–26.

18 Syaifuddin, “Strategi Branding Instagram@ Santri Design Community Sebagai Brand Awareness.”

19 Marwantika, “The Rise of New Santri on Instagram@ Santridesign: Community Branding and Mainstreaming of Moderate Da’wah.”

kalangan anak muda Muslim untuk berbagi konten keagamaan yang informatif dan estetis. Banyak pengguna media sosial yang menjadikan poster-poster SDC sebagai bahan renungan harian atau materi diskusi dalam kelompok-kelompok kajian online. Meskipun fokus utama adalah pada produksi poster, SDC juga mulai mengeksplorasi format visual lainnya seperti infografis, motion graphics, dan video pendek untuk memperkaya konten dakwah digital mereka. Mereka terus berinovasi dalam menyajikan ajaran Islam dengan cara yang relevan dan menarik bagi generasi digital, sambil tetap mempertahankan keotentikan dan kedalaman pesan yang disampaikan.[20]

Podcast Youtube Pesantren

Memahami objek dakwah sangat penting di era digital saat ini, karena tipe audiens itu sangat beragam. Mereka juga bersifat aktif dan saling berhubungan karena adanya jaringan internet. Pendengar Podcast didominasi oleh generasi milenial, yaitu 42,12% dengan kisaran usia 20-25 tahun, 25,52% usia 26-29 dan 15,9% udia 30-35 tahun. Artinya, generasi milenial memegang peranan penting dalam dunia konten baik audio maupun video. Hal ini dikarenakan generasi milenial memiliki karakteristik yang akrab dengan media dan teknologi digital serta cenderung menyukai hal-hal yang baru.[21]

Salah satu Pondok Pesantren yang melakukan inovasi dakwah gaya baru adalah Pondok pesantren Lirboyo. Pesantren ini menggunakan Podcast Youtube untuk menyiarkan dakwah melalui studio LIM Production. Hal ini dilakukan untuk mempercepat langkah dakwah pesantren masuk ke ranah digital. Di sisi lain, podcast tersebut sekaligus sebagai respon para santri menjawab tudingan minor masyarakat, yaitu anggapan bahwa santri itu gaptek alias gagap teknologi. Dakwah melalui Podcast Youtube dipilih karena generasi muda saat ini selalu membawa gawai (handphone) dan terdapat aplikasi Youtube. Format Podcast dipilih karena bisa dua arah dan lebih interaktif. Mereka juga bisa mendatangkan narasumber dengan

20 Dawam M Rohmatulloh, "Digital Santri: The Traditionalist Response to the Religious Populism Wave in Indonesian Islam," in *The Twelfth International Convention of Asia Scholars (ICAS 12)*, vol. 1 (Amsterdam University Press, 2022), 601–8.

21 A H Ummah, M K Khatoni, and ..., "Podcast Sebagai Strategi Dakwah Di Era Digital: Analisis Peluang Dan Tantangan," *Komunike* XII, no. 2 (2020): 210–34, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunike/article/view/2739.

berbagai kompetensi.[22]

Medium yang digunakan untuk mendiseminasikan konten Podcast sangat beragam, diantaranya: Anchor, Spotify, Gooogle Podcast, Apple Podcast, Overcast, Inspigo, dan lain sebagainya. Berbagai platform ini dapat saling terhubung, sehingga kreator Podcast (podcaster) atau da'i bisa mengunggah di salah satu platform, kemudian audiens dapat mengaksesnya diberbagai platform lain yang tersedia. Besarnya penikmat konten audio saja maupun audio-visual baik offline maupun online, memberikan peluang yang besar kepada platform digital dalam mendiseminasikan Podcast-nya di Indonesia. Popularitas dari fasilitas mendengarkan ulang dalam platform digital berbasis audio telah membuktikan bahwa kebutuhan akan konten audio masih cukup besar. Saat ini, fenomena yang tengah marak adalah Podcast tidak hanya diproduksi dalam bentuk audio, namun juga berbentuk video yang kemudian dipublikasikan melalui akun Instagram maupun Youtube.[23]

Tantangan dan Potensi Digitalisasi Dakwah NU

Berdasarkan fakta literatur dan sosial terdapat beberapa aspek yang menjelaskan mengapa digitalisasi dakwah NU belum mampu sepenuhnya bersaing dengan kelompok Islamis lainnya diantaranya keterlambatan adopsi teknologi. Para pendakwah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama cukup terlambat menyikapi era digital, jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam lainnya yang mengoptimalkan sosial media sebagai sarana dakwah. Keterlambatan ini memberikan keuntungan awal bagi kelompok lain untuk membangun basis pengikut yang lebih besar dan mengembangkan strategi digital yang lebih matang. Selain itu resistensi terhadap perubahan. Disadari atau tidak masih ada beberapa pesantren yang membatasi diri dari dunia digital. Sikap konservatif ini dapat menghambat adopsi teknologi dan metode dakwah digital di kalangan NU, terutama di pesantren-pesantren tradisional yang menjadi basis kaderisasi NU. Aspek lainnya yakni fokus pada dakwah konvensional. Tradisi dakwah NU yang kuat dalam bentuk pengajian tatap muka, majelis taklim, dan kegiatan pesantren membuat

---

22 A H Ummah, M K Khatoni, and ..., "Podcast Sebagai Strategi Dakwah di Era Digital: Analisis Peluang Dan Tantangan," Komunike XII, no. 2 (2020): 210–34, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunike/article/view/2739.

23 Ummah, Khatoni, and ...

sebagian tokoh dan lembaga NU lebih lambat dalam mengalihkan fokus ke platform digital.[24]

Disatu sisi kurangnya infrastruktur dan pelatihan dalam membuat konten dakwah digital di platform media sosial. Meskipun ada inisiatif seperti AIS Nusantara dan SDC tetapi masih belum terstruktur masif dan menunjukkan kurangnya infrastruktur teknologi dan pelatihan sistematis untuk para dai dan aktivis NU dalam mengoptimalkan platform digital. Begitu juga dengan konten yang dihasilkan cenderung kurang menarik karena kebanyakan mendaringkan kegiatan dakwah luring. Hal ini juga mendorong SDC dibentuk karena kegelisahan melihat desain media dakwah (brosur, pamphlet, meme, spanduk dan sejenisnya) di NU yang kurang menarik. Hal ini menunjukkan bahwa konten dakwah NU belum sepenuhnya dikemas dengan cara yang menarik bagi audiens digital, terutama generasi muda. Meskipun ada berbagai inisiatif seperti AIS Nusantara, SDC, dan podcast dari pesantren seperti Lirboyo, upaya-upaya ini masih terfragmentasi dan belum terkoordinasi secara optimal di tingkat organisasi NU secara keseluruhan.

Disisi lain, Kelompok Islamis lain lebih agresif dalam memanfaatkan algoritma media sosial dan strategi viral marketing untuk memperluas jangkauan mereka, sementara dakwah digital NU lebih fokus pada kualitas konten daripada viralitas. Apalagi jika dikomparasi dengan perbedaan pendekatan konten. Dakwah NU yang cenderung moderat dan kontekstual dirasa masih kurang "menggigit" dibandingkan dengan pesan-pesan yang lebih tegas atau kontroversial dari kelompok Islamis lain, yang terkadang lebih mudah menarik perhatian di media sosial. Selain itu, meskipun NU adalah organisasi besar, alokasi sumber daya untuk dakwah digital belum sebanding dengan potensi dan kebutuhan yang ada, terutama jika dibandingkan dengan investasi kelompok Islamis lain dalam platform digital mereka. Strategi dakwah digital yang terpadu di tingkat organisasi NU juga belum terstruktur. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang ada masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam visi besar dakwah digital NU. Hal ini perlu adanya kesadaran dan upaya-upaya positif dari generasi muda NU untuk meningkatkan *presence* digital mereka. Inisiatif seperti AIS Nusantara

24 Harry Purwanto and Achmad Arifulin Nuha, "Post Dakwah Di Era Cyber Culture," *DAKWATUNA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2020): 1–28.

dan SDC menunjukkan potensi besar untuk pengembangan dakwah digital NU di masa depan. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan dan memperkuat upaya-upaya ini agar dapat bersaing secara efektif dengan kelompok Islamis lainnya dalam lanskap dakwah digital.

Selain beberapa aspek tersebut, perlu diperhatikan bahwa kompleksitas pesan moderasi yang dibawa oleh NU juga dapat menjadi tantangan dalam kompetisi dakwah digital. Pesan-pesan moderat yang menekankan konteks, nuansa, dan pemikiran kritis lebih sulit dikemas dalam format digital yang cenderung singkat dan cepat dikonsumsi. Sementara itu, kelompok Islamis lain lebih mudah menarik perhatian dengan pesan-pesan yang lebih sederhana, tegas, dan kadang kontroversial. Hal ini menciptakan dilema bagi NU antara mempertahankan substansi ajaran moderat atau mengadaptasi pesan agar lebih "catchy" di media sosial. Unsur lain yang perlu dipertimbangkan adalah perbedaan target audiens. NU, dengan basis tradisionalnya, lebih fokus pada mempertahankan dan melayani jamaah yang sudah ada, sementara kelompok Islamis lain lebih agresif dalam menargetkan audiens baru, terutama generasi muda yang belum memiliki afiliasi kuat. Strategi ini dapat mempengaruhi pendekatan dan konten dakwah digital yang dihasilkan.

NU memiliki struktur organisasi yang besar dan kompleks, dengan berbagai lembaga dan badan otonom. Koordinasi dan sinergi antar elemen dalam mengembangkan strategi dakwah digital yang koheren bisa jadi merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, kelompok Islamis yang lebih kecil dan terkonsentrasi dapat bergerak lebih lincah dan responsif terhadap tren digital. Meskipun demikian gerakan dakwah di media sosial dari berbagai elemen yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama juga menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya digitalisasi dakwah NU. Munculnya komunitas seperti AIS Nusantara dan SDC menandakan adanya kesadaran dan inisiatif dari generasi muda NU untuk mengambil peran aktif dalam dakwah digital. Inovasi seperti podcast dari Pondok Pesantren Lirboyo juga menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tradisional NU mulai beradaptasi dengan tren digital.

Tantangan ke depan bagi NU adalah bagaimana mengintegrasikan dan memperkuat inisiatif-inisiatif ini menjadi sebuah gerakan dakwah digital yang lebih terstruktur dan masif. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan literasi

digital di kalangan dai dan aktivis NU, mengembangkan konten yang menarik namun tetap substantif, serta membangun infrastruktur digital yang mendukung penyebaran pesan-pesan NU secara lebih luas dan efektif. Selain itu, NU perlu mempertimbangkan bagaimana memadukan kekuatan tradisionalnya dengan inovasi digital. Misalnya, bagaimana menghadirkan kharisma dan kebijaksanaan kyai-kyai NU dalam format yang menarik bagi generasi digital, atau bagaimana mentransformasikan tradisi bahtsul masail menjadi forum diskusi online yang interaktif dan relevan bagi isu-isu kontemporer.

Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi dakwah NU akan bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan lanskap media digital yang terus berubah, sambil tetap mempertahankan esensi ajaran dan nilai-nilai NU. Dengan basis massa yang besar dan kekayaan intelektual yang dimiliki, NU memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dominan dalam dakwah digital. Yang diperlukan adalah visi yang jelas, strategi yang tepat, dan komitmen untuk terus berinovasi dalam menyebarkan pesan-pesan Islam moderat di era digital.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi dakwah Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam upayanya bersaing dengan kelompok Islamis lainnya di era media sosial. Keterlambatan adopsi teknologi, resistensi terhadap perubahan di beberapa pesantren tradisional, fokus yang masih kuat pada metode dakwah konvensional, serta kurangnya infrastruktur dan pelatihan digital yang memadai menjadi hambatan utama. Kompleksitas pesan moderasi yang diusung NU juga menjadi tantangan tersendiri, karena lebih sulit dikemas dalam format digital yang cenderung singkat dan cepat dikonsumsi. Meskipun demikian, munculnya inisiatif seperti Arus Informasi Santri (AIS) Nusantara dan Santri Design Community (SDC) menunjukkan adanya potensi besar dan kesadaran di kalangan generasi muda NU untuk mengambil peran aktif dalam dakwah digital.

Untuk menjawab tantangan ini dan memanfaatkan potensi yang ada, NU perlu mengembangkan strategi komprehensif dalam digitalisasi dakwahnya. Ini mencakup peningkatan literasi digital di kalangan dai dan aktivis, pengembangan konten yang menarik namun tetap substantif, serta pembangunan infrastruktur digital

yang mendukung penyebaran pesan-pesan NU secara lebih luas dan efektif. NU juga perlu mempertimbangkan cara memadukan kekuatan tradisionalnya dengan inovasi digital, seperti menghadirkan kharisma kyai-kyai NU dalam format yang menarik bagi generasi digital atau mentransformasikan tradisi bahtsul masail menjadi forum diskusi online yang interaktif. Dengan basis massa yang besar dan kekayaan intelektual yang dimiliki, NU memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dominan dalam dakwah digital. Keberhasilan upaya ini akan bergantung pada kemampuan NU untuk beradaptasi dengan lanskap media digital yang terus berubah, sambil tetap mempertahankan esensi ajaran dan nilai-nilai moderatnya. Dengan visi yang jelas, strategi yang tepat, dan komitmen untuk terus berinovasi, NU dapat memperkuat perannya dalam menyebarkan pesan-pesan Islam moderat di era digital, sekaligus menjawab tantangan radikalisme online.

Referensi

Bimbingan, Jurnal, and Penyuluhan Islam. “| 179 Digitalisasi Dakwah Di Media Sosial Berbasis Desain Komunikasi VisuaL Ari Wibowo” 02, no. 02 (2020): 179–98.

Fahmi, Muhammad Mu’ti Nuril. “Karya Desain Komunikasi Visual Sebagai Penyampai Pesan Dakwah (Analisis Semiotika Konten Instagram Santri Design Community).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Fairozi, Achmad. “Digitalisasi Dakwah ; Upaya Meningkatkan Daya Saing Islam Ramah Di Era Pandemi Digitizing Da ’ Wah ; Efforts to Increase the Competitiveness of Cordial Islam in the Pandemic Era” 13, no. 2 (2020).

Firdaus, Muhammad Rizal. “Peran Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara Dalam Implementasi Moderasi Beragama Di Media Sosial.” *Journal of Islamic Management* 3, no. 1 (2023): 48–65.

Fridiyanto, M. Kholis Amrullah, and Muhammad Rafi’i. “Digitalisasi Nahdlatul Ulama : Dari Laku Tradisional Menuju Revolusi Digital.” *AD-DHUHA : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2020).

Hamid, Abdulloh, and Santi Andriyani. “Digital Literasi Santri Milenial; Studi Kasus Admin Instagram Santri (AIS) Nusantara.” *Membangun Masyarakat Kampus Yang Berpaham Ahlussunnah Waljamaah*, n.d., 29.

Hanif, Mohamad Abdul, and Nur Azka Inayatussahara. “Transformation of Santri Challenging the Millennial Era: A Case Study of AIS Nusantara Community.” In *Ushuluddin International Conference (USICON)*, Vol. 2, 2018.

Marwantika, Asna Istya. “The Rise of New Santri on Instagram@ Santridesign: Community Branding and Mainstreaming of Moderate Da’wah.” *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian Dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2022): 14–26.

Purwanto, Harry, and Achmad Arifulin Nuha. “Post Dakwah Di Era Cyber Culture.” *DAKWATUNA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2020): 1–28.

Risdiana, Aris, Reza Bakhtiar Ramadhan, and Imam Nawawi. “Transformasi Dakwah Berbasis ‘Kitab Kuning’ Ke Platform Digital.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 1–28. https://

doi.org/10.31291/jlk.v18i1.682.
Rohmatulloh, Dawam M. "Digital Santri: The Traditionalist Response to the Religious Populism Wave in Indonesian Islam." In *The Twelfth International Convention of Asia Scholars (ICAS 12)*, 1:601–8. Amsterdam University Press, 2022.
Syahputra, Muhammad Candra. "Jihad Santri Millennial Melawan Radikalisme Di Era Digital: Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara Di Media Sosial." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 69–80. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.187.
Syaifuddin, Wildan Kholid. "Strategi Branding Instagram@ Santri Design Community Sebagai Brand Awareness." IAIN Ponorogo, 2022.
Ummah, A H, M K Khatoni, and ... "Podcast Sebagai Strategi Dakwah Di Era Digital: Analisis Peluang Dan Tantangan." *Komunike* XII, no. 2 (2020): 210–34. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunike/article/view/2739.
Ummah, Athik Hidayatul. "Dakwah Digital Dan Generasi Milenial." *Tasâmuh* 18 (2020): 54–78.

Sirkulasi Digital: Transformasi Kultur warga NU pada Era Teknologi

Noval Setiawan

Pada era globalisasi serta teknologi digital yang terus berkembang pesat, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi serta sosial, tetapi juga sangat signifikan pada bidang kultural. Fenomena tersebut tidak terkecuali bagi warga Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar pada Indonesia yang mempunyai pengaruh yang luas dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakatnya. Menarik untuk menyelidiki bagaimana transformasi kultur rakyat NU terjadi di era digital, menggali akibat-dampaknya dan respon yang timbul pada menghadapi perubahan. Pada era yang semakin terdigitalisasi ini, teknologi sudah mengubah tidak hanya cara kita berkomunikasi dan bekerja, namun pula bagaimana nilai-nilai kultural serta agama tersebar serta diterima oleh warga .[25] Hal ini tidak terkecuali bagi Nahdlatul Ulama (NU), yg mempunyai imbas yang signifikan pada kehidupan keagamaan, sosial, dan politik pada negara Indonesia. Transformasi tidak hanya meliputi penggunaan teknologi untuk berbagi ajaran kepercayaan , tetapi pula dampaknya terhadap identitas kultural dan praktik keagamaan yang diyakini oleh jutaan anggota NU di seluruh Indonesia.

NU didirikan di tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan misi utama buat memperkuat pendidikan kepercayaan Islam yang moderat dan toleran pada Indonesia. Sejak itu, NU telah menjadi simbol perlawanan terhadap radikalisme kepercayaan dan menjadi pembela pluralisme pada negeri ini. Nilai-nilai keagamaan NU yang berakar pada tradisi pesantren serta ajaran Asy'ariyah sudah menjadi bagian integral berasal identitas kultural mereka. namun, menggunakan masuknya era digital, cara-cara ini berubah. Penggunaan teknologi digital dalam menyebarkan ajaran kepercayaan sudah membuka peluang baru bagi NU buat mencapai audiens yg lebih luas dan majemuk. media umum, situs web, serta platform digital lainnya telah menjadi sarana efektif buat menyampaikan ceramah, diskusi keagamaan, dan pemikiran

25 Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000).

intelektual dari para ulama NU pada jutaan pengguna di semua dunia.[26] Tidak hanya mempertinggi jangkauan pesan keagamaan saja, tetapi juga meningkatkan kecepatan aliran dan adopsi nilai-nilai keagamaan pada antara generasi muda yg terbiasa dengan teknologi.

Akan tetapi, pada kembali kegunaannya, era digital juga menimbulkan tantangan serius bagi NU. salah satu tantangan utamanya ialah bagaimana menjaga keutuhan dan keaslian nilai-nilai tradisional mereka dalam menghadapi arus berita yang begitu cepat dan terkadang tak terfilter. Teknologi memungkinkan tersebarnya pemikiran-pemikiran yang berpotensi bertentangan dengan ajaran orisinil NU, sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dalam menyaring serta menafsirkan berita yang disampaikan melalui platform digital. Dalam konteks ini, maka pentingnya kita mempelajari secara mendalam bagaimana aliran digital sudah mengubah dan terus mengganti kultur rakyat NU. Melalui studi masalah, analisis, serta diskusi mendalam, kita akan menjelajahi berbagai aspek perubahan dan respon yg diambil oleh warga NU dalam menghadapi era teknologi yang terus berkembang. Hal ini tidak hanya bertujuan buat memberikan gambaran luas wacana transformasi kultural yang sedang terjadi, namun juga buat menggali akibat asal perubahan ini bagi warga NU serta Indonesia secara lebih luas.

Konteks Sejarah serta ciri-ciri NU

Menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki sejarah panjang yang kaya akan tradisi keagamaan serta kultural. Nilai-nilai keagamaan utamanya, dan bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam kultur masyarakat NU. Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar pada Indonesia yang didirikan pada tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari. NU lahir menjadi respons terhadap situasi sosial dan politik yang kacau di Indonesia pada masa itu, pada mana Islam seringkali digunakan menjadi indera politik buat mencapai tujuan-tujuan yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. KH. Hasyim Asy'ari, beserta dengan tokoh-tokoh lainnya, mendirikan NU dengan tujuan primer buat memperjuangkan Islam yg moderat, toleran, serta inklusif, yang menghargai keberagaman serta mempromosikan perdamaian

26 Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982).

pada rakyat. semenjak awal berdirinya, NU telah menempatkan pendidikan kepercayaan menjadi salah satu pilar utama pada ajaran dan aktivitasnya. Pesantren, menjadi lembaga pendidikan tradisional Islam, menjadi basis utama dari kegiatan NU dalam mengembangkan serta mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Tradisi pesantren ini bukan hanya menjadi daerah pendidikan formal, namun juga sebagai pusat kehidupan spiritual dan intelektual bagi para santri dan komunitas sekitarnya.[27]

Identitas NU pula sangat ditentukan pada ajaran Asy'ariyah, sebuah peredaran teologi yang menekankan pemahaman yang rasional dan moderat terhadap Islam. Pemikiran Asy'ariyah menegaskan pentingnya logika dalam tahu agama dan menyeimbangkan antara nalar, wahyu, dan tradisi keagamaan. Nilai-nilai ini tidak hanya menghasilkan landasan teologis NU, tetapi pula menghipnotis sikap sosial dan politik mereka, yang cenderung moderat serta inklusif. Menjadi organisasi yang tumbuh pesat pada masa kolonial serta pasca-kemerdekaan Indonesia, NU pula sebagai kekuatan politik yang signifikan. Mereka tidak hanya aktif pada memperjuangkan kemerdekaan Indonesia asal penjajahan, tetapi pula memiliki kiprah krusial dalam membentuk landasan demokrasi dan pluralisme di negara ini selesainya merdeka. Keterlibatan politik NU sering diarahkan buat mempertahankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan warga .

Di tengah dinamika sejarah dan perkembangan politik di Indonesia, NU juga sudah menghadapi berbagai tantangan serta transformasi. Asal masa kolonial hingga zaman globalisasi waktu ini, NU terus beradaptasi dengan perubahan zaman sembari mempertahankan inti nilai-nilai keagamaan serta kulturalnya. Sejarah panjang NU yang kaya dan kiprah mereka dalam menghasilkan identitas keagamaan dan sosial pada Indonesia membentuk mereka menjadi sosok sentral pada diskusi wacana Islam moderat serta peran kepercayaan pada rakyat modern.

Era Digital dan Perubahan Sosial

Teknologi digital telah membawa perubahan sosial yang signifikan di seluruh dunia. Bagaimana hal ini mempengaruhi masyarakat NU, seperti akses terhadap informasi, interaksi sosial, dan

---

27 Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung, 1987).

dinamika dalam penyampaian pesan keagamaan. Era virtual telah menghadirkan perubahan sosial yang signifikan bagi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan politik. Teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mengubah cara NU berinteraksi, menyebarkan ajaran agama, dan mempertahankan identitas kultural mereka di tengah arus globalisasi dan modernisasi.[28]

Pertama-tama, akses mudah dan luas terhadap informasi melalui net dan media sosial telah mengubah cara NU memperoleh pengetahuan agama dan memperdalam pemahaman keagamaan. Ulama NU dapat menggunakan platform virtual untuk menyebarkan ceramah, kajian agama, dan fatwa secara lebih efisien kepada jamaah mereka di seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan pesan keagamaan, tetapi juga memfasilitasi dialog antara pemimpin agama dan umat, yang memungkinkan pertukaran ide dan interpretasi agama yang lebih dinamis.

Namun, dengan kemudahan ini juga muncul tantangan baru, termasuk arus informasi yang tidak terfilter secara baik. NU dihadapkan pada tugas kritis untuk menafsirkan dan menilai kebenaran dari berbagai informasi yang tersebar luas di net, untuk memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan dan kultural yang mereka anut tetap terjaga. Peningkatan kritis dalam literasi virtual dan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan salah menjadi penting dalam era digital. Perubahan sosial juga terlihat dalam cara masyarakat NU berorganisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Media sosial telah memberikan platform untuk mobilisasi dan aktivisme sosial yang lebih efektif, memungkinkan NU untuk berperan aktif dalam isu-isu sosial dan politik yang relevan, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perdamaian. Ini mencerminkan peran NU sebagai agen perubahan yang berupaya mempertahankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan toleransi di tengah perubahan zaman.

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan juga memberikan NU kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di pesantren-pesantren mereka. Pelatihan

28 Hiroko Horikoshi, *Kyai Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987).

guru, kurikulum virtual, dan sumber daya pendidikan on line telah membantu dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan agama di seluruh jaringan pesantren NU, mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, generation virtual membawa tantangan dan peluang bagi masyarakat NU dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kultural mereka sambil beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Perlunya kita menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana NU merespons perubahan ini, mengelola tantangan yang ada, dan mengoptimalkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital untuk memperkuat identitas dan misi keagamaan mereka di masa depan.

Transformasi Media dan Penyebaran Pemikiran

Media sosial dan platform digital telah menjadi sarana utama dalam menyebarkan pemikiran dan nilai-nilai keagamaan. Munculnya media baru memengaruhi cara berkomunikasi dan memahami ajaran agama di kalangan warga NU. Peran media sosial dan platform digital dalam mempercepat sirkulasi dan adopsi nilai-nilai keagamaan. Transformasi media dalam era virtual telah mengubah paradigma penyebaran pemikiran dan ajaran agama di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), membawa dampak yang signifikan terhadap cara mereka mengakses, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan. Media baru seperti net, media sosial, dan platform digital lainnya telah menjadi sarana utama bagi NU dalam menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan memfasilitasi diskusi intelektual yang lebih luas di antara anggota komunitas mereka.

Sebelum generation virtual, NU mengandalkan saluran komunikasi tradisional seperti ceramah, majelis taklim, dan literatur cetak untuk menyampaikan ajaran Islam dan pemikiran keagamaan kepada jamaah mereka. Namun, dengan hadirnya internet dan media sosial, paradigma ini berubah secara drastis. Ulama dan pemimpin NU sekarang dapat menyampaikan ceramah dan kuliah keagamaan mereka secara langsung melalui platform video streaming atau menyebarkan tulisan-tulisan mereka melalui blog atau situs net resmi. Media sosial juga memberikan NU platform untuk berinteraksi secara langsung dengan jamaah mereka di seluruh dunia. Melalui

facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, NU dapat membangun komunitas yang lebih strong, berbagi pengalaman keagamaan, dan memperkuat solidaritas di antara anggota mereka yang tersebar geografis.[29] Diskusi keagamaan dapat dengan mudah dipraktikkan, dan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dapat dijawab dengan cepat oleh para ulama dan pengajar.[30]

Perubahan ini juga mempengaruhi dinamika di dalam pesantren-pesantren NU, yang merupakan pilar utama dalam pendidikan keagamaan dan moral. Pesantren sekarang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengajaran, menyediakan materi-materi pendidikan yang lebih terstruktur dan mudah diakses melalui platform daring, dan bahkan menyelenggarakan kelas-kelas jarak jauh untuk para santri yang berada di luar kota atau bahkan di luar negeri. Namun, meskipun berbagai manfaat yang ditawarkan oleh transformasi media ini, NU juga dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah keberadaan informasi yang tidak terverifikasi dan potensial merusak yang tersebar luas di net. NU harus bekerja keras untuk memfilter informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam moderat dan toleran yang mereka anut, serta untuk mengedukasi jamaah mereka tentang pentingnya kritis dalam menyikapi informasi yang mereka terima.

Dengan demikian, transformasi media dalam generation virtual telah membuka pintu untuk NU dalam memperluas pengaruh mereka dalam menyebarkan ajaran agama, memperkuat komunitas mereka, dan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia. Namun, sambil memanfaatkan peluang ini, NU juga harus tetap berhati-hati untuk mempertahankan nilai-nilai inti mereka dalam menghadapi tantangan dari perubahan teknologi yang begitu cepat dan dinamis ini.[31]

29 Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

30 Anthony Smith, 'Indonesia's New Order State: "Language as an Order and Progress" Regime,' *Third World Quarterly*, Vol. 23.No. 4 (2002), 613–31.

31 Abdul Gaffar Karim, *Islam, Civil Society, and Social Movements in Indonesia* (Jakarta: CSIS, 2012).

Tantangan dan Peluang bagi Kultur Tradisional NU

Dalam menghadapi generation virtual, masyarakat NU dihadapkan pada tantangan baru sekaligus peluang untuk memperkuat identitas dan nilai-nilai tradisional mereka, termasuk upaya untuk menjaga keutuhan budaya dan agama dalam generation teknologi yang serba cepat. Di tengah transformasi international yang didorong oleh teknologi virtual, masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang yang signifikan terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan kultur tradisional mereka. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki warisan kultural yang kaya, yang terutama berakar dalam nilai-nilai Islam moderat, tradisi pesantren, dan filosofi Asy'ariyah. Namun, era digital membawa dinamika baru yang mempengaruhi cara NU mempertahankan dan mentransformasi kulturnya sendiri.[32]

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh NU adalah pengaruh media sosial dan internet terhadap nilai-nilai tradisional mereka. Media sosial, meskipun memberikan platform yang luas untuk menyebarkan ajaran agama, juga membuka pintu bagi berbagai pemahaman agama yang beragam dan terkadang bertentangan. NU harus berjuang untuk mempertahankan interpretasi agama yang moderat dan toleran di tengah arus informasi yang begitu cepat dan terkadang tidak terfilter dengan baik. Selain itu, globalisasi juga memberikan tekanan terhadap kelestarian budaya tradisional. Generasi muda NU, yang lebih terhubung dengan teknologi dan gaya hidup international, mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan praktik-praktik tradisional seperti bahasa Arab, adat istiadat lokal, dan kegiatan keagamaan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal dan nearby. Keterampilan virtual yang semakin canggih juga mempengaruhi cara mereka mengakses dan menghargai warisan budaya ini.

Meskipun demikian, teknologi digital juga membawa peluang besar bagi NU dalam mempromosikan dan memperkuat kultur tradisional mereka. Penggunaan teknologi dalam pendidikan agama dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran di pesantren-pesantren NU. Guru dapat menggunakan platform digital untuk menyediakan materi-materi pendidikan yang terstruktur dan

32 Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994).

bermanfaat bagi santri, baik di dalam maupun di luar pesantren. Selain itu, media virtual juga memungkinkan NU untuk memperluas jangkauan pesan-pesan keagamaan mereka. Ceramah, khotbah Jumat, dan diskusi keagamaan dapat disiarkan secara langsung atau diunggah ke platform video, sehingga lebih mudah diakses oleh jamaah di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi antara ulama dan jamaah, tetapi juga memperkuat identitas keagamaan mereka dalam konteks globalisasi yang semakin terhubung.[33]

Secara keseluruhan, tantangan dan peluang dalam mempertahankan kultur tradisional NU di technology digital merupakan bagian dari dinamika yang kompleks dari perubahan sosial dan teknologi. NU diharapkan untuk terus beradaptasi dengan perubahan ini sambil tetap memegang teguh nilai-nilai kultural dan agama yang menjadi pondasi keberadaan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak dan mengambil langkah-langkah strategis, NU dapat menjaga dan mengembangkan kultur tradisional mereka untuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kasus Studi dan Contoh Nyata

Studi kasus dan contoh konkret akan dihadirkan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana transformasi kultur warga NU terjadi dalam generation virtual mencakup penggunaan media sosial oleh ulama NU, peran pesantren dalam pendidikan digital, dan inisiatif-inisiatif kultural lainnya. Untuk mengilustrasikan bagaimana transformasi kultur warga Nahdlatul Ulama (NU) terjadi dalam teknologi digital, kita dapat mengambil beberapa kasus studi dan contoh nyata yang mencerminkan perubahan yang signifikan dalam praktik keagamaan, pendidikan, dan komunikasi di antara komunitas NU. Berikut adalah beberapa contoh yang relevan:

1. Pemanfaatan Media Sosial dan Platform digital
   Sejumlah ulama dan pemimpin NU telah aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan pendidikan. Contoh yang menonjol adalah KH. Abdullah Gymnastiar atau yang lebih dikenal sebagai AA gym, yang

33 Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 1999).

telah memanfaatkan platform YouTube dan Instagram untuk menyebarkan ceramah dan kuliah keagamaan secara luas. Dengan jangkauan yang mencapai jutaan orang, AA Gym dan tokoh-tokoh lainnya dari NU telah berhasil menginspirasi dan mendidik masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam moderat yang dipegang teguh oleh NU.

2. Modernisasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
   Pesantren, sebagai pusat pendidikan tradisional dalam masyarakat NU, juga mengalami transformasi signifikan. Banyak pesantren NU yang kini memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan. Berbagai pesantren menyediakan platform daring untuk pembelajaran, menyebarkan materi-materi pendidikan yang terstruktur, dan mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif. Contoh ini menunjukkan bagaimana NU tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan teknologi current untuk memperkuat warisan keagamaan.
3. Kampanye Sosial dan Politik
   NU juga aktif dalam menggunakan media digital untuk berpartisipasi dalam kampanye sosial dan politik yang relevan. Dakwahnya dengan menyebarkan pesan-pesan tentang perdamaian, toleransi, dan keadilan sosial melalui media sosial, membentuk opini publik, dan memobilisasi dukungan dari jamaah mereka di seluruh Indonesia. Contoh nyata adalah peran NU dalam mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan memperjuangkan hak-hak minoritas dalam masyarakat, yang menjadi bagian integral dari identitas kultural dan sosial.[34]
4. Ekspansi International dan Jaringan Internasional
   Dengan bantuan teknologi digital, NU juga berhasil memperluas jangkauan mereka ke tingkat internasional. Organisasi-organisasi NU dan pesantren memiliki kehadiran on-line yang kuat melalui situs internet, saluran YouTube, dan media sosial lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan dengan komunitas Muslim di luar Indonesia, berbagi pengalaman keagamaan, dan memperluas

34 Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009).

jejaring kegiatan keagamaan dan pendidikan di tingkat *worldwide*.[35]

5. Menanggapi Tantangan International
   Di tengah tantangan international seperti pandemi COVID-19, NU juga menunjukkan adaptabilitasnya dengan menggunakan teknologi digital untuk menjaga kontinuitas pendidikan dan kegiatan keagamaan. Pesantren-pesantren mereka beralih ke pembelajaran jarak jauh, menyelenggarakan ceramah dan kuliah on line, serta menyebarkan informasi kesehatan dan keagamaan yang relevan untuk masyarakat luas. Hal ini menegaskan peran teknologi digital dalam mendukung kelangsungan kehidupan komunitas NU dalam menghadapi perubahan international yang cepat.

Melalui kasus-kasus studi tersebut, kita dapat melihat bagaimana transformasi kultur warga Nahdlatul Ulama di teknologi digital tidak hanya terjadi secara internal dalam cara menyebarkan ajaran agama dan mengelola pendidikan, tetapi juga dalam cara mereka berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan international. Teknologi digital tidak hanya menjadi alat untuk mempertahankan warisan budaya dan agama, tetapi juga untuk memperluas pengaruh dan dampak positif NU dalam masyarakat luas. Transformasi kultur warga Nahdlatul Ulama (NU) di era teknologi telah menghadirkan dinamika baru yang signifikan dalam cara mereka mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan kultural. Teknologi digital membawa tantangan besar seperti penyebaran informasi yang tidak terfilter dengan baik dan dampak globalisasi yang mempengaruhi praktik keagamaan tradisional. Namun, NU juga berhasil mengambil peluang yang ditawarkan oleh teknologi untuk memperluas jangkauan pesan keagamaan, meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren, dan memobilisasi komunitas dalam isu-isu sosial dan politik yang relevan. Melalui media sosial, platform digital, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan, NU tidak hanya mempertahankan identitasnya sebagai pembela Islam moderat dan toleran, tetapi juga mengadaptasi nilai-nilai tersebut dalam konteks yang semakin terhubung secara international. Dengan demikian, transformasi kultur NU dalam

35 Julia Day Howell, 'Sufism and the Indonesian Islamic Revival', *The Journal of Asian Studies*, Vol. 60.No. 3 (2001), 701–29.

technology virtual bukan hanya tentang mempertahankan warisan tradisional, tetapi juga tentang mengoptimalkan potensi teknologi untuk memperkuat dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang mendasari eksistensi mereka.

Daftar Pustaka

Anam, Choirul, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 1999)

Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994)

Bush, Robin, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009)

Horikoshi, Hiroko, *Kyai Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987)

Howell, Julia Day, 'Sufism and the Indonesian Islamic Revival', *The Journal of Asian Studies*, Vol. 60.No. 3 (2001), 701–29

Karim, Abdul Gaffar, *Islam, Civil Society, and Social Movements in Indonesia* (Jakarta: CSIS, 2012)

Madjid, Nurcholish, *Islam: Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000)

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982)

Smith, Anthony, 'Indonesia's New Order State: "Language as an Order and Progress" Regime', *Third World Quarterly*, Vol. 23.No. 4 (2002), 613–31

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007)

Zuhri, Saifuddin, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung, 1987)

Era Digital dan Dinamika Kultural Warga NU: Transformasi dan Tantangan dalam Dunia Digital

Fitah Husurur

Teknologi digital telah mengubah kehidupan manusia secara signifikan, termasuk budaya dan identitas agama. Perkembangan ini mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalin hubungan sosial, sehingga mengubah cara kita memahami dunia di sekitar kita. Anak-anak dan remaja menjadi rentan terhadap dampak negatif perubahan teknologi dalam kehidupan keluarga, sehingga mereka memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua untuk mengurangi risiko tersebut[36][37]. Era digital juga mengubah cara pandang terhadap agama dari pencarian kebenaran absolut menjadi pemahaman bersama yang kaya nilai budaya, dengan munculnya komunitas online yang memperkuat praktik keagamaan sebagai bagian dari warisan budaya bersama[38]. Pengaruh teknologi digital dalam upaya keagamaan di era Budaya Informasi Global juga berdampak pada misi global, praktik budaya, dan hubungan antaragama. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di sektor keagamaan perlu mengadopsi inovasi digital untuk meningkatkan hasil dari upaya mereka[39].

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia, mengubah cara anggota NU terlibat, mengakses informasi, dan menjalankan prinsip-prinsip agama. NU menggunakan alat pembelajaran digital seperti perangkat lunak Maktabah Syumila NU 1.0 untuk mempromosikan moderasi agama di pesantren, yang berperan penting dalam menanamkan

---

36 Urgensi nilai-nilai agama islam dalam pendidikan anak di era digital. El-Rusyd : Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi, doi: 10.58485/elrusyd.v8i1.144

37 The Role of the Family in Facing the Impact of Advances in Information Technology on the Lives of Children and Adolescents (Review of Islamic Psychology). doi: 10.24269/almisykat.v1i1.5786

38 Hablun, Ilham. (2022). Agama dan komunitas virtual: studi pergeseran orientasi keagamaan di era digital. Mukaddimah. Jurnal studi islam, doi: 10.14421/mjsi.71.2945

39 John, E., Efiong., Raphael, Akhijemen, Idialu. (2023). "Technosapiencing" and the Global Christian Mission in the Digit-shaped World. UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities, doi: 10.4314/ujah.v23i2.3

nilai-nilai Islam kepada siswa[40]. Di sisi lain, Kementerian Agama Indonesia telah aktif memanfaatkan platform e-learning untuk pendidikan jarak jauh, fokus pada peningkatan kehadiran sosial dan penyerapan kognitif, yang berdampak pada kepuasan dan retensi peserta dalam e-learning[41]. Selain itu, Universitas Nahdlatul Ulama (PTNU) mengalami perkembangan digital signifikan pasca-reformasi dengan mengadaptasi nilai-nilai eksternal dan tren pendidikan. Universitas NU telah beralih ke program studi yang lebih umum dan mengakomodasi populasi kampus yang lebih heterogen[42]

Dengan demikian, transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam mengubah lanskap kehidupan manusia, termasuk cara kita beragama dan berinteraksi sosial. Ke depannya, penting bagi semua pemangku kepentingan di sektor keagamaan untuk terus beradaptasi dengan perubahan ini dan memanfaatkannya secara optimal demi kebaikan masyarakat dan penyebaran nilai-nilai keagamaan yang lebih luas.

Perubahan Interaksi dan Komunikasi

Di era digital, Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran penting dalam memperkuat literasi dan teknologi. Organisasi keagamaan tradisionalis ini telah mengadopsi teknologi internet serta media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pandangan keagamaannya. Misalnya, NU adaptif terhadap perkembangan media sosial dengan mengadopsi YouTube sebagai platform baru untuk studi agama, mengubah cara tradisional dalam pendidikan dan pembelajaran[43]. Dakwah digital NU tidak hanya berfokus pada memberikan

---

40 Muhammad, Rizki, Alfarizi., Ngatindriatun, Ngatindriatun. (2023). Kepuasan dan retensi guru terhadap sistem pelatihan jarak jauh balai diklat keagamaan indonesia. Wawasan, doi: 10.53800/wawasan.v4i1.223

41 Ibrahim. (2023). Digital Transformation Acceleration Policy in Indonesia (Study on the Implementation of all in One Indramayu Information Technology in Indramayu Regency). Formosa Journal of Applied Sciences, doi: 10.55927/fjas.v2i6.4283

42 Hamidulloh, Ibda., Aji, Sofanudin., M., Syafi., Novena, Ade, Fredyarini, Soedjiwo., Ana, Sofiyatul, Azizah., Muhamad, Abdul, Arif. (2023). Digital learning using Maktabah Syumilah NU 1.0 software and computer application for Islamic moderation in pesantren. International Journal of Power Electronics and Drive Systems, doi: 10.11591/ijece.v13i3.pp3530-3539

43 Setia, P., & Iqbal, A. (2022). Adaptasi Media Sosial oleh Organisasi Keagamaan di Indonesia: Studi Kanal YouTube Nahdlatul Ulama, NU Channel. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.14572.

pemahaman tentang nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyyah melalui berbagai akun media sosial, tetapi juga memfasilitasi warga NU untuk terhubung secara global. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, mereka dapat dengan cepat dan luas berbagi informasi, pengalaman, dan pemikiran keagamaan[44] [45]. Bahkan di tingkat lokal, seperti di Sidoarjo, Asosiasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggunakan skema penanganan media sosial tunggal untuk mengoordinasikan kolaborasi antar komunitas menggunakan media sosial dan platform komunitas lainnya[46]. Dengan demikian, NU tidak hanya berperan dalam konteks lokal, tetapi juga dalam skala global, berkontribusi pada perdamaian dunia dan menciptakan keharmonisan umat manusia di era digital ini[47].

Era digital telah memungkinkan Nahdlatul Ulama (NU) untuk terhubung secara global melalui media sosial dan platform digital lainnya, memfasilitasi berbagi informasi, pengalaman, dan pemikiran keagamaan dengan cepat dan luas. NU mengadaptasi teknologi dengan mengadopsi YouTube dan media sosial lainnya untuk pendidikan agama dan dakwah digital, memodernisasi pendekatan tradisional dalam pembelajaran dan pendidikan. Upaya ini menegaskan peran NU dalam memperkuat literasi teknologi dan kontribusinya dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni di dunia modern.

Transformasi Pendidikan dan Penyebaran Ilmu

Di tengah revolusi digital yang melanda dunia saat ini, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tidak luput dari dampaknya. NU, yang memiliki

---

44 Utami, H. (2020). Dakwah Digital Nahdlatul Ulama Dalam Memahami Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyyah. MEDIAKITA. https://doi.org/10.30762/MEDIAKITA.V4I2.2621.

45 Wahid, M. (2020). DARI TRADISIONAL MENUJU DIGITAL: ADOPSI INTERNET OLEH NAHDLATUL ULAMA SELAMA PANDEMI COVID-19. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 16, 73-84. https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.1745.

46 Zamroni, Z., & Tsalatsa, M. (2021). Sensitivitas Organisasi NU dan Muhammadiyah dalam Pengembangan Dakwah (Studi Kasus di Kecamatan Bangah Kabupaten Sidoarjo). QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah. https://doi.org/10.54396/qlb.v2i1.173.

47 Ridho, A., Suja, A., Taufik, M., Rahmat, S., & Nisa, F. (2023). Nahdlatul Ulama as The Main Actor Managing and Resetting Civilization in The Digital Era. Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7702.

sejarah panjang dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kultural Islam di Indonesia, menghadapi tantangan dan peluang baru dalam mengadaptasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pendidikan dan penyebaran ilmu di era digital ini.

Peran NU dalam Pendidikan Keagamaan

NU telah lama menjadi pusat pendidikan agama Islam di Indonesia dengan jaringan pondok pesantren yang luas. Di era digital, NU terus mengembangkan pendekatan pendidikan keagamaan yang inklusif dan berbasis teknologi[48] [49]. NU mengadopsi platform digital untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan memperbarui metode pengajaran agar relevan dengan perkembangan zaman, sehingga meningkatkan daya tarik dan efektivitas pendidikan agama di lingkungan pesantren.

a. Adopsi Teknologi dalam Pembelajaran

   NU mulai mengadopsi teknologi internet dan platform digital sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan keagamaan. Sejumlah pondok pesantren NU mulai menyediakan pembelajaran online dan mengembangkan konten-konten pendidikan yang dapat diakses secara digital.

   1) Penggunaan Aplikasi Digital untuk Moderasi Islam

      Penggunaan aplikasi Maktabah Syumila NU 1.0 di pesantren tradisional di Temanggung, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pembelajaran digital dapat memperkuat moderasi Islam di kalangan santri[50].

   2) Dinamika Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

      Lembaga Pendidikan Ma'arif NU berperan penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, termasuk penerapan teknologi dalam pembelajaran untuk

48 Akmaliah, W. (2020). The Demise of Moderate Islam: new media, contestation, and reclaiming religious authorities. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.1-24.

49 Ridho, A., Suja, A., Taufik, M., Rahmat, S., & Nisa, F. (2023). Nahdlatul Ulama as The Main Actor Managing and Resetting Civilization in The Digital Era. Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7702.

50 Ibda, H., Sofanudin, A., Syafi, M., Soedjiwo, N., Azizah, A., & Arif, M. (2023). Digital learning using Maktabah Syumilah NU 1.0 software and computer application for Islamic moderation in pesantren. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). https://doi.org/10.11591/ijece.v13i3.pp3530-3539.

meningkatkan kualitas pengajaran dan kreativitas guru[51]. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU memiliki peran sentral dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Mereka aktif menerapkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kreativitas guru. Ini meliputi penggunaan platform digital untuk menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif dan aksesible, serta inovasi dalam metode pengajaran yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Langkah ini membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa di berbagai tingkat pendidikan.

3) Pendekatan Pembelajaran Virtual
Pembelajaran berbasis teknologi digital atau virtual terbukti efektif tidak hanya di universitas dan pesantren, tetapi juga sebagai metode alternatif untuk pembelajaran agama dari rumah ke rumah[52]. Keuntungan utamanya adalah fleksibilitas waktu dan tempat yang lebih besar, serta kemungkinan untuk menyesuaikan ritme belajar sesuai dengan kebutuhan individu. Metode ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan agama, tetapi juga memungkinkan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk mendukung pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai agama.

b. Penggunaan Media Sosial
NU juga aktif menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Twitter untuk menyebarkan kuliah-kuliah agama, khotbah, dan informasi keagamaan lainnya. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan pesan dakwah, tetapi juga memungkinkan NU untuk berinteraksi langsung dengan jamaahnya secara global.

---

51 Purnomo, S., Ansori, M., & Andari, A. (2023). Dynamics of Ma'arif Nahdlatul Ulama Education Institute. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v5i3.3648.

52 Rohman, A., Muda, L., Posangi, S., Yahiji, K., & Munirah, M. (2021). Alternative approach techniques to support home islamic boarding schools using virtual learning technology. Linguistics and Culture Review. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1846.

1) Adopsi Media Sosial untuk Dakwah:
   a) NU telah mengadopsi YouTube sebagai media baru untuk menyampaikan kajian agama secara online melalui NU Channel, menunjukkan transformasi digital dalam studi keagamaan NU yang sebelumnya identik dengan metode pembelajaran konvensional seperti pesantren dan belajar langsung dengan kiai[53].
   b) NU menggunakan Instagram (@nuonline_id) untuk menyebarkan konsep moderasi beragama, yang bertujuan untuk menjaga integritas negara dan mencegah radikalisme atau ekstremisme dalam agama[54].
2) Peran Media Sosial dalam Mengatasi Pandemi COVID-19
   Selama pandemi COVID-19, NU menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang memotivasi masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta mengintegrasikan kesehatan fisik dan spiritual melalui berbagai kegiatan keagamaan[55].
3) Penggunaan Media Sosial dalam Pariwisata Religius
   Media sosial seperti Facebook dan WhatsApp digunakan secara efektif dalam bimbingan dan pemasaran pariwisata religius, khususnya dalam konteks haji dan umrah. Media sosial membantu menyebarkan informasi dan berkomunikasi secara interaktif dengan jamaah[56].

---

53 Setia, P., & Iqbal, A. (2022). Adaptasi Media Sosial oleh Organisasi Keagamaan di Indonesia: Studi Kanal YouTube Nahdlatul Ulama, NU Channel. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.14572.

54 Soraya, S., & Wibowo, W. (2021). Construction of Public Opinion about Religious Moderation on NU Online Instagram Accounts (@nuonline_id). KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. https://doi.org/10.24090/komunika.v15i1.4572.

55 Ma'arif, B., Siddiq, A., Nasir, M., & Hendrawan, H. (2022). The Role of Nahdlatul Ulama (NU) Organizations in West Java in Overcoming the Covid-19 Pandemic. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.018.

56 Khadijah, U., Novianti, E., & Anwar, R. (2022). SOCIAL MEDIA IN GUIDING AND MARKETING RELIGIOUS TOURISM: THE CASE OF UMRAH AND HAJJ SERVICES. Sosiohumaniora. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i1.36579.

Transformasi Dakwah dalam Era Digital

Dakwah digital menjadi bagian integral dari strategi NU dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran dengan mempromosikan kerjasama, dakwah yang menarik dan ramah, serta meningkatkan kesadaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mendorong bentuk pendidikan agama yang lebih inklusif dan mudah diakses.

a. Dakwah yang Moderat dan Toleran
   Dakwah digital NU menekankan pendekatan yang moderat, ramah, dan toleran untuk melawan radikalisme dan mempromosikan persatuan nasional[57]. Hal ini termasuk pengamalan empat pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI[58].
b. Aksesibilitas Digital
   Pergeseran dari dakwah tatap muka ke dakwah digital telah secara signifikan meningkatkan aksesibilitas ajaran Islam, memungkinkan jangkauan yang lebih komprehensif dan mendorong keterlibatan Masyarakat. Metode ini beradaptasi dengan waktu, tempat, dan konteks, memastikan pesan tetap relevan dan berdampak.
c. Memerangi Radikalisme
   Dakwah digital dipandang sebagai solusi terhadap radikalisme kontemporer dengan mempromosikan nilai-nilai Islam moderat dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini membantu mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, agama, dan psikologis yang berkontribusi terhadap radikalisme.
d. Keterlibatan dan Perdebatan Publik
   Model dakwah digital, khususnya yang dilakukan oleh Habib Husein Ja'far Al Hadar, telah menarik minat dan perdebatan publik yang signifikan, menyoroti keefektifannya dalam melibatkan berbagai kalangan agama dan menjaga kesadaran

57 Rofiq, A. (2022). PURIFIKASI ASWAJA NAHDLATUL ULAMA GARIS LURUS. Hikmah. https://doi.org/10.24952/hik.v16i2.5514.

58 Arifuddin, A., & Faridah, F. (2021). DA'WAH IN RESPONDING TO THE PROBLEMS OF CONTEMPORARY RADICALISM. Jurnal Diskursus Islam. https://doi.org/10.24252/JDI.V9I1.21597.

beragama[59].

Tantangan dan Adaptasi

Namun, transformasi ini juga membawa tantangan. Misalnya, Penyebaran informasi yang cepat di era digital menimbulkan risiko yang signifikan, termasuk penyebaran pemahaman agama yang salah dan radikalisme. Sangat penting bagi anggota Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempertahankan pemikiran kritis dan mengembangkan literasi digital yang sehat ketika mengonsumsi konten keagamaan secara online.

1. Rendahnya Literasi Informasi dan Radikalisme:
   Penyebaran ideologi radikal difasilitasi oleh dominasi internet sebagai media utama untuk mencari informasi, diperparah dengan rendahnya kemampuan literasi informasi. Hal ini menyebabkan interpretasi konservatif terhadap makna agama dan pelabelan orang lain sebagai kafir[60]. Rendahnya kemampuan literasi informasi di kalangan pengguna internet memperburuk situasi ini, karena banyak individu kurang mampu menilai kebenaran atau keabsahan informasi yang mereka dapatkan. Akibatnya, terjadi interpretasi konservatif terhadap makna agama, di mana beberapa orang dapat memandang seolah-olah pendapat mereka adalah satu-satunya yang benar, sementara yang lain mungkin dipandang sebagai kafir atau diberi label negatif lainnya secara tidak adil.
2. Literasi Media sebagai Tindakan Pencegahan:
   Literasi media sangat penting untuk mencegah penyebaran radikalisme di internet. Mengedukasi masyarakat tentang literasi media dapat menjadi mekanisme pertahanan agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi radikal di dunia maya[61].

---

59 Sikumbang, A., Dalimunthe, M., Kholil, S., & Nasution, N. (2023). Digital Da'wah Indonesia Ulema in the Discourse of Theology. Pharos Journal of Theology. https://doi.org/10.46222/pharosjot.1051.

60 Zaenudin, H., & , S. (2019). Information Literacy For The Net Generation To Anticipate The Danger Of Intolerance. Jurnal ASPIKOM. https://doi.org/10.24329/ASPIKOM.V4I1.480.

61 Toruan, G., & Ruslinawaty, N. (2020). Educating Communities Through Media Literacy in Preventing the Spread of Radicalism Content on the Internet. Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019). https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.035.

Untuk mengurangi risiko penyebaran pemahaman agama yang salah dan radikalisme, penting bagi anggota NU untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan berpikir kritis. Dengan meningkatkan literasi informasi dan media, individu dapat menavigasi dan menilai secara kritis konten agama yang mereka temui secara online, sehingga mengurangi pengaruh ideologi radikal.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, transformasi digital telah mengubah fundamental cara kita beragama dan berinteraksi dalam masyarakat modern. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai contoh nyata telah mengadopsi teknologi informasi dan media sosial untuk memperluas pengajaran agama, mempromosikan nilai-nilai moderat, dan mempertahankan identitas keagamaan dalam era digital. Dengan memanfaatkan platform seperti YouTube dan Instagram, NU tidak hanya mengubah cara tradisional pendidikan agama, tetapi juga memfasilitasi koneksi global dan dakwah yang inklusif. Meskipun ada tantangan seperti risiko radikalisme dan rendahnya literasi informasi, adaptasi ini menegaskan pentingnya literasi digital yang sehat dan kritis dalam menghadapi dampak perubahan teknologi terhadap kehidupan agama dan sosial kita.

Daftar Pustaka

Urgensi nilai-nilai agama islam dalam pendidikan anak di era digital. El-Rusyd : Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi, doi: 10.58485/elrusyd.v8i1.144

The Role of the Family in Facing the Impact of Advances in Information Technology on the Lives of Children and Adolescents (Review of Islamic Psychology). doi: 10.24269/almisykat.v1i1.5786

Hablun, Ilham. (2022). Agama dan komunitas virtual: studi pergeseran orientasi keagamaan di era digital. Mukaddimah. Jurnal studi islam, doi: 10.14421/mjsi.71.2945

John, E., Efiong., Raphael, Akhijemen, Idialu. (2023). "Technosapiencing" and the Global Christian Mission in the Digit-shaped World. UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities, doi: 10.4314/ujah.v23i2.3

Muhammad, Rizki, Alfarizi., Ngatindriatun, Ngatindriatun. (2023). Kepuasan dan retensi guru terhadap sistem pelatihan jarak jauh balai diklat keagamaan indonesia. Wawasan, doi: 10.53800/wawasan.v4i1.223

Ibrahim. (2023). Digital Transformation Acceleration Policy in Indonesia (Study on the Implementation of all in One Indramayu Information Technology in Indramayu Regency). Formosa Journal of Applied Sciences, doi: 10.55927/fjas.v2i6.4283

Hamidulloh, Ibda., Aji, Sofanudin., M., Syafi., Novena, Ade, Fredyarini, Soedjiwo., Ana, Sofiyatul, Azizah., Muhamad, Abdul, Arif. (2023). Digital learning using Maktabah Syumilah NU 1.0 software and computer application for Islamic moderation in pesantren. International Journal of Power Electronics and Drive Systems, doi: 10.11591/ijece.v13i3.pp3530-3539

Setia, P., & Iqbal, A. (2022). Adaptasi Media Sosial oleh Organisasi Keagamaan di Indonesia: Studi Kanal YouTube Nahdlatul Ulama, NU Channel. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.14572.

Utami, H. (2020). Dakwah Digital Nahdlatul Ulama Dalam Memahami Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyyah. MEDIAKITA. https://doi.org/10.30762/MEDIAKITA.V4I2.2621.

Wahid, M. (2020). DARI TRADISIONAL MENUJU DIGITAL: ADOPSI INTERNET OLEH NAHDLATUL ULAMA SELAMA PANDEMI COVID-19. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 16, 73-84. https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.1745.

Zamroni, Z., & Tsalatsa, M. (2021). Sensitivitas Organisasi NU dan Muhammadiyah dalam Pengembangan Dakwah (Studi Kasus di Kecamatan Bangah Kabupaten Sidoarjo). QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah. https://doi.org/10.54396/qlb.v2i1.173.

Ridho, A., Suja, A., Taufik, M., Rahmat, S., & Nisa, F. (2023). Nahdlatul Ulama as The Main Actor Managing and Resetting Civilization in The Digital Era. Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7702.

Akmaliah, W. (2020). The Demise of Moderate Islam: new media, contestation, and reclaiming religious authorities. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.1-24.

Ridho, A., Suja, A., Taufik, M., Rahmat, S., & Nisa, F. (2023). Nahdlatul Ulama as The Main Actor Managing and Resetting Civilization in The Digital Era. Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7702.

Ibda, H., Sofanudin, A., Syafi, M., Soedjiwo, N., Azizah, A., & Arif, M. (2023). Digital learning using Maktabah Syumilah NU 1.0 software and computer application for Islamic moderation in pesantren. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). https://doi.org/10.11591/ijece.v13i3.pp3530-3539.

Purnomo, S., Ansori, M., & Andari, A. (2023). Dynamics of Ma'arif Nahdlatul Ulama Education Institute. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v5i3.3648.

Rohman, A., Muda, L., Posangi, S., Yahiji, K., & Munirah, M. (2021). Alternative approach techniques to support home islamic boarding schools using virtual learning technology. Linguistics and Culture Review. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1846.

Setia, P., & Iqbal, A. (2022). Adaptasi Media Sosial oleh Organisasi Keagamaan di Indonesia: Studi Kanal YouTube Nahdlatul Ulama, NU Channel. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.14572.

Soraya, S., & Wibowo, W. (2021). Construction of Public Opinion about Religious Moderation on NU Online Instagram Accounts (@nuonline_id). KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. https://doi.org/10.24090/komunika.v15i1.4572.

Ma'arif, B., Siddiq, A., Nasir, M., & Hendrawan, H. (2022). The Role of Nahdlatul Ulama (NU) Organizations in West Java in Overcoming the Covid-19 Pandemic. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.018.

Khadijah, U., Novianti, E., & Anwar, R. (2022). SOCIAL MEDIA IN GUIDING AND MARKETING RELIGIOUS TOURISM: THE CASE OF UMRAH AND HAJJ SERVICES. Sosiohumaniora. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i1.36579.

Rofiq, A. (2022). PURIFIKASI ASWAJA NAHDLATUL ULAMA GARIS LURUS. Hikmah. https://doi.org/10.24952/hik.v16i2.5514.

Arifuddin, A., & Faridah, F. (2021). DA'WAH IN RESPONDING TO THE PROBLEMS OF CONTEMPORARY RADICALISM. Jurnal Diskursus Islam. https://doi.org/10.24252/JDI.V9I1.21597.

Sikumbang, A., Dalimunthe, M., Kholil, S., & Nasution, N. (2023). Digital Da'wah Indonesia Ulema in the Discourse of Theology. Pharos Journal of Theology. https://doi.org/10.46222/pharosjot.1051.

Zaenudin, H., & , S. (2019). Information Literacy For The Net Generation To Anticipate The Danger Of Intolerance. Jurnal ASPIKOM. https://doi.org/10.24329/ASPIKOM.V4I1.480.

Toruan, G., & Ruslinawaty, N. (2020). Educating Communities Through Media Literacy in Preventing the Spread of Radicalism Content on the Internet. Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019). https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.035.

Pancasila dan Tantangan Digitalisasi di Abad Kedua 2045

Edy M Ya'kub

Bangsa Indonesia patut bersyukur, karena atas berkat rahmat-Nya, menjadi bangsa yang memiliki ideologi yang mengakar dibandingkan dengan negara lain, sebab Pancasila adalah ideologi bangsa yang merupakan karya bersama, bukan produk kelompok atau negara. Paling tidak, mengakar-nya ideologi itu dapat disimak dari ceramah Kiai Kampung seperti KH Anwar Zahid (Bojonegoro, Jawa Timur), Bu Nyai Hj Mumpuni Handayayekti (Cilacap, Jawa Barat), bahkan sampai Cak Ukil (M Sulukhil Amin, Guru Ngaji di PP Tebuireng Jombang), yang sering menguji jamaahnya: Apakah hafal teks Pancasila atau tidak?

Tidak hanya tokoh lokal, bahkan seorang TKI Bernama Siti merawat anak Taiwan yang terlantar, Sha Wang, yang membuatnya berteriak mencari Siti ketika sang TKI itu terkena deportasi. Kalau bukan karena sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, apa mungkin Siti peduli kepada anak majikan di Taiwan yang sudah diabaikan orang tuanya? Ada lagi, umat Islam pun menyambut kedatangan 24 biksu Thudong asal Thailand yang melakukan perjalanan spiritual dengan berjalan kaki ke Candi Borobudur dan Candi Muaro Jambi dalam rangkaian Waisak Nasional 2568 BE/Tahun 2024, apa mungkin hal itu terjadi kalau tidak ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk toleransi kepada umat beragama lain?

Fakta dari mengakar-nya Pancasila atau Pancasila menjadi falsafah hidup (way of life) dalam berbangsa dan bernegara itu, agaknya membuktikan bahwa Pancasila bukanlah ideologi "kaleng-kaleng" (remeh). Bahkan, Wamenhan AS 2001 Paul Wolfowitz menilai Indonesia akan menjadi negara yang kokoh dalam menghadapi pertarungan regional dan global, karena Indonesia memiliki ideologi yang mengakar di hati bangsanya yakni Pancasila. Jadi, Pancasila adalah modal yang tepat untuk memasuki Abad Kedua 2045, termasuk tepat bagi kaum beragama. Bagi Bung Karno (Ir Soekarno), Pancasila itu merajut hubungan antar-anak bangsa, tetapi bagi umat Islam, terutama umat NU, Pancasila itu bukan hanya merajut dalam berbangsa dan bernegara, tetapi juga merajut hubungan

transendental dengan Sang Maha Pencipta, Allah SWT.

Bahkan, Mentor Utama Pendidikan Ke-NU-an KH Abdul Mun'im Dz dalam "Tumpengan Harlah Pancasila" di Surabaya (1/6/2024) menegaskan bahwa kiai-kiai NU sudah "melampaui" Bung Karno dalam mengawal lahirnya Pancasila, bahkan sampai ada kelakar bahwa siapapun yang bisa mengamalkan dua sila saja dari Pancasila secara konsisten, maka dia sudah menjadi "wali". Intinya, Pancasila pun menjadi "milik bersama". Lebih dari itu, Nahdlatul Ulama (NU) saat Muktamar ke-13 di Banjarmasin pada tahun 1936 pun memutuskan bahwa Indonesia merdeka sebagai negara bangsa dan Indonesia merdeka berbentuk negara kesatuan, serta menolak Khilafah yang tidak sesuai kondisi modern. Sementara itu, saudara kembar NU, ormas Muhammadiyah memiliki pandangan yang kurang lebih sama. Melalui keputusan muktamar ke-47 di Makassar pada 2015, Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai "Darul Ahdi wa Syahadah" yang berarti negeri yang bersepakat dengan kemaslahatan, atau Dar Assalaam atau negeri yang penuh kedamaian.

Terkait Pancasila, ada cerita menarik tentang kiai-kiai NU ketika bangsa ini ribut soal keharusan organisasi menggunakan "Asas Tunggal" Pancasila oleh Presiden Soeharto pada tahun 1980-an, agar bangsa ini terhindar dari paham ekstrem, baik ideologi kiri (komunis) maupun ideologi kanan (Islam) radikal. Awalnya, banyak kiai NU yang menolak wacana dari Pak Harto tersebut, maka almaghfurlah KH Imron Hamzah (Ngelom, Surabaya) bersama kiai-kiai lain pun sowan/menghadap ke kiai yang kasyaf/sufi dan hasilnya justru sangat mengejutkan, karena kiai dimaksud justru mengucap "Alhamdulillah" karena Pancasila (Indonesia) kembali kepada yang punya (umat Islam/NU).

Pandangan "Pancasila kembali kepada umat Islam yang punya ideologi itu" dalam analisa Kiai Mun'im Dz, merujuk pada perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berproses dengan melibatkan Soekarno (Ketua), Moh. Hatta (Wakil), dan Anggota (Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, dan AA Maramis). Jadi, tokoh-tokoh "non-negara" (NU/Islam) pun berproses dalam perumusan "Piagam Jakarta" sebagai inti dari Pembukaan UUD 1945, yang justru tidak memihak syariat Islam, asalkan Islam pun dapat berkembang leluasa. Itulah pandangan moderasi beragama yang memadukan kemajemukan tanpa meniadakan hak

pribadi yang justru dirangkul secara harmonis. Apalagi, Islam pun memahami perbedaan sebagai keniscayaan yang tak mungkin satu, kecuali dalam pola saling kenal.

Tantangan digitalisasi

Menjelang Abad Kedua Indonesia pada tahun 2045, agaknya persoalan terkait bentuk negara, ideologi negara (Pancasila), dan persoalan kewilayahan, yang sudah selesai itu tetap saja muncul dalam persoalan yang mirip (dalam ideologi, bentuk negara, dan kemajemukan bangsa), namun muncul dalam format digitalisasi. Misalnya, sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila, yang kini menghadapi sikap dan praktek beragama secara ekstrem/radikal serta mengabaikan kemanusiaan serta kemajemukan bangsa melalui ajaran/ajakan pemaksaan tafsir agama dan ideologi di dunia digital.

Tidak hanya itu, sila keempat dan kelima Pancasila pun menghadapi penjajahan politik, ekonomi, dan budaya secara digital, melalui "penjajahan" politik digital, ekonomi digital, dan budaya digital, yang seakan-akan mempermudah kehidupan, namun sejatinya masuk jebakan orang atau negara lain untuk keuntungan sepihak. Dulu, media massa adalah koran, majalah, radio, televisi, dan sejenis, tapi sekarang ada media sosial yakni FaceBook, twitter/X, Line, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, dan media digital lainnya, yang berbeda secara konten.

Kalau media massa itu pasti benar karena dibuat dengan proses konfirmasi/kompetensi/kroscek, objektif/akurat/adil/imbang/kepentingan publik, dan ada rujukan/kredibel, sedangkan media digital/medsos tanpa semua proses yang benar itu, bahkan ada "jebakan" hoaks/gosip, kriminal/ radikal, dan framing (pelintir/belok). Celakanya, "jebakan" (khususnya, framing) itu justru bisa berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila yang merasuk secara halus melalui digitalisasi.

Contoh tantangan digitalisasi untuk sila pertama, kedua, dan ketiga adalah jebakan ekstrem kanan-kiri akibat berguru kepada Mbah Google/ustadz digital, yang mempertanyakan apakah Pancasila lebih bagus dari Islam? Tentu, jawaban logisnya adalah Islam, tapi jawaban itu disambung dengan ajakan meninggalkan Pancasila. Bagi yang paham filsafat, tentu tidak pas membandingkan ideologi dengan agama. Pancasila lebih pas dibandingkan dengan komunis, liberal, sekuler. Kalau Islam ya dibandingkan dengan Kristen, Hindu, dan

agama lain.

Ya, belajar di dunia digital memang ibarat belajar tanpa guru yang sangat mungkin akan melenceng, apalagi bila disertai kepentingan dari pihak lain. Inti dari tantangan digitalisasi untuk soal ideologi dan bentuk negara adalah "permainan" logika, seperti Pancasila versus Islam itu. Permainan logika lainnya terkait benturan dengan budaya lokal, yang justru dapat menyasar warga NU, khususnya kaum NU muda yang sering "ngaji" (tanpa guru) di dunia digital. Dikira yang logis adalah benar.

Benturan agama dengan budaya lokal ("main logika"/radikal), seperti Celana Cingkrang dan Jenggot yang dianggap lebih mengikuti Sunnah Nabi, padahal Sunnah Nabi paling baik adalah non-fisik yakni Akhlak, karena Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki Akhlak, bukan fisik. Contoh Sunnah non-fisik lainnya yang sering disebut ulama Rembang-Jateng/Syuriah PBNU KH Ahmad Bahaudin Nursalim (Gus Baha) adalah hafal Al-Qur'an, tapi justru nggak ditiru. Contoh benturan "logika" lainnya, wasilah kepada orang sholeh atau Nabi yang dianggap musyrik, padahal dokter atau obat adalah wasilah/perantara juga, tapi bukan syirik kan?!

Satu lagi, Gus Baha yang ahli tafsir itu pun memaknai "min atsaris sujud" (bekas sujud) dalam QS Al-Fath ayat 29 juga bukan makna fisik, tapi "nur" (cahaya/non-fisik), karena yang melihat "bekas" adalah malaikat. "Dalam ilmu lughat, atsar bermakna akibat, misal sujud berakibat tidak maksiat," ujarnya. Secara logika, Gus Baha juga menafsirkan "Bumi Bersaksi" dengan memahami proses manusia yang tercipta dari tanah/bumi.

Itu masih tantangan digitalisasi dalam agama, politik, dan budaya, padahal tantangan digitalisasi dalam ekonomi dan sosial yang sesuai dengan sila keempat dan kelima juga tak kalah berbahaya, karena bisa menjurus pada kolonialisme atau penjajahan ekonomi dan sosial yang tak disadari, akibat proses digitalisasi yang sangat halus, bahkan ditengarai ketergantungan ekonomi dan budaya secara digitalisasi itu sudah mencapai 60-70 persen masyarakat Indonesia. Contohnya, aplikasi TikTok yang semula bersifat hiburan, tapi akhirnya memajang TikTok Shop.

Itu baru satu aplikasi, padahal aplikasi asal Amerika (FaceBook, Twitter, dan sebagainya), atau asal China (TikTok, Temu, Shein, AliExpress, dan sebagainya), bukan sekadar aplikasi yang bersifat teknologi murni tanpa kepentingan ekonomi, politik, budaya, agama,

dan sebagainya. Semua aplikasi itu rata-rata memiliki pengguna diatas 100 juta masyarakat Indonesia, dan bias kepentingan. Bukan cuma sekadar “mematikan” pasar lokal dan UMKM akibat 90 persen produk “pasar digital” itu impor, namun “pasar digital” dalam konten viral itu juga membuat masyarakat mengalami “ketergantungan” (kolonialisasi ekonomi) tanpa disadari. Nggak bahaya tah?!

Reporter “Washington Post” di Washington DC, AS, yakni Abby Ohlheiser, mencatat penulis berita viral (hoaks, framing, ujaran kebencian) yang bohong/palsu dapat menjadi kaya akibat viewer yang mendatangkan cuan dengan mengabaikan moral yakni 10 ribu dolar AS/bulan atau Rp135 juta/bulan. Pengakuan menggiurkan itu diperoleh reporter itu dari penulis berita palsu di Facebook bernama Paul Horner (AFR/20/6/2024).

Oleh karena itu, langkah Presiden Jokowi yang melarang aplikasi sosial untuk berbisnis (misalnya, TikTok Shop) agaknya dapat dipahami, bahkan langkah itu terasa sangat kurang banyak untuk era digitalisasi kedepan, baik produk maupun konten viral, apalagi bila digitalisasi itu justru menggerus “modal kekuatan utama” bangsa Indonesia yakni Pancasila. Ya, ikhtiar mewujudkan “kesalehan digital” merupakan jawaban yang tak dapat dipandang enteng/ringan, karena sudah banyak negara yang tercabik-cabik oleh hoaks, framing, ujaran kebencian/adu domba, dan kolonialisme dalam berbagai bentuk digital, akibat tidak adanya penyikapan digitalisasi secara cerdas/ tepat, benar/saleh/nyata, dan toleran/moderat (meyakini tanpa menyalahkan).

Dalam buku “Kesalehan Digital” (2023) yang memaparkan 12 jenis jebakan digitalisasi, ada tiga solusi cerdas dan benar yang disodorkan untuk menyikapi dunia digital, yakni narasumber/ sanad (proses konfirmasi, kompetensi, kroscek/cek-ricek), matan/ konten (objektif/akurat, adil/imbang, ukhuwah/kepentingan publik), dan rawi (rujukan kredibel). Artinya, karakter digital dalam buku “Kesalehan Digital” itu menyodorkan saran untuk menghindari “share” informasi media sosial bila tanpa “tiga solusi” (“SMR” atau Sanad, Matan, Rawi), karena dapat berdampak fatal (fatalitas) yakni merusak demokrasi (konflik dan rekayasa konflik secara digital), merusak karakter/publik (anti demokrasi, tidak siap berbeda), dan merusak agama (muflis/bangkrut di akhirat).

Solusi “S” atau Sanad adalah adanya Sumber/Narasumber/ Sanad sebagai sumber verifikasi informasi dari ahlinya/kompeten.

Bukan informasi tanpa narasumber dan kompeten, bukan asal "makan/telan" dan "ikuti" secara "mentah" atau apa adanya (tanpa guru/rujukan/narasumber). Untuk Solusi "M" atau Matan adalah isi/konten/meaning yang mengandung konten kebenaran, konten keadilan, dan konten ukhuwah. Konten Kebenaran adalah upaya kroscek untuk akurasi. Konten Keadilan adalah objektif/bukan sepihak/netral. Konten Ukhuwah adalah berbeda untuk mengenal/menghormati dan fokus kepentingan publik/bukan pribadi. Islam mengajarkan selalu positif atau diam. Negatif yang Benar adalah Ghibah (Makan Bangkai), lalu Negatif yang Salah adalah Fitnah (Bunuh).

Untuk Solusi "R" atau Rawi adalah rujukan/media referensi yang legal (Asosiasi/Dewan Pers) dan kredibel (kualitas-etik/standar-UKW), karena itu rujukan tanpa legal dan kredibel justru membahayakan, meski viral di dunia digital. Jadi, Pancasila harus tetap menjadi modal utama dari kekuatan bangsa Indonesia memasuki Abad Kedua 2045, karena Pancasila adalah modal utama berbangsa dan bernegara, tapi mungkin perlu disertai "Kesalehan Digital". Kesalehan digital itu bukan ajakan untuk sikap baik/positif ansich, tapi ajakan untuk cerdas/saleh di dunia digital agar tidak kena prank/jebakan digital ala Framing akibat editan/potongan, hoaks, atau rekayasa informasi lainnya yang canggih.

Kesimpulan

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah terbukti mengakar kuat dan menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merangkul kemajemukan dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, tantangan besar di Abad Kedua 2045 muncul dalam bentuk digitalisasi yang menguji nilai-nilai Pancasila melalui ekstremisme, radikalisme, dan penjajahan politik, ekonomi, serta budaya secara digital. Digitalisasi yang tidak terkendali dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan ideologi bangsa jika tidak disikapi dengan cerdas dan bijak. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat "kesalehan digital" melalui verifikasi informasi, konten yang adil dan objektif, serta rujukan yang kredibel guna mempertahankan Pancasila sebagai modal utama bangsa Indonesia dalam menghadapi era digital yang kompleks dan penuh tantangan.

Daftar Pustaka

Buku “Kesalehan Digital” (Penerbit Campustaka/Gramedia-2023)

Pengajian Gus Baha’ di NU Online https://www.nu.or.id/prefix/PENGAJIAN%20GUS%20BAHA

Dialog “Tumpengan Harlah Pancasila” di TV9 Surabaya, tanggal 1 Juni 2024. https://duta.co/melewati-pesan-bung-karno-1-kh-1-munim-kiai-nu-tolak-khilafah-lebih-militan-jaga-pancasila-mengapa

Artikel/Opini Nurul Safitri, Mahasiswi ITB Ahmad Dahlan, Jakarta, tertanggal 29 November 2020 https://tajdid.id/2020/11/29/pancasila-dalam-pandangan -muhammadiyah/

Detik.com, 20 Juni 2024. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7398672/lebih-ngeri-dari-tiktok-shop-aplikasi-temu-dari-china-dipelototi-kemendag

Paul Horner di Washington Post, kutipan AFR - 20/6/2024. Pengakuan penulis berita palsu di Facebook

Transfigurasi Nahdliyin Prespektif Digital Kultur

Muchammad Machrus Zaman

Perkembangan teknologi informasi yang dibentuk dengan digitalisasi mengharuskan manusia untuk selalu berkembang. Modernisasi yang tidak terbendung, setidaknya membuat masyarakat berfikir keras untuk menghasilkan nilai positif sebagai bentuk perkembangan zaman. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari campur tangan orang lain akan terbantu dengan perkembangan teknolgi informasi ini. Semua lini kehidupan baik budaya, pendidikan, agama dan lain sebagainya harus turut ikut andil dalam memanfaatkan media digital.

Era digital yang mestinya manjadi alat bantu untuk berkembang dalam segala bidang baik pendidikan, budaya dan agama menjadi tercemar akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dalam menebar berita hoax, pornografi, SARA dan lainnya. Ini membuktikan bahwa perlu adanya pengawasan dan penanganan khusus untuk merubah algoritma media digital agar menjadi alat bantu dalam menyebarkan kebaikan. Sehingga muncul transfigurasi warga nahdliyin sebagai bentuk perubahan terhadap budaya yang ada di media digital agar menjadi lebih baik.

Transformasi Budaya Warga Nahdliyin di Era Digital

Era digital dimana era yang tidak dapat kita hindari, bahkan sebagai manusia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga kita perlu muhasabah untuk terus berkembang agar tidak tertinggal dengan perubahan terebut. Menghadapai fenomena ini warga nahdlyin selalu hadir dalam berkembang untuk memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang Rahmatan lil Alamin.

Proses dakwah yang dilakukan oleh ulama, kiai, ustaz, da'i Nahdlatul Ulama sudah banyak mengunakan media digital. Karena jangkauan yang dihasilkan dakwah di media sosial (youtube, instagram, tiktok dll) cukup luas dan mudah tersampaikan ke khalayak luas. Hal ini sangat membantu dalam perkembangan dakwah NU agar lebih luas jangkauannya. Jika melihat kebelakang bahwa dakwah yang dulunya dilakukan secara konfensional masih terbilang kurang dalam penyebaran dakwah, namun dengan perkembangan teknologi

ini dakwah menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk menjangkau umat Islam disetiap penjuru dunia.

Ditahun 2019 hingga sekarang dengan adanya peristiwa Covid-19 yang mengaruskan semua kegiatan dilakukan secara online memberikan pelajaran baru bahwa memang perkembangan teknologi ini tidak bisa dihindarkan. Anjuran pememrintah untuk *work from home* adalah cara pemerintah untuk membiasakan kita dalam memanfaatkan media digital yang ada. Hingga sekarang, dampak yang dihasilkan begitu terasi baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya bahkan agama beradaptasi dengan media digital.[62]

Fealy menyatakan bahwa polarisasi antara modernis dan tradisionalis adalah hasil dari pendekatan historis yang notabennya didominasi oleh masyarakat modern.[63] Sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama ini bukan lagi Ormas tradisionalis. Lebih parahnya jika ada yang menuduh NU sebagai Ormas yang tidak merespon isu modernitas. Padahal jika dilihat secara teliti bahwa NU dan modernitas selalu berjalan berdampingan dan NU selalu merespon perkembangan yang selama ini terjadi.

Bidang pendidikan Nahdlatul ulama merespons perkembnagn teknologi ini dengan penggunaan pemebelajaran daring meskipun tidak lagi Covid-19. Bukan hanya metode pembelajaran melainkan sistem pemelajaran yang tidak lepas dari media dgital pada pendidikan Nahdlatul Ulama. Hingga pendidikan pesantren yang notabennya tidak diperblehkannya santri untuk membawa alat komunikasi namun lembaga pesantren sendiri yang memberikan fasilitas tersebut, agar stigma santri kuno tidak lagi melekat dan dapat bersaing dengan pendidika luar pesantren.

Bidang agama seperti pengajian dan dakwah sekarang sudah banyak menggunakan media digital seperi youtube, instagram, tiktok dan lain sebagainya. Pengajian yang disiarkan di mesia sosial banyak mendapatkan respons positif oleh warga NU. Karena pengajian oniline ini bisa dinikmati oleh siapapun dan dengan waktu yang tidak ditentukan. Sehingga penyebaran ajaran agama Islam dengan faham

---

62 Paelani Setia, Asep Muhamad Iqbal, *Adaptasi Media Sosial Oleh Organisasi Keagamaan di Indonesia: Studi Kanal Youtube Nahdlatul Ulama, NU Channel*, JIPSO Jurnal Ilm Sosia dan Politik, Vol. 11 No. 2 Tahun 2021. Hlm. 17

63 Greg Fealy, *Islamic Radicalism in Indonesia: The faltering Revival?*, Southeast Assian Affairs, Tahun 2004. Hlm. 114

Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa semakin luas. Penguatan faham aswajah di media sosial juga sebagai bentuk perlawanan terhadap faham-faham radikal, ektrimis dan lain sebagainya.

Kehadiran internet sebagai lingkungan baru Islam menuntut NU untuk memainkan peranannya di dunia maya ini, khususnya media sosial. Lahan yang besar yang sangat fleksibel ini menjanjikan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dengan perjuangan NU di media sosial. Berbagai inovasi dibuat sejalan dengan teori “lingkungan Islam siber” di media sosial. Misalnya, mendesain website yang kekinian dengan nama NU Online yang menyuguhkan tulisan-tulisan ilmiah tokoh-tokoh NU yang menjawab segala persoalan bangsa sebagai bukti perjuangan “baru” NU. Di Instagram, NU Online (nuonline_id) memiliki sekitar 808.000 pengikut dan menyajikan konten foto dan video yang menyejukkan dan mencitrakan Islam yang damai. Sebagai penyambung aspirasi dan jembatan konten lainnya, NU juga aktif di Twitter melalui nama yang sama, NU Online (@nu_online) dengan sekitar 696.200 pengikut yang biasa digunakan untuk memperbaharui informasi dan penyebaran dakwah agama NU di media sosial. Tidak ketinggalan, di YouTube NU juga sangat fenomenal melalui konten-konten video yang kolaboratif dan inovatif dengan nama NU Channel.

Alhasil, pemahaman media sosial sebagai ruang baru bagi gerakangerakan Islam terlihat jelas dalam respon NU ini. Keikutsertaan NU di media sosial tidak hanya menjawab tuduhan terhadapnya yang seringkali dinilai tradisionalis, tetapi juga bergerak lebih jauh dengan menyajikan konten-konten Islam yang moderat. Konteks ini sejalan untuk melawan narasi-narasi esktrem di media sosial.[64] NU dalam hal ini hadir sebagai salah satu organisasi yang paling vokal melawan narasinarasi radikalisme di Indonesia terutama di media sosial. Apalagi melihat data dari Kominfo yang menyebut bahwa di tahun 2020 terdapat sebanyak 13.032 konten radikal di media sosial yang tentu menjadi ancaman serius.[65] Selain itu, NU juga erat berseberangan dengan organisasi keagamaan radikal yang sering disebut-sebut menguasai media sosial. Setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah tahun 2017 silam, dan FPI ditahun 2020, NU mendapat peluang lebar untuk mengembalikan wajah Islam yang moderat baik

64 Puji Harianto, *Radikalisme Islam dalam Media Sosial (Konteks: Channel YouTube).* Jurnal Sosiologi Agama Vo. 12 No. 2 Tahun 2018. Hlm. 297-326.

65 Kristina Natalia, *Sebanyak 13.032 Konten Radikalisme dan Terorisme Tersebar di Medsos Diblokir*. Kumparan.com, 11 September 2020.

secara offline maupun secara online.

Nilai-nilai aswajah yang sekarang dapat disamapikan dengan media digital membuat pemurnian dari konten-konten radikal di media digital. Transformasi dari tradisional ke digital membangkitkan ghiroh warga nahdliyin dalam menumbuhkan nilai-nilai aswajah. Jika disampaikan dalam porses konfensional maka pesan ini tidak akan menjangkau khalayak luas. Namun jika disampaikan dengan memanfaatkan media digital maka akan menjangkau hampir keseluruhan umat manusia.

Seperti halnya Abdullah ibn Baz dalam Andi Faisal Bakti merekomentasikan agar media baru digital dapat digunakan untuk dakwah. Karena beberapa alasan seperti:

1. Mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejab dengan biaya dan energi yang relatif terjangkau
2. Penggunaan jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis.
3. Pakar dan ulama yang berada di balik media dakwah via internet bisa lebih konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang menuntut status hukum syar'i
4. Dakwah melalui internet sudah menjadi salah satu pilihan masyarakat.
5. Cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah via internet bisa menjangkau segmen yang luas.
6. Pembelajaran ilmu akan berlangsung efektif ketika disosialisasikan secara informal
7. Hal yang dipelajari dari da'i yang dicintai lebih mudah diserap dibandingkan dengan pembelajaran konvensioanal
8. Akan lebih mudah dalam menyerap ilmu pengetahun dengan keadaan santai daripada dalam posisi tegang.[66]

Akulturasi Budaya Nahdlatul Ulama dan Teknologi Informasi

Nahdaltul Ulama sebagai sebuah organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dinamika yang terjadi dalam tubuh organisasi NU tentu tidak dapat dilepaskan dari akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia. Seperti peristiwa terjunnya NU kedalam politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952

66 Andi Faisal Bakti dan Venny Eka Maidasari, *Trendsetter Komunikasi di Era Digitas: Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 4 No. 1 Juni 2014. Hlm. 34

dan kemudian mengikuti pemilu 1955, yang kemudian juga NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Periode-periode yang terjadi di tubuh organisasi NU sama halnya menarik seperti apa yang terjadi di Muhammadiyah. NU sebagai gerakan Islam pembaharu memberikan warna dan corak gerakan pembaharuan Islam yang terjadi di Indonesia dalam setiap periodenya. Contoh yang sudah terjadi peristiwa ketika terpilihnya tokoh Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia, kita kenal Gus Dur sebagai tokoh pluralism nya Indonesia, hal ini juga memberikan warna dan perubahan bagi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, dan bahkan di dunia.

NU pada dasarnya bukan hanya terjun ke dalam politik praktis atau politik kenegaraan, tetapi juga sama halnya dengan Muhammadiyah terjun ke dalam dinamika sosial-kemasyarakatan. Dengan mengadopsi apa yang layak dalam tradisi untuk dikembangkan demi kepentingan masa kini dan masa depan merupakan langkah pemaknaan yang paradigmatic, karena sebuah transformasi, baik pemikiran harus beranjak dan menimba inspirasinya dari tradisi. Maka, diperlukan ikhtiar dan tajdid untuk menggali hal- hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi.

Melihat perkembangan organisasi pembaharu NU mempunyai jargon bahwa gerakan kembali ke *khittah* 1926, yang menjadi tonggak awal, karena masifnya pergerakan NU dalam pembaharuan Islam. Meskipun bahwasannya bahwa gerakan kembali ke *khittah* ini adalah faktor politis dan non-politis, tetapi diluar itu ada faktor lain yang akhirnya membuat gerakan NU 1926 ini menjadi sebuah paradigma kebudayaan.

Tedi Kholiludin mempunyai pandangan, ada tiga tema dasar dan besar yang melatar belakangi beridirinya NU yaitu integritas terhadap bangsa, independensi dari kolonialisme, dan hak untuk berkeyakinan. Tiga konteks itulah yang menjadi kerangka khittah 1926 sebagai paradigma kebudayaan, bukan paradigma politik. Maka dari itu, formulasinya jelas, bahwa *khittah* tersebut, adalah peduli terhadap persoalan kebangsaan, kritis terhadap kekuasaan dan menjaga hak warga negara untuk bebas beragama dan berkeyakinan.

Selain politik praktis atau politik kenegaraan NU juga terjun kedalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan kegiatan ini dimulai pasca Muktamar di Situbondo pada tahun 1984. Pada saat itu, muncul kader-kader muda NU seperti Gus Dur, Fahmi Saifuddin, dan Mustofa

Bisri. Dari sini, muncul wacana-wacana baru dimana kemudian perkembangan pemikiran ini tidak hanya berlaku pada tataran teologis namun juga berbicara pada tataran sosialkemasyarakatan. Konsekuensi ini kemudian memunculkan corak baru pada dunia pemikiran Islam.[67]

Sejarah menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah organiasai yang mampu masuk dalam segala bidang. Apalagi dengan proses perkembangan teknologi digital ini Nahdlatul Ulama memberikan respon positif dengan menggabungkan budaya lama dengan budaya baru, sehingga budaya lama tidak tergerus dengan budaya baru. Hal ini dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama agar generasi penerus nahdliyin mampu merespon perkembangan zaman mendatang.

Seperti narasi sebelumnya bahwa Nahdlatul Ulama tidak dapat terhindar dari perkembangan zaman apalagi revolusi digital saat ini. Satu hal yang paling menonjol bahwa berita hoax dan narasi kebencian dari berbagai kelompok Islam yang berusaha menjatuhkan marwah NU dengan menyebutkan bahwa Islam Nusantara adalah faham baru yang sesat. Eksistensi Nahlatul Ulama di media digital terbentu dari beberapa model: pertama tanpa identitas, kedua berbasis swadaya pesantren, ketiga berbasis komunitas Islam Nusantara dan keempat berbasis Nahdlatul Ulama. Dari semua ini adalah praktik warga nahdliyin di media digital.[68]

Nahdlatul Ulama menjadi salah satu Orma Isam yang sangat berkontribusi dalam memberikan jawaban atas problematika masyarakat dengan menebarkan ajaran Islam yang Rahmatan lil Alamin yang saat ini dikemas dengan media digita. Peran Nahdlatul Ulama di media digital sangat jelas dalam melawan berita-berita hoax dan berita yang menebar ujaran kebencian.[69] Dalam banyak kajian akademik bahwa Nahdlatul Ulama merupakan benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu Nahdlatul Ulama harus selalu berkiprah dalam segala aspek dan mampu memanfaatkan

67 Yeyen Subandi, *Gerakan Pembaharuan Keagamaan Reformis-Modernis: Studi Terhadap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Resolusi, Vol. 1 No. 1 Juni 2018. Hlm. 45

68 Mukodi, *Revitalisasi Islam Nusantara di Era Digital*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol, 9, No. 2, Desember 2017. Hlm. 98

69 Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Muhammad Saiful Umam, *Quo Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong Peran NU-Muhammadiyah di Era Revolusi Industri 4.0* , Jurnal Politea, Vol. I No. I, Tahun 2018. Hlm. 36

media didital sebagai ladang dakwah nahdliyin.

Budaya warga Nahdlatul Ulama yang dulunya hanya sebatan konfensional atau tradisional dengan tatap muka yang serkang bergeser dengan adanya perembangan teknologi digital. Hampir semua budaya di Nahdlatul Ulama dapat dikomparasikan dengan media digital saat ini. Contoh pengajian yang dulunya kiai, da'i atau penceraham datang dari kota ke kota dengan jamaah sesuai lokasi dakwah. Namun sekarang dengan bantuan media digital dakwah bisa lebih luas dan dapat diakses oleh seluruh umat manusia. Meskipun demikian perlu adanya penekanan bagi warga Nahlatul Ulama untuk terus menjaga tradisi yang sudah ada sejak Nahdlatul ulama hadir.

Perkembangan teknologi bukan hambatan bagi perkembangan budaya Nahdlatul Ulama. Namun jika terlena dengan perkembangan teknologi maka generasi penerus budaya Nahdlatul Ulama akan hilang. Maka, akulturasi budaya tradisional dan modern perlu sebagai bentuk pelestarian budaya Nahdlatul Ulama. Seperti tahlilan, istighosah, jamiyaan, manaqiban, isharian dan lain sebagai sebagai bentuk akulturasi adalah membuat dokumentasi kegiatan tersebut sehingga dapat diakses di media digital.

Jika dulu informasi hanya bersumber dari televisi, koran dan radio yang jangkauan informasinya terbatas serta sangat lambat. Maka dizaman digitalisasi ini informasi yang didapatkan jangkauannya lebih luas serta kecepatannya bahkan dalam hitungan detik. Terjadi juga pergeseran paradigma antara kalangan tua dan kaum milenial misalnya terkait media mainstream. Jika kita beranggapan bahwa media mainstream adalah koran dan televisi, kaum milenial justru lebih banyak menjadikan media online sebagai sumber informasi yang mereka lahap setiap hari. Media online juga ada yang tetap mengandalkan media online yang jelas sumber dan kredibilitasnya, tapi ada juga yang hanya asal membaca yang penting isi dan bacaan itu sesuai dengan ideologi dan pemikirannya. Belum lagi dengan maraknya media dikuasai oleh kalangan politisi, muncul sikap ketidakpercayaan dan pemilahan yang masing-masing memiliki stasiun televisi yang dianggapnya sesuai dengan pandangan politik mereka. Kondisi ini secara tidak langsung tentu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan informasi yang disampaikan.

Salah satu basis interaksi antarumat beragama adalah toleransi. Perbedaan bukanlah alasan untuk bertindak intoleran kepada

siapa pun. Menerima dan menghormati persamaan memang lebih mudah daripada menerima perbedaan karena yang terakhir ini butuh kedewasaan. Sebab itulah, kualitas beragama seseorang bisa diukur dari seberapa bijak ia mampu berinteraksi dengan perbedaan. Maka dari itu, sikap toleransi pada dasarnya adalah mendamaikan perbedaan untuk saling menghargai dan menghormati identitas, perilaku, dan kepentingan masing-masing.[70]

Sikap yang mudah untuk berbagi dan menyebarkan informasi memang baik, akan tetapi sikap ini perlu dikendalikan dengan baik agar tidak sembarang informasi dengan mudahnya kita bagikan kepada pihak lain. Perlu kearifan, kebijaksanaan dan ketelitian sebelum membagikan dan menyebarkan sebuah informasi. Budayakan membaca dengan teliti informasi yang kita dapatkan sebelum dibagikan. Jika sekiranya informasi itu keliru dan mengandung unsur ujaran kebencian kita bisa memperingatkan orang yang menyebarkannya kepada kita agar tidak menyebarkan lagi dan kita juga cukup menyimpannya untuk kita tidak dikirim ke orang lain. Ujaran kebencian dan berita hoax memang begitu banyak di media sosial baik yang bersifat terbuka dan dapat dengan mudah diketahui oleh orang banyak atau juga diruang-ruang percakapan tertutup di grup-grup yang biasanya dengan mudah banyak yang asal memforwad apa yang didapatkan.

Perbedaan dan keragaman agama di Indonesia bisa menjadi potensi munculnya konflik dan disintegrasi bangsa bila tidak saling memahami, curiga, dan fanatisme berlebihan terhadap agama dan keyakinanya. Sebaliknya, bila keragaman tersebut dikelola dengan baik dan bijaksana akan melahirkan sikap pengertian bahwa perbedaan itu merupakan rahmat dan fitrah ilahi yang patut disyukuri dan justru menjadi kekayaan khazanah bangsa Indonesia itu sendiri.[71]

Secara historis perjumpaan Islam dengan agama-agama lain telah berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW. Islam datang dalam konteks agama Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya, dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat baru di Madinah, Nabi tidak menafikan kelompokkelompok di luar Islam, melainkan mengakomodir kepentingan mereka dan mengajak untuk bekerja

70 Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Media Utama, 2016. Hlm 16.

71 Lasijan, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*, Jurnal TAPIs, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2014. Hlm. 132

sama. Langkah Nabi ini kemudian dikenal dengan "Piagam Madinah". Di samping itu dalam Islam juga dikenal adanya perjanjian yang dibuat Umar bin Khatab dengan penduduk Yerussalem, setelah kota suci itu dibebaskan oleh tentara muslim. Perjanjian itu memuat jaminan keamanan jiwa, harta dan agama penduduk setempat.

Konsep berita yang ditawarkan Al-Qur'an sangat signifikan dan memberi kontribusi dalam sistem pemberitaan pada media massa, khususnya media sosial. Beberapa implikasi dari konsep berita dalam Al-Qur'an dalam sistem pemberitaan sebagai berikut: Sumber berita harus jelas, berita harus benar, berita harus sesuai dengan fakta.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi memaksa masyarakat, termasuk warga Nahdliyin, untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan zaman. Digitalisasi menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan budaya NU secara luas, mengubah pendekatan dakwah yang dulunya konvensional menjadi lebih modern dan menjangkau khalayak global. Meski membawa banyak manfaat, media digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, radikalisme, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, pengawasan, dan pengelolaan yang bijak untuk memastikan teknologi digunakan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai positif, toleransi, dan kebaikan. Transformasi digital Nahdliyin menunjukkan komitmen NU dalam menjaga ajaran dan tradisi Islam yang moderat, beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai aswajah.

Menyelaraskan Hidup Warga NU Di Era Digital

Ela Indah Dwi Syayekti

"Ilmu dan teknologi harus beriringan dengan iman dan takwa." Begitulah ucapan almarhum BJ Habibie yang dikutip oleh Habib Husein Ja'far dalam akun twitternya.

Saat ini, perkembangan teknologi informasi membawa umat manusia memasuki era digital yang menembus batas ruang dan waktu. Banyak kemudahan yang didapatkan mulai dari akses informasi yang sudah merata, kemudahan untuk berkomunikasi dan bertransaksi karena adanya internet yang bisa menembus ruang dan waktu, serta banyaknya pelajaran, keterampilan dan pekerjaan yang dapat diakses secara daring. Kemudahan tersebut membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dan memudahkan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, dari komunikasi hingga pekerjaan dan pendidikan.

Namun perkembangan teknologi juga menjauhkan manusia dari dunia nyata karena kehidupan mereka berfokus pada dunia maya, sehingga mengurangi interaksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Dampak negatif untuk individu misalnya budaya malas gerak, kesenjangan digital, dan tidak fokus belajar karena lebih memilih untuk berselancar di dunia maya. Kemajuan teknologi juga mempersempit lapangan pekerjaan karena banyak kerja yang digantikan dengan robot, juga pendidikan di dunia maya yang terkadang mengabaikan nilai moral. Selain itu hadirnya internet turut memperluas tindakan kriminal seperti pelanggaran hak cipta, informasi yang tidak sesuai dengan fakta, penipuan digital, penyebaran pornografi, resiko pelanggaran privasi dan pencurian data, serta *cyberbullying, hoax*, dan konten pornografi. Dampak negatif ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital membawa banyak kemudahan, tetap ada tantangan dan risiko yang harus dihadapi untuk mengoptimalkan manfaatnya.

Lantas apakah dengan berbagai dampak negatif tersebut kita harus meninggalkan teknologi di era digital dan hidup seperti nenek moyang kita? Bukankah hal tersebut tidak bijak. Sedangkan islam mengajarkan umatnya untuk bersikap *tawassuth* (tengah-tengah) dan *tawazun* (seimbang) dalam merespon perubahan yang sedang

terjadi?

Kegelisahan agama di era digital

Teknologi dan agama dapat berjalan beriringan atau bertentangan dalam beberapa hal karena pengaruh atau dampak yang dibawa oleh teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut diantaranya: perkembangan teknologi dapat mempengaruhi budaya dan pola hidup masyarakat, sehingga dapat menyebabkan konflik antara nilai-nilai agama dengan praktik-praktik teknologi modern. Perkembangan teknologi turut menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan menciptakan kesenjangan yang lebih luas. Kemudahan dan peningkatan akses pendidikan, tetapi juga dapat menimbulkan kesenjangan digital karena tidak semua masyarakat dapat mengakses internet dengan mudah. Interaksi sosial masyarakat mengalami pergeseran, sehingga dapat menciptakan individu yang apatis terhadap lingkungan sekitar. Perkembangan teknologi juga membawa dampak terhadap moral dan etis, kemudahan akses dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta dan pencurian data pribadi.

Dengan berbagai dampak yang dibawa, sudah seharusnya perkembangan teknologi dimanfaatkan secara bijak agar dapat berjalan beriringan dengan agama dan masyarakat. Karena jika tidak, berbagai dampak negatif seperti kerusakan moral dan lingkungan dapat terjadi. Teknologi dapat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika seperti dalam kloning manusia. Pendidikan yang dapat diakses dengan mudah di internet terkadang mengabaikan sisi moral yang bertentangan dengan aspek utama dalam agama. Komunikasi di dunia maya seringkali juga mengabaikan etika menghargai dan menghormati manusia lain. Dampak tersebut juga yang membuat masyarakat Indonesia dijuluki sebagai netizen paling tidak sopan se Asia Tenggara berdasarkan data Digital Civility Index (DCI). Kemajuan teknologi juga berdampak pada lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggungjawab, tidak adil, dan tidak etis. Hal tersebut menyebabkan kegelisahan di tubuh internal agama mengenai bagaimana merespon perkembangan era digital dan strategi pemanfaatannya dengan bijak. Memanfaatkan hadirnya era digital secara baik dan bijak dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan pertentangan antara teknologi dengan agama. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip islam yaitu keadilan,

tanggung jawab, integrasi, dan relevansi dengan isu-isu kontemporer.

Berubahnya kultur warga NU

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama. NU merupakan jam‟iyah keagamaan yang bergerak di bidang dakwah Islam, yang meliputi bidang keagamaan, pendidikan dan sosial- kemasyarakatan. Karena bergerak dalam bidang dakwah, aktivitas NU seringkali berbasis kultural yang mengadaptasi tradisi masyarakat setempat. Aktivitas kultural Nahdlatul Ulama (NU) meliputi berbagai tradisi dan upacara keagamaan yang telah menjadi bagian dari budaya organisasi NU seperti *istighatsah, tahlil, diba'an, manaqib*, yasinan, haul, maulid nabi, dan ziarah kubur. Selain aktivitas kultural, sarana prasarana yang digunakan juga dekat dengan kehidupan masyarakat seperti adanya beduk dan toa masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai pengingat waktu solat, juga sebagai sarana menyebarkan informasi untuk warga.

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, aktivitas warga NU yang awalnya di dunia nyata mulai bergeser ke dunia maya, dari media konvensional ke platform digital atau internet. Seperti penggunaan toa masjid yang biasanya digunakan untuk menyebarkan informasi kematian, tahlilan dan perkumpulan lainnya, kini mulai berubah melalui pesan *whatsapp group*. Pergeseran aktivitas tersebut turut membawa dampak bagi kehidupan warga NU.

Perubahan aktivitas masyarakat dari dunia nyata ke dunia maya terjadi karena berbagai faktor, termasuk peningkatan aksesibilitas internet, kemudahan dalam berkomunikasi, dan pengaruh teknologi digital. Komunikasi yang awalnya harus bertatap muka kini dapat berganti melalui media sosial. Hal ini menyebabkan berkurangnya tradisi *sowan* atau menyampaikan informasi di acara-acara tahlilan atau perkumpulan warga NU lainnya. Kemudahan akses informasi turut memudahkan pengurus structural NU untuk menyampaikan informasi melalui web atau media sosial, sehingga berita dan keputusan apapun akan mudah tersebar kepada warga.

Hadirnya internet membuat masyarakat lebih mudah mengakses materi agama yang diinginkan karena segmentasi yang lebih tertata. Namun diperlukan kehati-hatian karena tidak semuanya mengandung hikmah, melainkan ada juga yang mengandung

provokasi, cacian, kecaman, hinaan, ancaman dan lain sebagainya. Kita harus selektif terhadap materi agama atau berita yang kita lihat seperti bisa memilah materi mana yang layak dan tidak pantas untuk dilihat atau disampaikan pada publik yang dapat menimbulkan perselisihan. Serta kita tidak boleh menelan mentah- mentah materi agama atau berita yang berpotensi keliru dan merusak persatuan.

Kemudahan yang didapatkan tersebut harus dibarengi dengan sikap bijak karena dampak dari jejak digital dan berita palsu tidak mudah terhapus. Masyarakat harus menyikapi secara bijak postingan yang didapatkan dan mengkonfirmasi kebenarannya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Saat ini banyak berita atau link yang mengandung provokasi, adu domba, fitnah, *hoax*, tuduhan, dan kebencian yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama. Sehingga kita sebagai warga NU harus lebih selektif sehingga turut berperan menjaga kerukunan umat. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah etika saat menggunakan media sosial. Kita tidak boleh mengunggah sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, caci maki dan perbuatan kasar lainnya. Sebaliknya, seperti yang diajarkan oleh islam, kita harus menggunakan internet dengan baik dan bijak. Menggunakan bahasa yang sopan, menghargai orang lain, berbicara santun dan hikmah, serta menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Kita justru harus menjadi teladan untuk orang lain dalam menjaga etika dan kerukunan di media sosial dengan cara tidak memprovokasi dan tidak termakan oleh berita bohong.

Dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat karena perkembangan teknologi, warga NU harus tetap menggunakan prinsip yang diajarkan oleh NU yaitu: *tawassuth* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (seimbang), *i`tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi) ketika dalam bermedia sosial ada yang berbeda keyakinan, *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah) ketika dibutuhkan keputusan atau terjadi cekcok di media sosial, *ishlah* (reformasi), *aulawiyyah* (mendahulukan yang prioritas) sehingga warga NU tidak menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya sehingga melupakan ibadah dan kewajiban lainnya, *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif) untuk menyelaraskan kehidupan dengan teknologi sehingga tidak terjadi penolakan yang keras, dan *tahadhdhur* (beradab) yang merupakan hal paling penting dalam menggunakan media sosial sehingga tidak menyinggung perasaan pengguna lain.

Hal tersebut berfungsi agar ketika warga NU menggunakan media sosial dan internet tetap menghormati adat dan tradisi, moderat, mampu memadukan dan mengadaptasikan etika bermedia sosial dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Warga NU juga harus memiliki karakter kontekstual, toleran, menjaga tradisi, progresif, dan berpikir luas baik di media sosial atau internet maupun di kehidupan bermasyarakat secara langsung.

Menyelaraskan teknologi dengan kehidupan

Era digitalisasi tidak hanya berpengaruh pada pola sistem informasi dan komunikasi tetapi juga terjadinya sebuah percampuran budaya global yang bisa berakibat pada fisik dan mental. Sarana informasi dan transportasi telah mempermudah hubungan antar budaya semakin cepat dan kuat. Di era digital, hubungan antar manusia tidak hanya sebatas satu wilayah saja, tetapi bisa mencakup manusia di seluruh dunia. Kemudahan relasi dan interaksi antar sesama manusia dan berbagai komponen budaya menjadi bagian dari hubungan dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya akulturasi antar budaya dan manusia. Dengan demikian, adanya teknologi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia sekaligus juga menjadi tantangan dalam arus perkembangan zaman

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin berkembang, sehingga agama ditantang untuk memberikan respon dan refleksi yang mencerahkan masyarakat. Agama harus membantu manusia untuk merefleksikan dan memaknai berbagai pengalaman konkret dalam hiruk pikuk dunia ini. Salah satu refleksi penting yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelaraskan perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat agar tidak bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku. Karena pada dasarnya, perkembangan teknologi dan agama bukanlah suatu yang harus terus dipertentangkan relevansinya, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menyejahterakan hidup masyarakat.

Islam menganggap teknologi sebagai sebuah kemudahan karena dapat bermanfaat untuk membantu aktivitas manusia dan sebagai alat untuk mengeksplorasi. Islam memiliki perspektif dan landasan mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika. Islam berpandangan bahwa teknologi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Sebaliknya, IPTEK harus digunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia secara

harmonis antara teknologi, nilai agama, dan nilai moral masyarakat. Oleh karena itu, Islam berusaha untuk mempromosikan kepentingan seluruh umat manusia dengan meletakkan diri pada suatu perspektif yang universal, berpijak pada kemaslahatan bersama dan toleransi dengan pemeluk agama lain

Umat Islam dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari perspektif Islam. Kegiatan yang dapat dilakukan berupa penelitian ilmiah modern, mempersatukan perbedaan pendapat antara ilmuwan dan pemuka agama, serta menghargai ciptaan Allah SWT dengan mengamati keindahan dan karunia ciptaan-Nya baik dimasa lampau; masa sekarang; masa depan. Selain itu dapat melalui berbagai cara yang memungkinkan penggunaan teknologi untuk memperkaya dan memperluas praktik keagamaan. Hal tersebut seperti penggunaan aplikasi keagamaan yang memudahkan umat mengakses Al-Qur'an serta ajaran keagamaan secara mudah melalui ponsel dan dapat dilakukan di mana saja, seperti yang terdapat dalam aplikasi NU online. Kemudahan ini membuat warga NU lebih memperkuat iman serta lebih tertib menjalankan ibadah serta amaliyah lainnya.

Menggunakan media sosial untuk berdakwah, pesan yang disampaikan yaitu mengenai kebaikan, toleransi, dan saling pengertian, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dakwah di media sosial dan internet juga memungkinkan umat islam untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam diskusi dan komunitas keagamaan yang positif. Dengan hadirnya dakwah melalui internet, masyarakat dapat lebih mudah mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan Namun hal yang harus diperhatikan adalah harus selektif, mencerna materi dakwah yang disampaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan tindakan anarkis lainnya.

Dalam ranah sosial, perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat akan suatu permasalahan, juga memudahkan menyebarkan informasi saat ada hal yang penting. Misalnya pada masa pandemi kemarin, adanya teknologi membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan lebih mudah dan aman, serta lebih mudah memantau kondisi dan informasi yang ada di luar lingkungan masyarakat setempat.

Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran bahwa agama dan teknologi saling membutuhkan dalam mengembangkan moralitas. Iman yang kontekstual dan aktual memberi pencerahan bagi pengembangan teknologi yang berkualitas dan humanis. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan teknologi dapat digunakan untuk memperkaya hidup bersama dan mengembangkan kualitas hidup. Pentingnya perkembangan teknologi ini selaras dengan banyaknya ayat yang membahas mengenai teknologi di Al-Qur. an, menurut menurut Muhammad Ijazul Haq dari Universitas Damaskus menemukan sebanyak 750 ayat Al-Qur'an membicarakan mengenai ilmu pengetahuan. Sehingga Perkembangan IPTEK seharusnya menjadi ilmu pengetahuan yang harus dipelajari dan dimanfaatkan untuk kehidupan beragama.

Dengan demikian, agama sudah seharusnya dapat beradaptasi dengan teknologi melalui berbagai cara, yang memungkinkan penggunaan teknologi untuk memperkaya dan memperluas praktik keagamaan. Agama dan keyakinan iman tidak perlu dipertentangkan dengan perkembangan IPTEK. Manusia beragama dan manusia IPTEK adalah makhluk yang sama sebagai ciptaan Allah. Sebaliknya, agama dan teknologi melalui pembelajaran bersama secara dialogis digunakan untuk menangani dan merespon berbagai persoalan kemanusiaan secara konkret dan pengalaman kebersamaan di tengah suka-duka kehidupan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Secara spesifik, Nahdlatul Ulama (NU) memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kegiatan kulturalnya melalui berbagai inisiatif dan program. Dengan memanfaatkan teknologi, NU dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas kegiatan kulturalnya, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan spiritual yang menjadi bagian dari identitas organisasi. Beberapa contoh bagaimana NU memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan media sosial dan digital untuk berdakwah dan menyebarkan informasi terkait kegiatan kulturalnya. Hal ini membantu dalam penyebaran informasi dan meningkatkan aksesibilitas kegiatan-kegiatan NU kepada lebih banyak orang. Selain itu, penguasaan media sosial dan digital yang dilakukan NU dapat melawan postingan-postingan yang memberikan ujaran kebencian serta berusaha untuk memecah belah umat.

NU berfokus pada pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan kemandirian organisasi. Program seperti NU Tech,

yang melibatkan kompetisi inovasi dan pelatihan digital, bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan transformasi budaya dalam organisasi. Dengan adanya literasi digital, warga NU tidak mudah terprovokasi dan tidak mengakses informasi secara sembarangan. Sehingga perubahan kultur warga NU tidak membawa dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar. Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan penggunaan teknologi yang antikapitalis juga diharapkan dapat membantu dalam transformasi digital dan peningkatan kualitas kegiatan kultural NU.

Pelatihan dan peningkatan keterampilan yang diselenggarakan oleh NU dalam bidang jurnalisme warga, kepenulisan, dan *video maker* berfungsi untuk membangun keterampilan digital di kalangan anggotanya. Hal ini membantu dalam pengembangan konten digital yang berkualitas dan relevan dengan kegiatan kultural NU, serta membuat warga NU mendapatkan informasi yang valid juga bertindak sebagai penyebar informasi yang baik.

NU bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain untuk mengembangkan teknologi yang dapat mendukung kegiatan kultural. Contohnya, kerjasama antara perguruan tinggi NU dengan universitas lain untuk mengembangkan inovasi teknologi yang dapat digunakan dalam kegiatan.

Bagaimana strategi NU dalam merespon perkembangan teknologi, serta bagaimana membuat relevan dengan agama menunjukkan bahwa agama dan teknologi tidak harus dipertentangkan. Islam dan teknologi dapat berhubungan secara positif, negatif, atau netral karena agama juga merupakan nilai dan ide. Islam berusaha untuk mempromosikan kepentingan seluruh umat manusia dengan meletakkan diri pada suatu perspektif yang universal, berpijak pada kemaslahatan bersama dan toleransi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan teknologi hadir untuk memudahkan dan menyejahterakan hidup umat manusia. Perkembangan teknologi dan agama harus dapat beradaptasi dan berkolaborasi untuk membantu perkembangan Islam di dunia modern.

Dalam kaitannya dengan era digital dan dampaknya terhadap perubahan kultur warga NU, perubahan pola interaksi warga NU yang awalnya melalui tradisi silaturahmi dan perkumpulan kini berganti menggunakan media sosial tidak menjadi masalah. Hal yang perlu ditekankan adalah warga NU tetap berkomunikasi secara baik dan bijak sesuai dengan ajaran islam, meskipun sudah terdapat internet,

tradisi silaturahmi sebaiknya tidak ditinggalkan begitu saja. Dalam mengakses dan menyebarkan informasi, warga NU harus selektif dan memastikan kebenarannya agar tidak termakan oleh berita bohong serta tidak memecah belah persatuan umat.

Era digital juga seharusnya membuat manusia tetap memandang manusia lain sebagai sosok yang setara. Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di media sosial terutama kepada perempuan sudah seharusnya membuat kita sebagai warga NU tetap memandang mereka yang berada di media sosial sebagai sosok yang setara, sebagai saudara seperti kita memandang organisasi Muslimat, Fatayat dan organisasi perempuan lainnya dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Sehingga perubahan kultur yang terjadi dalam kehidupan warga NU tetap menciptakan kehidupan yang harmonis serta ruang aman bagi siapapun, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Daftar Pustaka

https://www.merdeka.com/teknologi/5-kemudahan-hidup-di-era-digital.html

https://www.baktikominfo.id/id/detail-berita/dampak-positif-dan-negatif-perkembangan-teknologi-komunikasi-di-era-digital

https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/download/4743/3405

https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/ketika-agama-menghadapi-tantangan-sains-dan-teknologi-VTuQO

https://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/22252611/cara.nu.menjaga.nilai-nilai.islam.melalui.jalan.kebudayaan?page=all

https://www.ipmafa.ac.id/islam-dan-pengembangan-teknologi/.

https://jateng.nu.or.id/opini/nahdlatul-ulama-dan-perkembangan-teknologi-6keAN

Mastori and Athoillah Islamy, 'Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial', Komunikasia: Journal of Islamic Communication & Broadcasting, 1.1 (2021), 1–18.

Majelis Sabilu Taubah: Bukti Nyata Adanya Pengaruh Digitalisasi dalam Dakwah dan Implementasi Amaliyah NU

Wafiq Kamilatul Lailiyah

YouTube merupakan media sosial paling populer dengan pengguna mencapai 88%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya menonton video dari *YouTube*.[72] Sekarang *YouTube* menjadi media digital yang cukup populer sebagai sarana kegiatan dakwah. Menyampaikan ilmu dan agama menggunakan *YouTube* sudah banyak digunakan oleh para pendakwah, Ketika memulai dakwahnya, mayoritas para pendakwah sudah memiliki ciri khasnya masing-masing agar video yang ditayangkan bisa menarik perhatian *viewers*. Dengan demikian, pendakwah di era sekarang harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat yang mengalami perkembangan, baik dari segi isi, metode, dan media yang akan digunakan. Pendakwah sendiri seharusnya adalah orang yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas dalam menyampaikan materi dakwah. Langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dakwah di era sekarang yakni dengan menggunakan metode efektif dan relevan, serta menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat yang dihadapi. Salah satu diantaranya adalah menggunakan salah satu media yang populer yakni *YouTube*.

Siapa yang tidak mengenal *majelis* yang dipimpin oleh Agus H. Muhammad Iqdam Kholid di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Majelis ini selalu diikuti oleh puluhan ribu jamaah baik yang datang secara langsung, maupun yang menyaksikan dan ikut serta sebagai jamaah online melalui *streaming youtube*. Antusiasme masyarakat baik dari kalangan *nahdliyyin* maupun yang lainnya sangatlah tinggi untuk mengikuti rutinan yang dilaksanakan oleh *Majelis Sabilu Taubah* setiap hari Senin malam Selasa dan Kamis malam Jumat. Bahkan, banyak dari mereka yang berasal dari daerah-daerah yang cukup jauh rela datang ke Blitar untuk menimba ilmu dan mengikuti kegiatan keagamaan di majelis ini. Selain itu, jamaah online yang mengikuti pengajian dan rutinan shalawat melalui streaming YouTube tentu

72 https://dataindonesia.id (diakses pada Selasa, 9 Juli 2024)

tidak kalah banyak, bahkan dari luar negeri juga ada.

Pengaruh Digitalisasi dalam Dakwah

Penggunaan *YouTube* sebagai media dakwah merupakan bukti nyata adanya pengaruh digitalisasi dalam dakwah pada masa sekarang. Konsep dakwah yang terus mengikuti perkembangan zaman juga menjadi kebangkitan umat Islam di bidang teknologi,. Selain itu , hal ini juga membuktikan bahwa umat muslim tidak mengalami ketertinggalan terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu jika kegiatan dakwah berhasil dengan menggunakan teknologi modern, maka seluruh dunia akan mengetahui tentang ajaran Islam yang sesungguhnya.

Gus Iqdam adalah pendakwah yang terkenal dengan ciri khas dakwahnya yakni menggunakan komunikasi dengan jamaah sebagai media penyampaian nasihat dalam setiap dakwahnya yang kebanyakan berdasarkan dari kejadian sehari-hari yang dialami masyarakat. Selain itu banyak kata yang melekat pada Gus Iqdam yang akhirnya banyak yang menggunakan kalimat tersebut, seperti "Dekengan Pusat" yang melekat sekali di setiap ceramah beliau. Dan juga kata "Garangan" untuk menyebut jamaahnya yang mayoritas kaum awam yang masih sering melakukan hal-hal yang seharusnya ditinggalkan, namun seiring berjalannya waktu mereka yang rutin mengikuti pengajian lambat laun akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu media yang memiliki peran besar dalam penyebaran dakwah beliau dan juga majelis Sabilu Taubah yakni *Channel YouTube* beliau yang bernana "Gus Iqdam Official" yang saat ini telah mencapai 969 ribu subscriber. Channel youtube ini dinantikan kehadirannya oleh jamaah yang ingin datang langsung di Pondok Pesantren Mambaul Hikam II yang terletak di Desa Karaggayam, Srengat, Blitar. Banyak jamaah juga yang ingin hadir namun terhalang oleh jarak dan waktu, sehingga *channel youtube* beliau sangat dinantikan kehadirannya. Terpantau di setiap kajian beliau di *youtube* selalu mencapai puluhan ribu penonton dari dalam negeri maupun manca negara.

Kajian *beliau* selalu dinantikan setiap hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 20.00 hingga 23.00. ada beberapa perbedaan antara ngaji hari Selasa dan Kamis. Selasa pembahasannya lebih santai dan sering dihadiri tokoh masyarakat, artis maupun orang yang

berpengaruh di negeri ini. Dan dari segi pakainnya juga gus iqdam memilih lebih santai, baju muslim berwarna warni. Sedangkan di hari Kamis seluruh jamaah memakai busana muslim berwarna putih. Kajian beliau selalu diawali oleh sholawat yang digaungkan oleh grup sholawat Sabilu Taubah, sehingga jamaah yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui *YouTube* juga mengikuti membaca sholawat.

Syariah dan amaliyah. Gus Iqdam salah satu ulama yang dapat dijadikan role model jamaahnya. Cara berbicara dan perilakunya yang bak menjadikan beliau sebagai teladan khususnya bagi kaum milenial saat ini. Sesuatu yang melekat pada sosok Gus Iqdam ini adalah rendah hati dan tidak memilih. Hal ini *terbukti* di manapun dakwahnya, sasaran mad'u nya yang berlatar belakang berbeda-beda tetapi Gus Iqdam dapat menyesuaikan dirinya. Sebagai keturunan Jawa sekaligus memiliki kultur yang sama, maka tak jarang Gus Iqdam saat berdakwah menggunakan bahasa Jawa krama. Gus Iqdam dikenal karena memasukkan dagelan dan humor dalam dakwahnya, yang menyenangkan para mad'u. Prinsip-prinsip Islam adalah dia memasukkan pesan dakwahnya melalui nyanyian lucu,sehingga mad'u bisa langsung merefleksikan humor yang ia tawarkan. Selain itu ia mengubah ledekan untuk mencerminkan lingkungan setempat. Gus Iqdam mampu mengesankan orang-orang dengan dakwah cara ini. Tak hanya lelucon Gus Iqdam akan tetapi dalam majelis Sabilu Taubah ini juga mengundang biduan cantik untuk bernyanyi dalam penyampaian dakwahnya, meskipun jamaah banyak yang laki- laki dan menimbulkan polemik. Nilai-nilai Islam biasa tidak disajikan secara serius, menurut Gus Iqdam setiap orang masih melakukan penyesuaian dengan cara masyarakat yang ikut kajiannya, nilai Islam dapat dilakukan dengan santai namun tetaplah lugas dan tegas.

Dengan banyaknya jamaah yang mengikuti kajian di Sabilu Taubah, maka makin banyak pula donatur yang *mendukung* majelis ta'lim ini. Sehingga banyak juga sponsor yang memberikan prodak yang akan dibagikan untuk jama'ah. Yang menarik dalam kajian ini, Gus Iqdam sering mengajak dialog beberap jam'ah. Terutama yang ingin menanyakan permasalahannya dan ada beberapa jama'ah juga yang di pilih berdasarkan dari daerah terjauh yang datang langsung ke Blitar. Seperti jama'ah yang hadir dari Bandung, NTB, Jakarta dan lain-lainnya, yang khusus hadir untuk mengikuti kajian Gus Iqdam ini. Setelah dipilih biasanya Gus Iqdam memberikan hadiah berupa

uang tunai yang didapat dari sumbangan donatur, atau mendapatkan prodak sponson seperti mukenah dan juga skin care. Sehingga dengan kajian yang dikemas seperti ini menjadikan jama'ah antusias. Gaya penyampaian yang santai namun mengenah pesan dakwahnya dan juga diselingi beberapa sholawat serta hadiah untuk pada jama'ah.[73]

Implementasi Amaliyah NU pada Rutinan Majelis Sabilut Taubah

Rutinan *Majelis Sabilu Taubah* pada hari kamis merupakan cara Gus Iqdam untuk mengajak jamaah agar senantiasa menjadi hamba yang senang bershalawat kepada nabinya. Shalawat yang dibaca yakni Maulid *Simthud Durar.* Maulid *Simthud Durar* cukup masyhur bagi kaum Muslimin di Indonesia. Hal itu tidak lepas dari penyusunnya yang sangat alim dan sangat besar kecintaannya kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ. Ia adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sang penulis lahir pada hari Jumat, 24 Syawal 1259 H (17 November 1843 M) di kota Qasam, sebuah kota di negeri Hadramaut, Yaman, dan wafat di kota Seiwun, Hadhramaut, pada hari Ahad 20 Rabi'ul Akhir 1333 H (6 Maret 1915 M).

Penyusunan Maulid Simthud Durar tidak memiliki latar belakang secara khusus. Namun secara eksplisit, Habib Ali Al-Habsyi mengungkap niatnya yang lurus dan meyakini kehadiran Rasulullah di tempat-tempat dibacakannya maulid ini. Beliau mengatakan:

المَوْلِدُ أَنَا أَلَّفْتُهُ عَلَى نِيَّةٍ صَالِحَةٍ، فَتْحٍ جَدِيْدٍ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ رُوْحَهُ ﷺ تَحْضُرُ عِنْدَ قِرَائَتِهِ

Artinya, "Maulid Simthud Durar yang saya susun ini atas dasar niat yang benar, media yang baru, dan tidak diragukan kembali bahwa sungguh ruh Rasulullah akan hadir saat membacanya."[74]

Maulid Simthud Durar ditulis dua tahun sebelum Habib Ali wafat. Tepatnya pada tahun 1330 H (1912 M). Setelah semuanya rampung, kemudian dibacakan dalam rumahnya bersama para habaib yang lain. Setelah pembacaan itu selesai, Habib Ali al-Mantsur berkata:

---

73 Najib, M. F. A. (2023). DAKWAH ISLAM DI ERA MILLENIAL (Studi Pengajian Gus Iqdam Pada Majelis Ta'lim Sabilut Taubah). IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies, 4(2), 53-60.

74 Al-Jawahirul Maknunah wal Asrarul Makhzunah, h. 42).

وَلَمَّا قُرِئَ الْمَوْلِدُ بِبَيْتِهِ سَنَةَ أَلف وثلاثمئة وثلاثون هـ. قَالَ رَضِي الله عَنْهُ: المَوْلِدُ كَأَنْ عَادَ نَحْنُ الا سَمِعْنَاهُ. عَلَيْهِ نُورٌ عَظِيمٌ، وَكُلُّ عِبَارَةٍ صِفَةٌ مَلَانَةٌ بِتَعْظِيمِهِ ﷺ

Artinya, "Setelah maulid (Simthud Durar) dibaca di rumahnya, tahun 1330 H, Habib Ali al-Mantsur berkata: Maulid (Simthud Durar) seperti mengembalikan kita semua (pada zaman Rasulullah), maka dengarkanlah, di dalamnya terdapat cahaya yang mulia, dalam setiap ungkapan terdapat sifat yang sangat condong mengagungkan Rasulullah."[75]

Keutamaan Simthud Durar yang lain juga disebutkan dalam kitab At-Ta'rif bil Maulid min Kalami Shahibil Maulid, dengan mengutip pesan penyusun perihal keutamaan membacanya, yaitu:

مَوْلِدِي هٰذَا أَشْوَفُ أَنَّهُ لَوْ دَاوَمَ الوَاحِدُ عَلَى قِرَائَتِهِ وَحِفْظِهِ وَجَعَلَهُ مِنْ أَوْرَادِهِ، أَنَّهُ يَظْهَرُهُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ سِرِّهِ ﷺ

Artinya, "Maulidku ini (Simthud Durar) sangat bermanfaat. Bahwa sesungguhnya, barang siapa yang tekun membacanya, menghafalnya, dan menjadikannya sebagai wirid, maka sungguh akan ditampakkan kepadanya rahasia (sir) Rasulullah ﷺ.

Berkah dari maulid Simtud duror di malam Jumat dibaca sebagai bentuk tirakatan kepada Tuhan dengan tujuan jamaah Sabilu Taubah bertambah banyak. Gus Iqdam dawuh kalau malam Jumat itu dijadikan malam tirakatan, biar jemaah bertambah banyak,

Kesimpulan

Majelis Sabilu Taubah yang dipimpin oleh Gus Iqdam di Blitar merupakan bukti nyata dari pengaruh digitalisasi dalam dakwah dan implementasi amaliyah NU. Dengan memanfaatkan platform YouTube, Gus Iqdam berhasil menarik perhatian puluhan ribu jamaah, baik yang hadir langsung maupun melalui streaming online. Pendekatan dakwah yang relevan dengan zaman digital ini tidak hanya memudahkan akses terhadap ajaran Islam yang rahmatan

75 Sayyid Ahmad bin Ali bin Alawi al-Habsyi, Syarah Simthud Durar fi Akhbar Maulidi Khairil Basyar wama Lahu min AkhlaqI wa Aushaf wa Siyar, halaman 391

lil alamin, tetapi juga membuktikan bahwa dakwah NU dapat beradaptasi dengan teknologi modern tanpa kehilangan esensinya. Ciri khas dakwah Gus Iqdam, seperti humor dan interaksi langsung dengan jamaah, menjadikan dakwah lebih menarik dan mudah diterima, terutama di kalangan milenial. Majelis ini membuktikan bahwa digitalisasi dapat menjadi alat efektif dalam memperluas jangkauan dakwah dan memperkuat nilai-nilai Islam yang moderat di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Data Indonesia. (2024, July 9). Retrieved from https://dataindonesia.id

Najib, M. F. A. (2023). Dakwah Islam di era millenial (Studi Pengajian Gus Iqdam Pada Majelis Ta'lim Sabilut Taubah). *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies, 4*(2), 53-60.

Al-Jawahirul Maknunah wal Asrarul Makhzunah. (n.d.).

Al-Habsyi, S. A. bin A. bin A. (n.d.). *Syarah Simthud Durar fi Akhbar Maulidi Khairil Basyar wama Lahu min Akhlaqi wa Aushaf wa Siyar* (p. 391).

Transformasi Kultural Warga Nahdlatul Ulama di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Keagamaan dan Sosial

Muhammad Fadhlurrohman

Era digital telah memberikan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks kultural warga Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Warga NU memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kaya yang telah bertahan melalui berbagai perubahan zaman. Transformasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk metode dakwah dan pola komunikasi sosial. Dakwah yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini banyak beralih ke platform digital seperti YouTube, Facebook, dan Instagram, memungkinkan pesan-pesan keagamaan menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam (Niam, 2019). Selain itu, teknologi digital memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota NU melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Skype, yang memungkinkan koordinasi lebih efisien dan hemat biaya (Supriatno, 2018). Namun, era digital menawarkan tantangan dan peluang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dalam hal literasi digital. Literasi digital yang memadai penting agar anggota NU dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan menghindari dampak negatif seperti kecanduan internet (Hafidz, 2021). Generasi muda NU diharapkan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, mengingat mereka adalah pengguna terbesar teknologi dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan dakwah digital (Putri, 2021).

Secara keseluruhan, era digital menawarkan peluang besar bagi warga NU untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, penting bagi mereka untuk tetap menjaga nilai-nilai dan tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas mereka. Dengan demikian, warga NU dapat memaksimalkan manfaat era digital sambil tetap mempertahankan kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Artikel ini akan mengeksplorasi dampak era digital terhadap perubahan kultur warga NU secara mendalam, dari akses informasi hingga keterlibatan politik, serta bagaimana warga NU menavigasi tantangan dan memanfaatkan

peluang dalam konteks digital ini.

Akses Informasi

Salah satu dampak paling signifikan dari era digital adalah akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi. Di masa lalu, informasi keagamaan sering kali terbatas pada ceramah di masjid, pengajian di pesantren, atau buku-buku yang tersedia di toko buku lokal. Namun, dengan munculnya internet, informasi keagamaan kini tersedia hanya dengan beberapa klik saja. Website, blog, dan platform media sosial menyediakan berbagai macam konten keagamaan, mulai dari artikel, video ceramah, hingga podcast (Ibda et al., 2020). Warga NU dapat dengan mudah mengakses ceramah-ceramah dari ulama terkenal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini memungkinkan mereka untuk memperdalam pengetahuan agama mereka tanpa harus meninggalkan rumah. Platform seperti YouTube, Facebook, dan Instagram menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan keagamaan. Banyak ulama NU yang aktif di media sosial, seperti KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Mustofa Bisri, dan Gus Miftah, yang sering membagikan ceramah dan pandangan mereka tentang isu-isu terkini. Namun, akses informasi yang luas ini juga membawa tantangan tersendiri. Tidak semua informasi yang tersedia di internet dapat dipercaya atau memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Warga NU perlu lebih kritis dan selektif dalam memilih sumber informasi, serta memiliki literasi digital yang baik untuk membedakan antara informasi yang valid dan yang menyesatkan.

Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari warga NU. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, tetapi juga untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi tentang isu-isu sosial dan keagamaan, serta membangun komunitas yang lebih erat (Nisa, 2018). Media sosial juga memungkinkan warga NU untuk terlibat dalam diskusi global tentang Islam dan isu-isu terkait, serta untuk menghubungkan diri dengan komunitas Muslim di seluruh dunia. Peran media sosial dalam penyebaran informasi keagamaan sangat besar. Misalnya, grup-grup WhatsApp sering digunakan oleh komunitas NU untuk

mengkoordinasikan kegiatan keagamaan, berbagi informasi tentang acara-acara pengajian, dan menyebarkan dakwah. Di sisi lain, media sosial juga memungkinkan warga NU untuk berinteraksi dengan umat Islam dari berbagai belahan dunia, sehingga memperkaya wawasan mereka tentang berbagai interpretasi dan praktik Islam. Namun, media sosial juga memiliki sisi negatif. Penyebaran informasi yang cepat dan luas dapat menyebabkan penyebaran hoax dan berita palsu, yang dapat merusak reputasi seseorang atau organisasi. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi ajang bagi penyebaran paham radikal dan ekstremis, yang berpotensi mengancam kerukunan dan persatuan umat Islam. Oleh karena itu, penting bagi warga NU untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

Pendidikan dan Pengajaran

Era digital memberikan dampak besar dalam bidang pendidikan. Pesantren dan madrasah, yang merupakan lembaga pendidikan utama bagi warga NU, kini mulai mengadopsi teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Ini termasuk penggunaan e-learning, aplikasi pendidikan, dan platform pembelajaran online. Hal ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren dan madrasah, serta memudahkan akses terhadap bahan ajar yang lebih beragam dan up-to-date. Teknologi digital telah mengubah cara pendidikan dan pengajaran dilakukan, termasuk di pesantren dan madrasah yang merupakan lembaga pendidikan tradisional bagi warga NU. Banyak pesantren yang mengadopsi teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, sehingga santri dapat belajar dari rumah, terutama selama pandemi COVID-19. Platform pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams digunakan untuk mengadakan kelas-kelas virtual, sementara materi-materi keagamaan tersedia dalam bentuk digital, seperti e-book, video, dan aplikasi belajar. Namun, adopsi teknologi dalam pendidikan juga menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua pesantren dan madrasah memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan internet. Selain itu, tidak semua pengajar dan santri memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan dukungan yang memadai untuk memastikan bahwa teknologi dapat digunakan dengan optimal dalam proses pendidikan.

Penyebaran Nilai dan Budaya

Era digital memungkinkan penyebaran nilai-nilai dan budaya NU ke berbagai penjuru dunia. Tradisi dan budaya NU, seperti Maulid Nabi, Tahlilan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, dapat disiarkan secara langsung atau melalui rekaman video, sehingga dapat diikuti oleh warga NU di berbagai tempat. Ini tidak hanya memperkuat ikatan antara warga NU, tetapi juga memperkenalkan budaya NU kepada masyarakat luas, termasuk kepada mereka yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke tradisi-tradisi ini (Biyanto, 2009). Misalnya, acara-acara besar seperti peringatan Hari Santri atau Muktamar NU kini sering disiarkan secara langsung di media sosial dan platform siaran langsung, sehingga dapat diikuti oleh jutaan warga NU di seluruh dunia. Ini memungkinkan warga NU yang berada di luar negeri atau di daerah terpencil untuk tetap merasa terhubung dengan komunitas mereka dan ikut merayakan momen-momen penting.

Selain itu, era digital juga memungkinkan warga NU untuk lebih mudah mengakses dan mempelajari teks-teks keagamaan klasik, seperti kitab-kitab kuning, yang merupakan sumber utama ajaran Islam tradisional. Banyak kitab-kitab ini yang telah didigitalisasi dan tersedia secara online, sehingga dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ini memungkinkan warga NU untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam dan memperkaya wawasan keagamaan mereka. Namun, penyebaran nilai dan budaya ini juga menghadapi tantangan tersendiri. Globalisasi dan kemajuan teknologi dapat menyebabkan erosi budaya lokal dan tradisi. Tradisi dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi berisiko terancam punah jika tidak ada upaya pelestarian (Ahnaf et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi warga NU untuk menemukan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi digital dan melestarikan kearifan lokal. Langkah-langkah seperti mengintegrasikan teknologi dalam pelestarian budaya dan tradisi, serta mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kearifan lokal, dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Tantangan Radikalisme

Di sisi lain, era digital juga membawa tantangan, terutama terkait dengan penyebaran paham radikal melalui internet.

Radikalisasi online menjadi masalah yang semakin mendesak, di mana kelompok-kelompok ekstremis menggunakan internet untuk merekrut anggota baru, menyebarkan propaganda, dan merencanakan serangan. Warga NU perlu lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan radikal yang dapat mengganggu kerukunan dan persatuan (Paryanto et al., 2022). Untuk menghadapi tantangan ini, NU telah mengambil berbagai langkah untuk melawan radikalisme dan ekstremisme online. Salah satunya adalah dengan menyebarkan narasi Islam moderat yang damai dan toleran melalui berbagai platform digital. NU juga aktif dalam mendidik masyarakat tentang bahaya radikalisme dan cara-cara untuk mengenali dan melawannya. Selain itu, NU bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai organisasi internasional untuk memperkuat upaya deradikalisasi dan mencegah penyebaran paham ekstremis. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan Aminudin (2023), ditemukan bahwa prevalensi konten radikal di platform media sosial meningkat sebesar 37% dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Keterlibatan Politik

Era digital juga memungkinkan warga NU untuk lebih terlibat dalam diskusi politik dan sosial. Media digital digunakan untuk kampanye politik, sosialisasi program-program organisasi, serta mobilisasi massa dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Warga NU dapat dengan mudah mengakses informasi tentang isu-isu politik terkini, berpartisipasi dalam diskusi online, dan menyuarakan pendapat mereka melalui media sosial. NU sebagai organisasi juga menggunakan platform digital untuk mengkomunikasikan pandangan dan kebijakan mereka kepada publik. Ini termasuk mengadvokasi isu-isu sosial, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, NU juga terlibat dalam berbagai inisiatif dan kampanye untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan toleransi, serta untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Namun, keterlibatan politik ini juga membawa risiko tersendiri. Media sosial dapat menjadi ajang bagi penyebaran berita palsu dan hoax, yang dapat mempengaruhi opini publik dan memperburuk polarisasi politik. Dilansir dari web resmi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), berdasarkan "Hasil Survei Wabah Hoax Nasional 2019" menunjukkan hoax berisi isu politik sebesar 93,2% (Mastel, 2019). Oleh karena itu, penting bagi warga NU

untuk tetap kritis dan bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi politik.

Transformasi Ekonomi dan Sosial

Era digital juga membawa perubahan signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial. Warga NU yang tinggal di daerah pedesaan kini memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar dan peluang ekonomi melalui platform e-commerce dan teknologi finansial. Ini membuka peluang baru bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Schmidt, 2021). Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia mencapai 78%, tertinggi di dunia (Kemkominfo, 2019). Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan terciptanya inisiatif-inisiatif sosial yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, platform crowdfunding digunakan untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pembangunan masjid, bantuan untuk korban bencana, dan program-program pendidikan. Teknologi juga digunakan untuk memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Namun, transformasi ekonomi dan sosial ini juga menghadapi tantangan. Tidak semua warga NU memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan internet, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, ada kekhawatiran tentang dampak negatif dari globalisasi dan digitalisasi, seperti hilangnya pekerjaan tradisional dan meningkatnya kesenjangan sosial. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan masih ada sekitar 20% penduduk Indonesia yang belum mengakses internet (APJII, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua warga NU dapat merasakan manfaat dari era digital ini, serta untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul.

Kesehatan Mental dan Keagamaan

Transformasi digital juga berpengaruh pada kesehatan mental warga NU. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Penggunaan media sosial yang intensif dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai "stres

digital," di mana individu merasa terbebani oleh arus informasi yang terus-menerus dan ekspektasi sosial dari interaksi online (Twenge, 2019). Di Indonesia remaja yang menderita gejala depresi mencapai 5,1% (Suryaputri et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi warga NU untuk tetap menjaga keseimbangan antara aktivitas online dan offline. NU sendiri telah mengampanyekan pentingnya kesehatan mental dalam berbagai ceramah dan kegiatan keagamaan. Selain itu, platform digital juga digunakan untuk memberikan dukungan psikologis dan konseling bagi mereka yang membutuhkan. Penggunaan media sosial yang intensif dapat menyebabkan kelelahan digital, yang berdampak negatif pada kesehatan mental (Hilal Bashir & Shabir Ahmad Bhat, 2017). Media sosial dapat memicu perbandingan sosial yang berlebihan, di mana individu merasa perlu membandingkan hidup mereka dengan orang lain yang tampak lebih sukses atau bahagia. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, kecemasan, dan depresi (Vogel et al., 2014). Selain itu, cyberbullying dan penyebaran hoax dapat memperburuk kesehatan mental pengguna media sosial (Hinduja & Patchin, 2010).

Di sisi lain, akses mudah ke informasi dan komunitas online dapat memberikan dukungan emosional bagi mereka yang merasa terisolasi atau membutuhkan bantuan. Misalnya, berbagai aplikasi dan platform digital telah digunakan untuk menyediakan layanan konseling keagamaan dan psikologis. NU juga mendorong penggunaan teknologi untuk mempromosikan kesejahteraan mental melalui program-program berbasis komunitas yang menggabungkan dukungan spiritual dan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam komunitas agama dapat memberikan rasa dukungan sosial dan mengurangi risiko depresi dan kecemasan (Koenig, 2012). Dengan demikian, pengintegrasian teknologi digital dalam kehidupan keagamaan dapat memperkuat dukungan sosial ini, asalkan digunakan dengan bijak. NU telah menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital. Melalui berbagai program dan inisiatif, NU berupaya memberikan dukungan psikologis kepada anggotanya. Misalnya, NU menggunakan platform digital untuk menyediakan layanan konseling dan bimbingan bagi mereka yang membutuhkan. Ceramah-ceramah keagamaan juga seringkali menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas online dan offline, serta menjaga kesehatan mental melalui pendekatan spiritual dan religius.

Komunitas dan Identitas

Di era digital, identitas dan komunitas NU mengalami transformasi signifikan. Identitas keagamaan kini tidak hanya terbentuk melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui interaksi di dunia maya. Komunitas online seperti grup Facebook, forum diskusi, dan saluran YouTube menjadi ruang baru bagi warga NU untuk berkumpul, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan (Turkle, 2011). Identitas digital warga NU terbentuk melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan keagamaan online. Mereka dapat mengakses berbagai sumber daya keagamaan, mengikuti pengajian virtual, dan berinteraksi dengan ulama dan sesama anggota NU dari berbagai penjuru dunia. Hal ini menciptakan bentuk komunitas baru yang lebih inklusif dan terbuka, di mana batasan geografis tidak lagi menjadi penghalang (Castells, 2010). Platform digital memungkinkan NU untuk menjangkau lebih banyak orang, termasuk mereka yang mungkin tidak terlibat dalam kegiatan keagamaan secara langsung. Ini memperkuat ikatan sosial dan memperluas komunitas NU ke skala global. Misalnya, program-program dakwah online dan seminar virtual telah menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan membangun solidaritas antar umat Islam (Castells, 2015). Namun, komunitas online juga menghadapi tantangan tersendiri. Anonimitas di dunia maya dapat memicu perilaku negatif seperti bullying dan penyebaran hoax. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga etika dan adab dalam berinteraksi di dunia maya, sesuai dengan ajaran Islam (Boyd, 2014).

Tantangan Infrastruktur

Meskipun era digital menawarkan banyak peluang, tantangan infrastruktur tetap menjadi kendala utama. Tidak semua daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan tempat banyak warga NU tinggal, memiliki akses internet yang memadai. Ini membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi digital secara maksimal (Riggins & Dewan, 2005). Ketimpangan akses internet antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan besar. Daerah pedesaan sering kali mengalami konektivitas yang lambat atau tidak ada sama sekali. Ini mengakibatkan warga NU di daerah tersebut tertinggal dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya

dari pemerintah dan pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses internet di daerah pedesaan, seperti program Palapa Ring yang bertujuan untuk menyediakan koneksi internet cepat di seluruh Nusantara (Kominfo, 2019).

Kolaborasi dan Sinergi

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak. NU perlu bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi lainnya untuk memperkuat kapasitas digital warga NU. Ini termasuk pelatihan literasi digital, pengembangan aplikasi dan platform digital yang ramah pengguna, serta penyediaan akses internet yang terjangkau (Partnerships in the Digital Age, 2018). Pelatihan literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa warga NU dapat menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. NU telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi anggotanya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan media sosial yang bijak hingga keamanan siber. Pengembangan aplikasi dan platform digital yang ramah pengguna juga menjadi fokus NU. Misalnya, NU telah meluncurkan aplikasi mobile yang menyediakan informasi keagamaan, jadwal salat, dan layanan konsultasi keagamaan. Aplikasi ini memudahkan warga NU untuk mengakses berbagai layanan dan informasi keagamaan secara cepat dan mudah. Selain itu, NU juga perlu terus memperkuat jaringan dan kolaborasi dengan komunitas internasional. Era digital membuka peluang untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan organisasi Islam di negara lain. Ini dapat membantu NU untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan oleh para pendahulunya.

Kesimpulan

Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam kehidupan kultural warga Nahdlatul Ulama (NU), menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam konteks keagamaan dan sosial. Digitalisasi memfasilitasi akses informasi, dakwah, dan interaksi

sosial yang lebih luas, memungkinkan warga NU untuk menjangkau audiens global dan mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam format yang lebih modern. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan, seperti penyebaran hoax, radikalisme, dan erosi budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi warga NU untuk memperkuat literasi digital, menjaga keseimbangan antara adaptasi teknologi dan pelestarian tradisi, serta memanfaatkan peluang era digital untuk memperkuat identitas dan solidaritas komunitas mereka di tengah perubahan zaman.

Referensi

Ahnaf, M. I., Yulianti, Pattiserlihun, S. C., & Ahda, M. N. F. (2023). TRANSFORMASI DIGITAL, PERUBAHAN SOSIAL DAN TANTANGAN REPRODUKSI BUDAYA DAMAI MASYARAKAT AGAMA DI YOGYAKARTA. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *25*(1). https://doi.org/10.55981/jmb.2023.1942

Aminudin, C., Nugroho, P., & Sutrisno, A. (2023). Media Sosial dan Radikalisme: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Pemikiran Ekstrem. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, *1*(4), 110–115. https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/download/31/21/284

APJII. (2024). *Hasil Survei Internet APJII*. Web Resmi APJII. https://survei.apjii.or.id/survei?emailSent=1

Biyanto. (2009). Tafsir Sosial Ideologi Keagamaan Kaum Muda Muhammadiyah: Telaah terhadap Fenomena Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). *Jurnal Salam*, *12*(2), 31–43.

Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.

Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.

Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Wiley-Blackwell.

Hafidz, M. (2021). *Muktamar NU dan Transformasi Digital*. NU Online. https://new-frontend-islam.nu.or.id/opini/muktamar-nu-dan-transformasi-digital-A0N19#google_vignette

Hilal Bashir, & Shabir Ahmad Bhat. (2017). Effects of Social Media on Mental Health: A Review. *International Journal of Indian Psychology*, *4*(3). https://doi.org/10.25215/0403.134

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, *14*(3), 206–221. https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133

Ibda, H., Wijanarko, A. G., & Wijayanti, D. M. (2020). Ma'arif Literacy Movement Program in Improving Literacy Skills in Teachers and Students in Central Java. *Borneo International Journal of Islamic Studies*, *3*(1), 25–43. https://doi.org/https://doi.org/10.21093/bijis.v3i1.2278

Kemkominfo. (2019). *Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen*. Web Resmi Kominfo. https://

www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media

Koenig, H. G. (2012). Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. *ISRN Psychiatry, 2012,* 1–33. https://doi.org/10.5402/2012/278730

Kominfo. (2019). *Palapa Ring: Connecting the Archipelago with Internet*. Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia.

Mastel. (2019). *Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019*. Web Resmi Mastel. https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/

Niam, A. M. (2019). *Peluang dan Tantangan NU di Era Digital*. NU Online. https://islam.nu.or.id/risalah-redaksi/peluang-dan-tantangan-nu-di-era-digital-UTjI8

Nisa, E. F. (2018). Social media and the birth of an Islamic social movement: ODOJ (One Day One Juz) in contemporary Indonesia. *Indonesia and the Malay World, 46*(134), 24–43. https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1416758

Partnerships in the Digital Age. (2018). *Collaborative Approaches to Enhance Digital Literacy and Inclusion*. UNESCO.

Paryanto, Nurmandi, A., Qodir, Z., & Kurniawan, D. (2022). *Eradicating Terrorist Networks on Social Media: Case Studies of Indonesia* (pp. 433–442). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8_38

Putri, A. I. (2021). *Bermedia Model Strategi Dakwah yang Relevan di Era Digital*. NU Online. https://nu.or.id/daerah/bermedia-model-strategi-dakwah-yang-relevan-di-era-digital-LlMVw

Riggins, F., & Dewan, S. (2005). The Digital Divide: Current and Future Research Directions. *Journal of the Association for Information Systems, 6*(12), 298–337. https://doi.org/10.17705/1jais.00074

Schmidt, L. (2021). Aesthetics of authority: 'Islam Nusantara' and Islamic 'radicalism' in Indonesian film and social media. *Religion, 51*(2), 237–258. https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1868387

Supriatno, E. (2018). *NU dan Revolusi Digital*. NU Online. https://nu.or.id/opini/nu-dan-revolusi-digital-CRrxd

Suryaputri, I. Y., Mubasyiroh, R., Idaiani, S., & Indrawati, L. (2022). Determinants of Depression in Indonesian Youth: Findings From a Community-based Survey. *Journal of Preventive Medicine*

and Public Health, *55*(1), 88–97. https://doi.org/10.3961/jpmph.21.113

Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.

Twenge, J. M. (2019). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood*. Atria Books.

Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. *Psychology of Popular Media Culture*, *3*(4), 206–222. https://doi.org/10.1037/ppm0000047

Sinergitas Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (APPTNU) Dalam Upaya Pengembangan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LTNU) Di Era Digital Global

Kardi

Perpustakaan merupakan elemen penting yang menjadi syarat mutlak keberadaaannya di lingkungan perguruan tinggi. Karena perpustakaan akan menjadi pusat kegiatan para sivitas akademika dalam melakukan kerja-kerja ilmiah. Beberapa fungsi perpustakaan di antaranya adalah menjadi pusat sumber belajar untuk pendidikan, penelitian, dan juga tempat hiburan (rekreasi).(Syamsul & Rodin, 2021) Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi pun turut mewarnai pola pengembangan tata kelola perpustakaan perguruan tinggi. Tuntutan akan jaminan mutu layanan juga menjadi keniscayaan. Ukuran tingkat kelayakan mutu layanan tersebut akan diuji melalui sistem akreditasi perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional. Untuk menyiapkan program tersebut maka pengelola perpustakaan harus berjejaring dengan perguruan tinggi lain. Jejaring tersebut biasanya bermula dari kesamaan latar belakang organisasi perguruan tinggi bersangkutan. Dengan berjejaring antar pengelola perpustakaan bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Di antaranya bisa saling sharing best practice tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perpustakaan, otomasi perpustakaan, digitalisasi koleksi perpustakaan, persiapan akreditasi perpustakaan, dan masih banyak yang lainya.

Beberapa jejaring asosiasi perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia telah banyak dibentuk. Untuk jejaring perpustakaan sekolah ada ATPUSI atau asosiasi tenaga perpustakaan sekolah seluruh Indonesia. Lalu untuk perpustakaan perguruan tinggi ada Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN) berdiri di tahun 1992, Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APTIS) tahun 2011, Asosiasi Perguruan Tinggi Kristen (APTIK), Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) berdiri tahun 2000, Forum Silaturahmi Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiah/Aisyah (FSPPTMA) dibentuk tahun 2004, Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (APPTNU) dibentuk

tahun 2020, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan di sini secara keseluruhan.

Pada tulisan kali ini, akan lebih mengenalkan kepada khalayak bahwa kader-kader NU yang bergerak dalam bidang perpustakaan perguruan tinggi juga berkontribusi dalam berbagai peluang kesempatan untuk berkhidmah. Bagi pengelola perpustakaan (pustakawan) juga ingin bersinergi dengan induk akademiknya yaitu Lembaga Perguruan Tinggi NU (LTNU) dalam membantu mengembangkan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi ilmiah di perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Sejarah Pembentukan APPTNU

Networking antar perpustakaan perguruan tinggi seperti di atas menjadi awal perjalanan sejarah terbentuknya Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (APPTNU). Jelas nampak dari namanya bahwa asosiasi tersebut dibangun untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) sebagai induknya. Pembentukan asosiasi tersebut saat itu dipimpin oleh Labibah Zain (Dosen UIN Sunan Kalijaga dan Past Presiden SLA Asia), Mufid dari UIN Malang yang juga Ketua Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS Jawa Timur), dan didukung sepenuhnya oleh Kardi dari IAIN Ponorogo dan Muhsin Khalida dari UIN Sunan Kalijaga yang juga sebagai Penasihat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Nasional. Pertemuan awal tersebut bertempat di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020. Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk memudahkan para pengelola perpustakaan perguruan tinggi NU dalam meningkatkan layanan perpustakaan.(*Sejarah – APPTNU*, 2020). Adapun sekretariat APPTNU ini berada di Jalan Raya Jemursari No.57, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kora Surabaya, Jawa Timur Kode Pos 60237.

Asosiasi ini mengusung visi sebagai sarana kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Dengan misi menjadi mitra dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Tren perpustakaan perguruan tinggi semakin mengerucut pada kerja-kerja ilmiah sehingga sudah selayaknya menjadi pusat penelitian (research center)(Asmad dkk., 2018; Fatmawati, 2013; Karmila, 2020) dalam membangun komunikasi ilmiah (scholarly communication)(Syamsul

& Rodin, 2021) antar peneliti dan sarjana dalam menghasilkan produk penelitian yang berkualitas. Dukungan berbagai pihak dalam hal ini APPTNU menjadi satu kenyataan bahwa pustakawan dan perpustakaan ikut andil dalam pengembangan layanan bermutu di lembaga induknya.

Berikut ini adalah hasil capture dari awal pembentukan APPTNU di UNU Yogakarta. Gambar ini diunduh dari web apptnu.

Sumber : https://apptnu.or.id/sejarah/

Susunan Pengurus APPNU Periode Tahun 2023 – 2026

Jajaran kepengurusan APPTNU Periode 2023-2026 berjumlah 20 pengurus resmi dilantik melalui SK LPTNU Nomor 179/SK/A.LPT-PBNU/IV/2023. Pelantikan tersebut diselenggarakan di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang pada tanggal 20 Juli 2023. Adapun format kepengurusan asosiasi diambil dari laman resmi APPTNU adalah sebagaimana struktur berikut ini.

KETUA UMUM
Yeni Fitria Nurahman, S.IIP
(Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya)
WAKIL KETUA
Dra. Lilik Ernawati Firdaus, M.Si
(Universitas Islam Malang)
SEKRETARIS 1
Nurul Hasanah, S.IP
(Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara)

SEKRETARIS 2
Wahyu Dwi Aji, S.IIP
(Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya)
BENDAHARA 1
Siti Rozinah, S.Sos. M.Hum
(Univ. Nahdlatul Ulama Indonesia – Jakarta)
BENDAHARA 2
Miftahul Jannah Kusuma N., S.Ptk
(Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo)

BIDANG–BIDANG:

1. **Bidang Keanggotaan**
   Koordinator : Wahyuning Ucik, S. Sos (Univ. Pesantren Tinggi Darul 'Ulum – Jombang)

   Korwil Jawa Timur : Qonita Fi Aunillah, S.Ptk., M.A. (Universitas Islam Lamongan)

   Korwil Jawa Tengah : Isti Mawaddah, Amd. (Institut Agama Islam Negeri Kudus)

   Korwil Jawa Barat : Ahmad Anas Ghozali, S.Pd. (Univ. Nahdlatul Ulama Indonesia – Jakarta)

   Korwil Kalimantan dan Luar Jawa : Najmi Fuady, M.A. (Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan)
2. **Bidang Humas**
   Koordinator : Amalia Herlina, S.IIP., M.MT (Universitas Nurul Jadid – Paiton)

   Anggota : Retno Lujeng Palupi, S.IP (Universitas Islam Raden Rahmat Malang)

   Anggota : Lathifah S.IPust., S.Pd. (Universitas Islam Madura – Pamekasan)
3. **Bidang Pengembangan Perpustakaan**
   Koordinator : Hamid Sakti Wibowo, S.Pd.I, MSI (Univ. Wahid Hasyim – Semarang)

   Anggota : Tadzkiroh, S.Ag (Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali – Cilacap)

   Anggota : Moh. Afifi, M.Hum. (Institut Ilmu Keislaman Annuqayah – Sumenep)

4. **Bidang Teknologi Informasi**
   Koordinator : Muhammad Ali Ridla, S. Kom., M. Kom. (Universitas Ibrahimy Situbondo)

   Anggota : Aditya Prayuda Rachmadani, S.IIP (Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya)

Beberapa Realisasi Kegiatan APPTNU

Di tengah gempuran perkembangan teknologi informasi yang demikian deras, perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk selalu up date terhdap perubahan dan perkembangannya. Sebagai bentuk perwujudan dari respons tersebut APPTNU menghelat berbagai kegiatan yang progresif. Beberapa kegiatan yang inspiratif tersebut di antaranya adalah:

International Seminar and Call for PPT dengan tema "Library Transformation in the Era of Society 5.0 and Optimization of Artificial Intelligence for Access and Excellent Service." Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Kamis, 19 Oktober 2023 lalu di auditorium lantai 9 UNUSA kampus B. Acara tersebut diselenggarakan secara hibryd systems di zoom dan live youtube.

Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang perpustakaan dan informasi, pemateri pertama Prof. Asmadi Mohammed Ghozali dari Universitas Teknologi MARA Malasia menyampaikan perlunya penyusunan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi baru. Kemudian pemateri kedua yaitu Ida Fajar Priyanto dari UGM Yogyakarta memperoleh knowledge sharing dari kegiatan tersebut. Di antaranya perpustakaan dibawah APPTNU diharapkan mampu menjadi multiple agent dalam berbagai platform. media sosial. Selain itu pemateri ketiga Sritusta Sukaridhoto, S.T., Ph.D dari UNUSA Surabaya menekankan penggunaan teknologi *robotic process automation* (RPA), *internet of think* (IOT), dan pemanfaatan *Virtual Reality/Augmented Reality/Mixed Reality* agar layanan perpustakaan tampil lebih menambahkan menarik.

APPTNU bekerjasama dengan UNISULA menggelar acara webinar pada hari Rabu 6 Desember 2023 dengan tema "Pengelolaan dan Optimasi Repository Perpustakaan : Pemeliharaan, Penyimpanan, dan Keamanan Data" melalui zoom dan live streaming pada chanel youtube APPTNU. Software repository yang direkomendasikan dalam webinar tersebut di antaranya adalah

eprints dan *dspace*. Kedua aplikasi tersebut selain karena banyak diminati tetapi juga mudah untuk saling berkoordinas sesama pengguna aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut juga tergolong freeware (gratis).

Di samping itu, selain memperbaiki sistem layanan administrasi dan otomasi, perpustakaan juga memikirkan agar layanan perpustakaan juga bisa diakses secara online. Tentu hal ini harus didukung oleh tata kelola laman website yang terpasang dengan baik. Untuk memperoleh laman layanan terpasang yang user frendly maka APPTNU juga menyelenggarakan webinar tentang Dasar-dasar dan strategi desain user-frendly untuk Website Perpustakaan. Beberapa di antara kriteria user friendly ini minimal juga mempertimbangkan pengguna yang berkebutuhan khusus. Sehingga website tersebut dirancang dengan mengedepankan ramah disabilitas(Maulana & Nurdiana, 2024)(Akmaliah, 2022)

Sinergitas antar PTNU patut diapresiasi karena munculnya bentuk kerjasama-kerjasama baru tersebut semakin menambah soliditas dalam berorganisasi. Sinergitas tersebut juga terealisasi melalui peran LPPM, pengelola jurnal (Asosiasi Relaawan Jurnal LTNU/ARJUNU), dan perpustakaan APPTNU. Program-program kegiatan tersebut mampu memakmurkan peran LTNU dalam kancah publikasi ilmiah bereputasi internasional demi mengabdi kepada negeri. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang sudah terpapar oleh kemudahan-kemudahan akses pada produk kecerdasan buatan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana.

Teknologi digital telah memberi pengguna koneksi baru yang telah mengatur ulang pemahaman kita tentang arsitektur sosial. Sebagai reaksi terhadap Kecerdasan Buatan (AI) dan Big Data, bidang pendidikan telah menata ulang strukturnya untuk mempertimbangkan pemangku kepentingan manusia dan non-manusia serta tindakan mereka di platform digital. Mengingat skenario yang semakin kompleks ini, AI dan Big Data melampaui pencarian daya komputasi belaka. dampak sosial dalam Pendidikan. analisis pendidikan melalui keterampilan abad ke-21 dan dampak pengembangan AI di era platform, menjalani tiga pertimbangan metodologis: penelitian, aplikasi, dan evaluasi. Untuk menyelesaikan penelitian, kami mengandalkan tinjauan sistematis, penelitian bibliografi, dan analisis kualitas yang dilakukan dalam studi kasus untuk menyusun makalah posisi yang menjelaskan bagaimana AI

dan Big Data bekerja dan pada tingkat apa mereka dapat diterapkan di bidang pendidikan.(Bonami dkk., 2020)

Urgensi Kemitraan Antar Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan Digital Global

Globalisasi pendidikan tinggi saat ini sudah sangat nyata. Globalisasi merupakan fenomena sosial yang berpengaruh pada berbagai faktor. Dampaknya pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Merespons akan tuntutan masyarakat dalam perspektif global perguruan tinggi dalam hal ini perpustakaan memerlukan konsep, strategi yang relevan dengan disiplin ilmu, budaya, visi, misi, tujuan, dan rencana strategis dalam pengembanagn Tri Dharma PT. Masing-masing PT telah membuat road map menuju world class university. Perguruan tinggi berkelas dunia memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Sehingga jargon tersebut bukan hanya isapan jempol belaka. Hal ini juga memerlukan jalinan kerjasama antar perguruan tinggi. Bentuk kemitraan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kelebihan dari masing-masing PT bisa dibagi dengan yang lain. Demikian halnya dengan kekurangannya bersama-sama mencarikan solusinya. Ikatan ini akan semakin jika didasari satu kesamaan tujuan organisasi. Hal ini akan memudahkan komando. Seperti perjalanan APPTNU yang bertujuan ingin meningkatkan reputasi LTNU melalui level akreditasi atau sertifikasi perpustakaan. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan strategi. Salah satu yang disebutkan Nanang Fattah yang menguti pernyataan Simon Marginson adalah perlunya kemitraan antara universitas, konsursium universitas, kampus lintas negara, dan e-universitas global.(Fattah, 2019, hlm. 149)

Tidak ada perpustakaan yang sempurna di dunia ini. Sekalipun *"maktabah syamilah"*(Baehaqi dkk., 2020) sebuah aplikasi perpustakaan digital yang berisi tentang manuskrip dalam bahasa Arab. Walaupun namanya maktabah syamilah yang artinya perpuanstakaan yang sempurna tapi masih saja ada kekurangannya. Untuk memenuhi kekurangan masing-masing perpustakaan tersebut diantara upayanya adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut dibangun atas dasar untuk maju bersama, bahu membahu untuk peningkatan dan pengembangan layanan perpustakaan yang lebih baik. Sebagaimana artikel yang mengelaborasi antara dua aplikasi perpustakaan digital yang satu memuat tentang manuskrip

arab bernama maktabah syamilah, kemudian ada juga aplikasi yang memuat kitab-kitab kuning mu'tabaroh yang diajarkan di pesantren namanya *maktabah syumila NU fiha*.(Kardi dkk., 2021) Keduanya saling melengkapi. Demikian halnya dengan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. Tentu masing-masing perpustakaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kerjasama yang dijalin akan saling melengkapi.

Model kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi di Malang Raya juga pernah terjalin mulai tahun 2017 dengan hadir program MILL atau Malang Inter Library Loan. Kerjasama semacam ini sering dikenal dalam dunia perpustakaan sebagai bentuk kerjasama silang layan dan resources sharing (Fahmi, 2022). Melalui program kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi seperti itu sedikit banyak bisa meningkatkan mutu layanan.

Upaya Pendidikan Tinggi Indonesia menghadapi Tantangan Era Digital Glonal

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet sangat besar. Namun demikian ada 171 juta jiwa yang masih tertinggal dalam hal literasi digital. Kehadiran internet memunculkan adanya gerakan literasi digital dalam penggunaan mesin pencarian dengan mudah dan cepat. Pemerintah Indonesia mencanangkan tiga jenis literasi di antaranya adalah literasi digital. Konsep tersebut tidak hanya sebatas pada kegiatan membaca saja akan tetapi juga belajar meningkatkan analysis skill dalam penggunaan informasi digital secara sehat.(Habeahan, 2023)

Habeahan menambahkan dalam penelitiannya bahwa pendidikan tinggi pada era disrupsi digital ini menghadapi tantangan besar. Dimana pendidikan tinggi masih tertatih-tatih dalam mengikui perkembangan transformasi digital oleh karena itu perlu ada pembaharuan. Dan keberhasilannya bertumpu pada beberapa hal berikut ini:

1. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang siap pakai.
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran yang komprehensif.
3. Peningkatan *hard skill* dosen dan mahasiswa dalam hal literasi digital
4. Pelaksanaan kuliah yang berbasis pada teknologi digital.

Mengapa keahlian literasi digital tersebut perlu digalakkan? Karena pengguna layanan pendidikan tinggi saat ini adalah merupakan bagian dari generasi *digital native* (Prensky, 2001). Mereka lahir pada zaman digital atau sering dikenal dengan istilah *digital native*. Beda halnya dengan pengelola yang mungkin lahir jauh sebelum era digital, mereka ini sering dikenal sebagai generasi *digital immigrant*. Yaitu generasi peralihan dari manual ke digital. Jika pengelola pendidikan tidak mengikuti pola dari *user habits* saat ini maka yang terjadi adalah ketidakpuasan atas layanan informasi yang disediakan. Begitu juga halnya dengan layanan perpustakaan perguruan tinggi dalam hal ini perpustakaan yang tergabung dalam APPTNU. Mereka harus mengikuti perkembangan teknoligi informasi saat ini.

Lebih lanjut, perlunya kurikulum yang memiliki orientasi baru yang bukan sekedar membaca dan menulis namun perlu menekankan kepada kemampuan literasi digital (menggunakan informasi di dunia digital, literasi teknologi, dan literasi manusia (humanities, komunikasi dan disain). Ketiga aspek itu menjadi fokus terhadap perubahan orientasi kurikulum yang baru.(Simarmata dkk., 2019, hlm. 51) Layanan yang berpusat pada *"User"* merupakan salah satu kriteria utama untuk menilai *"smart library"*. Istilah seperti kepuasan konsumen, nilai pelanggan, kustomisasi, dan konsep lainnya kadang-kadang digunakan sebagai pengganti pemusatan pengguna. Memahami hal ini memberdayakan organisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan beradaptasi atau memperkenalkan teknologi baru dan mengganggu yang dapat menarik konsumen baru, mempertahankan konsumen yang sudah ada, dan mengarah pada bisnis yang lebih banyak dan lebih baik. Untuk kepentingan konsumen, baik kota pintar maupun rumah pintar mengusulkan domain utama seperti privasi, multi-fungsi, fleksibilitas, fasilitas untuk bekerja dari rumah, aktivitas jarak jauh, dan langkah-langkah penghematan waktu.

Allameh mengatakan domain utama dari user-centrindred dalam SRE melibatkan perubahan teknologi, gaya hidup, dan ruang. Perubahan teknologi termasuk meja dapur pintar dengan permukaan layar sentuh, zona panas, kontrol suhu, peralatan dengan jaringan multimedia, panduan resep online, panel memasak dinamis, dan teknologi sensor yang mengenali aktivitas pengguna. Ada dinding pintar yang memungkinkan pemandangan dan

hiburan yang berubah-ubah, perangkat elektronik interaktif yang peka terhadap sentuhan, aktivitas jarak jauh berbasis internet seperti tele-edukasi dan tele-caretaking, sistem kontrol lingkungan seperti HVAC, dan sistem pencahayaan. Ada juga perabotan pintar, dengan komputer tertanam yang saling berhubungan dan dengan demikian memungkinkan pemindahan yang mudah dan fleksibel. Ini mungkin sensitif terhadap preferensi pengguna, responsif dan dapat diprogram; Mereka interaktif karena layar sentuh dan multifungsi, memungkinkan aktivitas virtual, hiburan, dan kontrol lingkungan. Demikian pula, ada ruang hidup pintar dan garasi pintar. Tujuan utama dari teknologi pintar—baik itu dapur, TV, perabotan, atau ruang tamu—adalah kepuasan konsumen. Tujuan lain mungkin termasuk kesejahteraan, kemudahan penggunaan, peningkatan produktivitas, kenikmatan yang dirasakan, pencelupan, keceriaan, dan personalisasi. Kepuasan konsumen memiliki tiga tingkatan: fisik, fungsional dan psikologis. Kenyamanan fisik melibatkan suhu, pencahayaan, suara, udara, dan keselamatan. Kenyamanan fungsional berkisar pada kebutuhan konsumen dan interaksi mereka dengan lingkungan melalui desain ruang dan teknologi yang cerdas. Kepuasan psikologis mengacu pada gaya hidup dan kebutuhan manusia; Hal ini dicapai melalui integrasi cerdas teknologi dan ruang dengan kehidupan sehari-hari seseorang (Ullah dkk., 2018).

Daftar Pustaka

Akmaliah, W. (2022). Reclaiming Moderate Islam in Nahdlatul Ulama: Challenging the Dominant Religious Authority in Digital Platform. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, *16*(1), Article 1. https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.223-248

Asmad, C. C., Mathar, T., Akbar, A. K., Arifin, N., Hijrana, Haruddin, Irmawati, Irawati, & Satriani. (2018). Tren Perkembangan Open Access Institutional Repository pada Perguruan Tinggi di Indonesia. *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, *6*(2), 168–180. https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a8

Baehaqi, A., Sanusi, A., Wasliman, I., & Gintings, A. (2020). Management Learning of Assyamilah Almaktabah Base on Information and Communication Technology ICT in Pondok Pesantren. *IJO-International Journal of Educational Research*, *3*(02), 18–30.

Bonami, B., Piazentini, L., & Dala-Possa, A. (2020). Education, Big Data and Artificial Intelligence: Mixed methods in digital platforms. *Comunicar*, *28*(65), 43–52. https://doi.org/10.3916/C65-2020-04

Fahmi, A. (2022). Kerja Sama Antar Perpustakaan Perguruan Tinggi di Pulau Jawa dengan Silang Layan dan Resource Sharing. *AL Maktabah*, *7*(2), 110–122.

Fatmawati, E. (2013). Trend Perpustakaan Perguruan Tinggi Di Era Informasi. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi. Warta Perpustakaan UNDIP*.

Fattah, N. (2019). *Strategi dan Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Konteks Peningkatan Daya Saing Globla menuju Masyarakat 5.0*. Remaja Rosdakarya.

Habeahan, S. (2023). *Upaya Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tingggi Keagamaan Di Era Revolusi Indsutri 4.0; Society 5.0*.

Kardi, K., Makin, A., & Masruri, A. (2021). Maktabah Syumila Nu Fiha Dan Maktabah Syamilah: Digital Transformation and Contestation in Pesantren. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, *25*(2), Article 2. https://doi.org/10.32332/akademika.v25i2.3047

Karmila, A. K. (2020). Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Infomasi, dan Kearsipan, How It Manages? *Literatify : Trends in*

Library Developments, *1*(1), Article 1. https://doi.org/10.24252/literatify.v1i1.13094

Maulana, M. R., & Nurdiana, D. (2024). Pengukuran Kebergunaan dan Pengalaman Pengguna Website Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka (SIA UT) Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS) dan User Experience Questionnaire (UEQ). *Journal of Informatics and Communication Technology (JICT)*, *6*(1), 1–17.

Prensky, Marc. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *MCB University Press, Vol. 9*(No. 5).

Sejarah – APPTNU. (2020). https://apptnu.or.id/sejarah/

Simarmata, J., Iqbal, M., & Nasution, I. N. (2019). *Tren dan Aplikasi: Strategi dan Inovasi Dalam Pembelajaran*. Denpasar: Jayapangus Press.

Syamsul, R., & Rodin, R. (2021). *Scholarly Communication and Library Role: Penguatan dalam Fungsi Perpustakaan Mendukung Peran dan Komunikasi Ilmiah di Perguruan Tinggi*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.

Ullah, F., Sepasgozar, S., & Wang, C. (2018). A Systematic Review of Smart Real Estate Technology: Drivers of, and Barriers to, the Use of Digital Disruptive Technologies and Online Platforms. *Sustainability*, *10*(9), 3142. https://doi.org/10.3390/su10093142

Era Digital dan Transformasi Kultur Warga Nahdlatul Ulama: Tantangan, Strategi Adaptasi, dan Implikasi

Mukhlas Habibi

Era digital telah mengubah beberapa aspek kehidupan manusia seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar. Kemajuan ini tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga memengaruhi berbagai institusi, termasuk organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama'. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat. NU berdiri pada tahun 1926 dan telah lama dikenal sebagai pelestari dan penjaga tradisi Islam Nusantara. NU mengelola berbagai lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan yang berperan penting dalam membentuk kultur dan komunitas Islam di Indonesia.

Seiring dengan penetrasi teknologi digital yang semakin dalam, NU menghadapi tantangan dan peluang baru. Digitalisasi menawarkan berbagai kemudahan, seperti akses informasi yang lebih luas, platform untuk dakwah, dan mempermudah koordinasi dan manajemen. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan, seperti potensi penurunan kualitas interaksi sosial, pergeseran nilai, kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan munculnya sikap individualitas. Transformasi budaya NU dalam era digital mencerminkan dampak yang dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan anggotanya. Misalnya, cara berkomunikasi dan penyebarluasan ajaran agama telah berubah dengan adanya media sosial dan aplikasi digital. Pendidikan agama di pesantren dan madrasah kini dapat dilakukan secara online yang bisa diakses kapan saja baik secara langsung maupun tidak.

Tantangan yang dihadapi NU meliputi bagaimana mengatasi perubahan dalam cara berinteraksi, menangani penyebaran informasi yang tidak akurat, dan mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Di sisi lain, NU perlu mengembangkan strategi adaptasi untuk memanfaatkan teknologi secara efektif tanpa mengorbankan inti ajaran dan kultur yang telah lama dijaga. Implikasi dari transformasi ini bagi NU sangat

luas. Perubahan ini mempengaruhi cara anggota berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, cara mereka menerima informasi, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Di tingkat organisasi, NU perlu menyesuaikan strategi dakwah dan program-programnya untuk menghadapi perubahan ini, sambil terus menjaga integritas ajaran Islam

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi manfaat kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta internet terhadap budaya warga NU. Selama ini warga NU dikenal sebagai muslim tradisionalis yang sulit untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Dalam tulisan ini, terdapat pemaparan bagaimana warga NU memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk kebaikan dan kemanfaatan yang luas. Selain itu, tulisan ini menganalisis tantangan apa yang terjadi akibat kecanggihan teknologi saat ini. Salah satu tantangan dengan teknologi yang semakin canggih, pada akirnya mengurangi peran manusia, mengurangi interaksi sesama manusia, pada akhirnya menimbulkan sifat individualis. Tantangan lain dengan era digital saat ini adalah penyalahgunaan teknologi menuju hal-hal negatif, seperti melihat tayangan yg tidak pantas.

Era Digital Terhadap Transformasi Kultur Warga Nahdlatul Ulama

Era digital merupakan periode atau waktu yang berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer dan internet. Hal ini berdampak secara signifikan terhadap beberapa aspek kehidupan manusia, seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan lain sebagainya (Sagala et al., 2024). Era digital identik dengan kemudahan dan kecepatan mengakses suatu informasi maupun pengetahuan (Wibowo, 2019). Berbagai macam teknologi komunikasi maupun informasi telah menjadikan hidup manusia menjadi semakin mudah (Efendi et al., 2017). Jangkauan komunikasipun semakin luas dan seakan seperti tidak memiliki batas karena untuk berkomunikasi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja asalkan tersambung dengan jaringan internet (Anggit Pramesti, 2021). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini semakin menghapus adanya jarak dan batas antar negara sehingga arus informasi dapat mengalir dengan sangat cepat dan tidak terbatas (Isfironi, 2014).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan tatanan sosial baru di masyarakat dan berkembang mulai tahun 2000-an sehingga menjadikan masyarakat sebagai *network society* atau masyarakat jaringan (Anggit Pramesti, 2021). *Network Society* atau masyarakat jaringan sudah sangat akrab dengan pemanfaatan teknologi komunikasi digital seperti komputer atau laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Bahkan untuk saat ini teknologi digital sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Pergeseran tersebut berdampak pada perubahan masyarakat dalam aspek stuktur sosial, komunikasi, dan budaya masyarakat (Efendi et al., 2017). Pola komunikasi masyarakat di era digital telah berubah sejak adanya internet, masyarakat lebih suka berkomunikasi secara virtual tanpa harus bertemu langsung (Anggit Pramesti, 2021).

Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar dan dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi masyarakat yang dipimpin oleh ulama. Komitmen yang kuat untuk meneruskan dan menjaga *amaliyah* tradisi menjadi kunci keberlanjutan organisasi NU hingga saat ini (Asmar, 2020). Akar historis pendirian Nahdlatul Ulama berasal dari reaksi terhadap benturan antara modernisme Islam di Timur Tengah dan dinamika Islam di Nusantara. Reaksi ini ditunjukkan oleh tokoh-tokoh *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang menentang kaum Muslim reformis. Konflik antara kelompok reformis dan tradisional inilah yang melatarbelakangi pembentukan jaringan ulama NU, yaitu KH M Hasyim Asy'arie, KH Wahab Chasbullah, dan KH R. Asnawi. Gerakan mereka juga dipengaruhi oleh perkembangan internasional, dengan tujuan untuk melestarikan tradisi keagamaan dan melawan gagasan serta praktik kaum reformis (Solikhin, 2016).

Nahdlatul Ulama menganut paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* maka secara fiqih menganut salah satu dari empat madzhab empat, yakni Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Adapun secara aqidah bermadzhab kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Sedangkan tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. (Solikhin, 2016) Gus Dur mendefinisikan bahwa di dalam NU terdapat NU struktural dan NU kultural. NU srtuktural merupakan para kiai yang menduduki jabatan di organisasi NU seperti Tanfidziyah maupun Syuriah. Adapun NU kultural merupakan para kiai yang memperjuangkan amaliyah tradisi NU seperti ziarah kubur, tawassul,

tahlil, istighosah, maulidan dan lain-lain. (Mulyono, 2017)

Kultur warga NU apabila dilihat dari persepektif ibadah ritual keagamaan adalah kebiasaan atau kebudayaan yang dijalani oleh masyarakat yang diperjuangkan oleh para kiai NU kultural seperti kegiatan yasinan, tahlilan, pengajian, maulidan dan lain sebagainya. Warga NU dalam menjalankan ibadah atau ritual keagamaan identik dengan pengumpulan massa dengan jumlah yang besar, adanya interaksi sosial dan ikatan emosional yang kuat.

Sedangkan kultur warga NU apabila dilihat dari persepktif sosial adalah kebiasaan warga NU dalam berkomunikasi, memberi dan menyampaikan pesan. Kebiasaan warga NU dalam berkomunikasi adalah dengan menjunjung tinggi adab atau akhlak, terutama berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan terlebih kepada para ulama.

Transformasi Kultur Warga NU Era Digital: Komunikasi dan Kegamaan

Transformasi Komunikasi

Diantara perubahan akibat era digital adalah komunikasi. Komunikasi bila dulu dilakukan secara tradisional artinya harus bertatap muka, berkat kecanggihan teknologi saat ini komunikasi bisa dilakukan dengan teknologi digital. Teknologi digital memudahkan manusia untuk memberi dan menerima pesan dengan cepat dan luas (Wibowo, 2019). Sebagaian besar warga NU adalah berasal dari masyarakat pedesaan dan para santri maupun kiai pesantren, sehingga ada yang mengatakan warga NU identik dengan muslim tradisionalis. Berbeda dengan Muhammadiyah, sebagian besar angotanya merupakan masyarakat perkotaan dan mayoritas menempuh pendidikan tinggi formal sehingga dikenal dengan muslim modernis (Irfan Wahid, 2020)

Perubahan zaman yang terjadi dimana teknologi informasi dan komuikasi yang semakin mendominasi berdampak pula terhadap kebiasaan warga NU. Meski dikatakan sebagai muslim tradisionalis, namun warga NU dengan cepat mampu beradaptasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini. Pola komunikasi yang digunakan saat ini jauh berbeda dengan pola komunikasi yang dulu digunakan. Warga NU saat ini cenderung lebih suka memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi maupun

media dakwah (Irfan Wahid, 2020). Media sosial yang digunakan untuk memberi maupun menyampaikan pesan adalah WhatsApp, Instagram, Tiktok, Youtube, Facebook dan lain sebagainya (Wibowo, 2019).

Transformasi Kegiatan Keagamaan

Masyarakat Indonesia memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial saat ini untuk media mempelajari agama (Dwicahyo, 2017). Jika dulu belajar agama harus menemui gurunya secara langsung, maka saat ini untuk mempelajari agama bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia (Wibowo, 2019). Teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia saat ini bila dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif, dapat dimanfaatkan sebagai media untuk belajar agama. Para pendakwah saat ini menyambut baik kehadiran media sosial untuk membantu menyampaikan pesan dakwahnya, sebab penggunaan media sosial dalam menyampaikan dakwah dapat dilakukan dengan cepat dan efektif daripada media yang lainnya (Faisol, 2017).

Media sosial yang sangat umum digunakan para *pendakwah* agar mudah dijangkau oleh masyarakat adalah YouTube, Instagram dan TikTok. Banyak sekali para pendakwah membuat akun media sosial dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Seperti yang kita lihat baru-baru ini, terdapat pedakwah dari Blitar, yakni Gus Iqdam membuat akun YouTube "Gus Iqdam Offiicial" yang diikuti oleh 1,3 juta *subscriber.* Sementara di Instagram, akun beliau bernama "iqdammuhammad_" diikuti oleh 1,5 juta pengikut. Sementara di TikTok akun beliau bernama "@muhammad_iqdam_kholid" diikuti oleh 186,7 ribu pengikut. Selain itu ruang yang bisa digunakan untuk mempelajari agama bisa dilakukan melalui aplikasi Zoom dan Google Meet. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Faqihudin Abdul Kodir, Lc. MA. Beliau memanfaatkan aplikasi Zoom untuk melakukan kajian untuk membahas teks-teks ayat Al-Qur'an bias gender bernama *Qiro'ah Mubadalah* setiap hari Ahad pagi bersama para murid-muridnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Beliau merupakan ilmuwan muslim di Indonesia yang fokus kajiannya terhadap isu-isu gender menjadikannya dirinya disebut sebagai bapak mubadalah (Zakiyah, 2020).

Aplikasi zoom sangat bermanfaat bagi banyak orang ketika jarak sangat jauh dan sulit dijangkau. Ataupun situasi yang menyebabkan larangan bertemu secara fisik yang mengharuskan pertemuan secara virtual aplikasi Zoom dan Google Meet menjadi alternatif utamanya. Hal ini terjadi seperti pada saat pandemi Covid 19 yang melanda sekitar 4 tahun yang lalu. Pemerintah membatasi adanya pertemuan secara fisik antar sesama manusia untuk mengurangi perkumpulan masyarakat guna mencegah semakin merebaknya virus Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah provinsi Jawa Timur menggelar *istighosah* kubro online bersama 19 kiai sepuh Jawa Timur dan warga masyarakat Jawa Timur melalui aplikasi Zoom (Yuliani et al., 2022).

Meskipun pandemi Covid 19 dinyatakan telah hilang di Inonesia, namun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital masih digunakan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan karena penggunaan media digital dirasakan sangat efektif pelaksanannya. Seperti kegiatan *khotmil qur'an* online masih digunakan hingga saat ini. Kegiatan ini banyak ditemui oleh sekelompok masyarakat ataupun suatu organisasi namun dikarenakan terhalang jarak geografis yang jauh dan tidak memungkinkan unuk sering bertemu, maka untuk tetap menjaga silaturahmi diadakan *khotmil qur'an* online yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang terjadi pada Muslimat NU Lampung Timur, anggota organisasi tersebut mengadakan kegiatan *khotmil qur'an* online yakni setiap hari mendapat bagian satu juz Al-Qur'an kemudian pada malam Jum'at membaca do'a *khotmil qur'an* bersama-sama (Fikry Mahfudz Ikhsanudin & Eka Prasetiawati, 2024). Selain itu terdapat kegiatan ruqyah jarak jauh dengan memanfaatkan fitur di aplikasi WhatsApp yakni Video Call untuk melakukan ruqyah atau pengobatan jarak jauh. Peruqyah meruqyah pasien yang jaraknya jauh dari lokasi dan tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, ruqyah dilakukan secara online, tentunya dengan cara dan teknis pelaksanaan tertentu (Ahid, A., & Lc, M. S. I. 2020).

Kemunculan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini juga dapat dimanfaatkan untuk filantropi. Berzakat, infak maupun sedekah tidak harus langsung diserahkan kepada penerima, namun zakat, infak, dan sedekah bisa ditunaikan melalui *mobile banking* atau *internet banking*. Lembaga filantropi pemerintah yakni BAZNAS dan lembaga filantropi NU yakni NU CARE-LAZISNU dengan cerdas memanfaatkan era digital ini untuk

mengumpulkan pundi-pundi amal untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Hasilnya pengumpulan dana filantropi dapat dikumpulkan dengan mudah dan jumlah yang diterima lebih banyak (Rakhmawati, 2019).

Tantangan yang Dihadapi NU dalam Era Digital

Kesenjangan Digital

Kemampuan mengakses teknologi informasi dan komunikasi seperti *smartphone* atau laptop beserta jaringan internet mungkin bagi sebagian masyarakat adalah hal yang mudah, namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat pelosok yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebab kita ketahui bersama berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk ikut menikmati kecanggihan teknologi di era digital ini, sedangkan mungkin bagi kelompok masyarakat tertentu uangnya hanya cukup untuk makan. Kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat menimbulkan kesenjangan digital pada akhirnya menyebabkan kesenjangan informasi dan kesenjangan digital. Pada akhirnya terdapat sekelompok masyarakat yang dapat dengan mudah mengakses informasi dan memanfaatkannya dengan baik, namun sebaliknya terdapat sebagian kelompok masyarakat yang jauh tertinggal dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi saat ini (Pratiwi et al., 2021).

Perubahan Nilai dan Tradisi

Nahdlatul Ulama identik dengan jamaah yang banyak dan terjadinya interaksi secara langsung, dengan era digital yang ada ini tentu menjadikan adanya perubahan nilai dan tradisi warga NU. Terutama nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas selama ini lekat dengan warga NU justru semakin berkurang dan sikap individualisme semakin terlihat. Hal ini merupakan salah satu dampak perubahan nilai yang diakibatkan oleh adanya teknologi di era digital yaitu internet (Sagala et al., 2024). Internet sebagai produk modernitas menjadi isu yang tengah hangat dibahas oleh para peneliti (Irfan Wahid, 2020). Kehadiran internet dianggap sebagai pembawa perubahan sosial dalam masyarakat (Muhamad Iqbal, 2013). Selain itu internet membawa ancaman negatif terhadap agama karena ada muatan nilai-nilai kapitalisme dari barat yang dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat di Indonesia (Irfan Wahid, 2020).

Maraknya kasus radikalisme hingga terorisme yang terjadi beberapa dekade akhir ini juga ditimbulkan karena adanya internet. Penyebaran pengaruh radikalisme ditularkan melalui ajakan *jihad fi sabilillah* melalui tayangan-tayangan YouTube pada akun-akun yang dibuat oleh kelompok Islam radikal dan intoleran. Termasuk di dalamnya yaitu kelompok Salafi Wahabi di Indonesia yang dikenal sangat *konservatif* pada kenyatannya justru menggunakan internet sebagai media promosi dan penyebaran ideologi salaf mereka (Muhamad Iqbal, 2013). Mereka justru dikenal lebih cepat beradaptasi menggunakan teknologi digital berupa internet ini dibanding organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah (Irfan Wahid, 2020).

Penyebaran Informasi

Akibat adanya internet, masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi terkini. Internet seperti dua sisi pisau, satu mempunyai sisi positif dan satunya lagi memiliki sisi negatif (Anggit Pramesti, 2021). Sisi positif adanya internet ini adalah kecepatan dalam memberi dan menyampaikan pesan serta mengakses informasi, namun informasi yang diterima oleh masyarakat belum tentu merupakan informasi yang benar. Terkadang terdapat berita-berita hoax ataupun berita bohong yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan kekacauan melalui jaringan internet ini.

Gus Nadirsyah Hosen seorang cendekiawan NU dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Irfan Wahid (Irfan Wahid, 2020) menyebutkan adanya istilah baru terkait membludaknya informasi, yakni anarki informasi. Maksudnya adalah dengan adanya internet, masyarakat dapat dengan cepat dan mudah untuk menggali informasi, termasuk informasi keagamaan. Bahayanya adalah apabila seseorang yang memberikan informasi keagamaan di innternet yang tidak memiliki kredibilitas dan *dhawuh*-nya tidak dapat dipertanggung jawabkan kemudian dikonsumsi secara mentah oleh masyarakat justru hal ini sangat membahayakan. Sehingga akan muncul kekacuan dalam beragama karena internet menyediakan fasilitas bagi semua orang siapa saja untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan agama. Orang menjadi malas berguru kepada ustadz atau kyai namun cukup menjadikan internet sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan tempat bertanya.

Strategi Adaptasi warga NU di Era Digital

Pemanfaatan Teknologi

Era digital yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi canggih dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, misalnya pada aspek pendidikan, dakwah, dan ekonomi. Pada aspek pendidikan dan pengajaran, kita banyak belajar dari pandemi Covid-19 dimana terjadi pembatasan sosial sehingga kegiatan pendidikan tetap bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, seperti Zoom dan Google Meet. Meskipun pandemi telah berakhir, namun masih banyak ditemui beberapa macam model pendidikan yang diadakan melalui jaringan. Contohnya adalah kuliah online, seminar online, dan konferensi ilmiah. Hal demikian diterapkan karena keterbatasan jarak yang dapat diatasi dengan pertemuan virtual (Rakhmawati, 2019).

Literasi Digital

Literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Definisi lebih luas literasi mencakup lebih dari itu, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menggunakan materi cetak serta tulisan dalam berbagai konteks. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi yang disajikan dalam berbagai format dan sumber melalui komputer (Naufal, 2021). Literasi digital diartikan dengan membaca informasi maupun pengetahuan melalui pemanfaatan internet, hal ini identik dengan penggeseran buku sebagai sumber pengetahuan menjadi buku digital. Bagi warga NU terutama kaum santri identik dengan pengajiab kitab kuning yang dicetak di kertas, untuk saat ini sangat banyak ditemukan kitab kuning versi digital yakni berbentuk format PDF. Selain itu terdapat aplikasi perpustakaan digital komprehensif yang menghimpun banyak sekali kitab *mu'tabaroh* yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat luas (Badruzzaman et al., 2023).

Implikasi Era Digital Terhadap Kultur Warga NU

Dampak Positif

Era digital yang identik dengan suatu zaman serba terhubung dengan internet datang dengan membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, terutama terhadap kultur atau kebudayaan warga NU. Berbagai macam dampak positif

era digital terhadap warga NU adalah peningkatan akses informasi, komunikasi, pendidikan, dan dakwah. Contohnya mempelajari agama bisa dilakukan tanpa batasan waktu dan jarak, sumber ilmu pengetahuan semakin luas, dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga. Era digital juga dapa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi warga. Untuk saat ini, kita tidak sulit mencari di media sosial konten-konten dakwah digital seperti Ngaji Fiqih Wanita Ning Sheila, Ngaji Gus Baha', Podcast Habib Ja'far, Informasi Kajian Ustadzah Halimah Alaydrus dan lain sebagainya. Selain itu, NU telah meluncurkan situs resmi www.nu.or.id dan aplikasi NU Online SuperApp yang bisa diunduh melalui Playstore untuk HP Android maupun App Store untuk iPhone sebagai pusat informasi dan kajian keagamaan warga NU (Irfan Wahid, 2020).

Dampak Negatif

Selain membawa dampak positif, era digital juga menimbulkan dampak negatif terhadap kultur warga NU. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah lunturnya semangat kebersamaan dan solidaritas, munculnya sikap invidualisme warga NU, serta kehilangan koneksi emosional antar warga. Selain itu, banjir informasi seperti yang disebut oleh Gus Nadirsyah Hosen dengan anarki informasi juga membawa dampak buruk bagi warga NU. Seperti yang terjadi belakangan ini, media sosial sering kali digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan pesan atau berita bohong, adu domba, kekerasan, menjelak-jelekkan orang lain serta pesan buruk lainnya (Sumadi, 2016). Dampak negatif lainnya adalah menjadikan warga NU menimbulkan ketergantungan teknologi, penyalahgunaan teknologi. serta kesenjangan akses.

Kesimpulan

Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi di era digital memberikan pengaruh terhadap kebudayaan warga NU. Dampak tersebut membawa perubahan positif dan negatif terhadap berbagai aspek kehidupan warganya diantaranya adalah pada aspek pendidikan, dakwah, dan sosial. Manfaat ini hanya bisa dirasakan apabila kita bijak menggunakannya, tetapi apabila kita tidak selektif dalam penggunaan teknologi di era digital ini, justru kita menjadi korban atas kecanggihan teknologi ini. Untuk itu kita perlu menyusun strategi untuk menerima kehadiran teknologi informasi dan

komunikasi di era digital agar dapat membantu tugas dan pekerjaan kita, bukan kita yang menjadi budak teknologi. Sebaiknya kita mampu menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas penyebaran dakwah, dan menjaga hubungan sosial. Alangkah lebih baiknya sebagai warga NU kita tidak hanya sebagai pengguna, tapi ikut terlibat dan sebagai pelaku kemajuan teknologi ini.

Referensi

Ahid, A., & Lc, M. S. I. (2020). Ruqyah Online Solusi Ditengah Pandemi. Cipta Media Nusantara.

Anggit Pramesti, I. (2021). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT DAN CARA MEMBACA MASYARAKAT INDONESIA DI ERA DIGITAL, SERTA DAMPAKNYA PADA BISNIS MEDIA CETAK Factors Influencing Indonesian People's Interests and Reading Ways in the Digital Age, and Its Impact*. *05*(1), 117–131. https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian

Asmar, A. (2020). Dakwah Lesbumi Nu: Saptawikrama. *Jurnal Islam Nusantara*, *4*(1), 17. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.172

Badruzzaman, A., Najamuddin, M., & Miharja, D. (2023). Peningkatan Kualitas Literasi Santri Peningkatan Kualitas Literasi Santri Pondok Pesantren Quran Al-Lathifah Menggunakan Digital Library Maktabah Syamilah. *Dinamika*, *8*(1), 1–16. http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3566/1625

Dwicahyo, S. (2017). Muslim Preachers in Social Media : Fighting For Moderation. *Rsis Commentary*, *187*. www.rsis.edu.sg

Efendi, A., Astuti, P. I., & Rahayu, N. T. (2017). Analisis Pengaruh Penggunaan Media Baru Terhadap Pola Interaksi Sosial Anak Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Penelitian Humaniora*, *18*(2), 12–24. https://doi.org/10.23917/humaniora.v18i2.5188

Faisol, M. (2017). Peran Pondok Pesantren Dalam Membina Keberagamaan Santri. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(2), 37–51. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.112

Fikry Mahfudz Ikhsanudin, & Eka Prasetiawati. (2024). Transformasi Ibadah: Khatmil Qur'an Online di Kalangan Muslimat NU Lampung Timur. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, *1*(1), 1–17. https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i1.768

Hosen, N. (2008). Online fatwa in Indonesia: From fatwa shopping to googling a kiai. In Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia (pp. 159-173). Institute of Southeast Asian Studies.

Irfan Wahid, M. (2020). Dari Tradisional Menuju Digital: Adopsi Internet Oleh Nahdlatul Ulama Selama Pandemi Covid-19.

Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, *16*(1), 73–84. https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.1745

Isfironi, M. (2014). PROYEK IDENTITAS KULTUR KERUKUNAN: Studi Harmoni Kehidupan Warga NU, Muhammadiyah dan LDII. *Al-'adâlah : jurnal kajian keislaman dan masyarakat*, *17*(2), 235–254. http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/aladalah/article/view/255

Muhamad Iqbal, A. (2013). Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, *2*(2), 77–87.

Mulyono, P. (2017). Membumikan Nu Kultural. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, *17*(1), 109–126. https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.926

Naufal, H. A. (2021). Literasi Digital. In *Perspektif* (Vol. 1, Nomor 2). https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32

Pratiwi, P. S., Seytawati, M. P., Hidayatullah, A. F., Ismail, I., & Tafsir, T. (2021). Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, *6*(1), 83. https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959

Rakhmawati, Y. (2019). Studi Media Filantropi Online: Pergeseran AltruismeTradisional-Karitas menuju Filantropi Integratif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, *13*(2), 167–186. https://doi.org/10.24090/komunika.v13i2.2082

Sagala, K., Naibaho, L., & Rantung, D. A. (2024). Tantangan Pendidikan karakter di era digital. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, *6*(01), 1–8. https://doi.org/10.53863/kst.v6i01.1006

Solikhin, M. (2016). GERAKAN PEMIKIRAN DAN PERAN TIGA ULAMA NU (K.H. HASYIM ASY'ARI, K.H.R. ASNAWI KUDUS, K. H. WAHHAB HASBULLAH) DALAM MENEGAKKAN AHL Al-SUNNAH WAL-JAMA'AH ANNAHDLIYAH DI JAWA TAHUN 1926 – 1971. *Jurnal THEOLOGIA*, *27*(2), 331–364. https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.2.1071

Sumadi, E. S. K. (2016). DAKWAH DAN MEDIA SOSIAL : Menebar Kebaikan Tanpa Diskrimasi. *At-Tabsyir*, *4*(1), hal. 173-190.

Wibowo, A. (2019). Penggunaan Media Sosial Sebagai Trend Media Dakwah Pendidikan Islam Di Era Digital. *Jurnal Islam Nusantara*, *03*(02), 339–356. https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/141

Yuliani, V., Fadlilah, K., & Malikah, N. (2022). *Fenomena Istigasah Online Realisasi Perilaku Religius*. 137–147.

Zakiyah, U. (2020). Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization*, *4*(02), 115–138. https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33

SEKOLAH, PESANTREN DAN VISI PENDIDIKAN TINGGI NU DALAM MERESPON REVOLUSI INDUSTRI 5.0

Sekolah, Pesantren dan institusi pendidikan tinggi NU berperan strategis dalam merespons tantangan Revolusi Industri 5.0 dengan memperkuat integrasi kultur-tradisi, agama, sains dan teknologi. Visi pendidikan inklusif dan adaptif yang digagas oleh kaum muda NU baik di tanah air maupun jejaringnya dengan dunia global diharapkan dapat melahirkan generasi cendekiawan NU dengan identitas dan karakternya dalam menghadapi dinamika global tanpa kehilangan jati diri islam moderat yang berjangkar kuat pada kultur, tradisi dan ajaran ulama salafussalih.

Sekolah di Persimpangan Jalan; Antara Komersialisasi, Neoliberalisme Pendidikan dan Arena Reproduksi Kesenjangan Sosial

Muhammad Muchlish Huda

Sekolah dan Kelas Sosial

Pada tahun 80-an, Jean Anyon melakukan studi empiris di lima sekolah yang ditargetkan untuk kelompok sosial yang berbeda. Dari studi empirisnya, ia menemukan ternyata kurikulum pembelajaran di lima sekolah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Ada semacam kurikulum tersembunyi atau *hidden curruculum* yang membuat perbedaan kelimanya menjadi tampak mencolok (Anyon, 1980)

Pada dua sekolah dengan kelompok siswa ekonomi kelas menengah ke bawah, belajar tak lebih dari tuntutan pendidik pada siswa untuk menghasilkan siswa yang disiplin dan taat berbagai prosedur mekanis. Penekanan pelajaran hanya pada hafalan dan sedikit sekali aktifitas yang melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan atau pilihan. Pada sekolah dengan kelompok siswa ekonomi kelas menengah, sekolah adalah mencari jawaban atas problematika praktis sehari hari. Di sekolah ini siswa diajari mengenai kemandirian dan bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. (Anyon, 1980)

Adapun yang terjadi pada sekolah lain dimana sebagian besar orang tuanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas atau ekonomi mapan, belajar adalah proses kreatif yang dilakukan secara independen oleh siswa. Didampingi oleh guru secara intensif. Proses ini tentu akan mematangkan kepercayaan diri dan keberanian siswa dalam berkreasi. Sementara itu, di sekolah untuk kelompok eksekutif dengan orang tua berada atau kalangan ekonomi elite, belajar adalah mengembangkan kemampuan analitis siswa. Siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk yang ketat serta berkualitas akademis tinggi.

Sekolah di Indonesia; Neoliberalisme dan Komersialisasi

Empat puluh tahun lebih studi empiris tersebut telah berlalu. Bagaimana kondisi sekolah dewasa ini? Masihkah sama, ataukah

sudah berbeda? Bagaimana dengan sekolah-sekolah di Indonesia? diam diam saya pernah mengamati sebuah tempat kursus/les untuk anak-anak yang cukup bergengsi di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tempat kursus/les ini mengusung konsep modern dan urban dengan fasilitas belajar yang serba bersih, rapi dan mewah. Ketika masuk ke dalam, pengunjung disambut dengan meja suasana ruangan yang bersih, full ac dengan meja informasi yang bagus dan mewah dan penjaga yang penuh senyum dan ramah.

Kesan berkelas lembaga ini tidak bisa lagi terelakkan. Kurikulum dan materi yang diajarkan tampak jelas dan terukur. Dicetak dalam poster berwarna warni dan ditempel dengan hiasan yang bagus dengan aksentuasi pigura modern dan kekinian. Siswa yang belajar di lembaga ini sebagian besar dari keluarga berada. Jumlah siswa-siswinya tidak banyak. Mungkin tidak lebih dari 50 anak. Mereka tampak bersih dan terawat. Sekilas pandang sudah bisa ditebak dari kalangan menengah ke atas. Rata-rata orang tua mereka memang dari kalangan berada. Seperti pemilik toko sepeda, toko emas, toko elektronik atau pemilik restoran ternama, beberapa orang tua yang menjemput anaknya di Lembaga ini tampak mengenakan seragam ASN, beberapa diantaranya lagi mengenakan sragam berlogo BUMN. Sepertinya orang tua dengan ekonomi pas-pasan tidak akan pernah terbayang menyekolahkan anaknya di tempat ini. Bahkan mungkin sekedar tau tempat ini saja tidak. Tempatnya tertutup dan agak masuk ke dalam dari jalan raya.

Tempat les ini memberikan porsi belajar mandiri lebih banyak. Model belajar anak berbasis pada project yang terukur dengan hitungan kuantifikasi yang proper dan memadai. Capaian belajar anak harian benar-benar dihitung dan dikalkulasi secara presisi. Perkembangan anak dilaporakan setiap hari. Fasilitas tempat les juga lebih lengkap. Lokasinya berada di jantung kota. Manajemen tempat les ini juga memiliki akses luas terhadap sumber informasi seputar pengembangan skill dan kemampuan akademis anak. Disamping itu mereka juga memberikan afirmasi dan previllage terhadap peserta didik karena sama sama berasal dari lingkungan orang berpunya yang mayoritas memang keturunan etnis tertentu.

Di tempat lain yang agak lebih ke dalam dan jauh dari kota, ada sekolah dengan segala hal ihwal mengenai konservatismenya. Halaman sekolah yang penuh dengan rumput. Lonceng besi karatan yang tergantung di salah satu sudut atap pelataran. Atap plafon yang

jebol di mana-mana. Meja dan bangku kayu yang telah mulai reyot dan menghitam. Kantor yang berantakan dan tidak tertata. Buku, absensi siswa, lembar penilaian, dokumen sekolah bercampur begitu saja dengan piring, gelas, botol, makanan-makanan ringan, sendok dan seterusnya. Seperti kita bersama bisa menebaknya, sekolah ini berbiaya jauh lebih murah daripada yang pertama.

Metode pembelajaran di sekolah ini lebih menekankan pada metode klasikal. Kurikulumnya menitikberatkan pada hafalan. Apapun mata pelajarannya, hafalan adalah solusinya. Bahkan pelajaran sejarahpun dihafalkan. Inisiatif pribadi siswa dan keberanian tampil di muka publik tidak begitu mendapatkan porsi perhatian yang serius. Apalagi latihan mengambil keputusan. Pengenalan terhadap teknologi dan kebaruan dilakukan tanpa terpola dan cenderung apa adanya. Mata pelajaran berbasis *project* tidak terlalu dikenal. Dengan konservatismenya, sekolah ini tampak begitu eksklusif hanya untuk golongannya sendiri. Biasanya pengelola dan manajemen sekolah model kedua ini memiliki definisi sendiri mengenai sekolah yang maju.

Parameter kemajuan sekolah bukan diukur dari kualitas, tetapi jumlah siswa. Ada semacam kompetisi tak tertulis untuk saling berlomba memperbanyak siswa. Apalagi jika dalam satu desa ada dua atau lebih sekolah dengan segmentasi yang hampir sama. Maka berbagai Langkah dilakukan. Mulai dari promosi dengan menunjukkan penampilan drumband keliling kompleks atau desa, menyebar brosur atau selebaran, jemput bola calon siswa dari pintu ke pintu, bahkan potongan harga SPP atau bonus-bonus menarik seperti gratis sragam sekolah atau voucher biaya Pendidikan lainnya.

Model kompetisi Lembaga Pendidikan sebagaimana tergambar dalam uraian di atas semakin menegaskan bagaimana neoliberalisme mengubah wajah Pendidikan kita (Lingard, 2020). Pendidikan yang diniatkan menjadi institusi luhur, direduksi sedemikian rupa menjadi pelatihan-pelatihan yang dihitung berdasarkan jumlah akumulasi jam. Nilai-nilai luhur publik tersebut disederhanakan menjadi nilai-nilai instrumental mentah. Pendidikan yang memiliki watak sophistic dan filosofis dipaksa sedemikian rupa menjadi sistem operasi pasar dimana keberhasilannya ditentukan oleh hitung-hitungan kuantifikasi dan data-data numerik seperti jumlah siswa yang banyak, berbagai pilihan program outclass yang banyak, gedung pembelajaran yang bertingkat dan seterusnya (Olssen, 2020).

Dalam konteks pendidikan Indonesia, ideologi neoliberalisme ini tercermin dalam meningkatnya peran lembaga pendidikan swasta, komersialisasi pendidikan, dan peningkatan biaya Pendidikan (Adriany, 2018). Neoliberalisme banyak memberikan ekses negative seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, penurunan mutu, dan pengaruh globalisasi yang mengancam identitas budaya lokal (Suratno, 2014). Neoliberalisme, sebagai ideologi ekonomi, memperjuangkan kebebasan pasar, privatisasi, dan deregulasi, memberikan dampak terhadap pendidikan baik secara global, termasuk di Indonesia (Sukasni & Efendy, 2017).

Neoliberalisme mendorong terjadinya kesenjangan sosial masyarakat, dimana masyakarakat yang kaya dapat mengkases pendidikan terbaik, sedangkan yang miskin sebaliknya (Salim et al., 2024). Dalam konteks pendidikan di Indonesia, neoliberalisme mempengaruhi berbagai aspek seperti terjadinya marketisasi pendidikan (Lynch, 2006). Marketisasi Pendidikan adalah terbentuknya kultur pendidikan yang dipaksa menjadi sebuah persaingan pasar (Bartlett et al., 2002). Lembaga-lembaga Pendidikan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan di atas dipaksa sedemikian rupa oleh neoliberalisme untuk bersaing mendapatkan murid agar dapur sekolah tetap mengepul. Pola persaingannya seperti orang yang sedang berjualan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dan strategi pemasaran dalam menawarkan dagangan agar dagangannya laku (Davies & Bansel, 2007; Klees, 2020; Lakes & Carter, 2011; Olssen, 2020).

Dalam rangka mendongkrak perolehan siswa, berbagai strategi diluncurkan baik oleh Lembaga Pendidikan seperti sekolah dan termasuk juga oleh pemerintah. STEM (Science, Technology, Engineering and Math) dan sekolah berbasis vokasi di Indonesia yang semakin hari semakin marak menjadi salah satu anak kandung neoliberalisme dan marketisasi Pendidikan. Dalam STEM dan sekolah Vokasi, penekanan pendidikan adalah sekolah kejuruan yang tujuannya untuk melayani persaingan ekonomi, dunia industri dan kebutuhan pengembangan teknologi. Di satu sisi sekolah model vokasi dan kejuruan serta STEM dituntut untuk selalu berimprovisasi dan mengembangkan diri sesuai dengan permintaan pasar, namun di sisi yang lain model Pendidikan ini justru akan mendowngrade ketrampilin kritis dan kepekaan sosial siswa (Younis & Hatim, 2021). Bentuk komodifikasi Pendidikan semacam ini juga akan mengikis

kepekaan sosial dan emosional siswa (Klees, 2020).

Neoliberalisme juga secara signifikan berpengaruh terhadap pergeseran cara pandang masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Tidak lagi dipandang sebagai nilai yang filosofis dan sophistis, ilmu pengetahuan justru dilihat sebagai komoditas atau objek guna yang mendatangkan nilai ekonomi (Marginson, 2016). Sekolah lebih sibuk menyiapkan siswa dengan berbagai vokasi teknis yang ada untuk ikut masuk dalam kompetisi pasar kerja dan dunia industri daripada bertekun pada pengembangan diri dan pemahaman keilmuan siswa yang lebih mapan. Neoliberalisme juga berdampak pada permasalahan ketidaksetaraan antar sekolah. Sekolah yang memiliki basis finansial yang kuat cenderung menjadi semakin besar dan mapan. Pada saat yang sama, sekolah dengan kemampuan finansial yang minim akan semakin tertekan lalu tenggelam. Ketidaksetaraan antar sekolah atau Lembaga Pendidikan tersebut tentu akan berdampak serius pada layanan kualitas Pendidikan yang disediakan. Neoliberalisme dan Marketisasi Pendidikan mendorong sekolah atau Lembaga Pendidikan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dan mengabaikan fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan karakter dan kreativitas siswa (Dahlstedt & Fejes, 2019).

Sekolah; Arena Reproduksi Kesenjangan Sosial

Beberapa fakta tersebut di atas membuka sebagian kecil tabir kelam dunia pendidikan selama ini. Studi empiris yang dilakukan oleh Jean Anyon misalnya, sekolah melalui strategi belajar dan kurikulumnya, alih alih menjadi mekanisme perbaikan status sosial, ia justru menjadi arena reproduksi kesenjangan sosial (Shokouhi & Pashaie, 2015). Sekolah yang digadang-gadang sebagai institusi suci dan tumpuan harapan bagi masyarakat kelas bawah untuk keluar dari jeratan kemiskinan, tetapi yang terjadi justru jauh panggang dari api. Sekolah favorit dengan fasilitas yang baik dan jejaring alumni yang luas dan mapan seperti mustahil diakses oleh masyarakat miskin. Jikapun ada, prosentasenya tidak besar. Pertanyaan paling mendasar adalah di mana letak inklusifitas Lembaga Pendidikan kita?

Banyak yang mengatakan bahwa kesuksesan ditentukan oleh bakat, hal tersebut menurut Bourdieu (Bourdieu, 2018) sebenarnya adalah upaya untuk melanggengkan mitos bahwa seolah-olah semua orang memiliki kesempatan yang sama. Padahal kenyataannya kelas atas tidak terelakkan memiliki kesempatan yang jauh lebih terbuka

karena akses dan jaringan yang dimilikinya. Mitos tersebut tujuannya adalah untuk menutupi jurang kesenjangan akses pendidikan itu sendiri. Jika merujuk data BPS tahun 2022, penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang tamat perguruan tinggi hanya 10,15 persen. Data tersebut belum dipecah lagi berdasarkan prosentase jumlah penduduk yang bisa masuk pada perguruan tinggi bereputasi. Selebihnya, masuk ke sekolah atau perguruan tinggi bereputasi tetap memerlukan kapital ekonomi dan kapital budaya.

Data tersebut di atas belum lagi jika berbicara masalah angka buta huruf. Berdasarkan data statistik, angka buta huruf di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2022 masih tercatat cukup tinggi. Daerah dengan prosentase masyarakat buta huruf pada usia produktif (15-44 tahun) masih dipegang oleh papua dengan prosentase 15,09 persen pada tahun 2022, 19,03 persen pada tahun 2021 dan 20,38 persen pada tahun 2020. Meskipun sebenarnya angka ini mengalami trend penurunan dalam tiga tahun terakhir, namun angka 15,09 persen bukanlah angka prosentase yang rendah. Pada usia penduduk 15 tahun ke atas angka buta huruf lebih tinggi lagi. Di tahun 2022 ada 18,81 persen penduduk Indonesia masih buta huruf, 21,11 pada 2021 dan 22,10 persen pada tahun 2020. Yang lebih miris lagi, jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia pada kelompok umur 16-18 tahun terdapat 22 anak dari 100 anak yang tidak sekolah. (Sumber data: Laporan Statistik Pendidikan 2022)

Berdasarkan data di atas, ketimpangan pendidikan bukan isapan jempol belaka. Ia benar-benar sebuah fenomena yang nyata adanya. Ketimpangan menjadi alarm bahwa pendidikan telah benar-benar mengalami disorientasi (Arsal, 2019). Bagi Paulo Freire (Freire, 1996)dalam *"pedagogy of the oppressed"* pendidikan sudah seharusnya dikaitkan dengan masalah kekuasaan, ketimpangan, budaya dan penindasan (McLaren, 2015) yang terjadi melalui struktur sosial yang dominan, lalu membongkarnya (Freire, 2021). Akan tetapi pendidikan yang lumrah terjadi di masyarakat terlalu disederhanakan sedemikian rupa dalam bentuk materi dan kurikulum yang bersifat instrumental.

Bahan dan materi ajar dengan beban yang berat dan saling tumpang tindih dan overlapping. Media pembelajaran digital yang menguras kuota, energi dan waktu untuk instalasi dan adaptasi. Sehingga dampak dari hal itu siswa menghabiskan waktunya bertekun dalam kurikulum yang terlalu instrumental tersebut untuk kemudian

kehilangan nalar kritisnya terhadap kondisi yang ada. Kondisi dimana diri dan lingkungannya sedang menjadi objek alienasi, penindasan dan subordinasi kelas atas (Haryatmoko, 2003) dalam wujud sekolah. Siswa benar-benar dibuat tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi objek ambisi kekuasaan melalui kebijakan pendidikan yang timpang. Siswa benar-benar dipaksa untuk berjarak dengan kekuasaan dan negara yang korup. Seolah olah negara dan kekuasaan adalah urusan para elit politik negeri. Pada saat yang sama, guru dibuat sibuk dengan mempersiapkan administrasi dan perangkat pembelajaran yang di luar batas kewajaran. Tanpa melakukan itu mereka akan dibayang bayangi penghentian sertifikasi, tunjangan kinerja, remunerasi dan tunjangan tunjangan lain yang sangat berarti bagi kelangsungan hidup mereka.

Dalam kondisi yang semacam ini, sekolah tidak lebih dari sekedar sarana untuk melanggengkan dan mengamankan *status quo* secara turun temurun (Maemonah et al., 2023; Suwaed & Ali, 2016). Sekolah bonafid dan bergengsi hanya untuk ekonomi kelas atas. Masyarakat kelas bawah tak lebih hanya menjadi penonton. Tempat kursus/les sebagaimana fakta di atas adalah fenomena umum yang terjadi di banyak tempat. Di tengah munculnya pendidikan berbasis multicultural (Suharto, 2012), sekolah/tempat kursus/tempat les yang diskriminatif ternyata juga tidak berkurang jumlahnya. Dalam kondisi lingkungan sekolah yang tidak sehat tersebut, kelas elite atau pemilik modal melahirkan kembali klan elitenya. Dan sebaliknya, kelas menengah ke bawah akan selamanya menjadi masyarakat miskin dan sulit -untuk tidak mengatakan mustahil- naik kelas atau melakukan mobilitas sosial, justru yang sering terjadi hanya bergeser kelas saja atau malah turun kelas.

Sekolah yang diharapkan menjadi arena terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali untuk bisa membongkar kelas sosial dengan hanya murni mengandalkan kemampuan semata, pada kenyataannya menjadi tempat reproduksi kelas sosial itu sendiri melalui kurikulumnya yang timpang, di perguruan tinggi wali murid dibayang-bayangi oleh UKT (uang kuliah tunggal) yang mencekik, fasilitas pendidikan yang bagus dengan UKT tinggi hanya bisa dinikmati segelintir orang. Sekolah menjadi arena ketimpangan sosial yang tidak pernah disadari, karena proses ketimpangan yang terjadi dalam sekolah terbentuk dengan citra positif dan produktif melalui pendisiplinan dan normalisasi pendidikan yang sekilas tampak baik

dan adiluhung. Seolah hal semacam ini sudah lumrah terjadi dan memang beginiliah kultur yang harus diterima.

Dalam beberapa kesempatan, digitalisasi pendidikan dan *hybridisasi* model pembelajaran di sekolah utamanya pasca pandemi, secara teori memang memberi kesempatan yang sama kepada semua orang, tetapi harus disadari pula bahwa digitalisasi bagi masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi adalah sebuah *cultural shock*. Butuh waktu yang tidak singkat untuk memapankan teknologi dan digitalisasi kepada masyarakat buta teknologi. Dalam konteks pendidikan kritis, teknologi justru semakin mendorong terlembaganya instrumentalisasi sekolah. Sekolah yang ada di pelosok dengan akses internet yang minim jika dibandingkan dengan sekolah di pusat kota dengan sarana prasarana digital yang memadai, tentu akan tampak sangat timpang.

Hampir sama dengan pola pengelolaan sekolah model pertama sebagaimana dijelaskan di atas, pengelolaan sekolah dengan tetap mempertankan konservatisme sebagaimana dipaparkan dalam contoh kedua, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Dalam pandangan teori modal sosial Pierre Bourdieu, sekolah semacam ini sedang melakukan praktik melanggengkan reputasi kelompok (Bourdieu, 2018). Alih alih guru atau pengajar membuka realitas sosial untuk melawan dan menggugat ketimpangan redistribusi modal yang bersifat struktural yang hanya dikuasai dan dikendalikan segelintir orang dengan kekuatan modal kapital yang mereka miliki, kesibukan sekolah dengan contoh kedua justru terkuras habis dalam rangka beradaptasi dengan perubahan perubahan kurikulum dari pusat atau kesibukan dalam mengejar rekognisi sosial-kultural atau pengakuan status sosial. Arah alumninya adalah mengisi jabatan kultural dalam masyarakat dan organisasi baik sosial maupun keagamaan. Sekali lagi problem ketimpangan redistibusi modal dan kapital yang hanya terkonsentrasi pada kelas sosial tertentu luput dari perhatian. Belum lagi jurang kelas sosial yang tercipta akibat redistribusi modal yang timpang tersebut.

Menurut teori modal budaya dan modal sosial Pierre Bourdieu kemampuan dan aspirasi seorang individu untuk meraih kondisi sosial yang lebih baik (*upward mobility*) dengan ekonomi yang lebih mapan dan naiknya status sosial seseorang dipengaruhi oleh jaringan budaya dan jaringan sosial yang dimilikinya atau dapat

diakses oleh dirinya (Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, 1990). Stanton membedakan jaringan sosial ke dalam dua jenis berdasarkan status sosial ekonomi keluarga. Dibandingkan dengan komunitas menengah, jaringan sosial kelompok ekonomi lemah, cenderung kecil, homogen dan sangat rapat, dengan sedikit akses menuju institusi dan jaringan sosial lainnya terutama kelas menegah, kelas atas apalagi kelas pemilik modal.

Zona Prioritas Pendidikan & Pendidikan Berbasis Masyarakat: Sebuah Alternative

Gagasan Haryatmoko untuk mengurai disparitas dan ketimpangan pendidikan sebagaimana fakta pendidikan di atas kiranya perlu untuk dipertimbangkan. Dalam berbagai kesempatan, Haryatmoko menyampaikan pentingnya pemerintah menginisiasi zona prioritas pendidikan untuk peserta didik dari keluarga miskin atau dari daerah tertinggal (Haryatmoko, 2010). Zona prioritas pendidikan tersebut diisi dengan tenaga pendidikan yang berkualitas, fasilitas pendidikan yang bermutu, infrastruktur digital yang memadai dan dengan standar manajemen pendidikan yang profesional sebagaimana sekolah-sekolah bereputasi pada umumnya. Zona prioritas Pendidikan harus bersifat inklusif. Siapapun dengan kondisi ekonomi apapun bisa masuk dan menikmati fasilitas Pendidikan yang prima. Dalam rangka menggagas zona prioritas Pendidikan maka pemetaan jangkauan dan akses terhadap peserta didik dari keluarga menengah ke bawah atau dari daerah tertinggal terhadap sekolah bermutu dan bereputasi menjadi penting.

Data pemetaan tersebut tentu menjadi landasan bagi pemerintah untuk mendirikan sekolah bermutu dan bereputasi dengan standardisasi tertentu di zona prioritas Pendidikan tersebut (Shor & Freire, 1987). Beasiswa bagi peserta didik berprestasi atau kurang mampu tetap dipertahankan, namun beasiswa tidak menjadi satu-satunya solusi bagi pemerataan pendidikan karena dalam prakteknya penerima beasiswa sering salah sasaran, jika tidak ingin menyebutnya sengaja disasarkan pada orang yang salah. Sekolah bermutu dan bereputasi tersebut berfungsi untuk memudahkan akses dan jangkauan peserta didik dalam mendapatkan pendidikan yang baik dan layak (Breuing, 2011). Sehingga prinsip pemerataan pendidikan tidak sebatas menjadi slogan tetapi menjadi garapan serius pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga Negara tanpa

memandang suku, ras, agama, status sosial, kondisi ekonomi dan modal kapital atau konektifitas yang dimiliki oleh keluarganya.

Disamping zona prioritas pendidikan yeng lebih bersifat instrumentalis karena diinisiasi oleh pemerintah, pendidikan berbasis masyarakat yang lebih humanis bisa menjadi penyeimbang (Giroux, 2018; McLaren, 2015; Ross, 2017). Sebagaimana pandangan Makmuri Sukarno yang dikutip oleh Toto Suharto, bahwa secara teoritis terdapat dua orientasi ekstrem politik pendidikan, yaitu politik pendidikan yang berorientasi instrumentalistik dan politik pendidikan yang berorientasi humanistic (Suharto, 2005). Politik pendidikan instrumentalistik memusatkan pendidikan sebagai upaya memaksimalkan fungsi ekstrinsik peserta didik untuk menghadapi masa depan, yang didefinisikan oleh kekuatan system ekonomi dan politik tertentu. Sementara politik pendidikan humanistik cenderung mengembangkan aspek kemanusiaan peserta didik secara intrinsik sebagai sentral.

Dalam suatu Negara berkembang, kedua orientasi pendidikan ini muncul dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang kritis dengan mengutamakan watak dan gerakan pembebasan (Aliakbari & Faraji, n.d.; Shor & Freire, 1987; Wink, n.d.) dan politik pendidikan berbasis Negara yang cenderung mengembangkan politik pendidikan secara instrumentalistik. *Radical/critical education* sebagai salah satu eskponen dari orientasi pendidikan humanistik mengandaikan adanya peran pendidikan sebagai gerakan politik pembebasan (Aliakbari & Faraji, n.d.; *IDENTITY LANGUAGE LEARNING AND CRITICAL PEDAGOGY*, n.d.; Riasati & Mollaei, 2012). Tanpa gerakan politik pembebasan, pendidikan akan menjadi instrument dominasi oleh kelompok yang dominan.

Dalam konteks inilah, pendidikan berbasis masyarakat (Freire, 1996; McLaren, 2015; Monchinski & Monchinski, 2008) menjadi solusi penyeimbang bagi zona prioritas pendidikan yang penting untuk diinisiasi oleh pemerintah sebagai amanat undang-undang dalam rangka pemerataan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berbasis masyarakat tersebut diharapkan menjadi inkubasi bagi humanisasi pendidikan untuk mengimbangi orientasi politik pendidikan instrumentalistik di mana pendidikan menjadi alat bagi Negara untuk melakukan dominasi atas nama standardisasi.

Daftar Referensi

Adriany, V. (2018). Neoliberalism and practices of early childhood education in Asia. *Policy Futures in Education*, *16*(1), 3–10. https://doi.org/10.1177/1478210317739500

Aliakbari, M., & Faraji, E. (n.d.). *Basic Principles of Critical Pedagogy*.

Anyon, J. (1980). Social Class and the Hidden Curriculum of Work. *Journal of Education*, *162*(1), 67–92. https://doi.org/10.1177/002205748016200106

Arsal, Z. (2019). Critical multicultural education and preservice teachers' multicultural attitudes. *Journal for Multicultural Education*, *13*(1), 106–118. https://doi.org/10.1108/JME-10-2017-0059

Bartlett, L., Frederick, M., Gulbrandsen, T., & Murillo, E. (2002). The Marketization of Education: Public Schools for Private Ends. *Anthropology & Education Quarterly*, *33*(1), 5–29. https://doi.org/10.1525/aeq.2002.33.1.5

Bourdieu, P. (2018). Cultural reproduction and social reproduction. In *Knowledge, education, and cultural change* (pp. 71–112). Routledge.

Breuing, M. (2011). Problematizing Critical Pedagogy. In *International Journal of Critical Pedagogy* (Vol. 3, Issue 3).

Dahlstedt, M., & Fejes, A. (Eds.). (2019). *Neoliberalism and Market Forces in Education*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429470530

Davies, B., & Bansel, P. (2007). Neoliberalism and education. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, *20*(3), 247–259. https://doi.org/10.1080/09518390701281751

Freire, P. (1996). Pedagogy of the oppressed (revised). *New York: Continuum*, *356*, 357–358.

Freire, P. (2021). *Education for critical consciousness*. Bloomsbury Publishing.

Giroux, H. (2018). *Pedagogy and the politics of hope: Theory, culture, and schooling: A critical reader*. Routledge.

Haryatmoko, J. (2003). *Etika politik dan kekuasaan*.

Haryatmoko, J. (2010). *Dominasi penuh muslihat: akar kekerasan dan diskriminasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Klees, S. J. (2020). Beyond neoliberalism: Reflections on capitalism and education. *Policy Futures in Education*, *18*(1), 9–29. https://doi.org/10.1177/1478210317715814

Lakes, R. D., & Carter, P. A. (2011). Neoliberalism and Education: An Introduction. *Educational Studies*, *47*(2), 107–110. https://doi.org/10.1080/00131946.2011.556387

Lingard, B. (Ed.). (2020). *Globalisation and Education*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429464454

Lynch, K. (2006). Neo-Liberalism and Marketisation: The Implications for Higher Education. *European Educational Research Journal*, *5*(1), 1–17. https://doi.org/10.2304/eerj.2006.5.1.1

Maemonah, M., Zuhri, H., Masturin, M., Syafii, A., & Aziz, H. (2023). Contestation of Islamic educational institutions in Indonesia: Content analysis on social media. *Cogent Education*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2164019

Marginson, S. (2016). The worldwide trend to high participation higher education: dynamics of social stratification in inclusive systems. *Higher Education*, *72*(4), 413–434. https://doi.org/10.1007/s10734-016-0016-x

McLaren, P. (2015). *Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education*. Routledge.

Monchinski, T., & Monchinski, T. (2008). *Critical pedagogy in the everyday classroom*. Springer.

Olssen, M. (2020). Neoliberalism, globalisation, democracy: challenges for education. In *Globalisation and Education* (pp. 28–72). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429464454-2

Pierre Bourdieu, & Jean-Claude Passeron. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage Publication.

Riasati, M. J., & Mollaei, F. (2012). Critical Pedagogy and Language Learning. In *International Journal of Humanities and Social Science* (Vol. 2, Issue 21). www.ijhssnet.com

Ross, E. W. (2017). *Rethinking social studies: Critical pedagogy in pursuit of dangerous citizenship*. IAP.

Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D. (2024). NEOLIBERALISME DAN DAMPAKNYA BAGI PENDIDIKAN INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI. *Jurnal Pendidikan*, *24*(2), 97–115. https://doi.org/10.52850/jpn.v24i2.12484

Shokouhi, M., & Pashaie, F. (2015). Critical pedagogy and its realization in classroom context. *Journal of Applied Linguistics*

and Language Research, *2*(3), 204–210.

Shor, I., & Freire, P. (1987). *A pedagogy for liberation: Dialogues on transforming education*. Greenwood Publishing Group.

Suharto, T. (2005). Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*, *3*, 87599.

Suharto, T. (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. LKIS Pelangi Aksara.

Sukasni, A., & Efendy, H. (2017). The Problematic of Education System in Indonesia and Reform Agenda. *International Journal of Education*, *9*(3), 183. https://doi.org/10.5296/ije.v9i3.11705

Suratno, T. (2014). The education system in Indonesia at a time of significant changes. *Revue Internationale d'éducation de Sèvres*. https://doi.org/10.4000/ries.3814

Suwaed, M., & Ali, N. (2016). Education, identity, and ideology: the Islamic movement and Moslem religious education in Israel. *Social Identities*, *22*(4), 426–449. https://doi.org/10.1080/13504630.2015.1128811

Wink, J. (n.d.). *Critical Pedagogy: Notes from the Real World*. http://www.joanwink.com/cp4/cp4_toc.phpRetrievedfrom:http://www.joanwink.com/scheditems/CP-050911-Part1.pdf

Younis, A. A.-H., & Hatim, M. (2021). Trends in higher education under neoliberalism: Between traditional education and the culture of globalization. *Educational Research and Reviews*, *16*(2), 16–26. https://doi.org/10.5897/ERR2020.4101

Menyosong Pendidikan Pesantren Integratif Dalam Merespon Tantangan Era Society 5.0

Samsul Hadi

Dewasa ini pembahasan wacana Pendidikan baik pada segi konsep serta teori, hingga kapanpun tetap relevan untuk di diskusikan pada kerangka refleksi dan realisasi serta memiliki ruang yang penting buat dicermati ulang guna keberlangsungan umat manusia. Mengapa pembahasan perihal Pendidikan begitu penting, paling tidak ada tiga alasan sebagai berikut. Pertama keterlibatan manusia yang senantiasa bergerak maju, baik menjadi pendidik, peserta didik, juga penanggung jawab pendidikan. kedua perlunya trobosan menggunakan perkembangan sains dan teknologi yang begitu masif. Ketiga yaitu tuntunan zaman yang menyebabkan keterbukaan informasi sehingga meleburkan sekat-sekat agama, ras, budaya, bahkan falsafah satu bangsa. Ketiga alasan tersebut tentunya harus diikuti serta dijawab oleh dunia pendidikan demi kelangsungan hidup manusia pada situasi yang serba dinamis, inovatif, serta semakin mengglobal.(Malik et al., 2022)

Pendidikan pesantren di akui ataupun tidak merupakan pendidikan tertua di Indonesia, pesantren dalam merespon perkembangan zaman tidak pernah goyah menanamkan nilai-nilai ke generasi selanjutnya. Inilah faktanya, sebab sistem pendidikan pesantren mengajarkan pada setiap generasi bukan hanya buat taat menjalankan perintah agama melainkan pula bagaimana menjaga kesinambungan sejarah dan ideologi nasional buat keberlanjutan peradaban, budaya, dan humanisme.(Sufirmansyah, n.d.)

Di Indonesia pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menekankan unsur keagamaan yang begitu kuat. lembaga pesantren secara Sejarah sudah berlangsung sejak masa lampau, menjangkau hampir seluruh lapisan warga muslim. Pesantren diakui menjadi lembaga pendidikan yang telah ikut dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Maulida et al., 2016) Pendidikan pesantren secara langsung berperan mengembangkan dan membentuk nilai-nilai moral. Pendidikan pesantren juga merupakan pelopor sekaligus inspirator dalam memperbaiki karakter bangsa.(Kesuma, 2017).Pendidikan pesantren hadir tentu untuk

menumbuhkan generasi serta kebutuhan nasional dengan tujuan utama mencapai tujuan pendidikan nasional.(Sunan Gunung Djati Bandung et al., n.d.)

Maka pendidikan pesantren sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa; "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab"(Islam et al., n.d.).

Pendidikan pesantren memiliki peran strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional agar menjalankan kiprahnya dengan baik. sehingga pada menjalankan kiprahnya sebuah lembaga wajib menyusun dan memanajemen supaya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan terealisasi dengan optimal (Malik et al., 2022). Dari perspektif ilmu pendidikan, pendidikan pesantren sangat relevan buat diterapkan pada sistem pendidikan nasional dengan mempertimbangkan fakta bahwa Pendidikan pesantren adalah agen tradisi yang menghormati nilai-nilai serta norma istiadat dan ilmu yang dapat merekayasa strategi humanisme dan budaya dalam membangun rakyat yang beradab(Sufirmansyah, n.d.).

Diakui, secara empiris pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak persoalan serta belum berhasil memimpin generasi muda, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Memang, sistem pendidikan dirumuskan, diterapkan, tetapi tak jarang ditantang oleh sistem pendidikan yang dikembangkan oleh negara asing. dalam syarat demikian, intervensi konsep pendidikan barat sulit dihindari. Era keterbukaan serta modernisasi saat ini diibaratkan menjadi dua sisi yang telah masuk pada bilik-bilik pesantren menjadi pewaris keaslian pendidikan Indonesia(Kesuma, 2017).

Hal ini memberikan ujian yang cukup luar biasa bagi pesantren. Di satu sisi, pesantren harus mempertahankan tradisi kepesantrenannya sebagai lembaga "*asli*" Indonesia . Namun di sisi lain, pesantren tidak bisa menghindar dari modernisasi Dengan segala produk yang ditawarkan. modernisasi menawarkan sebuah

pilihan, satu sisi membawa kebaikan, dan mungkin juga membawa petaka bila tidak siap menghadapinya. Di tengah laju modernisasi yang mengubah wajah dunia, Pendidikan pesantren tidak lagi sekadar menjadi penguatan pengetahuan keagamaan. Ia telah menjadi pemandu moral dan etika, membimbing individu dalam menyongsong perubahan zaman yang dipenuhi oleh robotika canggih, kecerdasan buatan, dan digitalisasi(Kesuma, 2017).

Modernisasi merupakan sebuah keniscayaan yang wajib kita hadapi bersama. Begitu pula, tantanganya sudah menuntut pesantren bertindak bijak(Kesuma, 2017). Tantangan kompleks yang dihadapi pesantren memang memerlukan pendekatan yang bijak. perkembangan ekonomi, perubahan cara kerja tradisional, serta pertumbuhan teknologi yang sangat massif adalah dinamika yang mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan manusia. Pendidikan pesantren, dengan ajaran-ajarannya yang menganjurkan integritas, kejujuran, empati, serta tanggung jawab sosial, Jika mampu menjalankanya memiliki potensi besar untuk membimbing generasi muda dalam menghadapi tantangan ini dengan bijak dan penuh pengabdian.

Adaptasi dan kolaboratif artinya suatu bentuk keniscayaan tanpa menghilangkan ciri khas yang dimiliki pesantren (*almuhâfazhah `ala al-qadîm Alaihi Salam-shâlih wa alakhdzu bi al-jadîd al-ashlah*). Integritasi sistem pendidikan pesantren ialah nilai sentral dalam ajaran Islam yang mengajarkan untuk konsisten pada prinsip-prinsip moral, bahkan di tengah godaan dan tekanan zaman yang kuat(Musyafak & Subhi, 2023).

kembali pada wacana modernisasi, ilmu terkini yang diajarkan pada pesantren harus memiliki pola perpaduan. Landasan karakteristik keilmuan disandarkan pada kajian ayat-ayat *qauliyah* serta *qauniyah*, yang bersumber dari Allah SWT. Landasan ini dijadikan patokan dalam segala kegiatan. Konsep inilah yang diperlukan dapat melahirkan konsep-konsep keilmuan yang kokoh. Santri wajib dibekali keilmuan umum agar mampu bertahan di era modernisasi.(Kesuma, 2017) Penulis berusaha untuk mengungkap realitas empiris dari teori dan praktik pendidikan pesantren yang pernah dilakukan dan dikembangkan di masa lalu dan masih ada saat ini dengan metode pembelajaran khusus dan terbukti memberikan pengembangan tidak hanya dalam pendidikan khas Indonesia, tetapi juga pada perkembangan lokal, nasional dan

global pada saat bersamaan.

Asal Usul Pesantren

Pesantren merupakan pola pendidikan tertua di Indonesia, Pesantren bisa dikatakan 'bapak' dari pendidikan Islam di Indonesia. Berdirinya pesantren didasari karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, di mana bila dirunut kembali sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran syiar islam(Maulida et al., 2016). Menurut Dhofier menyampaikan bahwa secara historis pesantren mempunyai akar-akar yg kuat, hal tersebut berasal aktivitas penggalian arkeologi situs Barus, Sumatra Utara, yang di promotori oleh Prof. Claude Gulliot dan Ludvik Klaus, mengungkapkan bahwa situs Barus merupakan sentral pendidikan Islam paling tua di Asia Tenggara.(Tarbiyah et al., 2018).

Sebagai pembanding berasal Dhofier, Mastuhu berpendapat bahwa pesantren pertama kali didirikan oleh siapa, kapan serta dimana belum di ketahui secara sempurna. tetapi, sesuai pendataan Departemen agama tahun 1984-1985, diketahui bahwa pesantren tertua didirikan di tahun 1062 yaitu Pesantren Tan Jampes II di Pamekasan, Madura. tapi pernyataan ini mengakibatkan keraguan, bisa jadi ada Pesantren Tan Jampes I yg lebih tua, apalagi pada buku Departemen agama tadi banyak dicantumkan pesantren tanpa tahun pendirian. Begitupun, Soebardi beropini bahwa pesantren tertua adalah pesantren Giri sebelah utara Surabaya, Jawa Timur yang didirikan sang wali Sunan Giri pada abad 17 M langsung dipimpin oleh keturunan Nabi - Wali.

Proses ikatan Sejarah berlangsung di jawa yang di syiarkan walisongo sekitar abad ke-15-16 M yang menandakan kesuksesan syiar agama islam di terima secara luas mempengaruhi kepercayaan warga pribumi buat menjadikan islam menjadi agamanya. Syiar walisongo menggunakan pendekatan- pendekatan yang hening dengan rekonsiliasinya menggunakan tradisi-tradisi lokal salah satunya ialah dilakukan melalui pendidikan pesantren. mirip pendidikan pada era kerajaan majapahit yang mempunyai sistem pendidikan yang sangat sederhana serta tradisional apa adanya (Maulida et al., 2016). Selanjutnya proses rekonsiliasi sistem pendidikan lokal yang berciri Hindu Budha, dan Kapitayan, seperti dukuh, asrama, padepokan, yang bertransformasi menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren.

Kembali sejarah berdirinya pesantren di Indonesia sebab sedikitnya berita yang bisa diketahui perihal sejarah perkembangan pesantren pada masa lalu, dan yang bisa dilakukan adalah hanya menduga-duga wacana tentang ciri-ciri dan pengaruhnya dalam kehidupan keagamaan. Mastuhu menyampaikan kesimpulan , bahwa pesantren di Indonesia telah ada semenjak abad ke 13-17, dan pada Jawa semenjak abad 15-16 M bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Laporan mastuhu dikuatkan oleh Dhafier bahwa dalam serat Senthini dijelaskan pada abad 16 telah banyak pesantren-pesantren mashur di Indonesia yang menjadi sentral pendidikan Islam. tapi, laporan Mastuhu serta Dhofier di tolak oleh Van Bruinessen, dimana serat Senthini tersebut disusun abad 19, oleh sebab itu tidak bisa dianggap menjadi sumber yang bisa dipercaya untuk menyebutkan peristiwa abad 17 M. Akhirnya, para sejarahwan menyimpulkan bahwa pendidikan pesantren di Indonesia belum terdapat sebelum abad 18 M serta baru ada pada akhir abad 18 M dan awal 19 M(Kesuma, 2017).

Selanjutnya pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini menunjukkan besarnya animo dan semangat kaum muslimin untuk belajar ilmu Islam sejak dahulu. Berdasarkan laporan pemerintah kolonial Belanda, pada abad ke-19 untuk di Jawa saja terdapat tidak kurang dari 1.853 buah, dengan jumlah santri tidak kurang dari 16.500 orang. Dari jumlah tersebut belum termasuk pesantren-pesantren yang berkembang di luar Jawa terutama Sulawesi dan Kalimantan . Pada laman situs *pendis. kemenag.go.id* dimuat data statistik pondok pesantren dari berbagai aspeknya sebagai hasil penelitian pada tahun 2011/2012. Pendataan pondok pesantren tahun 2011-2012 ini berhasil mendata 27.230 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia(Maulida et al., 2016).

Terdapat tiga elemen dasar yang menghasilkan pondok pesantren sebagai subkultur yang mendorong visi tujuan pendidikan nasional. Pertama, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri. kedua, penggunaan buku-buku rujukan yang selalu dipergunakan berabad-abad lamanya. serta yang Ketiga, sistem nilai atau sering di sebut menggunakan tata cara-adat yang digunakan adalah bagian berasal warga luas. sesuai elemen yang ketiga, dapat dinyatakan Pondok Pesantren memiliki korelasi yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren sebagai salah

satu penopang pilar utama pendidikan di indonesia(Sunan Gunung Djati Bandung et al., n.d.).

Semangat pengembangan pendidikan pesantren yang memiliki visi sebagai pendidikan, syiar keagamaan dan komitmen kebangsaan. Ternyata mampu mempengaruhi perhatian Masyarakat. Karena itu, pesantren terus berkembang berupaya mencerdaskan, meningkatkan pemahamanan keagamaan, menyebarkan kedamaian(Arafat et al., n.d.). Pendidikan pesantren dalam perkembanganya mempunyai andil dan peranan pada tumbuh kembangnya santri. Penanaman pendidikan agama terkhusus keimanan, kemandirian serta budi pakerti. Hal tadi sejalan dengan apa yang di inginkan oleh tujuan pendidikan nasional. Penanaman keimanan adalah keunggulan primer pada pendidikan pesantren.(Islam et al., n.d.).

Integrasi Pendidikan Pesantren

Pesantren dengan semangat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan karakteristik spesial pesantren menjadi pewaris tradisi pendidikan bangsa Indonesia. Secara umum model pendidikan pesantren diklasifikasikan menjadi dua tipe yakni: pertama, terintegrasi dengan lembaga pendidikan umum, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (sekolah, madrasah dan perguruan tinggi), dan kedua, pendidikan non formal yang secara spesifik mengajarkan kitab -kitab klasik abad ke-7-13 M yang mencakup kitab tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, gramatikal bahasa Arab (nahwu, saraf, balagah, dan tajwid), mantik dan akhlak. di pesantren-pesantren tipe pertama serta kedua, sistem pembelajaran tradisional masih permanen di jalankan, yaitu *sorogan, wektonan, halaqah dan batsul masail* hanya saja disesuaikan dengan perkembangan zaman(Tarbiyah et al., 2018).

Secara umum pendidikan pesantren memiliki metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. namun pendidikan pesantren tetap tidak menghilangkan karakteristik spesial pembelajaranya sampai saat ini. Pertama, metode sorogan secara bahasa dari berasal bahasa jawa sorog yang artinya menyodorkan. menggunakan metode ini santri bisa menyodorkan materi yang ingin di pelajarinya sehingga bisa menyodorkan materi yang ingin dipelajarinya sehingga menerima bimbingan spesifik secara individual ataupun kelompok. Metode soragan ini acapkali diklaim sebagai proses pembelajaran individual yang di lakukan oleh

santri. Sorogan mempunyai keaslian bahan / substansi ajaran Islam yang ditransformasikan berasal satu generasi ke generasi berikutnya menggunakan pola serta pendekatan pembelajaran yang sudah diuji..

Metode sorogan ditinjau di era modern ini menjadi model pendidikan yang unggul. Dengan metode ini kyai dapat membimbing, mengawasi, dan menilai kemampuan santri secara langsung. Metode sorogan bila terintregrasikan dengan konsep pendidikan orang dewasa. Sebagai upaya penyatuan dan usaha mendewasakan manusia melalui proses pembelajaran. Sangat relevan sebagai wujud merespon perkembangan zaman hari ini. Semisal, metode sorogan dengan materi primer menggunakan kitab kuning di tambahkan materi sekuder yakni sains sebagai pengetahuan sistematis tentang alam, material termasuk di dalamnya geologi, kimia, matematika, ilmu pengatahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan teknologi. Integrasi dan revitalisasi metode sorogan dengan materi-materi diatas membangun santri untuk lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan di harapkan menjadi rujukan dalam kelompok masyarakat modern.

Kedua, metode menghafal atau tak jarang di sebut dengan Tahfidz dan Majelis Ta'lim. Dimana sistem pembelajaranya mengharuskan untuk menghafal kitab -buku yang di ajarkan oleh kyai. Metode tadi, mempunyai nilai-nilai yang di wariskan semenjak tradisi klasik yang dipergunakan di Timur Tengah. sebab metode dipergunakan buat memotivasi santri belajar dengan serius dan bersungguh-sungguh Ketiga, metode Wetonan (Belajar kolektif) atau sering disebut dengan bandongan. Ini adalah sistem pengajaran yang dilakukan ketika seorang kiai membaca buku dan para santri membawa buku yang sama, ketika kiai membaca isi buku tersebut, bahwa santri memberikan tanda struktur kata atau kalimat yang dibaca oleh kiai pada masing-masing masing-masing bukunya. Biasanya santri menandainya dengan tulisan Pegon, tulisan dengan gaya tersebut sangat mashur di kalangan santri. Dalam praktiknya, metode wektonan menekankan kepatuhan pada kiai. Santri mendengarkan kiai sepenuhnya.

Keempat, adalah Metode Bahtsul Masail. Metode ini berarti melakukan pertemuan ilmiah, pertemuan tadi sebaai proses pemecahan masalah. umumnya membahas tentang problematika kehidupan menggunakan rujukan buku atau kitab -kitab yg telah diajarkan kyai sebagai landansanya. Penerapan metode ini

diperlukan dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan referensi yang disediakan. pada metode ini, santri akan mempercepat untuk membentuk mentalitas yang kuat dalam memberikan pendapat dengan cara yang baik serta pula melatih santri buat menghormati orang lain. (Sufirmansyah, n.d.). Metode Bahtsul Masail pada dasarnya menjadi model pendidikan yang unggul. Output Bahtsul Masail menjadi pemecah atas problematikan kehidupan hari ini. Terlebih bila mana output dari Bahtsul Masail mampu di akses oleh Masyarakat luas. Dengan cara apa? yakni dalam bentuk karya tulis. Seperti, membukukan hasil Batsul Masail Pesantren sehingga dapat dicetak, tersebar sehingga mampu di akses oleh Masyarakat luas.

Keempat metode pembelajaran pendidikan pesantren tersebut yang hingga hari ini masih di terapkan oleh lembaga pendidikan pesantren. Selanjutnya, Intregrasi pendidikan pesantren merupakan wujud nyata, sebagai upaya lembaga penndidikan islam merespon perubahan zaman. Pendidikan pesantren dengan segala komitmen keislaman dan kebangsaanya, memiliki kontribusi yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia. pengembangan pondok pesantren. Dalam prosesnya sebagai upaya merespon tantangan zaman memiliki beberapa point pembaharuan pendidikan pesantren di antaranya yakni:

Pertama, mendistribusikan sekaligus mensosialisasikan pada proses pembelajaran yang ada di pesantren. Setidaknya, Materi produktif: yang lebih mengarah kepada skill ketrampilan serta pembentukan karakter. dengan mendistribusikan, mengambarkan serta mensosialisasikan baik lewat media cetak ataupun media online seperti platfrom digital, bulletin, media, temu diskusi, atau cara lainnya. Kedua, membumikan dan mendorong segenap tokoh di lingkungan lembaga pesanten baik kyai, ustadz/ustadzah, dan santri untuk lebih menyelemani dunia literasi terkhusus dalam bidang sosial keagamaan sehingga mampu merespon problematika sosial dan paling penting bisa di akses oleh Masyarakat luas. Dengan cara apa? yakni dalam bentuk karya tulis. Seperti, mengadakan lomba karya tulis antar Pesantren, memberikan ruang media kepada santri, dan memberikan bantuan madding ke Pesantren, dll.

Ketiga, lembaga pesantren dalam proses pembelajaran agar tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sayogyanya, melakukan kegiatan studi banding yakni kegiatan yang dilakukan

dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepanya menjadi lebih baik terkhusus pada kurikulum. Karena, kurikulum sebagai sumber rujukan proses pembelajaran. Serta menjembatani pesantren- pesantren dalam menjalin kerjasama di bidang kurikulum dengan pesantren atau lembaga lain. Dengan Membumikan motto NU, yaitu: Almuhafadzoh ala Qadimi Assholih wal Akhdzu bil Jadidi Al-ashlah. Mengupayakan untuk penyetaraan untuk ijazah pesantren pengenalan dan penyosialisaian tentang IPTEK

Tiga point pembaruan pada atas tidak terlepas dari bagaimana lembaga pesantren tetap mencetak generasi yang unggul. Generasi yang unggul menggunakan indikator sumber daya manusia yang berkualitas serta kompeten dibidangnya. manusia yang berkualitas adalah insan yang minimal memiliki ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) dan kompetesi dalam keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT(Lestari Stainu purworejo prawidya, 2018). Dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, lembaga pesantren dalam menghadapi tantangan di era society 5.0. sayogyanya, melakukan berbagai strategi dan pendekatan untuk memastikan santri dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kemajuan teknologi dan tuntutan zaman. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan :

Pertama, Pengembangan Kompetensi Digital. Memasukkan pada kurikulum pengembangan kompetensi digital seperti literasi media, keamanan digital, dan etika berinternet. Hal ini akan membantu santri dalam memakai teknologi dengan bijak dan memahami implikasinya terhadap ajaran agama Islam. kedua, kolaborasi dengan Komunitas serta forum kemasyarakatan. Mengadakan kolaborasi dengan masjid, organisasi kemasyarakatan, dan ulama setempat untuk menyampaikan wawasan tambahan serta membimbing santri dalam praktik dan penerapan nilai-nilai agama Islam pada era Revolusi Industri 5.0. Ketiga, Pembelajaran Berbasis Proyek. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan santri buat merancang solusi teknologi inovatif yang sinkron dengan prinsip-prinsip Islam. Proyek- proyek ini bisa meliputi pengembangan aplikasi, situs web, atau penemuan teknologi lainnya. (Musyafak & Subhi, 2023).

Terakhir, Integrasi Pendidikan pesantren, pesantren memainkan peran multifungsi dalam merespon kebutuhan

zaman. pesantren tidak hanya sebagai tempat pendidikan agama tetapi meninjau realitas dan kebutuhan pemecahan problematika yang terjadi di luar pesantren. Dengan memegang teguh nilai-nilai pesantren sebagai gerakan kesadaran transformatif dan memberdayakan masyarakat, mengadvokasi ketimpangan atau diskriminasi gender, pluralisme, hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan Hidup. (Sufirmansyah, n.d.).

Kesimpulan

Pendidikan pesantren dalam merespon tantangan era Society 5.0. Pesantren berperan krusial dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, Pesantren mempunyai semangat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Meski menghadapi modernisasi, pesantren tetap mempertahankan tradisi dan metode pembelajaran khasnya seperti sorogan, bandongan, serta tahfidz. Penyesuaian dan penambahan wacana pembaruan seperti materi sains dan teknologi bertujuan untuk membangun generasi yang mampu mengintegrasikan pengetahuan agama dengan tantangan zaman. Pendidikan pesantren juga diklaim strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. menggunakan pendekatan keseluruhan, pesantren tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama namun pula nilai-nilai , serta tanggung jawab sosial. Integrasi pendidikan pesantren dalam menghadapi tantangan zaman memberikan adaptasi pesantren tanpa menghilangkan karakteristik khasnya.

Daftar Pustaka

Arafat, Y., Kurniati, D., & Fahmi, F. (n.d.). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman Dinamika Manajemen Pendidikan Islam Pada Era Klasik Menuju Revolusi Industri 5.0*. https://doi.org/10.5281/Zenodo.1161729

Islam, J. P., Sabil, N. F., & Diantoro, F. (n.d.). *AL-ISHLAH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI PONDOK PESANTREN*.

Kesuma, G. C. (2017). Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, *2*(1), 67. https://doi.org/10.24042/tadris.v2i1.1740

Lestari Stainu purworejo prawidya, P. (2018). SINKRONISASI PENDIDIKAN PESANTREN DAN PERGURUAN TINGGI ISLAM GUNA MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA MENYONGSONG SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA. In *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim PROGRESS* (Vol. 6, Issue 2). https://www.nu.or.id/post/read/95164/nu-menuju-satu-abad-dan-

Malik, A. S., Latifah, E. D., Koswara, N., & Fatkhullah, F. K. (2022). Perspektif Visi Pendidikan dari Sudut Pandang Agama, Filsafat, Psikologi dan Sosiologi. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, *4*(2), 2523–2537. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2194

Maulida, A., Dosen, *, Prodi, T., Stai, P., & Bogor, A.-H. (2016). *DINAMIKA DAN PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PENDIDIKAN ISLAM SEJAK ERA KOLONIALISME HINGGA MASA KINI* (Vol. 05).

Musyafak, M., & Subhi, M. R. (2023). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan di Era Revolusi Industri 5.0. *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, *1*(2), 373–398. https://doi.org/10.58578/ajisd.v1i2.2109

Sufirmansyah. (n.d.). *Membangun Model Pendidikan Pesantren Integratif dalam Merespon Tantangan Era Industri 4.0*.

Sunan Gunung Djati Bandung, U., Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (n.d.). *Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia Badrudin*.

Tarbiyah, F., Unsiq, K., Tengah, J., Hasyim Asy'ari, J. K., & 03, K. (2018). Faisal Kamal. In *Jurnal Paramurobi* (Vol. 1, Issue 2).

Pengelolaan Pesantren Mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah

K.A. Rahman, Firman Afrian Pratama, Agung Yusup, Mulyadi

Ma'had Al-Jami'ah adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat pemantapan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, dan pengembangan ilmu keislaman serta dakwah Islamiyah, khususnya bagi mahasiswa yang juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Konsep Ma'had Al-Jami'ah ini mengintegrasikan model pembelajaran pesantren dengan kebutuhan akademik mahasiswa, menciptakan keseimbangan antara pembelajaran agama dan kegiatan perkuliahan. Dengan program-program khusus seperti tahsin dan tahfidz Al-Qur'an, pengajaran kitab kuning, pengembangan bahasa asing, dan kegiatan wirausaha, Ma'had Al-Jami'ah berupaya untuk mencetak generasi yang unggul baik dalam aspek akademik maupun keagamaan. Pengelolaan Ma'had ini memerlukan manajemen khusus karena mahasantri tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan Ma'had sepanjang waktu, sehingga diperlukan strategi yang efektif dalam pengelolaan SDM, kurikulum, dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Konsep Ma'had Al-Jami'ah

Ma'had Al-Jami'ah merupakan Lembaga pusat pemantapan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia dan amal shaleh, pengembangan ilmu keislaman dan dakwah Islamiyah. Sebahagian model pembelajaran pesantren yang diterapkan di ma'had al-jami'ah diadopsi dari berbagai lembaga pendidikan yang dianggap relevan, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sehubungan bahwaa peserta didiknya merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan perkuliahan di institute atau universitas yang membawahi ma'had al-jami'ah tersebut. Keseluruhan waktu 24 jam mereka dalam sehari tidak berada penuh dalam pembinaan dan pengawasan ma'had (Nurhalimah & Kadir, 2021). Tentunya diperlukannya pengelolaan dan manajemen khusus sesuai dengan kebutuhan di ma'had al-jami'ah tersebut menimbang lembaga tersebut tidak sama seperti halnya di pondok pesantren pada umumnya namun harus berbagi

waktu dengan pembelajaran dan kegiatan di kampus. Pada umumnya pesantren mahasiswa memiliki program-program khusus yang ditawarkan sebagai *branding* dan entitas ciri khas dari pondok pesantren tersebut seperti program *Tahsin* (memperbagus bacaan) al-qur'an, *tahfidz* (menghafal) al-qur'an sebagaimana wawancara dengan *mudir*[1] ma'had al-jami'ah IAIN Kendari bahwa saat tes masuk penerimaan mahasantri baru sejumlah mahasantri belum memiliki kemampuan membaca al-qur'an dengan baik secara menyeluruh maka pengasuh menyusun kurikulum pembinaan *ta'lim* al-qur'an yang terdiri dari pembinaan *Tahsin* al-qur'an dan pembinaan *tahfidz* tersebut untuk meminimalisir kendala tersebut (Putri, 2020),terdapat pula program bahasa asing, program wirausaha, dan kajian keagamaan. Sebagaimana pembelajaran yang diterapkan di ma'had al-jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu kegiatan pengajian kitab kuning atau kitab turats. (Barry, 2020). Semua mahasantri dalam hal ini merupakan seluruh mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang wajib tinggal di ma'had al-jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh ma'had al-jami'ah tersebut. Diantaranya adalah kajian keagamaan atau disebut *ta'lim afkar*[2] yang mana membahas, mengkaji dan menkhatamkan kitab fiqih (*safinatun najah*[3]), kitab hadis (*hadis arbain nawawi*[4]) dan kitab fiqih (*at-tadzhib fi Adillati Matni Ghayah wat Taqrib*[5])

Pemelajar atau peserta didik yang belajar atau bergabung dalam ma'had al-jami'ah dalam hal ini disebut dengan mahasantri. Mahasantri adalah mahasiswa yang memilih tinggal di ma'had atau pesantren dan sekaligus menimba ilmu untuk mengembangkan potensi dirinya selain dari bangku kuliah. Secara umum dalam pengelolaannya diklasifikasi dalam dua kelompok. Pertama,

1 Berarti ketua pengasuh ma'had

2 Kegiatan pembelajaran keagamaan yang mengkaji mengenai fiqih dan hadis di mahad al-jami'ah UIN MALANG yang diselenggarakan pada malam hari setelah isya

3 Sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i yang disusun oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al Hadhrami

4 Sebuah kitab yang memuat empat puluh dua hadits pilihan yang disusun oleh Syekh Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi

5 Sebuah kitab yang menggali dalil-dalil atau dasar hukum dari kitab *Matn Ghayah wat Taqrib* yang disusun oleh Syekh Mushtafa Dieb Al-Bugha

pesantren yang berafiliasi dan dikelola oleh perguruan tinggi. Pesantren atau ma’had tersebut menjadi bagian sistem perguruan tinggi yang sifatnya ekslusif untuk mahasiswa internal kampus tersebut. Maka dari itu disebut dengan ma’had al-jami’ah dan pemelajar disana disebut dengan mahasantri. Kedua, pesantren mahasiswa yang dikelola secara mandiri oleh Yayasan tertentu dan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi. (Alfinnas, 2018)

Pengelolaan SDM, Kurikulum & Pembelajaran di Ma’had Al-Jami’ah

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Daya pikir adalah kecerdasa yang dibawa dari lahir sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha. Daya fisik sebagai kekuatan dan ketahanan individu dalam melakukan pekerjaan yang berat dan pekerjaan berdurasi lama (Priyono & Marnis, 2008). Adapun beberapa penilaian dalam penerimaan sumber daya manusia di mahad al-jami’ah dalam hal ini sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya yaitu *Murabbi, Musyrif* dan *Muallim* yang berada dalam kebijakan para dewan pengasuh. *Murabbi/ah* adalah orang pilihan yang memenuhi kualifikasi umum yaitu minimal Strata 1, belum berkeluarga, memiliki keterampilan Bahasa arab dan Bahasa inggris yang baik, bersedia domisili di mahad. Adapun tugas *murabbi/ah* adalah sebagai koordinator lapangan pada setiap *mabna* yang ada di mahad. *Murabbi/ah* bertanggung jawab atas *mabnanya* masing-masing, mendampingi *musryif/ah* dan mengontrol/ mengawasi pelaksanaan kegiatan di *mabna*. Sedangkan tugas *musryif/ah* sebagai pelaksana lapangan dari semua kegiatan ma’had dan juga sebagai pendamping layaknya sebagai saudara bahkan orang tua bagi para mahasantri karena mereka berhubungan secara langsung dengan mahasantri. Mulai dari pendampingan ibadah dan spiritual, pendampingan akademik (Hasan, 2023). Sedangkan *Muallim/ah* yaitu dewan guru/asatidz yang mengajar kajian keagamaan dalam bidang *ta’lim afkar* baik kajian fiqih, dan hadis serta *ta’lim* al-qur’an.

Dalam Bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan Manhaj, yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan (Muhaimin, 2009:1). Kurikulum

juga disebut sebagai proses pengajaran yang isinya terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan sejalan dengan hal-hall yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu proses dalam kegiatan pendidikan tertentu. Menurut Hilda taba dan Oliva memandang bahwasanya kurikulum tidak hanya terbatas pada kumpulan materi pelajaran, tetapi cakupan kurikulum harus dipandang sebagai suatu yang holistik, meliputi konsep, perencanaan program, implementasi pembejaran, hingga evaluasi hasil pembelajaran. Konsep kurikulum demikian, tenntu saja akan sangat terkait dengan tujuan instruksional, pilihan metode yang harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, pengalaman belajar siswa, pelaksanaan evaluasi, hingga hasil yang diperoleh dari kegiatan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum dapat didefinisikan sebagai perencanaan kegiatan atau dokumen tertulis yang meliputi strategi untuk mencapai tujuan. (Fauzan, 2017).

Dalam pengelolaan mutu pesantren mahasiswa diperlukan tahapan-tahapan berikut antara lain (1) perencanaan yang meliputi pengintegrasian antara visi misi ma'had dengan visi misi afiliasi institutnya, perencanaan yang melibatkan pimpinan institute dan pengelola ma'had, rancangan program-program yaitu perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana, penerimaan SDM yang berkualitas dan kompeten di bidangnya, kurikulum disusun dan dikembangkan oleh segenap pengelola dan *Muallim* yang berorientasi pada Pendidikan agama, bacaan al-qur'an dan Bahasa arab, dilakukan evaluasi pembelajaran secara berkala dua kali dalam satu tahun baik tes tulis dan tes lisan. (2) Pengorganisasiannya, yaitu : penetapan sturktur organisasi berdasarkan hasil rapat seluruh pimpinan, koordinasi antar pimpinan dalam forum rapat secara rutin dalam satu tahun dua kali dan incidental jika diperlukan. (3) pengawasan yang dilakukan oleh pihak ma'had melalui mudir yang menggerakkan para pengelola ma'had dan dilakukan rapat evaluasi bulanan. (Fatoni, 2016)

Adapun kegiatan-kegiatan ma'had yang menunjang kompentensi akademik maupun non akademik sebagai berikut : *Ta'lim al-afkar al-islamiyyah* (kajian keagamaan yang mengkaji tentang fiqih, dan hadis Nabawi pada malam hari), *Ta'lim al-qur'an* (terdiri dari *Tahsin* al-quran dan *Tahfidz* al-quran), *khatm al-qur'an,* pengayaan materi dan penguasaan kosakata Bahasa asing dan pembelajaran Bahasa asing di waktu pagi setelah shalat subuh

berjama'ah, menciptakan *biah lughowiyah* (lingkungan kebahasaan) sebagai wadah untuk menunjang kemampuan berbahasa mahasantri baik dalam Bahasa arab dan Bahasa inggris, pelayanan konsultasi Bahasa, Kegiatan *Al-Yaum Al-araby* (hari yang dikhususkan wajib berbahasa arab, jika melanggar akan dikenai sanksi tertentu), *English Day* ((hari yang dikhususkan wajib berbahasa arab, jika melanggar akan dikenai sanksi tertentu), *al-musabaqah al-arabiyyah* (kegiatan perlombaan tahunan terkait kaidah Bahasa arab, olimpiade Bahasa arab, pidato Bahasa arab (*khitobah*), puisi berbahasa arab, cerita berbahasa arab (*taqdimul qishoh*), menulis esai berbahasa arab dan debat berbahasa arab yang bertujuan memacu kreatifitas dan menunjang keterampilan berbahasa asing bagi mahasantri. *English Contest* ((kegiatan perlombaan tahunan terkait kaidah Bahasa inggris, olimpiade Bahasa inggris, pidato Bahasa inggris (*speech*), puisi berbahasa inggris, cerita berbahasa inggris (*telling story*), menulis esai berbahasa inggris dan debat berbahasa inggris yang bertujuan memacu kreatifitas dan menunjang keterampilan berbahasa asing bagi mahasantri. Ada juga peningkatan kompetensi bakat antara lain divisi penerbitan bulletin atau majalah (jurnalistik), kegiatan seni religius dan olahraga yaitu marawis, shalawat, gambus, Latihan ceramah dan membawakan acara atau disebut sebagai MC. Ada juga kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, sepakbola, futsal, bola voli, sepak takrwa dan tenis meja yang dilakukan setiap pekannya. Terdapat juga kegiatan peringatan hari besar islam dan nasional antara lain kegiatan pengajian tanggal 1 Muharram, Maulid al Nabi (Rabi'ul Awal), Isra' & Mi'raj (Rajab), Nuzul al Qur'an (Ramadhan), Hari Pendidikan Nasional (Mei), Hari Kemerdekaan RI (Agustus). Selain kegiatan yang telah disebutkan di atas ada juga pembiasaan karakter dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah antara lain pembiasaan shalat maktubah berjamaah, kuliah umum keagamaan dalam multi perspektif, pembiasaan gerakan menuju masjid sebelum adzan, pembiasaan puasa-puasa sunnah, pembiasaan pembacaan al-adzkar al-ma'tsurah, dan kegiatann workshop penentuan arah qiblat, penentuan awal bulan, manajemen zakat dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Ma'had Al-Jami'ah berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa melalui pendekatan pembelajaran yang

mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pendidikan formal. Dengan manajemen yang baik, kurikulum yang terstruktur, dan kegiatan pembelajaran yang beragam, Ma'had Al-Jami'ah mampu memberikan pengalaman pendidikan yang holistik bagi mahasantri. Selain itu, program-program unggulan yang ditawarkan memberikan nilai tambah yang membedakan Ma'had Al-Jami'ah dari lembaga pendidikan lainnya. Meski menghadapi tantangan dalam pengelolaan waktu dan pengawasan, upaya untuk meningkatkan kompetensi keagamaan dan akademik mahasantri terus dilakukan guna membentuk generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing tinggi, baik di dalam negeri maupun di kancah global.

Daftar Pustaka

Mu'awanah, Mu'awanah (2009) *MANAJEMEN PESANTREN MAHASISWA : Studi Ma had UIN Malang.* STAIN Kediri Press, Kediri.

Putri, H. H. (2020). Strategi Pengelola Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari Dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasantri Mengikuti Ta'lim Qur'an. *Skripsi, IAIN Kendari*.

Nurhalimah, S., & Kadir, A. (2021). Pengelolaan Mahasantri Ma'had Al Jami'ah IAIN Kendari. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, *7*(1), 142-163.

Alfinnas, S. (2018). Membangun Academic Self-Concept Mahasantri Pesantren Nawesea. *Education and Human Development Journal*, *3*(2).

Barry, M. Y. F. (2020). PENGEMBANGAN MODEL LITERASI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN KITAB KUNING DI MAâ€™ HAD AL-JAMIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, *5*(1), 87-100.

Priyono, M., & Marnis, M. (2008). Manajemen sumber daya manusia. *Sidoarjo: Zifatama Publisher*.

Hasan, Z. (2023). *Strategi Ma'had Sunan Ampel Al-Aly dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan hubungan sosial yang humanis mahasantri di era pasca pandemi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Fauzan, F., & Press, G. P. (2017). Kurikulum dan pembelajaran.

Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi pendidikan Islam: dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran*. Raja Grafindo Persada.

Fatoni, A. (2017). *Pengelolaan mutu pesantren mahasiswa (Penelitian Kualitatif di Ma'had al-Jamiah Ulil Abshar)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Urgensi Nilai Etika dan Moral Pendidikan Pesantren Salafiyah Modern Menghadapi Revolusi Industri 5.0

Elsa Monica, Sahila Nur Mahfudah

Islam memiliki konsep dan prinsip yang kuat terhadap semua kondisi dan kebutuhan zaman. Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim. Pesantren salafiyah adalah lembaga pesantren yang masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama besar Islam ratusan tahun lalu sebagai inti pendidikan. Bahan ajar metode salaf hanya menggunakan sistem sorogan dan ngaji bandongan. Adapun madrasah di lembaga pesantren salafiyah hanya ditetapkan untuk memudahkan sistem sorogan, tanpa mengenalkan mata pelajaran umum.

Santri dituntut bisa memahami pelajaran di pesantren melalui sejumlah literatur klasik. Dalam hal berargumen, seorang santri yang berpendapat harus dilandaskan dengan referensi yang jelas. Budaya yang dilakukan dalam lingkup pesantren salafiyah dinamakan dengan syawir atau bisa juga dilakukan dengan bahtsul masail. Adanya diskusi tersebut bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kegiatan itu dapat meningkatkan pemahaman daya ingat dan memperkaya wawasan seorang santri.

Pembahasan dalam syawir tidak lepas dari problematika kontemporer. Walaupun pesantren salafiyah tergolong tradisional dalam hal metode pembelajaran dan masih terikat kuat dengan pemikiran ulama zaman dahulu, pesantren salafiyah sekarang masih tetap konsisten memegang prinsip salaf sambil terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman (Hilal, n.d.). Seminar, talkshow, dan metode problem solving, disitulah metode modern diterapkan, agar eksistensi santri harus bisa menjawab tantangan di zaman modernisasi dan tidak tertinggal era digitalisasi yang terus berkembang. Adanya lembaga pendidikan sekolah formal di pesantren yang mengajarkan pengetahuan umum itulah disebut dengan pesantren salafiyah berbasis modern.

Keberadaan pesantren salafiyah di dunia modern tentu saja mengalami dampak secara signifikan, sebagaimana perkembangan zaman saat ini yang telah memasuki fase revolusi industri 5.0. Seiring dengan perkembangan zaman maka persoalan-persoalan yang harus dihadapi dan direspon oleh pesantren juga semakin kompleks yang harus dipikirkan mulai saat ini. Secara umum, persoalan tersebut meliputi modernisasi atau kehidupan modern. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan modern memiliki dampak yang cukup signifikan, terlebih lagi dalam hal pengebangan pola fikir.

Secara umum, manusia yang hidup di era modern memiliki pemikiran yang berkemajuan untuk masa depan sebagai jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk menghadapi kehidupan modern. Pentingnya ilmu pengetahuan menjadi hal yang fundamental dalam menghadapi berbagai dampak dari kehidupan modern. Baik dampak positif ataupun dampak negatif yang berpotensi membawa kerugian.

Revolusi industri 5.0 dianggap sebuah konsep yang dibangun atas dasar manusia dan teknologi dengan meningkatnya konektivitas, interaksi serta perkembangan digital dan sistem yang lainnya (Rosadi et al., 2022). Industri 5.0 yang hadir menggantikan industri 4.0 ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Konsep Revolusi 5.0 ini tidak hanya terbatas pada bidang manufaktur tetapi juga terkait pemecahan masalah sosial dengan bantuan integrasi ruang fisik dan virtual. Revolusi 5.0 mengedepankan integrasi teknologi canggih yang mendukung pekerjaan manusia, dimana teknologi bukan hanya digunakan untuk efisiensi dan otomatisasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi teknologi manusiawi fokus pada kolaborasi antara manusia dan teknologi digital. Teknologi memungkinkan produksi yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan konektivitas dan kolaborasi antar manusia dan sistem baik secara lokal maupun global. Hampir semua aspek kehidupan di era digital ini menghadirkan tantangan yang kompleks dan multidimensi yang mencakup isu-isu teknis, sosial, ekonomi, hingga etika dan budaya.

Perkembangan teknologi yang ada banyak dirasakan oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Etika menjadi hal fundamental dalam memanfaatkan teknologi sebagai bentuk

sikap bijak mermedia. Sebagaimana diketahui, akibat adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia nyata seakan-akan digantikan oleh dunia maya. Hal ini, tentu mengurangi interaksi antar sesama manusia yang dapat berdampak pada pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendidikan, pembentukan karakter seseorang dapat terbentuk. Salah satu pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yang dapat menjadi patron dalam pembentukan karakter adalah pondok pesantren. Saat ini, telah banyak didirikan pondok pesantren dengan berbagai metode pembelajaran, diantaranya pondok pesantren tahfidz, pondok pesantren salafiyah, ataupun lainnya. Akibat perkembangan zaman yang semakin maju, ponodok pesantren yang dulunya menanamkan pendidikan tradisiononal kini juga menambahkan pendidikan modern. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan zaman dari masyarakat itu sendiri.

Relevansi Ajaran Moral Pesantren Salafiyah Modern dan Etika di Era Revolusi Industri 5.0

Pondok pesantren memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan bangsa, mencakup aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, dan moral. Fungsi ini menjadikan pondok pesantren sebagai institusi yang semakin diperhatikan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan arus informasi yang pesat. Efektivitas fungsi dan peran pesantren dapat dilihat dari materi pembelajaran yang diberikan kepada para santri. Materi ini, sebagai bagian dari kurikulum yang berperan penting dalam membentuk pola pikir dan kemampuan santri untuk berkontribusi di masyarakat kelak.

Menurut pandangan KH. Ali Ma'shum, pesantren idealnya membekali santrinya dengan enam bidang pengetahuan, diantaranya yaitu ilmu syariah, ilmu empiris, ilmu yang mengembangkan pemikiran kritis dan wawasan luas, ilmu pebinaan akhlak, pelatihan keterampilan bermasyarakat, dan pembentukan mental dan karakter (Jamaluddin, 2012). Melalui bekal pengetahuan yang komprehensif ini, pesantren diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga mampu menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Seiring dengan kemajuan zaman, proses modernisasi telah merambah hampir ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Fenomena ini tidak luput menyentuh lembaga pendidikan pesantren, khususnya pesantren tradisional atau salafi. Banyak pesantren kini mengalami transformasi menuju era modern, mengadaptasi diri dengan tuntutan zaman. Modernisasi di lingkungan pesantren tidak hanya terbatas pada aspek fisik, seperti fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek non-fisik. Perubahan ini meliputi pembaruan dalam tugas dan fungsi pesantren untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan era modern.

Pesantren tradisional, yang sebelumnya lebih fokus pada pengajaran ilmu-ilmu keislaman klasik, kini mulai membuka diri terhadap ilmu-ilmu umum dan keterampilan praktis. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi utama pesantren (Maesaroh & Achdiani, 2017). Proses modernisasi ini mencerminkan upaya pesantren untuk tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer, sambil tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi ciri khas pendidikan pesantren.

Pendidikan pesantren memiliki keutamaan pendidikan tersendiri, khususnya dalam hal pendidikan etika dan profesionalisme peserta didik. Etika, moral, dan profesionalisme saling berkaitan erat. Etika berakar dari kata Yunani "ethos", yang memiliki beragam makna seperti kebiasaan, adat istiadat, watak, dan cara berpikir. Secara luas, etika dipahami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku umum manusia. Etika mencakup cara seseorang bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan etika terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Tingkat etika seseorang dapat dinilai dari bagaimana mereka bersikap dan seberapa tinggi mereka menghargai nilai-nilai etis. Meskipun etika dan moral memiliki kemiripan, terdapat perbedaan dalam penerapannya. Moral lebih fokus pada penilaian tindakan spesifik, sementara etika berkaitan dengan kajian sistem nilai yang berlaku. Etika juga menjadi landasan pembentukan moral seseorang. Etika bersumber dari pemikiran rasional dan menjadi dasar untuk menilai baik buruknya suatu kebiasaan atau perilaku (Ehwanudin et al., 2022). Etika pada seseorang sangat berperan penting dalam membentuk karakter dan profesionalismenya dalam menjalani

kehidupan.

Meskipun etika dan moral memiliki hubungan yang erat, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Moral lebih berfokus pada pedoman perilaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengarahkan tindakan manusia menuju kebaikan. Di sisi lain, etika lebih berkaitan dengan pola tingkah laku manusia yang sudah menjadi kebiasaan. Moral berfungsi sebagai panduan yang membantu manusia menentukan langkah-langkah yang baik dalam bertindak. Sementara itu, etika lebih menekankan pada kebiasaan perilaku yang telah terbentuk dalam diri seseorang.

Penilaian terhadap perbuatan manusia untuk diketahui apakah suatu perbuatan manusia itu baik atau tidak, perlu mempertimbangkan tiga aspek, diantaranya yaitu motivasi, tujuan akhir, dan lingkungan. Jika ketiga aspek ini baik, maka perbuatan tersebut dapat dianggap baik. Namun, jika salah satu aspek tidak baik, ada kemungkinan bahwa keseluruhan perbuatan tersebut juga tidak baik. Sehingga dapat dipahami, bahwa moral dan etika saling melengkapi dalam membentuk perilaku manusia yang baik. Moral menyediakan panduan atau tata cara, sedangkan etika mencerminkan implementasi dari panduan atau tata cara tersebut dalam bentuk kebiasaan sehari-hari (Ehwanudin et al., 2022).

Peran Pesantren dalam mempersiapkan santri untuk menghadapi revolusi industri 5.0

Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan tantangan dan persaingan tersendiri. Selain pesantren harus dihadapkan dengan kemajuan teknologi di tengah revolusi industri 5.0, pesantren juga harus mampu mengkritisi setiap kemajuan teknis yang digunakan secara luas.

Lembaga pendidikan di lingkup pesantren memerlukan pendidik yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi di era digital, seorang pendidik harus mampu mendidik murid-muridnya agar bisa memanfaatkan secara efektif (Oktaria et al., 2023a). Pendidikan kepada peserta didik, bukan hanya memberikan pengetahuan secara akademisi saja, melainkan pemberian pendidikan karakter pada peserta didik.

Diantara era industri 4.0 dan 5.0, terdapat hal-hal yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah reformasi kurikulum pendidikan

pesantren. Konsep kurikulum pesantren salafiyah yang berbasis modern harus bisa merespon kemajuan industri saat ini, dengan melakukan pembaruan pada kurikulum bertujuan agar para santri nantinya mampu bersaing di abad digital saat ini. Oleh karena itu, lembaga pondok pesantren salafiyah modern tidak boleh tertinggal oleh derasnya arus teknologi, tetapi harus bisa mengkolaborasikan antara ilmu agama dan sains teknologi yang berkembang saat ini.

Pesantren di zaman sekarang harus bisa melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Tidak hanya sekedar mengasah *soft skill,* seorang santri juga harus mampu menunjukkan kemampuan *hard skill* nya (Oktaria et al., 2023b). Konsep *soft skill* sebenarnya merupakan bentuk dari konsep yang sering dikenal sebagai kecerdasan emosional, sedangkan *hard skill* itu ibarat ilmu atau penguasaan ilmu pengetahuan baik itu teori, keterampilan teknis, atau pengetahuan khusus tentang minat yang dipelajari. Sehingga, setiap seorang santri perlu meningkatkan *hard skill* dan *soft skillnya* untuk menghadapi masa depan (Syahputra, 2022). Banyak diantara kemampuan *soft skill* yang harus dimiliki seorang santri yaitu:

a) Kemampuan *leadership,* kemampuan untuk memimpin. Seorang santri harus mempunyai keberanian untuk memimpin agar selalu bersiap dalam setiap keadaan terutama jika sudah terjun dimasyarakat.
b) Kemampuan *language skill,* dimana kemampuan berbicara dengan bahasa asing terutama bahasa arab dan bahasa inggris sangat diperlukan pada era peradaban 5.0, agar bisa mencetak generasi yang siap maju dalam persaingan kancah internasonal. Dengan memiliki ketrampilan berbahasa yang baik, hal ini dapat membangun hubungan yang kuat dalam berkomunikasi dengan orang lain, karena fungsi utama menguasai Bahasa internasional adalah sebagai alat interaksi dengan manusia serta dapat menjadi aset berharga dalam dunia kerja selanjutnya (Oktaria et al., 2023b).
c) Keterampilan komunikasi, proses dua arah di mana yang satu memberikan pesan dan yang lain menerima pesan tersebut dan bertindak sesuai dengan itu.
d) Kecerdasan emosional, yang meliputi aspek motivasi diri, pengelolaan emosi, pengenalan emosi orang lain, frustasi, pengelolaan suasana hati, dan lain-lain.

e) Kemampuan berpikir adalah kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam situasi sulit dan berargumen agar dapat memahami orang lain dan beradaptasi dengan keadaan sendiri.
f) Etika, yaitu nilai dan prinsip moral yang terkandung dalam aturan normatif (Pantas H Silaban & Silalahi, 2020).

Selain soft skill yang dimiliki, pada era industri 5.0 setiap santri juga harus mempunyai kemampuan *hard skill*, diantaranya:

a) Keterampilan teknis adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, dan teknik teknis tertentu
b) Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang usaha sadar untuk mempelajari, menemukan dan meningkatkan kemampuan seorang santri dari berbagai sudut pandang realitas (Pantas H Silaban & Silalahi, 2020).
c) Penguasaan ilmu teknologi, yang dapat didapatkan santri dari sebagian besar sumber belajar yang ada di pesantren yang dapat berasal dari buku untuk menunjang materi pembelajaran ataupun pelatihan-pelatihan yang disediakan.

Selain kemampuan-kemampuan yang telah dipaparkan baik kemampuan *soft skill* dan juga *hard skill*, di era indutri 5.0 yang serba canggih lembaga pesantren harus berkembang dan memanfaatkan penggunan teknologi untuk tujuan pendidikan. Perkembangan teknologi dilihat dari berbagai tujuannya, diantaranya peran teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan standar pengajaran di pesantren, sebagai platform periklanan, dan untuk mempromosikan dakwah Islam (Oktaria et al., 2023b). Melalui pemanfaatan teknologi ersebut, dapat menjadi dampak positif dari kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan.

Integrasi Teknologi dalam Mendukung Pendidikan Etika dan Moral Pesantren Salafiyah Modern

Teknologi memungkinkan akses ke berbagai sumber digital tentang etika dan moral Islam. Menurut Hidayat (2020*), "Digitalisasi kitab kuning dan karya ulama klasik memudahkan santri mengakses rujukan otoritatif tentang akhlak dan adab secara lebih efisien"*. Hal ini memungkinkan santri memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep etika Islam dari berbagai perspektif. Penggunaan media interaktif seperti video, animasi, dan simulasi

dapat membantu mengilustrasikan konsep-konsep etika yang abstrak. Visualisasi dilema etis melalui animasi membantu santri lebih mudah memahami dan menganalisis permasalahan akhlak dalam konteks modern (Fathurrohman, 2021). Teknologi juga dapat digunakan untuk mengajarkan etika dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Pelatihan literasi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai pesantren penting untuk membekali santri menghadapi dilema etis di dunia maya (Huda, 2023).

Modernisasi pesantren, termasuk dalam penggunaan teknologi, harus tetap menjaga nilai-nilai dan tradisi keilmuan pesantren yang telah mengakar (Dhofier, 2021). Integrasi teknologi dalam pendidikan di pesantren salafiyah modern dapat bermanfaat dalam peningkatan metode pembelajaran, memperluas akses ke sumber-sumber keilmuan, dan membantu santri dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan bijak dan seimbang, tetap menjaga esensi dan nilai-nilai tradisional pesantren.

Peran Pesantren dalam Mempertahankan dan Menjaga Identitas Nilai-Nilai Agama di Era Revolusi Industri 5.0

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, memiliki peran penting dalam mempertahankan dan menjaga identitas nilai-nilai agama di tengah arus Revolusi Industri 5.0. Pesantren tetap menjadi benteng utama dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai keislaman. Pesantren memiliki peran strategis dalam membentengi generasi muda dari dampak negatif globalisasi dan disrupsi teknologi dengan memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam (Azra, 2020). Melalui peran tersebut, pesantren menjadai salah satu lembaga yang dapat membentuk seseorang dalam pembentukan karakter.

Pesantren perlu mengadaptasi kurikulumnya untuk mengintegrasikan pemahaman teknologi dengan nilai-nilai agama. Modernisasi kurikulum pesantren harus mampu memadukan keilmuan agama dengan sains dan teknologi tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai pesantren (Dhofier, 2021). Modernasasi kurikulum yang melestarikan budaya lama yang baik dan mengimplementasikan hal baru yang baik.

Pesantren berperan penting dalam pembentukan karakter yang tangguh di era digital. Model pendidikan karakter berbasis pesantren

terbukti efektif dalam membentengi santri dari dampak negatif media sosial dan budaya digital (Mahmudah, 2023). Pesantren memiliki peran multidimensi dalam mempertahankan dan menjaga identitas nilai-nilai agama di era Revolusi Industri 5.0. Pendidikan pesantren yang mengadaptasi teknologi dengan tetap mempertahankan esensi nilai-nilai tradisional dapat menjadikan pesantren sebagai institusi yang relevan dan berpengaruh dalam membentuk generasi Muslim yang mampu menghadapi tantangan era digital tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempertahankan nilai-nilai gotong royong di tengah tren individualisasi dapat meningkatkan tradisi kebersamaan dan tolong-menolong. Kedua hal tersebut dalam dunia pesantren dapat menjadi modal sosial yang penting dalam menghadapi tantangan era digital (Wahid, 2018). Urgensi nilai etika dan moral dalam pendidikan pesantren salafiyah modern di era Revolusi Industri 5.0 terletak pada kemampuannya untuk membekali santri dengan landasan moral yang kuat, etika penggunaan teknologi, karakter digital yang baik, pemahaman moderasi beragama, etika keilmuan, dan semangat gotong royong.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempertahankan dan mengadaptasi nilai-nilai etika dan moral, dapat menjadi bagian lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi selanjutnya yang mampu menghadapi tantangan era digital tanpa kehilangan identitas moral dan spiritual mereka. Melihat fakta lapangan, dengan ditemukan adanya berbagai pelanggaran etika dan moral dalam dunia teknologi di era saat ini membuktikan bahwa, kemajuan zaman harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi didalamnya.

Masyarakat sebagai objek dalam penggunaan kemajuan teknologi menjadi pelaku bahkan korban dari dampak yang disebabkan oleh kemajuan zaman. Peningkatan pendidikan karakter seseorang dapat meningkatkan pemahamannaya pada kebijaksanaannya memanfaatkan kemajuan zaman dalam mendukung kehidupan. Melalui peran lembaga pendidikan, diharapkan dapat mempersiapkan generasi selanjutnya untuk dapat menjalani kehidupan di era kemajuan zaman seperti saat ini.

Kesimpulan

Pesantren salafiyah modern berperan penting dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0 dengan mempertahankan nilai-nilai etika dan moral sebagai landasan pendidikan. Transformasi pesantren yang mengintegrasikan teknologi modern dan tetap mempertahankan tradisi keislaman memungkinkan santri untuk mengembangkan soft skill dan hard skill yang relevan, seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan penguasaan teknologi. Pendidikan di pesantren yang berbasis nilai-nilai agama dan moral dapat menjadi benteng bagi santri dalam menghadapi tantangan era digital, seperti penyebaran hoaks, radikalisme, dan degradasi moral. Dengan demikian, pesantren salafiyah modern dapat melahirkan generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan identitas spiritual dan moral yang kokoh.

Daftar Pustaka

Azra, A. (2020). Pesantren di Tengah Arus Disrupsi: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dhofier, Z. (2021). Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: LP3ES.

Fathurrohman, M. (2021). Inovasi Pembelajaran Pesantren Berbasis Teknologi. Yogyakarta: LKiS.

Hidayat, K. (2020). Digitalisasi Kitab Kuning: Tantangan dan Peluang. Bandung: Mizan.

Hilal, Syamsul. Fiqih dan Permasalahan Kontemporer. IAIN Raden Intan Lampung.

Huda, M. (2023). Etika Digital untuk Santri Milenial. Surabaya: Risalah Gusti.

Mahmudah, S. (2023). Model Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren di Era Digital. Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 45-60.

Megayanti, Windi, Nicky Rosadi, Hamzah Robbani. (2022). Edukasi Peluang dan Tantangan Pemuda di Era Society 5.0 bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara, Yayasan Napala Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Publikasi Kegiatan Abdimas https://doi.org/10.37010 /pnd.v1i2.703

Oktaria, Auline, Khoirul, Srigustia Fitriyenni, Paiman, Maulidul Irfan. (2022). Peran Pesantren dalam Era Digital. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(3), 432-444.

Silalaban, Pantas H. Andri Dayarana K. Silalahi. (2020). Peranan Hard dan Soft Skills Bagi Anggota DPRD Menjelang Purna Bakti.

Syahputra, Muhammad Afrillyan Dwi. (2021). Pentingnya Pendekatan Interpersonal Skills untuk Mengembangkan Hard Skill & Soft Skill pada Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, 1(2), 82-90.

Wahid, A. (2018). Pesantren sebagai Subkultur. In G. Barton & G. Fealy (Eds.), Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara (pp. 39-60). Yogyakarta: LKiS.

Framework Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Berbasis Revolusi Industri 5.0

Muhamad Afif Effindi

Kontribusi NU dalam Pendidikan Tinggi Bermutu di Indonesia

Dunia saat ini memasuki era Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 tidak bertujuan untuk menegasikan keberadaan manusia. Sebaliknya, dalam era Revolusi Industri 5.0 manusia berpeluang untuk semakin berkembang dan bekerja bersanding dengan teknologi terkini, seperti Machine Learning atau Artificial Intelligence. Namun demikian, berbagai peluang tersebut memiliki berbagai tantangan, antara lain perlunya pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi yang bermutu (Adel, 2022).

Berbicara mengenai Pendidikan Tinggi yang bermutu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari mutu atau kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Pendidikan Tinggi yang bermutu dinyatakan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai pendidikan tinggi yang menghasilkan alumni atau lulusan yang memiliki kemampuan aktif dalam pengembangan potensi diri serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, serta negara.

Tabel 1. Distribusi Peringkat Akreditasi Berdasarkan Bentuk Perguruan Tinggi

PT Penyelenggara	A/Unggul	B/Baik Sekali	C/ Baik	Tidak Terakreditasi	Total
Akademi	3	20	329	14	366
Institut	8	116	225	1	350
Politeknik	9	130	170	4	313
Sekolah Tinggi	5	248	1357	72	1682
Universitas	103	380	300	4	787

Total	128	894	2.381	95	3.498

(Sumber: https://www.banpt.or.id/data-akreditasi/distribusi-peringkat-akreditasi/ diakses pada 10 Juli 2024)

Salah satu tolok ukur yang paling nampak adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi yang tercermin dalam status akreditasi perguruan tinggi. Mengacu pada halaman Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT), jumlah perguruan tinggi di Indonesia adalah 3.498. Jumlah tersebut sudah termasuk perguruan tinggi dengan berbagai bentuknya, baik pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi.

Tabel 1 merangkum distribusi peringkat akreditasi dari total 3.498 perguruan tinggi. Menarik untuk diperhatikan, dari 3.498 perguruan tinggi tersebut baru 4 persen perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A atau akreditasi Unggul, atau berarti 128 dari total jumlah perguruan tinggi. Tentu hal ini masih jauh dari kata harapan untuk mewujudkan lulusan yang siap menyambut era Revolusi Industri 5.0. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pendidikan tinggi bermutu di Indonesia, salah satunya melalui keberadaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama atau PTNU.

Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama merupakan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama maupun oleh Badan Hukum lain yang menempatkan dirinya sebagai PTNU atau anggota Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU). Informasi yang tersedia di laman website LPTNU, jumlah PTNU mencapai 283 perguruan tinggi, diantaranya 30 perguruan tinggi diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sedangkan 253 diselenggarakan oleh Badan Hukum lain, seperti Yayasan atau Perkumpulan di tiap daerah di Indonesia.

Tabel 2. Klasifikasi dan Jumlah PTNU Berdasarkan Badan Penyelenggara

No	Klasifikasi PTNU	Jumlah
1	Perkumpulan NU	30
2	Yayasan	253

Jumlah	283

(Sumber: https://lptnu.or.id/perkumpulan/ dan https://lptnu.or.id/https-lptnu-eduview-org-pt-yayasan/ diakses pada 10 Juli 2024)

Jumlah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) yang demikian besar perlu menjadi perhatian agar ke depan menjadi kontributor dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bermutu di Indonesia. Tulisan ini berupaya memberikan gagasan untuk penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU). Bagian selanjutnya dari tulisan ini mencoba mengurai paradigma baru dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Framework penjaminan mutu pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama berbasis Revolusi Industri 5.0, serta penutup.

Paradigma Baru Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada bulan Agustus 2023 telah menerbitkan sebuah kebijakan baru. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri tersebut antara lain merubah Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Menyambung Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan kebijakan yang menjadi turunan, yakni Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Fokus sasaran mutu akreditasi dalam SAN-PT 2023 antara lain menilai Budaya Mutu, Relevansi penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi, Akuntabilitas, serta Diferensiasi Misi (Gambar 1).

PTNU harus bergerak untuk menyesuaikan regulasi internalnya dengan Peraturan tersebut. Hal ini bahkan ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Gerak cepat PTNU dalam penyesuaian regulasi ini merupakan upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Nahdlatul

Ulama. Ke depan, PTNU harus menjadi institusi pendidikan yang selalu cepat dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan terkait pendidikan tinggi.

Gambar 1. Sasaran Mutu Akreditasi dalam
Per-BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023

Framework Penjaminan Mutu PTNU Berbasis Revolusi Industri 5.0

Framework Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Berbasis Revolusi Industri 5.0 yang dimaksud dalam bagian ini merupakan sebuah seperangkat pedoman dalam rangka mengembangkan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) yang bermutu dalam menyambut Revolusi Industri 5.0. *Framework* ini terdiri atas beberapa aspek antara lain *Legal Compliance*, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (PDPTNU), Pedoman Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTNU, serta Pengembangan Kurikulum PTNU Berbasis Revolusi Industri 5.0 (Gambar 2). Masing-masing aspek dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, Legal compliance, atau kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. *Legal compliance* merupakan hal mendasar dalam menjamin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Nadhlatul Ulama (PTNU) yang bermutu. Beberapa regulasi perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kepatuhan terhadap regulasi oleh Perguruan

Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) juga perlu memperhatikan regulasi terbaru, seperti Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
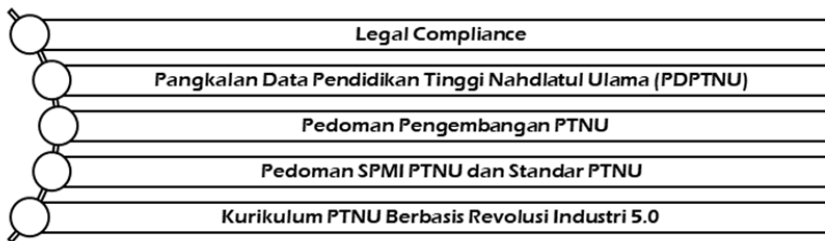
Gambar 2. Framework Penjaminan Mutu PTNU

Kedua, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (PDPTNU). Sebagai sebuah langkah mendasar, diperlukan sebuah basis data yang berisi informasi minimal berupa daftar Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) yang berafiliasi atau mengafiliasikan dirinya ke dalam Nahdlatul Ulama. Berdasarkan Badan Penyelenggaranya, PTNU diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis PTNU, yakni PTNU yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama serta PTNU yang diselenggarakan oleh Yayasan yang mengafiliasikan diri pada NU. Untuk mengelola dan memberikan arahan bagi pengembangan PTNU secara sama merupakan tantangan tersendiri. Namun demikian, tetap diperlukan suatu basis data yang khusus mengelola data pokok PTNU. Data pokok ini menyimpan seluruh informasi dasar PTNU guna menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Data pokok ini disimpan dalam sebuah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Nadhlatul Ulama atau disebut sebagai PDPTNU. PDPTNU dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan pemetaan potensi PTNU di Indonesia.

Ketiga, Pedoman Pengembangan PTNU. Perlunya penyusunan Pedoman Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU). Pedoman ini berguna sebagai panduan PTNU dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan tata Kelola PTNU. Pedoman ini berisi sekurangnya antara lain panduan bagi PTNU dalam mengembangkan Rencana Induk Pengembangan (berjangka 25 tahun), Rencana Strategis (5 Tahunan), serta Rencana Operasional (rencana kerja tahunan). Sebagai sebuah panduan, pedoman

pengembangan PTNU bersifat memberikan garis besar haluan dalam pengelolaan untuk menuju PTNU yang bermutu.
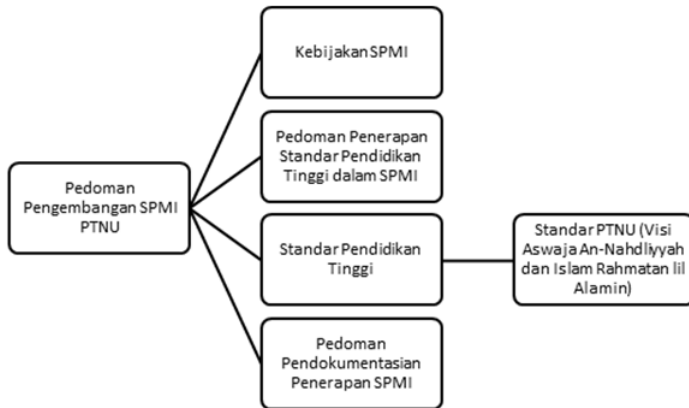
Gambar 3. Pedoman Pengembangan SPMI PTNU
mengacu pada Permendikbudristek 53 Tahun 2023

Keempat, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTNU beserta Standar PTNU (Gambar 3). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejatinya merupakan salah satu dari tiga aspek dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia, di samping Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Dalam konteks Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi PTNU, intervensi yang paling mungkin untuk dikembangkan adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari masing-masing PTNU. Meskipun demikian, sebagai sebuah kelompok perguruan tinggi yang berafiliasi ke dalam naungan Nahdlatul Ulama, maka perlu sebuah Pedoman pengembangan SPMI bagi PTNU.

Pedoman SPMI PTNU, sebagaimana Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, setidaknya terdiri atas panduan dalam mengembangkan perangkat Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI, Standar Pendidikan Tinggi, serta Pedoman Pendokumentasian Penerapan SPMI PTNU. Bagian dari tulisan ini ingin mengulas mengenai keberadaan Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi kekhasan PTNU.

Standar Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal bagi penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang terdiri atas Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Standar-Standar yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dalam melampaui SNDIKTI. Lantas, *apakah Standar minimal bagi sebuah perguruan tinggi Nadhlatul Ulama (PTNU)?* maka perlu sebuah kriteria minimal sebuah perguruan tinggi dapat disebut sebagai PTNU atau perguruan tinggi yang mengafiliasikan diri sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran nilai-nilai Ahlussunnah Waljamaah An-Nahdliyyah. Kriteria minimal ini disatukan ke dalam sebuah Standar Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama atau selanjutnya disebut sebagai Standar PTNU.

Standar PTNU merangkum mengenai kriteria minimal yang harus dimiliki PTNU dalam menyelenggarakan tridharma dengan Visi Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahddliyyah, menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatan lil alamin, sebagaimana yang selalu digaungkan oleh KH. A. Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidhiyah PBNU Keempat. Standar PTNU juga merangkum keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Pesantren yang menjadi wadah pendidikan para santri Nahdlatul Ulama.

Kelima, Pengembangan Kurikulum PTNU Berbasis Revolusi Industri 5.0. Kurikulum PTNU sebagai salah satu komponen dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi juga harus menjadi perhatian utama. Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan sebagai "*seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi*". Berbagai input menjadi pertimbangan dalam pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, salah satunya adalah perkembangan IPTEKS, dan perkembangan Revolusi Industri 5.0.

Dengan demikian, salah satu bahan kajian yang sudah seharusnya masuk ke dalam Kurikulum PTNU Berbasis Revolusi Industri 5.0 adalah *Computational Thinking*. *Computational Thinking* atau diterjemahkan juga sebagai Berpikir Komputasional adalah sebuah istilah yang dimunculkan pertama kali oleh Jeannette M. Wing, seorang ilmuwan ilmu komputer, pada tahun 2004. Kemampuan *Computational Thinking* yang menjadi kemampuan abad 21 yang harus dimiliki oleh generasi mendatang (Effindi, 2022).

Computational Thinking merujuk pada istilah penyelesaian masalah pendekatan proses berpikir ilmuwan komputer.

Computational Thinking terdiri atas Dekomposisi, Abstraksi, Algoritma, dan Pengenalan Pola. *Computational Thinking* semenjak kemunculannya hingga saat ini semakin banyak diadopsi oleh banyak negara. Bentuk adopsi yang dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan pembelajaran *Computational Thinking* dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Di Indonesia, *Computational Thinking* mulai diterapkan dalam bentuk sisipan mata pelajaran Informatika bagi pendidikan dasar dan menengah.

Computational Thinking di Indonesia juga masuk sebagai mata kuliah bagi mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Memperhatikan urgensi dan manfaat yang diperoleh dari pembelajaran *Computational Thinking,* maka Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) tidak boleh "ketinggalan kereta". PTNU perlu untuk mempertimbangkan masuknya *Computational Thinking* dalam bahan kajian Kurikulum Pendidikan Tingginya, apapun program studi yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh PTNU. Melalui masuknya Computational Thinking dalam Kurikulum PTNU, diharapkan ke depan dapat dihasilkan alumni PTNU yang siap dalam menyambut Revolusi Industri 5.0. Alumni PTNU yang memiliki kemampuan fiqih yang mumpuni dengan keahlian di bidang *digital literacy*.

Penutup

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) yang bermutu. Namun demikian, perlu pemikiran, sinergi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka mewujudkan PTNU yang bermutu. Melalui perwujudan penyelenggaraan dan pengelolaan PTNU yang bermutu pada akhirnya akan memberikan kontribusi besar bagi peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia dalam menyambut Revolusi Industri 5.0. Tulisan ini juga memiliki keterbatasan, misalnya belum masuknya Ma'had Aly, yang merupakan bentuk pendidikan tinggi Keagamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Daftar Bacaan lebih Lanjut

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

(3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

(4) Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

(5) Ahmad Millah Hasan. 2018. Biografi A. Hasyim Muzadi: Cakrawala Kehidupan. Depok: Penerbit Keira.

(6) Muhamad Afif Effindi. 2022. Computational Thinking dalam Pembelajaran Informatika. Malang: Penerbit Literasi Nusantara.

(7) Amr Adel. 2022. Future of Industry 5.0 In Society: Human-Centric Solutions, Challenges and Prospective Research Areas. Journal of Cloud Computing: Advances, Systems, and Applications Vol. 11 Issue 40. https://doi.org/10.1186/s13677-022-00314-5

Pendidikan Karakter Di Dalam Pesantren : Responsif Terhadap Tantangan Revolusi Industri 5.0

Dedi Ardiansyah

Pendidikan karakter yang dilaksanakan di pesantren menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era revolusi industri 5.0, di mana perkembangan teknologi yang semakin cepat telah mengubah nuansa pendidikan Islam secara fundamental. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, tidak hanya menjaga eksistensinya di era transformasi zaman, tetapi juga beradaptasi dengan responsif untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Pendidikan dalam pesantren tidak hanya mempertahankan nilai-nilai keagamaan secara khusus, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan keterampilan teknologi yang relevan. Dalam kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana pesantren membangun pendidikan karakter yang kuat dan responsif terhadap perubahan teknologi. Melalui narasi deskripsi dalam karya ini penulis mengajak pembaca untuk memahami strategi-strategi inovatif yang diterapkan pesantren dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual, sekaligus mempersiapkan santri dengan keterampilan digital yang diperlukan di era digitalisasi saat ini. Dengan fokus pada integrasi yang seimbang antara kearifan lokal dan kebutuhan global, pesantren diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan adaptif.

Dalam kajian ini, akan dieksplorasi berbagai studi kasus dan pendekatan praktis yang berhasil diterapkan oleh pesantren dalam menjawab tantangan revolusi industri 5.0. Tujuannya adalah memberikan panduan yang bermanfaat bagi lembaga-lembaga pendidikan agama lainnya untuk menghadapi era digital dengan cerdas dan terencana. Melalui pembahasan yang komprehensif, penulis berharap karya ini menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi semua yang tertarik dalam pembangunan pendidikan karakter. Dengan demikian, melalui karya tulis ini, penulis mendikasikanya untuk memperkaya khazanah Islam dan menjadi rambu-rambu melakukan tindakan dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah serta dengan tetap menjaga akar

historis tradisional yang ada dalam pendidikan Islam di pesantren**.**

Sejarah Awal Pesantren di Indonesia

Proses Islamisasi di Indonesia sudah ada sejak pertengahan abad ke-7 Masehi. Menurut P. Wheatley dalam *The Golden Kersonese: Studis in the Historical Geography of the malay Paninsula A.D.* 1500, yang pertama kali membawa ajaran Islam ke wilayah Nusantara adalah para saudagar dari Arab, yang sejak lama telah membangun jalur hubung perdagangan, jauh sebelum adanya Islam di Indonesia. Kehadiran Islam Pada abad ke-7 Masehi tersebut terbukti mengalami kendala sampai pada abad ke-15 Masehi. Sehingga terdapat rentan waktu sekitar delapan abad sejak kedatangan awal Islam, dimana ajaran Islam belum bisa dianut dan diterima secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara.[6]

Pada pertengahan abad ke-15 Masehi, perkembangan ajaran Islam sudah mulaii terlihat. Pada era tersebut Dakwah penyebaran Islam dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi berkarismatik yang dikenal dengan sebutan "Wali Songo". tokoh tersebut sering dikisahkan memiliki keahlian karomah adikodrati yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Pada masa tersebut Islam dengan cepat diserap kedalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Meskipun data-data sejarah pada era tersebut kebanyakan bersumber dari historiografi dan cerita tutur, yang pasti peta dakwah penyebaran Islam saat itu sudah bisa terdeteksi.[7] Sehingga, di era penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali songo inilah yang menjadi tonggak awal lahirnya sistem pendidikan pondok pesantren di Indonesia.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Pada awalnya, hadirnya pesantren memiliki fungsi utama yaitu sebagai wadah pendidikan dan pusat dakwah penyebaran Islam. Dua fungsi utama tersebut masih melekat pada pesantren hingga saat ini, meskipun sistem pendidikan didalamnya terus mengalami transformasi.[8] Keberadaan pesantren di Indonesia telah mengundang

---

6 Agus Suyono, *Atlas Wali Songo : Buku Pertama Yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah* (Depok: Pustaka IIMaN, 2016), 50.

7 Suyono, 55.

8 Yudi Hartono, *Sejarah Pesantren : Pendidikan Keislaman Dan Keindonesiaan* (Madiun: UNIPMA Press, 2019).

atensi publik secara signifikan, baik dari para ahli di tanah air maupun dari mancanegara. Ketertarikan terhadap lembaga pendidikan tersebut, bukan hanya dilatar belakangi karena pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua, tetapi banyak hal-hal yang unik, menarik serta menyimpan nilai-nilai spritual yang tinggi dan perlu untuk dipelajari.

Kontribusi pesantren bagi negara Indonesia tidak hanya sebatas pada ranah pengembangan keagamaan saja. Secara keseluruhan, pesantren memiliki sumbangsih yang besar terhadap kekuatan intelektual generasi muda, pembangunan ekonomi, relasi sosial dan kebudayaan bangsa Indonesia yang kokoh. Pada masa kolonialisme Belanda, pesantren telah menanamkan karakter dan nilai-nilai patriotisme pada santri sebagai generasi muda bangsa, supaya melakukan pertentangan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing dan berjuang dengan gigih untuk menegakan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia.

Pada masa kedudukan negara Jepang di Tanah Air, para kiai dan santri secara terang-terangan melakukan pertentangan terhadap *saikere* (budaya penghormatan terhadap kaisar jepang Tenna Haika yang dianggap sebagai keturunan Dewa Amatarezu atau Dewa Matahari). Selain itu, perlawanan secara fisik juga dilakukan oleh para kiai dan santri, seperti pasukan kiai di daerah Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh KH. Zainal Mustofa dari Singaparna, Tasikmalaya pada 18 Februari 1944. Dimasa revolusi kemerdekaan, para kiai bersatu membulatkan tekad untuk menyuarakan resolusi jihad pada 22 Oktober, sehingga moment tersebut pada saat ini yang telah ditetapkan menjadi peringatan Hari Santri Nasional.

Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan Islam di tanah Jawa telah menimbulkan goncangan yang dahsyat dalam kehidupan masyarakat. Padahal sebelum Islam hadir, penduduk lokal tanah Jawa telah memiliki kepercayaan yang sangat kental dan melekat dalam kehidupan mereka, yaitu animisme (sistem pemujaan terhadap roh leluhur) dan dinamisme (paham adanya kekuatan yang dimiliki oleh manusia, hewan dan benda-benda alam lainya), akan tetapi Islam hadir secara terbuka dan saling berintraksi dalam praktek kehidupannya. Sehingga Islam menjadi agama yang mudah untuk diterima dan diikuti oleh penduduk asli. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyebaran Islam difokuskan secara akulturatif dan tidak terlepas dari model pendidikan pesantren. Sehingga dakwah Islam

akhirnya diteruskan oleh generasi berikutnya yakni melalui bentuk pendidikan dalam pondok pesantren.[9]

Para ahli sebagian berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia dimulai pada saat masuknya ajaran Islam di Indonesia. Pondok pesantren yang dianggap tertua adalah terletak di pulau sumatra yaitu di daerah Aceh. Sementara tinjauan yang lain menyebutkan bahwa pendirian pondok pesantren pertama kali di Indonesia dilakukan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Gujarat India.[10] Selanjutnya, tokoh sentral yang dianggap berhasil dan telah sukses mengembangakan sistem pendidikan pesantren adalah Sunan Ampel (Raden Rahmat) yang mendirikan pondok pesantren di daerah Kembang Kuning, Surabaya, dimana pada awalnya pesantren yang didirikan masih dengan skala yang kecil dan dengan jumlah santri yang sedikit, kemudian hari para santrinya tersebut mengembangkan serta mendirikan pesantren di berbagai wilayah, seperti di daerah Tuban oleh Sunan Bonang (Raden Maulana Makdum Ibrahim), Sunan Giri (Muhammad Ainul Yaqin) bergerak di wilayah di Gresik, di daerah Lamongan oleh Sunan Sunan Drajad (Raden Qasim) dan di daerah Demak oleh Raden Patah.[11]

Pada masa kerajaan Mataram (1587-1745), pesantren telah dijadikan lembaga pendidikan formal. Dimana, pada masa itu pemerintah Mataram mewajibkan seluruh anak-anak muslim yang berada di daerah wilayah kekuasanya, untuk mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an secara komprehensif. Pendidikan tingkat dasar dilakukan di surau dan pendidikan tingkat tinggi dilakukan di pesantren. Santri yang telah mengkhatamkan kajian Al-Qur'an di surau akan dilanjutkan untuk mengkaji kitab yang diasuh oleh Modin desa yang telah memenuhi syarat. Guru yang mengajarkan agama diberi gelar "kiyai" dan tempat pengajianya disebut dengan "pesantren". Tempat mengaji biasanya dilakukan di serambi masjid dan para santri harus tinggal di asrama yang disebut dengan

---

9 Imam Sayuti Farid, *Geneologi Dan Jaringan Pesantren Di Wilayah Mataram* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2020).

10 H. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bakti, 1983), 19–22.

11 Farid, *Geneologi Dan Jaringan Pesantren Di Wilayah Mataram*.

"pondok".[12][13] Sehingga, inilah akar dasar yang menjadi histroris sejarah awal mula kehadiran pondok pesantren di negara Indonesia.

Fokus Pendidikan Karakter dalam Lingkup Pesantren

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. ke muka bumi adalah sebagai *uswah hasanah* (contoh yang baik) bagi seluruh umat manusia di dunia (Q.S Al-Ahzab:32:21), sejak itu pula Nabi Muhammad didaulat sebagai makhluk yang paling sempurna akhlaknya (Q.S Al-Qolam:68:4). Hal ini senada dengan hadist-hadist yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia (HR. Baihaqi). Sehingga dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa orang-orang yang memiliki akhlak baik (karakter baik) dapat dijadikan *uswah hasanah* (teladan yang baik).[14]

Problematika yang terjadi pada negara Indonesia saat ini sudah semakin kompleks, terjadinya dekadensi moral pelajar seperti *free sex*, judi online, penyalahgunaan narkoba, meningkatnya penderita HIV-AIDS, tawuran antar pelajar, membolos sekolah dll.[15] Semuanya sudah menjamur di berbagai wilayah negara Indonesia, seakan-akan hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang biasa. Dilansir dari detik.com, ketua MPR Bambang Saesatyo mengingatkan tentang derasnya arus teknologi informasi telah menjelajahi benak dan pemikiran anak bangsa dengan nilai-nilai yang baru. Sayangnya nilai-nilai baru tersebut tidak semuanya selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi cenderung mengarah pada nilai-nilai yang negatif.175 peristiwa dan 333 tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di masyarakat.[16] Hadirnya pesantren di tengah-tengah masyarakat Indonesia membawa visi utama yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pusat dakwah penyebaran agama Islam. Pendidikan karakter yang dilakukan di dalam pesantren

12 Farid.

13 Farid.

14 Abdullah Hamid, *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017).

15 Hamid.

16 Sukma Nur Fitriana, "Bamsoet Ingatkan Ancaman Dekadensi Moral Generasi Muda Bangsa," detik.com, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6724050/bamsoet-ingatkan-ancaman-dekadensi-moral-generasi-muda-bangsa.

menjadi langkah solutif untuk merespon problem dekadensasi moral pada generasi muda Indonesia. Penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan di dalam pesantren sejak dahulu telah terbukti menjadi pendidikan karakter yang memiliki mutu dan kualitas tinggi. Banyak tokoh-tokoh Nasional yang memiliki pengaruh besar lahir dari pendidikan pesantren, seperti Ma'rif Amin yang menjadi wakil presiden Indonesia di era pemerintahan presiden Joko Widodo, Hasyim Muzadi merupakan tokoh Islam Indonesia dan mantan ketua umum Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbanagan Presiden sejak 19 Januari 2015. Abdurrahman Wahid atau sering disapa dengan "Gus Dur" menjadi tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001.[17] Dan jika ditelisik lebih dalam, tentu akan lebih banyak ditemukan lagi tokoh-tokoh bangsa yang memiliki latar belakang santri.

Pendidikan karakter dalam lingkup pesantren merupakan pokok dari pendidikan Islam yang ditekankan secara mendalam, menyeluruh dan berkelanjutan. Nilai-nilai pendidikan karakter merupakan aspek-aspek yang akan ditanamkan melalui dunia pendidikan, antara lain seperti nilai karakter menurut setandar yang dikeluarakan oleh kemendiknas, yaitu; 1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Disiplin, 5) Kerja Keras, 6) Kreatif, 7) Mndiri, 8) Demokratis, 9) Rasa Ingin Tahu, 10) Semangat Kebangsaan, 11) Cinta Tanah Air, 12) Menghargai Prestasi, 13) Komunikatif, 14) Cinta Damai, 15) Gemar Membaca, 16) Peduli Lingkungan, 17) Peduli Sosial, dan 18) Tanggung Jawab.[18] Proses pendidikan yang dilakukan di pesantren tidak sekadar mentransfer ilmu pengetahuan agama, tetapi juga memiliki orientasi utama yaitu membentuk kepribadian santri yang teguh pendirian, berakhlak (karakter) yang baik. Pendidikan karakter yang dilaksanakan di dalam pesantren memiliki fokus utama yaitu melipuri :

1. Memahami hakikat kemanusiaan

   Banyak yang tidak memahami tentang hakekat diciptakanya seorang manusia. Manusia yang lahir muka bumi mengemban

---

17 "Hari Santri Nasional: Berikut Tokoh Nasional Yang Berlatar Belakang Santri," era.id, 2020, https://era.id/nasional/41391/hari-santri-nasional-berikut-tokoh-nasional-yang-berlatar-belakang-santri.

18 Husna Nasihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesanteren* (Semarang: CV. Pilar Nusantara Semarang, 2017), 7.

peran dan tugas penting, selain menjadi seorang hamba (beribadah kepada Allah Swt.) manusia di muka bumi juga memiliki peran penting yaitu menjadi *kholifah,* tugas yang diberikan Allah kepada manusia ini patut disyukuri dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Memiliki rasa peduli dan reaktif terhadap peran ini berarti terdapat indikasi pada seorang manusian telah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta inilah yang akan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainya.[19] Dengan demikian, pendidikan karakter serta berbagai nilai-nilai karakter yang ada di lingkungan pesantren akan menjadikan para santri paham terhadap hakikat dari diciptakanya manusia.

2. Mendidik manusia dengan berkeluarga

Keluarga merupan sebuah pesantren kecil yang seharusnya menjadi bagian wadah pendidikan dalam melanjutkan nilai dan tradisi pesantren. Nilai tradisi serta kultur dalam kehidupan pesantren akan menjadi bagian penting dalam keluarga, mulai dari kemandirian hidup, kebiasaan hidup sederhana, istiqomah beribadah, peduli sosial dan memilik akhlakul karimah hingga memiliki rasa peduli terhadap pendidikan generasi selanjutnya. Bagian pesantren kecil inilah yang nantinya akan melahirkan generasi unggul dan bisa menjadi bagian dari pesantren besar.[20]

Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya berhenti pada penciptaan kultur secara internal di pesantren, tetapi penting untuk dipahami bahwa penciptaan kultur tersebut harus dilanjutkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. Keberlanjutan kultur tersebut juga harus dimediasi oleh alumni pesantren., disampaikan pada keluarga dan harus ditradisiskan. sehingga akan tercipta sebuah nuansa kepesantrenan dalam keluarga.[21] Dengan demikian, Pendidikan karakter yang diberikan pesantren akan memberikan pengaruh terhadap *output* alumni pesantren ketika kembali dalam kehidupan masyarakat serta meberikan pengaruh pada keluarga.

19 Mohammad Zakki, *Pesantren Dan Pendidikan Karakter* (Kebasen, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023), 9.

20 Zakki, 9.

21 Zakki, 10.

3. Melahirkan manusia nasionalis
   Kemajuan dalam ranah pendidikan yang ada dalan lingkup pesantren maupun pendidikan non-pesantren tidak luput dari bantuan dan kontribusi negara. Pendidikan yang dilaksanakan di pesantren selain memiliki orientasi membentuk manusia yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kokoh juga membentuk pribadi yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalis. Pendidikan nasionalis yang diberikan dalam pesantren bertujuan untuk menangani paham-paham yang merongrong stabiltas keamanan negara. Dengan memberikan semangat *hubbul wathon minal iman* akan memberikan suntikan motivasi kepada santri untuk berjiwa nasionalisme. Sehingga jiwa dan karakter tersebut akan terpatri dalam jiwa generasi muda Indonesia.[22]
4. Melatih menjadi manusia ekologis
   Fiqih lingkungan merupakan salah satu bentuk kontribusi pesantren terhadap lingkungan. Menciptakan budaya bersih adalah upaya membentuk muslim yang memilii pola pikir dan hidup yang sehat. Kegiatan dan pembiasaan yang dilakukan dipesantren dengan menjaga kebersihan dengan maksimal menjadi bentuk pembiasaan dan penanaman karakter. Dengan ajaran-ajaran yang diberikan pesantren terhadap para generasi muda yaitu para santri menjadi bentuk dan langkah membina manusia ekologis.

Integrasi Teknologi dalam Kurikulum Pendidikan Pesantren

Pesantren di era revolusi industri saat ini, penting untuk melakukan pengintegrasikan antara teknologi modern ke dalam kurikulumnya, dimana hal ini secara khusus telah dilakukan oleh pesantren yang memiliki tipologi pesantren modern, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan pesantren berbasis *salaf* juga bisa melakukan integrasi ini. Pendidikan yang dilakukan pesantren dalam integrasi ini didalamnya mencakupi tata cara penggunaan komputer, internet, dan perangkat digital lainnya, hal tersebut digunakan sebagai media dan prasarana dalam pembelajaran. Pada dasarnya pesantren adalah lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik dan menggembleng santrinya salah satunya untuk menjadikan juru

22 Zakki, 9.

dakwah bagi masyarakat. Tujuan tersebut harus bersinergi dengan cara yang dialkukan pesantren dalam mempersiapkan santrinya kembaali di masyarakat.[23] Dengan demikian para santri tidak hanya memiliki kompetensi ilmu agama tetapi juga dibarengi dengan kompetensi ilmu teknologi. Sehingga pendidikan yang dilakukan di pesantren seharusnya tidak hanya fokus terhadap ilmu agama tetapi para santri juga dibekali dengan ilmu tekhnologi yang cukup.

Santri sebagai produk pesantren harus mulai hal-hal baru utamanya teknologi. Karena dapat didefenisikan bahwa santri tidak hanya yang pandai membaca kitab kuning saja, namun dianggap gagap teknologi. Bukan pula mereka yang hanya paham terhadap ilmu salaf tetatapi juga ilmu kholaf. Begitulah kurang lebihnya. Santri yang dianggap baik harus sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat era modern, dapat menyelesaikan problematika sosial dengan sikap arif serta dilandasi dengan hukum yang benar tanpa harus terlepas dari tradisi yang dipegang ulama terdahulu. Beberapa pesantren seperti pondok Sidogiri Jawa Timur, Pondok Modern Gontor dan lain-;ain telah muai melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi sebagai media belajar santri. Ini adalah sebuah terobosan yang positif. Bukan tidak mungkin nuansa keislaman ala pesantren di Indonesia akan tampak lebih semarak jika gerakan serentak pesantren berteknologi sudah mulai digagas saat ini.[24] Dengan demikian, pesantren yang telah melakukan integrasi antara teknologi dengan kurikulum pembelajaran didalamnya merupakan suatu langkah yang positif dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 5.0.

A. Memberikan Pendidikan Kewirausahaan Kepada Santri

Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren merupakan salah satu upaya dalam menumbuhkan motivasi berwirausaha para santri. Melalui pembelajaran kewirausahaan diharapkan dapat mencetak santri lulusan pesantren yang memiliki daya saing secara profesional di era transformasi zaman. Oleh karena itu pelatihan dan pendidikan kewirausahaan meruakan pelatihan berbasis kompetensi (*competency basd training*)

yang sangat penting untuk direalisasikan, hal tersebut berguna untuk meningkatkan *soft skill* para santri untuk mennghadapi

23 Miftahul Arifin, "Pemanfaatan Teknologi Untuk Pembekajaran Pesantren," nuonline, 2015.

24 Arifin.

tantangan di masa depan.[25] Dengan ini pesantren tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang ilmu agama, tetapi juga yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi sekala lokal maupun nasional. Sehingga upaya pendidikan yang dilakukan dalam pesantren secara nyata telah mempersiapkan santri agar santri siap dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era revolusi industri 5.0.

B. Memberikan Pembinaan Tentang Etika dalam Pemanfaatn Teknologi

Indonesia sebagai negara timur harusnya menjaga dan menjunjung tinggi adat, nilai-nilai ketimuran sebagaimana masyarakat Indonesia yang dikenal dengan keramah tamahan dan kesopananya. Akan tetapi faktanay jika kita berselancar di dunia maya, sungguh sangat miris, para pengguna media sosial dan netizen netizan sudah tidak lgi mepeprhatikan unsur-unsur kesopanan dalam berinteraksi dan menggunakan teknologi.[26] Oleh karena itu pendidikan yang dilakukan di pesantren secara konsisiten harus meperbiki dan membina kakter (adab) para santri sebagai generasi muda yang akan berhadapan dengan transformasi zaman dan kecanggihan teknologi. Karena prinsip yang selalu menjadi pegangan masyarakat pesantren adalah menempatkan adab dan akhlak di atas ilmu, sehingga semua santri tanpa terkecuali diwajibkan memiliki karakter dan akhlak yang baik. Dengan memberikan pembinaan terhadap santri tentang etika bermedia sosial dan menggunakan teknologi berarti pesantren telah berupaya mempersiapkan para santri sebagai generasu muda siap menghadapi tantangan di era revolusi industri 5.0.

Kesimpulan

Kajian dengan judul "Pendidikan Karakter di Pesantren: Responsif terhadap Tantangan Revolusi Industri 5.0" memberikan

---

25 Khotibul Uman, "Pendidikan Kewirausahaan Di Pesantren Sebagai Upaya Dalam Membangun Semanagat Para Santri Untuk Berwirausaha," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 03, no. 01 (2016): 57, https;//ejournal.staim-tulungagung.ac.id/indek.php/eksyar/article/download/138/137/165.

26 Dalfin Ponco Nugroho, "Etika Bermedia Sosial," Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021.

deskripsi secara komprehensif tentang bagaimana pesantren dapat menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era industri 5.0 yang revolusioner. Dalam karya tulis ini, penulis memberikani sebuah narasi yang menggabungkan kearifan lokal pesantren dengan kebutuhan zaman modern yang dipenuhi dengan teknologi canggih. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Indonesia, dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman secara utuh, tetapi juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan kemajuan teknologi digital dan transformasi ekonomi global. Melalui kajian ini, penulis mengilustrasikan betapa pentingnya pesantren menjadi responsif terhadap perubahan tersebut, agar pesantren tidak hanya mempertahankan eksistensinya, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam pembentukan karakter dan kompetensi generasi muda. Selain itu, kajian ini mengajukan pandangan bahwa pesantren perlu aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia industri dan teknologi, untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran yang inovatif. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman pendidikan pesantren tetapi juga membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 5.0.

Daftar Pustaka

Arifin, Miftahul. "Pemanfaatan Teknologi Untuk Pembekajaran Pesantren." nuonline, 2015.

Farid, Imam Sayuti. *Geneologi Dan Jaringan Pesantren Di Wilayah Mataram*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2020.

Fitriana, Sukma Nur. "Bamsoet Ingatkan Ancaman Dekadensi Moral Generasi Muda Bangsa." detik.com, 2023. https://news.detik.com/berita/d-6724050/bamsoet-ingatkan-ancaman-dekadensi-moral-generasi-muda-bangsa.

H. Mahmud Yunus. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bakti, 1983.

Hamid, Abdullah. *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

"Hari Santri Nasional: Berikut Tokoh Nasional Yang Berlatar Belakang Santri." era.id, 2020. https://era.id/nasional/41391/hari-santri-nasional-berikut-tokoh-nasional-yang-berlatar-belakang-santri.

Hartono, Yudi. *Sejarah Pesantren : Pendidikan Keislaman Dan Keindonesiaan*. Madiun: UNIPMA Press, 2019.

Husna Nasihin. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesanteren*. Semarang: CV. Pilar Nusantara Semarang, 2017.

Nugroho, Dalfin Ponco. "Etika Bermedia Sosial." Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021.

Suyono, Agus. *Atlas Wali Songo : Buku Pertama Yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*. Depok: Pustaka IIMaN, 2016.

Uman, Khotibul. "Pendidikan Kewirausahaan Di Pesantren Sebagai Upaya Dalam Membangun Semanagat Para Santri Untuk Berwirausaha." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 03, no. 01 (2016)..https;//ejournal.staim.tulungagung.ac.id/indek.php/eksyar/article/download/138/ 37/165.

Zakki, Mohammad. *Pesantren Dan Pendidikan Karakter*. Kebasen, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023.

Peran Pesantren dalam Membangun Masyarakat Berkarakter di Era Revolusi Industri 5.0

Afni Ma'rufah

Revolusi Industri 5.0 membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berbeda dari era sebelumnya yang menekankan otomatisasi dan keterhubungan melalui teknologi digital, Revolusi Industri 5.0 fokus pada kolaborasi antara manusia dan mesin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Era ini menyuguhkan tantangan dan peluang baru, terutama dalam sektor pendidikan dan pengembangan karakter masyarakat. Pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, memiliki peran kunci dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral di tengah arus modernisasi yang semakin pesat.

Pesantren dikenal tidak hanya sebagai tempat belajar ilmu agama tetapi juga sebagai pusat pembentukan akhlak dan karakter santri. Dalam konteks Revolusi Industri 5.0, pesantren dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya sambil beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Tantangan ini mencakup penerapan teknologi baru dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan pendidikan di pesantren.

Dalam masyarakat modern, semakin dibutuhkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan akhlak yang mulia. Di sinilah pesantren memiliki keunggulan tersendiri. Dengan metode pendidikan yang fokus pada pengembangan moral dan spiritual, pesantren mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial yang tinggi. Menghadapi Revolusi Industri 5.0, pesantren dituntut untuk memperkuat perannya dalam membangun karakter masyarakat yang siap menghadapi perubahan zaman.

Pesantren dan Pendidikan Karakter

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang paling lama berdiri di Indonesia, dengan sejarah mendalam dalam

penyebaran Islam di Nusantara. Pesantren mulai muncul pada abad ke-15 bersamaan dengan penyebaran Islam di pesisir Jawa. Di antara pesantren tertua yang masih ada hingga saat ini adalah Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur, yang didirikan pada tahun 1718. Pesantren ini, bersama dengan Pesantren Tegalsari di Ponorogo dan Pesantren Tremas di Pacitan, memiliki peran signifikan dalam menyebarluaskan ajaran Islam dan membentuk karakter masyarakat Muslim di Indonesia[27]. Secara tradisional, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu agama seperti fiqh, tafsir, dan hadis, tetapi juga sebagai lembaga yang membina karakter. Pendidikan di pesantren menekankan pentingnya akhlak yang baik, kesederhanaan, disiplin, dan ketaatan kepada Allah SWT. Nilai-nilai ini diajarkan melalui kehidupan sehari-hari yang teratur, pengawasan ketat oleh kyai, dan teladan yang diberikan oleh para ustadz[28].

Pesantren menerapkan metode pembelajaran khas seperti *sorogan* dan *bandongan*, yang memungkinkan santri untuk mendalami teks-teks klasik Islam dengan lebih mendalam. Metode-metode ini tidak hanya berfokus pada pemahaman intelektual tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan di pesantren dirancang untuk membentuk santri yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kokoh, jujur, dan bertanggung jawab. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti modernisasi dan globalisasi, peran pesantren dalam pembinaan karakter tetap penting dan relevan. Pesantren terus berfungsi sebagai lembaga yang krusial dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Islam tradisional yang menjadi dasar moral bagi masyarakat Muslim di Indonesia[29].

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia, memainkan peran utama dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, moral, dan etika kepada santri. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi dasar pengajaran ilmu agama tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian santri agar mereka dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan keislaman di pesantren mencakup pengajaran ilmu seperti tauhid, fiqh, tafsir, dan hadis,

---

27 Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Erlangga, 2002), 36.

28 Nurcholish Majid, *Bilik-bilik pesantren: sebuah potret perjalanan* (Paramadina, 1997), 31.

29 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah* (Prenada Media, 2013), 358.

dengan penekanan pada ketakwaan kepada Allah SWT sebagai fondasi utama seluruh kegiatan santri. Ketakwaan ini diterapkan melalui praktik ibadah sehari-hari seperti shalat berjamaah, puasa, dan dzikir, yang diajarkan dengan disiplin yang ketat[30]. Selain itu, pesantren juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Kejujuran dianggap sebagai pilar utama dalam pendidikan moral di pesantren, di mana santri diajarkan untuk selalu berbicara dan bertindak dengan jujur dalam segala situasi. Kesederhanaan, sebagai nilai penting lainnya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari santri dengan membiasakan mereka hidup sederhana dan menjauhi kemewahan, sebagai cara untuk melatih pengendalian diri dan meningkatkan spiritualitas[31].

Dalam pendidikan di pesantren, etika atau akhlak mulia menjadi salah satu perhatian utama. Santri dilatih untuk menunjukkan perilaku baik tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Tata krama sehari-hari, seperti penghormatan kepada guru (*ta'dzim*), kerendahan hati (*tawadhu'*), dan semangat saling membantu (*ukhuwah Islamiyah*), merupakan cerminan dari etika ini. Pembelajaran etika dilakukan dengan memberikan teladan langsung dari para kyai dan ustadz yang menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga santri mendapatkan contoh yang nyata[32]. Dengan mengajarkan nilai-nilai keislaman, moral, dan etika, pesantren bertujuan untuk membentuk santri yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam tetapi juga karakter yang kokoh dan mampu menghadapi tantangan moral di masyarakat. Pendidikan ini mempersiapkan santri untuk menjadi individu yang berintegritas dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial.

Sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, pesantren memiliki metode pembelajaran yang khas dan berfokus pada pembentukan karakter santri. Metode yang diterapkan di pesantren menggabungkan tradisi keislaman dengan pendekatan menyeluruh, sehingga santri tidak hanya mempelajari ilmu agama tetapi juga

30 Idhar Idhar, "Pola Pendidikan Akhlak Dalam Persepektif Pesantren," *FASHLUNA* 1, no. 01 (March 17, 2020), https://doi.org/10.47625/fashluna.v1i01.219.

31 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia* (LP3ES, 2011), 31.

32 Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, 372.

mengembangkan akhlak mulia. Salah satu metode utama adalah *sorogan* dan *bandongan.* Dalam *sorogan*, santri belajar secara individual dengan menghadap kyai atau ustadz untuk membaca dan memahami teks kitab kuning. Kyai memberikan bimbingan langsung, memastikan setiap santri memahami materi sesuai kemampuannya. Metode ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan mendalam, sesuai dengan kemampuan masing-masing santri. Di sisi lain, metode *bandongan* melibatkan kyai yang membacakan teks kitab kuning kepada kelompok santri. Santri mendengarkan, mencatat, dan mempelajari penjelasan dari kyai, sehingga memungkinkan transfer ilmu yang lebih efisien kepada banyak santri sekaligus[33].

Selain fokus pada pembelajaran teks, pesantren juga menekankan pentingnya pembinaan karakter melalui kehidupan sehari-hari yang teratur dan disiplin. Santri dilatih untuk mengikuti rutinitas yang terstruktur, mulai dari bangun pagi untuk shalat subuh berjamaah hingga tidur setelah shalat isya. Kegiatan harian yang terencana dengan ketat ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian pada santri. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, dan *tawadhu'* (kerendahan hati) diajarkan melalui teladan langsung dari para kyai dan ustadz. Pembinaan karakter juga dilakukan melalui aktivitas seperti *muhadharah* (latihan pidato), *riadhah* (latihan spiritual), dan gotong royong, yang bertujuan untuk memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan solidaritas sosial di kalangan santri[34]. Dengan pendekatan ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga yang menyeluruh dalam pembinaan karakter. Santri tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama yang mendalam tetapi juga dibekali dengan karakter yang kuat dan berakhlak mulia, siap untuk memberikan kontribusi positif dalam masyarakat.

Tantangan dan Peluang Pesantren di Era Revolusi Industri 5.0

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, kini menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi

---

33 Dhofier, *Tradisi pesantren*, 57.

34 Muhammad Jundullah, Tajuddin Nur, and Yayat Herdiana, "Pembinaan Karakter Santri Melalui Latihan Pidato (Muhadhoroh) Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Bekasi | ISLAMIKA," September 23, 2022, https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/2043.

teknologi baru. Meskipun teknologi dapat membawa banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi manajemen dan akses ke informasi yang lebih luas, pesantren juga dihadapkan pada sejumlah hambatan yang signifikan dalam proses adopsinya.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur. Di banyak pesantren, terutama yang berada di pedesaan, akses terhadap internet dan perangkat teknologi seperti komputer atau tablet masih terbatas. Tanpa infrastruktur yang memadai, sulit bagi pesantren untuk mengimplementasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan manajemennya[35]. Tantangan lain yang muncul adalah resistensi terhadap perubahan. Dikenal dengan pendekatan tradisional dalam pengajaran, pesantren cenderung mengutamakan interaksi langsung antara kyai dan santri serta fokus pada pengajaran kitab kuning. Teknologi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang asing dan berpotensi mengganggu nilai-nilai tradisional yang telah lama dijunjung tinggi. Sikap konservatif ini kerap memperlambat proses adopsi teknologi di pesantren[36].

Keterbatasan keterampilan teknologi di kalangan tenaga pengajar dan santri menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi pesantren. Banyak kyai dan ustadz tidak terbiasa menggunakan perangkat teknologi modern, sehingga mereka membutuhkan pelatihan tambahan agar dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif. Namun, untuk menyediakan pelatihan ini, pesantren membutuhkan waktu, sumber daya, dan komitmen, yang tidak selalu mudah dipenuhi mengingat banyaknya keterbatasan yang dihadapi. Selain itu, biaya implementasi teknologi juga menjadi tantangan penting. Pesantren, yang sering kali bergantung pada dana dari masyarakat atau donatur, sering kali tidak memiliki cukup dana untuk menutupi biaya pengadaan perangkat teknologi dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan. Kondisi ini membuat pesantren kesulitan untuk berinvestasi dalam teknologi baru[37]. Isu

---

35 Ihin Solihin et al., "TANTANGAN PONDOK PESANTREN PADA MASA PANDEMI COVID-19," *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 5, no. 1 (2022): 78–90.

36 Mohammad Arif, "PERKEMBANGAN PESANTREN DI ERA TEKNOLOGI," *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 2 (February 22, 2016): 307, https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.550.

37 Aep Tata Suryana, "PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN," *Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama* 2, no. 2 (December 29, 2020): 1–8, https://doi.org/10.51482/almujaddid.v2i2.42.

pengawasan penggunaan teknologi juga menjadi perhatian utama. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, teknologi dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi di pesantren. Oleh karena itu, pesantren perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif agar teknologi dapat digunakan secara positif dan produktif.

Meskipun teknologi sering dilihat sebagai tantangan bagi institusi pendidikan tradisional seperti pesantren, ia juga membuka peluang besar untuk peningkatan pendidikan karakter. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat memperkaya pembelajaran dan memperkuat pembinaan karakter santri secara lebih inovatif dan efektif. Salah satu peluang penting adalah melalui platform *e-learning* dan aplikasi pembelajaran interaktif. Pesantren bisa memanfaatkan teknologi untuk menyediakan akses ke berbagai sumber belajar digital, yang akan membantu santri memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai keislaman dan etika. Aplikasi pembelajaran yang dirancang khusus untuk pendidikan karakter bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab melalui permainan edukatif, simulasi, dan kuis interaktif[38]. Selain itu, teknologi juga bisa mendukung pembelajaran jarak jauh, yang sangat relevan selama masa pandemi dan dalam situasi di mana santri tidak bisa hadir secara fisik di pesantren. Meski jarak jauh, pembelajaran ini tetap bisa menekankan pendidikan karakter melalui konten yang dirancang untuk menginternalisasi nilai-nilai moral. Misalnya, video pembelajaran yang menggambarkan kisah-kisah teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW atau para sahabat dapat membantu santri memahami dan meneladani karakter-karakter mulia tersebut[39].

Teknologi juga membuka peluang untuk menciptakan pengawasan dan penilaian karakter yang lebih terstruktur. Dengan memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran (LMS), pesantren dapat secara sistematis memantau perkembangan karakter santri. Melalui digitalisasi, aktivitas dan tugas yang berhubungan dengan pembinaan karakter dapat diunggah, dinilai, dan dianalisis,

38 Izzul Fatawi, "Implementasi E-Learning Pada Lembaga Pendidikan Pesantren," *El-Hikam* 5, no. 2 (2012): 325–36.

39 Fitria Zulfa, Jaja Jahari, and A. Heris Hermawan, "Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Covid-19," *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 6, no. 1 (2021): 14–28.

sehingga memungkinkan pengajar memberikan umpan balik berbasis data yang lebih tepat waktu[40]. Di sisi lain, media sosial dan platform komunikasi digital memberikan kesempatan bagi santri untuk mempraktikkan etika Islam di luar lingkungan pesantren. Pesantren dapat membimbing santri dalam menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab, mendukung mereka dalam mengembangkan karakter Islami dalam konteks digital. Ini merupakan langkah penting untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan moral di era digital[41]. Dengan cara ini, pesantren tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperkuat tradisi pendidikan karakternya melalui pemanfaatan teknologi. Teknologi berpotensi menjadi alat yang efektif dalam memperkaya pendidikan karakter, menjadikannya lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Di era digital, pesantren di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap efektif dan relevan dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pembinaan karakter. Beberapa pesantren telah berhasil menunjukkan cara institusi tradisional ini dapat mengintegrasikan teknologi modern tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai Islam mereka. Salah satu adaptasi yang signifikan adalah penerapan platform *e-learning*. Pesantren-pesantren kontemporer, seperti Pesantren Daarut Tauhiid di Bandung, telah mengembangkan sistem *e-learning* yang memungkinkan santri mengakses materi pelajaran secara daring. Ini tidak hanya mempermudah akses ke ilmu agama, tetapi juga menyediakan metode pengajaran yang lebih fleksibel, yang sangat penting selama pandemi COVID-19[42]. Pesantren ini telah berhasil menggabungkan pembelajaran online dengan pembinaan karakter, memastikan bahwa nilai-nilai seperti disiplin dan tanggung jawab tetap menjadi fokus utama pendidikan, meskipun dilakukan dalam format digital.

---

40 Rajab Rajab, Zulmuqim Zulmuqim, and Rully Hidayatullah, "Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Pada Pesantren Di Sumatera Barat," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (December 28, 2020): 246–66, https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.2.246-266.

41 Hidayatun Nafiah, "Penggunaan Media Sosial Dalam Kehidupan Sosial Oleh Santriwati Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia Dalam Perspektif Uses James Lull," 2021, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30437.

42 Lailatu Rohmah, "Konsep E-Learning Dan Aplikasinya Pada Lembaga Pendidikan Islam," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2011): 255–70.

Dalam era digital, pesantren juga menerapkan inovasi melalui penggunaan media sosial. Contohnya, Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang memanfaatkan platform seperti *YouTube, Facebook,* dan *Instagram* untuk menyebarkan dakwah dan memberikan pengajaran kepada masyarakat luas. Dengan menggunakan ceramah *online, podcast,* dan video edukasi, pesantren ini mampu mencapai audiens yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun internasional. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh pesantren dan memenuhi kebutuhan dakwah di zaman digital[43]. Selain itu, beberapa pesantren mulai memasukkan program *coding* dan literasi digital dalam kurikulum mereka. Pesantren Buntet di Cirebon, misalnya, telah memahami pentingnya memberikan keterampilan teknologi kepada santri sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka menawarkan kelas pemrograman dan literasi digital yang bertujuan mempersiapkan santri menghadapi tantangan digital, sambil tetap mengajarkan nilai-nilai Islam[44].

Beberapa pesantren kini juga meluncurkan aplikasi *mobile* yang berfungsi untuk mempermudah manajemen internal serta memperlancar komunikasi antara pengajar, santri, dan orang tua. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam menyebarluaskan informasi penting, mengatur jadwal kegiatan, dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Sebagai contoh, Pesantren Nurul Jadid di Probolinggo telah memperkenalkan aplikasi semacam itu sebagai bagian dari upaya mereka untuk memodernisasi sistem pendidikan[45]. Dengan berbagai adaptasi dan inovasi ini, pesantren di Indonesia tidak hanya dapat bertahan di era digital, tetapi juga menunjukkan kemampuan mereka dalam memadukan teknologi modern dengan

---

43 Munawara Munawara, Andre Rahmanto, and Ign Agung Satyawan, "Pemanfaatan Media Digital Untuk Dakwah Pesantren Tebuireng: Studi Pada Akun Media Sosial Tebuireng. Online," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (2020): 29–45.

44 yamalaor, "Literasi Digital Di Buntet Pesantren: Santri Buat Konten Kreatif Dengan Modal HP," Yayasan Media Adaptive Lampung, December 17, 2023, https://yamala.org/berita/literasi-digital-di-buntet-pesantren-santri-buat-konten-kreatif-dengan-modal-hp/.

45 Ridwan Maulana Rifqi Muzakky, Rijaal Mahmuudy, and Andhita Risko Faristiana, "Transformasi Pesantren Menghadapi Era Revolusi Digital 4.0," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 240–55.

pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Strategi Pesantren dalam Membangun Masyarakat Berkarakter

Pesantren memainkan peranan krusial dalam membentuk masyarakat yang berkarakter di Indonesia. Sebagai institusi pendidikan Islam yang menekankan nilai-nilai moral dan etika, pesantren berfungsi sebagai pelopor dalam melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang terpuji. Untuk tetap relevan dalam proses pembinaan karakter di tengah tantangan era digital, pesantren harus mengembangkan berbagai pendekatan dan strategi.

Pesantren perlu mengembangkan strategi yang melibatkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan pembelajaran. Teknologi dapat berfungsi sebagai alat yang efisien untuk memperkaya proses belajar santri dan mendukung pembinaan karakter mereka. Contohnya, pesantren dapat memanfaatkan platform *e-learning* untuk menawarkan materi pembelajaran yang beragam dan interaktif. Penggunaan video ceramah, modul digital, serta aplikasi pembelajaran Islami dapat membuat pemahaman tentang nilai-nilai keislaman menjadi lebih menarik dan relevan[46]. Pondok Pesantren Modern Gontor, sebagai contoh, telah berhasil mengadopsi TIK dalam kurikulumnya. Mereka memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran digital untuk mengatur kelas, mengumpulkan tugas, dan memberikan umpan balik secara langsung kepada santri. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran tetapi juga memungkinkan pemantauan perkembangan karakter santri dengan cara yang lebih terstruktur[47].

Pesantren dapat merancang berbagai program pendidikan karakter berbasis digital untuk memperkuat pembinaan karakter melalui teknologi. Salah satu inisiatif yang dapat diimplementasikan adalah pengembangan aplikasi mobile yang mendukung pengajaran nilai-nilai Islami. Aplikasi ini dapat mencakup modul-modul

---

46 Suryati Suryati and Adisel Adisel, "Penerapan Aplikasi Teknologi Komunikasi Dan Informasi Di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir Sumatera Selatan," *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)* 4, no. 2 (2020): 1–38.

47 Rila Setyaningsih et al., "Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning," *Jurnal Aspikom* 3, no. 6 (2019): 1200–1214.

interaktif mengenai etika Islam, kisah-kisah inspiratif dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, serta kuis dan permainan yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral pada santri[48]. Selain itu, pesantren juga bisa memanfaatkan platform media sosial untuk mendistribusikan konten dakwah dan pendidikan karakter. Dengan rutin mengunggah video pendek, ceramah online, dan artikel yang membahas pentingnya akhlak baik, pesantren dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan cara ini, pendidikan karakter tidak hanya terbatas pada lingkungan pesantren tetapi juga bisa diakses oleh masyarakat umum, termasuk mereka yang belum pernah merasakan pendidikan di pesantren[49].

Kompetensi guru menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan penerapan teknologi dan program pendidikan karakter berbasis digital di pesantren. Oleh karena itu, pesantren perlu menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan bagi para guru untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran dan pembinaan karakter. Program pelatihan ini sebaiknya mencakup pengenalan berbagai platform digital, penggunaan perangkat lunak edukasi, serta metodologi pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan teknologi mutakhir[50]. Selain itu, pelatihan harus menitikberatkan pada pengembangan keterampilan pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Para guru pesantren perlu dilatih untuk merancang dan mengelola kelas virtual, memberikan umpan balik secara daring, dan memotivasi santri agar dapat belajar secara mandiri melalui platform online. Dengan pendekatan ini, guru akan berfungsi sebagai fasilitator yang efektif dalam pembelajaran berbasis teknologi serta pembinaan karakter[51].

48 I Harsemadi et al., "Aplikasi Pembelajaran Kisah Teladan Rasulullah Muhammad Saw Berbasis Multimedia," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 8 (June 18, 2022): 24–41, https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i1.141.

49 Ahmad Mufid Anwari, *Potret Pendidikan Karakter Di Pesantren: Aplikasi Model Keteladanan Dan Pembiasaan Dalam Ruang Publik* (Edu Publisher, 2020), 70.

50 Mukhammad Nasif, "Manajemen Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di MANU Putri Buntet Pesantren," *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2022): 63–78.

51 Mesran Mesran, Suginam Suginam, and Dwika Assrani, "Integrasi Teknologi Informasi Di Pesantren Dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Digital, Kualitas Pembelajaran Dan Kepedulian Penghijauan," *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2024): 402–7.

Pesantren harus merumuskan berbagai strategi untuk terus membentuk masyarakat berkarakter dalam menghadapi tantangan era digital. Langkah-langkah nyata yang bisa diambil mencakup integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kurikulum, pengembangan program pendidikan karakter berbasis digital, serta pelatihan dan peningkatan keterampilan para guru. Keberhasilan penerapan teknologi di pesantren sangat bergantung pada keahlian para pendidik. Oleh karena itu, kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi serta metode pembinaan karakter yang sesuai dengan era digital tidak boleh diabaikan. Guru yang mahir dalam teknologi dapat mengelola kelas virtual, menggunakan perangkat lunak edukasi, dan mendukung pengembangan karakter santri dengan lebih efisien. Untuk memperkaya proses pembelajaran dan pembinaan karakter, pesantren harus terus memperbarui kurikulum mereka dengan elemen teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pelatihan intensif bagi para pendidik perlu dilakukan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pengajaran.

Kesimpulan

Revolusi Industri 5.0 menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pesantren dalam membentuk karakter masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika di tengah arus modernisasi. Dengan adaptasi dan inovasi, pesantren mampu mempertahankan relevansinya melalui integrasi teknologi dalam pembelajaran, yang memungkinkan santri mengakses materi secara digital sambil tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan resistensi terhadap perubahan perlu diatasi dengan strategi yang tepat, termasuk pelatihan guru dan pengembangan program pendidikan karakter berbasis teknologi. Pesantren berperan sebagai benteng terakhir dalam menjaga identitas keislaman masyarakat, menjadikannya lembaga yang esensial dalam membentuk generasi yang berkarakter kuat di era digital.

Daftar Pustaka

Anwari, Ahmad Mufid. *Potret Pendidikan Karakter Di Pesantren: Aplikasi Model Keteladanan Dan Pembiasaan Dalam Ruang Publik*. Edu Publisher, 2020. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=yaj8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pendidikan+karakter+tidak+hanya+terbatas+pada+lingkungan+pesantren+tetapi+juga+bisa+diakses+oleh+masyarakat+umum&ots=9AnhRjju3m&sig=j4da9jFWg_RSslF3GZXT_coPM1o.

Arif, Mohammad. “PERKEMBANGAN PESANTREN DI ERA TEKNOLOGI.” *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 2 (February 22, 2016): 307. https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.550.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media, 2013.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES, 2011.

Fatawi, Izzul. “Implementasi E-Learning Pada Lembaga Pendidikan Pesantren.” *El-Hikam* 5, no. 2 (2012): 325–36.

Harsemadi, I, Riza Wulandari, Akmal Rosyadi, I Lamopia, and Dedy Agustino. “Aplikasi Pembelajaran Kisah Teladan Rasulullah Muhammad Saw Berbasis Multimedia.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 8 (June 18, 2022): 24–41. https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i1.141.

Idhar, Idhar. “Pola Pendidikan Akhlak Dalam Persepektif Pesantren.” *FASHLUNA* 1, no. 01 (March 17, 2020). https://doi.org/10.47625/fashluna.v1i01.219.

Jundullah, Muhammad, Tajuddin Nur, and Yayat Herdiana. “Pembinaan Karakter Santri Melalui Latihan Pidato (Muhadhoroh) Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Bekasi | ISLAMIKA,” September 23, 2022. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/2043.

Majid, Nurcholish. *Bilik-bilik pesantren: sebuah potret perjalanan*. Paramadina, 1997.

Mesran, Mesran, Suginam Suginam, and Dwika Assrani. “Integrasi Teknologi Informasi Di Pesantren Dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Digital, Kualitas Pembelajaran Dan Kepedulian Penghijauan.” *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2024): 402–7.

Munawara, Munawara, Andre Rahmanto, and Ign Agung Satyawan. "Pemanfaatan Media Digital Untuk Dakwah Pesantren Tebuireng: Studi Pada Akun Media Sosial Tebuireng. Online." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (2020): 29–45.

Muzakky, Ridwan Maulana Rifqi, Rijaal Mahmuudy, and Andhita Risko Faristiana. "Transformasi Pesantren Menghadapi Era Revolusi Digital 4.0." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 240–55.

Nafiah, Hidayatun. "Penggunaan Media Sosial Dalam Kehidupan Sosial Oleh Santriwati Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia Dalam Perspektif Uses James Lull," 2021. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30437.

Nasif, Mukhammad. "Manajemen Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di MANU Putri Buntet Pesantren." *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2022): 63–78.

Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga, 2002.

Rajab, Rajab, Zulmuqim Zulmuqim, and Rully Hidayatullah. "Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Pada Pesantren Di Sumatera Barat." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (December 28, 2020): 246–66. https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.2.246-266.

Rohmah, Lailatu. "Konsep E-Learning Dan Aplikasinya Pada Lembaga Pendidikan Islam." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2011): 255–70.

Setyaningsih, Rila, Abdullah Abdullah, Edy Prihantoro, and Hustinawaty Hustinawaty. "Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning." *Jurnal Aspikom* 3, no. 6 (2019): 1200–1214.

Solihin, Ihin, Ahmad Jaelani, Nurwadjah Ahmad EQ, and Andewi Suhartini. "TANTANGAN PONDOK PESANTREN PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 5, no. 1 (2022): 78–90.

Suryana, Aep Tata. "PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN." *Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama* 2, no. 2 (December 29, 2020): 1–8. https://doi.org/10.51482/almujaddid.v2i2.42.

Suryati, Suryati, and Adisel Adisel. "Penerapan Aplikasi Teknologi Komunikasi Dan Informasi di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir Sumatera Selatan." *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)* 4, no. 2 (2020): 1–38.

yamalaor. "Literasi Digital Di Buntet Pesantren: Santri Buat Konten Kreatif Dengan Modal HP." Yayasan Media Adaptive Lampung, December 17, 2023. https://yamala.org/berita/literasi-digital-di-buntet-pesantren-santri-buat-konten-kreatif-dengan-modal-hp/.

Zulfa, Fitria, Jaja Jahari, and A. Heris Hermawan. "Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Covid-19." *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 6, no. 1 (2021): 14–28.

Mengintegrasikan Tradisi dan Inovasi: Pendekatan Modern dalam Pendidikan Salafi

M. Arwan I'tikaf

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan ekonomi, serta merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berilmu, bermoral, dan taat beragama. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya terletak pada lembaga formal, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Di era globalisasi, tantangan peningkatan mutu pendidikan semakin mendesak, terutama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing secara global. Upaya perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan harus terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika masyarakat.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki kontribusi besar dalam pendidikan dan penyebaran nilai-nilai Islam di Indonesia. Pesantren tetap menjadi salah satu pilar pendidikan yang unik dengan sistem pembelajaran berbasis kitab kuning, metode sorogan, dan halaqah. Di tengah tantangan modernisasi, pesantren perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya. Meski menghadapi perbedaan pandangan dalam menerima pengetahuan umum, pesantren tetap memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang berkarakter kuat, berilmu, dan berakhlak mulia.

Integrasi tradisi pesantren dengan inovasi modern menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren perlu mengadaptasi kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan umum agar santri mampu menghadapi era digital dan revolusi industri 5.0. Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo adalah salah satu contoh pesantren yang terus berkembang dan mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan menawarkan program pendidikan yang lengkap dan prestasi di berbagai bidang. Dengan menggabungkan tradisi dan inovasi, pesantren dapat berkontribusi lebih besar dalam mencetak generasi yang unggul dan mampu bersaing di masa depan.

Memahami Tradisi dalam Pendidikan Salafi dengan Nilai, Prinsip, dan Praktik

Pendidikan Salafi di pesantren berakar pada pemahaman mendalam terhadap Al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab klasik, menekankan nilai ketaatan pada ajaran agama, keteladanan akhlak, serta penghormatan terhadap ulama. Pendidikan ini berfokus pada pengajaran tekstual, penghafalan, dan penguasaan ilmu agama melalui metode tradisional seperti halaqah, sanad, dan musyawarah yang melibatkan dialog intensif antara murid dan guru. Tujuan utama pendidikan Salafi adalah membentuk individu yang tidak hanya menjalankan ajaran Islam secara ketat, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan perbuatan, menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup sehari-hari. Nilai-Nilai Pendidikan Salafi :

1. Keimanan yang Mendalam: Menekankan pentingnya memiliki keimanan yang kuat dan tulus kepada Allah, rasul-Nya, dan ajaran agama Islam. Ini meliputi keyakinan yang benar dan tidak terpengaruh oleh keraguan atau penyelewengan.
2. Akhlaq yang Terpuji: Mengutamakan pengembangan karakter dan akhlak yang baik seperti sabar, jujur, adil, dan rendah hati, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
3. Keteladanan: Mengambil teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sebagai model ideal dalam berperilaku, berbicara, dan bertindak.

Prinsip-Prinsip Pendidikan Salafi

1. Kepatuhan pada Syariat: Mengutamakan kepatuhan yang penuh terhadap ajaran syariat Islam, termasuk dalam hal ibadah, hukum, dan etika. Prinsip ini menolak segala bentuk penambahan atau pengurangan dalam agama.
2. Tawhid dan Sunnah: Penekanan pada prinsip tawhid (keesaan Allah) dan mengikuti sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW sebagai panduan utama dalam semua aspek kehidupan.
3. Penghindaran dari Bid’ah: Menolak setiap bentuk bid’ah (inovasi dalam agama) yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur’an dan Hadis, dengan fokus pada praktik-praktik yang sudah diterima dan dicontohkan oleh generasi awal Islam.

Praktik Pendidikan Salafi Sholeh

1. Studi Al-Qur’an, Hadist Kitab Kuning: Pendidikan Salafi Sholeh sering kali melibatkan studi mendalam tentang Al-Qur’an ,

Hadist Kitab Kuning. Ini termasuk menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kedua sumber utama ajaran Islam tersebut.

2. Pengajaran Akhlak dan Etika: Selain pengajaran agama, pendidikan ini juga menekankan pentingnya akhlak yang baik dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pendidikan tentang tata cara berinteraksi dengan orang lain, etika berbicara, dan tindakan sehari-hari.
3. Kehidupan Sederhana dan Taat: Mengajarkan untuk hidup sederhana dan menjauhi gaya hidup yang dianggap mewah atau berlebihan. Praktik ini mencerminkan kesederhanaan dan ketaatan pada ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan.
4. Kegiatan Keagamaan Harian: Mengadakan kegiatan keagamaan rutin seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan mengikuti majelis ilmu sebagai bagian dari rutinitas harian untuk memperkuat iman dan amal saleh.

Implementasi dalam Kehidupan

1. Model Teladan dalam Keluarga: Pendidikan Salafi sering diterapkan dalam lingkungan keluarga Pondok Pesantren, di mana Kiai menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka, Santri dan siswa dalam hal ibadah dan akhlak.
2. Lingkungan yang Mendukung: Membentuk lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai Salafi, baik di Asrama Pondok, rumah, sekolah, maupun komunitas, untuk memperkuat pengajaran dan praktik yang diajarkan.
3. Kesadaran Sosial: Meskipun menekankan pada kesederhanaan, pendidikan ini juga mengajarkan pentingnya membantu sesama dan terlibat dalam aktivitas sosial yang positif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan praktik ini, pendidikan Salafi Sholeh bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan tindakan sehari-hari.

Inovasi dalam Pendidikan dengan Pendekatan dan Metode Modern yang Dapat Diadopsi

Mengintegrasikan metode tradisional dengan inovasi modern di pondok pesantren Salaf memerlukan strategi yang matang dan

berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas tenaga pendidik agar mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran tanpa meninggalkan metode tradisional. Penerapan model pembelajaran campuran (blended learning), yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran daring, dapat menjadi solusi untuk mempertahankan interaksi personal sekaligus memperkenalkan teknologi baru. Kurikulum yang seimbang antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan umum juga akan membantu santri mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Integrasi teknologi informasi menjadi salah satu inovasi utama yang dapat diterapkan, seperti penggunaan platform pembelajaran online, e-learning, dan aplikasi mobile untuk mendukung pembelajaran interaktif. Misalnya, video pembelajaran yang berkaitan dengan tafsir, hadis, atau fiqh dapat diakses kapan saja, memberikan fleksibilitas bagi santri untuk belajar di luar jam sekolah. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek, seperti proyek kemanusiaan dan penelitian, dapat memperkuat keterampilan santri dalam memahami nilai-nilai sosial dan keislaman serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem-solving.

Pondok pesantren juga dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis, melalui kegiatan aktif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan role play. Kurikulum holistik yang mengaitkan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan modern dan keterampilan praktis akan memastikan pendidikan yang lebih komprehensif bagi santri. Evaluasi pembelajaran yang modern, seperti evaluasi berbasis kinerja dan penilaian formatif, dapat memberikan umpan balik berkelanjutan yang mendukung pengembangan santri.

Untuk memperkuat pendidikan karakter dan keterampilan sosial, pesantren dapat menyediakan kegiatan ekstrakurikuler dan program mentoring yang membina karakter dan keterampilan interpersonal santri. Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan lain dan program pertukaran pelajar dapat memberikan pengalaman yang beragam dan memperluas akses santri ke sumber daya pendidikan yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, pondok pesantren Salaf dapat meningkatkan kualitas pendidikan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mereka anut, mempersiapkan santri untuk menghadapi tantangan dan

peluang di era modern.

Strategi Integrasi Penggabungan Metode Tradisional dan Modern di Pesantren Darul Falah

Menggabungkan metode tradisional dengan inovasi modern di pesantren, seperti di Pesantren Darul Falah, memerlukan strategi matang yang memastikan kekayaan tradisi tetap dihormati sementara inovasi modern memperkaya proses pembelajaran. Salah satu pendekatan adalah melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu menggunakan teknologi tanpa meninggalkan metode tradisional. Penerapan model pembelajaran campuran (blended learning) yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran daring menjadi solusi untuk mempertahankan interaksi personal sambil memperkenalkan teknologi. Selain itu, pelatihan bagi guru perlu diadakan agar metode pengajaran tradisional dapat diadaptasi menjadi lebih relevan dengan kebutuhan siswa saat ini.

Integrasi metode tradisional dan modern di pesantren memerlukan kurikulum yang seimbang dengan menggabungkan mata pelajaran klasik seperti kitab kuning dengan ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Di Pesantren Darul Falah, kurikulum ini dipadukan dengan sistem pendidikan salaf dan metode pondok modern seperti KMI Gontor. Pelajaran formal dari Kemenag dan Diknas disesuaikan dengan kegiatan pesantren seperti shalat berjamaah dan pembelajaran kitab kuning di malam hari. Penggunaan teknologi seperti video pembelajaran dan laboratorium bahasa mendukung pengajaran agar lebih interaktif.

Pesantren juga menekankan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, dan simulasi untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan memahami konsep agama dalam konteks nyata. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni, dan kewirausahaan mendukung pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan santri. Evaluasi beragam, baik formatif maupun sumatif, diterapkan untuk menilai proses belajar santri sesuai dengan kurikulum modern dan tradisional.

Program kewirausahaan di pesantren mengajarkan santri tentang pengelolaan bisnis dengan prinsip Islam, sementara pelatihan keterampilan seperti manajemen administrasi, kelistrikan, dan memasak membekali santri dengan keterampilan praktis. Penggunaan fasilitas teknologi seperti laboratorium komputer dan

ruang belajar fleksibel membantu integrasi metode pembelajaran tradisional dan modern. Kolaborasi dengan institusi lain dan partisipasi orang tua dalam pendidikan santri juga memperkuat dukungan bagi proses pembelajaran yang inovatif.

Evaluasi dan penyesuaian strategi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas integrasi metode tradisional dan modern, dengan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari santri, guru, dan orang tua. Dengan strategi ini, Pesantren Darul Falah terus berupaya memadukan kurikulum Kemenag, Diknas, dan manajemen pondok modern ala KMI Gontor sambil mempertahankan pembelajaran klasik salafi seperti sorogan Al-Qur'an dan Kitab Kuning, menjadikannya model pesantren yang dinamis dan adaptif di era modern.

Dampak Integrasi terhadap Mutu Pendidikan dan Kualitas Lulusan

Integrasi antara tradisi dan inovasi dalam pendidikan Salafi di pesantren diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang agama, tetapi juga kompeten dalam berbagai bidang keilmuan dan keterampilan modern. Lulusan yang demikian akan lebih siap menghadapi tantangan zaman, berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, dan tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai keislaman. Dampak lain yang diharapkan adalah peningkatan reputasi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu menyeimbangkan tradisi dengan kebutuhan modern, sehingga menjadi pilihan yang lebih menarik bagi generasi muda.

Dampak positif integrasi Sistem kurikulum pesantren salafi dan umum mengikuti kurikulum KEMENAG dan DIKNAS serta penerapan manajemen pesantren modern KMI ala Gontor, yang terjadi di pondok pesantren Darul falah telah terbukti dengan luar biasa, dengan mengikuti strategi integral tiga system tersebut perkembangan pondok begitu luar biasa, baik dari minat Masyarakat mempercayakan anaknya untuk dididik di pondok, maupun Pembangunan fasilitas fisik dan modern, sehngga memiliki banyak sekali Lembaga Pendidikan formal dan fasilitas modern lain, memiliki Lembaga mulai TK, SD, MTs, MA, SMK lengkap dengan Gedung ruang kelas , ruang praktek dan fasilitas perkantoran, transportasi bahkan Klinik Kesehatan. Ini merupkan bukti awal yag terlihat

langsung. Yang meningkatkan Trust Masyarakat terhadap pondok pesantren Darul Falah.

Lulusan dari pondok pesantren darul falah banyak yang di terima di kampus-kampus baik negeri maupun swasta, melanjutkan ke jenjang Pendidikan formal maupun informal dengan mondok lagi baik di lingkungan pondok salaf maupun modern. Karena dengan integralisasi system Pendidikan pondok salafi yang materinya sesuai dengan kebutuhan Masyarakat sekitar, Dimana baik dari praktek ibadah maupun pemikiran nya bisa seiring sejalan, berkat materi salafi yang dipertahankan dan keterlibatan masyrakat sekitar langsung dalam kegiatan pondok , seperti pemerintah desa dan pemuda karang taruna sehingga dengan terjalinya komunikasi menjadi luwesnya komunikasi dan product santri yang siap terjun dimasyarakat, demikian pula dengan penerapan manajemen dan disiplin ala pesantren modern KMI Gontor, menjadikan suasana tertib dan budaya yang positif bagi santri, ketaatan dan kepatuhan dalam system pembelajaran, mengerjaka tugas dengan disiplin, dengan sendirinya membentuk karakter santri dan siswa yang sehat, positif.

Kesimpulan

Mengintegrasikan tradisi dan inovasi dalam pendidikan Salafi di pesantren merupakan langkah penting untuk menjaga relevansi pendidikan agama di era modern. Pondok Pesantren Darul Falah telah berhasil mengembangkan kurikulum integral yang menggabungkan pendekatan salafi dengan kurikulum KEMENAG dan DIKNAS, serta adopsi manajemen pondok pesantren modern ala KMI Gontor. Strategi ini telah membuahkan hasil yang luar biasa, baik dari segi kepercayaan masyarakat, peningkatan fasilitas, maupun kualitas lulusan yang mampu bersaing di berbagai jenjang pendidikan formal dan non-formal, baik di pesantren salaf maupun modern. Keberhasilan ini menunjukkan dampak positif dari peningkatan mutu pendidikan di pesantren, menjadikan lulusannya siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi fondasi pendidikan mereka.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi.*Prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kompri, M.Pd.I , *Strategi Pendidikan; Komponen-komponen Elementer Kemajuan Sekolah* Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2015

Tim penulis Rumah Kitab, *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren* Jakarta Pusat: RUMAH KITAB, 2014.

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI , *Ilmu dan aplikasi pendidikan,* Jakarta: PT GRASINDO, 2007.

Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan islam*, Yogyakarta: LkiS, 2009.

Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009.

Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* , Yogyakarta: LkiS,2008.

Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.

Tim penulis Rumah Kitab, *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren* Jakarta Pusat: RUMAH KITAB, 2014.

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* , Jakarta:INIS, 1994.

M. Murtadho, *"Pesantren salaf dan perubahan sosial : Studi kasus pesantren al anwar sarang rembang",* Journal Edukasi, Vol. 10 (April 2012)

Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

Dedi Mulyasana, *Pendidikan Ber Dan Berdaya Saing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Syaifulloh Maksum, *Dinamika Pesantren, Telaah Kritis Keberdaan Pesantren Saat Ini,* Jakarta: yayasan Islam Al Hamidiyah, 1998.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Kudus, PT. Menara Kudus, 2006.

Dr. Ahmadi, *Kurikulum ; Pendidikan Kecakapan Hidup,* Yogyakarta:Pustaka Ifada, 2013.

E Mulyasa, *Berbasis Sekolah, Konsep,Strategi, dan Implementasi,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2005.

Muhtarom, *Reproduksi ulama di era globalisasi: resistansi tradisional Islam*, Pustaka Pelajar, 2005

Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2003 Cet. II

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* Jakarta:LP3ES, 1994 Cet. VI

H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

H.B Siswanto, *Pengantar ,* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Sugiyono, *Strategi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Masters Program in Education, *Research Methods in Education* t.t.: The Open University,

Robert C. Bogdan dan Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn & Bacon, 1998.

Lexi Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Robert E. Stake, *Qualitative Research: Studying How Things Work*, New York: The Guilford Press, 2010.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: 1993.

Zainal Azril, *Micro Teaching*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Dedy Mulyana, *Strategi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu SosialLainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications, 1994.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi*, Jakarta: UI Press, 1992.

M. Djunaedy Ghony dan Fauzan Almanshur, *Strategi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

James A.F. Stoner, , *Prantice hall international,*New York:Englewood Cliffs,1982.

Hasibuan, *Sumber Daya manusia,* Jakarta:Bumi Aksara, 2003.
Jurnal Idaarah, *Vol. I, No. 2*, Desember 2017
Risvan Munir, *Apresiatif*, Yogyakarta: Mizan Pustaka, 2014.
Edward Sallis, *Total Quality Management In Education Pendidikan,* Yogyakarta:IRCiSoD, 2012.
Dr. Ahmadi, *Kurikulum ; Pendidikan Kecakapan Hidup*, Yogyakarta:Pustaka Ifada, 2013.
Akdon, *Strategic Management for Educational Management ,* Bandung: Alfabeta, 2006.
Soekarto Indra Fachrudi dkk, *Administrasi Sekolah,* Malang: Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1975.
Sanaky Hujair A.H. *Paradigma Pendidikan Islam,* Yogyakarta, Safaria Insania Press. 2003.
Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanis Teosentris*, Semarang : Pusataka Pelajar, 2004.
Sanaky Hujair A.H. *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Safaria Insania Press, 2003.
Jurnal At-Taqaddum, Volume 9, Nomor 1, Juli 2017
Jurnal Idaarah, Vol. I, No. 2, Desember 2017
Sudarwan Danim, *Visi Baru Sekolah ; dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik,* Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3S, 1983.
A. Rafiq Zainul Mun'im, *"Peran Pesantren dalam Education For All di Era Globalisasi",* (2009) dalam http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/JPI/ article/view/177/ 162, diakses 23 Nopember 2017
www.wikipedia.com /09/26/2018, 11;28 AM. Pesantren.
Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009.
Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LkiS,2008.
Muwahid Shulhan, dan Soim, *Strategi Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Teras, 2013.
Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.

Tim penulis Rumah Kitab, *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren* Jakarta Pusat: RUMAH KITAB, 2014.

Mastuhu*, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta:INIS, 1994.

Mujamil Qomar, Pesantren: *Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi,* Jakarta: Erlangga, 2007 Cet. III

Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Edisi III, Cet. III

Haidar Putra Daulay*, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009 Cet. III

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Study Tentang Pandangan Hidup Kyai* Jakarta: LP3ES, 1994 Cet. VI

Muwahid Shulhan, dan Soim, *Strategi Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Teras, 2013.

M. Murtadho, *"Pesantren salaf dan perubahan sosial : Studi kasus pesantren al anwar sarang rembang",* Journal Edukasi, Vol. 10 (April 2012)

Suyoto, *Pondok Pesantren Dalam Pendidikan Nasional. Diedit oleh M. Dawan Raharjo,* Jakarta: Pesantren dan Pembaharuan, LP3ES, 1988.

Drs. H. Zaini. Muchtarom. MA, dkk,. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Depag RI, 1986.

Cholil Dahlan, *Dilema Pondok Pesantren,* 1987

Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Mustofa Bisri, *"Pesantren dan Pendidikan",* Tebuireng, Edisi 1/Tahun I/JuliSeptember 2007

S, Prasodjo, dkk, *Profit Pesantren,* Jakarta; LP3ES, 1975

Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.

Abdul Majid, Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Prespektif Islam*, Bandung: Pemaja Rosdakarya, 2013.

Dawam Rahardjo, *Pergulatan dunia Pesantren:membangun dari bawah,* Jakarta:P3M, 1985.

Najd E Sobirin, *Pergumulam dunia Pesantren,* Jakarta:P3M, 1985.

Ahmad Munawir Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet. XIV

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6)

Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (4)

Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan

PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas No. 24 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 , tentang Standar Kompetensi Lulusan

Indonesia Emas:
Antara Tantangan dan Cita-Cita

Eko Priaji

Mimpi Indonesia emas adalah cita-cita bangsa untuk menjadi negara yang maju, kreatif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Pertanyaannya adalah bagaimana persiapan bangsa ini untuk menuju ke sana, sementara sejumlah tantangan telah menghadang di depan mata. Visi Indonesia 2045 adalah visi besar yang membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi dari semua elemen bangsa. Dengan potensi ekonomi dan demografi yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju dan sejahtera.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki pasar domestik yang sangat besar. Potensi ini diperkuat oleh bonus demografi, di mana pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan memiliki mayoritas populasi yang berada pada usia produktif. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih lebar. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin, dapat menghambat upaya pencapaian kesejahteraan yang merata.

Namun, untuk mencapai cita-cita ini, Indonesia harus menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kesenjangan sosial dan ekonomi, tantangan lingkungan, hingga ketahanan politik. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia masih tertinggal, terutama di bagian timur Indonesia. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai masih menjadi tantangan di banyak daerah terpencil. Pergantian kurikulum yang terus-menerus di Indonesia telah memberikan dampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan di Indonesia sudah melakukan kurang lebih 10 kali perubahan kurikulum. Berbeda dengan di Jepang, kurikulum pendidikan di Jepang lebih stabil dan cenderung konsisten dalam jangka panjang.

Ketidakstabilan dalam proses pembelajaran, beban administratif yang berat bagi guru, kebingungan di kalangan siswa serta ketimpangan infrastruktur adalah beberapa dampak negatif yang muncul akibat pergantian kurikulum yang terlalu sering di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah perlu memastikan stabilitas kebijakan pendidikan, menyediakan pelatihan guru yang berkelanjutan, konsistensi dalam pendidikan karakter, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta evaluasi kurikulum yang berbasis bukti. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat dan memberikan sumbangsih dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ketahanan politik dan keamanan menjadi faktor krusial dalam memastikan stabilitas jangka panjang. Ancaman terhadap demokrasi, korupsi yang merajalela, serta ketegangan sosial dapat menghambat kemajuan menuju Indonesia 2045. Korupsi yang masih merajalela di berbagai sektor pemerintahan dan bisnis dapat menghambat upaya reformasi dan pembangunan. Upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan agar tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Ketegangan sosial yang dipicu oleh isu-isu agama, etnis, dan ideologi dapat mengancam persatuan nasional. Pendidikan yang inklusif dan dialog antarbudaya menjadi kunci untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme.

Pemerintah telah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur yang kuat akan menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Pendidikan berkualitas dan pengembangan keterampilan adalah kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan SDM yang mampu bersaing di kancah global. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertanian, pertambangan, hingga energi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital, terutama dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi, berpotensi menjadi pilar penting dalam perekonomian.

Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam hal keberlanjutan lingkungan. Deforestasi, polusi, dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa

dan generasi mendatang. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, termasuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Ini dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan bencana alam. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus menjadi prioritas.

Sistem kesehatan yang inklusif dan efisien akan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, yang pada gilirannya mendukung produktivitas nasional. Stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat penting untuk mencapai visi Indonesia 2045. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Pembenahan birokrasi menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik adalah langkah strategis untuk mencapai hal ini.

Untuk mencapai visi Indonesia 2045, pembangunan harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan bahwa sumber daya alam dikelola dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan sangat penting untuk mengurangi kesenjangan. Mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan, termasuk melalui energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan.

Reformasi di sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas. Pendidikan harus fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, sementara sistem kesehatan harus lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan demografi dan epidemiologi. Kurikulum pendidikan harus lebih terfokus pada sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), serta pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Pemerintah perlu memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan berkualitas di seluruh negeri, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Memperkuat tata kelola dan demokrasi adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Digitalisasi pemerintahan, termasuk e-governance dan open data, dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Membangun kesadaran politik dan demokrasi sejak dini melalui pendidikan akan membantu menciptakan warga negara yang aktif dan kritis. Indonesia tahun 2045 akan menandai seratus tahun kemerdekaan, sebuah momen penting dalam sejarah bangsa. Pada saat itu, Indonesia bercita-cita untuk menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang sejahtera, dan pemerintahan yang stabil.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, kita sebagai bangsa harus bersatu, berkomitmen, dan bekerja sama. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara inklusif, berkelanjutan, dan adil. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan semua peluang yang ada untuk mencapai masa depan yang cerah dan berdaya saing global di tahun 2045.

Merdeka atau Menderita?

Roin Roiya Hanifah

Mengacu pada peraturan Mendikbud Nomer 12 Tahun 2024 tentang penerapan Kurikukum Merdeka sebagai kurikulum yang berlaku untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah yang saat ini mulai berangsur angsur kita terapkan dalam dunia pendidikan tentunya memberikan beragam tanggapan secara kelebihan dan kesulitannya dalam penerapannya. Suatu kurikulum yang memberi fleksibilitas dan terfokus pada materi esensial. Yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik salah satunya pada P5 (Projek penguatan profil pelajar pancasila) dalam mencetak siswa yang memiliki karakter pelajar pancasila yang mampu mengamalkan berdasarkan nilai- yang terkandung didalamnya.

Mengambil dari kata Merdeka memiliki arti bebas, tanpa belenggu, dan tanpa tekanan yang mampu menyebabkan seseorang merasa leluasa serta menemukan kebahagiaannya. Namun pada saat kita melihat kondisi pendidik dengan berbagai keluhan, tekanan, takut tehadap konsekuensi maupun kegelisahan yang dirasakan. Hal tersebut apakah bisa di katakan kita sudah merdeka? Beberapa pendapat yang mengungkapkan kata "merdeka" berasal dari bahasa Sansekerta "Mahardhika atau mahardika" yang memiliki arti antara lain terhormat, bijaksana dan berbudi luhur. Berdasarkan KBBI, kata "merdeka" memiliki tiga arti, yaitu : bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. tidak terkekang atau lepas dari tuntutan. tidak terikat, tidak tergantung kepada orang.

Belajar dari fenomena yang ada, kini Perkembangan IPTEK semakin canggih dan berkembang sangat pesat. Sehingga pendidikan di Indonesia pun kini sudah mulai beralih menggunakan aplikasi. Hal tersebut dinilai mampu meringankan dan memudahkan para guru dalam proses kegiatan KBM dan melengkapi semua administrasi perangkat mengajar tanpa kesulitan. Apapun mudah di dapatkan, tinggal satu tekan, media perangkat telah disiapkan tinggal memilih apa yang kita harapkan, semua bisa instan tanpa menyusun dengan kesusahan. Aplikasi yang disediakan sudah terstruktur secara sistematis mulai dari absensi, jurnal, platform merdeka mengajar,

perangkat pembelajaran, assesment kinerja guru, murid dll. Sehingga secara otomatis dapat di akses oleh siapapun.Namun perlu di garis bawahi bahwa tidak semua kalangan mampu mengoperasikannya, terlebih bagi seorang tenaga pendidik yang merasa sudah lanjut usia mereka akan belajar beradaptasi dengan hal yang baru. Proses adaptasi itupun tidak cukup dengan beberapa singkat waktu. Mereka akan banyak menyita waktu dalam mempelajari, memahami dan mengaplikasikannya. Apakah seorang guru sudah merasakan kenyamanan, kebahagiaan, kejayaan yang di dapat? Justru menimbulkan beban, kekhawatiran, ketakutan, paksaan, tuntutan terhadap perubahan agar kita tidak tertinggal dan mampu menyesuaikan. Fokus mereka akan tertuju pada tuntutan yang harus terselesaikan.

Dilansir dari detik. Com yang mengungkapkan beberapa kendala guru dalam penerapan kurikulum merdeka seperti : Kesulitan mengelompokkan siswa sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik karena rasio jumlah murid yang terlalu banyak sedangkan jumlah guru terbatas, kompetensi guru yang belum memenuhi standar pembelajaran di kurikulum merdeka. Selain itu banyak sekali berita yang beredar di media sosial tentang keluhan guru dalam penerapan kurikulum merdeka terutama terkait administrasi. Penerapan kurikulum merdeka ini juga mendorong para guru untuk terus mengejar perolehan sertifikat pengembangan diri di platform merdeka mengajar, sehingga mereka banyak yang merasa kewalahan mengajar padahal tugas utama mereka adalah mendampingi belajar dan mendidik para siswa. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing,m engarahkan,melatih,menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari pengertian di atas tugas seorang pendidik sangatlah tidak mudah. Namun mereka harus di tuntut dengan segala aturan.

Seorang pendidik di harapkan bisa memahami karakter, dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Maka seorang pendidik harus diberi kesempatan dalam berekspresi, berkreasi, tanpa adanya tuntutan, tekanan yang merenggut kebahagiaan, kekhawatiran yang merenggut kenyamanan, ketakutan pada tugas yang tak dapat terselesaikan, ingin mengikuti perkembangan justru merasa

kesusahan, tak lagi mengedukasi justru menyakiti. Jika jiwa pendidik tidak tertekan maka mereka akan merdeka batinnya, merdeka bebannya, merdeka waktunya dan merdeka kebahagiannya. Dari situ melahirkan rasa hati senang murid riang. Karena sejatinya mendidik bukan hanya transfer ilmu melaikan ada nilai nilai yang harus kita contohkan, biasakan, dan terapkan. Semua itu harus melibatkan beberapa faktor internal dari jiwa raga seorang pendidik agar tercapai suatu keberhasilan. Sehingga kesejahteraan seorang pendidik menjadi hal utama yang harus kita perhatikan.

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF KEUMMATAN

NU aktif dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada pengembangan ekonomi inklusif berbasis keummatan. Upaya ini mencakup advokasi terhadap hak-hak ekonomi masyarakat marjinal dan pemberdayaan komunitas melalui pendekatan yang berbasis nilai keadilan sosial, memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

Teori Pembangunan Berwawasan Nu

Ginanjar Prastyanto

Setiap manusia pasti menginginkan kondisi kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, yakni kehidupan yang dicirikan dengan serba terpenuhi berbagai kebutuhan hidup (Soetomo: 2009). Kondisi tersebut bisa tercapai jika barang-barang maupun jasa-jasa yang menjadi kebutuhan hidup mudah didapatkan dengan harga terjangkau, dalam hal ini meminjam istilah dari falsafah jawa, kehidupan masyarakat yang murah sandang, pangan, dan papan. Kehidupan yang seperti itu tidak akan terjadi begitu saja, tetapi untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu usaha. Upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan tersebut disebut dengan pembangunan (Soetomo: 2009).

Pembangunan itu sendiri merupakan upaya yang bersifat terencana dan tertata untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan (Soetomo: 2009). Jadi pembangunan sifatnya tidak sekedar mengalir begitu saja. Oleh karena itu, agar suatu pembangunan mampu mewujudkan cita-cita yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu teori pembangunan, yang fungsinya menjadi penunjuk arah bagi jalannya pembangunan. Beberapa teori pembangunan yang sudah ada saat ini antara lain teori modernisasi, teori ketergantungan, teori pemberdayaan masyarakat (people center development), dll. Teori modernisasi memberikan tuntunan tentang bagaimana cara merubah masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern (Swarsono dan Alvin Y.So: 2006). Teori tersebut pernah diadopsi oleh pemerintahan era orde baru sebagai panduan dalam menjalankan pembangunannya. Menurut teori modernisasi masyarakat tradisional dicirikan dengan penggunaan teknologi yang masih sederhana di dalam menjalankan pekerjaannya, mereka umumnya menekuni pekerjaan sebagai petani dengan pengelolaan manajemen yang juga sederhana yakni pengelolaan pertanian biasanya berdasarkan pengalaman tidak dengan riset, dan tenaga kerjanya biasanya menggunakan tenaga kerja keluarga atau para tetangga, tidak menggunakan tenaga ahli yang memiliki ijazah pendidikan di bidang pertanian, seperti yang dilakukan oleh perkebunan modern. Sedangkan sebaliknya,

masyarakat modern dicirikan dengan penggunaan teknologi yang memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi di dalam menjalankan pekerjaannya dan bidang usaha yang ditekuni oleh masyarakat tersebut bukan lagi pertanian tetapi industri, dan kalau pun ada yang menekuni sektor pertanian, dia mengelolanya pun juga dengan pola-pola seperti industri.

Dengan demikian, produktivitas masyarakat tradisional kalah jauh jika dibandingkan dengan masyarakat modern. Keberlimpahan barang-barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat tradisional relatif sangat rendah bila dibandingkan dengan masyarakat modern. Oleh karena itu, masyarakat modern lebih sejahtera daripada masyarakat tradisional karena berbagai kebutuhan hidupnya lebih tercukupi.

Bagi masyarakat tradisional yang ingin merubah dirinya menjadi masyarakat modern maka dibutuhkan peran sentral pemerintah (Mansour Fakih: 2002). Dalam hal ini, mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu program yang tidak mudah, karena selain membutuhkan biaya yang besar juga membutuhkan kondisi sosial yang kondusif agar jalannya perubahan tetap terarah, dan tidak melenceng ke arah lainnya, oleh karena itu, pemerintahlah yang memiliki kapasitas untuk menjalankan program tersebut.

Teori pembangunan berikutnya adalah teori ketergantungan. Berbeda dengan teori modernisasi yang fokus pada ketimpangan tingkat teknologi dan ketimpangan tingkat cara berproduksi antar negara, teori ketergantungan fokus pada ketimpangan struktur ekonomi-politik antar negara (Swarsono dan Alvin Y.So: 2006). Menurut teori ini keterbelakangan yang dialami suatu negara bukanlah karena masyarakatnya masih hidup dalam kondisi tradisional tetapi karena berada dalam relasi sosial yang tidak adil dengan negara lain, khususnya relasi dalam segi hubungan perekonomian.

Dalam hal ini, negara-negara yang hidup terbelakang dahulu merupakan negeri-negeri yang menjadi bekas penjajahan negara-negara maju (Nurhadi). Dalam hal ini, jika hanya sekedar dilihat dari sisi permukaan negara-negara yang terbelakang tersebut memang nampak sebagai negara-negara yang didiami oleh masyarakat tradisional, sedangkan negara-negara maju didiami oleh masyarakat modern. Jadi seolah-olah masyarakat di negara-negara terbelakang merupakan masyarakat yang kurang cerdas sehingga tingkat

kesejahteraannya tertinggal oleh rekan-rekan mereka yang hidup di negara maju. Padahal jika dianalisis secara lebih mendalam, ketradisionalan yang mereka alami pada dasarnya merupakan dampak buruk dari penjajahan yang dahulu pernah mereka alami. Dalam hal ini, karena penjajahan akhirnya mereka sulit untuk berkembang, dan akhirnya masih hidup secara tradisional. Selama masa penjajahan, negara-negara terbelakang tersebut diposisikan sebagai pemasok bahan baku-bahan baku bagi industri-industri di negara-negara maju, oleh negara penjajah mereka. Setelah merdeka, di satu sisi, negeri-negeri tersebut masih mewarisi struktur perekonomian era penjajahan, sedangkan di sisi lain, negara-negara maju bekas penjajah mereka tersebut menerapkan peraturan hak paten bagi teknologi-teknologi yang telah berhasil mereka kembangkan, sehingga negara-negara bekas jajahan tersebut tidak boleh meniru dan mengembangkan teknologi yang dikembangkan negara-negara maju itu (Nurhadi). Sehingga, mereka akhirnya tetap berposisi sebagai pemasok bahan baku-bahan baku bagi industri-industri di negara-negara maju, karena terhalang peraturan yang dikeluarkan oleh negara maju-negara maju tersebut ketika ingin mengembangkan sendiri perindustrian di negerinya sendiri. Negara-negara tersebut akhirnya secara perekonomian bergantung pada negara-negara maju.

Dengan demikian, karena negara-negara tersebut tidak leluasa mengembangkan teknologinya sendiri, juga tidak leluasa mengolah sumber daya alam yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan sendiri melainkan untuk kebutuhan industri-industri negara-negara maju, maka mereka akhirnya kurang mampu menyediakan barang-barang kebutuhan hidup bagi rakyatnya, negara-negara tersebut harus mengimpornya dari negara-negara maju. Oleh karena itu, kebutuhan mereka terhadap mata uang asing menjadi tinggi, dan di sisi lain karena di dalam negeri langka lapangan pekerjaan akibat dari ketidakleluasaan mengembangkan industri-industri sendiri, maka banyak di antara rakyat dari negeri-negeri tersebut terpaksa bekerja menjadi pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bagi negara, mereka sebagai sumber pasokan mata uang asing (devisa).

Menurut teori ketergantungan suatu negara yang terbelakang tersebut bisa keluar dari jeratan ketergantungan pada negara maju dengan cara berani untuk tidak mematuhi peraturan-peraturan yang

diterapkan oleh negara-negara maju tersebut, yakni melalui jalan mengembangkan perindustrian dan teknologi di negerinya sendiri, tanpa takut melanggar aturan hak paten dari negara-negara maju tersebut. Dalam hal ini, negara-negara yang berusaha keluar dari kondisi ketergantungan tersebut harus siap jika karena kebijakannya tersebut akhirnya mereka diembargo oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk keluar dari kondisi ketergantungan tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan yang kompak dari rakyatnya.

Teori pembangunan selanjutnya adalah teori pemberdayaan masyarakat atau di dalam istilah asalnya people center development. People center development jika diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa indonesia artinya adalah pembangunan yang berpusat pada orang-orang. Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat fokus membangun pada manusianya (Soetomo: 2009), berbeda dengan teori modernisasi dan teori ketergantungan, yang sama-sama lebih fokus ke aspek materialnya. Menurut teori pemberdayaan masyarakat, masyarakat jika ingin hidup sejahtera maka mereka tidak perlu menunggu terlebih dahulu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat tersebut bisa berusaha sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas bersama yang menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, dan sesuatu yang memiliki manfaat ini bisa tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama meskipun orang-orang yang membentuknya di awal sudah tidak lagi saling berinteraksi dan saling berjauhan, baik karena berpindah tempat atau sudah tiada. Sesuatu yang memiliki manfaat tersebut bisa berupa perkumpulan orang atau juga bisa berupa tradisi yang bersifat baik. Contoh tradisi yang bersifat baik adalah kebiasaan memberikan santunan pada anak-anak yatim di acara-acara tertentu atau bahkan ada masjid-masjid yang memiliki jadwal khusus untuk menyelenggarakan kebiasaan tersebut. Dengan adanya kebiasaan tersebut maka pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup anak-anak yatim sedikit terbantu. Orang-orang yang saat ini sering menyelenggarakan kegiatan santunan anak yatim, tentu, tidak ada yang tahu siapa yang mengawali mengadakan kegiatan tersebut. Tapi, meskipun orang yang mengawali kebiasaan tersebut tidak diketahui, hal itu tidak menjadi soal, karena yang terpenting adalah nilai

manfaat dari kebiasaan tersebut.

Contoh perkumpulan orang yang memiliki nilai kemanfaatan adalah komunitas para perantau Banyuwangi di Makassar. Mereka merupakan orang-orang yang kompak dan hidup saling tolong-menolong di tanah perantauan. Dalam hal ini, ketika ada seseorang yang berasal dari Banyuwangi yang datang ke Makassar untuk mencari kerja maka oleh mereka, orang tersebut akan dicarikan pekerjaan. Hal ini berbeda dengan ketika ada di antara mereka yang telah kembali ke Banyuwangi dan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sana, orang-orang tersebut, tentu, tidak lagi saling tolong menolong untuk mencarikan pekerjaan.

Komunitas para perantau Banyuwangi tersebut, tentu, merupakan suatu perkumpulan orang yang telah memberikan manfaat sangat besar bagi banyak orang. Orang-orang yang merintis rasa kekompakkan pada para perantau Banyuwangi tersebut, tentu, sudah tidak ada lagi di tengah komunitas tersebut, tapi hasil dari tindakan mereka masih lestari dan memberikan manfaat hingga saat ini. Dalam hal ini, jika orang-orang tersebut di masa lalu tidak berusaha membangun rasa kekompakkan di antara para perantau Banyuwangi, dan orang-orang lain pun juga tidak ada yang berusaha membangun rasa tersebut, maka bisa jadi saat ini orang-orang Banyuwangi yang merantau ke Makassar tidak saling tolong-menolong, dan orang-orang baru dari Banyuwangi yang datang ke sana akan kesulitan untuk mencari pekerjaan.

Dengan menggunakan sudut pandang teori pemberdayaan masyarakat, kita bisa menemukan bahwa kekompakkan yang saat ini ada pada para perantau Banyuwangi di Makassar tersebut pada dasarnya bisa dibalik, yakni orang-orang yang tinggal di Banyuwangi sebenarnya memungkinkan untuk membangun kekompakkannya di wilayah mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi kesulitan mencari pekerjaan di wilayahnya sendiri, dan tidak perlu merantau ke luar pulau. Untuk mewujudkan situasi hidup yang kompak, orang-orang di Banyuwangi perlu mengenali potensi-potensi yang mereka miliki, mereka perlu menggali potensi kekayaan alam yang ada di wilayah mereka, selain itu, mereka juga perlu menggali kembali nilai-nilai gotong royong yang dulu pernah begitu menjiwai kehidupan para leluhur mereka. Setelah memahami berbagai potensi yang mereka miliki, potensi kekayaan alam yang mereka miliki berikutnya dikembangkan menjadi sumber daya ekonomi, sedangkan nilai-

nilai gotong royong yang telah berhasil kembali digali tersebut dikembangkan menjadi perekat rasa saling tolong menolong di dalam mendayagunakan sumber daya alam tersebut. Dengan langkah-langkah seperti itu maka orang-orang di Banyuwangi akhirnya dapat mencapai kekompakkan di wilayahnya sendiri.

Menurut teori pemberdayaan masyarakat seringkali masyarakat tidak menyadari potensi-potensi yang mereka miliki sendiri dan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitator yang tugasnya membangunkan kesadaran mereka, dan mendampingi mereka mengembangkan kekuatannya sendiri, sehingga dengan kekuatannya sendiri tersebut mereka bisa menggapai kehidupan yang lebih sejahtera. Peran fasilitator tersebut dimulai sejak masyarakat belum menyadari kekuatannya sendiri hingga mereka berhasil merubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Fasilitator tersebut bisa berasal dari siapa saja, bisa dari seseorang yang memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat, bisa berasal dari organisasi masyarakat, juga bisa dari lembaga pemerintahan. Maka di sinilah sebenarnya letak kekuatan dari teori pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan teori modernisasi dan teori ketergantungan, dalam hal ini teori pemberdayaan masyarakat bisa diterapkan oleh siapa saja dan tidak perlu menunggu political will dari pemerintah. Sehingga dengan semakin banyak pihak yang memahami teori tersebut, maka kesejahteraan masyarakat berpotensi lebih cepat terwujud.

Menggagas Teori Pembangunan Berwawasan NU

Bagian ini akan dibuka dengan pertanyaan sebagai berikut "perlukah NU mengembangkan teori pembangunannya sendiri?" Bagi penulis jawabannya sangat perlu, alasannya adalah seperti yang pernah disampaikan oleh Nur Kholiq Ridwan di dalam salah satu bukunya yang berjudul NU dan Neoliberalisme (2012) yakni saat ini penduduk Indonesia yang paling terkena imbas dari dampak buruk berkembangnya neoliberalisme kebanyakan adalah warga NU, sehingga NU membutuhkan program yang terdesain dengan baik untuk mengentaskan warganya dari keterpurukan hidup akibat ketidakadilan sosial (perkembangan neoliberalisme). Indonesia itu sendiri merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan NU itu sendiri merupakan organisasi keagamaan

Islam terbesar di Indonesia, oleh karena itu, penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan secara otomatis sebagian besar adalah warga NU, demikian juga penduduk Indonesia yang pergi merantau ke luar pulau atau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dan rela meninggalkan keluarganya karena desakan ekonomi secara otomatis sebagian besar juga warga NU, demikian pun penduduk Indonesia yang rumah tangganya berantakan akibat dari kesulitan ekonomi secara otomatis sebagian besar juga warga NU. Dengan demikian, NU membutuhkan teori pembangunannya sendiri untuk menjadi penuntun bagi desain program pemberdayaan para warganya yang hidup kurang sejahtera tersebut. Jika NU membutuhkan teori pembangunan sendiri, lalu, bagaimanakah model teori pembangunan yang berwawasan NU?

NU itu sendiri menganut pedoman keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrowi. Dalam hal ini, salah satu prinsip yang dianut NU adalah sikap tawazun, yakni sikap hidup yang menyeimbangkan aspek duniawi dan aspek akhirat. Jadi menurut ajaran NU seseorang tidaklah disebut baik, jika hidup orang tersebut hanya untuk beribadah dan melalaikan aktivitas kerja. Demikian juga sebaliknya seseorang tidak dianggap baik, jika hidupnya hanya untuk menumpuk harta dan lupa dengan ibadahnya. Hal ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Kyai Bahaudin Nursalim di dalam salah satu pengajiannya yakni seseorang yang bekerja sebagai satpam tidak perlu merasa risau ketika memasuki bulan ramadhan, dia tidak bisa mengikuti sholat tarawih karena menjalankan tugas jaga di malam hari. Menurut beliau kerja menghidupi keluarga itu sendiri merupakan kewajiban sedangkan melaksanakan sholat tarawih merupakan sunnah, meskipun selama setahun hanya dilaksanakan di bulan ramadhan saja. Berkaitan dengan hal tersebut, kerja jaga malam itu sendiri pada dasarnya merupakan aktivitas duniawi, sedangkan sholat tarawih meskipun hukum fiqhnya memang sunnah tapi termasuk aktivitas ukhrowi, tapi beliau, justru, lebih mewajibkan kerja jaga malam daripada melaksanakan sholat tarawih. Kyai Bahaudin Nursalim itu sendiri merupakan ulama' NU yang sangat alim terhadap berbagai fan disiplin keilmuan keagamaan, jadi beliau sangat otoritatif ketika berbicara tentang persoalan-persoalan keagamaan. Dengan demikian, contoh dari beliau tersebut bisa menunjukkan betapa kuatnya NU memegang prinsip keseimbangan antara kehidupan

duniawi dengan kehidupan ukhrowi.

Dilihat secara sosiologis antara kegiatan duniawi dengan kegiatan ukhrowi, pada dasarnya, saling bertautan. Dalam hal ini, seseorang yang menjadi satpam tersebut, tentu, lebih memilih untuk malaksanakan sholat tarawih daripada bekerja seandainya pekerjaannya adalah menjadi guru pns. Berkaitan dengan hal tersebut, guru pns itu sendiri terkadang memang membawa pulang berkas-berkas pekerjaan yang tidak cukup waktunya jika hanya dikerjakan di kantor sehingga harus dilembur di rumah ketika malam. Namun, waktu untuk mengerjakan berkas-berkas tersebut relatif fleksibel karena guru pns tersebut memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri kapan waktu pengerjaan berkas-berkas tersebut. Dalam hal ini, bagi pihak sekolah, yang penting pekerjaan guru tersebut bisa terselesaikan ketika dead linenya tiba, tidak peduli kapan waktu ia menyelesaikannya. Hal ini, tentu, berbeda dengan seorang satpam, yang mana dia memiliki jam kerja yang sudah ditetapkan oleh pihak instansi yang mempekerjakannya, sehingga mau tidak mau dia harus bekerja di jam yang sudah ditentukan oleh pihak instansi tersebut.

Selain itu, seseorang yang bekerja sebagai satpam tersebut, tentu, lebih memilih untuk melaksanakan sholat tarawih daripada bekerja seandainya pekerjaannya adalah sebagai petani dengan luasan lahan yang cukup (memiliki lahan pertanian 2 hektar, misalnya). Dalam hal ini, petani itu sendiri terkadang juga melakukan pekerjaan di malam hari, yakni misalnya mengairi sawahnya. Namun, waktu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut relatif fleksibel, sehingga ketika ramadhan dia bisa leluasa untuk mengikuti sholat tarawih. Selain itu, petani itu sendiri memiliki jam kerja yang relatif sangat fleksibel. Dia tidak harus setiap hari pergi ke sawahnya. Dia pergi ke sawahnya hanya di waktu-waktu tertentu, yakni saat penyiapan lahan untuk penanaman, saat penanaman, saat pemupukan, saat pengobatan hama, dan saat pemanenan. Ketika di sawah pun, dia juga tidak bekerja seharian full, seperti buruh pabrik dan satpam, melainkan dia cukup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan saja. Dengan demikian, karena memiliki banyak waktu luang, maka seseorang yang bekerja sebagai petani, di kala bulan ramadhan tiba dia berkesempatan untuk melaksanaan kegiatan-kegiatan ukhrowi sebanyak-banyaknya, termasuk sholat tarawih.

Berdasarkan ilustrasi-ilustrasi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang bekerja menjadi satpam tersebut dilihat dari sisi permukaan memang dia seolah-olah adalah orang yang lebih mengutamakan pekerjaannya daripada ibadahnya, di kala ramadhan, tetapi jika dianalisis secara mendalam dia sejatinya adalah seseorang yang hidup dalam kondisi ketidakberdayaan, dalam hal ini, karena keterdesakan pekerjaan orang tersebut akhirnya tidak memiliki kemerdekaan untuk mengikuti sholat tarawih. Dengan demikian, teori pembangunan berwawasan NU perlu meminjam konsep pembangunannya Amartya Sen yakni pembangunan untuk kemerdekaan. Dalam hal ini, warga NU yang masih hidup dalam kondisi keterdesakan pekerjaan sehingga tidak memiliki kemerdekaan di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas peribadatan perlu dibantu untuk mengembangkan perekonomian yang lebih bisa memberikan keleluasaan bagi dirinya untuk mengamalkan aktivitas-aktivitas peribadatan tersebut. Jadi di dalam teori pembangunan berwawasan NU yang perlu dientaskan bukan hanya warga NU yang hidup dalam kondisi miskin, tetapi juga yang hidup dalam kondisi keterdesakan pekerjaan.

Apalagi amaliyah-amaliyah NU itu sendiri sebagian besar memang menuntut waktu luang bagi para jamaahnya. Contoh, misalnya, amaliyah yasinan. Yasinan biasanya dilaksanakan tiap malam jum'at. Amaliyah tersebut bertujuan untuk kirim do'a kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Para jama'ah yasinan biasanya terdiri dari warga masyarakat satu RT (Rukun Tetangga) atau satu RW (Rukun Warga). Kegiatan tersebut biasanya digilir di tiap-tiap rumah. Orang-orang yang ikut di kegiatan tersebut, tentu, adalah orang-orang yang memiliki waktu luang di kala malam jum'at. Orang-orang yang bekerja menjadi satpam atau buruh pabrik yang sering dapat tugas lembur di malam hari, tentu, tidak akan bisa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Contoh berikutnya adalah kegiatan melayat dan mengurusi jenazah orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini, waktu manusia meninggal dunia itu sendiri pada dasarnya tidak terjadwal. Manusia bisa meninggal dunia di tengah malam, bisa juga di kala pagi, bisa juga di kala siang hari sewaktu jam kantor masih sibuk-sibuknya, atau juga bisa di sore hari, di saat orang-orang kantor sudah pulang kerja. Oleh karena itu, kegiatan untuk melayat dan mengurusi jenazah membutuhkan waktu luang yang sangat banyak. Seseorang yang pekerjaannya sebagai buruh pabrik, tentu,

dia tidak akan bisa melayat ke tetangganya yang meninggal dunia di siang hari karena dia masih bekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum mengurus jenazah itu sendiri memang fardlu kifayah, yakni ketika ada satu orang yang mengurusi jenazah maka gugurlah kewajiban orang lain untuk ikut mengurusi jenazah tersebut. Namun, bagi warga NU, ketika ada saudaranya meninggal dunia, tentu, lebih menginginkan dilayat dan diurusi oleh banyak orang daripada hanya oleh satu orang.

Problem waktu luang warga NU untuk melayat dan mengurusi jenazah tersebut saat ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat di era ini, laju industrialisasi di berbagai kota di Indonesia sedang gencar-gencarnya, sedangkan di sisi lain, laju deagrarianisasi (berkurangnya jumlah orang yang bekerja sebagai petani) juga terjadi secara besar-besaran, oleh karena itu, waktu luang yang dimiliki oleh warga NU juga berpotensi semakin berkurang. Oleh karena itu, jika situasi tersebut tidak segera direspons oleh NU maka di masa depan, bisa jadi ketika ada warga NU yang meninggal dunia hanya diurusi oleh satu orang, sesuai dengan tata aturan fardlu kifayah tersebut.

Seseorang akan memiliki banyak waktu luang, jika pekerjaan yang ditekuninya tidak hanya sekedar membutuhkan waktu yang relatif sedikit, tetapi di samping hanya membutuhkan waktu yang relatif sedikit, pekerjaan tersebut juga harus mampu memberikan pemasukan yang bisa untuk mencukupi segala kebutuhan hidup orang tersebut beserta keluarganya. Sebagai ilustrasi seseorang yang bekerja sebagai buruh tani, tentu, dia memiliki banyak waktu luang dalam kesehariannya karena dia hanya bekerja di waktu-waktu tertentu saja, sesuai dengan kalender pertanian. Tetapi, pemasukan orang tersebut, tentu, tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pemasukan seorang buruh tani, tentu, tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh seorang petani yang memiliki lahan seluas dua hektar, meskipun pekerjaan yang ditekuninya sama-sama memberikan banyak waktu luang. Dalam hal ini, seseorang bisa saja memiliki pekerjaan yang memberikan waktu luang yang relatif banyak pada dirinya, tetapi jika pekerjaan tersebut tidak memberikan pemasukan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut, tentu, akan mencari tambahan pekerjaan atau bahkan mencari pekerjaan lainnya yang bisa memberikan hasil yang bisa mencukupi segala kebutuhan hidupnya beserta keluarganya, meskipun pekerjaan tersebut menyita keseluruhan waktunya. Bahkan

bisa jadi orang tersebut rela untuk merantau ke luar pulau atau pun ke luar negeri ketika di wilayahnya langka lapangan pekerjaan yang mampu memberikan ketercukupan terhadap kebutuhan hidup. Dia bahkan rela meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil dan juga pasangannya untuk mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup tersebut. Dengan demikian, di dalam teori pembangunan berwawasan NU, warga NU bukan hanya dibantu untuk mengembangkan pekerjaan yang bisa memberikannya banyak waktu luang, tetapi juga bisa memberikannya pemasukan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Dengan demikian, waktu luang yang dimilikinya benar-benar waktu luang yang memberikannya ketenangan hati, sehingga bisa dia gunakan untuk menjalankan berbagai peribadatan dan amaliyah-amaliyah NU dengan khusyuk.

Lantas, bagaimana strategi untuk menerapkan teori pembangunan berwawasan NU tersebut?

Untuk mengembangkan strategi penerapan teori tersebut, kita bisa meminjam strategi yang dikembangkan oleh teori pemberdayaan masyarakat di dalam membangun masyarakat. Dalam hal ini, pertama-tama masyarakat diajak untuk mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai potensi yang dimilikinya, lalu mereka didampingi untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut secara bersama-sama, sehingga hasilnya bisa memberikan nilai manfaat kepada semua anggota masyarakat. Pembangunan di katakan berhasil ketika masyarakat akhirnya berhasil membentuk semacam kebiasaan baru atau pun perkumpulan orang yang memberikan suatu nilai manfaat tertentu kepada banyak orang. Berkaitan dengan hal tersebut, strategi pembangunan berwawasan NU juga dimulai dengan mengajak warga NU untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimilikinya. Mereka selanjutnya didampingi mengembangkan potensi-potensi tersebut sampai bisa menjadi sumber pemasukan yang bisa memberikan ketercukupan bagi kebutuhan hidupnya, dan juga memberikan banyak waktu luang bagi mereka. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan potensi-potensi tersebut adalah aset-aset yang dimiliki oleh warga NU, yang belum termanfaatkan atau pun sudah dimanfaatkan tapi belum maksimal (belum memberikan masukan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup). Aset tersebut juga bisa disebut dengan istilah aset terpendam. Aset-aset tersebut bisa berupa lahan pertanian, ijazah sekolah, keahlian, jaringan sosial, dll.

Oleh karena itu, di dalam proses pendampingan tersebut ketika warga NU yang didampingi telah berhasil menemukan salah satu aset terpendam yang dimilikinya dan dia berhasil mengembangkannya hingga bisa menjadi sumber pemasukan bagi dirinya, namun tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, maka tugas pendampingan belum selesai. Dalam hal ini, pihak pendamping masih memiliki tugas untuk menemani warga NU tersebut terus melakukan penggalian terhadap aset terpendam lainnya yang dimilikinya. Tugas pendampingan baru dikatakan selesai ketika warga NU yang didampingi tersebut, akhirnya, benar-benar memiliki sumber penghasilan yang di satu sisi memberikan ketercukupan pada segala kebutuhan hidupnya, di sisi lain memberikan banyak waktu luang bagi dirinya. Sebagai ilustrasi, ketika proses pendampingan, seorang warga NU yang berprofesi sebagai buruh pabrik berhasil menemukan salah satu aset terpendam miliknya yang selama ini belum ia manfaatkan secara maksimal, yakni sawah yang luasnya seperdelapan hektar. Karena kesibukannya bekerja, sawah tersebut selama ini hanya ia sewakan, dan tidak dia olah sendiri. Pemasukan dari penyewaan tersebut, tentu, sedikit. Dia akhirnya menyadari bahwa sawah tersebut akan memberi pemasukan yang jauh lebih banyak jika ia olah sendiri. Oleh karena itu, ia akhirnya memutuskan untuk mengolah sendiri sawah tersebut, di sela-sela kesibukannya bekerja. Ternyata setelah diolah sendiri, ia memperoleh pemasukan yang lebih banyak dari sawah tersebut. Namun, ternyata meskipun pemasukan yang diperoleh dari sawah tersebut saat ini lebih banyak daripada sebelumnya, tetapi pemasukan tersebut belum cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya. Pemasukan yang diperolehnya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pangan saja, sedangkan untuk membelikan baju istrinya, skin carenya, make upnya, perhiasannya ternyata belum cukup.

Merespons situasi tersebut, pihak pendamping akhirnya mengajak kembali warga NU itu untuk mengidentifikasi kembali aset terpendam lainnya yang dia miliki. Dia akhirnya menemukan bahwa di belakang rumahnya ternyata ada sepetak tanah miliknya yang selama ini tidak ia manfaatkan (tanah menganggur). Tanah tersebut ditumbuhi rerumputan liar dan semak belukar. Dia akhirnya menemukan ide untuk memelihara kambing di tanah tersebut, apalagi di sawahnya banyak ditumbuhi rerumputan, yang selama ini hanya ia babati dan dia singkirkan begitu saja agar

tidak mengganggu tanamannya. Rerumputan tersebut, tentu, bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakan bagi kambingnya. Akhirnya, warga NU tersebut membuat kandang kambing di tanah belakang rumahnya tersebut. Dia mengisi kandang tersebut dengan membeli empat ekor kambing. Satu jantan dan tiga betina. Dia membeli empat ekor kambing tersebut dari uang gajinya sebagai buruh pabrik. Dalam hal ini, mengingat kebutuhan pangannya sudah bisa tercukupi dari mengolah sawah, maka gaji yang ia dapatkan dari pekerjaannya di pabrik bisa ia kumpulkan, dan dijadikan modal untuk beternak kambing.

Setelah satu tahun berjalan, ketiga ekor kambing betina milik warga NU tersebut akhirnya sama-sama sudah beranak. Kambing itu sendiri selama satu tahun bisa beranak dua kali, dan anak kambing umur dua puluh bulan sudah memasuki usia dewasa, dan siap untuk dijual. Berkaitan dengan hal tersebut, kambing milik warga NU tersebut setelah satu tahun, beranak lima ekor. Dan di tahun kedua, dia akhirnya sudah bisa menjual kambing yang dipeliharanya. Satu ekor kambing dewasa itu sendiri harganya jutaan. Hasil dari penjualan seekor kambing tersebut, tentu, lebih dari cukup kalau hanya untuk sekedar buat membelikan baju istrinya, skin carenya, maupun make upnya, apalagi lima ekor kambing. Segala kebutuhan hidup warga NU tersebut beserta kebutuhan keluarganya akhirnya bisa terpenuhi. Selain itu, dia juga terus memperbesar usaha peternakan kambingnya. Uang hasil gajinya di pabrik terus ia pergunakan untuk menambah jumlah kambing yang ia ternak. Di samping itu, ia juga mulai meminjam uang KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari BANK untuk semakin memperbesar usaha peternakannya tersebut. Warga NU tersebut, akhirnya, menjadi peternak kambing yang sukses. Dia, akhirnya, resign dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik dan lebih fokus mengurusi usaha peternakannya. Sebagai seorang pengusaha, tentu, dia memiliki kesibukan yang luar biasa, tetapi sesibuk-sibuknya seorang pengusaha, dia tetap memiliki kemerdekaan untuk menentukan sendiri jam kerja yang akan dia jalani, berbeda dengan di saat dia masih menjadi seorang buruh pabrik, yang tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan sendiri jam kerjanya. Warga NU tersebut, akhirnya, memiliki banyak waktu luang. Waktu luangnya tersebut dia pergunakan untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah, kegiatan-kegiatan sosial seperti menyantuni anak-anak yatim, aktif sebagai pengurus NU, dan pergi beribadah ke tanah suci. Akhirnya,

tugas pendampingan terhadap warga NU tersebut selesai dan tuntas.

Teori pembangunan berwawasan NU meskipun strategi penerapannya mirip dengan teori pemberdayaan masyarakat, namun sasaran yang menjadi penerima manfaat dan tujuannya berbeda. Dalam hal ini, di dalam teori pemberdayaan masyarakat pihak yang menjadi penerima manfaat adalah kelompok, bukan individu, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan secara bersama-sama, bukan sekedar memberikan kemanfaatan kepada satu individu semata. Oleh karena itu, teori tersebut memiliki sisi kelemahan, yakni program pembangunannya mungkin berhasil membuat sesuatu yang memiliki nilai manfaat secara bersama-sama, tetapi bisa jadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat tersebut hanya dinikmati oleh individu-individu tertentu yang memiliki posisi kuat di tengah masyarakat, sedangkan individu-individu yang posisinya lemah tidak mampu menikmati. Sebaliknya, teori pembangunan berwawasan NU sasaran penerima manfaatnya adalah individu, yakni individu-individu warga NU pada khususnya, dan tujuan yang ingin dicapai juga sesuatu yang bisa dinikmati oleh individu, yakni kesejahteraan hidup dan banyaknya waktu luang untuk aktivitas peribadatan. Namun bukan berarti teori ini menafikan sisi sosial dari individu-individu tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, manusia itu sendiri ketika di hari kebangkitan nanti akan diadili oleh Sang Pencipta sebagai individu, dan bukan sebagai kelompok. Namun, isi dari pengadilan tersebut selain persoalan kewajibannya kepada Sang Pencipta juga terkait dengan persoalan hubungan sosial dan tanggung jawab sosialnya di kala hidup di dunia. Seorang lelaki yang di kala di dunia memiliki anak dan istri akan diminta pertanggungjawabannya sebagai seorang bapak dan seorang suami. Seorang wanita yang sewaktu di dunia memiliki anak dan suami juga akan diminta pertanggungjawabannya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Dengan demikian, teori pembangunan berwawasan NU memberikan tuntunan untuk memberdayakan individu-individu warga NU agar dia lebih memiliki kemampuan di dalam menjalankan tugasnya terhadap orang-orang yang memiliki hak terhadap tanggungjawabnya. Sehingga dia bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Berkaitan dengan hal tersebut, sepasang suami istri memang merupakan dua orang yang tidak terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi sebagai individu mereka pada dasarnya memiliki

potensi sendiri-sendiri. Pihak suami, misalnya, memiliki aset terpendam berupa skill membuat kerajinan kayu jati, sedangkan istrinya memiliki aset terpendam berupa skill menjahit pakaian. Oleh karena itu, masing-masing suami istri tersebut perlu didampingi secara sendiri-sendiri, agar mereka berdua mampu mengembangkan potensinya masing-masing dan sama-sama berkontribusi terhadap peningkatan pemasukkan keluarga. Dalam hal ini, pihak suami, misalnya, bisa membuka usaha kerajinan kayu jati di rumahnya, demikian juga, istrinya bisa membuka usaha konveksi di rumahnya. Sepasang suami istri meskipun didampingi sendiri-sendiri, namun hasil pemasukkan yang mereka peroleh, tentu, akan mereka manfaatkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, mereka perlu didampingi hingga usaha yang mereka kembangkan masing-masing, ketika pemasukannya dikumpulkan mampu mencukupi segala kebutuhan hidup mereka berdua beserta kebutuhan anak-anaknya.

Teori pembangunan berwawasan NU mengingat tujuannya adalah memberdayakan warga NU agar mencapai kehidupan yang sejahtera dan memiliki banyak waktu luang, maka teori tersebut mengajarkan kepada warga NU untuk memiliki mental berwirausaha daripada mental sebagai pekerja. Dalam hal ini, seseorang yang bekerja sebagai pengusaha, tentu, lebih memiliki kemerdekaan untuk meluangkan waktu kerjanya daripada seorang pekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, mungkin saja seorang warga NU, pada awalnya, bekerja sebagai seorang pekerja, tetapi dia harus didampingi agar dia bisa berusaha berubah menjadi seorang pengusaha, seperti ilustrasi buruh pabrik yang berubah menjadi pengusaha ternak kambing di atas.

Kesimpulan

Dengan demikian, teori pembangunan berwawasan NU menginginkan warga NU memiliki kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dan memiliki banyak waktu luang untuk menjalankan aktivitas peribadatan dan amaliyah-amaliyah NU. Kondisi tersebut bisa dicapai ketika warga NU memiliki pekerjaan yang dapat memberikan pemasukkan yang cukup memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan tidak menyita keseluruhan waktunya. Oleh karena itu, warga NU perlu dibangkitkan kesadarannya untuk memiliki mental pengusaha dan meninggalkan mental pekerja. Selain itu, warga NU juga perlu didampingi untuk mengembangkan berbagai potensi

yang dimilikinya hingga menjadi sumber penghasilan yang mampu memberikan kecukupan bagi seluruh kebutuhan hidupnya dan memberikan waktu luang yang banyak bagi diri mereka, sehingga mereka bisa tenang dan khusyuk di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas peribadatan dan amaliyah-amaliyah NU lainnya. *Wallahu a'lam*.

Daftar Pustaka

Bernstein, H.; Crow, B.; Johnson, H. (eds.). (1992), *Rural livelihoods: crises and responses*. United Kingdom: Oxford University Press in association with The Open University.

Fakih, Mansour. (2002), *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

Marzali, Amri. (2012), *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group.

Nurdiyanah, dkk. (2016), *Panduan Pelatihan Asset Based Community-driven Development (ABCD)*. Makassar: NUR KHAIRUNNISA.

Nurhadi. (2017), *Teori Ketergantungan Dalam Kajian Geografi*. Geo Media: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian, vol 5, no 1.

Ridwan, Nur Kholik. (2012), *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang. Satu Abad*. Yogyakarta: LkiS.

Sen, Amartya. (1999), *Development as Freedom*. New York : Alfred A Knoff, Inc.

Soetomo. (2006), *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetomo. (2009), *Pembangunan masyarakat: Merangkai sebuah kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Swarsono dan Alvin Y.So. (2006), *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia: Strategi, Tantangan, dan Potensi Keuangan Syariah

Abu Abas

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil di kisaran 5-6%, menempatkan Indonesia pada peringkat kelima di antara negara-negara emerging market. Stabilitas ini menjadi modal penting untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan menekan angka kemiskinan, meskipun jumlah penduduk miskin masih signifikan. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang mencakup bantuan sosial, peningkatan keterampilan, dan pengembangan UMKM. Strategi ini dilengkapi dengan upaya memanfaatkan potensi keuangan syariah seperti zakat dan wakaf, yang terbukti dapat mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung pengembangan ekonomi produktif. Dengan mengintegrasikan pendekatan kebijakan publik yang inklusif dan inovatif, pemerintah bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 ini tumbuh cukup stabil pada kisaran 5 hingga 6 % dan berada pada peringkat kelima di kelompok negara emerging market. Kondisi ini menjadi modal utama dalam mendorong perbaikan standar hidup penduduk Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, yaitu 9,02 % pada Maret 2024, namun jumlah penduduk miskin secara mutlak masih cukup besar karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kementerian PPN/ Bappenas berinisiatif menstandarkan kerangka kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dengan mengembangkan indeks ekonomi inklusif (Inclusive Economic Growth Index). Indeks pembangunan ekonomi Inklusif

pada dasarnya merupakan ukuran yang komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan, mencakup indikator tingkat nasional maupun disagregasinya sampai tingkat daerah.

Pemerintah juga terus berupaya menyempurnakan integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk kelompok miskin dan rentan, serta memantapkan pelaksanaan jaminan sosial. Untuk memperluas kesempatan dan kemampuan penduduk untuk terus meningkat kesejahteraannya, berbagai program seperti permodalan, peningkatan keterampilan dan vokasi, kewirausahaan, dan kemitraan terus dikembangkan agar kelompok menengah Indonesia bertumbuh dan semakin kuat.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia harus dilakukan secara tuntas, dari hulu ke hilir, mengingat kemiskinan dan ketimpangan tak hanya sekadar kondisi pendapatan yang rendah, tetapi juga akses dan kemampuan masyarakat untuk terus mempertahankan kondisi ekonomi agar tak semakin miskin. Helmi Yahya, seorang jurnalis pernah mengatakan bahwa untuk dapat keluar dari zona kemiskinan, setidaknya ada tiga hal penting, yaitu akses pinjaman mudah, akses pendidikan mudah, dan terbebas dari ketergantungan bantuan. Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan lebih dari US$ 1 miliar untuk membantu lebih dari tiga juta rumah tangga pedesaan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kerja sama tersebut dapat membantu membuat masyarakat seperti petani dan nelayan skala kecil untuk dapat berdaya saing.

Indonesia juga menyasar potensi besar pengelolaan dan pemanfaatan sistem keuangan syariah secara ekonomi makro. Saat ini, keuangan syariah di Indonesia telah berkembang di sektor perbankan, non-perbankan, pasar modal dan dana sosial. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen potensial pendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial secara konkret melalui distribusi aset dari orang yang berkewajiban (muzakki) kepada penerima (mustahik). Zakat juga dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkannya untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif kelompok miskin dan rentan.

Wakaf di Indonesia telah terbukti mendukung pengembangan pemberdayaan masyarakat, tersebar di 435,768 lokasi di seluruh Indonesia dan mencapai 4,4 miliar meter persegi. Meskipun jumlah zakat yang dikumpulkan masih sekitar 2 persen dari potensinya, zakat tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2017, zakat tercatat mencapai 6,060 miliar rupiah, dengan total distribusi zakat mencapai 66 persen. Teknologi dan inovasi berbasis aplikasi saat ini juga telah mendukung pengembangan sistem pengumpulan zakat. Ke depan, pemanfaatan zakat dan wakaf untuk mendorong kegiatan produktif masyarakat perlu terus didorong agar pembangunan ekonomi yang inklusif dapat terwujud sehingga tingkat kemiskinan serta ketimpangan dapat ditekan.

Strategi Pemerintah untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo menyampaikan dua strategi utama yang ditempuh pemerintah dalam upaya melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Strategi jangka menengah yang ditempuh pemerintah difokuskan pada sejumlah agenda nasional. Pemerintah berfokus untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan.

Untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 % dari APBN tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5,6 % dari APBN untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif. Selain itu, anggaran tersebut juga diarahkan untuk melakukan transformasi pada sistem kesehatan. Mendorong

berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Strategi selanjutnya berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah mengalokasi anggaran yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar hingga mendukung pengerjaan proyek strategis termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.

Selanjutnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya seperti dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

Strategi lainnya yaitu berfokus untuk pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen yang diharapkan akan

meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Pengembangan Ekonomi Keummatan

Sektor UMKM mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif di tanah air. Berdasarkan piramida struktur pelaku usaha di Indonesia di dominasi oleh UMKM (99%), dengan kontribusi sebesar 62% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2018. UMKM Indonesia menyumbang hampir 97% pekerjaan rumah tangga dan 56% dari total investasi bisnis, dengan penyerapan lapangan kerja sebanyak 97% dari total angkatan kerja. Di sisi lain, kontribusi UMKM terhadap ekspor belum dapat memberikan dampak yang signifikan yaitu baru mencapai 14% terhadap ekspor nasional. Konsern atau harapan utama dari keberadaan UMKM adalah bagaimana mengoptimalkan jumlah UMKM yang besar sehingga dapat berkontribusi secara lebih maksimal terhadap PDRB dan ikut mendukung penciptaan lapangan kerja.

Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh UMKM nasional, baik konvensional maupun syariah, adalah: (i) perluasan akses pasar: jangkauan pasar sebagian besar UMKM adalah pasar lokal di tingkat kabupaten atau kota. Hanya sebagian kecil UMKM dapat menjangkau pasar di tingkat provinsi atau antar provinsi. Hal ini disebabkan keterbatasan akses informasi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas; (ii) keterbatasan kapasitas: UMKM umumnya menghadap keterbatasan faktor-faktor produksi, khususnya faktor modal dan kemampuan manajerial. Hal ini tidak terlepas dari asal muasal UMKM yang berawal dari usaha mikro sehingga sangat bertumpu pada kemampuan perorangan; (iii) tantangan pembiayaan: keterbatasan modal UMKM seharusnya dapat dipenuhi dari pendanaan eksternal. Namun demikian masih terdapat gap antara UMKM dan lembaga pembiayaan formal, khususnya perbankan. Memperhatikan tantangan/permasalahan UMKM tersebut, Pemerintah maupun lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga negara telah berupaya untuk menyusun kebijakan yang dapat mengatasi hal tersebut, dan dari kacamata UMKM juga diketahui bahwa kebijakan tersebut relatif bermanfaat dalam upaya mengatasi kendala dan kelemahan-kelemahan dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Namun demikian, dalam upaya akselerasi kontribusi UMKM terhadap

pertumbuhan ekonomi serta peningkatan nilai tambah UMKM bagi perekonomian nasional, UMKM dan pelaku usaha memandang masih terdapat ruang-ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan tersebut. Perbaikan dan penyempurnaan tersebut utamanya adalah untuk menjembatani gap antara kebijakan tersebut dan kondisi real UMKM.

Selain itu, besarnya populasi konsumen Muslim di Indonesia, UMKM yang bergerak di industri syariah memiliki potensi dan peluang yang sangat besar. UU no. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal, termasuk untuk UMKM serta program subsidi sertifikat halal dari KemenkopUKM dan Pemerintah Daerah Provinsi tertentu yang dapat menjadi landasan untuk UMKM syariah untuk semakin berkembang. Walaupun demikian, sebagian konsumen muslim Indonesia masih dianggap kurang memiliki ownership akan pentingnya konsumsi produk halal. Sementara itu, dari sisi pedagang/ produsen, sebagian besar menyatakan masih terdapat kendala dalam melakukan proses Sertifikasi Halal. Banyak pengusaha UMKM yang merasa sertifikasi halal tersebut mahal biayanya, sehingga pelaku usaha enggan untuk mendapatkannya. Padahal, KemenkopUKM telah mengumumkan kebijakan sertifikasi halal tersebut gratis. Hal ini dapat mengindikasikan masih belum ada koordinasi yang baik antara kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikasi halal secara gratis dengan persepsi pelaku UMKM yang masih menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang memakan waktu dan biaya.

Di era pandemi saat ini, UMKM merupakan jenis usaha yang paling terkena dampak negatif dari krisis kesehatan ini dibandingkan dengan korporasi. Guncangan atau shock pada sektor UMKM terjadi melalui jalur pelemahan permintaan dan kenaikan biaya produksi yang turut memperberat kendala klasik dalam pengembangan UMKM, yaitu pemasaran dan akses keuangan. Seiring dengan terjadinya pelemahan permintaan konsumsi masyarakat, omzet penjualan UMKM turut mengalami penurunan. Kendala perolehan supply bahan baku dan pembatasan distribusi akibat pembatasan sosial pada seluruh daerah berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan biaya pengiriman produk. Kendala UMKM pada kondisi pandemi ini pun menimbulkan penurunan pendapatan yang mengakibatkan terganggunya arus kas (cashflow failure) UMKM. Di sisi lain, kesulitan pembiayaan yang dialami pelaku UMKM

mendorong terjadinya penurunan produksi, pengurangan alokasi biaya pemasaran dan pengurangan tenaga kerja yang masif.

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia membutuhkan strategi terpadu yang mencakup dukungan terhadap UMKM, optimalisasi keuangan syariah, dan transformasi kebijakan publik. Pemerintah telah berupaya mendorong pengembangan ekonomi inklusif melalui berbagai inisiatif seperti indeks ekonomi inklusif, peningkatan akses permodalan, dan program jaminan sosial yang lebih tepat sasaran. Pengelolaan zakat dan wakaf juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, ekonomi inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberdayakan kelompok rentan untuk keluar dari kemiskinan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Daftar Pustaka

https://www.bappenas.go.id/
https://www.presidenri.go.id/
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. 2021. Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal. Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Jakarta Selatan.

Arsitektur Kebijakan Publik untuk Ekonomi Inklusif: Pendekatan Keumatan dalam Era Digital

Kusnul Ciptanila Yuni

Di era globalisasi dan teknologi yang pesat, ekonomi inklusif menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Ekonomi inklusif bertujuan agar manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan seperti kaum miskin, perempuan, dan minoritas. Dengan partisipasi aktif semua pihak, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Kebijakan publik perlu mendukung inklusi ini melalui regulasi yang adil, akses ke sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat agar semua berperan dalam pembangunan ekonomi.[1]

Konsep Dasar Ekonomi Keumatan dan Relevansinya dalam Kebijakan Publik

Ekonomi keumatan merupakan konsep yang berakar dari nilai-nilai agama, khususnya dalam Islam, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan pengentasan kemiskinan. Konsep ini berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Nilai-nilai ini mencakup distribusi kekayaan yang merata, keberpihakan kepada yang lemah, serta penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan beretika.[2]

Dalam konteks kebijakan publik, ekonomi keumatan sangat relevan karena menawarkan alternatif yang lebih adil dan inklusif. Kebijakan publik yang mendukung ekonomi keumatan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat

1 Meilissa Ike Dien Safitri, Candra Fajri Ananda, and Ferry Prasetyia, "Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (June 30, 2021): 85–96, https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339.

2 Saputri Kusumaningrum and Risni Julaeni Yuhan, "Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (July 9, 2019): 1–17, https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150.

dilakukan melalui penguatan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengembangan infrastruktur sosial yang dapat menopang kesejahteraan bersama.[3]

Era Digital sebagai Pendorong Perubahan Sosial dan Ekonomi serta Dampaknya terhadap keumatan

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Digitalisasi telah mempercepat proses transaksi, memperluas akses pasar, dan menciptakan peluang baru bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang. Di sisi lain, transformasi digital juga menuntut adanya penyesuaian dalam kebijakan publik dan strategi ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan digital dan keterbatasan akses teknologi.[4]

Dalam konteks ekonomi keumatan, era digital memberikan peluang besar untuk memperkuat inklusi ekonomi umat. Platform digital dapat digunakan untuk mempermudah akses masyarakat ke layanan keuangan syariah, mendistribusikan dana zakat dan wakaf secara lebih efektif, serta memberdayakan komunitas melalui edukasi dan pelatihan berbasis teknologi. Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan, terutama terkait literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat kurang mampu, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi digital berbasis keumatan.

Dengan demikian, era digital membuka pintu bagi pengembangan ekonomi inklusif berbasis keumatan, tetapi memerlukan kerangka kebijakan publik yang adaptif dan responsif. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk mendukung keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, serta memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses transformasi ini.[5]

---

3 Achmad Muhibin Zuhri, *Beragama di Ruang Digital; Konfigurasi ideologi dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual* (Nawa Litera Publishing, 2021).

4 Fika Diaurrochmah and Mulyanto Mulyanto, "ANALISIS INDEKS PERTUMBUHAN INKLUSIF DI KAWASAN BARAT INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 8, no. 2 (October 29, 2021): 178–95, https://doi.org/10.24815/ekapi.v8i2.26570.

5 Alifiya Nisaul Latifah and Kusnul Ciptanila Yuni, "Employment of Funds of Excellence against Community Enrichment Activities for the Suppression of Stunters," *Terbuka Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (2024): 16–22, https://jurnal.ut.ac.id/index.php/tjeb/article/view/8433.

Peran Kebijakan Publik dalam Pengembangan Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif sendiri merujuk pada sistem ekonomi yang memberikan kesempatan setara bagi semua individu dan kelompok untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti masyarakat miskin, kaum perempuan, dan minoritas.[6]

Peran kebijakan publik dalam ekonomi inklusif meliputi beberapa aspek kunci:

1. Peningkatan akses: Kebijakan publik berfungsi untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, pelatihan, dan modal usaha.
2. Regulasi yang adil: Melalui regulasi yang tepat, kebijakan publik dapat mencegah monopoli ekonomi dan mendorong persaingan yang sehat sehingga peluang ekonomi dapat tersebar secara merata.
3. Pemberdayaan masyarakat: Kebijakan publik dapat memfasilitasi program-program pemberdayaan yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) serta usaha berbasis komunitas.[7]
4. Jaringan pengaman sosial: Kebijakan publik memainkan peran penting dalam menyediakan jaminan sosial yang melindungi kelompok rentan dari risiko ekonomi, seperti pengangguran atau kemiskinan ekstrem.

Dengan kebijakan publik yang tepat, negara dapat mendorong sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

---

6 Tiara Melati and Sulikah Asmorowati, "EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG INKLUSI SOSIAL: TINJAUAN DARI PRESFEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 3 (June 29, 2023): 257–67, https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3453.

7 Kusnul Ciptanila Yuni K et al., "Pengarahan Peningkatan Kapabilitas Usaha Mandiri Bolen Pisang Melalui Marketing Mix Di Desa Bibrik Madiun," *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (December 31, 2023): 117–26, https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i2.5680.

Transformasi Digital: Peluang dan Tantangan bagi Kebijakan Publik

Transformasi digital merupakan perubahan besar dalam cara ekonomi dan masyarakat berfungsi akibat adopsi teknologi digital secara masif. Perkembangan ini menciptakan peluang yang signifikan bagi kebijakan publik dalam memajukan ekonomi inklusif, tetapi juga menghadirkan tantangan-tantangan baru yang harus diatasi.[8]

Peluang:

1. Akses yang lebih luas: Teknologi digital memudahkan akses masyarakat terhadap informasi, layanan publik, dan pasar global. Misalnya, platform e-commerce memungkinkan UKM menjual produk mereka secara global tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang mahal.
2. Peningkatan efisiensi: Digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, seperti dalam sistem pembayaran pajak, distribusi bantuan sosial, atau pengelolaan data kependudukan.
3. Inovasi di sektor keuangan: Fintech dan layanan keuangan berbasis digital memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas, bahkan di daerah terpencil, dengan menyediakan akses mudah ke pinjaman, tabungan, dan investasi.

Tantangan:

1. Ketimpangan digital: Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Ketimpangan dalam infrastruktur internet, keterbatasan literasi digital, dan biaya teknologi masih menjadi kendala utama bagi banyak masyarakat miskin dan daerah terpencil.
2. Regulasi yang tertinggal: Perkembangan teknologi yang pesat sering kali mendahului regulasi pemerintah, sehingga banyak area digital yang belum diatur secara jelas, seperti keamanan data, privasi, dan ekonomi gig (pekerja lepas digital).
3. Pengaruh terhadap lapangan kerja: Digitalisasi juga dapat mengancam pekerjaan konvensional, terutama di sektor manufaktur dan layanan, dengan meningkatnya otomatisasi

8 Melati and Asmorowati, "EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG INKLUSI SOSIAL."

dan penggunaan AI (Artificial Intelligence).[9]

Kebijakan publik yang efektif harus mampu mengatasi tantangan ini dengan merancang regulasi yang fleksibel, memberdayakan masyarakat melalui program literasi digital, serta menyediakan infrastruktur teknologi yang merata.

Pengaruh Digitalisasi terhadap Ekonomi Keumatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Digitalisasi memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi keumatan, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan dan sosial. Ekonomi keumatan, yang berfokus pada keadilan sosial, pemberdayaan umat, serta prinsip keuangan syariah, dapat mengambil manfaat besar dari transformasi digital.

Pengaruh Positif:

1. Inklusi Keuangan Syariah: Teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan bank syariah, untuk memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Platform fintech syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional.
2. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF): Platform digital memudahkan pengumpulan dan penyaluran ZISWAF, sehingga proses distribusi dana untuk kesejahteraan umat menjadi lebih cepat dan transparan.
3. Pemberdayaan UKM Keumatan: Digitalisasi membuka akses bagi usaha kecil berbasis komunitas atau keumatan untuk memasarkan produk mereka melalui platform e-commerce, mempermudah transaksi, dan menjangkau konsumen global.
4. Edukasi dan Literasi: Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan dan syariah di kalangan umat, baik melalui aplikasi pendidikan, webinar, maupun kursus online.[10]

---

9 Hidsal Jamil, "Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia" (OSF, January 22, 2020), https://doi.org/10.31219/osf.io/ks5at.

10 "Redesain Dan Restrukturisasi Organisasi ; Upaya Perbaikan Kinerja Organisasi | Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage," accessed September 5, 2024, http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/manage/article/view/1944.

Tantangan:

1. Literasi Digital: Banyak masyarakat yang terlibat dalam ekonomi keumatan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, sehingga mereka kesulitan memanfaatkan teknologi secara maksimal.
2. Keamanan Data dan Privasi: Penggunaan teknologi digital dalam sektor keuangan syariah menuntut kebijakan yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna serta menjaga transparansi dan akuntabilitas.
3. Adaptasi Nilai-nilai Syariah dalam Teknologi: Digitalisasi membawa tantangan dalam menyesuaikan teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Untuk mengoptimalkan dampak digitalisasi terhadap ekonomi keumatan, kebijakan publik harus berfokus pada penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan literasi digital di kalangan umat, serta regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Konsep Ekonomi Inklusif Berbasis Keumatan

Ekonomi inklusif berbasis keumatan merupakan pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pemerataan manfaat ekonomi yang sejalan dengan ajaran agama, khususnya Islam. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan secara ekonomi, dalam proses pembangunan dan pembagian manfaat ekonomi. Dengan menempatkan prinsip-prinsip keumatan di pusat kebijakan ekonomi, ekonomi inklusif berbasis keumatan bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang adil.[11]

Ekonomi Keumatan: Prinsip, Tujuan, dan Pendekatan

1. Prinsip Ekonomi Keumatan:
   a. Keadilan Sosial: Ekonomi keumatan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, di mana distribusi sumber daya dan kekayaan harus dilakukan secara merata, memastikan

11 Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci, "Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat," *Souvereignty* 2, no. 4 (December 30, 2023): 354–68, https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/980.

bahwa kelompok rentan mendapatkan hak mereka.

b. Kesejahteraan Bersama: Tujuan utama ekonomi keumatan adalah mewujudkan kesejahteraan bersama, yang tidak hanya mencakup kebutuhan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan moral.
c. Kesetaraan Akses: Ekonomi keumatan berusaha menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial untuk semua anggota masyarakat, tanpa memandang status ekonomi atau latar belakang sosial.

2. Tujuan Ekonomi Keumatan:
   a. Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan: Salah satu tujuan utama ekonomi keumatan adalah memberantas kemiskinan melalui distribusi kekayaan yang adil dan menciptakan peluang ekonomi yang setara.
   b. Pemberdayaan Umat: Meningkatkan kemandirian ekonomi umat dengan mengembangkan keterampilan, meningkatkan literasi keuangan, dan memberikan akses kepada sumber daya ekonomi.
   c. Keseimbangan Duniawi dan Akhirat: Selain pertumbuhan ekonomi, ekonomi keumatan juga berfokus pada keseimbangan antara pencapaian material dan nilai-nilai spiritual yang membawa keberkahan.
3. Pendekatan Ekonomi Keumatan:
   a. Prinsip Syariah dalam Ekonomi: Ekonomi keumatan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan.
   b. Partisipasi Komunitas: Pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh komunitas dalam merancang dan menjalankan program-program ekonomi, dengan menekankan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi.
   c. Ekonomi Sosial dan Solidaritas: Ekonomi keumatan mendorong pola ekonomi yang berlandaskan pada solidaritas sosial, di mana individu-individu berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif, bukan hanya keuntungan

pribadi.[12]

Membangun Ekonomi Inklusif: Peran Institusi Keumatan (Masjid, Lembaga Zakat, BMT)

Institusi keumatan, seperti masjid, lembaga zakat, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memainkan peran penting dalam membangun ekonomi inklusif. Mereka berfungsi sebagai katalis dalam proses pemberdayaan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat.

1. Peran Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi:
   a. Sentra Ekonomi Umat: Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pendidikan keuangan, dan inisiatif bisnis kecil.
   b. Distribusi ZISWAF: Masjid berperan dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat memitigasi ketimpangan ekonomi.
   c. Program Sosial: Masjid sering menjadi tempat penyelenggaraan program-program ekonomi sosial, seperti koperasi berbasis masjid atau layanan konsultasi usaha.
2. Lembaga Zakat dan Wakaf:
   a. Pengelolaan Dana Sosial: Lembaga zakat dan wakaf bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari umat untuk pemberdayaan ekonomi melalui program bantuan langsung, pembangunan infrastruktur sosial, atau investasi produktif yang berkelanjutan.
   b. Inisiatif Ekonomi Produktif: Selain distribusi bantuan, lembaga zakat sering kali menjalankan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan pendapatan mereka secara mandiri.
3. Baitul Maal wat Tamwil (BMT):
   a. Penyedia Layanan Keuangan Inklusif: BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah menawarkan layanan perbankan

12 "Kewargaan Inklusif Sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik | Jati | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik," accessed September 5, 2024, https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/13093.

berbasis syariah, termasuk pinjaman dan tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional dapat mengakses layanan keuangan.

b. Pembiayaan Usaha Kecil: BMT memberikan akses modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya dari kalangan umat, untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terjebak pada riba atau ketidakpastian dalam transaksi.

c. Pendidikan Keuangan Syariah: Selain menyediakan layanan keuangan, BMT juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, mengajarkan bagaimana mengelola keuangan secara etis dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Inklusi Keuangan, Pendidikan, dan Teknologi

Pemberdayaan ekonomi umat memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup akses terhadap keuangan, pendidikan, dan teknologi yang semakin relevan di era digital.[13]

1. Inklusi Keuangan Syariah:
   a. Akses Keuangan Bagi Semua: Melalui lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, dan fintech syariah, masyarakat dapat memiliki akses ke layanan keuangan yang etis dan sesuai dengan ajaran agama. Ini mencakup tabungan, pinjaman, dan produk investasi yang dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka.
   b. Crowdfunding Syariah: Platform crowdfunding berbasis syariah dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial atau usaha kecil yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara luas.
2. Pendidikan Ekonomi dan Keterampilan:
   a. Pengembangan Kapasitas Umat: Pendidikan dan pelatihan keterampilan ekonomi sangat penting dalam memberdayakan umat. Ini mencakup pelatihan

13 "Kualitas Pemerintahan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Jawa Timur | Kajian Ekonomi Dan Keuangan," accessed September 5, 2024, https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/581.

kewirausahaan, manajemen keuangan, serta keterampilan teknis yang relevan dengan pasar kerja.

b. Literasi Keuangan Syariah: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manajemen keuangan berdasarkan prinsip syariah, termasuk investasi halal, manajemen utang, dan pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan.

3. Teknologi untuk Pemberdayaan Ekonomi:
   a. Akses Teknologi Digital: Teknologi digital memainkan peran penting dalam memperluas akses umat kepada layanan keuangan, pendidikan, dan pasar. E-commerce, fintech syariah, dan platform edukasi online memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian global.
   b. Platform Digital untuk Pemberdayaan: Platform seperti marketplace syariah atau aplikasi zakat digital memungkinkan umat mengakses produk dan layanan berbasis keumatan dengan lebih mudah dan efisien.

Melalui kombinasi inklusi keuangan, pendidikan, dan teknologi, pemberdayaan ekonomi umat dapat diperkuat sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arsitektur Kebijakan Publik untuk Ekonomi Inklusif

Dalam upaya mendorong ekonomi inklusif berbasis keumatan, peran kebijakan publik sangat penting. Kebijakan publik yang dirancang dengan baik harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, inklusivitas, dan kesejahteraan kolektif, serta menempatkan nilai-nilai keumatan sebagai fondasi untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Desain kebijakan ini harus mencakup semua sektor ekonomi, baik formal maupun informal, serta didukung oleh regulasi dan kebijakan fiskal yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan.

Desain Kebijakan Publik yang Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Keumatan

Desain kebijakan publik untuk ekonomi inklusif berbasis keumatan menitikberatkan pada dua aspek utama: inklusivitas sosial-ekonomi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-

nilai agama. Kebijakan-kebijakan ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal, agar mereka bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Beberapa elemen kunci dalam desain kebijakan ini meliputi:

1. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Umat:
   a. Program Pengembangan Kapasitas: Kebijakan ini berfokus pada peningkatan keterampilan masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu, melalui program pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan pendidikan vokasi.
   b. Infrastruktur Ekonomi Berbasis Komunitas: Kebijakan publik juga harus mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi yang mendukung komunitas lokal, seperti pembangunan pasar tradisional, pusat usaha mikro, serta akses terhadap teknologi dan informasi.
2. Akses terhadap Keuangan dan Sumber Daya:
   a. Pembiayaan Mikro Syariah: Desain kebijakan harus mencakup penyediaan akses pembiayaan syariah bagi usaha mikro dan kecil melalui program-program seperti BMT, koperasi syariah, atau fintech berbasis keumatan.
   b. Dana Sosial Umat: Pemanfaatan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai bagian dari kebijakan redistribusi kekayaan untuk mendukung pembangunan ekonomi umat yang inklusif.
3. Kebijakan Afirmasi bagi Sektor Rentan:
   a. Kebijakan Afirmasi Gender dan Sosial: Mengintegrasikan kebijakan afirmasi yang khusus menargetkan pemberdayaan perempuan, kaum disabilitas, dan masyarakat miskin, untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam arus pembangunan ekonomi.
   b. Sektor Ketenagakerjaan: Kebijakan publik juga harus mencakup akses yang lebih luas terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal bagi kelompok-kelompok rentan, serta melindungi hak-hak pekerja informal.[14]

---

14 "Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Inklusif Di Kota Bekasi | Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Daerah," accessed September 5, 2024, https://jurnal.inovda.org/kdid/article/view/6.

Model-model Kebijakan yang Memperkuat Peran Ekonomi Keumatan di Sektor Formal dan Informal

Ekonomi keumatan memainkan peran penting dalam membangun ekonomi inklusif, baik di sektor formal maupun informal. Untuk memperkuat peran ekonomi keumatan, kebijakan publik harus mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan berbagai lembaga keumatan. Beberapa model kebijakan yang dapat diterapkan meliputi:

1. Penguatan Lembaga Keuangan Syariah di Sektor Formal:
   a. Regulasi Perbankan Syariah: Pemerintah dapat memperkuat sektor formal dengan memperluas peran bank syariah melalui insentif regulasi, serta memperkenalkan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.
   b. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Melalui model kebijakan kolaboratif, sektor swasta dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam memberikan modal usaha, pembiayaan syariah, dan akses ke pasar bagi usaha kecil dan menengah (UKM).[15]
2. Pemberdayaan Sektor Informal melalui Lembaga Keumatan:
   a. Peran BMT (Baitul Maal wat Tamwil): BMT berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani usaha mikro dan informal, menyediakan akses modal dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.
   b. Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi: Model kebijakan yang mendorong masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menjalankan berbagai program, seperti koperasi berbasis masjid, pusat pelatihan keterampilan, dan distribusi dana zakat untuk usaha mikro.
3. Kemitraan Publik-Swasta-Sosial untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat:

   Model Kemitraan Tripartit: Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga sosial keumatan dapat bekerja sama dalam

15 “Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif | Wahyunengseh | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,” accessed September 5, 2024, https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10923.

mengembangkan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ini termasuk kolaborasi dalam penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil.

Regulasi dan Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan

Regulasi dan kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam mendorong ekonomi inklusif berbasis keumatan, terutama dalam hal redistribusi kekayaan dan alokasi sumber daya. Kebijakan fiskal yang pro-inklusif harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan pendapatan kelompok miskin, serta memperkuat peran institusi keumatan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

1. Regulasi Pengelolaan Dana ZISWAF:
    a. Pengaturan Hukum Zakat dan Wakaf: Regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat dan wakaf dikelola secara transparan dan akuntabel,[16] serta disalurkan secara efektif kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Ini termasuk pembentukan lembaga pengawas independen yang mengawasi distribusi dana ZISWAF.[17]
    b. Insentif Pajak bagi Donatur ZISWAF: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi individu atau perusahaan yang secara rutin menyumbangkan zakat, infaq, dan wakaf, sehingga memperbesar jumlah dana yang tersedia untuk program-program pengentasan kemiskinan.[18]
2. Kebijakan Fiskal untuk Pengentasan Kemiskinan:
    a. Subsidi untuk Masyarakat Miskin: Kebijakan subsidi yang tepat sasaran harus diterapkan untuk kelompok miskin,

16 Vika Annisa Qurrata et al., "Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare: Challenges and Opportunities" 10, no. 1 (2021).

17 Hajah Mustafa Mohd Hanefah et al., "Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysian and Singapore," *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, January 1, 2011, 89–104, https://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/133.

18 "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal Daerah, Dan Elastisitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Inklusif Indonesia | Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)," accessed September 5, 2024, https://journal3.um.ac.id/index.php/fe/article/view/627.

baik dalam bentuk bantuan langsung tunai, subsidi pangan, maupun akses pendidikan gratis. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.

b. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi untuk Daerah Tertinggal: Pemerintah perlu memperkuat investasi di daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, seperti jalan, akses internet, dan pasar lokal.[19]

3. Pajak Progresif dan Redistribusi Kekayaan:
   a. Penerapan Pajak Progresif: Pajak progresif dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, dengan memastikan bahwa kelompok yang lebih mampu membayar pajak yang lebih besar. Pendapatan pajak ini kemudian dapat dialokasikan untuk program-program sosial dan ekonomi yang mendukung kelompok miskin.
   b. Reformasi Kebijakan Pajak UMKM: Kebijakan pajak yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak membebani usaha kecil dengan pajak yang terlalu tinggi, serta memberikan insentif bagi UMKM yang berkontribusi pada ekonomi inklusif.

Dengan desain kebijakan publik yang tepat, serta regulasi dan kebijakan fiskal yang mendukung, ekonomi inklusif berbasis keumatan dapat berkembang dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di sektor informal dan kelompok yang selama ini terpinggirkan.[20]

---

19 Kusumaningrum and Yuhan, “Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya.”

20 Loso Judijanto et al., “REKAYASA SOSIAL EKONOMI: PENINGKATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (January 10, 2024): 223–29, https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24226.

Digitalisasi sebagai Pendorong Utama dalam Modernisasi Ekonomi Keumatan

Di era digital, perkembangan teknologi menjadi salah satu pendorong utama dalam modernisasi dan transformasi ekonomi, termasuk ekonomi berbasis keumatan. Digitalisasi telah membuka peluang baru bagi pemberdayaan umat dan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat secara lebih inklusif. Meskipun potensi besar terbuka, tantangan juga muncul dalam upaya mengoptimalkan digitalisasi untuk memperkuat ekonomi keumatan.[21]

Transformasi digital tidak hanya mengubah cara bisnis dilakukan, tetapi juga membuka peluang bagi komunitas berbasis keumatan untuk memodernisasi berbagai aspek ekonomi mereka. Dengan memanfaatkan teknologi digital, ekonomi keumatan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi seperti *e-commerce*, *fintech* syariah, dan aplikasi digital lainnya berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas ekonomi umat.

21 Muhammad Dedy Miswar et al., *Peta Jalan Kepemimpinan HMI* (Nas Media Pustaka, 2023).

Daftar Pustaka

Diaurrochmah, Fika, and Mulyanto Mulyanto. "ANALISIS INDEKS PERTUMBUHAN INKLUSIF DI KAWASAN BARAT INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 8, no. 2 (October 29, 2021): 178–95. https://doi.org/10.24815/ekapi.v8i2.26570.

Hanefah, Hajah Mustafa Mohd, Abdullaah Jalil, Asharas Mohd Ramli, Hisham Sabri, Norhaziah Nawai, and Syahidawati Shahwan. "Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysian and Singapore." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, January 1, 2011, 89–104. https://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/133.

"Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Inklusif Di Kota Bekasi | Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Daerah." Accessed September 5, 2024. https://jurnal.inovda.org/kdid/article/view/6.

Jamil, Hidsal. "Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia." OSF, January 22, 2020. https://doi.org/10.31219/osf.io/ks5at.

Judijanto, Loso, D. Yadi Heryadi, R. Sally Marisa Sihombing, Yenni Kurnia Gusti, and Ramli Semmawi. "REKAYASA SOSIAL EKONOMI: PENINGKATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (January 10, 2024): 223–29. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24226.

K, Kusnul Ciptanila Yuni, Imam Sopingi, Peni Haryanti, Athi' Hidayati, Anita Musfiroh, Lailatul Maghfiroh Putri Rifardi, and Lutfia Sobaroh. "Pengarahan Peningkatan Kapabilitas Usaha Mandiri Bolen Pisang Melalui Marketing Mix Di Desa Bibrik Madiun." *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (December 31, 2023): 117–26. https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i2.5680.

"Kewargaan Inklusif Sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik | Jati | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik." Accessed September 5, 2024. https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/13093.

"Kualitas Pemerintahan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Jawa Timur | Kajian Ekonomi Dan Keuangan." Accessed September 5, 2024. https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/581.

Kusumaningrum, Saputri, and Risni Julaeni Yuhan. "Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (July 9, 2019): 1–17. https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150.

Latifah, Alifiya Nisaul, and Kusnul Ciptanila Yuni. "Employment of Funds of Excellence against Community Enrichment Activities for the Suppression of Stunters." *Terbuka Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (2024): 16–22. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/tjeb/article/view/8433.

Melati, Tiara, and Sulikah Asmorowati. "EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG INKLUSI SOSIAL: TINJAUAN DARI PRESFEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK." *Jurnal Darma Agung* 31, no. 3 (June 29, 2023): 257–67. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3453.

"Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif | Wahyunengseh | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik." Accessed September 5, 2024. https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10923.

Miswar, Muhammad Dedy, Edy Sofyan, A. Ikram Rifqi, Yudhi Abdi Wibowo, Syamsul Asri, Hajriana, and Muh Aswar Darwis. *Peta Jalan Kepemimpinan HMI*. Nas Media Pustaka, 2023.

Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci. "Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat." *Souvereignty* 2, no. 4 (December 30, 2023): 354–68. https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/980.

"Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal Daerah, Dan Elastisitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Inklusif Indonesia | Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)." Accessed September 5, 2024. https://journal3.um.ac.id/index.php/fe/article/view/627.

Qurrata, Vika Annisa, Ermita Yusida, Nor Ermawati Hussain, Santi Merlinda, Vidya Purnamasari, and Linda Seprillina. "Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare:

Challenges and Opportunities" 10, no. 1 (2021).
"Redesain Dan Restrukturisasi Organisasi ; Upaya Perbaikan Kinerja Organisasi | Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage." Accessed September 5, 2024. http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/manage/article/view/1944.
Safitri, Meilissa Ike Dien, Candra Fajri Ananda, and Ferry Prasetyia. "Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (June 30, 2021): 85–96. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339.
Zuhri, Achmad Muhibin. *Beragama di Ruang Digital; Konfigurasi ideologi dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual*. Nawa Litera Publishing, 2021.

Strategi KOIN NU Sebagai Gerakan Berinfaq dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Siti Masruroh

Salah satu budaya yang melekat dalam masyarakat Indonesia adalah kerelaannya dalam hal berbagi manfaat (*utility sharing*) kepada sesama. Berdasarkan ragam jenisnya, *utility sharing* dikalangan Muslim diantaranya adalah kewajiban zakat dan anjuran Infaq dan sedekah. Anjuran Infaq dan sedekah ini sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 megenai Pengelolaan Zakat, Infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha selain zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umum sedangkan harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang individu atau badan usaha selain zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umum disebut sedekah[22]. Di Indonesia banyak lembaga pengelola ZIS baik milik swasta dan pemerintah. Salah satunya adalah LAZISNU yang merupakan lembaga pengelola zakat di Indonesia yang mayoritas memiliki pengikut terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama . LAZISNU ini merupakan Badan usaha milik swasta yang dimiliki oleh NU.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang sudah memberikan banyak kontribusi yang signifikan terhadap bangsa Indonesia. Organisasi sosial yang saat ini berdiri dan dimiliki oleh NU adalah LAZISNU. LAZISNU merupakan lembaga ZIS yang didirikan oleh swasta. Saat ini LAZISNU memiliki program yang disebut Program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (Koin NU) yang merupakan gerakan masyarakat Nahdlatul Ulama untuk bersedekah dengan mengunakan uang logam. Cara ini efektif untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinfaq. NU Care LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama'. NU Care LAZISNU didirikan pada tahun 2004 sebagai sarana dalam membantu kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Muktamar NU ke 31 di Boyolali Jawa tengah. NU Care

22 Muhammad Khaerul Muttaqien dan Tajudin Mas'ud, "Kampanye Infak di Media Sosial dan Niat Perilaku Infak Masyarakat Saat Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 1 (24 Juli 2021): 1–16, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.446.

LAZISNU ini secara yuridis formal di sahkan oleh SK Menteri Agama No 89 Tahun 2022 dalam melakukan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat. NU Care LAZISNU memiliki tujuan dalam membantu kesejahteraab dan kemandirian umat, mengangkat nilai sosial dengan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah serta wakaf (Ziswaf)[23].

Saat ini NU-Care Lazisnu Jawa Timur telah mencatat bahwa penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tahun 2023 sebesar 25,9 Miliar. Program pendistribusian bantuan Lazisnu dibagi menjadi 5, yaitu Nu Care Berdaya, NU Care Cerdas, NU Care Sehat, NU Care Damai, NU Care Hijau. Peningkatan penerimaan ZIS di Lazisnu dikarenakan adanya peran kiai dan manajemen yang profesional serta adanya SDM yang mumpuni[24]. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 333 Tahun 2015 pemerintah sudah memberikan izin pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang disahkan oleh pemerintah apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga tersebut memiliki tugas yaitu mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)[25]. Hingga Februari 2024, terdapat 170 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berizin dan diakui oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan data Kementerian Agama yang dirilis pada Februari 2024 bahwa daftar Lembaga Amil Zakat LAZ) telah memiliki izin operasional. Dari 170 LAZ yang sudah memiliki izin terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, 45 LAZ yang sudah memiliki izin sebagai LAZ yang berskala nasional yang memiliki cakupan dan pengaruh yang lebih luas di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, 39 LAZ yang memiliki izin berskala provinsi yang memiliki fokus pada pelayanan ditingkat provinsi untuk memastikan zakat dapat disalurkan dengan tepat dan efesien. Ketiga, 86 LAZ yang memiliki izin LAZ yang berskala kabupaten/kota yang memberikan layanan

---

23 LAZISNU, “Annual Report 2022 NU Care-LAZISNU,” 2022.

24 Setiawan, Kendy, “NU-Care Lazisnu,” *Rp25,9 Miliar Terhimpun NU Care-LAZISNU Jatim Sepanjang 2023*, 16 Februari 2024, https://nucare.id/news/rp25,9_miliar_terhimpun_nu_care_lazisnu_jatim_sepanjang_2023.

25 Mahfudhotin dan Rifda Lulus Madani, “Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk),” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 2, no. 1 (22 Juni 2022): 1–21, https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i1.195.

zakat yang berfokus di masyarakat yang berada di tingkat kabupaten/ kota. Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai dengan UU Zakat No 23 Tahun 2022, maka wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat[26].

Melihat potensi tersebut, maka penting penulis untuk menggali dan menganalisis lebih mendalam mengenai strategi KOIN NU Sebagai Gerakan Berinfaq dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat. Potensi dana Infaq yang dikelola oleh pemerintah melalui lembaga BAZNAS maupun LAZNAS yang dikelola oleh swasta penting untuk dikelola dengan baik agar pendistribusiannya tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh LAZISNU yang mengelola dana Infaq melalui program nya yang disebut Program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (Koin NU). Maka hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama salah satunya melalui Infaq yang sudah disalurkan ke lembaga ZIS.

Program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (Koin NU)

Infaq berasal dari *anfaqa* memiliki arti membelanjakan sesuatu (harta) untuk kepentingan tertentu. Arti Infaq menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, serta nafkah. Definisi Infaq sejalan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana Infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh individu maupun badan usaha selain zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umum[27]. Allah memerintahkan setiap hambanya agar menyisihkan hartanya untuk berinfaq yang dalam hal ini masuk dalam kebaikan, dan Allah mencintai hambanya yang melakukan kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 133-134. Yang artinya: "*Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menginfakkan (hartanya) baik di waktu senang atau di waktu susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan*

26 Setiawan, Kendy, "NU Care-LAZISNU, LAZ Nasional Berizin Resmi Pemerintah," 27 Juni 2024, https://nucare.id/news/nu_care_lazisnu_laz_nasional_berizin_resmi_pemerintah.

27 Suprihantosa Sugiarto dan Nurul Aulia Febriyani, "MODEL PENGHIMPUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA UMAT MELALUI GERAKAN KOIN NU PEDULI," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (1 Juni 2021), https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i1.88.

memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS. Ali Imran: 133-134).

Khodijah (2020) menyebutkan bahwa Infaq adalah salah satu konsep penting dalam perekonomian Islam yang memiliki dampak signifikan dalam membangun ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berbasis kepedulian sosial. Dalam konteks ekonomi, Infaq memiliki arti yang relevan. Pertama, Infaq berperan dalam membangun keadilan sosial dan pendistribusia kekayaan yang adil. Dengan memberikan infaq, individu yang memiliki kelebihan harta didorong untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, infaq berkontribusi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang dan mengatasi ketimpangan sosial[28]

Gerakan Koin NU yang merupakan salah satu program LAZISNU. Kotak Infaq NU (Koin NU) adalah kotak tempat pengumpulan koin (uang logam) dari rumah-rumah Nahdliyin dengan harapan bahwa warganya dapat mengisi kotak tersebut dengan koin (uang logam) setiap hari yang akan dikumpulkan setiap satu bulan sekali oleh petugas LAZISNU yang sudah ditentukan. Gerakan ini diprakarsai oleh KH. Said Aqil Siroj pada 14 April 2017 di Sragen Jawa Tengah. Program Gerakan koin ini disalurkan dengan beragam cara, yaitu pemberian bantuan pada fakir miskin, memberi pengobatan gratis, pemberian beasiswa kepada anak yatim, pemberian bantuan untuk wirausaha bagi kaum fakir miskin dan dhuafa, pemberian bantuan air bersih, pemberian bantuan tempat sampah bagi masjid[29].

Sari, Muchtharom dan Sifa (2021) mengatakan bahwa program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (Koin NU) adalah gerakan masyarakat Nahdlatul Ulama dengan tujuan bersedekah dengan menggunakan uang logam. Pengumpulan ini dilaksanakan dengan cara menyebar kotak infaq berbentuk persegi ke seluruh masyarakat yang memiliki keinginan untuk berinfaq. Dengan adanya gerakan kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (Koin NU), maka masyarakat menjadi lebih mudah

28 Sonia Silastia dkk., "Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara," Mei 2023, 393–413.

29 Intan Putri Nazila, "Strategi KOIN NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat Dan Berinfaq" 6, no. 1 (2023).

dan ringan untuk bersedekah. Adanya gerakan kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (Koin NU) diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul seperti Masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan siaga bencana[30].

Strategi Pengelolaan Koin NU dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan yang mencapai sasaran khusus. Pengelolaan adalah proses menjalankan aktivitas dengan memobilisasi sumber daya manusia lainnya, membantu merumuskan tujuan dan kebijakan organisasi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Manajemen pengelolaan dapat berhasil dengan mengikuti langkah-langkah seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang membentuk suatu sistem manajemen. Prosedur pengelolaan infaq juga diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yakni UU No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014[31]. Jadi Strategi pengelolaan Koin NU adalah rencana yang cermat untuk mencapai kemaslahatan umat dengan menjalankan aktivitas yang sudah dirumuskan dan di lakukan pengawasan oleh Nahdlatul Ulama. Gerakan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan inisiatif yang dilakukan oleh NU, organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Islam yang berbasis di Indonesia dan memiliki anggota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam menyebarkan Islam yang moderat dan cinta damai. Strategi pengelolaan Koin Nu di bagi menjadi:

a. Pengumpulan Dana (Fundraising) Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengumpulan merupakan proses, cara pengumpulan, penghimpunan, pengarahan. *Fundraising* dalam Kamus Inggris berarti pengumpulan dana, sedangkan

30 Ansori Yahya, Khoirul Abror, dan Erike Anggraeni, "STRATEGI DAN TANTANGAN PENGUMPULAN DANA HASIL KOIN NU PADA UPZIS NU KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR," *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (15 Juni 2022): 72–88, https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.734.

31 Mahfudhotin dan Madani, "Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk)."

orang yang mengumpulkan dana disebut dengan *Fundraiser*. Fanani (2010) mengatakan bahwa Fundraising merupakan suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik dengan individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah yang dipakai untuk membiayai program dan kegiatan operasional dalam lembaga dengan tujuan agar dapat mencapai visi dan misi lembaga tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan Fundraising dapat dilakukan melalui 4 cara[32], yaitu:

1. Face to face, yaitu pertemuan secara langsung dengan 2 orang atau lebih antara fundraiser dan calon donatur untuk menawarkan program kerja;
2. Direct mail, merupakan surat yang bertuliskan tawaran untuk menyumbang untu didistribusikan dalam menjaring donatur baru, up date donatur, memperbesar jaringan antar donatur;
3. Special event, merupakan kegiatan menggalang dana dengan cara mengadakan acara-acara khusus, dengan memanfaatkan kegiatan tertentu yang dihadiri oleh banyak orang untuk menggalang dana;
4. Campaign, merupakan menggalang dana kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti poster, internet, media elektronik maupun pamflet untuk komunikasi terkait program maupun lainnya.

Kegiatan Fundraising dapat dilakukan secara[33]:

1. Langsung (direct), merupakan metode yang digunakan dengan cara melibatkan muzakki secara langsung yaitu penghimpunan dana yang langsung mendapat respon dari muzakki. Metode langsung (direct) dilakukan dengan dua cara:
   - Luar jaringan (*via offline*), merupakan metode interaksi langsung secara *offline* yang dilakukan oleh amil dengan donatur yang melibatkan pertemuan tatap muka atau

32 Ansori Yahya, Khoirul Abror, dan Erike Anggraeni, "STRATEGI DAN TANTANGAN PENGUMPULAN DANA HASIL KOIN NU PADA UPZIS NU KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR."

33 Muhammad Agus Futuhul Ma'wa dan Ahmad Surohman, "STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI PW NU CARE-LAZISNU D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2019" 7, no. 2 (2021).

fisik. Salah satu contoh metode ini adalah Pertama, donatur mengunjungi kantor atau mereka bertemu dengan petugas amil untuk memberikan sumbangan mereka. Setelah itu, bagian keuangan mencatat transaksi tersebut menggunakan aplikasi NUCOS (Sistem Informasi NU Care Operating System), dan donatur menerima kwitansi sebagai bukti transaksi mereka. Kedua, dengan layanan Go-ZIS (Layanan Jemput ZIS), adalah layanan jemput Zakat, Infaq, dan Sedekah. Layanan ini dilaksanakan dengan cara menghubungi CS ke LAZISNU yang dituju. Ketiga, kerjasama dengan pengusaha, dan organisasi seperti Alfamart, Bulog, Alesa Hijab, dan lain sebagainya. Keempat dapat dilakukan dengan kegiatan yang memiliki manfaat bagi lembaga dengan menjalin loyalitas dengan donatur, biasanya dengan pengaian rutin, seminar dan workshop. Keenam, dengan surat cetak yang dikirim ke donatur baik secara perorangan maupun lembaga.

- Dalam Jaringan (*via online*), merupakan cara yang dilakukan dengan donatur dengan emdia atau alat perantara seperti sosial media melalui gadget. Adapun macam-macam metode online: Pertama, berupa email yaitu media yang mengirim pesan elektronik. Kedua, melalui whatsapp bussiness messanger yang merupakan aplikasi pesan, panggilan, dan media yang digunakan untuk memudahkan komunikasi. Ketiga melalui FB yang bertujuan memberikan informasi kegiatan fundraising LAZISNU yang bersangkutan. Keempat media sosial berupa twitter, Instagram, telepon call center LAZISNU dan sosial media lainnya yang mendukung informasi terkait Fundraising ZIS.

2. Tidak langsung (*indirect*), merupakan metode yang digunakan dengan tidak melibatkan muzakki secara langsung dengan artian bahwa penghimpunannya dilakukan dengan tidak langsung mendapatkan respon dari muzakki secara langsung. Metode yang dilakukan melalui 2 cara:
   - Luar Jaringan (*via offline*), merupakan cara yang dilakukan amil dengan berinteraksi kepada muzakki

menggunakan bantuan alat/media publikasi secara fisik yang diletakkan ditempat-tempat yang strategis. Seperti majalah cetak, buletin media, poster/brosur, banner/ spanduk. Koin NU, dan lain lain.

- Dalam Jaringan (*via online*), merupakan interaksi yang dilakukan amil bersama muzakki dengan media atau melalui gadget. Seperti website, kampanye, crowfunding atau iuran dana, Quick response (QRIS), dan lain-lain.

b. Distribusi dan Pendayagunaan, Kasanah (2021) mengatakan bahwa distribusi adalah usaha untuk memudahkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sementara itu, pendayagunaan merupakan kemampuan untuk menjalankan tugas secara efektif guna mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan. Dalam konteks manajemen zakat, infak, dan sedekah, ini mencakup semua proses seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengalokasikan dana tersebut dengan tepat agar dapat memberikan manfaat kepada penerima yang membutuhkan. Mubasirum (2013) mengatakan bahwa Distribusi Zakat, Infaq, dan Shadaqoh dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu konsumtif dan produktif. Metode konsumtif adalah ketika harta Zakat, Infaq, dan Shadaqoh diberikan langsung kepada penerima yang berhak untuk digunakan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi mereka. Di sisi lain, metode produktif berarti harta Zakat, Infaq, dan Shadaqoh tidak langsung diberikan kepada penerima, melainkan diinvestasikan terlebih dahulu oleh mustahiq sendiri atau lembaga amil untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi, seperti hasil usaha atau produksi[34].

c. Pengawasan dan Pelaporan, Pengawasan distribusi dan pemanfaatan dana Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (KOIN NU) dilakukan secara kontinu selama proses distribusi serta pemanfaatan dana. Tujuan utama pengawasan adalah untuk mengevaluasi apakah pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana dari KOIN NU telah sesuai dengan ketentuan

34 Ansori Yahya, Khoirul Abror, dan Erike Anggraeni, "STRATEGI DAN TANTANGAN PENGUMPULAN DANA HASIL KOIN NU PADA UPZIS NU KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR."

yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. Pengelolaan dana dari Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (KOIN NU) harus dilakukan secara transparan yang mengharuskan adanya pengawasan program melalui pelaporan bersama[35]. Dalam Buku Pedoman Gerakan Koin NU Lampung Timur (2020) mengatakan bahwa setiap Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (UPZIS NU) pada setiap tingkatan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Setiap hasil perolehan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di desa harus dilaporkan kepada pengurus UPZIS NU tingkat kecamatan dan kabupaten setelah selesai perhitungan;
2. UPZIS NU desa harus membuat laporan tertulis secara tiga bulanan mengenai semua kegiatan UPZIS NU di desa dan kecamatan kepada UPZIS NU Kabupaten;
3. UPZIS NU desa wajib menyusun Laporan Akhir Tahun dan mengirimkannya kepada pengurus UPZIS NU tingkat kecamatan dan kabupaten yang akan dijadikan bagian dari kegiatan RAKORCAB NU Care LAZISNU Lampung Timur.

Strategi yang dilakukan dalam mengelola KOIN NU berupa pengumpulan dana, distribusi dan pendayagunaan serta pengawasan dan pelaporan merupakan rangkaian strategi yang harus dilakukan oleh lembaga NU atau LAZISNU untuk mencapai tujuannya. Sehingga dengan strategi tersebut banyak umat yang terbantu dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Muslim.

Dalam Pasal 1 ayat 3 UU No 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat maka Infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha selain zakat untuk kemaslahatan umum. Maka dari itu pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Infaq adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu yang tidak terikat syarat tertentu. Infaq tidak mengenal nisab dan haul seperti zakat. Infaq dapat dilakukan oleh siapapun, dalam waktu kapanpun, saat berkecukupan maupun kekurangan sebagaimana disebutkan dalam Al Quran[36]: Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan*

---

35 Ansori Yahya, Khoirul Abror, dan Erike Anggraeni.

36 Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin*, Cetakan Pertama, 2021.

orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan". (QA. Ali Imran: 134).

Dalam mencapai kemaslahatan umat melalui koin NU maka diperlukan komitmen LAZISNU dan masyarakat untuk saling membantu agar program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. *Maslahah* disini menurut Imam Al Ghazali[37] merupakan upaya dalam memelihara tujuan dari hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda serta hal ini dimaksudkan untuk memelihara dari tujuan hukum Islam yang disebut *maslahah*. Kemaslahatan umat yang merupakan hal yang ingin diwujudkan dalam strategi koin NU ini yang artinya bahwa Dana Infaq yang diperoleh dari Koin NU ini dapat memelihara agama umat, jiwa umat, akal umat, keturunan umat dan harta benda umat. Perwujudan dari kemaslahatan umat ini adalah hal yang diharapkan dari lembaga LAZISNU melalui programnya KOIN NU untuk umat.

Infaq juga dapat dialokasikan untuk kepentingan individu atau umat, seperti masjid atau lembaga, seperti pembiayaan administrasi atau memberi bantuan kepada pengurusnya. Infaq berbeda dengan wakaf karena tidak memerlukan perlindungan mengenai keberlangsungan barangnya. Al-Qur'an mengarahkan terdapat dua jenis infaq: pertama, Infaq yang wajib dilaksanakan secara bersama-sama; kedua, infaq sunnah yang diberikan secara sukarela. Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran[38]: Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezeki hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*". (QS. Al Talaq: 7).

Ayat lain juga menyebutkan: Artinya: "*Dan belanjakanlah (harta bendamu" di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*". (QS. Al Baqarah: 195)

---

37 Hj Nur Asiah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI" 18 (2020).

38 Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin*.

Dari pemahaman ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa infaq wajib berarti mengeluarkan harta untuk hal-hal yang menjadi kewajiban, seperti membayar zakat, mahar, menafkahi istri dan anak-anak, menafkahi istri yang baru diceraikan namun masih dalam masa iddah, membayar kafarat, serta memenuhi nazar. Sedangkan infaq sunah sukarela berarti memberikan harta untuk tujuan sedekah yang tidak termasuk dalam kategori perintah wajib, seperti infaq untuk jihad, membantu fakir miskin yang membutuhkan, atau menyumbangkan dana untuk korban bencana[39].

Peruntukan Infaq melalui koin NU merupakan salah satu program yang dipilih yang peruntukannya memiliki nilai positif bagi umat. Bersama dengan masyarakat maka program yang diprakarsai oleh NU ini dapat lebih memberikan manfaat kepada umat baik secara individu maupun kelompok. Sehingga kemaslahatan umat dapat terwujud sehingga banyak orang yang akan terbantu dengan adanya program ini.

Kesimpulan

Strategi KOIN NU sebagai gerakan berinfaq melalui Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU) menjadi salah satu inisiatif penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Program ini berhasil menggalang dana dari masyarakat Nahdlatul Ulama dengan cara yang sederhana namun efektif, yaitu melalui pengumpulan uang logam di rumah-rumah Nahdliyin. Dana yang terkumpul kemudian didistribusikan untuk berbagai kegiatan sosial seperti bantuan fakir miskin, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Keberhasilan strategi ini terletak pada pengelolaan dana yang transparan, peran aktif kiai dan pengelola, serta partisipasi masyarakat luas. Melalui KOIN NU, NU Care LAZISNU mampu mengoptimalkan potensi infaq sebagai bagian dari kebaikan sosial, sekaligus memperkuat solidaritas umat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pengelolaan infaq yang baik dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan umat dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

39 Kasanah.

Daftar Pustaka

Ansori Yahya, Khoirul Abror, dan Erike Anggraeni. “STRATEGI DAN TANTANGAN PENGUMPULAN DANA HASIL KOIN NU PADA UPZIS NU KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR.” *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (15 Juni 2022): 72–88. https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.734.

Asiah, Hj Nur. “MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI” 18 (2020).

Kasanah, Nur. *Model Filantropi Nahdliyin*. Cetakan Pertama., 2021.

Mahfudhotin, dan Rifda Lulus Madani. “Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk).” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 2, no. 1 (22 Juni 2022): 1–21. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i1.195.

Ma’wa, Muhammad Agus Futuhul, dan Ahmad Surohman. “STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI PW NU CARE-LAZISNU D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2019” 7, no. 2 (2021).

Muttaqien, Muhammad Khaerul, dan Tajudin Mas’ud. “Kampanye Infak di Media Sosial dan Niat Perilaku Infak Masyarakat Saat Pandemi Covid-19.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 1 (24 Juli 2021): 1–16. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.446.

Nazila, Intan Putri. “Strategi KOIN NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat Dan Berinfaq” 6, no. 1 (2023).

Setiawan, Kendy. “NU Care-LAZISNU, LAZ Nasional Berizin Resmi Pemerintah,” 27 Juni 2024. https://nucare.id/news/nu_care_lazisnu_laz_nasional_berizin_resmi_pemerintah.

———. “NU-Care Lazisnu.” *Rp25,9 Miliar Terhimpun NU Care-LAZISNU Jatim Sepanjang 2023*, 16 Februari 2024. https://nucare.id/news/rp25,9_miliar_terhimpun_nu_care_lazisnu_jatim_sepanjang_2023.

Silastia, Sonia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, dan Yayat Suharyat. “Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara,” Mei 2023, 393–413.

Sugiarto, Suprihantosa, dan Nurul Aulia Febriyani. "MODEL PENGHIMPUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA UMAT MELALUI GERAKAN KOIN NU PEDULI." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (1 Juni 2021). https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i1.88.

NU DALAM BINGKAI POLITIK, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Partisipasi NU dalam politik, hukum, dan hak asasi manusia merefleksikan komitmen organisasi ini terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak warga negara. NU berperan sebagai penjaga moral dan etika dalam sistem kenegaraan, menawarkan perspektif nilai yang berakar pada tradisi Aswaja sebagai jawaban atas tantangan kontemporer.

Tradisi NU, Fiqh Sosial, dan Hukum (Fondasi Keadilan untuk Masyarakat Modern)

Anjar Kususiyanah

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang menjadi dasar dari berbagai ajaran dan aturan hukum syariah. Nilai keadilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik, dan sangat relevan dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks masyarakat modern, di mana tantangan ketidakadilan semakin kompleks, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual. Di sinilah pentingnya **fiqh sosial**, sebuah pendekatan hukum Islam yang berupaya merespons perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat secara lebih fleksibel. Fiqh sosial menawarkan solusi terhadap berbagai masalah keadilan yang dihadapi masyarakat kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan hak asasi manusia.

Di Indonesia, **Nahdlatul Ulama (NU)** sebagai organisasi Islam terbesar, telah lama dikenal dengan tradisi hukumnya yang kaya, berpijak pada landasan syariah namun senantiasa adaptif terhadap dinamika sosial. Tradisi NU berakar pada **fiqh ala madzahib al-arba'ah** (empat mazhab) yang dipadu dengan pendekatan **ta'ashub muktadil** atau moderasi dalam bermazhab, di mana pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai konteks lokal. Melalui **fiqh sosial**, NU tidak hanya berpegang pada teks-teks klasik, tetapi juga merumuskan hukum yang responsif terhadap tantangan-tantangan keadilan sosial. Dalam konteks ini, tradisi **bahsul masail**, forum diskusi dan pengambilan keputusan hukum di kalangan ulama NU, menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam diperkaya dengan nuansa lokal dan tanggap terhadap permasalahan sosial.

Sebagai bagian dari tradisinya, NU memiliki komitmen kuat terhadap **ukhuwah islamiyah**, **ukhuwah wathaniyah**, dan **ukhuwah basyariyah**, tiga pilar persaudaraan yang menekankan keadilan sosial tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh masyarakat tanpa memandang agama, suku, dan latar belakang budaya. NU memainkan peran penting dalam menjaga

harmoni sosial, terutama dengan mengadopsi tradisi-tradisi seperti **tahlilan**, **haul**, dan **manakiban**, yang selain berfungsi sebagai bentuk ibadah, juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Tradisi-tradisi ini, yang bersifat kolektif dan berorientasi pada keadilan sosial, mempertegas bahwa pendekatan NU terhadap hukum Islam adalah menyeluruh, mencakup aspek spiritual sekaligus sosial.

Pendekatan NU yang moderat dan responsif terhadap perubahan zaman menjadikannya sebagai salah satu fondasi penting dalam menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan di Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, keadilan sosial menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan dalam berbagai lapisan masyarakat. **Fiqh sosial** dalam tradisi NU bukan hanya menjadi alat hukum, tetapi juga menjadi instrumen perubahan sosial yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan umat, sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam tradisi **ahlussunnah wal jama'ah**.

Tradisi NU Wajah Islam yang Adaptif dan Moderat

Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia, yang berakar pada madzhab Syafi'i dan Asy'ariyah, tidak hanya menjadi pilar keagamaan, tetapi juga jembatan bagi harmoni sosial. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memegang teguh prinsip moderasi yang mencerminkan semangat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial budaya. NU mengedepankan konsep wasathiyyah, atau moderasi, yang mengajak umat untuk hidup dalam keadilan dan harmoni, menjadikan NU sebagai teladan dalam mengelola perbedaan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama (Rahmadi, 2023; Ekawati, 2016).

Tradisi ijtihad yang dipraktikkan oleh NU menunjukkan bagaimana fleksibilitas Islam dapat dijalankan tanpa meninggalkan akar tradisi. Melalui pendekatan ijtihad manhaji yang menyesuaikan dengan konteks sosial-budaya masa kini, NU mampu menjawab berbagai tantangan zaman dengan solusi yang relevan dan membumi. Prinsip maqasid al-shariah yang diterapkan mengedepankan tujuan utama hukum Islam: membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, seperti terlihat dalam fatwa yang mendukung praktik ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan (Arsadani, 2024; Ridwan, 2020).

Komitmen NU terhadap keadilan sosial terlihat jelas dalam berbagai aksi nyata, baik di bidang hukum, ekonomi, maupun sosial. Dengan semangat kemaslahatan umat, NU berupaya mengintegrasikan keadilan ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak dalam langkah-langkah pembaruan hukum keluarga yang lebih adil, serta upaya NU dalam memajukan ekonomi syariah yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang lebih luas. Upaya ini menjadikan NU sebagai kekuatan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang inklusif dan merangkul (Rosida, 2023; Risal et al., 2022).

Dalam menghadapi arus globalisasi dan radikalisasi, NU tetap konsisten dengan wajah Islam yang moderat, menekankan dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. NU tidak hanya bertindak sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator sosial yang mendorong perdamaian dan kerjasama antar kelompok. Keberpihakan NU pada nilai-nilai ini menjadikannya sebagai contoh nyata dari Islam yang adaptif, relevan, dan mampu menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Muhaimin, 2020; Prakosa, 2022).

Fiqh Sosial Pendekatan Hukum Islam yang Kontekstual

Fiqh sosial merupakan salah satu pendekatan hukum Islam yang tidak hanya membahas aspek legalistik, tetapi juga menyentuh dinamika sosial untuk menciptakan keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Fiqh ini hadir sebagai respons terhadap tantangan modern, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial yang semakin mencolok di era globalisasi (Aulia, 2019; Asmani, 2014). Melalui penerapan prinsip maqasid al-Shariah, fiqh sosial menekankan pada tujuan-tujuan syariah yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu. Dengan pendekatan ini, fiqh sosial menawarkan solusi kontekstual yang relevan untuk menjawab masalah sosial, menjadikannya sebagai panduan yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformasional dalam mengubah wajah masyarakat.

Pendekatan fiqh sosial mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat yang dinamis. Misalnya, dalam pengembangan asuransi syariah, fiqh sosial tidak hanya

sekadar memenuhi syarat kehalalan, tetapi juga menekankan aspek solidaritas dan saling melindungi antarindividu, menjadikannya instrumen yang lebih adil dan ramah bagi semua kalangan (Nasution, 2020). Dalam konteks ekonomi, fiqh sosial memperkenalkan prinsip-prinsip seperti zakat dan sedekah sebagai alat redistribusi yang mampu mengatasi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, fiqh sosial bergerak lebih jauh dari sekadar ritual, ia hadir sebagai pendorong perubahan struktural yang nyata, memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang terpinggirkan, mendapat tempat yang layak dalam sistem sosial.

Fiqh sosial juga mendorong kolaborasi aktif antara berbagai elemen Masyarakat individu, komunitas, lembaga sosial, dan pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial. Ini bukan sekadar teori; dalam praktiknya, fiqh sosial terwujud dalam program-program yang mendorong keterlibatan masyarakat secara inklusif, partisipasi masyarakat dalam kebijakan berbasis fiqh sosial dapat meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya keadilan dan kesejahteraan (Kadir et al., 2016). Dengan integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan publik, fiqh sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai peta jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan berdaya, memperlihatkan Islam sebagai agama yang hidup dan responsif terhadap realitas sosial.

Hukum Islam Membangun Masyarakat yang Berkeadilan

Keadilan adalah nilai yang mendasar dalam hukum Islam, menjadi fondasi yang menopang setiap aturan dan praktik hukum yang bertujuan membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam ajaran Islam, keadilan bukan hanya sebuah prinsip, melainkan kewajiban moral yang harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial dan hukum. Hukum Islam menempatkan keadilan sebagai pusat dari setiap keputusan, menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau gender (Rosida, 2023). Seperti dalam perkara poligami, keadilan menjadi syarat mutlak yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak sekadar mengatur perilaku, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban moral dan etis dari setiap individu yang terlibat.

Tradisi Nahdlatul Ulama (NU) memberikan contoh nyata bagaimana hukum Islam yang berlandaskan keadilan bisa diterapkan

secara kontekstual dalam masyarakat. Melalui fiqh sosial, NU mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam dengan praktik budaya lokal seperti gotong royong, memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Dalam tradisi Ruwahan, misalnya, masyarakat bersatu dalam ritual bersama yang tidak hanya memperkuat ikatan spiritual, tetapi juga sosial, dengan menekankan pentingnya saling membantu dan berbagi (Tsauri, 2023). Tradisi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya diterapkan di ranah hukum, tetapi juga dalam praktik sehari-hari yang membangun solidaritas di antara komunitas. Sinergi antara fiqh sosial dan tradisi NU membantu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan dan keadilan, menegaskan bahwa Islam adalah agama yang hidup dalam setiap aspek kehidupan umatnya.

Salah satu contoh paling konkret dari penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam di Indonesia adalah melalui pengelolaan zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, bukan hanya sebuah ibadah, tetapi juga instrumen sosial yang dirancang untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan memberdayakan yang kurang beruntung. Pengelolaan zakat yang diatur oleh negara melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memastikan bahwa zakat tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga didistribusikan secara transparan dan akuntabel kepada mereka yang membutuhkan (Iqbal, 2019). Lembaga-lembaga zakat di seluruh Indonesia bekerja untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara produktif, seperti dengan memberikan pelatihan dan bantuan usaha bagi penerima manfaat, membantu mereka untuk bangkit dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi (Makhrus & Mukarromah, 2020). Inisiatif ini mencerminkan esensi hukum Islam yang berupaya menciptakan kesejahteraan bersama, di mana keadilan menjadi landasan dalam setiap langkah, dari regulasi hingga pelaksanaan di lapangan.

Fiqh Sosial dan Tradisi NU di Era Modern dalam Menghadapi Tantangan Keadilan

Masyarakat modern menghadapi tantangan keadilan sosial yang semakin mendesak, seperti ketimpangan ekonomi yang memisahkan si kaya dari si miskin, terbatasnya akses terhadap pendidikan, serta ketidakmerataan dalam perlindungan hak-hak sosial. Ketimpangan ini bukan sekadar statistik, tetapi kenyataan

pahit yang dirasakan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, di mana kesenjangan menciptakan hambatan bagi orang untuk hidup dengan layak dan bermartabat (Sholeh, 2023). Di sinilah fiqh sosial hadir sebagai napas segar dalam hukum Islam, menawarkan pendekatan yang lebih dari sekadar aturan, fiqih sosial menghidupkan prinsip keadilan dengan memfokuskan pada kesejahteraan bersama. Pengelolaan zakat yang lebih efektif, misalnya, tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga sebuah langkah nyata untuk membantu mereka yang terpinggirkan agar bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi (Nafsaka, 2023).

Tradisi Nahdlatul Ulama (NU) memberikan konteks yang kaya bagi penerapan fiqh sosial, menjadikannya lebih membumi dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan yang moderat dan inklusif, NU mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kebersamaan dalam praktek sosial dan ekonomi. Melalui lembaga-lembaga zakat, NU tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang produktif di mana masyarakat didorong untuk berkembang dan berkontribusi secara aktif dalam membangun kesejahteraan bersama (Winata et al., 2022) seperti halnya LAZISNU membuat program KOIN NU. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan bukanlah konsep yang abstrak, tetapi nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat sehari-hari.

Fiqh sosial juga memainkan peran penting dalam reformasi sosial di tengah gempuran globalisasi, yang seringkali membuat masyarakat kehilangan arah dan nilai-nilai asli. Ketika dunia semakin individualistis, tradisi NU dengan fiqh sosialnya mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial. Di pesantren, misalnya, generasi muda diajarkan bukan hanya untuk pintar secara akademik, tetapi juga untuk peduli dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial di sekitarnya. Pendidikan ini menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang melekat dalam fiqh sosial, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang memahami pentingnya kontribusi sosial (Winata et al., 2022).

Namun, tantangan globalisasi tidak bisa diabaikan begitu saja. Arus modernisasi sering kali mengikis nilai-nilai lokal dan budaya, menciptakan jarak antara masyarakat dan tradisinya. NU berupaya mempertahankan keseimbangan dengan terus mengadaptasi

fiqh sosial dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan keadilan gender. Ini membuktikan bahwa fiqh sosial bukan hanya kumpulan aturan lama, tetapi sebuah pendekatan yang dinamis dan mampu berkembang mengikuti zaman, menawarkan solusi yang relevan bagi persoalan-persoalan masa kini (Siregar, 2023). Pendekatan ini membangun narasi bahwa tradisi tidak harus menjadi penghalang perubahan, melainkan fondasi untuk berkembang.

Lebih jauh, fiqh sosial dalam konteks NU juga menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan dialog dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Dalam situasi di mana perbedaan sering kali menjadi sumber konflik, NU melalui pendekatan fiqh sosial membuka ruang untuk percakapan yang lebih inklusif, mempertemukan berbagai kelompok untuk duduk bersama, memahami, dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi. Dengan dialog, ketegangan dapat diredam dan harmoni sosial bisa dibangun. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam melalui fiqh sosial dapat menjadi jembatan, bukan tembok, di tengah-tengah perbedaan (Alfiansyah, 2023).

Potensi hukum Islam melalui fiqh sosial dan tradisi NU sangat besar dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Ketika hukum Islam diimplementasikan dengan pendekatan yang empatik dan kontekstual, ia tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebuah kompas moral yang membimbing masyarakat menuju keadilan yang nyata. Pendidikan, dialog, dan pengelolaan sumber daya yang adil adalah cara-cara konkret di mana fiqh sosial dan tradisi NU terus memainkan perannya, membangun masyarakat yang tidak hanya mengikuti hukum, tetapi juga terinspirasi olehnya untuk mencapai keadilan sejati (Suparji, 2019). Dengan pendekatan ini, fiqh sosial dan tradisi NU tidak hanya menjawab tantangan, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Fiqh sosial dan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) merupakan fondasi penting dalam perjalanan menuju keadilan sosial yang lebih nyata di tengah masyarakat modern. Dengan mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan moderasi, NU telah menjadikan fiqh sosial sebagai alat yang bukan hanya sekadar hukum,

tetapi juga sebagai pedoman hidup yang relevan dengan tantangan zaman. Pendekatan ini menawarkan harapan bagi mereka yang terpinggirkan, membuka ruang bagi bagi kita semua untuk berdialog, dan mengingatkan kita bahwa keadilan harus dirasakan oleh semua, bukan hanya segelintir orang. Untuk terus memperkuat peran ini, kolaborasi yang lebih erat antara komunitas, lembaga keagamaan, dan pemerintah sangat diperlukan, agar nilai-nilai keadilan dan inklusivitas ini dapat menyentuh lebih banyak kehidupan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

Daftar Pustaka

Rahmadi, R. (2023). Tafsir ayat wasathiyyah dalam al-qur`an dan implikasinya dalam konteks moderasi beragama di indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 22(1), 1-16. https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.8572

Ekawati, E. (2016). Nahdlatul ulama (nu) sebagai civil society di indonesia. Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 13(2), 233. https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1098

Arsadani, Q. (2024). The progressiveness of sharia economic fatwas: direction of islamic legal thoughts within nu and muhammadiyah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775

Ridwan, M. (2020). Ijtihad pada era kontemporer (konteks pemikiran islam dalam fiqih dan maqashid al-syariah). jmas, 1(2), 110. https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356

Rosida, U. (2023). Keadilan dalam hukum islam dan urgensinya terhadap perkara poligami. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 108-123. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.93

Risal, M., Haddade, A., & Syariati, A. (2022). Jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep al-adl dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota makassar. Jurnal Sosial Dan Sains, 2(11), 1198-1210. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i11.525

Muhaimin, A. (2020). Ijtihad 'virtual' dan fiqih corona: respon ulama indonesia di musim pandemi. Hikmah Journal of Islamic Studies, 16(2), 167. https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.173

Prakosa, P. (2022). Moderasi beragama: praksis kerukunan antar umat beragama. Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (Jireh), 4(1), 45-55. https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69

Aulia, A. (2019). Metodologi fiqh sosial m.a. sahal mahfudh. El-Mashlahah, 7(2). https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1428

Asmani, J. (2014). Fikih sosial kiai sahal sebagai fikih peradaban. Al-Ahkam, 24(1), 31. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.130

Nasution, S. (2020). Pelaksanaan asuransi pendidikan dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal Literasiologi, 3(3). https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i3.107

Kadir, S., Hariadi, S., & Subejo, S. (2016). Efek interaksi kinerja dan sense of humor penyuluh sosial pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial di indonesia. Sosio Konsepsia, 5(2). https://doi.org/10.33007/ska.v5i2.183

Rosida, U. (2023). Keadilan dalam hukum islam dan urgensinya terhadap perkara poligami. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 108-123. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.93

Tsauri, M. (2023). Refleksi sosio-kultural tradisi ruwahan di kota pontianak dan korelasinya dengan ajaran islam. Pusaka, 11(2), 313-326. https://doi.org/10.31969/pusaka.v11i2.1235

Iqbal, M. (2019). Hukum zakat dalam perspektif hukum nasional. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 26-51. https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43

Makhrus, M. and Mukarromah, S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada pimpinan daerah ‘aisyiyah kabupaten banyumas. Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 20(1), 91. https://doi.org/10.21580/dms.2020.201.5439

Sholeh, M. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 12(1), 21-57. https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484

Nafsaka, Z. (2023). Dinamika pendidikan karakter dalam perspektif ibnu khaldun: menjawab tantangan pendidikan islam modern. Jurnal Impresi Indonesia, 2(9), 903-914. https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3211

Winata, K., Suhartini, A., & Nurwadjah, N. (2022). Pengembangan potensi sosiologis pesantren di era globalisasi. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 86. https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.9434

Siregar, R. (2023). Indonesia era globalisasi: peran dan tantangan generasi kedua digital native. At-Tawasul, 2(2), 101-109. https://doi.org/10.51192/ja.v2i2.470

Alfiansyah, A. (2023). Social media as a public spheremenguatnya gerakan islam konservatif dalam dunia pendidikan. Molang Journal Islamic Education, 1(01). https://doi.org/10.32806/qcjaeb32

Suparji, S. (2019). Eksistensi hukum islam dan kearifan lokal. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 5(1), 21. https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327

Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik, Hukum, dan HAM: Paradigma, Dinamika, dan Implementasi di Indonesia

Muhammad Fahim Sultoni

Nahdlatul Ulama (NU, bahasa Arab: نَهْضَةُ الْعُلَمَاءْ, translit. nahḍatul ‘ulamā›, har. ‘Kebangkitan Ulama’;) adalah organisasi keagamaan Islam asal Indonesia yang didirikan oleh Hasyim Asy›ari, kepala Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur. NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta (2013) hingga lebih dari 95 juta pada (2021) yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam. (https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama).

berikut sekilas selayang pandang pemahaman penulis tentang NU, tentu lebih luas lagi pemahaman setiap individu serta masyarakat yang tergabung didalamnya, dengan kenggotaan yang memiliki dua sifat yakni sebutan NU Kultural dan NU struktural tentu itu akan menjadi lebih luas lagi cakupan dan pemahaman tentang NU itu sendiri, menariknya kedua instrumen tersebut saling berhubungan satu sama lain, yang NU kultural berperan sebagai pengamal riyadoh ubudiyah (kegiatan keagamaan ditengah masyarakat) dan NU struktural bergerak sebagai pengayom dan supoorting bagi warganya melalui berbagai dimensi tidak telepas dari dimensi politik dan dimensi peng”advokasi-an” warga NU.

Menyusul pengakuan kemerdekaan Indonesia, sebuah partai baru bernama Masyumi didirikan dengan NU sebagai komponennya. Kepemimpinan NU pada saat itu tidak memiliki keterampilan politik, dan dianugerahi beberapa posisi kabinet yang berpengaruh, kecuali ketua Wahid Hasyim, yang diangkat menjadi menteri agama. NU tidak senang dengan kurangnya pengaruhnya di dalam Masyumi, terutama setelah keputusan pada konferensi partai tahun 1949 mengubah dewan agama partai, di mana NU memegang beberapa posisi, menjadi badan penasihat yang tidak berdaya.

Dua tahun kemudian, perselisihan tentang organisasi Haji menyebabkan penentangan Perdana Menteri Natsir terhadap

pengangkatan kembali Hasyim sebagai menteri urusan agama di kabinet berikutnya. Dalam krisis kabinet berikutnya, NU mengajukan serangkaian tuntutan, termasuk mempertahankan Hasyim, dan mengancam akan meninggalkan Masyumi. Pada tanggal 5 April 1952, beberapa hari setelah pengumuman kabinet baru tanpa Hasyim, NU pada prinsipnya memutuskan untuk meninggalkan Masyumi. Tiga bulan kemudian mereka menarik semua anggotanya dari dewan Masyumi, dan pada tanggal 30 Agustus ia mendirikan Liga Muslimin Indonesia, yang terdiri dari NU, PSSI dan PERTI. Diketuai oleh Wahid Hasyim.

Selama era demokrasi liberal (1950-1957), anggota NU menjabat di sejumlah jabatan kabinet. Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, NU menduduki tiga kursi, dengan Zainul Arifin ditunjuk sebagai wakil perdana menteri kedua. Namun, setelah kabinet ini jatuh, beberapa anggota NU menentang NU bergabung dengan kabinet baru, yang akan dibentuk oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan keyakinan bahwa jika dia tidak dapat membentuk kabinet, NU akan diundang untuk mencoba. Akhirnya ditekan untuk berpartisipasi, dan dianugerahi portofolio urusan dalam negeri dan agama di kabinet, yang dilantik pada 12 Agustus 1955.

Pada tanggal 29 September 1955, Indonesia mengadakan pemilihan parlemen pertama. NU berada di urutan ketiga, dengan hampir 7 juta suara, 18,4% dari total, di belakang Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. NU diberikan 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, naik dari hanya delapan sebelum pemilihan. NU adalah partai terbesar di basis Jawa Timurnya, dan 85,6% suaranya berasal dari Jawa. Ada pemisahan yang jelas antara Masyumi, yang mewakili pulau-pulau terluar, pemilih perkotaan, dan NU, yang mewakili konstituen pedesaan Jawa. Tiga bulan kemudian, pemilihan diadakan untuk Konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi permanen. Hasilnya sangat mirip, NU meraih 91 dari 514 kursi.

Pada 1950-an, NU masih ingin melihat Indonesia menjadi negara Islam, dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pidato presiden tahun 1953 yang ditolak oleh Sukarno. Tiga tahun kemudian, ia juga menentang «konsepsi» Sukarno yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan demokrasi terpimpin, karena ini berarti anggota PKI duduk di kabinet. Pada tanggal 2 Maret 1957, pemberontakan Permesta pecah. Di antara tuntutannya adalah kembalinya Mohammad Hatta menjadi wakil presiden. NU

mendukung seruan ini.

Sementara itu, di Konstituante, NU bergabung dengan Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan pihak lain untuk membentuk Blok Islam, yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Blok terdiri 44,8% dari total kursi. Namun, karena tidak ada satu pun blok yang mampu menguasai mayoritas dan mendorong melalui konstitusi yang diinginkan, majelis gagal untuk menyetujui dan dibubarkan oleh Sukarno dalam sebuah dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang juga mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang menyatakan negara untuk berdasarkan falsafah Pancasila, bukan Islam.

Pada tahun 1960, Presiden Sukarno melarang Masyumi karena diduga terlibat dalam pemberontakan Permesta. Namun, kepemimpinan NU melihat Partai Komunis Indonesia yang pro-kaum miskin, yang dekat dengan Sukarno, sebagai penghalang ambisinya, dan bersaing dengannya untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang miskin. Lima tahun kemudian, upaya kudeta oleh Gerakan 30 September terjadi. Pada tahun 1965, kelompok tersebut berpihak pada tentara pimpinan Jenderal Suharto dan sangat terlibat dalam pembunuhan massal komunis Indonesia. Namun, NU kemudian mulai menentang rezim Suharto.[19]

Pada tahun 1984, Abdurrahman Wahid, cucu pendiri NU Hasyim Asy›ari, mewarisi kepemimpinan dari ayahnya, dan kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999. Ia secara resmi meminta maaf atas keterlibatan NU dalam peristiwa 1965. Ia juga menyatakan bahwa «Nahdlatul Ulama (NU) seperti Syi›ah dikurangi Imamah; demikian pula Syi›ah adalah NU ditambah Imamah.» Ada banyak kesamaan antara keduanya, seperti posisi dan peran kyai. Kontras utama di antara mereka adalah bahwa di NU, konsep itu terlihat dalam bentuk budaya yang diterima, sedangkan di Syiah, itu berbentuk teologi.

Setelah penggulingan Sukarno, rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengadakan pemilihan umum pada tahun 1971. Meskipun NU dimanipulasi oleh pemerintah, yang menyebabkannya kehilangan banyak kredibilitas, NU berhasil mempertahankan 18% suara dari pemilu 1955. pemilihan. Namun, pada tahun 1973, ia terpaksa «menyatu» ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru. PPP berada di urutan kedua, setelah organisasi Golongan

Karya (Golkar) yang disponsori pemerintah dalam pemilihan 1977 dan 1982, tetapi pada 1984, ketua NU yang baru Abdurrahman Wahid (juga dikenal sebagai Gus Dur), putra Wahid Hasyim, menarik NU dari PPP karena ketidakpuasan dengan kurangnya pengaruh NU. Akibatnya, pada pemilu 1987, suara PPP anjlok dari 28% pada 1982 menjadi hanya 16%. Sejak saat itu, NU diharapkan berkonsentrasi pada kegiatan keagamaan dan sosial. (https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama)

selaras dengan apa yang disampaikan oleh penulis bahwa kombinasi antara NU Kultural dan NU struktural terjadi kegiatan peng"advokasi"an yang tak terpisahkan dinatara keduanya, seperti yang tersampaikan bahwa Hak asasi manusia (HAM) menempatkan manusia pada titik sentral dalam hubungan antar bangsa, kelompok, individu yang terbebas dari berbagai bentuk penjajahan, intimidasi, dominasi atau eksploitasi karena tidak sesuai dengan semangat universal nilai-nilai kemanusiaan (Abbas, 2007: 4). tentu tujuannya jelas yakni mengontrol dan mengkritisi kebijakan negara dalam memenuhi hak dan hajat hidup rakyatnya. Kajian ini difokuskan pada bagaimana kontruksi hak asasi manusia melalui epistemologi berpikir model NU; gerakan perjuangan NU dalam mengimplemetasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa; serta bagimana penerapan HAM bekerja untuk kemaslahatan umat.

Merujuk pada Kholid N. Ishaque (1974), tokoh Sunni kenamaan Abdurrahman Wahid (1940-2009) menyebutkan empat belas point hak asasi manusia yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu; hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mendapat perlakuan yang sama, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan negara, hak untuk menolak sesuatu yang melanggar hukum, hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak untuk memperoleh kebebasan dari ancaman dan penuntutan, hak untuk berbicara, hak atas perlindungan terhadap penuntutan, hak memperoleh ketenangan pribadi, hak ekonomi, termasuk hak mendapat upah yang layak, hak untuk melindungi kehormatan dan nama baik, hak atas harta benda, dan hak untuk penggantian kerugian yang sepadan (Wahid, 1985: 96).

sepertinya kasus perjuangan petani Jenggawah pada tahun 1995 merupakan contoh nyata dalam kehidupan bernegara kita. Bahwa hak milik harus diperjuangkan, ia tidak akan hadir dengan sendiri. Pada saat itu, petani bergerak dan membakar gedung-gedung

tembakau. Petani memprotes hak-hak milik atas tanahnya seluas 1.200 hektar yang telah digarap bertahun-tahun dirampas penguasa. Kiai-kiai NU seperti KH Sodiq Mahmud, KH. Imam Masyhuri dan lainnya dituding berada dibalik radikalisme petani. Pejuang hak asasi seperti petani Jenggawah dalam mempertahankan hak miliknya, di samping harus memiliki jiwa heroik, ia harus punya ketahanan yang prima. Intimidasi, rayuan, ancaman selalu datang, bahkan dalam laporan Majalah Ummat edisi 4 September 1995, mereka diminta mundur dengan iming-iming imbalan sejumlah 350 juta rupiah. Atas sikap, keberanian, konsistensi dan kegigihan petani Jenggawah dalam memperjuangkan haknya, Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (YAPUSHAM) memberikan Anugrah Hak Asasi Manusia Yap Thien Hien kepada petani Jenggawah. Menyikapi perihal kasus petani Jenggawah ini, KH Cholil Bisri menilai: "Rakyat Jenggawah yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah itu patut memiliki dan menggarapnya, karena tanah itu adalah peninggalan penjajah yang otomatis menjadi tanah mati (ardh amwât). Jadi, menurut Kiai Cholil, dalil apa saja yang dipakai, yang berhak atas tanah ini adalah rakyat Jenggawah". (Magfur ahmad)

sampai pula pada titik kesimpulan bahwa Pertama, terjaminnya hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa merupakan syarat penting menuju tercapainya MDGs. Dalam konteks keindonesiaan, NU sebagai lembaga sosial kemasyarakatan memiliki peluang, kesempatan dan potensi untuk mengontrol dan menegakkan hak asasi manusia. Kedua, HAM dalam konsep NU merupakan persemaian antara nilai-nilai hak asasi yang berkembang di Barat, Islam maupun nilai-nilai lokalitas keindonesiaan. Sebab itu, bagi NU, hak-hak beragama, berserikat, berpendapat, berpenghasilan, hak milik dan lain sebagainya, bukan diadopsi secara tekstual dari konsep Barat atau Islam tetapi didialogkan secara kritis dengan realitas sosial, politik, budaya ekonomi dan lainnya. Dengan demikian, hak asasi yang dipahami NU, demi terjaganya lima prinsip dasar: hifz al-nafs (jiwa), hifz al-dîn (agama), hifz al-nasl (keturunan), hifz al-mâl (harta) dan hifz al-aql (akal) bisa jadi maknanya berlainan dengan pemahaman pemikiran ortodoksi Sunni selama ini. Ketiga, dalam perjalanan kehidupan berbangsa bagi NU selama ini, menunjukkan bahwa pemahaman dan gerakan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang digalang NU adalah dalam rangka gerakan oposisi melawan pihak lain, terutama negara, yang

mengabaikan nilai dan hak dasar manusia. NU memaknai gerakan HAM tidak untuk melanggengkan rezim penguasa tirani atau situasi destruktif melainkan gerakan progresif menetang pihak-pihak yang menghalangi tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia. keempat kedepan perlu adanya banom dibawah NU yang fokus kepada permasalahan politik, Hukum dan HAM sehingga warga NU bisa mendapatkan payung ketika mengalami persoalan yang demikian.

Kesimpulan

NU telah memainkan peran strategis dalam penegakan HAM di Indonesia, menggabungkan nilai-nilai keislaman, budaya lokal, dan prinsip-prinsip universal dalam setiap langkah perjuangannya. Melalui kombinasi antara gerakan sosial kultural dan advokasi politik struktural, NU berhasil membangun narasi HAM yang relevan dengan konteks Indonesia. Perjuangan petani Jenggawah, misalnya, menjadi salah satu bukti konkret bahwa NU tidak hanya berperan sebagai pelindung moral umat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang proaktif dalam menghadapi ketidakadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, NU perlu memperkuat fokusnya pada bidang politik, hukum, dan HAM melalui pembentukan badan otonom yang khusus menangani isu-isu tersebut, sehingga mampu memberikan payung perlindungan lebih kuat bagi warganya. Dengan demikian, NU diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga hak-hak dasar masyarakat dan mengawal cita-cita keadilan sosial di Indonesia.

Eksistensi Media Sosial Dalam Menyuarakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kalangan Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri

Intan Amalia Humala Ababil, Fatihatul Anhar Azzulfa, Mahfud Aziz Dhulkurnaen Husein

Sebagaimana rumusan yang telah disepakati bangsa-bangsa dunia, hak asasi manusia (universal human right) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak dilahirkan, dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun kecuali Tuhan. Hak asasi manusia ini bersifat universal, dimiliki siapa saja, tanpa memperdulikan latar belakang kebangsaan, etnisitas, agama, jenis kelamin, warna kulit, ras, dan sebagainya. HAM pertama kali dideklarasikan oleh lembaga dunia secara resmi, yakni united nations (PBB) pada 24 Oktober 1945 setelah melalui perjuangan yang rumit dan panjang[1]. Sebagai Upaya masyarakat dunia untuk menghentikan peperangan dunia dan penindasan antar manusia yang diakibatkan oleh sistem relasi kekuasaan yang tidak adil[2]. Dasar hukum hak-hak kodrati atau HAM secara umum tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam dunia Islam kontemporer HAM secara universal disebut sebagai al-huququl insaniyatul asasiyyatul aalamiyah, yang juga berdasar pada sumber hukumnya yang paling otoritatif (al-Qur'an)[3].

Pada mulanya penegakan HAM disuarakan melalui perang pembebasan suatu negara atas penjajah, perjanjian antar penguasa/raja, demonstrasi masyarakat terhadap pemerintah, dan sebagainya. Dewasa ini semakin berkembang pesatnya kemajuan teknologi, kemudian turut memberikan pengaruh besar terhadap eksistensi HAM. Hal ini dapat dibuktikan dengan konflik dunia yang baru-baru

---

1 Muhammad Jamaluddin dan Erik Ilham Habibillah, "PENGARUH KEBIJAKAN PBB DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 1 (27 Juni 2023): 28–46, https://doi.org/10.24042/tps.v19i1.16761.

2 Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara* (Yogyakarta: Diva Press, 2022), 147.

3 Husein Muhammad, 149–50.

ini dan masih terjadi, yaitu perang Israel-Hamas yang memanas sejak 7 Oktober 2023. Konflik antara Israel dengan Palestina yang sebenarnya telah menjadi perbincangan utama di dunia internasional selama beberapa dekade terakhir. Perselisihan ini berlangsung selama kurang lebih 100 tahun[4].

Eskalasi terbaru ini terjadi bermula dari roket kelompok militan Hamas (Palestina) terhadap wilayah Israel sebagai tanggapan tegas dari mereka atas kekejaman yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun, dan pengakuan mereka (Israel) atas wilayah teritorial Palestina secara krusal yang mengakibatkan menyusutnya lahan Palestina dari tahun ke tahun[5]. Selain itu, juga warga biasa Palestina yang dalam beberapa kasus dibantai, diserang, diculik, direcoki, dipindahkan, dijarah dan ditolak untuk mendapartkan makanan, air dan kesejahteraan[6].

Konflik antara Hamas dan Israel ini memicu gelombang solidaritas di seluruh dunia, terutama Indonesia dengan melakukan aksi di Monas dan di Kedubes Amerika Serikat. Di sisi lain bumi, masyarakat London dan Inggris melaksanakan sholat dan doa berjamaah, sementara di Korea Selatan, Brasil, dan Malaysia juga terjadi demonstrasi dalam skala besar[7]. Selain itu, sentimen dan ekspresi solidaritas masyarakat internasional terhadap perang Israel-Hamas ini secara luas dan luar biasa diungkapkan melalui berbagai platform media sosial, dan kemudian menjadi fenomena sosial yang merata di berbagai platform media sosial seperti X, TikTok, Youtube, Facebook, Telegram dan Instagram[8].

---

4 Annisa Nadiyah Rahmani, "DAMPAK PERANG ISRAEL-HAMAS TERHADAP HARGA SAHAM DAN MINAT BELI MASYARAKAT PRODUK PENDUKUNG ISRAEL," *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (17 November 2023): 1445, https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.2104.

5 Rahmani, 1446.

6 Jagad Aditya Dewantara dkk., "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (28 Januari 2023): 22, https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4580.

7 Muhammad Risqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana, "ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GERAKAN BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 4 (6 Desember 2023): 2, https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1063.

8 Ade Tiara Susilawati, Nur Anjeni Lestari, dan Puput Alpria Nina, "Analisis Sentimen Publik Pada Twitter Terhadap Boikot Produk Israel Menggunakan Metode Naïve Bayes," *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024):

Hal ini menjadi bagian integral dari gelombang dukungan global yang berkembang. Masyarakat Indonesia salah satunya memberikan respon yang sangat dan/ paling berarti melalui media sosial. Salah satu hal yang paling besar adalah gerakan *Julidfisabilillah*, yakni gerakan netizen Indonesia dan Malaysia dalam melawan Tindakan para Zionis dan Israel melalui media sosial. Gerakan ini juga memiliki Komandan Satuan Operasi Khusus. Tidak hanya sampai disitu, peran krusial media sosial dalam menggalang opini publik dan menyebarkan informasi menjadi terlihat nyata dan sangat jelas pula melalui dukungan massal dalam berbagai gerakan, penyebaran informasi real terkait konflik Israel-Palestina, seruan boikot besar-besaran terhadap produk-produk yang berpihak (pro) pada Israel, hingga perusahaan-perusahaan media sosial yang kalah cepat dalam menanggulangi gerakan-gerakan massal tersebut. Pemahaman akan potensi media sosial sebagai alat perubahan sosial dan sebagai jejaring raksasa penghubung antar manusia yang berskala internasional ini, menarik penulis untuk menorehkannya dalam artikel yang bertujuan untuk merinci pemahaman mengenai seberapa besar pengaruh media sosial dalam menyuarakan penegakan HAM.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Israel VS Palestina

Jaminan HAM setiap individu dalam suatu negara telah dijamin oleh masing-masing negaranya. Akan tetapi jika pelanggaran HAM disebabkan karena adanya kesalahpahaman atau konflik antar negara, maka sebagai organisasi Internasional PBB perlu turun langsung untuk mencapai kompromi, meningkatkan kesejahteraan, serta memecahkan pertikaian yang timbul antar negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization (IGO) yang sudah beranggotakan 193 negara. Secara garis besar, PBB bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara, memelihara keamanan, serta menjaga kedamaian dunia. Terkait konflik Israel-Hamas yang masih berlangsung hingga kini, PBB telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengharuskan Israel keluar dari daerah pendudukan dan menghentikan gerakannya yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

27, https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.240.

Namun Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, mengabaikan Resolusi Majelis Umum PBB dan menyatakan bahwa Israel tidak akan menarik pasukan dan akan terus menyerang sampai tujuannya tercapai, serta tetap tidak meninggalkan daerah pendudukan. Disisi lain PBB tidak memberikan sanksi tegas terhadap Israel[9]. Oleh karena PBB yang dianggap 'kurang' mampu -oleh rakyat universal- dalam menanggapi secara tegas mengenai konflik besar ini, maka seluruh lapisan masyarakat dunia melakukan berbagai gerakan sosial besar-besaran yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan membebaskan Palestina berbagai pelanggaran HAM oleh Israel, melalui berbagai platfrom media sosial.

Sebagaimana kita ketahui, pendudukan Israel terhadap Palestina telah melanggar seluruh lapisan asas humanisme (HAM). Mulai dari yang paling dasar, yakni hak untuk memperoleh kesetaraan (al-musawah) dan kebebasan (al-hurriyyah). Lebih luas lagi, hak-hak rakyat Palestina yang telah dilanggar oleh Israel adalah HAM untuk semua; hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan; hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekejaman; hak mendapatkan pendidikan; hak jaminan kesehatan; hak istirahat; berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja; hak atas privasi; bebas berpindah tempat; berhak mendapatkan perlindungan; hak atas kewarganegaraan; kebebasan berkumpul secara damai; kebebasan berekspresi; hak atas properti pribadi; hak menikah dan membangun keluarga; hak untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat; hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum; hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya; hak mendapat jaminan sosial; berpartisipasi dalam demokrasi; berhak atas tatanan sosial dan internasional; tidak bersalah hingga terbukti bersalah; HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat[10].

Hak-hak rakyat, termasuk hak untuk hidup dan terbebas dari kekerasan, dirampas dari rakyat Palestina oleh Negara Israel. Insiden ini telah berlangsung lama, dan telah menimbulkan banyak korban jiwa di pihak Palestina, namun Israel belum juga menghentikannya. Berbagai pihak menyerukan kebebasan terhadap Palestina, agar

---

9 Jamaluddin dan Habibillah, "PENGARUH KEBIJAKAN PBB DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL," 33–36.

10 Lewiandy Lewiandy dan Alessandro Christian Max, "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel Dan Palestina," *UNES Law Review* 6, no. 4 (13 Juni 2024): 10299–303, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2003.

tidak terjadi lagi pelanggaran HAM terhadap Palestina. Namun, hal ini tidak berhasil karena konflik antara Palestina dan Israel masih terus berlanjut dan mengakibatkan banyak korban, terutama anak-anak Palestina. Melihat apa yang terjadi di Palestina, banyak aspirasi dari masyarakat dunia untuk memberikan keadilan bagi Palestina, sayangnya sampai saat ini seluruh negara masih menyaksikan kezaliman yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina[11].

Fenomena Gerakan Boikot

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), yang lebih dikenal dengan sebutan boikot terhadap barang-barang Israel dan barang-barang yang berhubungan dengan Israel, merupakan sebuah kampanye di seluruh dunia yang bertujuan untuk menekan Israel agar menghentikan apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang Palestina melalui penggunaan perantara perdagangan Geweldloze. Gerakan ini berperan penting dalam sejarah panjang konflik Israel-Palestina, yang dimulai dengan pemisahan negara Israel tahun 1948 dan Perang Arab-Israel, yang mengakibatkan pemusnahan massal rakyat Palestina, yang dikenal sebagai Nakba. Sengketa ini semakin meningkat sebagai akibat dari pendudukan Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967 di Tepi Barat Lembah Yordan, Gaza, dan Yerusalem Timur. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, negara-negara Arab membentuk gerakan menentang Israel dengan melakukan berbagai upaya boikot dan sanksi. Tidak ada gerakan global yang terorganisir dengan baik saat itu[12].

Pada tanggal 9 Juli 2005, gerakan BDS diresmikan oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina, yang mengeluarkan seruan bersama untuk kampanye BDS. Seruan ini dipengaruhi oleh model gerakan anti-apartheid Afrika Selatan. BDS memiliki tiga tujuan utama: mengakhiri pendudukan dan penjajahan di semua tanah Arab yang diduduki pada tahun 1967, serta membongkar tembok pemisah; mengakui hak-hak dasar warga negara Arab-Palestina di Israel untuk mendapatkan kesetaraan penuh; dan menghormati,

11 Lewiandy dan Max.

12 Idris Siregar, Dinar Maliki, dan Fakhrurrozi Nasution, "Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 3 (28 Juni 2024): 124, https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i3.938.

melindungi, serta mempromosikan hak-hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan harta benda mereka, sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi PBB 194[13].

Boikot juga digambarkan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan mendorong pelanggan untuk tidak membeli produk atau layanan yang ditawarkan di pasar dan pergi meninggalkannya. Boikot dilakukan dengan tujuan untuk mencegah orang lain untuk membuka dan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan aturan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian. Hal ini menyebabkan munculnya dua jenis boikot: boikot bisnis dan boikot komunitas, yang dapat dipicu oleh rentang geopolitik, sejarah, atau agama yang lebih intens[14].

Karena boikot difokuskan untuk mengurangi perdagangan dan keuntungan bisnis yang digerakkan oleh tujuan tertentu, boikot menjadi semakin populer dalam gerakan keadilan global. Boikot pelanggan adalah tindakan mempromosikan suatu produk dengan tujuan merusak margin keuntungan perusahaan, memengaruhi standarnya, merusak reputasinya, atau, secara umum, meningkatkan ketidaksetujuan publik terhadap implikasi politik produk tersebut. Boikot, menurut para aktivis, memiliki dampak langsung pada bisnis yang diarahkan dan membantu mereka dalam transisi ke bisnis internasional, yang dikatakan bahwa mereka menjadi lebih kuat daripada negara[15].

Alasan diatas mengharuskan pemboikotan perusahaan-perusahaan multinasional ternama, yang tentunya mendapat manfaat dari pentingnya reputasi merek yang kuat bagi bisnis yang bergantung pada logo mereka daripada kualitas produk mereka. Hal ini terjadi sebagai akibat dari fakta bahwa pembeli saat ini lebih peduli terhadap etika bisnis dan membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Selain itu, boikot dimotivasi oleh faktor agama, geopolitik, atau sejarah yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan

---

13 Siregar, Maliki, dan Nasution, 184.

14 Prihandono Wibowo, Renitha Dwi Hapsari, dan Muchammad Chasif Ascha, "RESPON PUBLIK TERHADAP FATWA BOIKOT PRODUK ISRAEL OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA," *Journal Publicuho* 7, no. 1 (19 Maret 2024): 385, https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371.

15 Della Porta dan M. Diani, *Social Movements: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell. Werbner* (Oxford: Blackwell Publishing, 2020).

gerakan tersebut.

Singkatnya, boikot merupakan sarana yang efektif bagi masyarakat untuk berurusan secara kolektif dan mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap suatu perusahaan atau kelompok. Yang dimaksud dengan boikot adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk menghentikan bisnis, budaya, dan industri. Keberhasilan boikot bergantung pada tingkat identitas dan kesetiaan kolektif. Aksi kolektif yang efektif dapat membantu masyarakat untuk menyadari isu-isu yang sedang terjadi dan memotivasi mereka untuk mengambil tindakan. Masalah-masalah tersebut dapat dikaitkan dengan faktor geopolitik, perkembangan sejarah, atau faktor agama yang sangat kuat yang dapat berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan Gerakan Boikot.

Dalam praktiknya, gerakan BDS juga menjadi gerakan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia[16], terutama bagi mereka yang dianggap mengalami ketidakadilan dan perlakuan buruk dari masyarakat. Dalam pandangan Jones, gerakan BDS adalah gerakan suppelementer. Untuk mencapai hasil yang terbaik, gerakan BDS juga terdiri oleh empat pilar strategi revolusioner, yaitu mobilisasi massa, organisasi akar rumput, perekrutan yang tepat sasaran, dan solidaritas global[17].

Mobilisasi massa adalah prinsip pertama yang menjadi dasar strategi ini. Untuk memberikan dampak yang signifikan, gerakan BDS harus dilaksanakan dengan konsensus yang luas. Untuk itu, solidaritas internasional digalang tidak hanya dari internal BDS tetapi juga dari eksternal. Lebih lanjut, Jones[18] menyatakan bahwa intervensi eksternal dapat digunakan untuk menggulingkan kediktatoran yang represif melalui penggunaan perdagangan, investasi, teknologi, dan kerja sama militer. Selain itu, hal ini akan menghambat kemampuan kediktatoran untuk menanggapi gerakan perlawanan massa yang meluas dengan sanksi. Israel menganggap gerakan BDS sebagai

16 David Feldman, *Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel* (London: Palgrave Macmillan, 2019).

17 Lee Jones, *Sanctioning Apartheid: Comparing the South African and Palestinian Campaigns for Boycotts, Disinvestment, and Sanctions. in Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel* (London: Palgrave Macmillan, 2019).

18 Lee Jones.

serangan strategis.

Inti dari strategi ini -mobilisasi massa- sebagaimana dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Agar gerakan BDS dapat memberikan dampak yang signifikan, gerakan ini harus dilaksanakan dengan konsensus massa yang besar. Inilah sebabnya mengapa hal ini dilakukan tidak hanya secara internal tetapi juga secara eksternal melalui solidaritas internasional. Jones berpendapat bahwa pihak luar yang terlibat dalam perdagangan, investasi, teknologi dan militer dapat menjadi alat untuk memperkuat rezim penindasan. Lebih jauh lagi, sanksi akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan sebuah rezim untuk menanggapi gerakan pembebasan yang meluas. BDS dipandang oleh Israel sebagai serangan balasan yang strategis[19]. Israel melebeli gerakan BDS dengan sebutan gerakan ant-semitisme[20].

Deskripsi Santri Pondok Pesantren Al Hikmah dalam Menyuarakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Tinjauan terhadap Boikot Produk Israel sebagai Dukungan terhadap Palestina

Konsep boikot dalam Islam mengacu apabila didapati bentuk penolakan pada mereka yang tidak mematuhi syariah, yang merupakan aturan hukum dalam Islam. Boikot disebutkan dalam berbagai bidang, diantaranya sosial, ekonomi, dan politik[21]. Dalam perspektif muamalah, boikot menandakan penolakan atau pertentangan terhadap segala bentuk aktivitas yang mengarah kepada hal-hal duniawi, termasuk di dalamnya adalah harta dan kebendaan. Gerakan boikot dapat terjadi ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap syariat Islam[22]. Boikot muamalah

19 Omar Barghouti, "BDS: Nonviolent, Globalized Palestinian Resistance to Israel's Settler Colonialism and Apartheid," *Journal of Palestine Studies* 50, no. 2 (2 April 2021): 108–25, https://doi.org/10.1080/0377919X.2021.1906067.

20 Jennifer Hitchcock, "Framing Palestinian Rights: A Rhetorical Frame Analysis of Vernacular Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement Discourse," *Rhetoric Society Quarterly* 53, no. 2 (15 Maret 2023): 87–103, https://doi.org/10.1080/02773945.2022.2095422.

21 Sharul Fitry Abdul Majid, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, dan Muhammad Talhah Ajmain @ Jima'ain, "Fiqh Boycott On LGBT Community: A Review:," *Perdana: International Journal of Academic Research* 6, no. 2 (31 Desember 2019): 35–49.

22 M. Alfa Riski Mokobombang, Fitria Ayu Lestari Niu, dan Jamaludin Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 2 (30 Desember 2023): 88–95, https://doi.org/10.30984/maqrizi.v3i2.769.

merupakan jenis boikot yang diklasifikasikan sebagai boikot perusahaan atau boikot jasa serta sebuah lembaga, dikarenakan melibatkan pola perilaku, interaksi, dan proses maupun pelayanan bagi orang lain khususnya dilakukan oleh Perusahaan[23].

Boikot dalam konteks ekonomi mengacu pada pelarangan mengonsumsi semua bahan makanan atau minuman karena satu atau beberapa alasan tertentu. Pemboikotan berlaku ketika sebuah lembaga mensponsori, mengelola, mendistribusikan, atau terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan dengan peraturan Syariah. Menurut penuturan KH. Abdun Nashir Badrus menyatakan bahwa:

> ‘Santri/santriyat yen tumbas jajan, ngombe lan maem kudu diperhatikke, ojo sampek tuku sing ono hubungane karo produk-produk Israel. Yen uwis eruh produk iku dukung Israel kok sampean sek mengonsumsi podo karo setuju tindakan Zionis menjajah Palestina. Iki kabeh kudu diperhatikno lan kudu disebar luasne sak akeh-akeh e mergo ono hubungan e karo kemerdekaan dulur-dulur ndek Palestina. Disebar luasne sak akeh-akeh e koyo to ndek mading ribath utowo mading kampus luwih-luwih disebar luaske lewat whatsApp ben sekabehane paham nek mendukung Palestina iku hal sing penting’
>
> ‘Seluruh santri khususnya Pondok Pesantren Al Hikmah Kediri harus memerhatikan dalam bertindak seperti membeli makanan atau minuman, hendaknya menhindari produk-produk yang terafiliasi Israel guna mendukung pembebasan penjajahan palestina atas perbuatan kejam Zionis. Hal tersebut perlu diperhatikan dan disebarkan melalui berbagai media khususnya di platform online seperti WhatsApp dan seterusnya,’ imbauan tersebut rutin disampaikan dalam berbagar kegiatan oleh beliau Romo KH. Abdun Nashir Badrus di setiap kegiatan baik di internal (lingkungan Pondok Pesantren Al Hikmah Kediri) maupun eksternal (dalam kajian-kajian keagamaan)[24].

23 K. Arsyad, *Objek Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah; Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.

24 KH. Abdun Nasir Badrus, Wawancara dengan Pengasuh PP Tahfizul Qur’an Al Hikmah Kediri, 15 Januari 2024.

Dalam perspektif Alquran, prinsip-prinsip boikot di bidang ekonomi disebutkan dalam firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 173, Dalam ayat ini, kata "*haram*" bermakna Allah melarang secara mutlak; ini adalah sesuatu yang Allah larang dengan tidak memperbolehkan segala yang dilarang oleh syariat Islam dilakukan. Kata "*haram*" dalam ayat tersebut merupakan perintah absolute atau dari bentuk langsung pemboikotan-Nya.

Selanjutnya, Pemboikotan di bidang sosial merupakan sebuah sikap terhadap kehidupan masyarakat yang didasarkan pada norma-norma sosial yang berlaku. Fakta sosial yang dimaksud adalah seluruh tindakan yang berlaku pada setiap individu maupun masyarakat sebagai suatu keharusan dan ketetapannya terlepas dari perwujudan individual. Karakteristik dari fakta sosial adalah bahwa mereka biasanya bersumber dari eksternal. Tujuan dari lingkungan eksternal adalah untuk membantu setiap orang mendapatkan suatu bimbingan, pemahaman, atau keterpaksaan yang diarahkan untuk mengakui atau menetapkan fakta sosial[25].

Contoh fakta sosial yang erat dengan kehidupan ialah pengamalan Pancasila, taat terhadap peraturan yang berlaku, adat istiadat, dan hukum agama. Contoh-contoh tersebut merupakan fakta sosial yang menjadi acuan bagi setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengikuti aturan-aturan yang relevan dengan fakta sosial tersebut, meskipun aturan-aturan tersebut dibuat oleh sekelompok individu. Dan jika setiap individu mengabaikan setiap kebenaran sosial yang ada dan tidak berkontribusi dalam pelaksanaannya, maka setiap individu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan penyimpangannya.

Dari uraian perihal pemboikotan di beberapa bidang, realitas yang sampai saat ini diberlakukan ialah mayoritas di bidang ekonomi, dikarenakan kehidupan di Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri erat kaitannya dengan hal tersebut. Meskipun Pesantren ini berbasis salaf sehingga tidak diperbolehkan santri/santriyat untuk mengoperasikan *handphone*, namun mayoritas santri/santriyat yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah dapat mengoperasikan laptop yang dapat mengakses media sosial sebagai bentuk penyaluran menyuarakan kemerdekaan atas Palestina. Pondok Pesantren Al

---

25 Mokobombang, Niu, dan Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer."

Hikmah Purwoasri Kediri merupakan salah satu lembaga yang menyoroti perilaku Zionis yang tidak berperikemanusiaan, Sejak bulan November 2023 lalu, Pengasuh pondok pesantren tersebut telah memberikan komando kepada para santri untuk tidak membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Lebih lanjut, pihak koperasi pondok diberikan titah untuk sebisa mungkin tidak lagi menjual barang-barang produksi pro-Israel di koperasi, dan memberikan penjelasan kepada para santri mengapa beberapa produk tidak lagi di jual di koperasi[26].

Seluruh pengurus menghimbau dengan seluruh santri harus menerapkan jargon *'Julid fi sabilillah'* yang bermakna memboikot dan tidak membeli barang-barang yang berafiliasi Israel, hal tersebut dimulai dari seluruh stok di Koperasi Pondok Pesantren Al Hikmah tidak membeli dan mendistribusikan kepada santri/santriyat yang berafiliasi produk Israel seperti seluruh produk *unilever*, *danone*, *nestle, coca cola group, McDonald* dan seterusnya. Bentuk sikap tersebut ialah ikhtiar mendukung Palestina terbebas dari genosida yang dilakukan oleh Israel. Jika santri didapati masih menggunakan produk terafiliasi Israel setelah imbauan berlaku, makan akan dikenakan sanksi/ta'zir[27].

Imbauan tersebut tidak sebatas pada wacana semata, namun seluruh santri/santriyat diminta menyebarluaskan kepada khalayak umum perihal tindakan zionis yang merebut kebebasan maupun Hak Asasi Manusia warga Palestina. Santri/santriyat memiliki inisiatif membuat berbagai *flyer* kemudian dijadikan status di platform masing-masing, ikhtiar tersebut digalakkan tidak hanya sekali-dua kali melainkan setiap waktu selalu dilakukan. Ikhtiar kecil tersebut diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap kemerosotan saham yang dimiliki oleh perusahaan asing maupun dari perusahaan internal yang mendukung tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut[28]. Para santri/santriyat sangat *tawadhu'* terhadap dawuh para masyayikh untuk menolak dan tidak membeli bahkan menyuarakan penindasan Hak Asasi Manusia secara terang-terangan, berdasar

---

26 Intan Amalia H. A., Wawancara dengan Pengurus PP Al Hikmah Kediri, 23 November 2023.

27 Maghfiroh (nama samaran), Wawancara dengan Pengurus PP Al Hikmah Kediri, Desember 2023.

28 Nabila (nama samaran), Wawancara dengan Pengurus PP Al Hikmah Kediri, 1 Januari 2024.

pada *dawuh* tersebut seluruh santri/santriyak kompak menyuarakan dengan menghindari membeli produk berafiliasi Israel dan membuat *flyer* yang berisi pemboikotan, bahkan mayoritas santri diharuskan menginstall aplikasi yang dapat mengidentifikasi produk-produk pro Israel[29].

Gerakan '*Julid fi Sabilillah*' yang diinisiasi oleh para santri/santriyat dengan melakukan pemboikotan di beberapa platform mereka seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok dan seterusnya memiliki dampak produk-produk yang terafiliasi Israel tidak laku di seluruh toko yang wilayahnya di sekitar Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri.

Respon Nahdlatul Ulama' terhadap Gerakan Boikot Produk Israel oleh Santri di Pondok Pesantren Al Hikmah Kediri Melalui Media Sosial

Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh beberapa Kyai di wilayah Jawa Timur, bertujuan untuk mengorganisir seluruh pemeluk agama Islam, khususnya mereka yang menganut mazhab Syafi'idan berhaluan Ahlusunnah Waljamah. Secara umum, ada banyak kegiatan keagamaan, sosial dan budaya, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang lahir pada masa penjajahan Belanda. Kegiatan-kegiatan tersebut lahir dalam situasi yang sulit dan mengalami banyak penindasan[30].

Sebagai sebuah organisasi keagamaan di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam ranah geopolitik dan kemanusiaan bagi bangsa Indonesia, seperti yang telah diakui dunia secara luas. Peran Nahdlatul Ulama dalam perjuangan, peran, dan fungsi bantuan kemanusiaan telah memberikan pengaruh besar dalam melawan penjajahan Belanda dan perjuangan rakyat Palestina[31]. Seruan tersebut faktanya tidak membuat genosida berakhi, karenanya Indonesia hingga merupakan salah satu Negara

---

29 KH. Abdul Wachid Badrus, Wawancara dengan Ketua Yayasan PP Al Hikmah Purwoasri Kediri, 3 Januari 2024.

30 Alvi Maghfiroh, "Menakar Peran Dan Posisi Nahdlatul Ulama Dalam Upaya Penguatan Geopolitik Indonesia," *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (23 Desember 2023): 101, https://doi.org/10.37092/khabar.v5i2.487.

31 Maghfiroh, "Menakar Peran Dan Posisi Nahdlatul Ulama Dalam Upaya Penguatan Geopolitik Indonesia."

yang mendukung boikot seluruh produk-produk terafiliasi Israel.

MUI dalam Fatwanya No 83/2023 tentang Hukum Dukungan terhadap perjuangan Palestina[32] merupakan bukti nyata Indonesia dalam menyuarakan pembebasan penindasan Hak Asasi Manusia oleh Zionis. Masyayikh di Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri merupakan kalangan tokoh Nahdlatul Ulama juga memberikan responnya terhadap tindak nyata para santri, sebagaimana dijelaskan pada poin pertama dalam fatwa tersebut yang diwakili oleh KH. Abdul Wahid Badrus dan KH. Abdun Nashir Badrus sepakat dan sangat setuju dengan poin pertama tersebut.

Romo KH. Abdun Nashir Badrus sangat menyetujui isi fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina. Beliau setuju berdasar pada argumentasi MUI, jika ada yang memerangi orang Islam memang harus ada perlawanan (*muqawamah*), dimana konflik antara Israel dan palestina tidak sekedar politik melainkan konflik antar umat. Oleh karenanya, boleh melakukan perlawanan yang berpotensi melemahkan zionis termasuk *muqata'ah* (boikot), *muqawamah* (melakukan perlawnan) dan menutup akses yang berpotensi mereka mendapatkan hukuman[33].

Romo KH. Abdul Wachid badrus mengatakan, umat Islam berkewajiban untuk membantu sesama umat Islam yang membutuhkan dan turut memperjuangkan keadilan di dunia, termasuk agresi Israel ke Palestina. Contoh utama yang menjadi tuntutan bagi umat Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina adalah dengan melihat kebrutalan agresi yang dilakukan Israel. Oleh karenanya, haram hukumnya mendukung agresi yang dilakukan oleh Israel[34].

Imbauan terakhir oleh MUI terdapat di point ke empat, KH. Abdun nashir Badrus sepakat atas imbauan aksi boikot, karena merupakan bentuk ikhtiar agar tidak hanya berpangku tangan. Maka perwujudannya dengan melakukan pemboikotan atau menghindari prouk-produk terafiliasi Israel. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, kemudian terdapat 2 hewan yakni cicak

---

32 Fatwa MUI, "Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina," Pub. L. No. 83 (2023).

33 KH. Abdun Nasir Badrus, Wawancara dengan Pengasuh PP Tahfizul Qur'an Al Hikmah Kediri.

34 KH. Abdul Wachid Badrus, Wawancara dengan Ketua Yayasan PP Al Hikmah Purwoasri Kediri.

yang meniup api agar membesar dan katak yang menyiram air agar api padam. Islam melihat kedua usaha dua hewan tersebut, karena Allah melihat mereka memiliki usaha membantu Nabi Ibrahim, akhirnya dihukumi membunuh katak haram sedangkan membunuh cicak ialah sunnah. Penjelasan tersebut sesuai dengan metode ijtihad yakni metode *ilhaqi*, yang mana suattu persoalan tertentu dasar hukumnya dianalogikan dengan kasus serupa lainnya. Bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh para santri/santriyat Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri dalam menyuarakan Hak Asasi Manusia tertuang dalam seruan pemboikotan produk-produk Israel melalui media sosial masing-masing yang secara rutin masih dilaksanakan hingga saat ini[35].

Gerakan yang dilakukan oleh santri/santriyat merupakan bukti riil terhadap perlawanan dengan tujuan agar produk-produk tersebut berkurang demi penuntasan perampasan hak. Selain itu, beberapa dampak signifikan dari gerakan pemboikotan dari riset Rahmani dalam Fauzan ialah harga saham dari 30 perusahaan sampel dari negara-negara Pro-Israel terbukti mengalami penurunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa stabilisasi laba perusahaan dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap ancaman boikot global terhadap negara tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi yang mengerikan seputar konflik, yang telah menyebabkan kecaman publik atas tindakan genosida yang mengerikan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina[36].

Kesimpulan

Perilaku pemboikotan yang dilakukan oleh seluruh santri Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri melalui media sosial masing-masing seperti WhatsApp, Facebook, Instagram merupakan salah satu bentuk ikhtiar agar pemberantasan Hak Asasi Manusia Palestina terhentikan. Aksi tersebut memaikan peran penting media sosial sebagai platform untuk menyuarakan opini dan membentuk pandangan kolektif masayarakat. Gerakan ini lazim dinamakan '*Julid fi Sabilillah*' dengan mengacu pada *dawuh* Kyai. Dampak signifikan dari bentuk boikot melalui media sosial yang paling terasa ialah di

35 KH. Abdun Nasir Badrus, Wawancara dengan Pengasuh PP Tahfizul Qur'an Al Hikmah Kediri.

36 Septiazi dan Yuliana, "ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GERAKAN BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA."

bidang ekonomi dan terlihat jelas pada penjualan toko disekitar Pondok Pesantren, melainkan nilai penjualan di beberapa penjualan perusahaan yang menjadi target boikot juga mengalami kemerosotan pada harga saham.

Daftar Pustaka

Barghouti, Omar. "BDS: Nonviolent, Globalized Palestinian Resistance to Israel's Settler Colonialism and Apartheid." *Journal of Palestine Studies* 50, no. 2 (2 April 2021): 108–25. https://doi.org/10.1080/0377919X.2021.1906067.

David Feldman. *Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel*. London: Palgrave Macmillan, 2019.

Della Porta dan M. Diani. *Social Movements: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell. Werbner*. Oxford: Blackwell Publishing, 2020.

Dewantara, Jagad Aditya, Sulistyarini, Afandi, Warneri, dan Efiani. "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (28 Januari 2023): 19–25. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4580.

Fatwa MUI. Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, Pub. L. No. 83 (2023).

Hitchcock, Jennifer. "Framing Palestinian Rights: A Rhetorical Frame Analysis of Vernacular Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement Discourse." *Rhetoric Society Quarterly* 53, no. 2 (15 Maret 2023): 87–103. https://doi.org/10.1080/02773945.2022.2095422.

Husein Muhammad. *Perempuan, Islam dan Negara*. Yogyakarta: Diva Press, 2022.

Intan Amalia H. A. Wawancara dengan Pengurus PP Al Hikmah Kediri, 23 November 2023.

Jamaluddin, Muhammad, dan Erik Ilham Habibillah. "PENGARUH KEBIJAKAN PBB DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 1 (27 Juni 2023): 28–46. https://doi.org/10.24042/tps.v19i1.16761.

K. Arsyad. *Objek Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah; Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.

KH. Abdul Wachid Badrus. Wawancara dengan Ketua Yayasan PP Al Hikmah Purwoasri Kediri, 3 Januari 2024.

KH. Abdun Nasir Badrus. Wawancara dengan Pengasuh PP Tahfizul Qur'an Al Hikmah Kediri, 15 Januari 2024.

Lee Jones. *Sanctioning Apartheid: Comparing the South African and Palestinian Campaigns for Boycotts, Disinvestment, and Sanctions. in Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel*. London: Palgrave Macmillan, 2019.

Lewiandy, Lewiandy, dan Alessandro Christian Max. "Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel Dan Palestina." *UNES Law Review* 6, no. 4 (13 Juni 2024): 10299–303. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2003.

Maghfiroh, Alvi. "Menakar Peran Dan Posisi Nahdlatul Ulama Dalam Upaya Penguatan Geopolitik Indonesia." *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (23 Desember 2023): 97–111. https://doi.org/10.37092/khabar.v5i2.487.

Maghfiroh (nama samaran). Wawancara dengan Pengurus PP Al Hikmah Kediri, Desember 2023.

Majid, Sharul Fitry Abdul, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, dan Muhammad Talhah Ajmain @ Jima'ain. "Fiqh Boycott On LGBT Community: A Review:" *Perdana: International Journal of Academic Research* 6, no. 2 (31 Desember 2019): 35–49.

Mokobombang, M. Alfa Riski, Fitria Ayu Lestari Niu, dan Jamaludin Hasan. "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 2 (30 Desember 2023): 88–95. https://doi.org/10.30984/maqrizi.v3i2.769.

Nabila (nama samaran). Wawancara dengan Pengurus PP Al Hikmah Kediri, 1 Januari 2024.

Rahmani, Annisa Nadiyah. "DAMPAK PERANG ISRAEL-HAMAS TERHADAP HARGA SAHAM DAN MINAT BELI MASYARAKAT PRODUK PENDUKUNG ISRAEL." *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (17 November 2023): 1444–56. https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.2104.

Septiazi, Muhammad Risqi Fauzan, dan Nina Yuliana. "ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GERAKAN BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 4 (6 Desember 2023): 134–44. https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1063.

Siregar, Idris, Dinar Maliki, dan Fakhrurrozi Nasution. "Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan*

Bisnis 2, no. 3 (28 Juni 2024): 181–92. https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i3.938.

Susilawati, Ade Tiara, Nur Anjeni Lestari, dan Puput Alpria Nina. "Analisis Sentimen Publik Pada Twitter Terhadap Boikot Produk Israel Menggunakan Metode Naïve Bayes." *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 26–35. https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.240.

Wibowo, Prihandono, Renitha Dwi Hapsari, dan Muchammad Chasif Ascha. "RESPON PUBLIK TERHADAP FATWA BOIKOT PRODUK ISRAEL OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA." *Journal Publicuho* 7, no. 1 (19 Maret 2024): 382–95. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371.

Rekayasa Toleransi: Hukum sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Perspektif Kesarjanaan NU

Abid Rohmanu

Toleransi merupakan pilar maha penting penting dalam membangun masyarakat yang majemuk dan harmonis. Di tengah kompleksitas kemajemukan agama, budaya, dan orientasi politik, toleransi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan harmoni sosial dan interaksi produktif. Toleransi adalah penerimaan terhadap kemajemukan sebagai kekayaan, bukan sebagai potensi konflik. Oleh karena itu, toleransi adalah aspek penting dalam program moderasi keberagamaan Kementerian Agama.[37]

Fakta di lapangan, kasus intoleransi dan konflik sosial masih marak terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi dalam pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan menyatakan bahwa kasus-kasus intoleransi masih terjadi di Indonesia. [38] Kantor Berita Radio mengabarkan 65 kasus intoleransi terjadi di Indonesia dalam rentang 2019-2023. [39] Setara Institut bahkan mencatat kenaikan kasus intoleransi menjelang tahun politik. [40] Di antara kasus intoleransi, yang paling kronis adalah intoleransi dengan motif agama, [41] seperti sulitnya pembangunan rumah ibadah hingga pembubaran kegiatan keagamaan oleh ormas. [42]

---

37 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., 2019).

38 Kompas, Jokowi: Masih Diemukan Beberapa Kasus Intoleransi, Ini Harus Jadi Perhatian Bersama, lihat https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/08/29/15321161/jokowi-masih-ditemukan-beberapa-kasus-intoleransi-ini-harus-jadi-perhatian.

39 KBR, *65 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia pada 2019-2023,* dalam https://m.kbr.id/nasional/11-2023/65-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-pada-2019-2023/113307.html.

40 Tempo, *Setara Institute Catat Kenaikan Kasus Intoleransi Jelang Tahun Politik,* https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1706562/setara-institute-catat-kenaikan-kasus-intoleransi-jelang-tahun-politik.

41 Humas Polri, *Intoleransi Masalah Kronis Kehidupan Beragama di Indonesia,* https://humas.polri.go.id/2023/09/30/intoleransi-masalah-kronis-kehidupan-beragama-di-indonesia/

42 BBC News Indonesia, *Kronologi Umat Kristen di Padang Diintimidasi dan Dibubarkan Saat Kebaktian,* https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/

Hukum adalah instrumen kunci kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi garda depan dalam mewujudkan masyarakat yang toleran dan moderat.[43] Instrumen hukum dalam hal ini diwujudkan dalam berbagai regulasi antidiskriminasi, penghormatan HAM, sistem peradilan yang berwibawa, dan pendidikan hukum yang berkarakter. Dalam teori hukum, dikenal istilah *law as a tool of social engineering*. Teori ini melihat hukum sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa sosial, mengendalikan kebiasaan negatif masyarakat (baca: intoleransi), dan membentuk nilai, budaya, norma, dan sikap yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

Perspektif kesarjanaan Nahdlatul Ulama (NU) sangat relevan dalam konteks rekayasa toleransi. NU dengan tradisi intelektual dan keagamaannya menawarkan pendekatan komprehensif[44] dalam mengatasi tantangan intoleransi. Perspektif kesarjanaan NU menekankan pentingnya pendidikan, dialog, dan advokasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam moderat. Perspektif kesarjanaan ini bisa menjadi pendekatan yang efektif dalam menghadapi isu-isu intoleransi.

Menggabungkan konsep *law as social engineering* dan perspektif kesarjanaan NU, tulisan ini akan memberikan analisis sederhana tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan moderat. Partisipasi aktif NU dalam proses ini memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mendukung toleransi dan harmoni sosial.

---

indonesia/articles/cd1g75exgkdo.amp. *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2023: Pendirian Rumah Ibadah Masih Sulit, https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/articles/cl79dv4x8lyo.amp.*

43 Friedman, L. M. (1The Legal System: A Social Science Perspective. (Russell Sage Foundation, 1975).

44 NU adalah organisasi nonpolitik yang bergerak tidak hanya dalam bidang organisasi keagamaan , tetapi juga sosio-budaya dan pendidikan. NU mempunyai ribuan lembaga pendidikan sejak dari TK hingga PT, pesantren, pusat-pusat pemberdayaan masyarakat dan lainnya. NU adalah organisasi civil society yang memediasi antara masyarakat dan kekuatan negara. Lihat Azra, A. ,"Indonesian Islam, mainstream Muslims and politics", *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives,* (Springer), 4.

Konsep Dasar Toleransi dalam Nalar Publik

Toleransi adalah terma teknis yang diperdebatkan pemaknaannya. Konsep toleransi bisa diterima oleh masyarakat sebagai implikasi logis kemajemukan, tetapi toleransi yang seperti apa masih diperdebatkan. Sebagaimana terma teknis demokrasi dan pluralisme, ide tentang toleransi diterima, tetapi teknis operasionalnya bisa berbeda-beda.

Setyabudi, Peneliti LIPI, mengidentifikasi beberapa interpretasi dan pemaknaan konsep toleransi. Pertama, toleransi dimaknai sebagai "sikap permisif" kelompok mayoritas untuk membagikan wewenangnya kepada minoritas dengan syarat tertentu. Kedua, toleransi dikonsepsikan sebagai upaya strategis-pragmatis untuk bersedia bekerja sama (ko-eksistensi) dalam relasi sosial untuk egalitarianisme dan minimalisasi konflik. Ketiga, toleransi dimaknai sebagai keterbukaan rekognitif dan penerimaan terbuka terhadap sikap dan pandangan kelompok lain yang berbeda secara mendasar. [45]

Definisi pertama dan kedua di atas dinilai masih lemah, sementara definisi ketiga cenderung terjebak pada relativisme. Setyabudi mengusulkan definisi toleransi yang bisa mendapatkan justifikasi dari berbagai sumber, moralitas agama, adat, dan konsensus yang diskursif. Toleransi menurutnya adalah:

> *"Sikap saling menghormati (mutual respect) dalam kesederajatan secara resiprokal dalam ruang privat dan ruang publik, dan sikap menghargai sesama warga negara .... meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda."* [46]

Justifikasi dari berbagai sumber perlu mendapatkan penekanan. Hal ini disebabkan toleransi adalah dasar interaksi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Toleransi seharusnya menjadi nilai universal di ruang publik. Pada sisi yang lain, menjadikan toleransi sebagai konsensus diskursif di ruang publik juga penting di alam demokrasi. Toleransi sebagai konsensus yang bersifat diskursif menuntut adanya dialog secara terus menerus. Dalam konteks perdamaian antaragama Hans Küng pernah mengatakan: "Tidak ada

45 Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, "Makna Toleransi dalam Ruang Muldimensi", dalam Ahmad Faizin Karimi dan David Efendi (ed.),, *Membaca Indonesia: Esai-Esai tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Air* (Gresik: Ceremedia Communication, 2020), 560.

46 Ibid.

kedamaian antar peradaban tanpa kedamaian antar agama; tidak ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama".[47]

Meminjam konsep John Rawls tentang *public reason* (nalar publik), agama dan ideologi apapun ketika hadir di ruang publik harus universal (bisa diterima oleh siapapun yang beragam latar belakang). Agama dan ideologi harus diformulasikan secara rasional di ruang publik. Ruang publik adalah ruang bersama yang berisi irisan-irisan nilai bersama (*kalimat al-sawa'*). Dalam konteks paradigma keagamaan, penghadiran nilai agama yang bersifat universal harus dimaknai justru sebagai fungsionalisasi dan sakralisasi agama di ruang publik, sebaliknya jika agama dihadirkan secara simbolik semata.[48]

Berdasar hal di atas, nilai toleransi adalah nilai bersama yang dihadirkan di ruang publik untuk menjaga harmoni dalam masyarakat tanpa adanya pemaksaan nilai-nilai dan keyakinan tertentu kepada pihak lain. Toleransi menjadi prasyarat masyarakat inklusif. Dalam konteks ini, toleransi penting untuk terus diwacanakan dan dialogkan untuk membangun konsensus. Dalam konteks negara hukum, konsensus tersebut diformalisasi dalam bentuk aturan dan budaya hukum yang bersifat mengikat.

Rekayasa Toleransi dan Intervensi Hukum

Merujuk pada teori *law as a tool of social engineering*,[49] rekayasa toleransi adalah upaya sadar untuk membangun dan mengokohkan sikap toleransi dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan dalam berbagai program dan kegiatan, seperti pendidikan multikultural, dialog lintas agama, dan perancangan aturan dan regulasi yang bersifat inklusif, dan lainnya. Rekayasa toleransi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang menghargai perbedaan/kemajemukan, masyarakat yang zero atau minimal tingkat konfliknya, dan kerja sama produktif antar individu/kelompok. Rekayasa toleransi melibatkan berbagai *stakeholders*: lembaga Pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu untuk mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan

47 Abid Rohmanu, *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam dan Etika Global* (Yogyakarta: Q-Media, 2021).

48 Abid Rohmanu, *Menyoal Nalar Privat dan Nalar Publik Keberagamaan Kita,* lihat https://geotimes.id/opini/menyoal-nalar-privat-dan-nalar-publik-keberagamaan-kita/.

49 Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

penerimaan terhadap kemajemukan masyarakat.

Selanjutnya, rekayasa toleransi dilakukan lewat instrumen hukum. Secara umum hukum dimaknai sebagai sistem regulasi/ aturan dan norma yang dirumuskan oleh otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum dirumuskan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat.

Dalam konteks negara hukum kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis pada *rule of law*. Tiga unsur utama *rule of law* adalah: (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*). Hukum mempunyai posisi tertinggi dan mempunyai kuasa penuh terhadap penyelenggara negara dan rakyat. (2) Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (nondiskriminasi); (3) Konstitusi didasarkan pada hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).[50]
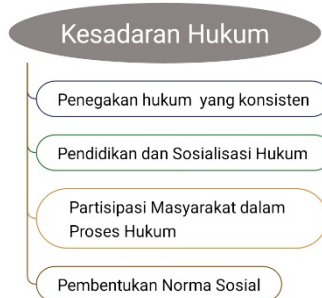
Ketika berbicara tentang hukum, regulasi bukanlah variabel yang tunggal. Hukum selama ini dikesankan secara formal dengan organ-organ formalnya, regulasi, aparat penegak hukum, dan sanksi. Senyatanya, hukum terkait dan berkelindan dengan banyak aspek. Dalam konteks hukum sebagai alat rekayasa sosial, pembangunan kesadaran hukum masyarakat bersifat urgen. Kesadaran hukum masyarakat adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku. Hukum berkaitan dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban, pengetahuan terhadap proses peradilan, dan kepatuhan terhadap hukum.

50 Abnan Pancasilawati, *Konsep Hukum Anti Korupsi* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 32.

Beberapa sub variabel yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum dapat digambarkan sebagai berikut

Dari gambar di atas, paling tidak ada empat sub variabel penting dari kesadaran hukum masyarakat. *Pertama*, penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsisten. Penegakan hukum adalah upaya dan proses yang dilakukan untuk tegaknya dan berfungsinya norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku untuk tujuan kedamaian dan ketertiban. Penegakan hukum dilakukan secara sempit oleh penegak hukum dan secara luas oleh semua subyek hukum yang terkait. Penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi subyek hukum (masyarakat) dengan aturan hukum. Tujuannya adalah proteksi dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan hak dasariah manusia. Dalam konteks ini pembangunan kesadaran hukum masyarakat menuntut penegakan hukum yang konsisten oleh subyek hukum, dimulai dari aparat penegak hukum.

Kedua, pendidikan dan sosialisasi hukum yang efektif. Pendidikan hukum baik yang bersifat formal maupun informal mempunyai kontribusi besar terhadap pembentukan kesadaran hukum. Ini bisa dilakukan oleh lembaga formal (sekolah dan PT) maupun informal oleh organisasi sosial kemasyarakatan. Pendidikan dan sosialisasi dengan melibatkan berbagai media informasi hukum yang berbasis digital/TI serta kearifan lokal.

Ketiga partisipasi hukum masyarakat. Kesadaran hukum juga bisa dibangun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Partisipasi hukum masyarakat bisa dilakukan sejak perumusan rancangan UU/aturan hingga implementasinya senyampang keterlibatan tersebut sesuai dengan koridor hukum.

Keempat pembentukan norma sosial baru. Hukum tidak hanya memunculkan norma-norma hukum formal. Kesadaran hukum masyarakat bermuara pada internalisasi masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang ending-nya menjadi bagian dari budaya dan perilaku sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks rekayasa toleransi, instrumen hukum yang perlu dipacu internalisasinya pada masyarakat meliputi: penegakan secara konsisten Undang-undang Anti-Diskriminasi, perlindungan kebebasan beragama, sistem peradilan yang mampu menjadi penengah konflik, penanganan secara baik hate speech (melalui media sosial), penguatan hukum perlindungan hak-hak minoritas,

anak dan perempuan. Semua ini merupakan intervensi hukum penting untuk rekayasa toleransi.

Perspektif Kesarjanaan NU

NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia. NU memiliki lebih dari 95 juta anggota pada tahun 2021. NU mempunyai Pendekatan yang moderat dan inklusif dalam beragama. Pendekatan ini sekaligus berperan penting dalam menanggulangi ekstremisme dan radikalisme. Konkritnya, NU mempromosikan Islam Nusantara yang menekankan pentingnya toleransi, pluralisme, dan adaptasi budaya lokal. NU juga terlibat dalam pendidikan melalui lebih dari 6.800 pesantren dan 44 universitas. Melalui berbagai program, NU berkomitmen untuk menyebarkan pesan Islam yang damai dan toleran dalam konteks sosial Indonesia yang majemuk.[51]

Pendekatan di atas menciptakan pola berislam yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Program-program sosial dan pendidikan yang dijalankan NU kontributif terhadap peningkatan kesadaran toleransi dan hak asasi manusia.[52]Selain itu, NU sering terlibat dalam dialog antaragama dan budaya sebagai upaya untuk membangun komunikasi dan kerja sama antar kelompok yang berbed. Ini menjadi bagian dari strategi rekayasa dalam membumikan toleransi dan mencegah konflik sosial.[53] Melalui forum-forum diskusi dan pertemuan rutin, NU menciptakan ruang untuk berbagi pandangan dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik secara lokal maupun nasional.

Di samping hal di atas, NU juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan etika dalam sistem pendidikan Islamnya. Dengan menanamkan nilai-nilai *tawassuth, tawazun, i'tidal*, dan *tasamuh* NU berupaya membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga secara karakter (memiliki

---

51 Nahdlatul Ulama - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama

52 Mujamil Qomar, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam." el Harakah, 17/2015(2).

53 Melalui forum seperti ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023, NU mendorong komunikasi terbuka untuk mengatasi konflik yang melibatkan agama, dengan fokus pada nilai-nilai universal dari berbagai tradisi agama. Lihat, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/02/semangat-melahirkan-perubahan-dunia-dengan-dialog-jujur-dan-terbuka-antaragama?utm_source=perplexity

empati dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan). Program pendidikan ini mencakup kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran agama dengan nilai-nilai universal, yang diharapkan dapat mengurangi potensi radikalisasi di kalangan pelajar.

Melalui upaya tersebut, NU menunjukkan komitmen kuat dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Peran NU sebagai penjaga nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk di tengah ancaman puritanisme. Dengan terus mengembangkan program dan inisiatif yang mendorong rekayasa toleransi, NU tidak hanya berkontribusi pada kehidupan beragama yang lebih inklusif di Indonesia, tetapi juga memberikan contoh bagi komunitas Muslim di seluruh dunia.

Tantangan dan Solusi dalam Perspektif

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa kasus intoleransi untuk melihat sebaran isu untuk kemudian dianalisis sesuai dengan pendekatan intervensi hukum (rekayasa toleransi). Di antara kasus dan isu intoleransi dalam beberpa tahun terakhir adalah *pertama*, intoleransi agama. Media suara.com mengidentifikasi sembilan kasus intoleransi agama yang terjadi di Yogyakarta sejak tahun 2019. Sembilan kasus intoleransi di kota tersebut berkaitan dengan relasi antar agama (Islam-Kristen) dan "pemurnian agama" yang dilakukan oleh Muslim Puritan.[54] Sementara itu di Padang Sumatera Barat Belasan Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Solagracia di Lubuk Begalung, Padang Sumatera Barat diintimidasi dan dibubarkan saat melaksanakan kebaktian yang dilakukan di sebuah rumah kontrakan.[55] Ini adalah sedikit contoh saja dari masih maraknya intoleransi agama.

Kedua, Konflik Agama dan Suku. Konflik antar agama masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Potensi konflik ini memang ada di banyak wilayah, dan yang bersifat laten adalah seperti yang terjadi di Poso[56] dan Papua.[57] Sementara itu konflik antar suku juga

54 Mediasuara.com

55 Kronologi Umat Kristen di Padang Diintimidasi dan Dibubarkan Saat Kebaktian dalam https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo

56 Konflik Poso: Latar Belakang, Kronologi dan Penyelesaian dalam https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/100000279/konflik-poso-latar-belakang-kronologi-dan-penyelesaian?page=all

57 Indonesia: Ketegangan antar Agama di Papua, lihat https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-communal-tensions-papua

masih kerap terjadi, di antaranya konflik antara Suku Lampung dan Bali (2012) dan konflik antara Suku Nduga dan Lani Jaya di Kampung Wouma (2022).[58]

Selain kasus-kasus di atas, terdapat pula kasus-kasus intoleransi yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender berbasis agama, pemanfaatan simbol dan isu agama untuk kepentingan politik praktis, dan implementasi/penerapan agama yang yang bersifat harfiyah/ tidak kontekstual. Dalam konteks kontemporer, maraknya kasus intoleransi disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi. Dalam berbagai kasus, pemahaman keagamaan yang ahistoris dan politisasi agama sering menjadi pemicu intoleransi.

Tantangan Utama

Berbagai kasus di atas mengilustrasikan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam upaya menciptakan masyarakat yang toleran di Indonesia. hal ini juga menunjukkan pendekatan *law as a tool of social enginereeng* (rekayasa toleransi) relatif belum dinilai berhasil. Persoalannya bukan pada ketiadaan regulasi dan materi hukumnya, tetapi pemahaman hukum masyarakat dan aparat yang masih banyak berada pada level formal dari pada subtansi. Hukum juga belum merasuk pada wilayah kesadaran hukum yang subtantif. Buktinya penyiasatan hukum masih sering marak terjadi.[59] Tantangan ini tidak hanya terkait dengan penegakan regulasi yang ada, tetapi juga mencakup resistensi sosial dan kultural di tingkat lokal yang sering kali menghambat implementasi kebijakan toleransi. Oleh karena itu, tantangan utama dalam menciptakan masyarakat yang toleran bukan hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada bagaimana membangun kesadaran dan penerimaan terhadap

---

58 5 Contoh Konflik antar Suku yang Pernah Terjadi di Indonesia. Lihat https://m.kumparan.com/sejarah-dan-sosial/5-contoh-konflik-antar-suku-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-20LJ7KCusUi/full.

59 Beberapa contoh misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang membatasi pengadilan dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama. SEMA ini menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia seperti SETARA Institute, yang menilai bahwa keputusan tersebut menghambat progresivitas dan hak-hak warga negara yang beragam. Lihat https://setara-institute.org/sema-22023-tidak-kompatibel-dengan-kebinekaan-dan-negara-pancasila/. Selain itu fenomena #noviralnojustice dan #percumalaporpolisi di media sosial mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak transparan dan responsif, serta adanya intervensi dalam proses hukum.

keberagaman di tengah masyarakat yang masih sarat dengan prasangka dan ketidakpahaman.

Berikut ini adalah beberapa identifikasi tantangan penciptaan masyarakat yang toleran:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat
   Banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan toleransi belum merata dan belum menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan.[60] Dalam perspektif NU, ini adalah tantangan besar karena toleransi merupakan salah satu nilai inti yang diajarkan dalam Islam. Kurangnya pemahaman ini bisa jadi akibat dari minimnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan inklusif, serta kurangnya penyuluhan mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
2. Sikap Diskriminatif Aparat Penegak Hukum
   Beberapa aparat penegak hukum masih bersikap diskriminatif dalam menangani kasus-kasus intoleransi.[61] Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang pentingnya nondiskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dalam perspektif NU, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif adalah esensial untuk menciptakan keadilan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum yang diskriminatif sering kali memperburuk situasi dan menambah ketegangan antar kelompok.
3. Regulasi yang Kurang Efektif
   Beberapa regulasi terkait pembangunan rumah ibadah dan perlindungan terhadap kelompok minoritas masih kurang efektif dan tidak tegas dalam penerapannya. Menurut laporan dari Humas Polri, banyak kasus intoleransi, termasuk pelarangan pembangunan tempat ibadah, terjadi karena aparat pemerintah mengacu pada ketetapan adat yang tidak

60 Imam Jazuli, "Mendesaknya Pendidikan Toleransi", dalam https://nu.or.id/opini/mendesaknya-pendidikan-toleransi-2qQfi?utm_source=perplexity.

61 Menurut penelitian, diskriminasi dalam penegakan hukum sering kali terjadi karena faktor-faktor nonlegal seperti ras tersangka dan hubungan sosial antara tersangka dan pelapor, yang dapat memengaruhi keputusan polisi dalam penanganan kasus. Lihat, Suparman Marzuki, "Diskriminasi Penegakan Hukum", dalam https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/22/diskriminasi-penegakan-hukum?utm_source=perplexity.

mengakomodasi keberagaman agama.[62] Hal ini menyebabkan banyaknya celah yang dimanfaatkan oleh kelompok intoleran untuk melakukan aksi diskriminatif. Dalam pandangan NU, regulasi yang efektif dan tegas sangat diperlukan untuk memastikan semua kelompok dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati.

4. Kurangnya Dialog Antaragama
   Dialog antaragama masih minim dilakukan, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik. Dialog antaragama penting untuk membangun saling pengertian dan kerja sama antar kelompok yang berbeda. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki sejarah panjang dalam mempromosikan dialog antaragama dan kerjasama lintas agama. Menurut laporan dari PBNU, mereka terus mendorong dialog terbuka untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan agama, seperti yang terlihat dalam konferensi ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023. Kurangnya dialog ini menjadi tantangan serius dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan toleran, sementara banyak daerah masih mengalami ketegangan antaragama akibat kurangnya komunikasi dan pemahaman yang mutual.[63]

Solusi

Solusi terhadap tantangan intoleransi dan diskriminasi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dalam konteks teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), peran hukum sangat penting sebagai instrumen pembentuk perilaku dan nilai-nilai masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan ini melalui berbagai inisiatif dan

62 "Intoleransi Masalah Kronis Kehidupan Beragama di Indonesia" - Humas Polri.

63 Hidayat Salam, "NU Dorong Dialog Jujur Atasi Konflik yang Libatkan Agama", dalam https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/02/semangat-melahirkan-perubahan-dunia-dengan-dialog-jujur-dan-terbuka-antaragama?utm_source=perplexity. Aru Lego Triono, "Dialog Antar-Budaya dan Agama Jadi Sumbangsih PBNU Jadikan ASEAN Pusat Pertumbuhan Ekonomi", dalam https://www.nu.or.id/nasional/dialog-antar-budaya-dan-agama-jadi-sumbangsih-pbnu-jadikan-asean-pusat-pertumbuhan-ekonomi-RFufU?utm_source=perplexity.

program yang berkaitan dengan pendidikan, penegakan hukum, dan promosi dialog antaragama. Dengan optimalisasi peran lembaga dan Badan Otonom (Banom) di bawah naungannya, NU dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penciptaan masyarakat yang toleran dan inklusif.

1. Pendidikan Toleransi dan Hak Asasi Manusia
   NU dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pendidikan toleransi dan hak asasi manusia di semua jenjang pendidikan. Melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah, NU dapat menyisipkan materi tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Pendidikan ini harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan keislaman NU yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, NU dapat mengembangkan program-program pelatihan dan penyuluhan untuk guru dan pendidik tentang cara mengajarkan toleransi dan kerukunan.
2. Kajian, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Pemangku Kepentingan
   NU dapat berperan aktif dalam melakukan kajian, pelatihan dan penyuluhan kepada pemangku kepentingan "rakayasa toleransi" tentang pentingnya nondiskriminasi dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Melalui lembaga-lembaga seperti Ikatan Sarjana NU (ISNU) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, program-program kajian dan pelatihan dapat dirancang untuk kepentingan rekayasa toleransi.
3. Penegakan Hukum yang Tegas
   NU dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap kelompok minoritas. NU memiliki jaringan luas yang dapat dimanfaatkan untuk mengadvokasi penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran regulasi yang ada. NU dapat memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan untuk melindungi semua kelompok dalam masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya.

4. Promosi Dialog Antaragama
   NU dapat terus mempromosikan dan memfasilitasi dialog antaragama secara rutin di semua daerah. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas dan pengaruh besar di kalangan umat Islam, NU memiliki kapasitas untuk menginisiasi dialog antaragama yang konstruktif. Dialog ini penting untuk membangun saling pengertian dan kerja sama antar kelompok yang berbeda, serta untuk mencegah terjadinya konflik sosial. NU dapat mengundang tokoh-tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum untuk terlibat dalam dialog-dialog ini, serta menyusun program-program yang mendorong kerja sama lintas agama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi.
5. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat
   NU dapat meningkatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat lainnya dalam mempromosikan toleransi dan moderasi beragama. Melalui program-program bersama dengan Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya, NU dapat memperkuat upaya-upaya untuk membangun masyarakat yang lebih toleran. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
6. Peningkatan Kapasitas Kader NU
   NU dapat terus meningkatkan kapasitas kader-kadernya melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai toleransi, moderasi, dan pluralisme. Kader-kader NU yang terdidik dan terlatih dengan baik akan mampu menjadi agen perubahan yang efektif dalam masyarakat, menyebarkan pesan-pesan toleransi dan kerukunan di tingkat lokal dan nasional. NU juga dapat mengembangkan program-program beasiswa dan pelatihan khusus bagi kader-kader muda untuk memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu pluralisme dan hak asasi manusia.
7. Penyuluhan dan Advokasi Kebijakan
   NU dapat berperan dalam melakukan penyuluhan dan advokasi kebijakan kepada pemerintah untuk memastikan regulasi yang mendukung toleransi dan perlindungan terhadap kelompok

minoritas diterapkan dengan efektif. NU dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, NU dapat berperan dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah intoleransi dan diskriminasi dalam masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, NU dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman. Peran NU dalam pendidikan, pelatihan, dialog antaragama, dan advokasi kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, NU dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan intoleransi dan membangun masyarakat yang harmonis dan damai. *Wallah A'lam!*

Kesimpulan

Rekayasa toleransi melalui instrumen hukum dan perspektif kesarjanaan NU menawarkan solusi efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Pendekatan NU yang moderat dan inklusif dalam mengadvokasi nilai-nilai toleransi, melalui pendidikan, dialog antaragama, dan advokasi kebijakan, mampu memberikan dampak signifikan dalam membentuk kesadaran dan praktik toleransi di tengah masyarakat. Tantangan utama, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, diskriminasi oleh aparat penegak hukum, serta regulasi yang kurang efektif, dapat diatasi dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan terus mengembangkan inisiatif-inisiatif yang mendorong rekayasa toleransi, NU tidak hanya berkontribusi pada stabilitas sosial dan keutuhan bangsa, tetapi juga memberikan teladan bagi komunitas Muslim global dalam menghadapi isu-isu intoleransi dan diskriminasi.

Daftar Pustaka

Abid Rohmanu. (2019). *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Abid Rohmanu. (2021). *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam dan Etika Global*. Yogyakarta: Q-Media.

Abid Rohmanu. (2023). Menyoal Nalar Privat dan Nalar Publik Keberagamaan Kita. Retrieved from https://geotimes.id/opini/menyoal-nalar-privat-dan-nalar-publik-keberagamaan-kita/

Azra, A. (n.d.). Indonesian Islam, mainstream Muslims and politics. In *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives* (Springer).

BBC News Indonesia. (2023). Kronologi Umat Kristen di Padang Diintimidasi dan Dibubarkan Saat Kebaktian. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Hidayat Salam. (2023). NU Dorong Dialog Jujur Atasi Konflik yang Libatkan Agama. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/02/semangat-melahirkan-perubahan-dunia-dengan-dialog-jujur-dan-terbuka-antaragama

Humas Polri. (2023). Intoleransi Masalah Kronis Kehidupan Beragama di Indonesia. Retrieved from https://humas.polri.go.id/2023/09/30/intoleransi-masalah-kronis-kehidupan-beragama-di-indonesia/

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

KBR. (2023). 65 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia pada 2019-2023. Retrieved from https://m.kbr.id/nasional/11-2023/65-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-pada-2019-2023/113307.html

Kompas. (2023). Jokowi: Masih Diemukan Beberapa Kasus Intoleransi, Ini Harus Jadi Perhatian Bersama. Retrieved from https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/08/29/15321161/jokowi-masih-ditemukan-beberapa-kasus-intoleransi-ini-harus-jadi-perhatian

Mujamil Qomar. (2015). Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam. *el Harakah*, 17(2).

Nahdlatul Ulama. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama

Prabowo Setyabudi, M. N. (2020). Makna Toleransi dalam Ruang Multidimensi. In A. Faizin Karimi & D. Efendi (Eds.), *Membaca Indonesia: Esai-Esai tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Air* (p. 560). Gresik: Ceremedia Communication.

Tempo. (2023). Setara Institute Catat Kenaikan Kasus Intoleransi Jelang Tahun Politik. Retrieved from https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1706562/setara-institute-catat-kenaikan-kasus-intoleransi-jelang-tahun-politik.

Gerakan Mahasiswa dan Momentum Historis

Murdianto

Seorang terpelajar harus berlaku adil
bahkan sejak dalam pikiran...
(Mas Tirto Adhie Soerjo, Pelopor Pers Perjuangan)

Ada beberapa angka penting dalam gerakan kaum muda dan mahasiswa di Indonesia. Yakni ‘08, ‘28, ‘45, ‘66, ‘74, ‘98. Beberapa momentum historis pada tahun-tahun ini memang dimulai dari gerakan kaum muda terpelajar. Pada era politik etis pada awal abad XX, momentum lahirnya kelas menengah terpelajar di Indonesia memberi warna baru dalam pola gerakan kaum muda di Indonesia. Era sebelumnya mereka ikut bergabung dalam gerakan fisik dan ke-laskar-an, misalnya hal ini terjadi di era Diponegoro, kita mengenal tokoh muda Sentot Ali Basyah Prawirodirjo misalnya. Di era ini gerakan kaum muda dan mahasiswa mulai melihat secara lebih luas problem yang dialami bangsa ini. Kolonialisme bukan hanya telah memasung secara fisik bangsa ini, namun juga telah melakukan eksploitasi dan pembodohan begitu rupa.

Tersebutlah nama RM Tirtoadisoerjo, HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Soewardi Surjaningrat, Soetomo, Tan Malaka, dan Semaun untuk menyebut beberapa nama, dengan tujuan yang kurang lebih sama menentang kolonialisme. RM Tirto Adhi Soerjo, misalnya memulai perlawanan dengan gerakan jurnalisme advokasi melalui koran pribumi pertama Medan Prijaji. Soekarno mendirikan sebuah kelompok kajian bernama Algemene Studi Club, mereka melakukan kerja mulai kajian kritis terhadap politik kolonial, melakukan advokasi pada masalah-masalah yang dialami pribumi hindia, dan menerbitkan sebuah buletin pergerakan yakni Soeloeh Indonesia Muda. Dan pada akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya PNI (Partai Nasional Indonesia). Sementara Soetomo dan Ki Hadjar Dewantoro, bergerak dalam kerja pencerdasan rakyat melalui Boedi Oetomo dan Taman Siswa. Ada melakukan gerakan ekstra parlementer dengan aksi massa dengan melakukan pengorganisiran massa rakyat, sebagaimana dilakukan Semaun dan Darsono dari SI Semarang yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya PKI. Sementara Tan Malaka dengan melakukan kerja-kerja under ground dengan pola-

pola gerakan intelejen untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme

Beberapa pola inilah yang kemudian menjadi, cikal bakal pola gerakan yang berkembang di era sesudahnya. Dengan varian ideologi masing-masing tentunya. Pada masa-masa berikutnya kaum muda terpelajar menemukan beberapa momentum dimana harus ada perubahan radikal, dengan berbagai pola gerakan menyatu dalam sebuah tujuan. Lihatlah ketika 1928, saat kaum muda menegaskan jati diri kebangsaannya dalam Sumpah Pemuda, kesadaran akan kebutuhan suatu bangsa telah dilalui dengan keberanian menyatakan lahirnya sebuah bangsa baru yakni Indonesia.

Sementara di tahun 1945, dimana konstelasi global sedang tidak menentu, para aktivis gerakan bawah tanah, menekan Soekarno untuk segera memerdekakan diri. Sutan Sjahriir, Soekarni dan kawan-kawannya adalah kaum muda yang memiliki kemampuan membaca kecenderungan perubahan global sehingga mampu mengambil langkah-langkah sigap dalam kondisi genting. Pada tahun 1955-1966, saat Demokrasi Terpimpin mengalami masalah akut perbenturan antar kekuatan politik dan otoritarianisme, dimana saat itu gerakan mahasiswa saling bermusuhan, GMNI, PMKRI, HMI bertarung dengan CGMI (organisasi mahasiswa PKI. Kemudian PMII berdiri sebagai ujung konflik kader NU dan Masjumi di HMI, karena HMI memang secara ideologis 'condong' kepada Masjumi, dan dianggap meminggirkan kader-kader NU. Gerakan Mahasiswa terpecah-pecah dalam pergumulan ideologis.

Ditengah situasi inilah tersebutlah nama Soe Hok Gie (Germasos), Mahbub Junaidi (PMII), Ahmad Wahib (HMI) yang bergerak dijalur jurnalisme, Zamroni (PMII), Hary Tjan Silalahi (PMKRI), AKbar Tandjung dan Fahmi Idris (HMI), dengan Zamroni sebagai ketuanya dengan mendirikan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) mengumpulkan kekuatan melalui gerakan ekstra parlementer dan melakukan aksi-aksi massa. Mereka berada dalam satu front yang sama, walaupun dengan payung ideologi politik dan gerakan yang berbeda. Perubahan mereka ciptakan. Walaupun dikemudian hari gerakan mereka di bajak oleh beberapa kawan mereka sendiri dengan memasuki ruang kekuasaan.

Mereka yang masih setia pada idealisme bergerak kembali di era 1974, ketika pembangunan ala Orde Baru melahirkan penjajahan baru yakni investasi ekonomi. Tersebutlah nama Hariman Siregar,

Heri Akhmadi dan beberapa nama lain yang harus mendekam dipenjara Orde Baru karena menolak politik investasi asing di Indonesia. Gerakan ini tidak bertahan lama, karena 4 tahun kemudian ditumpas melalui politik NKK/BKK (Normalisasi dan Birokratisasi Kehidupan Kampus), dimana mahasiswa di kungkung dalam penjara akademik semata. Mulai diperkenalkan konsep SKS, SKEK (Satuan Kredit Kegiatan Ekstra Kulikuler), organisasi tunggal Intra Kampus (Senat Mahasiswa) yang sangat mengekang kehidupan politik maupun keilmuan mahasiswa. Namun dalam kondisi demikian mahasiswa tetap bergerak melalui aras jurnalisme melalui majalah kampus, advokasi sosial dengan mendirikan ORNOP. Kita mengenal majalah mahasiswa Balairung dan Arena, misalnya, gerakan kajian dan advokasi sebagaimana yang dilakukan kaum muda di LP3ES dan P3M Jakarta, kelompok kajian kecil di berbagai daerah. Namun kontrol Negara sangatlah kuat, sehingga gerakan tersebut tidak berkembang kuat

Kaum muda terpelajar tidak pernah tiarap. Ketika Orde Baru, sudah jauh melangkah dan menafikkan nilai-nilai Keadilan dan kemanusiaan dalam pembangunan yang dilakukannya, sekitar awal tahun 1990, gerakan mahasiswa di berbagai jalur mulai mengkonsolidasikan diri. Hal serupa kembali terulang tahun 1998, saat Soeharto dengan militerisme dan birokratisme yang sangat otoriter. Gerakan Mahasiswa yang sebelumnya menempuh jalur jurnalisme dan advokasi kembali bersatu dalam satu front dengan jargon : reformasi. Semua garis ideologi dan kepentingan menyatu kembali. Runtuhlah sebuah rezim yang sangat kuat dan menindas.

Namun yang harus menjadi catatan: diluar semua angka itu lah sebenarnya masalah terjadi : *"Setelah perubahan radikal, banyak tokoh-tokoh gerakan yang harus memilih dua pilihan yang saling berlawanan. Pertama, masuk dalam kekuasaan dan menyerahkan agenda-agenda perubahan melalui proses politik, dengan resiko di cerca sebagai elit politik baru yang menjual idealisme, dengan pilihan kedua, setia pada pergerakan arus bawah dengan tetap berada pada basis perjuangan sebelumnya, dengan tetap mendorong agenda perubahan. Kedua hal ini selalu saja terjadi setelah angka-angka penting yang di sebutkan dimuka. Sementara itu agenda perubahan telah dibajak kelompok-kelompok yang berkepentingan merebut kekuasaan dengan jargon yang sama juga: perubahan, revolusi atau reformasi. Sementara kekuatan gerakan kaum muda terpelajar,*

kembali tercerai berai dalam berbagai pola, ideologi dan gayanya masing-masing. Sementara beberapa diantara mereka telah melakoni perselingkuhan terbuka dengan kekuasaan."

Pemikiran Kritis, Aksi Transformatif

Dalam melaksanakan tugasnya gerakan mahasiswa sebagai agen transformasi sosial modal yang pertama kali adalah membangun pemikiran kritis. Pengertian pemikiran kritis berporos pada tiga ciri *pertama,* pemikiran kritis berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari berbagai belenggu yang diakibatkan oleh proses sosial yang bersifat profan. *Kedua,* pemikiran kritis melawan segala bentuk dominasi dan penindasan baik secara ekonomi, politik dan sosial, jadi pemikiran kritis sejak awal memihak kaum tertindas *(mustadhafin)*. *Ketiga,* paradigma kritis membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik, oleh kepentingan ekonomi dan politis kelompok berkuasa.

Nalar kritis ini hanya bisa dibangun oleh aktivitas dialog antara teori dan realitas, antara aktivitas akademis dengan realitas sosial. Jadi mahasiswa memang harus melakukan diskusi secara intensif tentang konsep keilmuan, menyadari bahwa keilmuan tidak terlepas dari pertarungan kepentingan, dan secara langsung melakukan aksi sosial melalui pendampingan, aksi ekstraparlementer dan sekaligus menyuarakan ketimpangan sosial melalui media khas kelas menengah yakni tulisan. Mari kita belajar pada sejarah pergerakan kaum muda Indonesia di atas untuk melihat bagaimana nalar kritis harus dibangun.

Globalisasi dan student movement

Era pasca 1998 adalah contoh yang paling mudah di ilustrasikan dalam dua hal ini. Namun bukan berarti tidak ada titik temu, karena ada satu momentum historis yang belum selesai yakni melawan penindasan kapitalisme global dengan jargon globalisasi, anak pinak dari imperialisme dan kolonialisme dimasa lalu tentu dengan corak dan gaya lebih canggih.

Globalisasi, orang menyambutnya dengan gemuruh keceriaan, harapan tentang terangnya masa depan. Namun disisi lain memunculkan perdebatan dan bahkan pesimisme tentang kemuraman masa depan manusia. Setumpuk pandangan, perdebatan yang terangkum dalam ribuan tulisan, baik berupa buku, catatan-

catatan kecil telah banyak terbit. Ada yang optimis, ada yang pesimis dengan globalisasi. Globalisasi bukan sekedar suatu kenyataan yang mengisi sebuah ruang dan waktu, dalam arti realitas perkembangan kehidupan manusia. Lebih dari itu globalisasi, adalah setumpuk ide yang melampaui ruang dan waktu tertentu. Namun yang pasti banyak orang meyakini globalisasi, sebagai fase perkembangan kehidupan sosial yang mesti di terima.Globalisasi yang hampir tidak lain adalah proses hilangnya batas-batas geografis akibat perkembangan tekhnologi informasi, transportasi dan komunikasi. Semua serba cepat, serba instant. Namun tidak bisa dikatakan bahwa globalisasi adalah kebutuhan alamiah (natural) manusia, atau sebentuk keniscayaan. Globalisasi bagaimanapun hanya akan menguntungkan mereka yang menguasai tiga pilar diatas. Dan dapat dipastikan akibat proses ini adalah proses marginalisasi (peminggiran) individu, komunitas masyarakat atau bahkan suatu bangsa akibat mereka tidak menguasai pilar inti globalisasi.

Pada saat yang sama pergerakan informasi, jaringan dan modal tidak lagi terhambat oleh batas-batas ruang dan waktu. Runtuhnya saham pabrik sepatu Nike di Bursa Saham Wall Street New York, dalam hitungan hari akan mengakibatkan PHK massal di pabrik Nike di Tangerang itulah salah satu ilustrasi. Globalisasi telah menyatu dengan kekuatan kapitalisme, yang memang telah mengakumulasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi informasi. Lewat hegemoni globalisasi, tersebut banyak orang menderita amnesia kolektif, mereka lupa akan dosa-dosa kapitalisme sebagai cikal bakal globalisasi. Kapitalisme mutakhir bukan saja telah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan (seperti proteksi, subsidi) di tingkat nasional untuk melempangkan jalan kapital. Kapitalisme muthakir juga menghilangkan batas-batas etis maupun ekologis pada perdagangan. Ketika segala sesuatu bisa di perdagangkan, maka apapun-baik itu seni budaya, sel, gen, tumbuhan, benih, pengetahuan, air, bahkan polusipun-bisa di perjual belikan. Bahkan Bencana Lumpur korporasi pun yang menyengsarakan jutaan orang pun terjadi, dan seakan 'negara' makin kurang bernyali menghadapi kekuatan kapitalisme (nasional dan trans nasional). Dan tidak disadari hampir semua negeri di bumi mau tidak mau terjebak dalam kondisi semacam ini.

Dibagian lain, perkembangan global ini kemudian mendorong lahirnya situasi sosial dimana berbagai manusia dengan berbagai

pandangan hidup dan agama serta keyakinan berada dalam ruang sosial tertentu. Yang terjadi bukan sekedar interaksi antar manusia semata. Namun lebih dari itu adalah interaksi gagasan dan nilai. Hanya yang patut di cermati kemudian nilai-nilai yang dominan dan mampu seringkali muncul dalam ruang imajinasi publik (misalnya lewat media massa) tentu akan lebih menguasai. Tentunya soal-soal yang semacam inilah yang kemudian memancing resistensi kelopok sosial atau komunitas kebudayaan yang semakin tergusur akibat dominasi sebuah pandangan tersebut. Dalam konteks ini globalisasi tentunya akan terjadi defferesiasi secara horizontal, dalam arti akan lahir lapisan-lapisan budaya yang plural dalam masyarakat. Dalam konteks inilah globalisasi seringkali berarti tribalisasi.

Transformasi digital telah membuat medan perjuangan gerakan mahasiswa makin menantang. Realitas faktual telah melebur dengan realitas digital. Hegemoni dan ketidak-adilan makin canggih, tumpang tindih dan tak mudah di urai. Netizen dan dunia digital memiliki logika gerakan yang lebih rumit. Dunia digital bak 'ruang gema' yang menjebak manusia dalam zaman 'post truth' dimana kebenaran dapat diproduksi melalui kerja algoritma digital. Namun disana tetap ada peluang, banyak gerakan tumbuh cepat dan tanpa pemimpin muncul seperti kasus penentangan omnibus law (UU Cipta Kerja) atau Aksi Kawal Putusan MK pada kasus UU Pilkada ditahun 2024.

Di era seperti ini mahasiswa memang tidak bisa hanya mengandalkan semangat saja, namun juga bekal-bekal penguasaan terhadap tekhnologi informasi, kecerdasan membaca fenomena global, profesionalitas, kemampuan pengorganisasian yang lebih canggih dan tentu dengan visi gerakan yang kuat

*Murdianto**, bagian arus besar dinamika gerakan pemuda dan mahasiswa di awal era Reformasi 1998, Biro Kaderisasi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2005-2007, Bidang Pendidikan PW ISNU Jawa Timur 2017-2023*

Tantangan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di Era Kontemporer

Rinesti Witasari

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan yang didirikan pada tahun 1926 telah memainkan peran penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Para ulama NU sejak awal telah terlibat dalam upaya melawan kolonialisme, memperjuangkan kemerdekaan, serta mengukuhkan nilai-nilai Islam moderat yang sejalan dengan kebhinekaan Indonesia (Hasyim, 2001). NU terus bertransformasi menghadapi tantangan zaman. Organisasi ini berupaya menjaga relevansi dalam kehidupan masyarakat dan menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam era kontemporer, NU berusaha untuk memperkuat kembali pemahaman Islam moderat dan toleran yang telah menjadi ciri khas NU, dan membentuk generasi muda yang mempunyai pengetahuan agama dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman (Azizah, R 2020). Dalam menjaga kesinambungan perjuangan tersebut, mahasiswa NU sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang di ranah kebangsaan dan agama.

Mahasiswa NU tidak hanya menjadi penerus, tetapi juga representasi dari generasi muda Islam yang membawa misi kultural dan spiritual dari organisasi ini. Sejarah mencatat bahwa dalam masa perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh NU berperan penting dalam pendidikan, politik, dan sosial (Ichwan, 2001). Kini, mahasiswa NU menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan dinamis di era kontemporer. Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai perjuangan pendahulu, mahasiswa NU harus mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam konteks zaman yang berubah cepat (Azra, 2002).

Era kontemporer membawa berbagai tantangan multidimensional, termasuk tantangan intelektual dan sosial bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa NU. Salah satu dampak globalisasi yang signifikan adalah munculnya krisis identitas (Baso, 2015). Di satu sisi, globalisasi memberikan kemudahan akses informasi dan teknologi. Namun di sisi lain, hal ini juga memicu disorientasi

identitas, terutama bagi generasi muda yang terjebak antara modernitas dan tradisi, antara kemajuan teknologi dan etika agama. Mahasiswa NU harus mampu mempertahankan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan di tengah derasnya arus budaya asing yang tidak selalu selaras dengan tradisi lokal (Baso, 2015). Tantangan lainnya adalah meningkatnya radikalisme dan ekstremisme yang seringkali mengatasnamakan agama, termasuk Islam, untuk kepentingan politik atau kekerasan (Mujani, 2020). Mahasiswa NU, yang berlandaskan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, memiliki peran strategis sebagai benteng melawan narasi-narasi ekstrem yang tidak sejalan dengan Islam *rahmatan lil 'alamin* (Ahmad, 2015). Dalam era digital, mahasiswa NU juga dituntut untuk aktif dalam dakwah digital. Media sosial menjadi sarana efektif dalam menyebarkan pesan-pesan Islam yang moderat, toleran, dan damai kepada masyarakat luas, terutama generasi muda (Alatas, 2018). Selain itu, aktivisme sosial melalui organisasi-organisasi mahasiswa NU, seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), perlu terus diperkuat agar mahasiswa NU dapat berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai isu sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial

Tantangan yang dihadapi

Tantangan intelektual yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Globalisasi telah membawa kemudahan akses informasi dan teknologi, tetapi juga memicu disorientasi identitas bagi generasi muda (Baso, 2015). Mahasiswa NU harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Globalisasi telah membuka akses informasi yang lebih luas dan cepat. Dengan adanya internet dan media sosial, mahasiswa NU dapat mengakses informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk memperluas pengetahuan dan memahami berbagai perspektif. Namun, akses informasi yang terlalu luas juga dapat menyebabkan kebingungan dan disorientasi identitas. Generasi muda seringkali terpapar dengan berbagai informasi yang tidak selalu akurat atau relevan, yang dapat membingungkan mereka dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Belum lagi saat ini perkembangan *artificial intelligence* (AI) yang saat ini semakin meluas dan kompleks.

Tantangan sosial yang disebabkan oleh krisis identitas dan radikalisme. Krisis identitas terjadi karena generasi muda terjebak antara modernitas dan tradisi, antara kemajuan teknologi dan etika agama (Baso, 2015). Radikalisme dan ekstremisme juga menjadi tantangan besar bagi mahasiswa NU, karena seringkali mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik atau kekerasan (Mujani, 2020). Krisis identitas terjadi karena perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Generasi muda seringkali merasa terombang-ambing oleh berbagai informasi yang berbeda-beda, membuat mereka sulit menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Hal ini dapat menyebabkan krisis identitas, di mana individu merasa tidak yakin tentang diri mereka sendiri dan posisinya dalam masyarakat. Contohnya, dalam era digital, mahasiswa NU seringkali terpapar dengan berbagai informasi yang tidak selalu akurat atau relevan. Mereka mungkin merasa terdorong untuk memilih antara kemajuan teknologi yang cepat dan etika agama yang lebih tradisional. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa terjebak antara dua pilihan yang berlawanan, sehingga sulit untuk menentukan arah hidup mereka yang tepat.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, mahasiswa NU perlu mengokohkan kapasitas intelektualnya dengan terus belajar dan memperkaya wawasan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, pelestarian budaya dan tradisi lokal yang sejalan dengan ajaran Islam juga harus terus dilakukan agar identitas mahasiswa NU tetap terjaga (Wahid, 2001). Mahasiswa NU harus mampu menggunakan teknologi sebagai alat dakwah dan media untuk memperluas wawasan, bukan menjadi korban dari sisi negatif perkembangan teknologi (Alatas, 2018). Mereka harus terus belajar dan memperkaya wawasan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Pelestarian budaya dan tradisi lokal yang sejalan dengan ajaran Islam juga sangat penting. Mahasiswa NU harus terus memperkuat identitas mereka dengan menjaga dan mengembangkan budaya dan tradisi lokal yang telah ada (Wahid, 2001). Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti kajian ilmiah, diskusi tematik, serta keterlibatan dalam komunitas intelektual. Aktivisme Sosial dan Dakwah Digital. Dalam era digital, mahasiswa NU juga dituntut untuk aktif dalam dakwah digital. Media sosial menjadi sarana efektif dalam menyebarkan pesan-pesan Islam yang moderat, toleran, dan damai

kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

Selain itu, aktivisme sosial melalui organisasi-organisasi mahasiswa NU, seperti PMII, perlu terus diperkuat agar mahasiswa NU dapat berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai isu sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial (Ichwan, 2001). Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi langkah strategis untuk memperluas pengaruh dan dampak peran mahasiswa NU. Jaringan akademik, LSM, pemerintah, serta komunitas global dapat menjadi mitra dalam memperkuat dakwah dan memperluas jangkauan kerja-kerja sosial mahasiswa NU. Dengan kolaborasi ini, mahasiswa NU dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam kancah global dan memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan.

Kesimpulan

Mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) di era kontemporer menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan, baik dari segi intelektual maupun sosial, termasuk krisis identitas yang seringkali dihadapi generasi muda. Selain itu, radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama juga menjadi tantangan serius yang perlu dihadapi oleh mahasiswa NU. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, mahasiswa NU perlu memperkuat kapasitas intelektual mereka dengan terus memperdalam ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, serta mampu menavigasi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Di samping itu, pelestarian budaya dan tradisi lokal yang sejalan dengan ajaran Islam juga menjadi penting dalam menjaga identitas keislaman dan keindonesiaan. Dakwah digital melalui media sosial menjadi sarana strategis bagi mahasiswa NU untuk menyebarkan pesan-pesan Islam moderat dan toleran. Aktivisme sosial yang diperkuat melalui organisasi-organisasi seperti PMII perlu terus dioptimalkan agar mahasiswa NU dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial, serta memperkuat peran mereka dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Hasyim, M. (2001). Sejarah Perjuangan NU. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Ichwan, M. (2001). Tokoh-Tokoh NU dalam Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Azra, A. (2002). NU dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Baso, A. (2015). Krisis Identitas dan Globalisasi: Tantangan bagi Generasi Muda. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mujani, S. (2020). Radikalisme dan Ekstremisme: Ancaman bagi Islam Moderat. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Ahmad, A. (2015). Islam Moderat: Pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Alatas, S. F. (2018). Teknologi Digital dan Peranannya dalam Dakwah Islam. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wahid, A. (2001). Pembangunan Peradaban yang Berkelanjutan: Peran Mahasiswa NU. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Hasan Adi Nugraha (2020). Transformasi Pemikiran NU dalam Menghadapi Era Digitalisasi di Jakarta. Jurnal Al-Thariqah, 6(2), 187-200.

Perempuan Kepala Keluarga Sebagai Realitas Tidak Tercatat

Alfira Deviana

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 menyebutkan bahwa 14% rumah tangga di Indonesia, atau sekitar 9 juta rumah tangga dikepalai perempuan (penelitian tentang) *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Indonesia,* 2010). Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA) meyakini bahwa data ini merupakan fenomena gunung es—angka realita di lapangan jauh lebih tinggi. Ada beberapa alasan yang mendasari keyakinan ini. Pertama terkait definisi kepala keluarga yang hanya merujuk pada jenis gender laki-laki, yaitu menurut BPS, yang dapat membuat bias dalam penerapannya di lapangan. BPS mendefinisikan bahwa kepala keluarga adalah *pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga.* Ambigu dalam definisi inilah yang menjadi salah satu penyumbang rendahnya data rumah tangga yang dikepalai perempuan versi BPS saat ini. Dapat kita bayangkan, ketika proses survey atau pendataan dilakukan, hampir bisa dipastikan anggota masyarakat yang ditanya siapa kepala keluarga, sebagian besar akan menyebutkan figur suami atau ayah yang memang secara kultural dirujuk sebagai kepala keluarga. Nama perempuan sebagai kepala keluarga hanya akan muncul jika memang secara jelas keluarga itu sudah kehilangan figur laki-laki secara resmi, mungkin karena meninggal dunia atau bercerai secara nyata.

Kedua, adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat 3 yang berbunyi "Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga". Pemilahan secara tegas peran dan tanggung jawab suami istri dalam undang-undang ini telah menafikan keberadaan perempuan yang secara terpaksa maupun tidak menjadi kepala keluarga secara "de facto". Dan yang terakhir adalah nilai-nilai patriarkhi dalam proses konstruksi sosial masyarakat yang membagi peran laki-laki dan perempuan serta menempatkan laki-laki pada posisi pemimpin telah menjadi keyakinan kuat bahkan pada diri perempuan bahwa tidak ada perempuan yang boleh dan dapat menjadi kepala keluarga. Meskipun

demikian, dengan definisi itu saja BPS mencatatkan trend angka yang naik terus sepanjang kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir dengan kenaikan rata-rata pertahun sebanyak 0.1%, yang tidak dapat diabaikan dalam penerjemahan angka.

Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) dalam sepuluh tahun terakhir mengorganisir diri di tingkat akar rumput, di 450 desa di 19 Provinsi di Indonesia. PEKKA menemukan perempuan menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab. Paling tidak ada 9 kategori komunitas Pekka yang diambil dari realitas masyarakat. Sebagian besar perempuan menjadi Pekka karena suami meninggal dunia (39%) dan bercerai (13%). Namun penyebab karena tidak ada tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga juga cukup signifikan yaitu Pekka yang ditinggal suaminya begitu saja mencapai 7%, suami merantau bekerja untuk jangka waktu lama ada 9%, suami berpoligami dan mengabaikannya sebanyak 3%, dan suami cacat atau sakit menahun sehingga tidak lagi memegang peranan sebagai kepala keluarga mencapai 5%.

Sebab – Sebab Perempuan Menjadi Kepala Keluarga

Sebab perempuan menjadi kepala keluarga	Presentase
Karena suami meninggal dunia	39%
Karena bercerai	13%
Ditinggal suami begitu saja	7%
Suami merantau kerja dalam waktu lama	9%
Suami berpoligami dan mengabaikannya	3%
Suami cacat atau sakit menahun	5%
Perempuan lajang yang menjadi tulang punggung keluarga	11%

Secara normatif dan jika ditanya, sebagian Pekka dengan kategori ini masih menganggap bahwa dirinya adalah seorang istri dari seorang kepala keluarga yaitu suaminya yang telah bertahun-tahun tidak pernah hadir menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga. Yang cukup menarik adalah trend perempuan lajang yang menjadi tulang punggung keluarga yang cukup besar jumlahnya dalam komunitas Pekka yaitu 11%.

Diantara mereka ada yang belum pernah atau tidak menikah namun memiliki anak dari hubungannya dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya dalam realita di lapangan angka yang juga seharusnya cukup signifikan, namun belum secara radikal diungkapkan, adalah perempuan yang masih bersuami namun harus menjadi pencari nafkah utama dan mengurusi keluarganya, karena suami tidak memiliki pekerjaan atau bekerja tidak tetap dengan penghasilan yang tidak tetap. Di komunitas Pekka, ada 2% anggotanya yang masuk kategori ini.

Posisi Lemah dan Rentan

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga lainnya. Data yang diolah oleh Seknas PEKKA tahun 2009, memperlihatkan 67% komunitas Pekka yang didampingi berpenghasilan kurang dari Rp.15,000 per hari dengan tanggungan anggota keluarga hingga 5 orang. Dengan pendidikan formal yang terbatas bahkan 44% komunitas Pekka buta huruf dan hanya 5% yang merasakan bangku sekolah hingga SMA, mereka hanya memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas untuk mendukung keberlangsungan kehidupan keluarganya. Sebagian besar mempertahankan ekonomi keluarganya dengan bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil dan pengrajin. Karena itu tidaklah mengherankan jika kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan dan mereka kesulitan untuk mengirimkan anak-anaknya bersekolah. Penelitian Seknas PEKKA dan AIPJT (Australia Indonesia Partnership for Justice Transition) tahun 2009 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan anak-anak Pekka jauh berada dibawah standar pencapaian partisipasi sekolah Nasional.

No	Partisipasi Pendidikan	Anak PEKKA	Nasional
1	Tidak pernah sekolah	28%	8%
2	Tamat sekolah dasar	63%	72%
3	Tamat SMP	34%	41%
4	Tamat SMA	13%	23%

Sumber: Penelitian Seknas PEKKA dan AIPJ 2009

Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa untuk mengantarkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Pekka membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga menghabiskan sebagian besar penghasilannya. Biaya pendidikan sekolah dasar seorang anak Pekka menghabiskan 51% pendapatan per harinya, sekolah menengah pertama membutuhkan 140% penghasilannya, dan sekolah menengah atas memerlukan 170% dari pendapatannya.

Pengucilan dari sistem sosial masyarakat yang ada merupakan persoalan nyata yang dihadapi Pekka. Dalam sebagian besar kultur masyarakat kita, status perempuan sangat ditentukan oleh status perkawinannya. Perempuan yang paling tinggi derajatnya adalah perempuan bersuami, atau perempuan yang suaminya meninggal namun tidak kawin lagi. Perempuan cukup umur yang masih lajang, janda cerai dan perempuan yang mempunyai anak tanpa suami, memiliki status yang lebih rendah di dalam masyarakat. Menjadi perempuan tanpa suami, khususnya karena perceraian, bahkan aib bagi sebagian keluarga karena perceraian berarti kelemahan sebagai perempuan dan istri dalam sebuah perkawinan. Tanpa pernah mau melihat berbagai faktor penyebab dan kondisi perempuan bercerai, masyarakat cenderung menghakimi dan memberikan label buruk pada perempuan bercerai. Tidak heran jika banyak perempuan yang mati-matian bertahan dalam perkawinannya meskipun mengalami berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan, atau sudah bertahun-tahun ditinggalkan suaminya tanpa kabar karena merasa tidak sanggup menghadapi tekanan sosial sebagai perempuan bercerai. Dan banyak juga perempuan yang malu untuk mengatakan status “tanpa suaminya” dan berusaha menyembunyikannya. Meskipun masyarakat lebih bisa memaklumi dan menghormati perempuan yang suaminya meninggal dunia, namun tuntutan dan harapan terhadap mereka sama saja yaitu tidak kawin lagi—karena ketika perempuan kawin lagi berarti termasuk perempuan yang berperilaku tidak lazim dan tidak sesuai tuntutan norma tradisional tentang perempuan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan tanpa suami kerap menghadapi situasi yang serba salah. Sesama perempuan sering merasa terancam dengan keberadaan mereka di sekitarnya karena takut suaminya tergoda apalagi jika yang bersangkutan masih muda dan menarik. Laki-laki, di lain pihak, cenderung menganggap

mereka khususnya yang berstatus "janda" adalah mahluk lemah kesepian, yang pantas untuk digoda atau bahkan dimanfaatkan untuk memuaskan syahwatnya. Bahkan sebagian orang beranggapan bahwa "janda" adalah barang bekas yang bernilai rendah. Karenanya tidak heran jika kita sering mendengar kata "janda" dijadikan bahan tertawaan dalam banyak pembicaraan baik formal maupun non-formal. Istilah perempuan kepala keluarga (Pekka) sendiri, sebelumnya hampir tidak pernah dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Perempuan tanpa suami karena suami meninggal atau bercerai biasanya disebut "janda", sedangkan yang belum menikah disebut lajang. Istilah ini lebih erat kaitannya dengan status "perkawinan" perempuan, namun tidak perannya. Kata Pekka untuk menyebut perempuan tanpa suami yang berperan sebagai kepala keluarga merupakan bentuk perlawanan terhadap stereotipe "janda" yang selama ini dianggap rendah martabatnya, karena istilah Pekka mengedepankan peran, tugas dan tanggung jawab perempuan janda sebagai kepala keluarga.

Kerentanan posisi Pekka semakin bertambah, karena masih banyak komunitas Pekka yang berkeyakinan bahwa "bersuami" akan menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di wilayah-wilayah tertentu seperti Jawa Barat misalnya cukup banyak komunitas Pekka yang kawin dan bercerai berkali-kali. Hal ini sangat mudah terjadi karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi mereka, sehingga bersedia menikah tanpa pencatatan resmi. Penelitian Seknas PEKKA tahun 2009 juga memperlihatkan bahwa lebih dari 50% komunitas Pekka tidak memiliki pernikahan tercatat, dan lebih jauh lagi penelitian ini juga memperlihatkan hanya 1 dari setiap 10 perempuan miskin yang mengajukan perceraiannya melalui proses pengadilan. Selebihnya mereka memasuki dan meninggalkan perkawinan hanya melalui proses keluarga dan non-formal saja. Ketiadaan perlindungan hukum dalam status perkawinan ini, menyebabkan 78% komunitas Pekka yang bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan 56% anak-anak mereka tidak memiliki akte kelahiran.

Keterkucilan dan rasa percaya diri yang rendah membuat komunitas Pekka cenderung tersingkirkan dalam proses pembangunan dan kehidupan sosial. Selama ini, mereka hampir tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam proses sosial di masyarakatnya,

termasuk akses sumberdaya pembangunan yang kadang membanjiri wilayahnya. Misalnya salah satu penelitian Seknas PEKKA tahun 2009 juga menunjukkan bahwa sepertiga dari Pekka sangat miskin tidak mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang kontroversial itu, karena mereka tidak terdata.

Solusi: Pendidikan Kritis dan Perlindungan Hukum untuk PEKKA

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dimulai tahun 2001 merupakan inisiatif pertama mengorganisir Perempuan kepala keluarga (Pekka) miskin di Indonesia. PEKKA bertujuan untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil, dan bermartabat. Saat ini telah tumbuh dan berkembang 749 organisasi akar rumput (kelompok) Pekka dengan anggota mencapai 16,833 orang yang tersebar di 471 desa, 121 Kecamatan di 19 Provinsi di Indonesia. Kelompok-kelompok Pekka telah membentuk Serikat Pekka di tingkat Provinsi, dan mulai merintis Federasi Serikat Pekka di tingkat Nasional

Bertemu Pekka, sepintas, seperti berhadapan dengan potret suram perempuan yang muram, penuh airmata, penyesalan, keputusasaan dan ketidakberdayaan. Namun, dalam sepuluh tahun mengorganisir dan menemani perjalanan komunitas Pekka, gambaran ini tidak selalu benar. Pekka bukan perempuan lemah yang cengeng, peratap nasib ataupun perempuan kesepian, penggoda laki-laki seperti *stereotype* yang selama ini digambarkan. Pekka adalah potret kehidupan perempuan miskin yang realistis, penuh energi dan semangat kerja keras, kesabaran, ketabahan serta ketegaran yang luar biasa dan hampir tidak berbatas. Meskipun kemiskinan, keterkucilan, kesepian, trauma dan kesedihan, masih mendominasi sebagian kehidupan mereka, namun pengorbanan serta kesediaan menjalani nasibnya dengan penuh keikhlasan merupakan warna kehidupan Pekka yang dijumpai Pekka di lapangan. Mereka adalah gambaran nyata perempuan yang sangat bertanggungjawab terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya meskipun tidak pernah mendapatkan gelar “pemimpin” dan “kepala keluarga”. Apapun akan mereka lakukan meskipun mengorbankan kehidupannya guna mengantarkan anak-anak mereka pada kehidupan yang lebih baik. Ini adalah potensi perempuan pemimpin yang tidak boleh disia-siakan oleh negara.

Identifikasi masalah yang dilakukan oleh komunitas Pekka memperlihatkan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Pekka pada dasarnya disebabkan oleh tiga dimensi kekuasaan yang mengontrol kehidupan perempuan kepala keluarga, yaitu kekuasaan formal (*the visible power*), non formal (*hidden power*) dan tatanan nilai (*invisible power*) (Lisa Veneklasen, 2001). Oleh karena itu, proses Pemberdayaan Pekka harus mampu meningkatkan kemampuan komunitas Pekka membangun kekuatan individu maupun kolektifnya untuk mempengaruhi berbagai dimensi kebijakan demi kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan.

Cukup banyak waktu dan sumberdaya yang telah dialokasikan untuk mengorganisir seputaran "tata nilai" atau kekuasaan yang tidak terlihat yang telah memasuki kehidupan Pekka dan perempuan pada umumnya melalui proses "pencangkokan ideologi bias" terus-menerus melalui berbagai institusi kehidupan negara. Tujuan untuk mengubah pola pikir tidak mudah untuk direalisasikan. Pekka yang menganggap dirinya "bukan siapa-siapa" harus diyakinkan untuk melawan pemikiran tersebut dengan melihat bahwa dirinya adalah "seorang manusia dengan segala kemuliaan yang setara dengan lainnya", dan yang membuat mereka merasa berbeda dari lainnya dalam banyak aspek kehidupan hanyalah "kesempatan" yang selama ini ditutup untuk mereka. Pendidikan kritis dan pemaparan contoh-contoh kehidupan yang lebih baik dalam kesetaraan martabat dapat membantu Pekka secara perlahan mengubah cara pandang terhadap dirinya. Dan jika mereka telah sadar, mereka harus berhadapan dengan lingkungannya yang masih memiliki cara pandang tradisional tentang keberadaan mereka.

Keberadaan dan peran tokoh serta pemimpin baik dari kalangan agama dan adat, merupakan elemen "kekuasaan tersembunyi" yang selama ini banyak berperan dan berpengaruh dalam membangun persepsi dan kehidupan perempuan kepala keluarga, yang tidak dapat diabaikan. Misalnya interpretasi mereka tentang ajaran yang cenderung membenarkan kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan poligami yang semena-mena, membutuhkan "strategi" yang cerdas dan efektif dalam menyoalnya. Misalnya interpretasi ajaran agama dapat didialogkan dengan menekankan pada "konsep keadilan dan kemanusiaan" sebagai garis batasnya, serta melibatkan orang-orang yang berkompetensi dalam hal ini.

Peraturan perundangan, mekanisme dan struktur pengambilan keputusan, serta keberadaan aparat penguasa, adalah wujud kekuasaan formal yang besar pengaruhnya pada kehidupan perempuan kepala keluarga khususnya terkait akses sumberdaya dan keadilan. Oleh karena itu perundangan yang peka terhadap realita sosial yang ada, mekanisme dan struktur pengambilan keputusan yang bersahabat terhadap perempuan, serta aparat yang memahami kerentanan kelompok Pekka sangat diperlukan. Yang paling praktis dalam hal ini adalah membuat jumlah perempuan kepala keluarga menjadi nyata dalam angka statistik yang menjadi sumber berbagai kebijakan terkait akses sumberdaya dan keadilan. Perubahan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan agar lebih melindungi nilai-nilai luhur perkawinan dan konsep keluarga yang meninggikan martabat anggotanya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan merupakan hal yang harus dilakukan dalam waktu dekat.

Daftar Pustaka

Prof. Drs. KH. Hasbullah Ba. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 1985.

Penelitian Seknas PEKKA dan AIPJT (Australia Indonesia Partnership for Justice Transition) tahun 2009.

Dokumen Penelitian PEKKA kerjasama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF).

Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Indonesia. PEKKA dan AusAID. 2010.

Veneklasen. Lisa and Valerie Miller "A New Weave of Power, People, and Politics", 2002

Analisis Teori Sosial Terhadap Keputusan Wanita Di Ponorogo Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Mar'atus Saudah

Setiap manusia yang bernyawa membutuhkan perkerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut akan terpenuhi jika manusia mempunyai pekerjaan. Ketia seorang bekerja makan akan memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Namun, karena adanya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri memicu timbulnya mobilitas tenaga kerja migran atau biasa disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia).[64]

Ponorogo merupakan penyumbang tenaga kerja wanita tertinggi di wilayah Jawa Timur. Tenaga Kerja Wanita atau biasa disebut dengan istilah TKW adalah sebutan bagi seorang wanita yang mana berkerja sebagai buruh migran. Buruh migran sendiri adalah pekerja pendatang yang berbeda bangsa dan kultur dengan masyarakat setempat.[65] Arus migrasi para TKW ke luar negeri kian harinya semakin bertambah banyak. Hal ini terjadi karena problem dalam ketenagakerjaan di Indonesia belum juga rampung. Kebutuhan akan hal sosial ekonomi saat ini mendorong perecepatan jumlah TKW.[66] Karena jika pekerjaan semakin sulit dicari maka akan menimbulkan berbagai problem kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. Dari berbagai problem tersebut, masyarakat khususnya para wanita tidak mau tinggal diam, mereka berusaha untuk memecahkan dari berbagai masalah sosial ekonomi

---

64 Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (*Online*), Vol. 2, No. 2, Tahun 2020.

65 Siti Khozamah, Skripsi. *"Rasionalitas dan Diskriminasi Gender Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Perspektif Teori Feminis (Studi Analisis Mantan TKW di Desa Ratangwangi Banjarsari Kabupaten Ciamis)"*, (Yogyakarta: UINSUKA, 2015), hal 1.

66 Nur Hidayati, Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI), *Jurnal Pengembangan Humaniora* (*Online*), Vol. 13, No. 3.

dengan jalan memilih menjadi TKW.[67]

Dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarga, mereka para wanita di Indonesia, khususnya di Ponorogo bagi mereka yang kondisi ekoniminya lemah, untuk menjalankan peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru. Bagi wanita golongan bawah ini peran ganda telah ditanamkan oleh para orang tua mereka sejak mereka masih muda.[68] Motif yang mendasar yang mendorong wanita Ponorogo untuk menjadi TKW biasanya terdapat masalah pada sosial ekonomi yang melanda, seperti halnya masalah pengangguran dan kemiskinan yang dimana tercatat terdapat 22.900 orang sebagai penyandang pengangguran di Ponorogo.[69] Dalam rangka mengatasi terjadinya krisis lapangan kerja dalam negeri sebagai bentuk upaya dari pengurangan angka pengangguran, pemerintah memutuskan membuka lebih luas peluang kerja ke luar negeri bagi masyarakat yang berkeinginan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Karena nyatanya memang negara asing memiliki jumlah perekonomian yang lebih tinggi dan menjamin.[70]

Peranan dan partisipasi wanita dalam pembangunan sosial ekonomi, harus bisa diterima sebagai bukti pengakuan bahwa seorang wanita juga memiliki hak dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah. Umumnya wanita terdorong untuk ikut serta membantu mencari nafkah oleh tuntutan ekonomi keluarga, karena penghasilan kepala rumah tangga saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat sedangkan pendapatan tak sebanding dengan pengeluaran.[71]

---

67 Maulidyah Amalina Rizqi dan Wasti Reviandani, Motivasi Masyarakat Indonesia Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), *Jurnal Manajerial* (*Online*), Vol. 5, No. 2 Tahun 2018.

68 Rizki Andika, Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Perempuan Pengolah Pala Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* (*Online*), Vol. 1, No. 1: 1-16 Tahun 2017.

69 Beritajatim.com

70 Firman Syarifulloh, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Untuk Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi), *Jurnal Ilmiah* (*Online*), Tahun 2016.

71 Endang Sungkawati dan Ratnawati, Motivasi Wanita Bekerja Dalam Rangka Meningkatkan Perannya Di Bidang Ekonomi, *Prosiding Seminar Nasional 4th UNS SME's Summit & Awards 2015 "Sinergitas Pengembangan UMKM dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"*, Universitas Wisnuwardhana Malang.

Mencoba melihat dari sudut pandang religiusitas tujuan wanita bekerja adalah sebagai hamba yang menjalankan perintah Allah dan ingin mendapatkan keutamaannya yaitu pahala dari Allah, bekerja merupakan salah satu bagian dari ibadah yang dimaksudkan untuk membantu meringankan beban suami dalam mencari nafkah dan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau seorang yang belum berkeluarga, bekerja juga merupakan bagian dari ibadah ketika diniatkan sebagai bentuk pengabdian dan berbakti kepada orang tua, seperti halnya terdapat dalam firman Allah SWT, *"Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu."* (QS. At-Taubah: 105)

Sedangkan jika kita lihat dari sudut pandang kebutuhan akan sosial ekonomi, bekerja hanyalah sebagai sarana mendapatkan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja sebagai tujuannya. Namun, apabila bisa mengkolaborasikan kedua sudut pandang ataupun aspek tersebut yaitu dari aspek ekonomi dan aspek religius, maka akan menjadi sebuah keseimbangan pada diri manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Motivasi wanita-wanita di Ponorogo untuk memilih menjadi TKW dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang serba terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ingin membantu menambah penghasilan keluarga dengan ijin sang suami, penghasilan lebih menjamin dibandingkan bekerja di wilayah lokal.[72]

Para TKW biasanya akan mengirimkan uang penghasilan yang besar pada keluarganya di kampung halaman. Hal tersebut akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi kondisi keluarga, yang semula bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu. Dari sebagian penghasilan para TKW tersebut yang dikirim untuk pertama kalinya, adatnya digunakan untuk membayar hutang yang telah mereka gunakan untuk membiayai segala hal keperluan dan keberangkatan mereka sebagai TKW di luar negeri. Setelah hutang sudah beres, baru pengahasilan selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya baik primer maupun sekunder.

Karena pada dasarnya para TKW bersedia pergi bekerja ke luar negeri dengan membawa banyak harapan keluarga untuk mengubah kondisi sosial dan ekonominya menjadi lebih baik dan terjamin.

72 Wantini dan Kurniati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Garmen Di Pt Ameya *Living Style* Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3, No.1 Tahun 2013.

Namun demikian berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan sebuah fenomena yaitu suatu keadaan ketika para migran pulang ke rumah mereka masing-masing dari negara tempat mereka bekerja. Dalam selang waktu satu minggu sampai satu bulan para migran sudah berencana untuk berangkat kembali merantau ke negara tempat mereka bekerja. Salah satu alasan mengapa mereka ingin segera kembali bekerja adalah perbekalan berupa uang yang mereka bawa dari negara tempat mereka bekerja sudah menipis, sehingga tentu akan kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka dan keluarganya.[73]

Wanita sebagai sumber daya insani yang potensial dalam hal pembangunan. Potensi kaum wanita yang relatif besar sudah dimanfaatkan secara maksimal terutama dalam kegiatan-kegiatan produktif, seperti bekerja atau melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Selain itu, peran wanita tidak terlepas dari fungsi sebagai ibu rumah tangga, istri pendamping suami, serta pembina putra dan putri. Peranan wanita dalam kehidupan keluarga semakin berkembang. Sehingga jika wanita memutuskan menjadi TKW, maka peran wanita sebagai pembina ruamah tangga akan berkurang.[74]

Dilihat dari berbagai pembahasan diatas, umumnya pembahsan berfokus pada faktor-faktor eksternal yang melatarbelakangi keputusan wanita Ponorogo untuk memutuskan menjadi seorang TKW. Kajian ini akan menguak pada faktor 'internal' tentang proses wanita dalam mengalami 'pasang surut' pada dirinya sebelum mantap memutuskan menjadi seorang TKW. Pertanyaan kritisnya adalah apakah keputusan wanita menjadi TKW merupakan suatu 'keterpaksaan' atau sebagai 'pilihan'. Artinya keputusan wanita untuk menjadi TKW merupakan pilihan rasional dengan mempertimbangkan *cost and reward*.

Menurut update terakhir Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 tercatat terdapat 869 laki-laki dan 3.619

73 Abdul Rasyid, Suroso, dan Sri Agustina, Motivasi Kembali Dan Pemanfaatan Remitan Buruh Migran Di Desa Senyiur Kecamatan Keruak, *Jurnal Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2020, Hal 107-116.

74 Nina Darayani, Khaidir Sobri, dan Rahmat Kurniawan, Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usahatani Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Societa* (*Online*), No. 4, No. 2: 62 – 66, Tahun 2015.

wanita yang memutuskan menjadi seorang buruh migran ke luar negeri dan menjadikan identitas sosialnya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).[75] Hal tersebut membuktikan lebih tingginya angkan wanita yang menjadi buruh migran, sehingga peneliti akan mencoba fokus terhadap faktor-faktor eksternal yang melatarbelakangi keputusan wanita Ponorogo untuk memutuskan menjadi seorang TKW. Berikut data yang didapat oleh peneliti dari kuisioner melalui google form yang telah disebar:

Nama/Usia	**Berapa tahun menjadi TKW?**	**Apa yang memotivasi Anda menjadi TKW selain masalah ekonomi?**	**Apakah ada unsur keterpaksaan untuk menjadi TKW?**	
			Ya	**Tidak**
Siti Ruliyah, S.Pd/37	6 tahun	Ingin belajar sama Orang China dan ingin mendirikan usaha		
Rinawati/41	10 tahun	Kesuksesan seorang teman walaupun *single parents* bisa membiayai pendidikan anaknya sampai S2		
Sudarti/41	9 tahun	Mencari pengalaman		
Siti Khasanah/54	12 tahun	Bisa mendirikan wirausaha		
Windi/36	7 tahun	Demi pendidikan anak saya agar menjadi lebih baik		
Lasmi/45	15 tahun	Faktor anak-anak yang kuliah butuh biaya yang besar		

75 Data Sensus, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.

Nurul Eko/47	13 tahun	Saya ingin belajar bahasa, mencari pengalaman yang saya bawa pulang ke Indonesia		

Tabel 1.1

Teori Pilihan Rasional Tenaga Kerja Wanita Asal Ponorogo

Teori pilihan rasional pada dasarnya adalah melakukan suatu pengambilan keputusan pada diri individu dengan dasar analisis yang dikaitkan dengan relasi sosial, dan pelaku (aktor) tersebut yang akan menjadi fokus utama pada teori ini. Pelaku dipandang memiliki preferensi atau nilai, dan kepuasan. Pada sudut pandang Homans, di dalam pilihan rasional terdapat keterkaitan dengan kalkulasi seseorang di saat mereka melakukan suatu tindakan yang terdapat di sekitarnya. Dimana mereka melakukan perbandingan antara jumlah imbalan yang terjamin dengan yang bernilai rendah. Tentu saja imbalan yang paling didambakan setiap orang yaitu imbalan yang tejamin, mudah didapat, dan sangat mungkin untuk mencapainya. Dalam hal tersbut, Homans menghubungkan antara keberhasilan, stimulus, dan proposisi nilai.[76]

Sedangkan Coleman berpendapat dalam mengkaji sistem sosial dimana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Sistem sosial yang pertama terbentuk atas individu. Dimana setiap individu memiliki sifat yang sama pada lahiriahnya manusia, tetapi setiap individu memiliki perbedaan karakter sesuai dengan bagaimana mereka "dibentuk" dalam lingkungan masyarakatnya, dan penting untuk mengetahui proses terbentuknya karakter tersebut. Coleman menciptakan konsep "modal sosial" sebagai alat penting dalam analisis sosial. Sistem sosial yang kedua terbentuk dari adanya aksi dan interaksi antara individu dengan individu yang lain, sehingga akan membentuk suatu tatanan sistem sosial melalui pengembangan model pilihan rasional tersebut. Model pilihan rasional ini memungkinkannya untuk mememahami secara mendalam proses terjadinya penggabungan interaksi ke dalam sistem otoritas, sistem kepercayaan, perilaku kolektif, dan aktor

76 Ardina Wulantami, Pilihan Rasional Keputusan Perempuan Sarjana Menjadi Ibu Rumah Tangga, *Jurnal Dimensia* (*Online*), Vol. 7, No. 1 Tahun 2018.

kolektif.

Teori Pilihan Rasional Coleman terlihat pada gagasan dasarnya bahwa tindakan perindividu bermaksud pada suatu tujuan, dan tujuan tersebut adalah tindakan yang telah ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa aktor rasional memerlukan konsep yang tepat berasal dari sudut pandang ekonomi untuk menentukan tindakan aktor, sehingga diharapkan manfaat ataupun keinginan serta kebutuhan mereka didapat secara maksimal.

Coleman memiliki dua unsur utama dalam teorinya, yang pertama aktor dan yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya tersebut merupakan segala potensi yang ada ataupun yang dimiliki. Sumber daya bisa berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang sudah tersedia atau sebuah potensi alam yang dimiliki serta sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada di dalam diri seseorang. *Pertama*, aktor yaitu seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Seseorang yang dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik dinamakan aktor. Yang dinamakan aktor disini yaitu setiap individu yang memiliki tujuan dan juga memiliki pilihan mendasar untuk memutuskan setiap pilihan yang ada, yaitu dengan cara menggunakan berbagai pertimbangan ketikan akan bertindak berdasarkan kesadaran pikirannya, selain itu setaip aktor memiliki hak untuk bebas menentukan setiap pilihannya dan setiap tindakan yang ingin dilakukan. *Kedua*, sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol penuh terhadap suatu hal, sumber daya ini juga segala sesuatu yang bisa dikendalikan oleh aktor.

Coleman juga memaparkan proses interaksi antara aktor dengan sumber daya dalam tatanan sistem sosial. Basis minimal agar bisa dikatakan sebagai sistem sosial yaitu adanya sebuah tindakan yang dilakukan minimal oleh dua orang aktor, dimana setiap aktor dapat mengendalikan sumber daya yang bermanfaat bagi dirinya dan banyak pihak. Setiap aktor sudah tentu mempunyai tujuan, dan masing-masing mempunyai tujuan untuk memaksimalkan wujud dari kepentingannya yang saling bergantung pada tindakan aktor tersebut. Coleman dalam kehidupan nyata, telah mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak dengan menggunakan rasionalnya.[77]

77 Nila Sastrawati, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman, *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (*Online*), Vol. 19, No. 2, Tahun 2019.

Dilihat dari pembahasan di atas teori pilihan rasional menekankan pada dua hal yaitu aktor dan sumber daya. Aktor disini ialah para Tenaga Kerja Wanita yang tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu untuk terus memenuhi kebutuhan hidup di tengah kondisi sosial ekonomi yang sulit untuk mencari sebuah lapangan yang menajamin pengahasilannya. Bukan tanpa alasan ketika seorang wanita memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita yaitu untuk sebuah tujuan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya. Selain itu, inti dari teori ini juga terletak pada sumber daya.

Teori pilihan rasional ini lebih menekankan aktor, yaitu individu yang melakukan sebuah tindakan. Segala tindakan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan sebuah perubahan sosial. Saat Tenaga Kerja Wanita memilih suatu pilihan untuk bertahan dalam kondisi yang susah, terlebih lagi saat ini sangat sulit ditemukannya lapangan pekerjaan. Strategi bertahan hidup para Tenaga Kerja Wanita adalah sebuah pilihan, dimana proses pemilihan dalam melakukan berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh setiap individu disebut dengan pilihan rasional. Sehingga tindakan tersebut dapat membuat perubahan pada kondisi sosial hidupnya, yaitu dengan merubah cara untuk mempertahankan hidupnya dengan bertransmigran ke berbagai negara tetangga.

Aktor merupakan pemegang peranan yang paling sentral untuk bebas melakukan berbagai tindakan yang diinginkan. Segala pilihan yang dipilih oleh Tenaga Kerja Wanita sebagai dasar alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup dianggap rasional karena itu salah satu cara mereka agar tetap bisa melanjutkan kehidupnya dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara sumber daya disini ialah jasa yang mereka miliki. Dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita itu merupakan sebuah pilihan yang dianggap rasional olehnya, sebab untuk mempertahankan eksistensi hidupnya diperlukan sebuah pekerjaan yang hasilnya terjamin sehingga sistem kehidupannya bisa terus berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana umumnya masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan hidup.[78]

---

78 Sri Rejeki, Pilihan Rasional Petani Miskin Pada Musim Paceklik, *Jurnal Analisa Sosiologi* (*Online*), Vol. 8, No. 2: 185-212, Tahun 2019.

Berikut beberapa alasan rasional para Tenaga Kerja Wanita yang peneliti dapat dari survey kuisioner pada Google Form. Pertama, dari Rinawati usia 41 tahun, *"Selain masalah ekonomi yang memotivasi saya untuk memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita yaitu banyak single parents yang sukses sehingga bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai S2."* Ungkapnya.

Kedua dari Siti Ruliyah, S.Pd., *"Tidak ada kertepaksaan bagi saya menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita. Keinginan saya mendirikan usaha sendiri sehingga membutuhkan modal yang cukup, karena kondisi sosial ekonomi tidak memungkinkan saya untuk mendirikan usaha, sehingga saya memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita dan saya menarget menjadi Tenaga Kerja Wanita hanya sampai 6 tahun ketika sudah cukup untuk mendirikan usaha."* Dan masih banyak partisipan yang telah mengungkapkan alasannya menjadi TKW pada survey tersebut.

Dilihat dari pernyataan partisipan kuisioner yang peneliti dapatkan bisa disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Wanita 98% tidak ada keterpaksaan. Mereka memiliki motivasi sehingga mempunyai semangat juang yang tinggi, seperti kasus *single parent* sehingga harus mempunyai peran ganda yaitu pencari nafkah dan pembina rumah tangga, keterbatasan ekonomi sehingga harus membantu mencari tambahan penghasilan, dan yang terakhir adalah untuk mencari pengalaman, relasi baru, serta bisa jalan-jalan. Ketidakadanya keterpaksaan inilah menjadikan mereka menikmati pilihan keputusannya menjadi Tenaga Kerja Wanita. Rata-rata mereka menargetkan 6-12 tahun untuk menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita atau sampai kebutuhan yang mereka tuju telah terpenuhi.

Teori Interaksi Sosial Tenaga Kerja Wanita Asal Ponorogo

Dari mitra Tenaga Kerja Wanita pada akhirnya melahirkan kelompok sosial sehingga membentuk **teori interaksi sosial** dan **teori indentitas sosial**. H. Bonner memaparkan, **interaksi sosial** merupakan suatu hubungan yang melibatkan antara dua atau lebih dari satu individu, dimana aktivitas individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki aktivitas individu yang lain atau sebaliknya. Hal tersebut menggambarkan kelangsungan hubungan timbal-baliknya interaksi sosial antara dua atau lebih dari satu manusia itu.

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Proses bertemunya antara satu orang dengan orang lain secara badaniah saja tidak akan menghasilkan suatu pergaulan hidup dalam kelompok sosial. Pergaulan hidup dan kelompok sosial tersebut akan terjadi apabila individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok manusia menjalin kerja sama, saling berkomunikasi, dan sebagainya untuk mencapai suatu tujuan bersama, berkompetisi, pertikaian, dan lain sebagainya.[79]

Gillin membagi bentuk interaksi sosial menjadi dua yaitu asosiatif (kerjasama, akomodasi, dan asimilasi) dan disosiatif (persaingan, pertikaian dan konflik). Jadi kelompok Tenaga Kerja Wanita merupakan proses interaksi sosial asosiatif, dimana mereka biasanya berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membahagiakan orang terdekat. Adanya penerapan budaya kerja kekeluargaan, sehingga mengurangi terjadinya persaingan, pertikaian ataupun sejenisnya antara setiap Tenaga Kerja Wanita.[80] Interaksi sosial tidak lepas dari keseharian yang mereka (TKW) lakukan setiap harinya karena memang hakikat manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi, baik interaksi para buruh dengan majikannya, buruh dengan buruh, dan buruh dengan orang lain.

Teori Identitas Sosial Tenaga Kerja Wanita Asal Ponorogo

Adanya interaksi sosial antara Tenaga Kerja Wanita dengan Tenaga Kerja Wanita lainnya pada akhirnya membentuk **indentis sosial**. Menurut Hogg dan Abram identitas sosial adalah kelompok-kelompok sosial yang mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat sebagai sarana pemenuhan krediktabilitas.[81]

---

79 Eka Miftahul Jannah, Thesis, *"Interaksi Sosial Antarsiswa Muslim dengan Non-Muslim di SMA Kartika IV-3 Surabaya"*, (Surabaya: UINSA, 2016).

80 Estiana Megandini, Sukidin, dan Wiwin Hartanto, Interaksi Sosial Antara Pemimpin Dengan Karyawan Perindustrian Rumah Batik Rolla Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *Jurnal Pendidikan Ekonomi* (*Online*), Vol. 14, No. 2, Tahun 2020.

81 Lailatur Rohmah, Skripsi, Hubungan Antara Identitas Sosial dengan Persepsi Santriwati Al-Mawaddah Terhadap Fenomena Penistaan Agama, (Malang: Psikologi, UIN MALIKI, 2017), hal 9.

Tajfel berpendapat bahwa identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang sadar akan pengetahuan tentang keanggotaannya di dalam kelompok sosial dan mempunyai tujuan bersama dalam kelompok sehingga melahirkam bentuk pola emosional bersama juga. Identitas sosial yaitu sadar akan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anggota kelompok atas kelompoknya yang memiliki kesesuaiam dengan identitas yang dimilikinya. Dimana sebuah lingkungan akan mempengaruhi setiap individu, sehingga keberadaan individu di dalam kelompok akan saling melahirkan sebuah ikatan emosi antara individu dan kelompoknya karena didasarkan adanya perasaan senasib dan kesepenanggunan.

Psikologis mengatakan, sebuah rasa kesetiaan dan kepatuhan pada kelompok, mempunyai perasaan senasib dan kesepenanggungan disebut konformitas. Konformitas ini lahir karena adanya tujuan yang sama, nilai, dan norma yang sama-sama dianut dalam suatu kelompok, serta adanya aktivitas interaksi yang terus-menerus dilakukan di dalam suatu kelompok tertentu. Konformitas secara tidak langsung memberikan dampak hilangnya pendapat atau aspirasi pada setiap individu. Karena dalam suatu kelompok, keputusan yang diambil adalah keputusan kelompok, sehingga setiap individu kelompok secara sadar maupun tak sadar harus mau mengikuti pada keputusan kelompok.

Sarwono menjelaskan konformitas adalah sebagai kesesuaian antara perilaku individu dengan perilaku orang lain yang muncul karena keinginannya sendiri, sehingga adanya kesaamaan antara perilaku individu dengan perilaku orang lain atau perilaku individu dengan sebuah norma maka disebut konformitas. Konformitas ini terbentuk apabila anggota sebuah kelompok mengatakan atau bertindak sesuatu dan kemudian anggota lain cenderung untuk mengatakan serta bertindak akan suatu hal yang sama. Konformitas ini dilakukan bertujuan agar terhindar dari prasangka (*prejudice*) buruk dan untuk membentuk konsep baru pada diri individu berupa identitas sosial yang disasarkan pada afiliasi kelompok serta identitas personal individu yang masing-masing pasti punya karakteristik yang berbeda-beda dan unik. Sebuah teori identitas sosial terdiri atas perilaku kelompok (dan hubungan individu-kelompok) kemudian diperkenalkan dan dari hubungan tersebut lahir teori lebih lanjut dari

pengaruh sosial dan polarisasi kelompok.[82]

Dilihat dari teori di atas bahwa identitas sosial sebagai Tenaga Kerja Wanita terbentuk karena adanya perasaan senasib sebagai buruh migran yang ingin merubah sosial dan adanyan kecenderungan mengatakan dan melakukan suatu perkerjaan yang sama yaitu sebagai buruh migran yang berasal dari Indonesia. Di samping itu mereka para TKW asal Ponorogo membentuk komunitas yang biasanya membuat acara *hang-out* di hari libur, untuk saling bertukar cerita, informasi, maupun pengalaman.

Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan pilihan rasionalitas dengan interaksi sosial dan identitas sosial sangat berkaitan pada Tenaga Kerja Wanita. Karena ketika seorang akan menentukan pilihan rasionalitasnya untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita atau tidak perlu adanya interaksi sosial terhadap keluarga maupun temannya untuk mempertimbangkan pilihannya. Saat sudah terjun ke dunia Tenaga Kerjaan Wanita akan didapati banyak terjadinya proses interaksi sosial baik antara buruh dengan majikan, buruh dengan teman buruh yang membentuk identitas sosial. Identitas sosial ini muncul karena adanya perasaan senasib antar buruh yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

82 Fransisca Nurmalita Hapsari Utami dan Betty Yuliani Silalahi, Hubungan Antara Identitas Sosial Dan Konformitas Pada Anggota Komunitas Virtual Kaskus Regional Depok, *Jurnal Proceeding PESAT* (*Online*), Vol. 5 Tahun 2013.

Daftar Pustaka

Andika, Rizki. 2017. Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Perempuan Pengolah Pala Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* (*Online*), Vol. 1, No. 1: 1-16.

Darayani, Nina,. Sobri, Khaidir,. dan Kurniawan, Rahmat. 2015. Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usahatani Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Societa* (*Online*). No. 4, No. 2.

Data Sensus, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.

Hidayati, Nur. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). *Jurnal Pengembangan Humaniora* (*Online*). Vol. 13, No. 3.

Jannah, Eka Miftahul. 2016. Thesis. *"Interaksi Sosial Antarsiswa Muslim dengan Non-Muslim di SMA Kartika IV-3 Surabaya"*. Surabaya: Ushuluddin dan Filsafat.

Khozamah, Siti. 2015. Skripsi. *"Rasionalitas dan Diskriminasi Gender Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Perspektif Teori Feminis (Studi Analisis Mantan TKW di Desa Ratangwangi Banjarsari Kabupaten Ciamis)"*. Yogyakarta: Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UINSUKA.

Megandini, Estiana,. Sukidin,. dan Wiwin Hartanto. 2020. Interaksi Sosial Antara Pemimpin Dengan Karyawan Perindustrian Rumah Batik Rolla Di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* (*Online*). Vol. 14, No. 2.

Rasyid, Abdul,. Suroso,. dan Sri Agustina. 2020. Motivasi Kembali Dan Pemanfaatan Remitan Buruh Migran Di Desa Senyiur Kecamatan Keruak. *Jurnal Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*. Vol. 4, No. 1.

Rejeki, Sri. 2019. Pilihan Rasional Petani Miskin Pada Musim Paceklik, *Jurnal Analisa Sosiologi* (*Online*). Vol. 8, No. 2.

Rizqi, Maulidyah Amalina dan Reviandani, Wasti. 2018. Motivasi Masyarakat Indonesia Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). *Jurnal Manajerial* (*Online*). Vol. 5, No. 2.

Rohmah, Lailatur. 2017. Skripsi. Hubungan Antara Identitas Sosial dengan Persepsi Santriwati Al-Mawaddah Terhadap Fenomena Penistaan Agama. Malang: Psikologi, UIN MALIKI.

Rosalina, Henny Natasha dan Setyawanta, Lazarus Tri. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (*Online*). Vol. 2, No. 2.

Sastrawati. 2019. Nilai Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (*Online*). Vol. 19, No. 2.

Sungkawati, Endang dan Ratnawati. Motivasi Wanita Bekerja Dalam Rangka Meningkatkan Perannya Di Bidang Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional 4th UNS SME's Summit & Awards 2015 "Sinergitas Pengembangan UMKM dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"*. Universitas Wisnuwardhana Malang.

Syarifulloh, Firman. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Untuk Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah* (*Online*).

Utami, Fransisca Nurmalita Hapsari dan Silalahi, Betty Yuliani. 2013. Hubungan Antara Identitas Sosial Dan Konformitas Pada Anggota Komunitas Virtual Kaskus Regional Depok. *Jurnal Proceeding PESAT* (*Online*). Vol. 5.

Wantini dan Kurniati. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Garmen Di Pt Ameya *Living Style* Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. 3, No.1.

Wulantami, Ardina. 2018. Pilihan Rasional Keputusan Perempuan Sarjana Menjadi Ibu Rumah Tangga, *Jurnal Dimensia* (*Online*). Vol. 7, No. 1.

KOMPABILITAS NILAI ASWAJA TERHADAP PRODUKSI WACANA KEBANGSAAN SARJANA NU

Nilai-nilai Aswaja memiliki kompatibilitas yang kuat dengan wacana kebangsaan yang dikembangkan oleh sarjana NU, memperkuat narasi kebhinekaan dan toleransi dalam konteks nasional. Sarjana NU menjadi agen penting dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan kebangsaan yang selaras dengan nilai-nilai tradisi Islam Nusantara.

Aswaja sebagai Penyangga Ideologi Kebangsaan: Upaya Sarjana NU dalam Memperkokoh Identitas Nasional

Afidatul Asmar

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agamanya, membutuhkan pondasi kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Di sinilah peran penting Aswaja, sebagai salah satu aliran pemikiran Islam yang moderat dan toleran, menjadi penyangga ideologi kebangsaan. Sarjana NU, sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai Aswaja, memiliki peran vital dalam memperkokoh identitas nasional (Azra, 2016, hlm. 57).

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan ideologi kebangsaan di tengah-tengah masyarakat. Sarjana NU, yang merupakan bagian integral dari organisasi ini, telah memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya memperkuat dan menyebarkan ideologi kebangsaan di Indonesia (Baso, 2014, hlm. 39). Dengan berbagai upaya konkret yang dilakukan, para sarjana NU telah menjadi agen perubahan yang memainkan peran penting dalam memajukan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan mendukung kerukunan antar umat beragama (Bisri, 2022, hlm. 77).

Pertama-tama, sarjana NU telah aktif dalam mempromosikan ideologi kebangsaan melalui pendidikan. Mereka terlibat dalam proses pendidikan formal dan non-formal, baik di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun di berbagai lembaga pelatihan dan pendidikan masyarakat. Dengan memasukkan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum pendidikan, para sarjana NU turut berperan dalam membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air, menghormati perbedaan, dan memiliki rasa persatuan.

Selain itu, sarjana NU juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang mendorong semangat persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi hak asasi manusia, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan toleransi antarsesama (Ghazali, 2017, hlm. 67). Dengan menjadi contoh teladan dalam berperilaku dan

berinteraksi dengan masyarakat luas, para sarjana NU memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk mengutamakan persatuan dan kebersamaan di atas perbedaan. Terkhusus dengan mengedepankan ajaran dan pemikiran aswaja.

Aswaja, dengan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, memberikan landasan moral yang kuat untuk membangun bangsa. Prinsip-prinsipnya, seperti menghormati perbedaan, mengedepankan dialog, dan mengutamakan persatuan, menjadi pondasi kokoh dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan etnis. Hal ini selaras dengan Pancasila, sebagai dasar negara yang menekankan nilai-nilai luhur seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan (Hosen, 2018, hlm. 109).

Sarjana NU, yang merupakan para cendekiawan dan pemikir Islam, memegang peranan penting dalam menjembatani nilai-nilai Aswaja dengan ideologi kebangsaan. Mereka berperan aktif dalam melahirkan pemikiran dan wacana yang mengkaji isu-isu kontemporer dengan perspektif Aswaja, sehingga dapat menjadi solusi atas permasalahan bangsa(Kartiko dkk., 2020, hlm. 33).

Tulisan ini akan menelaah peran strategis Aswaja dalam membangun pondasi moral dan ideologi kebangsaan. Lebih lanjut, akan diulas bagaimana sarjana NU, dengan bekal intelektual dan spiritual yang mumpuni, terus berkontribusi dalam melahirkan wacana dan solusi untuk menjawab tantangan bangsa.

Aswaja: Menjembatani Nilai-nilai Islam dengan Ideologi Kebangsaan

Ahlussunnah wal Jamaah atau yang lebih dikenal dengan istilah Aswaja adalah sebuah paham keagamaan yang merujuk pada ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Aswaja memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan budaya Islam Nusantara serta telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Paham ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan ajaran agama, tetapi juga berperan penting dalam membentuk ideology kebangsaan yang inklusif, toleran, dan berkeadilan (Siroj, 2015, hlm. 79).

Aswaja sebagai penyangga ideologi kebangsaan dapat dilihat dari beberapa aspek(Suaedy, 2018, hlm. 109): pertama, nilai-nilai moderasi dan toleransi yang terkandung dalam ajaran Aswaja

sangat relevan dengan semangat kebhinekaan Indonesia. Aswaja menekankan pentingnya sikap wasathiyah atau moderasi dalam beragama, yang berarti tidak ekstrem ke kanan atau ke kiri. Sikap ini sejalan dengan prinsip Pancasila yang mengedepankan persatuan dalam keragaman.

Kedua, Aswaja mengajarkan pentingnya persaudaraan atau ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), maupun ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian, Aswaja mendorong terciptanya harmoni sosial dan menghindari konflik yang dapat merusak persatuan bangsa. Persaudaraan ini menjadi pondasi kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, Aswaja juga mengajarkan pentingnya menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks kebangsaan, hal ini berarti mematuhi konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Aswaja mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin dan hukum merupakan bagian dari kepatuhan kepada Allah, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Prinsip ini mendukung terciptanya stabilitas politik dan keamanan nasional.

Keempat, Aswaja mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam menerapkan hukum Islam, Aswaja selalu mempertimbangkan maqasid al-shariah atau tujuan syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini berarti bahwa penerapan hukum harus membawa kemaslahatan bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kerugian. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar Pancasila.

Kelima, Aswaja juga mendorong umat Islam untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dalam ajaran Aswaja, bekerja dan berusaha untuk kemajuan bersama adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Partisipasi aktif ini sangat penting dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera.

Pada level praktis, peran Aswaja sebagai penyangga ideologi kebangsaan dapat dilihat dari kontribusi nyata organisasi-organisasi Islam yang berafiliasi dengan Aswaja, seperti Nahdlatul Ulama (NU). NU, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia,

telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam menjaga keutuhan NKRI dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. NU aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat persatuan bangsa (Abubakar & Hemay, 2020, hlm. 22).

Selain itu, NU juga memiliki peran penting dalam menjaga harmoni antaragama. Melalui berbagai forum dialog antaragama dan kerjasama dengan berbagai pihak, NU telah berhasil membangun jembatan komunikasi antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Upaya ini penting dalam menciptakan kedamaian dan menghindari konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Di bidang pendidikan, NU melalui lembaga-lembaga pendidikannya seperti pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah umum, telah berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Pendidikan yang berbasispada nilai-nilai Aswaja ini penting dalam membentuk karakter bangsa yang toleran, inklusif, dan berkeadilan. Aswaja juga berperan dalam menjaga kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas kebangsaan Indonesia. Ajaran Aswaja yang adaptif terhadap budaya lokal memungkinkan terjadinya akulturasi yang harmonis antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Hal ini terlihat dari berbagai tradisi dan ritual ke agamaan yang ada di berbagai daerah di Indonesia, seperti peringatan Maulid Nabi, tahlilan, dan yasinan. Tradisi-tradisi ini tidak hanya memperkaya budaya lokal tetapi juga memperkuat identitas kebangsaan yang berbasis pada keragaman (Azisi & Moefad, 2022, hlm. 67).

Selain itu, Aswaja juga mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam proses demokrasi. Prinsip musyawarah dan mufakat yang diajarkan dalam Aswaja sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Umat Islam diajarkan untuk bersikap kritis namun konstruktif dalam menyikapi berbagai isu kebangsaan, serta selalu berusaha mencari solusi yang terbaik melalui dialog dan musyawarah.

Dalam konteks global, Aswaja juga berperan dalam membangun citra positif Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang moderat dan toleran. Sikap moderasi yang diajarkan oleh Aswaja menjadi contoh bagi dunia bahwa Islam dapat hidup

berdampingan secara harmonis dengan berbagai agama dan budaya. Hal ini penting dalam membangun diplomasi yang baik dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Aswaja juga memiliki peran penting dalam menjaga moralitas dan etika masyarakat. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang diajarkan oleh Aswaja menjadi landasan dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Dalam konteks kebangsaan, individu-individu yang berkarakter kuat ini menjadi agen perubahan yang dapat membawa bangsa menuju kemajuan yang lebih baik (Al-Ansi & Kartono, 2023, hlm. 98).

Secara keseluruhan, Aswaja sebagai penyangga ideologi kebangsaan bukan hanya sebuah konsep teoretis, tetapi telah terbukti dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dari nilai-nilai moderasi, toleransi, persaudaraan, keadilan, hingga partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, ajaran Aswaja memberikan kontribusi nyata dalam membentuk Indonesia yang damai, maju, dan berkeadilan.

Untuk mendukung pandangan ini, kita bisa merujuk pada berbagai literatur dan penelitian yang telah dilakukan. Misalnya, dalam buku "Ahlussunnah wal Jamaah: Tradisi dan Pemikiran" yang disusun oleh M. Atho Mudzhar, dijelaskan bagaimana Aswaja menjadi landasan dalam membentuk karakter masyarakat Muslim yang moderat dan toleran. Sementara itu, dalam jurnal "Islam Nusantara: Akar dan Kontribusinya bagi Peradaban Dunia" yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Islam Nusantara, dibahas peran Aswaja dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan (Goncing, 2015, hlm. 50).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa pesantren-pesantren Aswaja memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana nilai-nilai Aswaja diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para santri, yang kemudian membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar (Mujiati dkk., 2022, hlm. 20).

Di sisi lain, kontribusi organisasi seperti NU dalam menjaga ideologi kebangsaan juga didokumentasikan dengan baik dalam berbagai publikasi. Buku "NU dan Kebangsaan: Kontribusi untuk Indonesia" yang diterbitkan oleh PBNU, misalnya, menggambarkan

berbagai upaya NU dalam memperkuat ideologi kebangsaan melalui pendidikan, dialog antaragama, dan kegiatan sosial (Siroj, 2015, hlm. 90).

Peran Sarjana NU dalam Memperkokoh Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan suatu elemen penting yang mempersatukan suatu bangsa dengan nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang dimiliki bersama. Identitas nasional Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan suku telah menjadi landasan kuat bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, peran sarjana Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki kontribusi vital dalam memperkokoh identitas nasional.

NU, sebagai organisasi Islam yang mengusung nilai-nilai moderasi, toleransi, dan keberagaman, telah berperan penting dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Sarjana NU memiliki peran strategis dalam menggalang persatuan di tengah perbedaan, memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, serta menjaga keutuhan NKRI. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sarjana NU turut serta dalam membangun karakter bangsa yang inklusif, beradab, dan berkepribadian kuat (Mujiati dkk., 2022, hlm. 77).

Sebagai contoh, program-program pendidikan yang dicanangkan oleh sarjana NU, seperti program pengajaran nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, dan keadilan sosial, telah berdampak positif dalam membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di kalangan masyarakat. Selain itu, keterlibatan sarjana NU dalam riset dan pengembangan ilmu pengetahuan juga turut mendukung perkembangan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang.

Dalam konteks keagamaan, sarjana NU juga memainkan peran penting dalam merawat dan melestarikan nilai-nilai lokal yang menjadi bagian dari identitas nasional. Dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, sarjana NU mampu menjembatani perbedaan antaragama dan antarsuku, sehingga memperkuat rasa persatuan sebagai bangsa yang beragam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sarjana NU dalam memperkokoh identitas nasional Indonesia sangatlah penting. Melalui kontribusi-kontribusi yang positif dalam bidang pendidikan,

riset, dan keagamaan, sarjana NU mampu menjadi agen perubahan yang membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sarjana NU dapat terus berperan aktif dalam memperkokoh identitas nasional Indonesia untuk masa depan yang lebih baik (Kartiko dkk., 2020, hlm. 89).

Dalam menghadapi tantangan zaman, sarjana NU perlu terus berinovasi dalam menciptakan wacana kebangsaan yang relevan dan bermakna. Sinergi dan kolaborasi antar berbagai elemen bangsa sangat penting untuk mendukung peran sarjana NU dalam memperkokoh identitas nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera, dengan Aswaja sebagai penyangga ideologis yang kokoh (Muhammad, 2015, hlm. 23).

Sarjana NU, sebagai cendekiawan dan pemikir Islam yang berpegang teguh pada nilai-nilai Aswaja, memiliki peran krusial dalam memperkokoh identitas nasional. Peran mereka dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. Pendidikan:
    - Sarjana NU aktif dalam lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, untuk menanamkan nilai-nilai Aswaja dan nasionalisme kepada generasi muda (Azra, 2016, hlm. 77).
    - Mereka mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja dengan ideologi kebangsaan, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan mencintai negaranya.
    - Mereka juga berperan dalam membangun lembaga pendidikan yang berbasis Aswaja, seperti pesantren dan universitas NU, yang menekankan pada pentingnya ilmu dan akhlak dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Dakwah:
    - Melalui ceramah, diskusi, dan penulisan, sarjana NU menyebarkan pesan-pesan Aswaja yang menebarkan toleransi dan persatuan, serta menentang paham radikalisme dan ekstremisme (Bisri, 2022, hlm. 87).
    - Mereka aktif dalam menyebarkan wacana kebangsaan yang berbasis pada nilai-nilai Aswaja, sehingga masyarakat dapat

memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan bangsa.
- Mereka juga menjalankan peran sebagai "juru bicara" Aswaja dalam menjawab isu-isu kontemporer yang berhubungan dengan agama dan kebangsaan, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham sesat yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa.

3. Sosialisasi:
    - Sarjana NU berperan aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai Aswaja dan Pancasila kepada masyarakat luas, baik di lingkungan kampus, komunitas, maupun melalui media massa.
    - Mereka menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat, sehingga pesan-pesan Aswaja dan Pancasila dapat sampai kepada semua kalangan (Suaedy, 2018, hlm. 101).
    - Mereka juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan wacana kebangsaan yang berbasis Aswaja, sehingga menjangkau kalangan muda yang sering terpapar oleh informasi negatif yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Di tengah arus globalisasi yang membawa berbagai tantangan, peran sarjana NU dalam memperkokoh identitas nasional semakin penting. Mereka perlu terus aktif dalam melahirkan pemikiran dan solusi inovatif yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga nilai-nilai luhur Aswaja dan Pancasila.

Dalam konteks ini, sinergi dan kolaborasi antar berbagai elemen bangsa, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk mendukung peran sarjana NU dalam memperkokoh identitas nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera, dengan Aswaja sebagai penyangga ideologis yang kokoh (Mujiati dkk., 2022, hlm. 33).

Meskipun memiliki peran yang vital, sarjana NU juga menghadapi beberapa tantangan dalam memperkokoh identitas nasional:

- Munculnya paham radikalisme dan ekstremisme: Paham-paham ini mengancam kerukunan antar umat beragama dan

kesatuan bangsa.

- Maraknya hoax dan disinformasi di media sosial: Informasi negatif ini dapat menimbulkan perpecahan dan ketidakpercayaan di masyarakat.
- Kurangnya akses pendidikan dan informasi yang berkualitas: Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan potensi konflik di masyarakat.

Kesimpulan

Aswaja, dengan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, menjadi landasan moral kokoh dalam membangun bangsa melalui prinsip menghormati perbedaan, mengedepankan dialog, dan mengutamakan persatuan. Nilai-nilai Aswaja sejalan dengan ideologi Pancasila, yang menekankan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, sehingga keduanya saling melengkapi dan memperkuat. Untuk menghadapi tantangan, sarjana NU perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah, memperkuat literasi digital masyarakat, dan membangun kolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai Aswaja dan Pancasila.

Daftar Pustaka

Abubakar, I., & Hemay, I. (2020). Pesantren Resilience: The Path to Prevent Radicalism and Violent Extremism. *Studia Islamika, 27*(2), Article 2. https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.16766

Al-Ansi, A. M., & Kartono, R. (2023). The Role of Islamic Organizations "Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama" in Forming National Politics in Indonesia. *Polit Journal Scientific Journal of Politics, 3*(2), Article 2. https://doi.org/10.33258/polit.v3i2.895

Azisi, A. M. A. A. M., & Moefad, A. M. (2022). NU AND NATIONALISM: A Study of KH. Achmad Shiddiq's Trilogy of Ukhuwah as an Effort to Nurture Nationalism Spirit of Indonesian Muslims. *Islamuna: Jurnal Studi Islam, 9*(2), Article 2. https://doi.org/10.19105/islamuna.v9i2.7373

Azra, A. (2016). *Islam Nusantara: Gerakan dan Pemikiran*.

Baso, A. (2014). *Aswaja dan Kebangsaan: Membangun Identitas Nasional*.

Bisri, M. (2022). *Aswaja dan Nasionalisme: Perspektif NU*.

Ghazali, A. M. (2017). *Aswaja dalam Perspektif Kebangsaan*.

Goncing, N. (2015). Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru. *The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1*(1), Article 1. https://doi.org/10.31947/politics.v1i1.134

Hosen, N. (2018). *Pilar-Pilar Kebangsaan dalam Islam Nusantara*.

Kartiko, A., Zuana, M. M. M., Sirojuddin, A., Rofiq, M. H., & Maarif, M. A. (2020). Aswaja ke-Nuan-Based Islamic Moderate Education As A Radicalism Strategy. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88–101. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v3i2.98

Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. *KALAM, 9*(1), Article 1. https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.320

Mujiati, S. H., Ulfiah, U., & Nurjaman, U. (2022). Relasi Aswaja An-Nahdliyah dan Negara. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam, 7*(1), Article 1. https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i1.570

Siroj, S. A. (2015). *NU dan Kebangsaan: Kontribusi NU dalam Membangun Bangsa*.

Suaedy, A. (2018). *Gus Dur, Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bhineka*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Idealitas Jalan Tengah: Evaluasi Moderasi Beragama dalam Bingkai Aswaja

Abdul Azis Fatkhurrohman

Semarak wacana Moderasi Beragama oleh Pemerintah dan disusul beberapa ormas Islam, sebagai jembatan untuk menekan paham-paham ekstrimis-radikalis, konservatif dan sejenisnya, pada kenyataannya belum sepenuhnya menunjukan titik terang. Di saat yang bersamaan, indikasi terjadinya superioritas satu golongan yang mengantarkan pada klaim kebenaran (*truth claim*), bersembunyi di sudut-sudut narasi yang dibangun. Narasi moderasi dalam beberapa aspek menunjukan pergeseran terhadap prinsip-prinsip sosial masyarakat. Fatwa pelarangan penggunaan atribut agama lain, pengucapan salam hari raya bagi umat agama lain (Indonesia 2024), menjadi permisalan yang dapat diajukan. Di saat yang bersamaan, praktik salam pembuka dalam forum-forum resmi Nasional yang beberapa saat lalu juga disoroti (Stephanus Aranditio 2024), juga menegaskan telah terjadinya narasi yang kontraproduktif dalam wacana yang digaungkan. Dalam praktiknya, wacana moderasi beragama masih terkesan inkonsisten.

Perdebatan tentang wacana moderasi beragama juga menyisakan serpihan-serpihan narasi yang menunjukan perlu ada tinjauan ulang. Kerangka besar yang menaungi wacana ini, sepertinya masih memberikan penekanan pada hal-hal yang bersifat sosial serta mengabaikan perdebatan sengit, seperti aspek keyakinan teologis (Muchlis M Hanafi 2022). Padahal, moderasi beragama menjadi semacam wacana yang membawa konsekuensi logis pada seluruh aspek keberagamaan baik yang bernuansa sosial, ekonomi, lokalitas hingga keyakinan teologis. Sejumlah aspek tersebut, menjadi isu penting dalam praktik kehidupan yang rentan akan gesekan dan memantik perpecahan bangsa. Bahwa sejauh ini yang setidaknya munculnya gagasan tersebut bertujuan untuk menjernihkan citra Islam dari sejumlah oknum (Salik 2020), *-radikalis, ekstrimis-* yang kurang tepat dalam mengamalkan pemahaman Islam tidak sepenuhnya salah, namun senantiasa menghadap-hadapkan narasi tersebut secara konfrontatif juga kurang tepat. Akibatnya, bahwa isu-isu lain yang sama-sama dapat memicu potensi perpecahan akan

terabaikan. Perlunya rekonstruksi ulang, terhadap titik berangkat dari wacana moderasi beragama akan menjadikan wacana tersebut lebih elaboratif dan berimbang.

Beberapa ormas keagamaan memiliki pretensi untuk andil dalam mensyiarkan wacana moderasi, salah satunya Nahdlatul Ulama'. NU dengan komitmen kebangsaan yang dipegang teguh, menyikapi hadirnya wacana tersebut dengan positif. Pasalnya, sebagai ormas mayoritas yang tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah keagamaan, ia hadir di tengah masyarakat luas untuk menguatkan sendi-sendi Nasionalisme bangsa (Ronika 2023). Wacana moderasi sebagai jembatan untuk membangun citra Islam yang ramah dan kasih bagi umat manusia, bertolak dari Islam yang belakangan diidentikan dengan agama yang membolehkan kekerasan dan represif terhadap pandangan yang berbeda (Galib 2021). Hadirnya wacana moderasi menjadi upaya dalam melerai, memperbaiki serta meneguhkan nilai-nilai Islam yang tercerabut dan terkotori oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ajaran Nabi Saw dalam membenarkan tindakan-tindakan yang keluar dari norma sosial serta kemanusiaan. Di saat yang bersamaan, perlunya melihat problematika yang belum tersentuh secara intens perlu mendapatkan penekanan dari hadirnya wacana moderasi beragama.

Tulisan ini akan mencoba mengetengahkan problematika moderasi beragama yang dirasa belum ideal. Kesadaran dari masyarakat dalam membuka diri di tengah kontestasi wacana beragama, menjadi titik tolak untuk merumuskan ulang hadirnya wacana ini. NU khususnya, sebagai ormas mayoritas perlu kiranya memberikan pijakan-pijakan dan evaluasi dalam perdebatan yang lahir. Mengingat komitmen yang dipegang kuat oleh NU mencangkup tidak hanya aspek keagamaan, namun juga kebangsaan. Pengarusutamaan wacana moderasi dengan memberikan dasar-dasar yang sekiranya tidak latah dengan fenomena ekstrimisme, radikalisme dan sejenisnya, dapat menjadi pijakan beragama masyarakat luas. Sehingga, wacana moderasi beragama tidak hanya akan terkesan sebagai respon terhadap wacana tertentu, melainkan sebagai pondasi ideal dalam kehidupan beragama dalam konteks pluralitas masyarakatnya.

Memaknai Ulang Moderasi

Wacana moderasi beragama yang bergulir, menempatkan narasi dan model keberagamaan yang ekstrim (kanan maupun kiri) sebagai pijakan lahirnya gagasan tersebut. Kedua kutub tersebut, menjadi kecenderungan yang terjadi di masyarakat oleh beberapa kelompok atau golongan. Ekstrim kanan menggulirkan wacana keIslaman yang totalitas, upaya revitalisasi nilai Islam sebagaimana diterapkan oleh Nabi Saw dengan upaya mendistorsi khazanah pengetahuan yang terbentang antar keduanya. Sudut pandang yang dibidik menurut kelompok ini bahwa, Islam telah jauh keluar praktik-praktik yang disyariatkan Nabi Saw sehingga penting untuk upaya mengembalikan ajaran Islam (*ruju>' ila> Qur'a>n wa Sunnah*) (Wahid 2017). Sementara, di sudut yang lain memandang bahwa perlunya memberikan upaya reaktualisasi dalam ranah pemahaman dan praktik ajaran Islam. Jalan yang ditempuh ialah memberikan pembacaan ulang terhadap ajaran Islam dalam ranah teks; baik al-Qur'an maupun Sunnah dengan pembacaan yang kontekstual (HS 2021). Kedua kelompok ini mencoba menghadirkan Islam sebagai ajaran agama yang solutif meski dengan sudut pandang yang berbeda.

Pada level teoritis, hadirnya moderasi menjadi semacam gagasan yang diasosiasikan pada kepemilikan dari kelompok keagamaan tertentu saja; (sebut Islam). Bergulirnya penguatan dan pengarusutamaan dengan berbagai model dan varian yang di*sengkuyung* oleh sejumlah pihak, menjadi ciri dominan dari pengasosiasian wacana ini. Pihak pemerintah mulai dari level yang menaungi agama, pendidikan dan sejumlah pihak di luar itu berduyun-duyun untuk memberikan sosialisasi terhadap hadirnya wacana moderasi (Taufiq and Alkholid 2021). Wacana ini hingga pada tataran normatif lewat lahirnya panduan-panduan hingga tafsir al-Qur'an yang melegitimasi wacana moderasi (Hanafi et al. 2022). Pada saat yang sama, kesadaran akan moderasi dalam level ini terkesan mengabaikan idealitas kelompok lain, yang dalam hal ini juga memungkinkan memberikan perhatian dan pemahaman yang tidak luput dari al-Qur'an itu sendiri. Moderasi yang hari ini disandarkan melalui penafsiran term *al-wasath, wasathiyah, tawasuth,* identik dengan pemeluk Islam, mengabaikan term *muqtashid, iqtishad, dan muqtashidah* yang disasar pada umat-umat di luar Islam (Ghozali and Rizal 2021).

Wasathiyah yang diterjemahkan dalam kerangka moderasi Islam, disandarkan lewat penafsiran dari QS al-Baqarah ayat 143. Sejumlah pakar maupun peneliti memberikan berbagai argumen yang selaras dengan gagasan tersebut. Penelusuran dari berbagai wacana kitab tafsir yang ada dari berbagai periode sebagai penguat gagasan moderasi hari ini, terbukti bahwa hal tersebut menumbuhkan kesadaran moderasi Islam sebagai pesan dominan hingga cenderung mengabaikan peran penganut agama lain. Pengabaian peran agama lain, menempatkan posisi kelompok-kelompok di luar Islam untuk dijadikan subjek pasif serta objek yang harus diedukasi. Padahal, kesadaran tersebut idealnya juga memungkinkan peran aktif untuk dibangun secara kolektif mengingat al-Qur'an sendiri telah memberikan sinyal adanya ketersalingan dalam kesadaran pembangunan wacana moderasi itu sendiri (Ghozali and Rizal 2021). Lewat term *muqtashid* yang tersurat dalam QS al-Ma>idah ayat 66 pesan tersebut dapat menjadi pembacaan dan evaluasi yang dapat dikembangkan.

Dalam kedua konteks ayat tersebut, *ummatan muqtashidan* dan *ummatan wasathan* menempati pemaknaan yang setara. Kesetaraan pemaknaan tersebut membawa pada taraf pemahaman dan kesadaran bahwa subjek atau manusia pada dasarnya telah dibekali kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip moderasi tanpa memandang golongan. Persoalan yang mendorong pencarian dasar-dasar moderasi dengan identifikasi satu golongan saja berimplikasi pada pengabaian golongan agama lain yang telah lebih dahulu juga memiliki potensi yang sama. Hadirnya moderasi sebagai respon terhadap tindakan-tindakan dari internal Islam sendiri mengaburkan kesadaran golongan lain yang patut untuk dirangkul dalam mewujudkan moderasi pada taraf yang lebih luas. Mengingat moderasi sendiri bukan sebatas respon terhadap persoalan tertentu, namun ia sebagai nilai yang mendasari terwujudnya harmonisasi sosial dalam konteks yang lebih luas.

Hadirnya moderasi beragama menjadi salah satu terobosan untuk memberikan alternatif wacana ideal dalam praktik beragama. NU sendiri sedari awal telah menancapkan komitmen beragamanya yang menghargai perbedaan, menghadirkan wajah kasih sayang Islam dan merangkul kemanusiaan. NU dalam hal ini menekankan dan mempertahankan kerangka nilai Islam yang akomodatif terhadap budaya dan lokalitas. Begitupula dengan pandangan inklusif yang

digawangi oleh Gus Dur dalam memperlakukan hubungan antar manusia. Pandangan tersebut, telah membawa NU pada kesadaran untuk memposisikan kemanusiaan di atas persoalan sekat-sekat primordial, identitas keagamaan hingga gagasan kosmopolitan. Gagasan tersebut penting untuk direvitalisasi, mengingat adanya hubungan sosial yang semakin kompleks. Dalam taraf yang lebih luas, fitrah perbedaan perlu untuk disadari dan direnungkan, sebagai refleksi untuk mewujudkan terjadinya ikatan kemanusiaan yang harmonis antar manusia. NU menjadi semacam amunisi yang telah memiliki kematangan dalam tingkat wacana tersebut, tinggal praktik-praktik elaboratif untuk menerjemahkan wacana yang telah ada.

Aswaja dalam Pergumulan Zaman

Aswaja sebagai nilai normatif, banyak diakomodir oleh berbagai kelompok keagamaan. Dalam konteks ini, tidak lepas dari aswaja sebagai sandaran nash hadis yang telah diprediksi akan perpecahan umat Islam. Hadis tersebut berimplikasi pada perebutan aswaja dalam konteks wacana sehingga, di tataran normative pun, aswaja lahir sesuai dengan versi masing-masing kelompok Islam. NU dalam hal ini mengidealkan aswaja sebagaimana prinsip-prinsip yang dikonstruksi. Idealitas aswaja sebagai pembeda, ditambah keterangan an-nahdiyah sebagai bagian dari variasi aswaja yang hingga hari ini bermunculan. Aswaja NU telah memberikan dasar-dasar yang berprinsip pada hal-hal pokok dan akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Ahlu sunnah wa al-jama>'ah an-nahdliyyah yang kemudian mengkristal menjadi manhaj secara laku berfikir dan bergerak bagi NU, memiliki ciri khasnya sendiri dibanding aswaja-aswaja lainnya. Dalam beberapa prinsip yang dipegang, pemaknaan aswaja seringkali disandarkan pada cara pemahaman terhadap aspek-aspek pokok agama; akidah, fiqh dan tasawuf. Secara terminologi, Aswaja yang dianut oleh NU kemudian disebut *ahlu sunnah wa al-jama>'ah an-nahdliyyah*. Penisbatan an-Nahdiyah di sini, sepertinya sebagai sebuah reaksi dari lahirnya kelompok-kelompok Islam lain yang juga menyematkan kelompoknya sebagai kelompok ahlu sunnah wal jama'ah (Harianto and Syalafiyah 2019). Kontestasi klaim aswaja menjadi realitas tak terhindarkan, sehingga mengaburkan pemaknaan dan batas-batas teoritis. NU sendiri awalnya menganggap bahwa istilah ini, menjadi komitmen sejak awal didirikannya.

Bersamaan dengan kontestasi yang ada, penisbatan kepada an-Nahdliyah menjadi pilihan demi mengurai potensi salah faham bagi masyarakat umum.

Secara umum, pemaknaan aswaja yang meliputi arena terhadap praktik-praktik dari turunan aspek keagamaan menjadi pengertian luas. *Ahlu sunnah wa al-jama>'ah an-nahdliyyah* yang dianggap telah mapan, dalam perkembangannya pun mengalami upaya rekonstruktif. Pada taraf ini, beberapa tokoh ulama' seperti Kyai Said Aqil Siradj menjadi pendobrak kemapanan tersebut (Qomar 2002). Bagi Kyai Said, *aswaja an-nahdliyyah* memerlukan penyegaran, mengingat zaman yang terus merangkak menuju realitas-realitas baru yang jauh dari imajinasi masyarakat terdahulu. Prinsip-prinsip *aswaja an-nahdliyyah* dalam memegang aspek ekslusif dan inklusif secara bersamaan dinilai kurang seimbang, akan berdampak pada ketimpangan wacana dan kurangnya cangkupan yang akan dapat dinaungi oleh NU sendiri. Dalam aspek inilah *aswaja an-nahdliyyah* kemudian menjadi jalan untuk menempatkannya sebagai cara berfikir dan bertindak. Wacana tersebut kemudian melahirkan prinsip-prinsip tindakan yang bertumpu pada aspek moderat (*wasathiyah*).

Relevansi Wacana Aswaja dalam Bingkai Moderasi

Berbicara *ahlu sunnah wa al-jama>'ah an-nahdliyyah* dalam bingkai moderasi, tidak bisa tidak untuk melihat seluruh aspek sosial masyarakat secara luas. Penekanan terhadap hanya satu aspek, atau setidaknya sebagai aksi reaktif, hanya akan menyisakan persoalan-persoalan yang berserakan dan cenderung parsial. Proyeksi moderasi beragama yang belakangan senantiasa *dielu-elukan*, tampak hanya sebagai aksi reaktif atas persoalan-persoalan internal umat Islam, setamsil ekstrimisme, radikalisme, konservatisme dan sejenisnya (Faiqah and Pransiska 2018). Kenyataan tersebut, tampak dalam berbagai narasi dan wacana yang dibangun pemerintah dengan sejumlah *stakeholder* yang berperan di dalamnya. Persoalan-persoalan lain yang lebih kompleks dalam masyarakat hari ini, menjadi terabaikan dengan sendirinya.

Aswaja dalam konteks jalan berfikir masyarakat NU, idealnya dapat tampil sebagai koreksi dalam narasi moderasi beragama yang terbebani oleh satu keyakinan tertentu. Moderasi beragama dalam sejumlah narasi idealnya, masih menyisakan tafsir-tafsir yang dapat

dikatakan cukup bias (Salim and Riyadi 2022). Tidak heran jika, persoalan hubungan antar agama, menyangkut toleransi, tenggang rasa antar suku, budaya ikut terkorbankan. Bias narasi terhadap tafsir moderasi beragama lebih tertuju pada aspek-aspek teologis. Berbicara moderasi dalam konteks luas, akan membawa pada konsekuensi logis dalam persinggungan keyakinan antar agama. Dalam praktiknya, moderasi beragama masih sampai wacana ideal, belum menyentuh aspek praktik yang menuntut penerjemahan terhadap peran dan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan. Sejumlah permisalan di awal tulisan, menjadi contoh betapa praktik moderasi beragama masih belum sepenuhnya menyentuh persoalan yang terjadi. Titik awal dalam mendudukan moderasi beragama sebagai respon terhadap kelompok-kelompok garis ‘keras’ menjadi fokus yang mengabaikan sisi-sisi nasionalisme, penguatan hubungan sosial, dan batas-batas keyakinan (Alfian 2023).

Kendati demikian, perlunya mereaktualisasi wacana moderasi beragama untuk melihat sisi-sisi yang tidak kalah penting diperhatikan. Di tataran ini, konsepsi aswaja sebagai metode berfikir menjadi hal serius untuk ikut membangun ulang bingkai yang cenderung hampir mapan tersebut. Penegasan-penegasan pada tataran praktik perlu dielaborasikan lebih mendalam. *Aswaja an-nahdliyyah* telah lebih dahulu menjadi amunisi yang senantiasa dinamis dan inklusif. Metode berfikir dalam konsep aswaja, narasi-narasi yang dapat memantik perpecahan khususnya dalam bidang teologis akan membawa pada perpecahan masyarakat. Konflik antar keyakinan, klaim kebenaran serta superioritas golongan agaknya perlu untuk ditanggalkan terlebih dahulu demi mewujudkan keharmonisan sosial.

Kesadaran dalam keterbukaan diri, baik dalam tataran praktik maupun wacana, menjadi langkah awal ditempuhnya evaluasi terhadap wacana moderasi beragama. Dalam konteks ini pun, kesadaran memberikan ruang yang aktif bagi penganut agama lain menjadi satu jalan Tengah untuk mendamaikan narasi yang bias. *Aswaja an-nahdliyyah* dalam hal ini, dapat menjadi jembatan antara narasi moderasi beragama yang masih berat sebelah, timpang dan terbebani oleh kepentingan. Proyeksi penguatan *ahlu sunnah wa al-jama>’ah an-nahdliyyah* dapat ditampilkan secara mandiri, tanpa

terbebani oleh muatan wacana terselubung. Bangunan orientasi yang dituju yaitu mengakomodir problem-problem kontemporer yang kurang lebih belum tersentuh oleh wacana moderasi beragama.

Daftar Pustaka

Alfian, Andi. 2023. "Kekerasan Simbolik Dalam Wacana Keagamaan Di Indonesia." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 18(1): 25–50.

Faiqah, Nurul, and Toni Pransiska. 2018. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17(1): 33–60.

Galib, Syamsul Arif. 2021. "Legitimasi Kekerasan: Titik Temu Radikalisme Dan Terorisme." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13(1): 1–16.

Ghozali, Mahbub, and Derry Ahmad Rizal. 2021. "Tafsir Kontekstual Atas Moderasi Dalam Al-Qur'an: Sebuah Konsep Relasi Kemanusiaan." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 17(1): 31–44.

Hanafi, Muchlis Muhammad, Abdu Ghafur Maimun, Rosikhon Anwar, Darwis Hude, Ali Nurdin, A Husnul Hakim, and Abas Mansur Tamam. 2022. "Tafsir Tematik; Moderasi Beragama."

Harianto, B N S, and Nurul Syalafiyah. 2019. "Aswaja An-Nahdliyah Sebagai Representatif Teologi Islam Nusantara Perspektif Kiai Said Aqil Siroj." *Kontemplasi* 7(2): 252–81.

HS, Muhammad Alwi. 2021. "Islam Nusantara Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ajaran Islam Dalam Menciptakan Moderasi Beragama." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16(1): 75–94.

Indonesia, CNN. 2024. "Fatwa MUI Larang Muslim Ucapkan Selamat Hari Raya Agama Lain." *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531092345-20-1104065/fatwa-mui-larang-muslim-ucapkan-selamat-hari-raya-agama-lain*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531092345-20-1104065/fatwa-mui-larang-muslim-ucapkan-selamat-hari-raya-agama-lain.

Muchlis M Hanafi, dkk. 2022. *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Qomar, Mujamil. 2002. *NU" Liberal": Dari Tradisionalisme Ahlussunah Ke Universalisme Islam*. Mizan.

Ronika, Rima. 2023. *AKSIOLOGI BANSER*. Deepublish.

Salik, Mohammad. 2020. *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*. Literindo Berkah Jaya Malang.

Salim, Ahmad Agus, and Abdul Kadir Riyadi. 2022. "Tawāsuṭ, ʿAdālah, Dan Tawāzun Dalam Penafsiran Kementerian Agama: Telaah Konsep Moderasi Beragama Negara." *Nun: Jurnal Studi Alquran*

dan Tafsir di Nusantara 8(1): 45–72.

STEPHANUS ARANDITIO. 2024. "Fatwa MUI Larang Salam Lintas Agama, Antara Toleransi Dan Keyakinan." *https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/01/fatwa-mui-larang-salam-lintas-agama-antara-toleransi-dan-keyakinan?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall*. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/01/fatwa-mui-larang-salam-lintas-agama-antara-toleransi-dan-keyakinan?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

Taufiq, Firmanda, and Ayu Maulida Alkholid. 2021. "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41(2).

Wahid, Ahmad Buyan. 2017. "Dakwah Salafi: Dari Teologi Puritan Sampai Anti Politik." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13(2): 147–62.

KONSEP NEGARA BANGSA DAN ANCAMAN BERDIMENSI IDEOLOGI

NU menghadapi tantangan ideologis dalam mempertahankan konsep negara bangsa yang inklusif, terutama ketika berhadapan dengan paham-paham transnasional yang mengancam keberagaman. Melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, NU berupaya menjaga harmoni sosial dan mempertahankan integritas nasional di tengah dinamika ideologi global.

Intelektual Muda NU Inklusif: Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045

Lukman Santoso

Di Indonesia, eksistensi Islam selalu dinamis seiring relasi negara dalam menempatkan posisi umat Islam dalam pasang surut tensi politik nasional dan global.[1] Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sekaligus merupakan organisasi Muslim terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis sepanjang sejarah republik tersebut. NU, termasuk kaum intelektual di dalamnya, telah menjadi denyut nadi kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia melintasi ruang dan waktu.

Dewasa ini, intelektual muda NU dihadapkan pada tantangan yang lahir akibat globalisasi, era disrupsi sekaligus era *post-truth*. Akibat massifnya media digital dan teknologi informasi menyebabkan batas identitas kenegaraan dan kebangsaan mulai tergerus dalam tatanan tanpa batas. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan gejolak dan paham-paham yang disatu sisi menjadi 'kerikil' yang mendistorsi moral keagamaan-kebangsaan, dan di sisi lain justru dijadikan acuan bagi sebagian kalangan, khususnya kaum muda.[2] Semisal materialisme, hedonism, transnasional, Khilafah, ISIS dan lain sebagainya.

Kaum Intelektual NU saat ini dihadapkan pada dunia yang tidak lagi monolitik; Ia hidup menjadi warga dunia (*world citizenship*). Tentang hal ini, Bauman melihat globalisasi sebagai "perang ruang angkasa". Menurutnya globalisasi merupakan mobilitas pada masyarakat yang menjadi faktor stratifikasi paling kuat. Bahwa para pemenang dalam arus globalisasi dikatakan telah berhasil hidup di dalam "waktu" dan ruang (jarak) yang bukan lagi menjadi masalah. Agama juga menjadi bagian dari globalisasi dan juga dipengaruhi oleh proses globalisasi. Sehingga munculnya kelompok-kelompok sekuler, pragmatis maupun fundamentalis dalam masyarakat akibat

---

1 Abid Rohmanu dkk, *Nalar Kritis Keberagamaan: Menguatkan Ruh dan Hakikat Agama.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, hlm.172

2 M. Imdadun Rahmat. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas.* Jakarta: Erlangga, 2003. hlm.xi

proses tersebut.[3]

Di sisi lain, saat ini bangsa Indonesia juga tengah menyambut bonus demografi berupa generasi emas *(golden generation)* pada 2045. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Perkembangan teknologi informasi dan Artificial Intelligence yang sangat pesat, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Hal itu dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga intelektual muda dituntut untuk mampu memfilter sekaligus beradaptasi dengan berbagai situasi.

Indonesia Emas 2045 dicirikan pada kualitas sumber daya manusianya, terutama kaum muda. Fase ini juga disebut sebagai jendela demografi *(window of demography)*. Hal ini menghendaki setiap generasi memiliki karakter intelektual komprehensif, mulai dari: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.[4] Untuk itu, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, perlu penyiapan intelektual muda unggul, agar potensi bonus demografi itu tidak malah menjadi bencana demografi *(demographic disaster)*. Masalah SDM unggul memang telah menjadi masalah klasik di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia. Upaya mencetak intelektual muda yang terlatih dan terdidik merupakan faktor penting yang terus diupayakan dalam mengejar ketertinggalan dengan negara maju.[5]

Bonus demografi dapat tercapai jika kualitas sumber daya manusia di Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni sehingga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya, kutukan demografi akan terjadi jika jumlah penduduk yang berada pada usia produktif ini justru tidak memiliki kualitas yang baik sehingga menghasilkan pengangguran massal yang justru menjadi beban negara. Maka, dalam konteks itulah, Intelektual muda NU harus mampu memanfaat peluang tersebut, sehingga menjadi navigator perubahan. Intelektual muda NU harus terus tumbuh

---

3 George Ritzer dan Doudlas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern.* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

4 Nastiti Khadijah, "Generasi Muda Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045," https://www.kompasiana.com/akses 28 Maret 2024.

5 Yanwar Pribadi. "Partisipasi Aktif Intelektual Muda Muslim Dalam Membangun Masyarakat," *Lembaran Masyarakat,* 1 no 1 (2015).

dan berkembang menjadi intelektual yang inovatif dan produktif. Membuka diri dan adaptif terhadap hal-hal baru di era disruptif. Sehingga selain menjadi navigator juga mampu memimpin sektor-sektor strategis menuju era Indonesia emas di tahun 2045. Intelektual muda NU yang terlatih dan terdidik harus menjadi salah satu kekuatan Islam dalam pembangunan berkelanjutan.

Tulisan ini berusaha mengeksplorasi bagaimana intelektual muda NU idealnya menghadapi Indonesia emas 2045 sehingga dapat berimplikasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan umat berkelanjutan. Tulisan ini juga sekaaligus memberi tawaran reposisi peran intelektual muda NU untuk dapat menjadi intelektual muda yang inklusif-afirmatif.

Kaum Intelektual dan Ruang Publik Disrupsi

Dalam setiap kemajuan sebuah bangsa, terdapat kelompok kaum cendekia yang memegang peran strategis. Mereka menjadi navigator penting dalam menentukan arah peradaban bangsa; dialah para kaum intelektual. Istilah intelektual,[6] secara bahasa dimaknai sebagai cerdas, berakal, dan berpikiran jernih. Berdasarkan ilmu pengetahuan.[7] Dalam istilah Arab disebut *'Aqil*, yang berarti orang yang berakal, orang yang mengetahui, juga berbudaya. Bentuk kata sifat dari *'aqil* adalah *'aql* yang diterjemahkan melalui terma "nalar."[8]

Ada dua hal penting dari makna intelektual tersebut yaitu, *pertama*, kecerdasan sebagai syarat utama bagi seorang dikatakan sebagai intelektual dan ditandai dengan kepemilikan ilmu pengetahuan yang luas. Itulah kenapa intelektual disebut juga sebagai cendekiawan. *Kedua*, tentang makna berakal. Jika merujuk pada pemikiran Raymond Williams,[9] kata intelektual sering kali diidentikkan dengan orang yang menganut intelektualisme (*intellectualism*) dan kata intelektualisme merupakan bentuk lain dari rasionalisme (*rationalism*). Jadi intelektual dapat dipahami sebagai

---

6 Intelektual secara harfiah berasal dari bahasa Inggris "Intellectual". Dalam fungsinya sebagai kata sifat kata ini berarti Intelektual cerdik cendikia. Lihat John M. Echol dan Hassan Sadly. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 326.

7 KBBI Online/intelektual, akses 28 Maret 2024.

8 Abdul Mukti Ro'uf, *Kritik Nalar Arab Muhamamd Abid al-Jabiri*. Yogyakarta: LKiS, 2018 hlm. 15-16.

9 Raymond Williams. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. New Edition. New York: Oxford University Press. 2015, hlm.122

seorang rasionalis dan rasonalitas gagasannya menjadi indikator keintelektualan seseorang.

Karl Mannheim menyebut intelektual dengan istilah *intelligensia*. Menurutnya, dalam setiap masyarakat, *intelligentsia* yang memiliki tugas khusus (*special task*) untuk memberikan interpretasi dunia (*an interpretation of the world*) untuk masyarakat tersebut. Intelektual merupakan interpreter (penafsir) realitas politik demokrasi dengan tujuan memberikan kejelasan kepada publik agar memiliki kesadaran, pengetahuan dan pemahaman politik yang benar.[10] Dalam perspektif lain, kaum intelektual,[11] didefinisikan sebagai mereka yang berani berbicara kebenaran dan mengungkap kebohongan.[12] Mereka adalah individu yang mempunyai bakat untuk mengartikulasikan pesan, pandangan dan sikapnya kepada publik. Dari berbagai definisi diatas, dapat digarisbawahi bahwa kaum intelektual sejatinya ditandai dengan atribut "nalar kritis."

Urgensi hadirnya kaum intelektual di tengah masyarakat adalah untuk melakukan advokasi atas lingkungan sosialnya yang tidak adil. Terlibat langsung dalam pergumulan sosial untuk menjaga akal sehat tetap kritis dan merawat agar kebenaran tidak diselewengkan. Dalam pandangan Edward Said, kaum intelektual tidak boleh netral, tapi harus mempunyai keberpihakan terhadap kelompok lemah yang tertindas.[13] Dosa terbesar kaum intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan, tapi dia memilih diam dengan dalih

---

10 Karl Mannheim. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. With a Preface by Louis Wirth. New York: Harcourt, Brace, & Co., Inc. 1954, hlm. 9

11 Antara intelektual dan ilmuwan ada persamaan dan perbedaannya; ilmuwan dan intelektual sama-sama bekerja dengan informasi dan pengetahuan sebagai sarana dan fasilitas. Yang membedakan; Ilmuwan mengubah kepercayaan dan nilai menjadi informasi dan pengetahuan, sementara intelektual mengubah pengetahuan dan informasi menjadi nilai, komitmen politik, atau keyakinan idologis dan sikap moral, Ilmuwan membatasi kerjanya dalam disiplin ilmu tertentu, sedangkan intelektual menerobos disiplin keilmuannya karena memikirkan atau membela kepentingan publik. Lihat Ignas Kleden, *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka,* Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2020, hlm. 12.

12 Noam Chomsky dkk. *The Responsibility of Intellectuals Reflections by Noam Chomsky and others after 50 years.* UCL Press University College London. 2019, hlm. 21

13 Edward W. Said. *Peran Intelektual.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 54

apapun. Setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi intelektual, tapi tidak semua orang bisa menjadi intelektual dengan fungsi sosialnya.[14]

Konteks Indonesia, di tengah gaung era disrupsi dan revolusi industri yang menggema, kaum intelektual muda di mengalami surplus. Namun realitanya kaum intelektual terpolarisasi menjadi intelektual yang menyelami karir birokratik dan menjadi penyokong negara dalam lingkaran kekuasaannya,[15] namun miskin kontribusi bagi umat dan rakyat banyak. Sehingga kecenderungan intelektual itu mempunyai konsekwensi terpinggirkannya peran advokasi pengetahuan untuk masyarakat sipil. Tidak hanya peran advokasi sosial yang lumpuh tapi integritas dan moral juga pelan-pelan runtuh.

Dengan situasi seperti ini, perlu kiranya kembali merenungkan pertanyaan-pertanyaan kritis Edward Said tentang peran kaum intelektual di abad ke-20, Edwar Said mempertanyakan; masih adakah intelektual yang independen dalam menyampaikan gagasannya? Ia melakukan kritik keras bagi yang menganggap intelektual sebagai profesi dengan tujuan material *an sich.* Baginya, ancaman khusus intelektual saat ini bukan otonomi kampus, komersialisasi pendidikan, bukan posisi pinggiran, tapi justru perangai profesionalisme. Profesionalisme bagi Edward adalah bahaya laten yang dapat menurunkan derajat intelektual seseorang.[16] Seharusnya, kaum intelektual bergerak bukan karena mengejar keuntungan atau karena mendapat imbalan, melainkan bergerak karena cinta kebenaran, mempunyai rasa keberpihakan pada yang lemah dan tertindas.

Pada posisi ini, intelektual muda NU diharapkan dapat mengambil peran, misalnya pada ruang publik digital dengan mengimbangi berbagai isu dan wacana yang berkembang di ruang publik dengan cara mengkounter informasi viral yang sering kali menyesatkan atau merusak nalar umat yang sengaja dan sistematis diseminasikan oleh para pendengung bayaran (*buzzers*). Mekanisme kounter isu atau wacana tersebut juga dapat dilakukan dengan cara

---

14 Antonio Gramsci, *The Intellectuals", In Selections From The Prison Notebooks*, New York: International Publishers, 1989, hlm. 3-23

15 Airlangga Pribadi. "Pudarnya Peran Intelektual Pembela Masyarakat," *Harian Kompas,* Edisi 15 Maret 2021.

16 Edward W. Said. *Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures*. New York: Vintage Books. 1996.

melibatkan pendengung organik (*the organic buzzers*) yang diaktivasi dan diorganisasikan oleh para intelektual muda melalui berbagai komunitas.[17]

Intelektual muda NU harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dengan mengambil 4 kata kunci, yaitu: pengembangan teknologi, pengembangan konten, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. Dengan adaptif dan akomodatif menggunakan teknologi informasi, intelektual muda NU diharapkan dapat menyajikan wacana dan gagasan inklusif yang bisa meningkatkan literasi keagamaan generasi muda menjalankan fungsi sosialnya.

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa generasi sekarang lebih suka mencari informasi, termasuk informasi keagamaan melalui internet. Kecenderungan generasi saat ini tidak lagi mengenal dengan baik NU, Muhammadiyah atau organisasi Islam lainnya, tetapi mereka lebih mengenal dai atau ustadz secara personal melalui media sosial dan *YouTube*. Mereka lebih mengacu pada ajaran agama yang disampaikan oleh para ustadz populer tersebut. Fenomena disrupsi di bidang sosial-keagamaan ini tentu berdampak pada pola dakwah yang dilakukan oleh NU yang menggunakan pola konvensional, yaitu ceramah tatap muka, pengajian, diskusi keagamaan, dan khotbah.[18]

Sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *moral agent* (agen moral), para intelektual muda NU yang tinggal di berbagai pelosok negeri, agar tidak hanya dimonopoli oleh intelektual ibu kota, memiliki peran strategis untuk terlibat aktif di ruang publik digital tersebut. Secara imperatif, intelektual muda NU dituntut untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan optimisme literasi keagamaan digital di tengah arus fundamentalis dan global yang semakin deras. Kontribusi mereka dapat dimulai dengan intensitas dan keaktifannya publikasi literasi keagamaan dalam berbagai bentuk di ruang publik digital, begitu juga hal yang sama di ruang publik konvensional. Dengan kemampuan komunikasi diskursif yang persuasif, intelektual muda NU bisa mengobarkan wacana inklusivissme Islam yang

---

17 **Idham Holik.** "Idealitas Intelektual Dalam Ruang Publik Pilkada," https://kota-cirebon.kpu.go.id/berita/ akses 20 Maret 2021.

18 *Tasman, Islam Inklusif: Konstruksi Pemikiran untuk Dialog Umat beragama di Indonesia, 21 no 1, 2017. Hlm. 132-146.*

mencerahkan dengan berbagai bahasa dan media.[19]

Dalam pandangan Julien Benda, intelektual yang mampu adaptif dan inovatif merupakan intelektual sejati. Mereka adalah intelektual yang memiliki kepribadian kuat, siap menanggung resiko, pantang menyerah atas masalah praktis (*practical concerns*),[20] dan memiliki keberanian untuk menjadi oposisi permanen terhadap ketidakadilan dan penindasan.[21]

Menjadi Intelektual Muda NU: Menjadi Kaum Muda yang Inklusif

Secara etimologis, istilah inklusif berasal dari kata *inclusion*, yang berarti suatu tindakan mengajak atau mengikutsertakan. Dalam bahasa Inggris, istilah *inklusive* berarti sampai dengan atau termasuk.[22] Berdasarkan arti kata tersebut, istilah inklusif dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka, saling memahami, saling mengerti, dan saling memberi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Intelektual yang inklusif akan berusaha memahami latar belakang orang lain. Menerapkan dan memahami kemajemukan merupakan manfaat dari pola pikir inklusif. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk merangkul keragaman dalam hal ras, budaya, latar belakang, agama, dan beragam perbedaan lainnya.[23]

Pandangan mengakomodasi keragaman ini memberi arti akan pentingnya dialog dalam sebuah kemajemukan dengan landasan saling mengakui dan menghargai, dimana perbedaan pada manusia dianggap sebagai inti dalam menciptakan kehidupan dunia yang damai dan harmonis *(rahmatal lil 'alaamiin)*. Unsur dialog menjadi penting dalam paradigma inklusivisme.

Paradigma inklusif dapat dikembangkan oleh Intelektual NU paling tidak berpijak pada kerangka fikir keagamaan yang

---

19 **Idham Holik.** "Idealitas Intelektual Dalam Ruang Publik Pilkada," https://kota-cirebon.kpu.go.id/berita/ akses 20 Maret 2024.

20 Julien Benda. *The Treason of the Intellectuals*. Translated by Richard Aldington. With a new introduction by Roger Kimball. New Burnswick: Transaction Publishers, 1969, hlm 43

21 Edward W. Said. *Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures*. New York: Vintage Books, 1996, hlm. 7

22 John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia.* Jakarta: Gramedia. 2000. 316.

23 Agatha Olivia Victoria, "Mempertahankan masyarakat inklusif di tengah disrupsi teknologi" https://www.antaranews.com/ akses 2 Januari 2024.

terbuka, luwes, dan toleran. **Terbuka** memiliki makna bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk mengkritisinya jika kebenaran atau hikmah yang disampaikan. **Luwes** bermakna membuka diri berdialog dengan pihak lain, tanpa rasa canggung, dan juga tanpa melihat perbedaan yang ada, baik agama, kepercayaan, maupun asal usul. **Toleran** bermakna menghormati perbedaan yang ada, baik dengan yang seagama atau sekeyakinan maupun dengan yang berbeda agama atau keyakinan.[24]

Dialog berbasis inklusivisme ini menjadi relevan untuk menjawab problem *Class of Civilization* atau perbenturan budaya yang pernah digaungkan oleh Samuel P Huntington, yang menyebabkan manusia saling curiga mencurigai khususnya antar umat beragama. Dengan landasan saling mengakui dan menghargai, dialog dapat digunakan sebagai pijakan dalam menata dunia yang plural, membuka perspektif baru dan akan adanya penghargaan Islam terhadap nilai-nilai toleransi dan rekonsiliasi pemikiran agama dengan aturan kehidupan modern.

Hal ini menegaskan bahwa, kebangkitan kembali peradaban Islam hanya dapat direngkuh apabila Intelektual muda NU membuka ruang partisipatif dan bersikap terbuka terhadap pihak lain. Bersikap defensif sebagai bentuk penolakan dan atau ketidak mampuan kaum muda NU dalam menyikapi perkembangan dunia justru akan memperlihatkan kelemahan. Nilai dan prinsip Islam Indonesia yang ramah harus tetap menjadi dasar atau landasan dalam setiap ekspresi keagamaan intelektual muda NU dalam merespon perkembangan zaman tersebut.[25] Dengan demikian Islam Indonesia tidak akan kehilangan identitasnya serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga mampu melahirkan kader-kader muda yang inklusif.

Inklusivisme Islam akan mencapai titik optimal manakala terjadi keseimbangan antara kecenderungan normatif dan kebebasan berfikir semua warga bangsa. Implikasinya bagi intelektual muda NU adalah, harus ada keseimbangan dalam aktualisasi pengetahuan, yakni *fikrah* dan *amaliyah*, atau pemikiran dan aksi sosial. Intelektual muda NU, memang hidup berkembang di

---

24 *Zain Abidin, "*Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin Dan Sejarah," *Humaniora*, 4 no.2 Oktober 2013. hlm. 1273-1291.

25 Fabian Fadhly. "Tradisi Intelektual Islam di Indonesia Abad VII-XXI M," *Tamaddun*, 18, no 1 (2018), hlm. 37-39

Indonesia, akan tetapi secara peradaban, Intelektual muda NU tidak menutup diri dari pengaruh peradaban dunia. Intelektual muda NU harus aktif berdialog, berpikir keluar dari lingkup Indonesia untuk mempromosikan Islam Indonesia itu ke dunia luar. Tak hanya menerima pengaruh asing, tetapi juga berdialog, *sharing* tentang Indonesia kepada dunia luar. Tetapi harus jelas dan tegas pada posisinya, yakni membela yang *haq* dan kelompok yang terzalimi, bukan justru berdiri pada 2 kaki.

Diskursus inklusivisme Islam juga dapat dilacak di era kemerdekaan. Saat Indonesia dihadapkan pada persoalan perumusan bentuk kenegaraan yang dinilai relevan dengan realitas sosial masyarakat Nusantara yang majemuk. Perbedaan pendapat dalam merumuskan dasar negara sangat tajam. Sehingga muncul dua poros perbedaan pendapat itu dalam dua kelompok besar: —nasionalis Islam — dan nasionalis sekuler. Nasionalis Islam digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh Islam yang mempunyai aspirasi agar Islam dijadikan sebagai dasar negara *(Islamic state)*. Tokoh-tokoh Islam dari berbagai organisasi, termasuk K.H. Wahid Hasyim, berada dalam kelompok ini. Sementara itu —nasionalis sekuler digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh yang sebagian juga beragama Islam seperti Soekarno, tapi tidak menghendaki Islam sebagai dasar negara. Mereka menginginkan negara kebangsaan *(nation state)* yang tidak didasarkan pada satu agama tertentu. Dari sinilah kemudian Bung Karno mencetuskan gagasan tentang Pancasila.[26] Dawam Rahardjo menyebut pelopor spirit inklusivisme ini dengan istilah "ulama cendikiawan," seperti K. H. Wahid Hasyim yang berupaya menghadirkan kecendekiawanan berIslam berbasis kearifan lokal.[27]

Gagasan inklusivisme Islam sejatinya berakar dari spirit hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhamad bersama para sahabatnya ke Madinah. Dalam hijrah, Nabi yang ditemani sahabatnya, Abu Bakar, tampil sebagai pemimpin yang sukses mencipta strategi pemikiran dalam memecahkan situasi yang sulit. Peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi dan Abu Bakar menyiratkan sebuah inklusivisme

---

26 Abdul Rahman, "Reorientasi Islam Inklusif Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia Di Era Demokrasi Deliberatif, *Nusantara,* 9, no 10 2022, hlm. 3822-3832.

27 M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim,* Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

peradaban yang sedang diletakkan Nabi di Semenanjung Arabia.[28] Inklusivisme peradaban yang diciptakan Nabi dipoles dengan nilai-nilai universal yang tertancap dalam seluruh ajaran Islam. Peristiwa hijrah, yang oleh Umar bin Khattab dijadikan sebagai peletak dasar tahun Hijriyah, telah melompatkan ruang kesadaran umat Islam dalam penciptaan peradaban agung yang dipelopori Nabi Muhammad. Kalau di Mekkah Nabi lebih banyak disibukkan dengan berbagai konflik dengan kaum Quraisy Mekkah, maka di Madinah Nabi memulai babakan kehidupan baru dalam menata kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan.

Nabi Muhammad tampaknya memahami betul bahwa masyarakat yang beliau hadapi adalah masyarakat majemuk yang masing-masing golongan bersikap individualis terhadap golongan lain. Untuk itu, beliau melihat perlu adanya penataan dan pengendalian sosial-politik untuk mengatur hubungan-hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Dirumuskanlah perjanjian tertulis yang dikenal sebagai *Sahifah al-Madinah* atau *Mitsaq al-Madinah* (Konstitusi Madinah) sebagai landasan politik bersama yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik, dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan.[29]

Nabi membuat persaudaraan *(al-ikho)* antar umat Islam, dan mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah. Secara bahasa Madinah mempunyai akar kata yang sama dengan *tamaddun* (peradaban). Seluruh peristiwa sejarah yang dijalankan Nabi mencerminkan sebuah kosmopolitanisme peradaban, yang oleh Robert N Bellah dikatakan modern, bahkan terlalu modern untuk ukuran Timur Tengah waktu itu. Kecemerlangan Rasulullah SAW

---

28 Usman, "Pemikiran Kosmopolit Gus Dur Dalam Bingkai Penelitian Keagamaan," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 10 no. 1 2008, hlm. 185-192

29 Lukman Santoso Az, "Pesan Hijrah dan Praktik Moderasi Negara Madinah" https://nyabtu.com/pesan-hijrah-dan-praktik-moderasi-negara-madinah/, akses 30 Maret 2024.

dalam mengintrodusir negara Madinah ini oleh Michael H.Hart,[30] menjadikannya ditempatkan dalam urutan pertama di antara 100 tokoh berpengaruh dunia lainnya.

Hadirnya Negara Madinah bagi Rasulullah sejatinya bukan semata-mata untuk membangun "rezim Politik" atas aksi peretasan keprihatinan karena merasa gagal mengembangkan Islam di Mekkah. Melainkan, sebagai suatu praktik reformasi ideal yang berwacana kemanusiaan dan integrasi sosial di tengah kemajemukan masyarakat. Bercermin dari teladan Nabi, Lantas bagaimana idealnya kaum intelektual muda NU menempatkan diri dalam diskursus kebangsaan dan dinamika global saat ini ? Kosmopolitanisme Islam bagi intelektual muda NU hendaknya dipahami sebagai paradigma "etik-Islam" yang dikonstruksi untuk menghadapi realitas global dan problematika modernitas. Hal ini tentu muaranya adalah tugas intelektual muda untuk menjadikan keIslaman dan keindonesiaan sebagai Etika Universal. Aktualisasinya dapat diwujudkan dengan segala sumberdaya/*resources* kaum muda NU dalam beragam *locus* dan *tempus*. Dapat berupa Gerakan literasi, pengembangan berbagai saluran digital dan non digital, Gerakan komunitas.

Dalam tataran praksis, alam pikiran intelektual muda NU yang berorientasi pada nilai-nilai peradaban yang inklusif, selalu berupaya untuk ikut berdialog dan berbagi dengan berbagai peradaban dunia. Tidak hanya sebagai penerima pengaruh asing tapi juga memengaruhi masyarakat dunia. Inilah makna dari kosmopolitanisme yang dalam aktivitas nyata. Dengan sifat-sifat tersebut peran intelektual kosmopolit akan mampu membawa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam menyikapi kemajuan teknologi. Sederhananya Intelektual kosmopolit merupakan representasi priyayi prograsif, sekaligus santri yang Transformatif.

Era disrupsi dan globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus di hadapi intelektual muda NU dewasa ini. Salah satu wujud formulasi kosmopolit warga NU secara kritis-transformatif dalam menjawab tantangan globalisasi tersebut adalah dengan penguatan watak keislaman sembari tetap merawat keIndonesiaan. Islam Indonesia pada hakikatnya merupakan manifestasi sebuah pemahaman keislaman yang bergumul, berdialog dan menyatu

30 Michael H.Hart, *100 Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah,* Jakarta: Pustaka Jaya. 1997.

dengan kebudayaan Nusantara, dengan melalui proses seleksi, akulturasi dan adaptasi.

Sehingga NU tidak hanya terbatas pada sejarah atau lokalitas Islam di tanah Jawa. Lebih dari itu, NU sebagai *manhaj* atau model beragama yang harus senantiasa diperjuangkan untuk masa depan peradaban Indonesia dari sabang sampai merauke, dan juga seluruh penjuru dunia. Intelektual muda NU yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi sekaligus bersahabat dengan lingkungan kultur, sub-kultur, dan agama yang beragam ini setidaknya cukup. Gagasan demikian secara universal merupakan wujud inklusivisme keislaman intelektual NU di tengah gempuran arus globalisasi.

Secara aplikatif inlusivisme gerak intelektual harus ditopang oleh *dharriyat al-khamsah,* meminjam gagasan Gus Dur. Kelima hal dasar itu adalah: 1) *hifz al-din;* keselamatan keyakinan setiap agama; 2) *hifz al-nafs;* keharusan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan anarkis dan teror; 3) *hifz al-aqli;* pemeliharaan atas kecerdasan akal; 4) *hifz al-nasl;* keselamatan keluarga dan keturunan; dan 5) *hifz al-mal;* keselamatan hak milik, properti dan profesi dari kekerasan dan gangguan.[31] Artinya, semakin saleh intelektual muda NU dalam menjalankan *dharriyat al-khamsah,* semakin inklusif intelektual tersebut.

Akhirnya, sejalan dengan kaidah *al-Muhafadhotu ala Qodimis Sholeh wal Akhdu bil Jadidil Ashlah* (mengaktualisasikan nilai-nilai klasik yang masih relevan sembari mengambil nilai-nilai kontemporer yang membawa kebaikan). Bagaimanapun juga upaya menangkal hedonisme, materialisme, ekstrimisme, fundamentalisme dan terorisme sejalan dengan membangun keberagaman Islam di bumi nusantara yang majemuk.

Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan: *Pertama,* masa depan NU dalam menyongsong Indonesia Emas 2024, yang dalam hal ini dimotori oleh kaum intelektual muda, bergantung kepada kesiapan mereka dalam menempatkan diri di tengah revolusi digital yang kian massif. ISNU, Lakpesdam, PMII, KMNU, serta kantung-kantung intelektual NU lainnya perlu bertransformasi dan segera melakukan upaya reposisi

31 Abdurrahman Wahid. *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute. 2007.

nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang sinergis dengan perkembangan revolusi industri, agar dapat kembali menyapa akar rumput *applicable* dan *adaptable* dalam gerak inklusif.

Kedua, Perlu rumusan bersama arah gerakan intelektual muda NU yang inklusif, yakni gerak intelektual yang mampu bergumul, berdialog dan menyatu dengan tradisi Nusantara yang beragam, sekaligus responsif dengan dinamika global yang disruptif melalui proses seleksi, akulturasi dan adaptasi. Gerak dan gerakan intelektual yang membenamkan diri pada paradigma ilmu yang bertujuan praksis, yakni upaya membumi dan mendampingi secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abdul Mukti Ro'uf, *Kritik Nalar Arab Muhamamd Abid al-Jabiri*. Yogyakarta: LKiS, 2018

Abdurrahman Wahid. *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute. 2007.

Abid Rohmanu dkk, *Nalar Kritis Keberagamaan: Menguatkan Ruh dan Hakikat Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Agatha Olivia Victoria, "Mempertahankan masyarakat inklusif di tengah disrupsi teknologi" https://www.antaranews.com/ akses 2 Januari 2024.

Airlangga Pribadi. "Pudarnya Peran Intelektual Pembela Masyarakat," *Harian Kompas,* Edisi 15 Maret 2021.

Antonio Gramsci. *The Intellectuals, In Selections From The Prison Notebooks*. New York: International Publishers. 1989.

Edward W. Said. *Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures*. New York: Vintage Books. 1996.

Fabian Fadhly. "Tradisi Intelektual Islam Di Indonesia Abad VII-XXI M," *Tamaddun*, 18, no 1. 2018.

George Ritzer dan Doudlas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern.* Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2010.

Idham Holik. "Idealitas Intelektual Dalam Ruang Publik Pilkada," https://kota-cirebon.kpu.go.id/berita/ akses 20 Maret 2024.

Ignas Kleden, *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka,* Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2020.

John M. Echol dan Hassan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2000.

Julien Benda. *The Treason of the Intellectuals*. Translated by Richard Aldington. With a new introduction by Roger Kimball. New Burnswick: Transaction Publishers, 1969.

Karl Mannheim. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. With a Preface by Louis Wirth. New York: Harcourt, Brace, & Co., Inc. 1954.

Lukman Santoso Az, "Pesan Hijrah dan Praktik Moderasi Negara Madinah" https://nyabtu.com/pesan-hijrah-dan-praktik-moderasi-negara-madinah/, akses 30 Maret 2024.

Michael H. Hart, *100 Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Jakarta: Pustaka Jaya. 1997.

M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim,* Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

M. Imdadun Rahmat. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga 2003.

M. Lutfi Mustofa. "Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia: Negosiasi Intelektual Muslim dengan Modernitas," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam,* 12, no 2, 2011.

M. Nur Fauzi, "Jejak Pemikiran Kosmopolitan Gus Dur: Antara Universalitas Islam dan Partikularitas Kearifan Lokal," *Jurnal Transformatif,* 3, no. 2 October. 2019.

Muhammad Abed al-Jabiri. *Formasi Nalar Arab; Kritik Tradisi dan Wacana Agama,* Yogyakarta: IRCiSod. 2014.

Nastiti Khadijah. "Generasi Muda Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045," https://www.kompasiana.com/ akses 28 Maret 2024.

Noam Chomsky dkk. *The Responsibility of Intellectuals Reflections by Noam Chomsky and others after 50 years.* UCL Press University College London. 2019.

Raymond Williams. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. New Edition. New York: Oxford University Press. 2015.

Syarif Maulana, "Ruang Publik dan Intelektual Organik," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12, no. 1, Juni. 2015.

Tasman, Islam Inklusif: Konstruksi Pemikiran untuk Dialog Umat beragama di Indonesia, 21 no 1, 2017.

Usman, "Pemikiran Kosmopolit Gus Dur Dalam Bingkai Penelitian Keagamaan," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 10 no. 1 2008, hlm. 185-192

Yanwar Pribadi, "Partisipasi Aktif Intelektual Muda Muslim Dalam Membangun Masyarakat," *Lembaran Masyarakat,* 1 no 1. 2015.

*Zain Abidin, "*Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin Dan Sejarah," *Humaniora*, 4 no.2 Oktober 2013. hlm. 1273-1291.

KBBI Online/intelektual, akses 20 Juli 2024.

KBBI Online/inklusif/ akses 20 Juli 2024.

Menelisik Ancaman Berdimensi Ideologi dan Menata Kembali Etika Moral Bangsa

Zulkhoirian Syahri, Dwita Nurulita

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan sejarahnya yang beraneka ragam, saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan tersebut adalah ancaman berdimensi ideologi yang berpotensi mengikis nilai-nilai etika dan moral bangsa.[32] Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan ideologi politik, tetapi juga menyentuh aspek-aspek lain seperti sosial, budaya, dan agama. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat.[33] Informasi yang begitu mudah diakses seringkali tanpa filter, menyebabkan munculnya ideologi-ideologi baru yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah lama dianut oleh bangsa Indonesia. Terlebih lagi, pengaruh dari luar negeri yang tidak selalu sejalan dengan kearifan lokal, dapat mengancam integritas moral masyarakat.[34]

Di sisi lain, akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia, khususnya antara budaya Islam dan budaya lokal, menjadi bukti bahwa nilai-nilai etika dan moral bangsa dapat dipertahankan bahkan diperkuat melalui proses adaptasi yang harmonis. Namun, proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang bijaksana agar tidak terjadi benturan yang merugikan.[35] "Masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman purbakala sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral", demikian ungkapan Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya *Ethical View Point of Islam.* Ungkapan tersebut menggambarkan seluruh komponen bangsa, bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara super power, maju dan jaya, maka langkah utama dan pertama yang harus kita

32 Nir-Militer, "ANCAMAN ASIMETRIS TERHADAP SISTEM PERTAHANAN NEGARA."

33 Angeline, Hanifah, and Wibawa, "Degradasi Moral Dalam Etika Budaya Bangsa Indonesia."

34 Dalle, "Deklarasi Anies-Muhaimin Dan Konflik Ideologi NU Versus PKS Di Pentas Politik Nasional."

35 Afdhali and Triadi, "EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN IDEOLOGI ASING."

lakukan adalah dengan membenahi dan memperbaiki moral dan etika bangsa yang akhir-akhir ini dalam kondisi memprihatinkan, sebab bobroknya moral dan etika seseorang mencerminkan iman dan akidahnya telah goyah, sedangkan kalau iman dan akidah telah goyah, maka lahirlah pola kehidupan jahiliyyah, eksesnya manusia hidup bebas, buas, beringas, ganas, bahkan jauh lebih ganas dari binatang buas.[36] Sebagai bukti, tidak sedikit di antara kita yang gemar melakukan kemaksiatan, perjudian, pemerkosaan, pelacuran, perampokan, dan pembunuhan, bahkan akhir-akhir ini mayarakat menyaksikan markus-markus mulai bergentayangan, bahkan meskipun markus-markus itu telah diringkus, akan muncul lagi markus-markus yang lebih rakus, sehingga bukan hanya harta pajak yang dibajak, tetapi negara pun akan diinjak-injak. Itulah hadirin dampak langsung dari dekadensi moralitas yang dialami sebuah bangsa.[37] Oleh karena itu, mengingat betapa pentingya perbaikan moral dalam mewujudkan kebangkitan, kekuatan, dan kemuliaan bangsa.

Di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin maju, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman berdimensi ideologi. Ancaman ini bisa datang dari berbagai sumber, baik eksternal maupun internal, yang dapat menggoyahkan nilai-nilai dasar dan moral bangsa. Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti ekstremisme agama, radikalisme, dan separatisme, bisa merusak tatanan sosial dan keutuhan bangsa. Untuk menghadapi ancaman ini, perlu ada upaya menata kembali etika dan moral bangsa, sebagai landasan utama dalam mempertahankan integritas dan identitas nasional.[38]

Pendahuluan ini bertujuan untuk menelisik lebih jauh ancaman-ancaman berdimensi ideologi yang dapat merusak tatanan etika dan moral bangsa, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menata kembali etika moral bangsa agar tetap kokoh dan relevan di tengah dinamika global. Dengan demikian, diharapkan bangsa Indonesia dapat terus mempertahankan jati dirinya dan

36 Umam, Islamy, and Bariroh, "Internalisasi Nilai Karakter Berbasis Ideologi Keagamaan Di Lembaga PAUD Berafiliasi NU."

37 Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya."

38 Nir-Militer, "ANCAMAN ASIMETRIS TERHADAP SISTEM PERTAHANAN NEGARA."

menghadapi tantangan masa depan dengan penuh kesiapan dan kepercayaan diri.

Ancaman Berdimensi Ideologi

1. Ideologi Politik
   Perkembangan politik global dan lokal sering kali membawa serta ideologi-ideologi yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Ideologi politik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal dapat menyebabkan disintegrasi sosial.[39] Misalnya, ideologi radikal yang mengedepankan kekerasan dan intoleransi berpotensi memecah belah persatuan bangsa.[40] Selain itu, politik identitas yang menonjolkan perbedaan etnis, agama, dan ras juga dapat memperburuk polaritas di masyarakatl. Oleh karena itu perlu adanya filter dalam berpolitik jangan sampai nilai-nilai pancasila yang ada di negara ini sudah tidak diperhatikan dan hilang seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman.[41] Di sini NU mempunya peran penting dalam dunia berpolitik khususnya di indonesia dan umumnya di seluruh dunia karena mayoritas penduduk beraliran Nahdhiyin.
2. Ideologi Sosial dan Budaya
   Globalisasi telah memperkenalkan berbagai ideologi sosial dan budaya baru yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Indonesia. Budaya konsumerisme, individualisme, dan hedonisme yang semakin marak dapat mengikis nilai gotong royong, kebersamaan, dan kesederhanaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Penyebaran informasi melalui media sosial tanpa filter juga dapat mempercepat proses ini, mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda.[42] Terlebih lagi saat ini mayoritas populasi manusia di dunia mempunya Hand Phone sebagai media untuk mencari informasi dan mengekspresikan diri mereka di media sosial yang mana ketika hal tersebut tidak

---

39 Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam."
40 Ngatourrohman et al., "Menguatkan Ketahanan Nasional Bangsa Dengan Upaya Bela Negara."
41 Azizah, "Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan Dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa."
42 Husni, "NU Di Tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Transnasional."

digunakan dengan bijak maka akan berdampak buruk kepada dirinya dan orang lain.[43]

Media mempunya banyak dampak positif, manfaat dan kegunaan untuk manusia terlebih di zaman ini semua serba online dimulai dari belanja, meeting, belajar dan masih banyak lagi hal yang semua nya saat ini dilakukan oleh teknologi, bahkan sampai membuat robbot manusia yang digunakan untuk kepuasan induvidu. Jika tidak bisa teknologi maka akan tertinggal oleh mereka yang peduli terhadap teknologi.[44] Ternyata dibalik dampak positifnya, media dan teknologi memliki segudang dampak negatif terhadap ideologi sosial dan budaya di masyarakat mulai dari aktivitas kegiatan yang dilakukan secara kelompok maupun induvidu. Misalnya, sudah tidak peduli sesama tetangga dan satu sama lain, hilangnya rasa menghargai dan memperhatikan ketika berada di dalam forum dan masih banyak lagi. Maka dari itu NU diharap terus eksis di masyarakat guna merangkul dan memberikan arahan dan bimbingannya kepada masyarakat baik secara offline atau online, baik melalui media cetak maupun media non cetak. Gunanya untuk membangun ikatan kesaudaraan sesama manusia dan menjalin ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariah.[45] Dengan demikian penting untuk saling merangkul dan berpegangan tangan untuk mengapai cita-cita dan harapan bangsa sesuai dengan nilai-nilai yang tertera pada pancasila dan UUD 45.

3. Ideologi Agama

   Ideologi ini sangat penting meskipun agama seharusnya menjadi sumber moral dan etika, namun saat ini banyak sekali ideologi-ideologi agama yang menyimpang dari ajaran sebenarnya. Radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama sering kali menimbulkan konflik dan kekerasan.[46] Ideologi-ideologi ini tidak hanya merusak citra

43 Kristanto, "Pemanfaatan Cerita Rakyat Sebagai Penanaman Etika Untuk Membentuk Pendidikan Karakter Bangsa."

44 Pramitasari, "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pertunjukan Seni Dan Budaya."

45 Bilfagih, "Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU Di Tengah Tantangan Global."

46 Husni, "NU Di Tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Transnasional."

agama yang seharusnya membawa perdamaian, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan integritas moral bangsa.

Ideologi agama harus dibingkai dengan agama itu sendiri, karena ini berdasar kepada keyakinan, nilai-nilai dan praktik dalam kegiatan baik yang bersifat ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Ketika seseorang sudah menjadikan agama sebagai landasan hidup dalam melakukan segala kegiatan maka akan berdampak positif dan bangsa ini akan makmur aman dan damai.[47] Akan tetapi tetap semua itu harus ada filter oleh para pakar ahli agama yang mumpuni di bidangnya, jangan sampai agama dijadikan kedok bagi mereka yang ingin merusak ketentraman dan kesejahteraan di negri ini.

Menata Kembali Moral dan Etika Bangsa

1. Pendidikan Moral dan Etika
   Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun etika dan moral bangsa, dan kurikulum dalam pendidikan harus diintegrasikan dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat.[48] Oleh karena itu pendidikan karakter harus diberikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan agama yang moderat dan toleran juga penting untuk mencegah penyebaran ideologi radikal.

   Dengan pondasi yang sudah dibangun sejak dini menjadikan asas seseorang itu kuat dalam berideologi, terlebih lagi dalam NU kita dikenalkan bagaimana berfikir yang moderat dan toleran.[49] Hal ini membuat seseorang bisa saling menerima, mengerti dan memahami satu sama lain. Sehingga tidak akan terjadi konflik atau problem selama itu masih bisa diterima secara rasional dan berdasar pada nilai-nilai agama.
2. Penguatan Kearifan Lokal
   Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi sumber nilai-nilai moral dan etika. Penguatan kearifan lokal ini melalui berbagai kegiatan budaya, seni, dan tradisi

---

47 Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir Vis a Vis NU)."

48 Anwar, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Bangsa."

49 Azizah, Dewi, and Furnamasari, "Peran Seorang Mahasiswa Dalam Menyadarkan Masyarakat Indonesia Untuk Saling Berintegrasi."

perlu dilakukan secara konsisten. Budaya gotong royong, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur lainnya harus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas bangsa.[50]

Dengan demikian menjaga dan melestarikan kearifan lokal bisa menigkatkan banyak dampak positif baik secara intelektual, ekonomi dan ligkugan alam sekitar.

3. Peran Media Massa dan Media Sosial
   Media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, media harus berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang mendidik dan membangun. Pengawasan terhadap konten-konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan hoaks harus diperketat. Edukasi kepada masyarakat tentang literasi digital juga penting agar mereka lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima.[51]

   Saat ini sudah banyak dari kalangan NU yang aktif dan selalu eksis dalam media untuk memberikan informasi yang mendidik dan membangun, baik dalam bidang *ubudiyah, muamalah* dan politik melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twiter dan sebagainya baik dalam bentuk tekstual maupun kontekstual. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap informasi yang ada perlu melewati proses filterisasi sehingga apa yang diterima dapat dikonsumsi dengan bijak oleh masyarakat.[52] Hal ini penting supaya tidak terjadi kesalah pahaman dengan mangadu domba antar agama, suku atau etnis yang berbeda.
4. Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah
   Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran moral dan etika, seperti korupsi, kejahatan dan perjudian yang saat ini sudah tidak seperti dahulu, sekarang perjudian bisa dilakukan cukup dengan tap-tap layar saja ini dikenal dengan slot atau judi online. Hal ini merupakan langkah penting dalam

---

50 Pramitasari, "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pertunjukan Seni Dan Budaya."

51 Al Siddiq and Widianto, "Pemuda Nu Dalam Pusaran Wacana Anti Komunisme."

52 Fealy, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*.

menata kembali etika moral bangsa.[53] Jangan sampai hanya perkara kecil seperti demikian memberikan dampak buruk seperti pembunuhan. Oleh karena itu pemerintah juga harus merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan moral dan etika, seperti program-program sosial yang mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian.[54]

Dengan demikian diharapkan pemerintah bisa mengaplikasikannya sehingga mampu menata kembali moral dan etika bangsa. Ketika moral dan etika sedikit demi sedikit terbentuk, maka akan mampu meminimalisir hal-hal yang buruk terjadi. Karena semua orang bertindak sesuai moral dan etika sehingga bangsa ini menjadi *baldatu thoyyibatun wa robbun ghafur.*

5. Partisipasi Masyarakat

   Peran serta masyarakat dalam menjaga dan memperkuat etika moral bangsa tidak dapat diabaikan. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga dapat mempererat ikatan sosial dan memperkuat etika moral di tengah masyarakat.[55]

   Oleh karena itu kesadaran dalam beretika dan bermoral sangat penting dimiliki oleh masing-masing individu jika sudah demikian maka akan terbentuk dan lahir generasi bangsa yang diharapkan, tidak hanya sekedar menjadi *agent of change* akan tetapi juga menjadi *agent of producer* untuk menata kembali etika dan moral bangsa.

Ancaman berdimensi ideologi yang dihadapi Indonesia memerlukan perhatian serius dan tindakan yang komprehensif. Menata kembali etika moral bangsa bukanlah tugas yang mudah, namun sangat penting untuk keberlangsungan dan kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, penguatan kearifan lokal, peran media, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, Indonesia dapat

---

53 Mustaqim and Miftah, "Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) Dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam."

54 Indrawan, "Relevansi Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) Dengan Konsep Keamanan Nasional Terkait Ancaman Disintegrasi Bangsa Di Papua."

55 Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism?"

menghadapi tantangan ini dengan lebih siap dan penuh percaya diri.[56] Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat mempertahankan jati dirinya dan meraih kemuliaan di tengah dinamika global.

Kesimpulan

Indonesia menghadapi ancaman multidimensional yang dapat merusak tatanan etika dan moral bangsa, terutama melalui ideologi politik, sosial, budaya, dan agama yang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal. Perkembangan teknologi dan globalisasi mempercepat penyebaran ideologi ini, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan moral bangsa Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu adanya pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan moral dan etika, penguatan kearifan lokal, peran media massa dan sosial, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat.

Pendidikan moral harus diberikan sejak dini dan diintegrasikan dalam kurikulum, serta diperkuat dengan pendidikan agama yang moderat dan toleran. Kearifan lokal harus dijaga dan diwariskan melalui berbagai kegiatan budaya dan seni. Media massa dan sosial perlu berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang mendidik dan membangun, serta mengawasi konten negatif. Pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran moral dan etika, serta merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan nilai-nilai moral.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga dan memperkuat etika moral bangsa. Setiap individu harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempertahankan jati dirinya dan menghadapi tantangan global dengan lebih siap dan percaya diri, serta meraih kemuliaan di tengah dinamika global.

---

56 Usman, "Studi Strategik, Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Dan Perkembangannya Di Indonesia."

Daftar Pustaka

Afdhali, Dino Rizka, and Irwan Triadi. "EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN IDEOLOGI ASING." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 510–19.

Al Siddiq, Imamul Huda, and Ahmad Arif Widianto. "Pemuda Nu Dalam Pusaran Wacana Anti Komunisme: Sebuah Pergolakan Ideologi." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (2019): 257–76.

Angeline, Jessica Nathania, Nur Hanifah, and Tegar Wibawa. "Degradasi Moral Dalam Etika Budaya Bangsa Indonesia:(Studi Kasus Degradasi Moral Citra Polri)." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/195.

Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–45.

Anwar, Syaiful. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Bangsa." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2017): 157–70.

Azizah, RR Zahroh Hayati. "Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan Dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 6, no. 3 (2020). https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/666/626.

Azizah, Winda Nur, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Peran Seorang Mahasiswa Dalam Menyadarkan Masyarakat Indonesia Untuk Saling Berintegrasi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 8327–34.

Bilfagih, Taufik. "Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU Di Tengah Tantangan Global." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 2 (2018). https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/505.

Dalle, Muhammad. "Deklarasi Anies-Muhaimin Dan Konflik Ideologi NU Versus PKS Di Pentas Politik Nasional." *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 2 (2023): 230–52.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*. Vol. 1. LKiS Pelangi Aksara, 2012. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=a71mDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=ideologi+NU+&ots=Tpswvo8QVN&sig=1aTHopt7Xiukj-d_I6e9oWFKbDA.

Hadiyono, Venatius. “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1 (2020). http://repository.unika.ac.id/21846/.

Hilmy, Masdar. “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU.” *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 24–48.

Husni, Zainul Mu’ien. “NU Di Tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Transnasional.” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 1 (2018): 45–59.

Indrawan, Jerry. “Relevansi Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) Dengan Konsep Keamanan Nasional Terkait Ancaman Disintegrasi Bangsa Di Papua.” *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2015): 84–96.

Kristanto, Muhamad. “Pemanfaatan Cerita Rakyat Sebagai Penanaman Etika Untuk Membentuk Pendidikan Karakter Bangsa.” *Mimbar Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2014): 59–64.

Mustaqim, Muhamad, and Muhammad Miftah. “Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) Dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam.” *Addin* 9, no. 1 (2015). http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/608.

Ngatourrohman, Azham, Jihan Fitria, Khoirru Nisa, and Nurul Shobrina. “Menguatkan Ketahanan Nasional Bangsa Dengan Upaya Bela Negara.” *Jurnal Inovasi Pendidikan* 7, no. 5 (2024). https://ojs.co.id/1/index.php/jip/article/view/1098.

Nir-Militer, Dalam Sudut Pandang Pertahanan. “ANCAMAN ASIMETRIS TERHADAP SISTEM PERTAHANAN NEGARA,” 2013. https://www.academia.edu/download/33845802/Ancaman_Asimetris_Terhadap_Sishanneg.pdf.

Pramitasari, Arum Wahyu. “Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pertunjukan Seni Dan Budaya.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 23–27.

Rafiuddin, Mohamad. “Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir Vis a Vis NU).” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 29–55.

Umam, Nasrul, Aufrina Nur Islamy, and Bariroh Bariroh. “Internalisasi Nilai Karakter Berbasis Ideologi Keagamaan Di Lembaga PAUD Berafiliasi NU.” *FONDATIA* 7, no. 2 (2023): 295–305.

Usman, Wan. “Studi Strategik, Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2018): 2.

NU DAN TANTANGAN KONSERVASI BUDAYA ISLAM NUSANTARA

Konservasi budaya Islam Nusantara menjadi salah satu tantangan penting bagi NU di era modern. Melalui upaya pelestarian tradisi, seni, dan kearifan lokal, NU berperan menjaga kekayaan budaya yang merepresentasikan identitas Islam yang ramah dan inklusif, menghadapi arus globalisasi dan homogenisasi budaya.

Upaya Pemberdayaan Nilai-Nilai NU: Aswaja sebagai Wadah Pelestarian Budaya Islam Nusantara dalam Kontroversi di Masyarakat

Muh. Rijalul Fikri dan Arifatul Mufitda

Pelestarian budaya islam nusantara merupakan salah satu upaya pemberdayaan nilai-nilai NU (Nahdlotul Ulama). Aswaja adalah salah satu wadah yang dapat dijadikan sebagai penghubung untuk mewujudkan upaya tersebut. Karena Aswaja dapat menjadi sumber patokan dalam islam yang dapat dituangkan dan diaktualisasikan dalam masyarakat.

Dalam era modern seperti sekarang ini, dimana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) semakin canggih, perubahan dan problem sosialpun semakin kompleks dan terlihat dalam masyarakat warga NU. Tantangan umat saat ini utamanya NU, adalah globalisasi yang menghadapkanya dengan kenyataan bahwa penyebar agama Islam saat ini belum beradaptasi dengan keberadaan budaya nusantara[1]. Maka yang harus dilakukan adalah berani mencari alternatif dan ketentuan-ketentuan mazhab yang akan dijadikan sebagai *frame of reference*. Sebab jika tidak, maka masyarakat warga NU akan berfikir secara sempit dan tidak berani mengeluarkan keputusan yang menjadi tuntutan masyarakat warga NU. Maka dari itu, perlu kita tuangkan dalam pemikiran NU bahwa Aswaja dapat menjadi wadah pelestarian budaya Islam nusantara. Hal inilah yang menjadi kontroversi dalam masyarakat warga NU.

Gempuran perkembangan IPTEK yang semakin canggih membuat problematika yang semakin jelas, mulai menyamarkan nilai-nilai yang ditanamkan dalam NU. Maka Aswaja sangat berperan untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi, dan memvitalkan kembali nilai-nilai yang telah diajarkan oleh NU. Karena Aswaja diyakini sebagian besar umat Islam sebagai pemahaman dan ajaran dari Nabi Muhammad SAW yang benar, kemudian diajarkan turun temurun (*Tabi'in-Tabi'it*) dan diteruskan oleh generasi berikutnya hingga

1 Taufik Bilfagih, "ISLAM NUSANTARA; STRATEGI KEBUDAYAAN NU DI TENGAH TANTANGAN GLOBAL," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 2 (January 31, 2018), https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/505.

saat ini. Budaya islam nusantara perlu terus dilestarikan bahkan dikembangkan oleh masyarakat. Dalam konteks NU, masyarakat perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Aswaja untuk terus dapat memperluas budaya Islam nusantara saat ini. Selain itu, dengan memahami Aswaja yang berkaitan dengan tantangan budaya Islam nusantara dapat mempersempit kontroversi yang terjadi di masyarakat warga NU.

Said Agil Sidraj menulis, sebagai organisasi sosial keagamaan NU memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan kebangsaan dan kemanusiaan, karena NU menampilkan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) ke dalam 3 pilar *ukhuwah* yaitu, *ukhuwah islamiyyah, ukhuwah wathoniyyah,* dan *ukhuwah insaniyyah.* Ukhuwah Islamiyah merupakan landasan teologis atau landasan iman dalam menjalin persaudaraan tersebut dan ini sekaligus merupakan *entry point* dalam mengembangkan ukhuwah yang lain agar keimanan ini terefleksikan dalam kebudayaan dan peradaban, maka kepercayaan teologis ini perlu diterjemahkan ke dalam realita sosiologis dan antropologis, kemudian ukhuwah Islamiyah diterapkan menjadi *ukhuwah wathoniyah* (solidaritas kebangsaan)[2]. Untuk membina ukhuwah tersebut, kita perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menuntut kita untuk menghormati, tolong-menolong, dan mencintai sesama muslim yang nantinya juga sangat berdampak pada pemberdayaan nilai-nilai NU.

Organisasi NU yang menekankan pada konsep *Ahlussunah Wal Jama'ah* (Aswaja) yang berarti mengikuti ajaran Rasulullah dan mengutamakan persatuan umat Muslim. Tak hanya itu, dalam NU juga sangat menekankan pentingnya toleransi antar agama serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia khususnya pada bidang budaya di nusantara yang beraneka ragam. Maka dari itu, telah dituangkan dalam ajaran Aswaja bahwa kita harus bisa melindungi budaya islam nusantara dari penyimpangan dan problematika saat ini.

Tradisi Budaya Islam

Tradisi budaya Islam merupakan suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang terus berkembang kemudian menjadi

---

2 Bilfagih.

kebiasaan dan turun temurun dilakukan masyarakat sekitar yang diaktualisasikan dengan ritual adat dalam Islam[3]. Dalam buku karya Muhammad Rafi'i dengan judul Islam Nusantara Prespektif Abdurrahman Wahid, Azyumardi Azra memaparkan definisi budaya Islam nusantara itu memiliki distingsi tidak hanya dalam tradisi dan praktik keislaman yang kaya dan penuh nuansa, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya dan politik. Karena itu, penyebutan Islam Nusantara dengan memandang praktik keagamaan adalah valid[4]. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya Islam Nusantara adalah kebiasaan yang bernuansa praktik islam dalam kehidupan sosial, budaya maupun politik yang terus berkembang bahkan turun-temurun dan diterapkan berupa ritual adat masyarakat di dalam Islam. Akan tetapi yang dimaksud NU ialah Islam *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang diamalkan, didakwahkan dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di bumi Nusantara oleh para pendakwah yang bertujuan untuk mengantisipasi dan melindungi umat dari paham radikalisme, liberalisme, Syi'ah, Wahabi, dan paham-paham lain yang tidak sejalan dengan *Ahlussunnah Wal Jamaah.*

Respon Islam NU dalam Budaya Islam Nusantara

Islam memiliki berbagai wajah dalam merespon budaya sekitarnya. Ada saatnya Islam tidak menerima atau menyetujui budaya *tahrim* dan adakalanya Islam merekontruksi budaya *tahyir* serta Islam bertemu tanpa menolak dan merevisinya *tahmil.* Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Gus Dur menyebutkan bahwa "Pribumisasi Islam sebagai upaya melakukan"rekonsiliasi" Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat, agar budaya lokal itu tidak hilang. Di sini pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan, bukan sebagai upaya menghindari polarisasi antara agama dengan budaya setempat. Gus Dur menegaskan bahwa antara agama dan budaya memiliki hubungan yang tumpang tindih serta perbedaan. Namun, Gus Dur tidak mengesampingkan peran budaya dalam kehidupan beragama. Karena memang tidak mungkin terjadi jika ingin

3 "Tradisi Dan Budaya Menurut Aswaja | PDF," accessed July 4, 2024, https://www.scribd.com/presentation/449623057/TRADISI-DAN-BUDAYA-MENURUT-ASWAJA.

4 Muhammad Rafi'i, *Islam Nusantara Prespektif Abdurrahman Wahid Pemikiran Dan Epistemologinya* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019).

mewujudkan Islam dalam kesadaran masyarakat atau umat Islam, dalam arti menyebarkan agama Islam[5] . Namun, dalam pandangan kaum Nahdliyyin, kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukanlah untuk menolak segala tradisi yang mengakar menjadi kultur budaya masyarakat, melainkan sekedar untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan pelurusan-pelurusan terhadap tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan risalah Rasulullah SAW. Budaya yang telah mapan menjadi nilai normatif masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam akan mengakulturasikannya bahkan mengakuinnya sebagai bagian dari budaya dan tradisi Islam itu sendiri[6]. Metodologi yang diformulasikan oleh tokoh Nahdliyyin tersebut, memperlihatkan bahwa Islam Nusantara memiliki cakupan yang sangat luas, wilayah keagamaan, budaya, sosial, dan politik. Metodologi tersebut digali dari Al-Qur'an dan Hadist serta ilmu-ilmu dari orang itu sendiri. Hal ini sangat memungkinkan terjadi wacana yang dihadapi Islam Nusantara. Jadi, dalam Islam sebenarnya budaya Islam Nusantara dan NU itu tidak saling bertentangan, hanya saja akan ada modifikasi atau pembenahan yang sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi jika warga NU memandang secara positif, maka keduanya tidak akan terjadi problematik dan bahkan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Keunggulan Islam Nusantara itu terdapat pada *Maqasidu Syari'ah* yang terinspirasi dari ide *maqasid* Imam al-Ghazali yang sangat penting dalam memahami *manhaj* Islam Nusantara, yakni unsur utama yang menjadi pendukung dalam mencapai tujuan Syari'ah.

Kontroversi Islam Nusantara dalam Masyarakat

Menurut Buya Gus Rizal, istilah Islam Nusantara melahirkan berbagai permasalahan yang akan mengundang perdebatan yang tidak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting yang sedang dihadapi, bahkan istilah 'islam Nusantara' bisa membawa kerancuan dan kebingungan di tengah umat dalam memahami Islam. Susunan bahasa Indonesia menunjukkan pembatasan Islam dalam wilayah yang disebut "Nusantara" ini berakibat terjadinya pengerdilan dan penyempitan ruang lingkup

---

5 Muhammad Rafi'i.

6 Nailus Syarifah, "Makalah Semester 1 : Tradisi Dan Budaya Menurut Pandangan NU," *Makalah Semester 1* (blog), accessed July 4, 2024, https://nailuszaman.blogspot.com/2016/04/makalah-semester-1-tradisi-dan-budaya.html.

Islam yang semestinya menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alamiin*) dan untuk seluruh umat manusia (*kaaffatan linnaas*)[7]. Terjadinya kontroversi antara nilai-nilai NU dan masyarakat terkait budaya Islam nusantara seperti yang dijelaskan di atas dapat terjadi, disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang Aswaja. Orang yang kurang memahami makna nilai nilai NU yang tertuang dalam Aswaja dapat memicu stigma negative dan kerancuan serta menganggap ajaran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, Aswaja merupakan pengetahuhan pokok dalam NU yang menjadi patokan sebagian besar masyarakat warga NU.

Akan tetapi, warga NU juga perlu bersikap lebih berhati-hati terhadap kebudayaan termasuk tradisi yang saat ini tengah berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat memicu terjadinya kontroversi dan kesalahpahaman. Dengan menghargai dan mengembangkan semangat dalam berinovatif dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengembangkan dan memberdayakan nilai-nilai NU dalam prespektif Aswaja. Hal ini dapat dilakukan dengan tujuan membumikan ajaran nilai-nilai NU ditengah-tengah masyarakat secara damai tanpa menyinggung oknum lainya. Islam Nusantara harus berpatokan pada Aswaja yaitu disiplin ketat mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dukungan mayoritas masyarakat. Islam Nusantara yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan berdiri tanpa diamalkan oleh masyarakat. Islam Nusantara juga membutuhkan pendekatan Islam kepada masyarakat nusantara terutama warga NU serta diterima oleh masyarakat tanpa paksaan apapun. Menurut pandangan Islam Nusatara dalam mengamalkan Aswaja yakni mengajarkan kita untuk tetap istiqomah menjalani Sunnah Rasulullah, sekaligus membangun kehidupan beragama secara damai, hidup bersama, dan solider dengan sesama. Dengan Islam Nusantara, masyarakat nantinya juga akan mempunyai rasa cinta tanah air atau nasionalisme karena rasa tersebut merupakan sebagian dari iman[8].

---

7 "Artikel Terbaru," Ganto.co, accessed July 4, 2024, http://www.ganto.co/artikel/717/menolak-islam-nusantara.html.

8 Muhammad Rafi'i, *Islam Nusantara Prespektif Abdurrahman Wahid Pemikiran Dan Epistemologinya*.

Korelasi NU dalam Aswaja Sebagai Problem Solving

Islam Nusantara bukanlah Islam yang anti Arab dan benci Arab, juga bukan Islam yang liberaton. Tapi Islam yang santun, berbudaya, ramah,, toleransi, berakhlak, dan berperadaban. Islam Nusantara bukanlah membuat aliran-aliran baru dan mengubah doktrin yang sudah ada dalam Islam, tetapi Islam Nusantara mengerjawantahkan nilai-nilai Islam yang ada dalam konteks masing-masing termasuk Nusantara. Abdul Maqosith Ghazali mengatakan bahwa dalam penerapan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist, Islam Nusantara menggunakan beberapa metodologis yang bertumpu pada tiga dalil, yaitu *maslahah mursalah, istihsan,* dan *'urf.* Dalil-dalil ini dianggap relevan karena pada hakikatnya Islam Nusantara lebih dominan bergerak pada aspek *ijtihad talbiqi* dari pada *ijtihad istinbati*[9].

Sepert contoh budaya Islam Nusantara yaitu Sesaji Rewanda yang merupakan budaya Islam yang berada di daerah Gua Kreo, Semarang. Sesaji yang artinya memberi, dan Rewanda yang berarti monyet. Ritual ini diadakan bertujuan untuk mengingat perjalanan Sunan Kalijaga dan pesanya untuk menjaga kelestarian alam termasuk monyet-monyet yang ada di sana. Biasanya, Sesaji Rewanda dilakukan tiga hari setelah lebaran. Namun, karena menjadi daya tarik wisata, waktu disesuaikan tapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari lebaran. Tradisi ini berawal dari perjalanan Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati yang akan digunakan untuk membangun Masjid Demak sekitar abad ke-15. Sunan Kalijaga yang mengalami hambatan di perjalanan mendapat bantuan dari para monyet di sekitar Gua Kreo. Saat itu para monyet berdatangan dan menolong Sunan Kalijaga. Lalu, Sunan Kalijaga berpesan kepada para monyet untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan ke Demak dan menjaga Gua Kreo itu[10]. Akan tetapi berbeda dengan pandangan masyarakat di sana yang mana mereka berfikir bahwa ritual tersebut bertujuan untuk meminta perlindungan, pemurnian, pemulihan, kesuburan, penjaminan, melestarikan leluhur (penghormatan) yang dipersembahkan untuk leluhur dan bertujuan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan mahkluk ghaib. Padahal dalam pandangan Islam secara akidah itu

9 Muhammad Rafi'i.

10 *Sesaji Rewanda, Tradisi Khas Syawalan di Goa Kreo Semarang,* accessed July 5, 2024, https://20.detik.com/e-flash/20220521-220521083/sesaji-rewanda-tradisi-khas-syawalan-di-goa-kreo-semarang.

tidak diperbolehkan atau terlarang. Karena, didalamnya terhadap harapan dan tujuan yang salah dalam hukum Islam. Dalam NU prespektif Aswaja juga hanya memperbolehkan tawasul dengan kebaikan-kebaikan dan ketaqwaan yang dipersembahkan kepada Allah SWT sebagaimana telah diajarakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Fenomena di atas dapat menjadi problematika dalam masyarakat karena kesalahpahaman dalam pandangan mereka. Akan tetapi, masyarakat juga tidak dapat memperdebat problematika tersebut, karena sudah merupakan tradisi mereka. Budaya dan tradisi nenek moyang harus dijaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Meskipun terkesan adanya perdamaian di antara agama dan budaya, tetap saja memunculkan ketegangan di antara keduanya. Diantara wajah ketegangan tersebut bahwa ada upaya untuk mengalahkan kebudayaan dengan legitimasi agama sebagai pengerem. Meskipun agama memiliki norma yang ideal, tapi realita sosialnya jauh dari cita-cita tersebut. Maka dari itu, walaupun ada budaya secara terus menerus berubah, maka agama harus mendampinginya sebagai kekuatan yang memberi warna dalam pergulatan tersebut.

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa pola pikir atau mindset umat Islam telah berpola untuk menghadapkan antara Islam dan kebudayaan. Pola pikir seperti ini akan mewujudkan kesenjangan atau mungkin ketegangan antara keduanya. Sebab kebudayaan bersifat dinamis, sedangkan agama sebaliknya. Islam Nusantara sebagai praktik keislaman di Indonesia cenderung mengedepankan nilai-nilai moderat, bersikap toleransi terhadap tradisi, budaya, serta kearifan lokal sebagai hasil dialetika[11]. Dengan demikian, paham Aswaja dengan konsep Islam Nusantara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang mengedepankan perdamaian, *akhlak al-karimah*, dan prinsip moderat, bersikap *tawasuth* dan *tawazun* dalam mengahadapi paham-paham ekstrem dan sekular, menerima budaya lokal selama tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip syariat, mengedepankan dialetika antara teks (syariat) dengan realitas dan budaya setempat, menyeimbangkan (*tawazun*) dalil *naqli* (wahyu) dan metode *aqliyah* (rasio), sehingga melahirkan harmonisasi antara

11 Alfaenawan Kalijaga PP Sirukem/ UIN Sunan, "Korelasi Terminologi Islam Nusantara dengan Aswaja," *Dunia Santri* (blog), June 19, 2023, https://www.duniasantri.co/korelasi-terminologi-islam-nusantara-dengan-aswaja/.

agama, budaya (tradisi), kearifan lokal (*local wisdom*), dan bangsa Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip paham Aswaja.

Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah kami paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa, Tradisi/Budaya Islam Nusantara merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kemudian dikembangkan secara turun-temurun yang praktiknya bernuansa Islam dan diaktualisasikan secara adat dalam Islam di masyarakat seperti yang dituangkan dalam ajaran Aswaja dalam NU. Melalui Aswaja. Kita dapat melestarikan nilai-nilai NU dalam bidang Budaya Islam Nusantara yang menjadi kontroversi yang ada dalam masyarakat, utamanya warga NU. Karena Aswaja menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk membumikan nilai-nilai NU yang cocok untuk diterapkan dalam Budaya Islam Nusantara yang lebih mengedepankan nilai-nilai moderat, bersikap toleransi terhadap tradisi, budaya, serta kearifan lokal sebagai hasil dialetika.

Saat ini, salah satu kontroversi yang ada dalam masyarkat yaitu kurangnya pemahaman dan kesalahpahaman antara Agama dan Berbudaya Islam Nusantara. Maka dari itu perlu pengembangan pola pikir masayarakat terutama warga NU. Karena ideal moral dari Islam Nusantara adalah dengan tidak merubah Islam. Islam Nusantara tetap berkaidah dan berislam sediakala umumnya Islam Suni. Islam Nusantara harus tetap kokoh meyakini rukun iman dan rukun islam. Disisi lain juga Islam Nusantara harus tetap berpijak pada Islam di Indonesia yaitu Islam *Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja).* Namun hanya bentuk luarnya saja yang memiliki perbedaan, tapi relevensi dari Islam Nusantara yaitu bisa membedakan antara Islam dan budaya yang memang tidak bisa dihindari, sehingga mampu menyerap budaya lokal atau unsur-unsur lokalitas sebagai wajah dari fleksibelitas Islam, yang ingin menyumbangkan upaya perbaikan hingga mencapai hubungan yang harmonis antara Islam dan budaya.

Daftar Pustaka

Bilfagih, Taufik. "ISLAM NUSANTARA; STRATEGI KEBUDAYAAN NU DI TENGAH TANTANGAN GLOBAL." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 2 (January 31, 2018). https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/505.

Ganto.co. "Artikel Terbaru." Accessed July 4, 2024. http://www.ganto.co/artikel/717/menolak-islam-nusantara.html.

Kalijaga, Alfaenawan, PP Sirukem/ UIN Sunan. "Korelasi Terminologi Islam Nusantara dengan Aswaja." *Dunia Santri* (blog), June 19, 2023. https://www.duniasantri.co/korelasi-terminologi-islam-nusantara-dengan-aswaja/.

makalah Semester 1. "Makalah Semester 1 : Tradisi Dan Budaya Menurut Pandangan NU." Accessed July 4, 2024. https://nailuszaman.blogspot.com/2016/04/makalah-semester-1-tradisi-dan-budaya.html.

Muhammad Rafi'i. *Islam Nusantara Prespektif Abdurrahman Wahid Pemikiran Dan Epistemologinya*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555.

Sesaji Rewanda, Tradisi Khas Syawalan di Goa Kreo Semarang. Accessed July 5, 2024. https://20.detik.com/e-flash/20220521-220521083/sesaji-rewanda-tradisi-khas-syawalan-di-goa-kreo-semarang.

"Tradisi Dan Budaya Menurut Aswaja | PDF." Accessed July 4, 2024. https://www.scribd.com/presentation/449623057/TRADISI-DAN-BUDAYA-MENURUT-ASWAJA.

Revitalisasi Gagasan Islam Publik-Inklusif Nu Melalui Konservasi Budaya Islam Nusantara

Rojif Mualim

Islam Nusantara bukan sekadar sebuah konsep, kosong tak bermakna, tetapi adalah sebuah sebuah gerakan intelektual dan spiritual yang penting dalam sejarah Indonesia. Konsep ini menggambarkan Islam yang hidup dan beradaptasi dengan budaya lokal, menciptakan sebuah identitas Islam yang unik dan inklusif di wilayah kepulauan Indonesia. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama' (NU), Islam Nusantara telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang mempromosikan toleransi, harmoni, dan keberagaman di masyarakat.

NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah dan terus secara kontinyu memainkan peran sentral dalam upaya pengembangan Islam Nusantara sebagai model Islam yang inklusif. Dengan banyaknya pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, NU tidak hanya fokus sebatas mengajarkan ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, NU justru mengeksplorasi lebih dalam, merelevansikan satas seluruh ajaran islam dalam pesatnya pergeseran zaman, sehingga kemudian diharapkan dapat melahirkan sikap positif yang dapat mengedepankan dan menjunjung tinggi ajaran yang memiliki nilai-nilai keberagaman dan kerukunan antarumat beragama, khususnya di Indonesia dan Dunia pada umumnya.

Dalam konteks ini, Abdurrahman Wahid, tokoh kunci dalam pemikiran Islam Nusantara, menjelaskan pentingnya memahami Islam dalam konteks budaya lokal. Menurut Wahid, bahwa, Islam Nusantara bukan sekadar Islam yang diselaraskan dengan tradisi lokal, tetapi juga sebuah visi Islam yang inklusif yang menolak penegasan kebenaran tunggal dalam doktrin keagamaan (Wahid, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa Islam Nusantara tidak hanya mencoba untuk mengakomodasi budaya lokal tetapi juga aktif dalam mempromosikan nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam masyarakat.

Konsep Islam Nusantara juga begtu mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya di Indonesia, sebab, di mana Islam masuk dan berkembang melalui interaksi antarbudaya yang panjang. Zainal Abidin Nursyamsi menggarisbawahi, bahwa Islam Nusantara

mengakui nilai-nilai lokal dalam konteks keislaman yang lebih luas, menghubungkan antara agama dan budaya dalam sebuah kerangka yang berkesinambungan (Nursyamsi, 2016a). Hal ini menunjukkan bahwa Islam Nusantara tidak hanya mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal tetapi juga menciptakan sebuah identitas keislaman yang khas di Indonesia.

Pandangan ini juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh akademis seperti Clifford Geertz, yang mempertimbangkan pentingnya "interpretasi budaya" dalam memahami agama dan masyarakat. Menurut Geertz, Agama hanya bisa dipahami melalui prisma budaya di mana ia hidup, mengingat pengaruh kompleks dari faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi (Geertz, 1973). Dalam konteks ini, Islam Nusantara tidak hanya mengadaptasi ajaran Islam tetapi juga membentuk sebuah identitas keislaman yang unik yang tercermin dalam tradisi lokal dan budaya masyarakat Indonesia.

Revitalisasi gagasan Islam publik-inklusif melalui konservasi budaya Islam Nusantara juga menawarkan solusi bagi tantangan-tantangan kontemporer seperti ekstremisme dan intoleransi. Robert W. Hefner menyoroti bahwa, NU berperan dalam mengembangkan 'Islam sipil' di Indonesia, yang menekankan pada partisipasi warga dalam kehidupan publik dan penolakan terhadap pemikiran sempit yang mengkotak-kotakkan agama dalam ranah pribadi semata (Hefner, 2000a). Hal ini menunjukkan bahwa Islam Nusantara tidak hanya berusaha untuk memelihara warisan budaya tetapi juga untuk menjadikannya sebagai sumber kekuatan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, Islam Nusantara bukan hanya merupakan sebuah konsep teoretis tetapi juga sebuah gerakan yang berpengaruh dalam membentuk identitas keislaman yang inklusif di Indonesia. Melalui pendidikan, dialog antarumat beragama, dan konservasi budaya, NU terus berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan harmonis dalam masyarakat yang multikultural. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam Nusantara tidak hanya memperkaya kajian akademis tetapi juga memberikan inspirasi bagi upaya-upaya lebih lanjut dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera di Indonesia.

Sebelum jauh saya menguraikan tentang bagaimana revitalisasi gagasan Islam publik-inklusif NU melalui konservasi budaya Islam Nusantara, Saya akan sampaikan sedikit bagaimana landasan

teoretisnya atas lahirnya analisis dalam artikel ini. Bagaimana konservasi budaya Islam Nusantara itu dilanggengkan supaya revitalisasi gagasan Islam Publik-Inklusif NU itu terjadi dan berhasil secara strategis? Dan termasuk, bagaimana potret relasi kuatnya atantara manusia, Tuhan, alama, dan keanekaragaman budaya?

Mari kita mulai. Saya akan mengawalinya dengan menjelaskan secara singkan, bagaimana relasi antara keberagaman budaya dengan lingkungan alam. Bahwa, pandangan Islam tentang "keberagaman budaya" termasuk juga dalam tanggungjawabnya manusia terhadap "lingkungan alam", telah lama tercermin dalam konsep tauhid (keyakinan akan keesaan Allah) dan khalifah (peran manusia sebagai pemelihara bumi). Konsep tauhid menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang Maha Esa, dan manusia sebagai khalifah diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi serta isinya sesuai dengan kehendak-Nya (otoritas Tuhan).

Khalid (1992), dalam bukunya "*Islam and Ecology: A Bestowed Trust*" bahwa "Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas bumi dan isinya." Lebih mendalam, ia menjalaskan mengenai konsep khalifah dalam Islam. Menurut Khalid, Islam mengajarkan bahwa manusia bukanlah pemilik absolut atas alam semesta ini, tetapi diangkat sebagai khalifah Allah untuk mengurus dan menjaga bumi serta sumber daya alamnya.

Artinya, bahwa konsep ini menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam dan tak terkecuali termasuk dalam bagaimana harus menghormati keanekaragaman budaya sebagai bagian integral dari ajaran keislaman itu sendiri. Hal ini, saya kira, menunjukkan secara jelas dan tegas, bahwa konsep khalifah tidak hanya sekedar peran sosial atau ekologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat dalam hubungan antara manusia dengan penciptanya, alam semesta, dan keanekaragaman budaya.

Dalam konteks keberagaman budaya, Islam mengajarkan bahwa perbedaan-perbedaan antara manusia adalah rahmat yang harus dihargai dan dijaga. Al-Qur'an telah menegaskan, "*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"

(QS. Ar-Rum: 21).

Contoh dalam konteks kelestarian lingkungan, konsep khalifah menuntut umat manusia untuk bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem bumi dan memelihara keberagaman hayati. Islam mengajarkan perlunya melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan mempertahankan keseimbangan ekologis sebagai bagian integral dari amanah khalifah. Syed Muhammad Naquib Al-Attas telah menjelaskan secara jelas, bahwa tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam alam semesta ini, yang mencakup keanekaragaman budaya dan lingkungan (Al-Attas, 1986).

Dengan demikian, konsep tauhid dan khalifah dalam Islam tidak hanya menjadi landasan teologis, tetapi juga menjadi panduan etis dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan keberagaman budaya. Islam Nusantara, yang mengakar kuat di Indonesia, menerapkan prinsip-prinsip ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam ajaran agama dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antarumat beragama. Hal ini tentu sangat sejalan dengan visi NU dalam membangun masyarakat yang berdasarkan keadilan sosial, keberagaman budaya, dan keseimbangan dalam wilayah ekologis.

Dalam konteks globalisasi dan masifnya tantangan lingkungan yang semakin kompleks, sehingga di sini Islam Nusantara harus berupaya secara konsisten untuk terus menawarkan berbagai paradigma alternatif dalam misi membangun pemahaman yang inklusif terhadap keberagaman budaya dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Melalui pendidikan agama yang holistik dan pendekatan ekologi yang berkelanjutan, Islam Nusantara diharap dapat mendorong untuk menciptakan sebuah masyarakat yang beradab dan berkeadilan, yang menghormati keanekaragaman budaya, termasuk dalam upaya memelihara lingkungan alam sebagai aktivitas kongkrit melahirkan sebuah "ketaatan" menjalankan amanah khalifah yang telah diembankan oleh Allah SWT pada Manusia.

Konteks Budaya Islam Nusantara dan Tawaran Paradigma yang Inklusif

Islam Nusantara, tidak hanya mengadaptasi ajaran Islam ke dalam budaya lokal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai

Islam dengan kearifan lokal yang telah ada sejak berabad-abad. Zainal Abidin Nursyamsi mencatat bahwa, Islam Nusantara muncul sebagai upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam yang universal dengan kearifan lokal yang telah terakulturasi di Nusantara (Nursyamsi, 2016c). Tentu, hal ini mencerminkan, bagaimana potret pendekatan yang holistik dalam menjaga dan mengembangkan tradisi-tradisi Islam di Indonesia tanpa mengorbankan identitas budaya lokal.

Artinya, bahwa dalam konteks dimenasi budaya Islam Nusantara, saya kira telah mencerminkan sebuah fenomena di mana Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tetapi juga disesuaikan dengan nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah ada dalam masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Konsep ini bukanlah sekadar asimilasi pasif, melainkan sebuah integrasi aktif antara ajaran Islam yang universal dengan konteks budaya lokal yang kaya dan beragam di wilayah kepulauan Indonesia.

Sejak kedatangan Islam di Nusantara, proses akulturasi dan adaptasi telah berlangsung secara bertahap. Zainal Abidin Nursyamsi menjelaskan bahwa Islam Nusantara lahir sebagai upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam yang membawa pesan universal dengan kearifan lokal yang telah terakulturasi di Nusantara. Nursyamsi menulis, Islam Nusantara muncul sebagai upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam yang universal dengan kearifan lokal yang telah terakulturasi di Nusantara (Nursyamsi, 2016b). Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan toleransi terhadap perbedaan budaya, tetapi juga strategi untuk memperkuat identitas Islam yang khas dan inklusif di Indonesia.

Konteks budaya yang melandasi Islam Nusantara mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat setempat. Islam tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari konteks budaya setempat, melainkan sebagai agama yang dapat menghidupi dan mengakomodasi nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, Islam Nusantara tidak hanya mempertahankan warisan budaya lokal, tetapi juga mengembangkannya sebagai bagian integral dari praktik keagamaan sehari-hari.

Selain itu, konsep ini juga menyoroti pentingnya menjaga keberagaman budaya sebagai elemen yang memperkaya dan memperkuat identitas keislaman di Indonesia. Dalam konteks ini, Clifford Geertz dalam karyanya "*The Interpretation of Cultures:*

Selected Essays" mengemukakan bahwa, budaya adalah pola-pola yang dihasilkan, diteruskan, dan diubah oleh perilaku, makna, dan simbol yang ada di dalamnya (Geertz, 1973). Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami Islam sebagai sebuah agama yang hidup dan beradaptasi dengan dinamika budaya lokal.

Islam Nusantara juga telah dan akan terus mempromosikan nilai-nilai inklusifitas, harmoni, dan toleransi antarumat beragama. Hal ini selaras dengan apa yang telah tertuang dalam visi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang aktif dalam mempromosikan dialog antaragama dan keberagaman budaya. NU memainkan peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal melalui pendidikan, dakwah, dan praktik keagamaan yang mengakomodasi realitas sosial masyarakat Indonesia.

Dalam konteks globalisasi dan tantangan modern seperti ekstremisme dan intoleransi, Islam Nusantara menawarkan paradigma yang inklusif dan moderat. Hal ini diperkuat oleh pendekatan Islam terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan alam, di mana konsep khalifah (peran manusia sebagai pemelihara bumi) menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT.

Secara keseluruhan, Islam Nusantara tidak hanya merepresentasikan sebuah adaptasi agama, tetapi juga sebuah model yang menunjukkan bagaimana Islam dapat mengakomodasi dan memperkaya keberagaman budaya serta ekologi di Indonesia. Melalui pendekatan holistik ini, Islam Nusantara tidak hanya menjaga warisan budaya yang berharga, tetapi juga membangun fondasi bagi masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan di Nusantara.

Revitalisasi Gagasan Islam Publik-Inklusif

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang terus berubah, revitalisasi gagasan Islam publik-inklusif melalui konservasi budaya Islam Nusantara menjadi semakin penting. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memainkan peran sentral dalam mempromosikan Islam Nusantara sebagai model yang inklusif dalam masyarakat. NU tidak hanya berperan sebagai pelindung ajaran Islam, tetapi juga sebagai pembela keberagaman budaya dan harmoni sosial.

Greg Barton menggambarkan bahwa, NU tidak hanya merupakan organisasi keagamaan, tetapi juga pusat kebudayaan yang mengadvokasi perdamaian, toleransi, dan inklusivitas di masyarakat (Barton, 2002a). Pesantren-pesantren NU, misalnya, tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai wadah untuk memelihara dan mengembangkan budaya lokal yang terkait dengan Islam Nusantara.

Revitalisasi gagasan Islam publik-inklusif melalui konservasi budaya Islam Nusantara menandai sebuah upaya penting dalam menghadapi dinamika globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang di era kontemporer. Di tengah arus perubahan ini, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memegang peranan sentral dalam mempromosikan Islam Nusantara sebagai model yang tidak hanya mengakomodasi ajaran Islam, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan mendukung keberagaman budaya serta harmoni sosial.

NU tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi keislaman di Indonesia, tetapi juga sebagai pembela keberagaman budaya yang merupakan ciri khas masyarakat Nusantara. Melalui pendekatannya yang inklusif, NU mendorong untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang kaya dan beragam di Indonesia, sekaligus memperkuat identitas keislaman yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan konsep Islam Nusantara yang menekankan adaptasi Islam dengan konteks budaya lokal tanpa mengurangi substansi ajaran agama.

Dalam pandangan NU, Islam Nusantara bukan sekadar sebuah adaptasi, melainkan sebuah sintesis yang mencakup nilai-nilai agama dan budaya lokal yang saling melengkapi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syafiq Hasyim dalam bukunya "*Islam Nusantara: Pergulatan Agama dan Budaya*" bahwa, Islam Nusantara bukan hanya sekadar implementasi ajaran Islam di Nusantara, tetapi sebuah wacana yang memadukan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama hidup di masyarakat (Hasyim, 2015). Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam menjaga identitas keislaman di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap harmoni sosial dan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa.

Selain itu, NU juga aktif dalam mengembangkan gagasan-gagasan keislaman yang inklusif dan progresif dalam menjawab

tantangan zaman. Organisasi ini tidak hanya memberikan ruang bagi dialog antarumat beragama, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai universal Islam yang dapat diadaptasi dengan konteks lokal. Hal ini sejalan dengan visi NU dalam membangun masyarakat yang berdasarkan pada keadilan sosial, toleransi, dan perdamaian.

Itu artinya, bahwa dalam konteks konservasi budaya Islam Nusantara, NU telah turut berperan aktif secara berkelanjutan dalam uapaya menjaga dan mengembangkan tradisi-tradisi keagamaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan melakukan ini, berarti NU tidak hanya melindungi warisan budaya, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keislaman yang inklusif dan progresif tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa revitalisasi gagasan Islam publik-inklusif melalui konservasi budaya Islam Nusantara oleh NU merupakan sebuah upaya yang strategis dalam memperkokoh identitas keislaman Indonesia yang inklusif dan harmonis. Melalui pendekatan ini, NU tidak hanya menjaga warisan budaya yang berharga, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif dalam memperkuat keberagaman budaya serta menjaga keharmonisan sosial di Indonesia.

Implikasi Praktis dan Relevansi Global

Revitalisasi gagasan Islam publik-inklusif melalui konservasi budaya Islam Nusantara memiliki implikasi praktis yang luas dalam memperkuat identitas keislaman yang inklusif di Indonesia. Di sini, NU telah menunjukkan komitmennya dalam upaya aktifnya dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran melalui pendidikan agama yang inklusif dan berwawasan global.

Pun secara global, Islam Nusantara menawarkan model bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal mereka sendiri, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai universal Islam. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, Islam Nusantara menegaskan bahwa, Islam tidak hanya relevan dalam ruang publik global, tetapi juga relevan sebagai sumber daya yang berharga dalam mengatasi berbagai tantangan zaman modern seperti misalnya pluralisme budaya dan harmoni sosial.

Robert W. Hefner menyoroti bahwa, NU adalah salah satu kekuatan utama dalam mengembangkan 'Islam sipil' di Indonesia, yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik (Hefner, 2000b). Pemikiran ini menegaskan bahwa Islam Nusantara tidak hanya tentang spiritualitas, tetapi juga tentang kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Implikasi praktis dari revitalisasi gagasan Islam publik-inklusif melalui konservasi budaya Islam Nusantara sangatlah signifikan dalam konteks Indonesia yang pluralis dan multikultural. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan utama di balik gerakan ini tidak hanya mempengaruhi dinamika keagamaan di dalam negeri, tetapi juga memiliki dampak yang relevan secara global.

Pertama-tama, upaya revitalisasi ini membantu memperkuat identitas keislaman yang inklusif di Indonesia. Dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal dalam ajaran Islam, NU membangun narasi keagamaan yang dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk memperkokoh persatuan nasional berdasarkan pada keragaman, bukan pemisahan.

Zainal Abidin Nursyamsi dalam kajiannya tentang "Islam Nusantara" menegaskan, bahwa Islam Nusantara muncul sebagai sebuah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal yang terkandung dalam budaya Nusantara (Nursyamsi, 2016b). Pemahaman seperti ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga menginspirasi gerakan inklusif dalam Islam di tingkat global.

Kedua, NU telah menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Melalui pendidikan agama yang inklusif dan berwawasan global, NU tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang mendasar, tetapi juga mendorong pemahaman yang mendalam tentang pluralisme dan toleransi antarumat beragama. Hal ini sesuai dengan misi NU untuk menjadi agen perdamaian dan keharmonisan sosial di Indonesia.

Greg Barton, dalam biografi resmi tentang Abdurrahman Wahid, menggambarkan bahwa Wahid atau Gus Dur, salah satu figur kunci dalam NU, telah mengadvokasi nilai-nilai inklusifitas dan pluralisme sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan sosial dan spiritual (Barton, 2002b). Gus Dur, melalui pendekatannya yang progresif, memberikan teladan bagi gerakan

inklusif dalam Islam yang mencakup nilai-nilai universalisme dan keadilan.

Ketiga, relevansi global dari konsep Islam Nusantara yang diusung oleh NU juga terletak pada modelnya yang dapat diadaptasi dalam konteks masyarakat multikultural di seluruh dunia, termasuk itu dalam wilayah ekologi/lingkungan. Seperti dalam bukunya, Fazlun Khalid, ia menjelaskan bahwa, Islam memiliki perspektif ekologis yang mendasar, di mana "manusia sebagai khalifah bumi bertanggung jawab atas kelestarian alam (Khalid, 1992). Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan keanekaragaman alam dan budaya, tetapi juga relevan secara global dalam menghadapi tantangan lingkungan dan keberagaman sosial.

Dengan demikian, dapat kita simpulakan secara bersama, bahwa revitalisasi gagasan Islam publik-inklusif melalui konservasi budaya Islam Nusantara oleh NU bukan hanya dalam tujuan tentang bagaiman membangun identitas keislaman yang kokoh di Indonesia, tetapi juga dalam tujuan memberikan kontribusi aktif dan berharga dalam upaya mempromosikan perdamaian, harmoni sosial, dan keberagaman budaya di tingkat global. Semoga.

Tabik.

Daftar Pustaka

Al-Attas, S. M. N. (1986). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ABIM. Halaman 65.

Barton, G. (2002a). *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Equinox Publishing. Halaman 176.

Barton, G. (2002b). *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Equinox Publishing. Halaman 162.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books. Halaman 89.

Hasyim, S. (2015). *Islam Nusantara: Pergulatan Agama dan Budaya*. . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Halaman 52.

Hefner, R. W. (2000a). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press. Halaman 15.

Hefner, R. W. (2000b). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press. Halaman 33.

Khalid, F. (1992). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge: The Islamic Foundation. Halaman 23.

Nursyamsi, Z. A. (2016a). *Islam Nusantara: Kajian tentang Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman 47.

Nursyamsi, Z. A. (2016b). *Islam Nusantara: Kajian tentang Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman 34.

Nursyamsi, Z. A. (2016c). *Islam Nusantara: Kajian tentang Pemikiran dan Gerakan.* . Jakarta: Rajawali Press. Halaman 32.

Wahid, A. (2006). *Islam Nusantara: Dari Tradisi Menuju Modernitas*. Yogyakarta: LKiS. Halaman 89.

Transformasi Budaya Islam Nusantara Di Tengah Tantangan Modernitas: Peran Nahdlatul Ulama

Roni Susanto, Muhamad Afif Ulin Nuhaa

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kekayaan budaya Islam yang sangat beragam dan khas, yang dikenal dengan istilah Islam Nusantara[12]. Budaya Islam Nusantara mencakup berbagai tradisi, ritual, seni, dan nilai-nilai yang telah berkembang dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia[13]. Budaya ini tidak hanya mencerminkan ajaran Islam, tetapi juga kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi[14]. Namun, di era modernitas yang ditandai dengan globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi yang pesat, budaya Islam Nusantara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Modernitas membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara pandang dan praktik keagamaan [15]. Di satu sisi, modernitas menawarkan kemajuan dan kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi.[16] Di sisi lain, modernitas juga membawa tantangan terhadap kelestarian

---

12 Tuti Munfaridah, "Islam Nusantara Sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mewujudkan Perdamaian," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 19, https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1476.

13 Nasikhin Nasikhin, Raharjo Raharjo, and Nasikhin Nasikhin, "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Konsep Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 19–34, https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371.

14 Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31, https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580.

15 Andayani Djoh Diana, "The Impact Of Modernization On The Social Change Of Farming Communities In Kambata Tana Village, East Sumba Regency," *Jurnal Ekonom Pertanian Dan Agribisnis* 2 (2018): 332–39, https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.04.8.

16 Nurul Fadhilah H.M, Andi Tenri Ola Rivai, and Syamsul Syamsul, "Development of Interactive Learning Media Based on Applications Articulate Storyline 3 Human Coordination System Material," *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)* 7, no. 3 (2023): 658, https://doi.org/10.33578/pjr.v7i3.9437; Astrid Faidlatul Habibah and Irwansyah Irwansyah, "Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 2 (2021): 350–63, https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255.

budaya lokal, termasuk budaya Islam Nusantara.[17] Generasi muda yang semakin terpapar oleh budaya global sering kali mengalami pergeseran nilai dan identitas, yang dapat mengancam keberlanjutan budaya Islam yang telah lama ada [18].

Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya Islam Nusantara.[19] Sejak didirikan pada tahun 1926, NU telah konsisten memperjuangkan Islam yang moderat, inklusif, dan berakar kuat pada tradisi lokal. NU tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan pendidikan. Melalui berbagai program dan kegiatan, NU berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, serta menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas budaya.

Berbagai langkash solustif dalam menjaga integritas nilai-nilai Islam dan kearifan lokal telah dilakukan oleh beberapa sarjanawan. Pertama, karya Fita Mustafida yang membahas itegrasi nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.[20] Kedua, karya Rizali pebrianto Dkk yang membahas tentang menjaga nilai-nilai Islam melalui kearifan lokal berupa tradisi mandi balimau kasai d kecamatan Rumbio Jaya Riau.[21] Ketiga, karya Dakir dan Harles yang membahas tentang nilai pendidikan pesantren sebagai *core value* dalam menjaga moderasi Islam.[22] Pelbagai kajian di atas serumpun

---

17 Afiful Ikhwan, "Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami Dalam Pembelajaran)," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2014), https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.2.179-194.

18 Indira Emilia Anjani et al., "Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Bagi Generasi Muda Demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045," *Jurnal Human and Education* 3, no. 4 (2023): 322–31, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.475.

19 Munfaridah, "Islam Nusantara Sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mewujudkan Perdamaian."

20 Fita Mustafida, "Integrasi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 4, no. 2 (2020): 173–85, https://doi.org/10.35316/jpii.v4i2.191.

21 Razali Pebrianto, Heri Saputra, and Nurhasanah Bakhtiar, "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mandi Balimau Kasai: Peran Pemangku Adat Untuk Menjaga Nilai-Nilai Islam Di Desa Alam Panjang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar Prov. Riau," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 1 (2019): 17, https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3172.

22 Dakir Dakir and Harles Anwar, "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020): 495–517, https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnalin.

dengan penelitian ini yaitu upaya dalam menjaga integritas nilai-nilai Islam namun, secara subtantif meliki perbedaan dalam hal metodologis dalam menjaga nilai- Isam. Kajian di atas belum ada yang membahas tentang peran NU dalam menjaga transformasi budaya Islam Nusantara di era modernitas sehingga untuk melengkapi kajian tersebut penelitian ini perlu dilakukan. Sehingga urgensi terhadap penelitian ini yaitu untuk menjaga transformasi budaya Islam Nusantara di era modern sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dengan analisis berupa analisis isi atau *analysis conten.*[23] Sumber data penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder, sumber primer diperoleh dari buku tentang Nahdhotul Ulama sedangkan sumber sekunder didapat dari jurnal artikel yang serumpun dengan kajian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi budaya Islam Nusantara di tengah tantangan modernitas dan menganalisis peran Nahdlatul Ulama dalam proses tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana NU beradaptasi dengan perubahan zaman, serta strategi yang digunakan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Islam Nusantara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika budaya Islam di Indonesia dan kontribusi NU dalam menjaga keberlanjutannya di era modern.

Konsep Budaya Islam Nusantara dan Modernitas

Budaya Islam Nusantara merujuk pada cara Islam berkembang dan beradaptasi di kepulauan Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi lokal dan interaksi dengan kebudayaan lain, seperti Hindu, Buddha, dan adat istiadat lokal.[24] Dimana budaya Islam Nusantara tetap menjaga kearifan lokal dengan pemahaman dan praktik Islam yang memperhatikan kearifan lokal dan kondisi sosial masyarakat setempat serta Budaya Islam Nusantara cenderung

---

v3i2.155.

23 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 57.

24 Fahruddin Faiz, "Sufisme-Persia Dan Pengaruhnya Terhadap Ekspresi Budaya Islam Nusantara," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2016): 1, https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1274.

mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralitas yang sejalan dengan keragaman etnis dan agama di Indonesia.[25]

Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi tindakan dan cara berpikir yang selaras dengan perkembangan zaman.[26] Islam bukanlah agama penentang modernisasi, melainkan pelopor modernisasi.[27] Islam memiliki prinsip dasar yang dijadikan pegangan untuk mengembangkan budaya setempat dengan agama Islam. Terdapat tiga sikap umat Islam terhadap modernisasi, menerima tanpa adanya sikap dan pikiran kritis, mengutuk bangsa barat dengan segala budayanya, dan mengambil budaya yang bersifat positif dan menghindari yang negatif. Islam sangat menghargai perbedaan termasuk perbedaan cara berpikir dan bertindak, namun harus tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Modernisasi ala Islam Nusantara meneguhkan prinsip *"al mukhafadhatu ala qadim al shalih wa al akhdu bi al jadid al ashlah"*, yaitu tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang sudah ada namun tidak menutup diri dari perkembangan zaman.[28] Contoh pertunjukan tradisional seperti tembang tombo ati dapat disajikan lebih modern dengan iringan musik jazz atau yang lainnya, tetap menjaga nilai keasliannya.

Peran Nahdlatul Ulama dalam Melestarikan Budaya Islam Nusantara

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang sangat signifikan dalam melestarikan budaya Islam Nusantara. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki pengaruh luas dalam aspek-aspek keagamaan, sosial, pendidikan, dan budaya.[29] NU berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai Islam yang moderat,

---

25 Saiful Mustofa, "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Islam Berkemajuan," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2015): 405–34, https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/187.

26 Naila Farah, "The Thought of Traditionalism and Modernic," *Agama Dan Kemanusiaan*|, vol. 5, 2019, https://doi.org/DOI : 10.24235/jy.v5i2.5670.

27 Alamul Huda, "Epistimologi Gerakan Liberalis, Fundamentalis, Dan Moderasi Islam Di Era Modern," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2010).

28 Al-'Asal Husain, "Al-Tarbiyah Al-Khuluqiyah Fi Al-Qur'an Al-Karim," 1988, 228.

29 Amin Farih, "Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 251, https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969.

inklusif, dan menjunjung tinggi persatuan umat Muslim.[30] Organisasi NU menghargai dan mengembangkan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga terwujudnya harmoni antara agama, budaya, dan bangsa.[31]

Dalam bidang teknologi Nu berperan gembangan aplikasi mobile yang membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah, seperti pengingat shalat, kompas kiblat, dan aplikasi Al-Quran digital serta penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan ajaran Islam dan budaya Nusantara. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim menggunakan YouTube, Instagram, dan platform lainnya untuk berdakwah dan berdiskusiDalam bidang pedidikan NU mengadopsi kurikulum modern selain tetap mempertahankan pengajaran kitab kuning. Ini mencakup pelajaran sains, teknologi, dan bahasa asing, yang memungkinkan santri memperoleh pendidikan yang lebih holistik. Dalam bidang seni dan budaya menggabungkan elemen tradisional dan modern dalam busana Muslim, serta seni visual yang menggambarkan tema-tema Islami dengan gaya kontemporer.

Transformasi Budaya Islam Nusantara di Era Modern

Berdasarkan hasil analisis peran NU dalam maka transformasi yang dilakukan oleh NU sebagai berikut; pertama transformasi dalam teknologi dan dakwah hal ini dibuktikan dengan penggunaan media sosial, platform online dan aplikasi dalam kajian virtuaal, ceramah online dan konten edukasi.[32] Hal ini dibuktikan dengan penggunaan media sosial, platform online, dan aplikasi untuk kajian virtual, ceramah online, dan konten edukasi. Media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook memungkinkan para ulama dan dai menyebarkan ajaran Islam secara luas dan interaktif, menjangkau jamaah tanpa batasan geografis. Platform online seperti Zoom dan

---

30 Nurlira Goncing, "Nahdatul Ulama Politics and the New Order Era," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 61–74.

31 Nursanda Rizki Adhari and Reza Adriantika Suntara, "Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Melalui Peran Nahdlatul Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia," *Jipis* 29, no. 2 (2020): 48–68, https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIPIS/article/view/725.

32 Fadhilah H.M, Rivai, and Syamsul, "Development of Interactive Learning Media Based on Applications Articulate Storyline 3 Human Coordination System Material."

Google Meet memfasilitasi pengajian dan kelas keagamaan selama pandemi, sedangkan aplikasi mobile seperti Muslim Pro dan Umma menyediakan fitur-fitur praktis untuk mendukung praktik keagamaan sehari-hari.[33] Dengan inovasi ini, dakwah Islam menjadi lebih inklusif dan adaptif, merespons kebutuhan zaman modern sambil tetap mempertahankan esensi ajaran.

Kedua, modernisasi pendidikan pesantren terbukti dengan adopsi kurikulum yang mengombinasikan pelajaran umum dan agama, menjadikan pesantren tradisional lebih relevan di era modern. Pesantren-pesantren kini tidak hanya fokus pada pengajaran kitab kuning dan ilmu-ilmu agama, tetapi juga menyertakan mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa asing, dan teknologi informasi.[34] Integrasi ini memungkinkan para santri mendapatkan pendidikan yang holistik, menggabungkan pengetahuan agama yang mendalam dengan keterampilan yang diperlukan di dunia modern.[35] Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti e-learning dan aplikasi edukasi, semakin memperkuat transformasi ini, menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan yang adaptif dan inovatif.

Ketiga, transformasi seni dan budaya dimana kesenian tradisional gamelan, wayang kulit dan tari-tarian kini diperkenalkan dalam bentuk film dan teater konteporer. Hal tersebut terlihat jelas dengan diperkenalkannya kesenian tradisional seperti gamelan, wayang kulit, dan tari-tarian dalam bentuk film dan teater kontemporer.[36] Proses ini tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga membuatnya lebih relevan dan menarik bagi generasi muda.[37] Misalnya, film yang menggabungkan musik gamelan dengan

---

33 Darwin Effendi and Dan Achmad Wahidy, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Proses Pembelajaran Menuju Pembelajaran Abad 21," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*, 2019, 125–29.

34 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai,* ((Jakarta: LP3ES, 1981).

35 Hendi Kariyanto, "Peran Pondok Pesantren Dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Pendidikan "Edukasia Multikultura"* 2, no. 2 (2020): 67–82.

36 Jokhanan Kristiyono and Rachmah Ida, "Digital Etnometodologi: Studi Media Dan Budaya Pada Masyarakat Informasi Di Era Digital," *Ettisal : Journal of Communication* 4, no. 2 (2019): 109, https://doi.org/10.21111/ejoc.v4i2.3590.

37 Fathurrohman Muhammad, *Budaya Religius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Tinjauan Teoritik Dan Praktik Kontekstual Pendidikan Agama Di Sekolah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

narasi modern atau teater yang memadukan cerita wayang kulit dengan teknik panggung kontemporer, menciptakan pengalaman yang unik dan memikat. Inovasi ini menjadikan seni tradisional lebih mudah diakses dan dihargai oleh khalayak luas, sekaligus memastikan keberlanjutan budaya Nusantara di tengah dinamika zaman.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa peran NU dalam transformasi budaya Islam Nusantara di era modernitas yaitu pertama, pertama transformasi dalam teknologi dan dakwah hal ini dibuktikan dengan penggunaan media sosial, platform online dan aplikasi dalam kajian virtual, ceramah online dan konten edukasi. Kedua modernisasi pendidikan pesantren hal ini dibuktikan dengan pesantren tradisiona kini mengadopsi kurikulum yang mengkombinasikan pelajaran umum dan agama. Ketiga, transformasi seni dan budaya dimana kesenian tradisional gamelan, wayang kulit dan tari-tarian kini diperkenalkan dalam bentuk film dan teater konteporer.

Daftar Pustaka

Adhari, Nursanda Rizki, and Reza Adriantika Suntara. "Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Melalui Peran Nahdlatul Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia." *Jipis* 29, no. 2 (2020): 48–68. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIPIS/article/view/725.

Anjani, Indira Emilia, Desy Natalia, Dwi Desi Yayi Tarina, Ahmad Khoiril Anam, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Bagi Generasi Muda Demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045." *Jurnal Human and Education* 3, no. 4 (2023): 322–31. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.475.

Dakir, Dakir, and Harles Anwar. "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020): 495–517. https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i2.155.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai,*. (Jakarta: LP3ES, 1981.

Diana, Andayani Djoh. "The Impact Of Modernization On The Social Change Of Farming Communities In Kambata Tana Village, East Sumba Regency." *Jurnal Ekonom Pertanian Dan Agribisnis* 2 (2018): 332–39. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.04.8.

Effendi, Darwin, and Dan Achmad Wahidy. "Pemanfaatan Teknologi Dalam Proses Pembelajaran Menuju Pembelajaran Abad 21." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*, 2019, 125–29.

Fadhilah H.M, Nurul, Andi Tenri Ola Rivai, and Syamsul Syamsul. "Development of Interactive Learning Media Based on Applications Articulate Storyline 3 Human Coordination System Material." *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)* 7, no. 3 (2023): 658. https://doi.org/10.33578/pjr.v7i3.9437.

Faidlatul Habibah, Astrid, and Irwansyah Irwansyah. "Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 2 (2021): 350–63. https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255.

Faiz, Fahruddin. "Sufisme-Persia Dan Pengaruhnya Terhadap Ekspresi Budaya Islam Nusantara." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Ushuluddin 17, no. 1 (2016): 1. https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1274.

Farah, Naila. "The Thought of Traditionalism and Modernic." *Agama Dan Kemanusiaan*|. Vol. 5, 2019. https://doi.org/DOI : 10.24235/jy.v5i2.5670.

Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 251. https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969.

Fita Mustafida. "Integrasi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 4, no. 2 (2020): 173–85. https://doi.org/10.35316/jpii.v4i2.191.

Goncing, Nurlira. "Nahdatul Ulama Politics and the New Order Era." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 61–74.

Huda, Alamul. "Epistimologi Gerakan Liberalis, Fundamentalis, Dan Moderasi Islam Di Era Modern." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2010).

Husain, Al-'Asal. "Al-Tarbiyah Al-Khuluqiyah Fi Al-Qur'an Al-Karim," 1988.

Ikhwan, Afiful. "Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami Dalam Pembelajaran)." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2014). https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.2.179-194.

Kariyanto, Hendi. "Peran Pondok Pesantren Dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Pendidikan "Edukasia Multikultura"* 2, no. 2 (2020): 67–82.

Kristiyono, Jokhanan, and Rachmah Ida. "Digital Etnometodologi: Studi Media Dan Budaya Pada Masyarakat Informasi Di Era Digital." *Ettisal : Journal of Communication* 4, no. 2 (2019): 109. https://doi.org/10.21111/ejoc.v4i2.3590.

Muhammad, Fathurrohman. *Budaya Religius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Tinjauan Teoritik Dan Praktik Kontekstual Pendidikan Agama Di Sekolah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Munfaridah, Tuti. "Islam Nusantara Sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mewujudkan Perdamaian." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 19. https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1476.

Mustofa, Saiful. "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Islam Berkemajuan." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2015): 405–34. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/187.

Nasikhin, Nasikhin, Raharjo Raharjo, and Nasikhin Nasikhin. "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Konsep Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 19–34. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371.

Njatrijani, Rinitami. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31. https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580.

Pebrianto, Razali, Heri Saputra, and Nurhasanah Bakhtiar. "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mandi Balimau Kasai: Peran Pemangku Adat Untuk Menjaga Nilai-Nilai Islam Di Desa Alam Panjang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar Prov. Riau." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 1 (2019): 17. https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3172.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Pohon Aksara Jawa: Cara Indah Menghafal Aksara Jawa

Oga Sugianto

Aksara Jawa, atau hanacaraka, tidak hanya sekadar sistem tulisan, tetapi juga bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat Jawa. Sebagai salah satu warisan budaya Nusantara, aksara ini mengandung sejarah panjang yang mencerminkan peradaban, kepercayaan, dan kearifan lokal masyarakat Jawa. Menguasai aksara Jawa berarti turut memahami aspek-aspek penting dari tradisi dan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Mempelajarinya tidak hanya menjaga kelangsungan bahasa, tetapi juga menghubungkan kita dengan akar budaya yang memperkaya keberagaman identitas bangsa.

Budaya Jawa sangat kaya dengan simbolisme, dan penggunaan aksara ini dalam berbagai manuskrip, naskah kuno, dan prasasti menegaskan perannya dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, serta seni. Sayangnya, modernisasi telah membuat aksara Jawa semakin terpinggirkan, bahkan di tanah kelahirannya sendiri. Pohon Aksara Jawa, sebagai metode penghafalan kreatif, menawarkan cara yang menyenangkan dan estetis untuk mempelajari aksara ini, menjadikannya lebih mudah diakses dan dipahami oleh generasi muda. Dalam budaya Jawa, pohon sering kali melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan kebijaksanaan, sehingga menghubungkan aksara dengan konsep pohon dapat memperkuat pemahaman akan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.

Dengan mengintegrasikan cara belajar yang visual dan artistik seperti Pohon Aksara Jawa, pembelajaran aksara menjadi lebih dari sekadar akademis; ia menjadi bentuk penghormatan terhadap budaya yang sarat makna. Metode ini tidak hanya membantu dalam mempelajari bentuk huruf, tetapi juga menyentuh aspek emosional dengan memperkuat keterikatan terhadap budaya lokal. Hal ini penting untuk membangun rasa bangga akan identitas budaya, serta menjaga kelestarian tradisi yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang masyarakat Jawa. Dengan demikian, Pohon Aksara Jawa bukan hanya sarana edukatif, tetapi juga upaya nyata untuk merawat dan memelihara warisan budaya dalam konteks zaman yang terus

berubah.

Apa Itu Pohon Aksara Jawa?

Pohon Aksara Jawa adalah metode visual yang menggabungkan unsur seni dan pendidikan, dengan tujuan membantu menghafal aksara Jawa melalui representasi grafis yang menyerupai pohon. Setiap aksara, baik huruf vokal, konsonan, maupun pasangan, ditempatkan pada bagian-bagian pohon, sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis.

Bayangkan sebuah pohon besar dengan akar, batang, cabang, dan dedaunan. Di setiap bagian pohon ini, ada aksara Jawa yang ditempatkan secara strategis, dimulai dari huruf dasar (*hanacaraka*) hingga variasi lainnya. Dengan melihat keseluruhan struktur ini, proses menghafal menjadi lebih intuitif karena terhubung dengan gambar visual.

Mengapa Metode Pohon Efektif untuk Menghafal?

Visualisasi Mempermudah Ingatan

Pikiran manusia cenderung lebih mudah mengingat informasi yang disajikan secara visual dibandingkan dengan hanya teks atau kata-kata. Dengan metode Pohon Aksara Jawa, setiap huruf dipasangkan dengan gambar pohon yang menarik, sehingga otak lebih mudah mengingat posisi dan bentuknya.

Struktur yang Teratur

Aksara Jawa memiliki urutan dan pola yang bisa dikaitkan dengan bagian-bagian pohon. Misalnya, akar pohon bisa mewakili huruf dasar, sementara cabang-cabangnya mewakili variasi aksara seperti pasangan atau tanda baca. Dengan struktur yang teratur ini, Anda dapat memetakan aksara dalam pola yang konsisten dan logis, memudahkan proses hafalan.

Meningkatkan Kreativitas

Menghafal tidak harus membosankan. Dengan Pohon Aksara Jawa, proses belajar menjadi lebih kreatif dan menyenangkan. Siswa bisa menggambar pohon mereka sendiri, menambahkan warna, atau menghubungkan huruf-huruf dengan elemen alam lainnya seperti bunga atau buah, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal.

Penghubung Budaya dan Alam

Pohon sering kali dianggap sebagai simbol kehidupan, pertumbuhan, dan keberlanjutan. Mengaitkan aksara Jawa dengan pohon menciptakan hubungan simbolis antara kebudayaan lokal dengan alam, memperkuat rasa bangga dan kepedulian terhadap pelestarian aksara ini.

Bagaimana Cara Membuat Pohon Aksara Jawa?

Untuk membuat Pohon Aksara Jawa, Anda bisa mengikuti beberapa langkah berikut:

Gambar Pohon dengan Cabang Utama

Mulailah dengan menggambar sebuah pohon sederhana yang memiliki batang kokoh dan beberapa cabang besar. Batang pohon dapat melambangkan fondasi utama aksara Jawa, yaitu *hanacaraka* (huruf-huruf dasar).

Letakkan Aksara di Batang dan Cabang

Tuliskan aksara dasar seperti "ha, na, ca, ra, ka" di batang pohon. Ini akan menjadi inti dari pohon Anda, karena aksara dasar adalah fondasi untuk memahami seluruh aksara Jawa.

Tambahkan Cabang untuk Variasi Aksara

Setiap cabang besar bisa Anda gunakan untuk menuliskan variasi aksara lainnya, seperti pasangan atau tanda baca. Misalnya, cabang satu bisa khusus untuk aksara pasangan seperti "la" atau "ya", sedangkan cabang lain bisa untuk tanda baca vokal seperti *taling* atau *wulu*.

Hiasi dengan Daun-daun atau Buah-buahan

Untuk membuatnya lebih menarik, tambahkan daun atau buah-buahan di setiap cabang yang mewakili kelompok aksara tertentu. Misalnya, satu kelompok daun bisa mewakili vokal, sementara kelompok buah bisa mewakili pasangan huruf.

Warna dan Gaya Sesuai Preferensi

Anda juga bisa mewarnai pohon tersebut dengan warna-warna cerah untuk membedakan kelompok aksara satu dengan lainnya. Warna-warna yang kontras akan membantu Anda mengingat lebih baik.

Contoh Sederhana Pohon Aksara Jawa

Akar Pohon: Mewakili hanacaraka, aksara dasar dalam alfabet Jawa.

Batang Pohon: Bagian inti dari aksara dasar seperti "ha, na, ca, ra, ka".

Cabang Pohon: Variasi pasangan seperti "wa", "la", "nga", serta tanda baca vokal.

Daun dan Buah: Bisa diisi dengan aksara-aksara tambahan atau variasi lainnya, sehingga semakin kaya.

Manfaat Menggunakan Metode Pohon Aksara Jawa

Mudah Diakses oleh Semua Kalangan

Metode ini sangat cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bagi anak-anak, visualisasi pohon yang berwarna-warni akan membuat belajar aksara menjadi lebih menyenangkan, sedangkan untuk orang dewasa, struktur yang teratur dan logis membuat metode ini mudah diikuti.

Memperkuat Memori Jangka Panjang

Karena metode ini menggunakan gambar dan pola yang mengaitkan berbagai aksara dalam satu struktur pohon, memori jangka panjang akan lebih mudah terbentuk. Setiap kali Anda mengingat aksara tertentu, gambaran visual pohon tersebut akan membantu memanggil kembali aksara lainnya yang terhubung.

Menyenangkan dan Kreatif

Belajar aksara Jawa sering kali dianggap sulit dan membosankan. Dengan metode Pohon Aksara Jawa, proses belajar berubah menjadi aktivitas yang menyenangkan dan penuh kreativitas. Anda bahkan bisa membuat berbagai versi pohon dengan gaya dan konsep yang berbeda.

Metode Pohon Aksara Jawa adalah pendekatan yang indah dan efektif untuk menghafal aksara Jawa dengan lebih mudah. Dengan memanfaatkan visualisasi pohon yang penuh warna dan struktur yang logis, belajar aksara Jawa tidak lagi terasa membebani, melainkan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pohon ini menggabungkan elemen budaya dan alam, menciptakan harmoni yang tidak hanya membantu dalam menghafal, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta pada warisan budaya Nusantara.

WACANA EKOLOGI, ISU LINGKUNGAN, CLIMATE CHANGE DAN PROBLEMATIKA KESEHATAN

Isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi perhatian utama bagi NU, yang memandang ekologi sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Melalui wacana ekologi yang progresif, NU menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bertindak secara bertanggung jawab dalam menghadapi krisis lingkungan dan kesehatan global yang semakin mendesak.

Bi'ah Progresif; Penerapan Fikih Ekologi dalam Mewujudkan Pilar Sustainable Development Goals (SDGS) Menuju Indonesia Emas

Aishhsalma, Rahmad Ikbal Devid

Fikih ekologi hadir sebagai respons Islam terhadap krisis lingkungan global yang kian mendesak, mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip keberlanjutan dalam upaya pelestarian alam. Dalam Islam, manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Namun, realitas menunjukkan bahwa aktivitas manusia sering kali menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan fikih ekologi bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan tindakan manusia dalam menjaga ekosistem melalui pendekatan maslahat, yang sejalan dengan upaya global mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Fikih ekologi menawarkan paradigma baru yang mengedepankan tindakan berkelanjutan dan menjadikan agama sebagai pilar dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan lestari.

Manusia dan Ekologi

Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku pula kearifan lingkungan (*ecoshophy*). Mandat kekhalifahan yang dibebankan manusia sebagai *cooperator* dan *cocreator* untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan alam. Dengan demikian, manusia bertindak secara kreatif dalam upaya transformasi, rekonstruksi dan konservasi alam semesta.[1]Namun melihat realita lingkungan dan kondisi sosial yang menjadi dampak buruk dari setiap kerusakan dan bencana di muka bumi ini juga disebabkan oleh perbuatan manusia. Manusia menjadi pelaku sekaligus korban dari kerusakan alam yang ia buat sendiri. Ada sekelompok manusia yang mungkin tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan. Namun, mereka yang tak bersalah seringkali juga harus menanggung beban derita dari bencana yang

---

1 M. Ridwan, "FIQH EKOLOGI: Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*: Desember 2013. http://doi.org/10.21093/MJ.V12I2.331

terjadi. Mengingat musibah yang terjadi sesungguhnya akibat ulah manusia lain di waktu yang berbeda ataupun mungkin di tempat yang berbeda. Kerusakan lingkungan merupakan isu global yang menuntut untuk semua lapisan masyarakat mulai dari intelektual, para ulama, cendekiawan serta pemangku kepentingan lainnya berkewajiban berkontribusi menjaga lingkungan agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Manusia hari ini, sedang mengalami titik krisis ekologis dalam peradaban sejarah tercatat disebabkan oleh interaksi dan aktivitas mereka dengan lingkungan dan alam yang telah mempengaruhi kehidupan di bumi sehingga mengalami perubahan. Krisis ekologi dunia membuat diskusi-diskusi dalam sains dan agama terasa semakin mendesak.[2] Konferensi yang diprakarsai oleh para ilmuwan, para agamawan, dan kaum teolog mengakui perlunya suatu konsensus tentang masalah ini. Konferensi tersebut merumuskan sebuah pernyataan bersama yang mendorong semua pihak memperhatikan secara lebih intens terkait masalah-masalah ekologis.[3] Sejak saat itu muncullah pendekatan ilmiah terhadap penyelesaian ekologi. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernast Haeckel pada tahun 1866, seorang biolog Jerman. Selanjutnya diskursus ekologi dan agama mulai marak sejak Russel Train yang memimpin Lembaga *World Wild Life Fund*, sebagaimana dikutip oleh John F. Haught, mengatakan bahwa agama dan teologi tidak begitu tanggap terhadap krisis ekologi yang dialami saat ini sehingga memunculkan teka-teki besar bagi solusi yang masih dianggap meragukan.

Gerakan penyadaran terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam melalui potensi agama dan pendekatan sistem-sistem ekologis menjadi wahana penting dalam menyadarkan manusia agar lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam dan

---

2 Abbas Sofwan Matla'il Fajar, "FIQIH EKOLOGI Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud" (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 2.

3 Dicanangkan oleh anggota senat saat itu, Senator Albert Gore, Carl Sagan, dan sejumlah pemimpin agama Washington D.C, Mei 1992. Senator Al-Gore, *Earth in Balance:Ecology and The Human Spririt* (Boston New York*:* Houghton Mifflin Company,1992) 263, ia menyatakan: *"The Fate of mankind, as well as of religion depends up on the emergence of a new faith in the future",* iman baru di masa depan, menurut Al-Gore, adalah dorongan moral umat manusia untuk melindungi bumi.

lingkungan. Upaya-upaya representative tidak hanya sebatas suara atau pamflet yang berserakan di pinggir jalan atau ditengah kota. Tindakan dan aksi nyata mulai dari dini juga turut membangun sistem ekologi yang baik dan berkesinambungan. Program dan kerja nyata tentang konservasi lingkungan hidup bukan sekedar tugas pemerintah saja, namun seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan kesadaran dan jiwa kepedulian terhadap alam dan lingkungan mendorong semua makhluk bumi turut mengambil langkah yang massif, meluas serta berkelanjutan. Dalam konteks ini para pemimpin masyarakat termasuk pemimpin agama dituntut untuk melakukan kerja-kerja penyadaran tersebut melalui otoritas yang dimiliki masing-masing.[4] Dengan demikian relasi manusia dengan alam secara otomatis akan menciptakan hubungan yang harmonis, bukan lagi hubungan subordinat yang mengatasnamakan manusia sebagai penguasa alam.

Orientasi Fikih Ekologi Dalam Kehidupan Global

Seiring dengan tatanan global yang berkembang menuntut manusia untuk menciptakan peradaban kehidupan yang dinamis dan harmonis. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga merupakan tantangan agar memperhatikan kehidupan alam. Berdirinya sektor ekonomi tidak jarang mengesampingkan kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan. Hal ini Islam sebagai agama rahmatan lil alamin merespon dengan munculnya peradaban fikih yang diorentasikan dengan konteks dan wajahnya yang berbeda, fikih yang berwajah kritis, responsive, progressif, humanis dan kini fikih harus tampil dengan nuansa naturalis. Menciptakan fikih sebagai spirit untuk merespon problem krisis lingkungan yang kini kian mendesak untuk diupayakan mencari solusi ijtihadi. Merumuskan fikih ekologi merupakan upaya pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata fikir keilmuan yang bernuasa keagamaan, mengingat ilmu fikih dalam konteks sekarang tentu berbading terbalik dengan situasi ilmu fikih ketika awal mula dibangun, dirumuskan, dirancang dan disistematikan.[5]

---

4 Tim Forum Kajian Ilmiah Mata Pena, *Bi'ah Progresif, Menuju Manusia Berkesadaran Lingkungan* (Kediri: Lirboyo Press, 2020).

5 M. Ridwan, "FIQH EKOLOGI: Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*: Desember 2013. http://doi.org/10.21093/MJ.V12I2.331

Perubahan iklim dan dampak dari kerusakan lingkungan semakin mendesak untuk mendapatkan solusi.[6] Tentunya ini menjadi perhatian bersama seluruh manusia di dunia untuk memikirkan rumusan solusi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, muncul disiplin ilmu yang menarik perhatian, yaitu "Fikih Ekologi". Fikih ekologi merupakan kajian tentang bagaimana ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam upaya menjaga lingkungan hidup melalui pendekatan yang berprinsip pada konsep maslahat. Konsep ekologi dalam Islam merupakan cara pandang baru untuk menghadirkan terobosan dan angin segar menjawab pelestarian lingkungan dan hukum lingkungan serta lahirnya konsep hukum lingkungan. Sebagaimana dengan riset Muta Ali Arauf [7] menyatakan bahwa agama juga berarti konsep bagaimana manusia mengetahui batas-batas realitas dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya sendiri. Agama sering berbicara tentang kisah-kisah kosmologis, sistem dan simbolis, praktik ritual, norma dan etika, sejarah, dan struktur kelembagaan yang mentransmisikan pandangan bahwa manusia sebagai bagian central di dunia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam.

Agama juga dinilai memiliki potensi yang besar terhadap keselamatan bumi. Korelasi manusia dengan alam berdasarkan pengetahuan spiritual memunculkan konsep agama yang ramah lingkungan. Konsep ekologi yang ditinjau ulang kembali berdasarkan fikih ekologi memuat konsep terkait konservasi lingkungan mulai dari faktor, dampak hingga pemecahan solusi Islam terhadap lingkungan. Manusia dengan segala akal dan ilmu pengetahuannya mampu mengatasi segala isu permasalahan lingkungan secara global. Dengan berkesadaran tinggi dan kepedulian terhadap alam mendorong manusia untuk melakukan upaya-upaya repsresif yang massif dan meluas. Fikih ekologi ini menjadi landasan baru yang harus selalu

---

6 Menkeu: Perubahan Iklim Menjadi Isu Utama Pembahasan Global, https://www.menpan.go.id/site/berita-
terkini/berita-daerah/menkeu-perubahan-iklim-menjadi-isu-utama-pembahasan-global. Diakses pada 27
Juli 2023, pukul 14.30

7 Muta Ali Arauf, "Ecological View From The Perspective of Quranic Verses, International" Journal of Social
Science and Religion (IJSSR): 2021: Volume 2 Issue 2. http://ijssr.net/index.php/ijssr/article/view/45.
DOI: https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i2.45

digaungkan demi terciptanya ekosistem dan kemaslahatan manusia baik secara nasional maupun internasional.

Fikih ekologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini. Fikih Ekologi merupakan terobosan baru dalam menjawab problematika lingkungan dan lahirnya konsep lingkungan. Konsep ini mengintegrasikan ajaran agama dengan pemahaman tentang lingkungan hidup.[8] Fikih ekologi mendorong umat manusia untuk memperlakukan alam dengan penuh hormat dan tanggung jawab serta membimbing kita dalam menjaga air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati sebagai amanah dari Tuhan. Urgensi Fikih ekologi tidak hanya menciptakan kesadaran akan perlunya konservasi lingkungan, tetapi juga memberikan pedoman konkret untuk tindakan nyata dalam menjaga alam dan lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Fikih ekologi juga memberikan konservasi terhadapa perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah dan penghematan air tanah, dan penentuan zona konservasi air tanah. Kebijakan tersebut dilaksanakan dan bisa menginisiasi peran serta masyarakat didalamnya.

Integrasi Konsep Fikih Ekologi Dengan Prinsip Pencapaian SDGs

Dalam konsep fikih ekologi, alam semesta, termasuk segala isinya, dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT. yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, konsep maslahat mengingatkan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil haruslah memberikan manfaat bagi lingkungan, tanpa merugikan dan merusaknya. Meskipun dalam menghadapi tantangan lingkungan, terdapat dilema moral dan etika yang kompleks. Dengan pendekatan konsep fikih ekologi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sejauh ini kajian-kajian terkait fikih ekologi perlu adanya perhatian yang khusus dalam dunia akademis dan Islam yang berkolaborasi dengan seluruh negara di dunia.

Persoalan kemiskinan, keadilan sosial, ketidaksetaraan gender, perlindungan lingkungan menyorot perhatian dunia untuk

8 Agus Zehid, Membumikan Fiqh Ekologi, Membumikan Fiqh Ekologi - Alif.ID. diakses pada 27 Juli 2023, pukul 21.30

memperbarui wacana dan strategi baru yang mengajak seruan untuk bertindak yang harus dicapai pada tahun 2030. Hal ini berdasarkan dokumen yang berjudul "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" atau "Mengalih rupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan" yang disosialisikan pada 2 Agustus 2015 merupakan cikal bakal dari SDGs. Sedangkan pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara adalah pada 25-27 September 2015 bertempat di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat.[9] Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) merupakan prinsip pencapaian pembangunan manusia sementara pada fase yang sama mempertahankan sistem alam untuk memberikan masukan bahwa masyarakat bergantung pada alam dan sumber daya didalamanya. Model pembangunan yang berkelanjutan ini menjadi suatu pilihan bagi dunia untuk mengadopsi ulang model pembangunannya dengan menyelaraskan antara Ecology, Economy and Equity.[10]

Dalam literatur fikih, terdapat konsep tanah kosong (mawat) yang menjadi pokok pembahasan. Upaya untuk menghidupkan dan memanfaatkan tanah ini telah menghasilkan tiga pendekatan yang dikenal dalam kalangan ulama, yaitu *ihya, iqtha,'* dan *hima*. *Ihya'* merujuk pada pemanfaatan tanah kosong oleh individu tertentu untuk kebutuhan pribadi dalam lingkup kehidupan sehari-hari umat Muslim. Namun, pendapat tentang keabsahan tindakan ini memiliki variasi antara mazhab fikih. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tindakan ini sah jika mendapat izin dari pemerintah, sedangkan mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda. Di sisi lain, *iqtha'* melibatkan pemerintah sebagai inisiator, di mana pemerintah memberikan tanah kepada individu tertentu untuk dimiliki atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Analoginya dalam konteks modern mirip dengan program transmigrasi.

9 United Nations Documents, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, sustainabledevelopment.un.org. diakses pada 12 April 2019

10 Ecology, Equty and Economy atau 3E disebut sebagi Triumvirat (dari bahasa latin yang artinya dari tiga laki-laki) Andreas T. Mulyono, Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Jurnal Law Review, Volume XIX, No. 1(Juli 2019), 29.

Selanjutnya, *hima* merujuk pada upaya pemerintah menetapkan sebidang tanah sebagai kawasan lindung yang bertujuan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bersama masyarakat. Konsep-konsep ini mencerminkan pemahaman ulama dalam memadukan prinsip-prinsip fikih dengan kebutuhan nyata masyarakat dan lingkungan, serta memberikan panduan penting dalam mengelola tanah kosong dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang keberlanjutan.[11]

Di titik ini, muncul gambaran jelas tentang upaya yang mendasar dalam konservasi lingkungan. Dalam konteks ini, usaha untuk menghidupkan tanah yang tidak produktif seharusnya tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa menghidupkan tanah yang mati (ihya' al-mawat) bukan hanya sekadar tindakan, tetapi juga mencerminkan sebuah terobosan pemikiran progresif yang dilakukan oleh para ulama dalam upaya memberdayakan masyarakat. Proses membangkitkan kehidupan pada tanah yang kering dan tandus memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada produktivitas tetapi juga memperhatikan pada prinsip ekologi. Konsep ini menjadi bukti konkrit bagaimana upaya konservasi bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi. Melalui restorasi tanah yang tandus, umat dapat mengalami manfaat yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi ekosistem dan masyarakat secara keseluruhan.[12]

Integrasi konsep fikih ekologi dengan prinsip-prinsip pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dapat dilakukan melalui upaya-upaya represif sebagai berikut:

a) Pemahaman dan Penerapan Prinsip Islam, Fikih ekologi mencoba mengintegrasikan antara ajaran Islam dengan ilmu ekologi, dan suatu upaya memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini juga termasuk memahami konsep maslahat yang merujuk kepada spirit Islam dalam mencapai keberlangsungan hidup yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

---

11 Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz V. Dar al-Fikr, Damaskus, 1989

12 Berjihat Lewat Fiqh Lingkungan. http://ppi.unas.ac.id/berjihad-lewat-fiqh-lingkungan/, lihat: diakses pada 01 Agustus 2023

b) Pengembangan Kaidah Baik-Buruk atau Halal-Haram, Fikih Biah atau fikih ekologi berbasis kecerdasan naturalis merumuskan paradigm baru untuk mengatur kaidah baik-buruk atau halal-haram yang akan menjadi patokan penilaian tindakan manusia terhadap lingkungan. Demikian hal ini akan menghadirkan pendekatan religius yang berdasarkan pada ajaran al-qur'an, hadist, dan ijtihad dalam memanndang persoalan lingkungan hidup.
c) Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan, Melalui konsep fikih ekologi dapat membantu masyarakat dalam memahami bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah bentuk ibadah sosial. Para pemangku aktivitas sosial juga bisa memberikan wadah pengelolaan sampah yang baik seperti bank sampah yang dikelola oleh masyarakat setempat sehingga masyarakat tersebut memiliki sistem pengelolaan dan wawasan yang bijak terhadap penanggulangan sampah di lingkungannya.
d) Pengembangan Konsep Mitigasi Berbasis Masyarakat, Mitigasi dalam konteks fikih ekologi merujuk pada upaya untuk mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup dan menghadapi perubahan iklim global. Mitigasi perubahan iklmi sudah seharusnya menjadi kajian serius dalam fikih lingkungan, dengan fokus pada tanggung jawab individu dan Masyarakat dalam mengelola lingkungan.
e) Pengembangan Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan, Perubahan arah baru dalam mensinergikan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan prinsip Islam rahamatan lil alamin ini bisa dicapai melalui praktek fikih ekologi. Fikih ekologi atau dikenal sebagai fikih lingkungan ini dapat menjadi aturan transeden yang bersifat praktis sekaligus sebagai panduan etis dan normatif yang memerlukan upaya internalisasi pada individu dan masyarakat muslim.
f) Pengembangan keanekaragaman Hayati, Gagasan fikih ekologi dirasa mampu dalam memberikan kontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Melalui konservasi, restorasi, dan penggunaan yang secara berkelanjutan dari ekosistem, termasuk hutan, rawa, pegunungan dan daratan, konsep fikih ekologi ini secara substansial dapat meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global serta dapat menghambat

permasalahan deforestasi yang terjadi selama ini.

g) Pengembangan Kaidah Ekologis Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Dalam rangka pencapaian Indonesia emas yang berprinsip pada tujuan pembangunan berkelanjutan, fikih ekologi dapat menjadi menjadi titik pemersatu pengembangan kaidah ekologi dan fokus pembangunan berkelanjutan. Hal ini bisa dipastikan melalui konservasi ekosistem pegunungan dan hutan dengan peningkatan kapasitas untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan tanpa menghilangkan keanekaragaman hayatinya.

Interpretasi Penerapan Fikih Ekologi Dalam Kehidupan Sehari-hari

Fikih ekologi yang menjadi wacana inti dalam tulisan ini, mencoba menggiring orentasi kearah pemikiran keagamaan yang memiliki nilai praksis yang mempunyai keberpihakan yang jelas dan tegas terhadap pembangunan lingkungan kerap menjadi sasaran empuk ekploitasi dari manusia serakah, paling tidak akan menjadi semacam *guide line* pada ummat Islam untuk sensitif, sadar dan ramah terhadap ekologi sebagai perwujudan khalifah yang memperhatikan kemaslahatan dan kemakmuran bumi. Hubungan antara manusia dan lingkungan sangat kompleks, dan memerlukan upaya pengelolaan yang bijaksana untuk memastikan keseimbangan dan keserasian dalam lingkungan hidup.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri bencana alam yang sering terjadi seperti, banjir, letusan gunung api, gempa bumi dan tanah longsor dan bencana alam lainnya. Dimana bencana tersebut terjadi karena konsekuensi dari suatu kombinasi aktivitas manusia dan aktivitas alam. Contoh kecil seperti kita membuang sampah tidak pada tempatnya, pembakaran hutan liar dan bencana alam lainnya yang diperbuat oleh manusia sendiri. Hal ini Jika di lakukan terus menerus sampai puluhan atau ratusan bahkan ribuan orang seperti itu pada saat hujan sampah mengalir ke selokan jalanya air dan air akan meluap keatas maka akan menyebabkan terjadinya banjir di daerah tersebut. Oleh sebab itu mengapa pendidikan pelestarian lingkungan hidup penting bagi kita semua, karena dapat menyadarkan manusia tentang masalah lingkungan hidup yang ada di sekitar lingkungannya. Pada dasarnya pelestarian lingkungan bertujuan untuk meningkatkan sikap individu dalam melestarikan

lingkungan, sehingga sangat berguna untuk meningkatkan tindakan positif terhadap masyarakat.

Pelestarian lingkungan yang dimaksud adalah tindakan kebijakan penanggulangan untuk pelestarian lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlu diingat juga bahwa perbuatan yang dianggap dosa bukan hanya berbuat maksiat atau enggan beribadah saja, melainkan membuat kerusakan pada alam juga bisa mendapatkan dosa besar dan bahkan mendapat hukuman baik di dunia maupun akhirat. Hukuman bagi kufur ekologi ada dua yaitu hukuman dari Allah dan hukuman dari lingkungan. Hukuman dari Allah yakni kelak di akhirat dan hukuman dari lingkungan yakni di dunia. Mengingat betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dengan berbagai ancaman hukuman bagi yang melakukan pencemaran hingga pengerusakan terhadap alam atau lingkungan, maka diperlukannya berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat agar terhindar dari dosa-dosa ekologi.

Interpretasi penerapan fikih ekologi dalam kajian fikih ekologi berfokus pada bagaimana ajaran Ialam dapat diaplikasikan dalam upaya merawat lingkungan hidup, dalam interpretasi dan implikasinya dapat dilakukan dengan cara berikut[13] :

a) Hubungan manusia dengan alam, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan rab-nya, dan hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam semesta ini merupakan ruang lingkup dari kajian fikih ekologi yang harus ditanamkan dalam diri seseorang demi menjaga, melindungi dan mensejahterakan lingkungan hidup.
b) Pemahaman dan penerapan prinsip Islam, Fikih ekologi melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam daalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Konsep ini menggunakan konsep Maslahat, yang merujuk pada tujun mulia yang ingin dicapai dalam ajaran Islam,yaitu keberlangsungan hidup yang adil, harmonis dan sejahtera.
c) Interpretasi Ayat-ayat ekologi, Dalam Nash Al-quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan terkait tentang ekologi.

13 https://www.kompasiana.com/muhammadalfarizi4799/650801e36e14f155116 diakses pada 7 juli 2024 pukul 23:14 WIB.

Tetapi, penulis hanya ingin menampilkan satu ayat yang sangat populer sekali, bahkan sudah tidak asing lagi bagi kalangan muslim mendengarnya. Yakni pada surat al-Baqarah ayat 30

وَإِذْقَالَ رَب لكَ لِلْمَلَائِكَة إِنِّى جَاعِلُ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُون

(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa manusialah sebagai khalifah[14] dimuka bumi yang memilki tanggung jawab untuk menjaga alam semesta. Sumber daya alam adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, begitu juga alam yang membutuhkan manusia agar alam diatur manusia menjadi lebih baik. Tetapi dibalik kekhalifahan yang ada pada manusia dimuka bumi ini justru membuat kerusakan lingkungan hidup sekitar. Oleh karena itu perlunya dilakukan penerapan konsep fikih ekologi dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman, damai dan sejahtera serta terbebas dari isu-isu global.

Kesimpulan

Fikih ekologi memberikan landasan penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global dengan mengintegrasikan ajaran Islam yang berbasis maslahat dalam pengelolaan lingkungan. Melalui konsep ini, manusia didorong untuk bertanggung jawab

---

14 Khalifah maknanya adalah yang menggantikan, siapa yang datang setelah yang datang sebelumnya, sedangkan yang dimaksud ayat ini yakni menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak dan menjalankan ketetapan Allah, dengan tujuan menguji serta memberikan penghormatan kepada manusia, bukan menempatkan manusia dalam posisi seperti Tuhan. Penjelasan diatas menunjukkan ke-khalifah-an mencakup wewenang, makhluk yang dibebani tugas yaitu Adam serta keturunannya, serta wilayah tempat melaksanakan tugas yaitu bumi. Maka ke-khalifah-an mengharuskan manusia yang dibebani tugas tersebut melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk dari pemberi tugas dan wewenang yakni Allah.

dalam menjaga alam sebagai amanah dari Tuhan, dengan tindakan nyata yang mendukung konservasi dan keberlanjutan. Penerapan fikih ekologi berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), memperkuat sinergi antara agama dan sains dalam mengatasi krisis ekologi. Dengan pendekatan yang lebih bijak terhadap alam, fikih ekologi tidak hanya mengatasi isu lingkungan tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam menuju Indonesia Emas.

Daftar Pustaka

Berikut adalah daftar pustaka yang disusun dengan menggunakan gaya APA:

Abbas, S. M. (2020). *Fikih Ekologi: Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud* (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya).

Arauf, M. A. (2021). Ecological View from the Perspective of Quranic Verses. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2(2). https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i2.45

Gore, A. (1992). *Earth in Balance: Ecology and the Human Spirit*. Boston New York: Houghton Mifflin Company.

Menkeu: Perubahan iklim menjadi isu utama pembahasan global. (2023, July 27). Retrieved from https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-perubahan-iklim-menjadi-isu-utama-pembahasan-global

Mulyono, A. T. (2019). Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia. *Jurnal Law Review*, 19(1), 29.

Ridwan, M. (2013). Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologis untuk Pelestarian Kosmos. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. http://doi.org/10.21093/MJ.V12I2.331

Tim Forum Kajian Ilmiah Mata Pena. (2020). *Bi'ah Progresif, Menuju Manusia Berkesadaran Lingkungan*. Kediri: Lirboyo Press.

United Nations Documents. (2019). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from sustainabledevelopment.un.org

Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V. Dar al-Fikr, Damaskus.

Zehid, A. (n.d.). Membumikan Fiqh Ekologi. *Alif.ID*. Retrieved on July 27, 2023.

Berjihat Lewat Fiqh Lingkungan. (2023, August 1). Retrieved from http://ppi.unas.ac.id/berjihad-lewat-fiqh-lingkungan/

Muhammad Alfarizi. (2024, July 7). Retrieved from https://www.kompasiana.com/muhammadalfarizi4799/650801e36e14f155116

Santri dan Kapitalisme Rokok (Sebuah Catatan Kritis dari Lirboyo)

Agus Setyawan

Tulisan ini membahas mengenai dinamika perilaku merokok kaum santri di dalam pondok pesantren. Dari dinamika ini kemudian ditarik ke dalam wilayah perdebatan yang lebih luas mengenai rokok di dunia global. Kejadian khusus di Pondok Pesantren Lirboyo menjadi salah satu pintu awal untuk melihat fenomena menarik dan kompleks atas sebuah fenomena kebiasaan masyarakat memanjakan mulut dengan rokok. Benturan rokok paling keras adalah dengan budaya kesehatan modern dengan berbagai macam alasan beserta upaya yang dilakukan selama ini. Aturan mengenai larangan merokok baik secara medis maupun teologis berbenturan keras dengan tradisi merokok masyarakat yang telah turun temurun berjalan dan belum ada tanda-tanda akan berakhir dimenangkan oleh salah satu pihak.

Merokok Diantara Dua Hukum

Kondisi sosial Pondok Pesantren Lirboyo merupakan miniatur sebuah realitas sosial masyarakat secara umum dalam konteks terkait dengan begitu kuatnya komoditas rokok menjadi salah satu bagian dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, dalam lingkup pondok pesantren memiliki kompleksitas relasi sosial unik di mana institusi ini memiliki sistem sosial berbeda dengan di luar pondok pesantren. Unsur utama pembentuk sistem di pondok pesantren adalah Kyai, santri, masjid, kitab kuning, dan pondok tempat mukim santri (Dhofier 2015:44). Lima unsur ini menjadi satu kesatuan relasi membantuk institusi bernama pondok pesantren. Setiap unsur memiliki perannya masing-masing secara teratur saling menopang eksistensi masing-masing. Kyai berperan mentransfer pengetahuan agama kepada para santri dengan media pembelajaran berupa kitab klasik berwarna kuning (kitab kuning) hasil karya ulama-ulama tempo dulu yang diseleksi muatan pengetahuannya oleh Kyai. Kapan dimulainya seleksi kitab-kitab ini tidak dapat dilacak secara pasti, karena para Kyai sekarang biasanya mengajarkannya secara turun temurun. Sebuah kitab kuning tertentu biasanya diajarkan kembali oleh Kyai kepada santrinya setelah sebelumnya yang bersangkutan

belajar kepada Kyai sebelumnya saat dia menjadi santri. Seperti halnya K.H. Abdul Karim dan seluruh penerusnya secara konsisten mengajarkan pengetahuan dari satu kitab tertentu yang diperoleh turun temurun. Tradisi ini sangat kuat membentuk satu sistem rangkaian silsilah keilmuan (sanad) tertentu sebagai dasar murni tidaknya ilmu tersebut. Sanad keilmuan dimaksudkan memberikan jaminan bahwa apa yang diajarkan sebagai ajaran yang benar dan bersambung kepada Rasulullah. Standarisasi pengetahuan ini sangat kuat dipegangi dalam tradisi Pondok Pesantren Lirboyo hingga sekarang. Dalam proses ini kebenaran suatu pengetahuan dipercaya hanya bersumber dari Rasulullah dan dapat dipertahankan secara turun temurun dengan sistem pengajaran di pondok pesantren ini. Metode bandongan merupakan satu metode paling dominan di pondok pesantren yang bertujuan mentransfer pengetahuan dari ulama sebelumnya kepada para santri agar suatu saat nanti para santri akan mengajarkan ilmu yang sama persis kepada murid-murid berikutnya. Dengan demikian seorang Kyai sebenarnya juga santri dan seorang santri juga menjadi Kyai pada waktunya kelak. Jika seorang santri mampu menunjukkan sanad keilmuannya biasanya akan mendapatkan kehormatan jika para guru sebelumnya adalah orang-orang yang dipercaya sebagai seorang Kyai dengan ke-alim-an tinggi. Bahkan jika salah seorang gurunya merupakan seorang Kyai dengan kemampuan olah kanuragan tinggi maka dia biasanya juga diyakini memiliki kemampuan kanuragan tersebut dalam beberapa hal.

Para santri mendapatkan pengetahuan dengan proses yang rigid secara berjenjang dari pusat pengetahuan sampai pada dirinya. Proses mengalirnya pengetahuan dari sumber pengetahuan - dalam hal ini Rasulullah - hingga ke santri melewati beberapa masa dengan kondisi realitas masing masing. Dalam pandangan Foucault, pengetahuan bersifat menyejarah, di mana pengetahuan tidak bisa lepas dari konteksnya masing-masing. Foucault mendefinisikan sejarah sama dengan arkeologi (Foucault 2002), akan tetapi makna arkeologi bagi Foucault bukan bertujuan mencari yang "*arche*" atau "*origin*" atau "asal", melainkan sebagai "*archive*" yang bertujuan memeriksa "arsip," yaitu sistem yang menetapkan pernyataan (*enonces*) sebagai peristiwa (dengan kondisi dan domain penampilan mereka sendiri) dan sebagai hal (dengan kemungkinan dan bidang penggunaannya sendiri (Gutting 2007:30).

Kitab kuning merupakan sumber pengetahuan utama bagi para Kyai dan santri untuk mendapatkan informasi beserta petunjuk mengenai bagaimana hidup berpijak dalam ajaran Rasulullah secara benar. Teks-teks dalam kitab kuning memberikan informasi mengenai keadaan sosial beserta dinamikanya, baik dalam hal teologi, ekomoni atau hukum beserta segala peristiwa penyertanya. Rentang waktu dalam perjalanan transfer pengetahuan melalui sistem *sanad* tersebut di atas, jika dilihat dengan kaca mata Foucault, tentu mengalami deviasi atau reduksi dari konteks sebenarnya. Bagi Foucault setiap pengetahuan dan kebenaran tidak bisa lepas dari konteksnya masing-masing. Sementara konteks merentang dalam ruang dan waktu yang panjang, di mana tidak diketahui secara pasti awal dan akhirnya. Pengetahuan menginisiasi kebenaran, sedangkan pengetahuan sangat dinamis terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, sehingga kebenaran pun juga sangat nisbi dan bisa saja berubah- ubah setiap saat tergantung kondisi lingkungan sosialnya (Afandi 2012:138).

Metode *bandongan* agaknya merupakan sebuah alternatif para ulama salaf-tradisional dalam upaya mempertahankan doktrin pengetahuan dan kebenaran agar tetap terjamin kemurniannya secara turun temurun ini. Schacht menyebut metode ini dengan istilah *Muhammadan jurisprudence* yang bertujuan untuk mendapatkan konteks sosial yang sama persis seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad (Schacht 1979), sedangkan Juynboll menyebut dengan istilah *common link* (Juynboll 2008) untuk menyebut rangkaian *sanad* atau sandaran sebuah pernyataan dalam *al-hadits* untuk dijadikan dasar sebuah keputusan hukum. Menurut kedua kritikus ilmu hadits ini jika metode ini diterapkan memiliki kelemahan pada rentang waktu yang sedemikian lama dengan konteks masing-masing akan mengalami kesulitan dalam menjamin kemurnian setiap *archive* dalam *al-hadits* karena telah mengalami konteks sosial yang berbeda-beda. Kalaupun tulisan teksnya sama persis, itupun belum tentu bisa dimaknai dalam setiap masa secara tepat. Sedangkan bahasa selalu mengalami perkembangan makna di tempat dia lahir, apalagi jika diadopsikan ke tempat lainnya pasti mengalami perbedaan makna beraneka ragam. Hasilnya adalah bahwa menurut kedua kritikus ilmu hadits ini semua perkataan dalam teks-teks hadits tersebut kecil sekali kemungkinan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad, akan tetapi lebih sebagai suatu pernyataan yang diusahakan bersandar seolah-olah dari Nabi Muhammad agar mendapat legitimasi teologis

dan hukum syari'at.

Kitab kuning sebagai sumber pengetahuan para santri dan Kyai tidak lepas dari teks- teks klasik terutama tentang kebenaran hukum kebiasaan merokok yang kebanyakan berasal dari sumber informasi berupa perdebatan para ulama pada abad 16 di Timur Tengah. Hukum *haram* dan *makruh* rokok bersumber dari berbagai kitab kuning tersebut sampai sekarang kenyataannya masih saja diperdebatkan dengan alasan yang relatif sama, walaupun dengan konteks ruang dan waktu yang berbeda. Alasan utamanya adalah selalu mengenai masalah kebersihan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia yang mana harus diutamakan dalam kehidupannya. Kondisi semacam ini cukup menarik dan unik mengingat sudah lama sekali perdebatan ini tidak kunjung menemukan titik pertemuan, khususnya dalam ajaran Islam sendiri dengan basis hukum sama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits serta hasil Ijtihad para ulamanya. Dua hukum rokok di atas tetap berjalan beriringan dan kelihatan baik-baik saja. Perseteruan keras di antara keduanya hanya kuat di tataran wacana, tetapi di wilayah praksis sama sekali tidak terlihat demikian keras. Misalnya pedagang rokok mayoritas perempuan yang tidak merokok dan berjualan rokok dengan baik-baik saja, atau para santri perokok dan tidak perokok biasa saja karena mereka sama sama meyakini hukum rokok *makruh* sehingga tidak berkonsekuensi dosa dan semacamnya. Jika fenomena ini dilihat dengan kaca mata strukturalisme dapat dilihat sebagai sebuah kontinuitas realitas sejarah dari masa lampau, tetapi pandangan ini tentu saja tidak memuaskan. Jika keadaan ini berlangsung dalam durasi waktu lama tentunya ada faktor mendasar yang mempengaruhinya.

Foucault setidaknya mengkritik strukturalisme dalam dua hal, *pertama,* bahwa strukturalisme tidak sampai pada analisis makna dan hanya berada pada tataran analisis relasi-relasi dalam rentang waktu sejarah periode tertentu, *kedua,* bahwa strukturalisme gagal menjelaskan hal-hal yang telah mengalami perubahan radikal beserta gagasan-gagasan mengenai diskontinuitas. Sebagai konsekuensinya, keterikatan dan komitmen Foucault pada sikap ini sangat membantu dalam menjelaskan dua aspek penting dari karyanya: *pertama*, penolakannya terhadap teori-teori esensial seperti Marxisme dan fenomenologi (teori-teori yang bersandar pada gagasan tentang kualitas absolut dan ahistoris, atau 'kebenaran). '); dan, *kedua*, dia mengambil perspektif 'historisisasi' khusus ketika menganalisis

klaim, dan gagasan tentang, kebenaran dan pengetahuan (Danaher, Schirato, dan Webb 2000:11). Dari kaca mata ini dapat dilihat sikap skeptis Foucault terhadap klaim-klaim kebenaran yang ada dalam setiap hal. Kebenaran biasanya melembaga dan dapat dimonopoli oleh sebuah institusi yang dianggap pemilik kuasa atas kebenaran tersebut. Pondok pesantren merupakan salah satu manifetasi dari institusi-institusi yang ada di kalangan masyarakat ini.

Pengetahuan mengenai kebiasaan menghisap asap rokok di Pondok Pesantren Lirboyo ini merupakan salah satu konsekuensi dari relasi kuasa para Kyai dan santri secara turun temurun seakan menjadi kebenaran mutlak. Hukum *makruh* dari merokok sampai sekarang tetap lestari dengan pengikutnya yang banyak sekali. Bahkan wanita muslim yang tidak merokok pun juga lebih banyak yang mengakui bahwa hukum rokok itu *makruh* walaupun mereka bersikap anti terhadap asap rokok. Relasi kuasa yang membentuk hukum rokok *makruh* ini agaknya sangat kuat. Ke-nisbi-an hukum rokok antara *makruh* dan *haram* ternyata tetap saja sama kuat sampai sekarang. Sekilas dapat dipahami seakan ada kebenaran "mutlak" atas kedua hukum merokok tersebut, yaitu mutlak *haram* dan mutlah *makruh*. Dalam dunia perokok mereka meyakini bahwa merokok akan *makruh* selamanya sebagaimana hasil ijtihad ulama terdahulu hingga sekarang dengan dasar teks hadits dan kitab suci tersebut. Keyakinan semacam ini bahkan juga dimiliki oleh orang yang bukan perokok pada umumnya, khususnya pada para santri di Pondok Pesantren Lirboyo.

Dominasi pengetahuan mengenai status hukum rokok *makruh* di Pondok Pesantren Lirboyo sangat kuat membentuk sebuah relasi sosial kuat melembaga secara abstrak dalam kalangan santri dan masyarakat seperti sebuah dimensi tertentu dengan segala hal sistem kehidupan di dalamnya. Jika dianalogkan dimensi ini semacam daratan luas dengan tumbuhan di atasnya dengan penuh warna karena mendapatkan sinar matahari yang bagus sebagai sumber chaya. Penampakan warna dan bentuk tumbuhan tersebut disebabkan oleh pancaran sinar langsung dari sumber cahaya. Tetapi di tengah-tengah pepohonan tersebut ada satu pohon yang juga terus tumbuh membesar dan mempunyai potensi cabangnya melampaui ketinggian pohon-pohon lain sehingga dapat menutup pohon lain tersebut dari sinar matahari. Jika sinar matahari benar-benar tertutup, maka konsekuensinya pohon yang tertutup tersebut akan kehilangan

warnanya karena gelap, dan dalam konsisi tertentu akan mengalami gangguan tumbuh kembangnya walaupun tidak mati. Setidaknya akan menjadi kerdil dan kehilangan eksistensinya. Dalam konteks perilaku merokok di Pondok Pesantren Lirboyo, agaknya telah terjadi *soft-constructivism* yaitu pembentukan konstruksi sosial merokok secara pelan atau halus melalui pengetahuan mengenai merokok di kalangan santri (Setyawan, Yuwono, dan Wahid 2021).

Sejak terbitnya tata tertib Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 2002 yang salah satunya mengatur mengenai aktifitas merokok dengan SIM, agaknya pengetahuan tentang bahaya merokok sudah mulai menguat tumbuh kembali di dalam institusi ini. Banyak tempat diberi tulisan larangan merokok walaupun kenyataannya efektifitasnya masih minim, tetapi fenomena ini menunjukkan adanya satu pertumbuhan pengetahuan baru ditengah-tengah pengetahuan lama di kalangan institusi Pondok Pesantren Lirboyo ini. Pada masa K.H. Abdul Karim pengetahuan ini sebenarnya sudah dominan, khususnya dalam pengetahuan beliau, tetapi selepas itu generasi berikutnya berbeda pengetahuan dan ganti menguasai dimensi ini. Ibarat pohon tumbuh kembangnya terhambat karena tertutup pohon lain. Dalam konteks sekarang agaknya posisinya mulai imbang pertumbuhannya. Kompetisi pengetahuan ini berjalan lama dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu masing-masing generasi. Dalam rumus dominasi Lovett salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena ketiadaan aturan yang jelas (Setyawan 2019:119).

Pandangan Lovett ini menguatkan pendapat Foucault tentang pentingnya pendisiplinan tubuh manusia sebagai bukti keberadaan kuasa dengan turunan konsekuensinya. Hukuman menjadi satu hal mutlak ketika aturan dibuat dengan tujuan memberikan efek tunduk patuh terhadap institusi pembuat aturan. Selain itu, dengan peraturan diharapkan setiap manusia akan berlaku disiplin dan patuh karena merasa diawasi terus menerus setiap saat. Ibarat sebuah penjara, maka aturan adalah seorang sipir di menara pengawas yang mengacungkan senjata ke semua tahanan dan akan menembak siapa saja yang tidak mematuhi aturannya (Foucault 1995). Semakin kuat aturan maka akan dianggap semakin baik. Bahkan Hobbes mengharapkan sebuah aturan yang diterapkan sebuah negara harusnya seperti *Leviathan* (monster laut) dengan segala kekuatan beserta kekuasaannya hingga tidak ada yang dapat mengalahkannya (Hobbes 1651:2, 1660:7). Dari sini dapat dilihat bahwa aturan menjadi

satu alternatif mutlak di Pondok Pesantren Lirboyo dalam usaha mendisiplinkan para santri. Mandat tertinggi pelaksana aturan ini adalah Kyai beserta perangkat organisasi pengurus pondok pesantren. Hukuman diguyur dan semacamnya menjadi alat mengancam santri jika tidak patuh. Akan tetapi sayangnya aturan ini tidak secara kuat berjalan dalam prakteknya.

Fenomena ketidak patuhan terhadap aturan di atas tentu tidak begitu saja terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas aturan tidak begitu terlihat, diantaranya adalah, *pertama,* ancaman hukuman tidak begitu berat dalam pandangan santri. Hukuman bersih-bersih, diguyur atau semacamnya dianggap bukan satu hal menakutkan, dan jika dikenai hukuman tersebut bukan menjadi sesuatu yang tabu. Ini menjadi unik karena beberapa kasus menurut keterangan Kang Edi bahwa santri yang telah kena hukuman malah merasa dirinya hebat karena berani menjalani hukuman tersebut. Alasan utamanya adalah karena hukuman tersebut hanyalah hukuman fisik biasa tanpa ada konsekuensi dosa dan asusila atau kriminal apapun. Secara pskikologis tidak ada beban apapun. Dalam kehidupan sosial di pondok pesantren mereka tidak merasa berhadapan dengan norma buruk apapun. Mereka biasanya hanya merasa telah berhadapan dengan tata tertib pengurus pondok pesantren saja di mana para pengurus tersebut kenyataannya juga banyak yang merokok. *Kedua,* secara psikologis dalam diri setiap orang, khusunya para remaja ada hasrat memberontak yang relatif tinggi karena rata-rata didorong oleh rasa ingin tahu (eksplorasi) terhadap sesuatu yang mereka angap menarik, proses mencari jati diri dan ada hasrat merasa sudah dewasa pada usia 15-18 tahun sebagai masa transisi dari anak-anak ke remaja (Joseph 2017; Ng dkk. 2007).

Ketiga, pengetahuan keagamaan sebagai pengetahuan paling tinggi di pondok pesantren sama sekali tidak berbenturan dengan kebiasaan merokok, sehingga tidak ada hal yang salah baik secara fiqih dan spiritual. Dengan pengetahun ini kebiasaan merokok dipandang menjadi sesuatu kebiasaan normal dan manusiawi mulai dari tahap internalisasi, obyektivikasi hingga eksternalisasi (Berger dan Luckmann 1991) di kalangan santri Pondok Pesantren Lirboyo. *Keempat,* dukungan sosial di lingkungan sekitar podok pesantren yang memberikan legitimasi kultural terhadap kebiasaan merokok, hal ini memberikan legitimasi kuat terhadap kultur di dalam pondok

pesantren sebagai bagian dari kultural besar masyarakat Kota Kediri. *Kelima,* kekuatan modal pabrik rokok, khusunya PT. Gudang Garam dalam memproduksi rokok begitu besar dan telah berdiri sejak lama tentu memberikan pengaruh budaya dan perilaku masyarakat. Pabrik rokok memproduksi komoditi untuk dikonsumsi masyarakat dengan kreatifitas mode, jenis dan inovasi produksi sehingga menimbulkan ketergantungan kuat di dalam masyarakat. Perilaku merokok masyarakat dikonstruksi oleh kuasa modal kreatif dan berhasil bersinergi dalam sistem relasi sosial masyarakat Kediri umumnya, dan para santri beserta institusi Pondok Pesantren Lirboyo.

Faktor-faktor di atas terkait secara erat dalam sebuah himpunan organis (*assemblage*) di mana antara satu faktor dengan faktor yang lain saling terkait secara organis dengan fungsi masing-masing. Ibarat sebuah mesin jam, maka keberadaan *gear box* penghubung antara semua *gear* bekerja sistemik saling terkait. Misalkan salah satu dilepas, maka bagian yang lainnya akan terganggu fungsinya. Relasi seperti ini terjadi dalam setiap gejala sosial dalam masyarakat, dengan kompleksitas masalah maupun fungsinya. Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dilawan dengan aturan beserta ancaman hukuman di dalamnya. Justru jika tidak cermat dalam membaca situasi akan dapat berbalik menyerang pembuat aturan. Seperti pepatah "menepuk air di dulang terpercik muka sendiri". Semua aturan seberapapun bagusnya dirumuskan, pada kenyataannya tetap saja ada celah kelemahannya tertentu. Prinsip kompleksitas masalah dalam sebuah realitas tidak bisa diurai hanya dari satu sisi saja. Sedangkan perspektif pandangan terhadap realitas juga terbatas. Dari sini agaknya pembacaan Foucault tentang kuasa sistem institusi pembentuk otoritas kebenaran belum lengkap. Hukuman sebagai pembuat manusia disiplin, bahkan sekuat *Leviathan* pun tetap tidak mampu menahan hasrat pemberontakan dari setiap individu. Semakin suatu hal dilarang, maka semakin timbul perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Kalau dalam pandangan Foucault kepentingan adalah turunan kuasa, dan kuasa bersifat menyebar di mana-mana. Dengan kata lain kuasa dapat muncul dari pihak yang tertindas oleh sebuah aturan.

Dalam pandangan Deleuze dan Guattari, keberadaan *the smooth* dan *the striated* (Deleuze dan Guattari 1987:480) dalam setiap realitas sosial akan terus ada dan saling melengkapi, walaupun berada pada sisi berbeda. Setiap ada terang pasti ada gelap, karena

gelap adalah terang yang terhambat oleh materi lain. Terang dan gelap disebabkan karena cahaya yang sama. Perilaku merokok berada pada realitas seperti ini. Sinar sebagai sumber pengetahuan dan kuasa, ternyata dalam waktu yang sama juga menyebabkan anomali sisi gelap di samping sisi terangnya. Sisi gelap ini akan berubah menjadi terang jika berhasil melakukan putaran posisi dengan baik. Putaran posisi merupakan putaran pengetahuan baru yang jika berhasil diterima oleh pencari pengetahuan, maka akan menjadi sisi terang (kebenaran) baru. Pengetahuan terus tumbuh seiring dengan pancaran kebenaran ilmu dari dunia ide dalam diri setiap manusia.

Bungkus rokok mempunyai dua fungsi semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 muncul. Regulasi ini bermaksud memberikan edukasi serta melindungi rakyat Indonesia dari bahaya rokok dengan salah satu pasalnya memerintahkan produsen rokok memasang gambar mengerikan akibat dari menghisap asap rokok beserta peringatan tertulisnya. Saat aturan ini benar-benar diterapkan ternyata konsumen rokok juga tidak menunjukkan penurunan. Dengan kata lain sama sekali tidak efektif, bahkan para perokok menyebut cara ini sebagai kefrustasian pemerintah yang disponsori rezim kesehatan beserta aktivis pendukung FCTC dalam kampanye anti tembakau. Sama sekali tidak rasional memberikan peringatan berbahaya kepada suatu barang, tapi barang tersebut masih dijual bebas. Lalu sebenarnya pemegang kuasa atas kedua hal yang bertolak belakang ini siapa? Logikanya adalah semakin banyak rokok diproduksi, maka kampanye anti rokok juga semakin besar.

Jika ditelaah pada fenomena ini, maka sebenarnya kemenangan bukan pada pihak anti rokok, justru berada pada produsen rokok karena bungkus rokok yang diproduksi semakin besar untuk mendukung kampanye anti rokok. Eksistensi rokok justru semakin kuat karena adanya regulasi ini. Kuasa pengetahuan akan merokok adalah hal biasa saja agaknya tetaplah kuat, apalagi di dalam lingkungan pondok pesantren dengan pengetahuan mengenai teologis, fiqih beserta kesehatan yang tidak begitu bertentangan atau dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Seberapapun dilarang santri merokok, toh hukum merokok tetap saja *makruh* tanpa konsekuensi dosa apapun. Posisi *smooth* masih dipegang oleh pengetahuan perilaku merokok, sementara sisi *striated* justru masih di posisi pengetahuan tentang kesehatan, walaupun sebenarnya pengetahuan kesehatan juga sedang bergerak tumbuh dan

berkembang di dalam Pondok Pesantren Lirboyo.

Jika melihat fenomena di atas, maka ada kemungkinan kegagalan menertibkan kebiasaan merokok dengan sebuah regulasi ternyata belum cukup. Sebuah aturan jika tanpa diiringi dengan penguatan pengetahuan justru akan menimbulkan pemberontakan masal yang justru akan membuat suasana tidak kondusif. Sebagai contoh peraturan pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini selama hampir dua tahun tetap saja tidak menemukan formulasi yang sesuai dan justru sering berbenturan dengan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Pengetahuan masyarakat belum memadai untuk menerima sebuah paksaan aturan dari kuasa pengetahuan kesehatan karena dirasa justru menindas. Penertiban pedagang dan kerumunan masyarakat oleh aparat dengan represif justru tidak efektif dan malah menimbulkan kerugian sosial lainnya. Tetapi di beberapa kasus ada aparat yang menertibkan dengan komunikasi persuasif bahkan memberikan kompensasi kepada para pedagang yang ditertibkan ternyata lebih efektif. Komunikasi beserta kompensasi alternatif sebagai varian pendukung sebuah regulasi baru diperlukan untuk memberikan pemahaman pengetahuan agar bisa dimasukkan ke dalam spirit setiap individu. Habermas menyebutnya dengan istilah tindakan komunikatif yang berfungsi mengarahkan pemahaman setiap subyek atas suatu hal yang diungkapkan dengan sebuah bahasa untuk saling bertemu dalam peran saling melakukan sosialisasi (Habermas 1987:4–5).

Dengan komunikasi diharapkan akan terjadi integrasi pengetahuan karena setiap subyek memiliki pengetahuan dengan warna berbeda-beda. Dalam kuasa pengetahuan setiap subyek memiliki kebenaran masing-masing walaupun tidak ada kebenaran mutlak. Foucault sangat menentang kebenaran mutlak, karena bagi Foucault kebenaran ada dalam kuasa yang menyebar di semua tempat. Komunikasi mengarahkan terjadi integrasi besar pengetahuan dalam relasi sosial yang kompleks dengan harapan membentuk satu pengetahuan induk yang terbentuk dari berbagai pengetahuan tersebut dan pada akhirnya dapat membentuk suatu konsensus bersama dalam kesadaran utuh dari setiap subyek. Jika hal ini tercapai maka aturan dan hukuman secara mudah bisa diterapkan tanpa ada pemberontakan

Kebiasaan merokok para santri merupakan buah manifestasi dari kegagalan pengetahuan mengenai kesehatan memberikan

pencerahan kepada mereka sejak dari pengetahuan paling dasar berupa teks-teks keagamaan (Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijtihad) hingga pengetahuan praktis di kalangan institusi pondok pesantren. Tata tertib di dalam Pondok Pesantren Lirboyo sendiri tidak memiliki kuasa mutlak karena pijakannya juga tidak kuat. Sementara aturan dari negara berupa regulasi perundang-undangan yang dimiliki juga tidak mempunya kekuatan mengatur secara penuh. Alih-alih memberikan efek jera dan ketakutan terhadap kampanye negatif langsung di bungkus rokok, justru kenyataannya malah terpelintir menjadi bahan buly-bulyan dari para perokok. Proses komunikasi para penentang rokok mestinya lebih dievaluasi lagi, tidak hanya komunikasi linier tapi harus dengan dua arah. Paling tidak ada alternatif kongkrit untuk ditawarkan sebagai ganti metode praktis memanjakan mulut beriringan dengan penguatan pengetahuan kesehatan dalam masyarakat. Peraturan dan hukuman bukan menjadi alat utama memaksa perpindahan kuasa pengetahuan kesehatan, tapi sebagai bagian dari himpunan *(assemblage*) dari berbagai faktor relasi pembentuk sebuah peradaban.

Merokok Membunuhmu

Kekuatan dari kuasa pengetahuan kesehatan di Pondok Pesantren Lirboyo – seperti di jelaskan di atas – mengalami kekalahan dengan pengetahuan mengenai kebiasaan merokok. Institusi pondok pesantren belum mampu secara maksimal memberikan pencerahan tentang bahaya merokok beserta turunannya. Sebenarnya ajaran tentang hidup sehat di dalam pondok pesantren telah diajarkan sejak ajaran Islam datang. Sebagai buktinya adalah ajaran mengenai kebersihan, kesucian dan hidup dalam kondisi sehat jauh dari hal-hal kotor. Dasar dari ajaran hidup sehat adalah mengenai kebersihan, termasuk kebersihan diri dan lingkungan. Banyak teks-teks keagamaan mengenai himbauan hidup bersih, misalnya ada seruan bahwa "Kebersihan adalah bagian dari iman" kemudian ajaran bersuci dengan wudhu sebelum sholat. Bahkan ajaran tentang khitan yang dinisbatkan kepada ajaran Nabi Ibrahim juga bertujuan untuk senantiasa menjamin kebersihan diri dari *hadas* dan najis. Selain itu misalkan di-*sunnah*-kan untuk memakai parfum atau wangi-wangian saat sholat Jum'at sebagai salah satu bentuk nyata dari aplikasi hidup bersih, di mana bersih itu berkonotasi dengan aroma wangi karena disukai oleh orang lain. Pada umumnya bau tidak wangi tidak disukai

dan mengganggu lingkungan sekitarnya sebagai akibat dari perilaku kotor dan tidak sehat.

Semua ajaran kebersihan di atas sudah diketahui secara detail oleh para santri karena telah diajarkan secara turun-temurun dari para guru sebelumnya. Ajaran mengenai berwudhu sebelum membaca kitab suci dan mengaji serta sebelum sholat adalah ajaran pertama dalam fiqih Islam. Di dalam kitab-kitab fiqih ajararan di bab I biasanya tentang *tauhid* atau teologi, kemudian disusul di bab II adalah mengenai tentang ibadah yang di dalamnya diajarkan tata cara pelaksanaan ibadah sholat dan syarat rukunnya. Salah satunya adalah bagaimana berwudhu, bahkan bagaimana cara mandi yang benar berdasarkan hukum fiqih. Di madrasah- madrasah biasanya dipasang gambar tutorial urut-urutan berwudhu secara benar agar dapat dengan cepat dimengerti oleh para santri, khususnya santri anak-anak dan remaja. Selain itu juga diajarkan menentukan air yang boleh dipakai bersuci dan yang tidak boleh dipakai, biasanya dikategorikan dalam tiga jenis air, yaitu air suci, air *musta'mal* (air suci tapi sudh dipakai membersihkan diri) dan air *mutanajis* (air mengandung najis, kotor). Secara rinci biasanya para ustadz menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari air-air ini serta bagaimana caranya untuk mendapatkan air-air tersebut. Bahkan dalam fiqih juga diajarkan mengenai menangani perempuan yang sedang haid hingga nifas dengan tata caranya masing-masing. Contoh- contoh tersebut sebagai sebagian bukti betapa dalam ajaran Islam sendiri diajarkan sangat rigid bagaimana senantiasa menjalani hidup dengan penuh dasar akan kebersihan. Dengan demikian ajaran untuk selalu menjaga kesehatan sebenarnya sangat diajarkan di dalam fiqih.

Hukum tertinggi adalah *hifdz al-nafs* atau menyelamatkan diri dari ancaman suatu ke-*mudharat*-an yang menimpa. Bahkan dalam hal sangat darurat maka kehidupan harus dipertahankan dengan cara apapun dan boleh keluar dari hukum fiqih yang sudah ada. Dalam konteks kebiasaan merokok perdebatan mengenai pro dan kontranya tersebut sudah sangat jelas. Akan tetapi bahwa pengetahuan tentang lebih baik meninggalkan rokok (*makruh*) sebagai nilai dasar sebenarnya lebih kuat dari pada pengetahuan untuk membiasakan diri menghisap asap bernikotin ke dalam paru-paru. Pengetahuan tentang merokok kurang baik di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo sebenarnya juga trennya semakin menguat dengan bukti sudah adanya tindakan nyata oleh pengurus pondok pesantren

dengan memasang tulisan-tulisan himbauan larangan merokok di depan kelas, di lingkungan masjid dan tempat-tempat sakral seperti di areal makam para pendiri pondok pesantren. Tindakan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh nilai dasar tersebut di atas serta diperkuat pengetahuan mengenai kesehatan yang terus digaungkan baik oleh pemerintah, ormas dan para aktifis anti tembakau.

Penetrasi pengetahuan anti tembakau ini mendorong sedikit demi sedikit pengetahuan santri dan institusi Pondok Pesantren Lirboyo sendiri dengan mulai *open mind* dengan menerima kegiatan kampanye anti tembakau pada tahun 2019 oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) (Masyhari 2019). Keberanian Kyai Haji Athoillah sebagai salah satu pimpinan di dalam Pondok Pesantren Lirboyo memfasilitasi kegiatan ini tentu patut diapresiasi, karena mampu melawan arus kuat kuasa pengetahuan dari pada perokok (Kyai dan santri lainnya) yang didukung oleh pabrik rokok, khususnya PT. Gudang Garam sebagai mitra kuatnya.

Tidak dapat dipungkiri jika hubungan khusus Pondok Pesantren Lirboyo dengan PT. Gudang Garam memberikan efek khusus terhadap eksistensi rokok di dalam pondok pesantren. Jumlah santri di pesantren ini sangat besar (kurang lebih 28.000 orang) berasal dari seluruh penjuru Indonesia menjadi satu aset besar. Selain sebagai seorang santri, suatau saat saat sudah selesai belajar mereka akan menjadi kyai-kyai baru di lingkungan asalnya masing-masing. Sebagai pemilik kelas sosial baru sebagai pimpinan agama mereka tentu memiliki legitimasi khusus dalam masyarakatnya dan dalam kondisi tertentu menjadi model rujukan perilaku keagamaan baru dalam masyarakat sekitarnya. Perilaku merokok sebagai kebiasaan di pondok pesantren yang terbawa sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari dalam hidupnya akan dilihat sebagai rujukan oleh masyarakatnya. Pengaruhnya akan cukup signifikan membentuk pengetahuan masyarakat sekitarnya tersebut. Dengan kata lain dalam konteks tertentu para santri yang sedemikian banyak ini akan menjadi agen-agen baru dalam masyarakatnya masing-masing. Secara tidak langsung memberikan keuntungan besar kepada produsen rokok. Adapun keuntungan langsung yang didapatkan oleh produsen rokok adalah laba dari penjualan rokok dengan omset yang sangat besar ini. Jika dihitung 62% dari 28.000 orang santri di Pondok Pesantren Lirboyo adalah perokok aktif, lalu seandainya setiap perokok

menghabiskan satu bungkus rokok saja tiap harinya, maka uang yang berputar dan laba yang didapatkan tentu besar sekali.

Kesadaran di institusi Pondok Pesantren Lirboyo ini mulai tumbuh sesuai harapan dari pendirinya, yaitu K.H. Abdul Karim untuk meninggalkan kebiasaan buruk merokok. Akan tetapi arus besar budaya merokok ternyata juga tidak mudah untuk dihadapi, apalagi menghentikannya. Banyak faktor saling mempengaruhi dan berkumpul secara *assemblage* dengan fungsi yang saling bersinggungan sehingga sangat sulit diurai. Salah satunya adalah keyakinan mengenai takdir hidup dan mati manusia dalam ajaran Islam dipercaya hanya otoritas Tuhan semata, tidak ada hubungannya dengan masalah kebiasaan merokok. Faktor ini menjadi penghambat paling berat pada upaya kampanye tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Kesehatan dianggap sebagai salah satu bagian saja yang dapat mengakibatkan kematian. Pengertian kesehatan atau kondisi yang sehat ternyata tidak mampu memberikan gambaran pasti mengenai apa dan bagaimana suatu kondisi disebut sehat.

Secara medis WHO mendefinisikan kondisi yang sehat adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan (Callahan 1973:77). Saylor menambahkan bahwa kesehatan akan dicapai dengan sempurna mana kala adanya keseimbangan, harmoni, dan integrasi pikiran-tubuh (Saylor 2004:111). Kondisi sehat tersebut dimaksudkan ada pada diri setiap manusia tanpa kecuali sebagai hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dari individu yang sehat ini kemudian naik menjadi komunitas yang sehat dan pada akhirnya membentuk kesehatan global. Diantara proyek kesehatan global adalah upaya mengatasi masalah kematian akibat kekurangan dan kelebihan gizi, HIV/AIDS dan tembakau, malaria dan kesehatan mental, tuberkulosis dan kematian akibat kecelakaan kendaraan bermotor (Koplan dkk. 2009:1994). Dengan kata lain sehat adalah keadaan yang baik secara lahir dan batin dan membuat bahagia.

Kebanyakan pengetahuan mengenai definisi kesehatan hanya memandang dari segi lahir saja. Orang sehat sering kali dipahami saat mereka kondisi tubuhnya tidak memiliki penyakit apapun. Orang sehat mampu beraktifitas, bekerja serta menjalankan fungsi lahiriyahnya secara baik. Padahal kesehatan juga berkaitan dengan kondisi spiritual yang membentuk kondisi sosial yang kondusif dalam komunitas masyarakat. Sebuah kebiasaan individu menjadi unsur

utama pembentuk kondusifitas perilaku sosial komunitas masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Perilaku yang dianggap tidak etis dalam masyarakat bisa mengancam sistem sosial yang sudah terbentuk dalam masyarakat. Sebagai ancaman maka bisa dikatakan sebagai "virus sosial" atau kerusakan unsur sosial (patologi sosial).

Dari sinilah muncul aturan pemberi rambu-rambu kepada setiap individu supaya tetap berada pada sistem yang sesuai dalam kondisi sosial komunitas tersebut. Terbitnya tatib di Pondok Pesantren Lirboyo dengan aturan pemberian Surat Ijin Merokok (SIM) agaknya menjadi alternatif memberikan rambu-rambu terhadap perilaku merokok di komunitas pondok pesantren ini yang dianggap kurang etis. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan memberikan dampak sosial berupa kerentanan pola relasi sosial individual dalam pondok pesantren. Para santri perokok dipaksa dengan aturan agar tidak sembarangan merokok agar tidak mengganggu teman santri lain yang tidak merokok, lebih khusus lagi lingkungan pesantren yang juga ada banyak santri putri yang anti rokok. Selain itu kebersihan udara di lingkungan pesantren menjadi hak semua orang yang berada di lingkungan tersebut.

Keinginan di atas, di mana Pondok Pesantren Lirboyo ingin memiliki kondisi lingkungan yang nyaman dan sehat sudah diajarkan oleh K.H. Abdul Karim, akan tetapi setelah beliau wafat agaknya cenderung meredup, hingga baru pada masa K.H. Anwar Mashur ini mulai dimunculkan lagi. Hambatan dari keinginan ini sehingga belum terwujud dengan maksimal sampai sekarang ini setidaknya karena dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Nalar mistis tasawuf cenderung didominasi oleh pengetahuan fatalistik, yang mana pengetahuan mengenai kematian sebagai takdir selalu jatuh pada ranah subyektif relatif.
2. Kesehatan masih dipandang dari sisi fisik saja, sehingga kondisi individu setiap orang diukur dari aktifitas yang nampak oleh mata. Kesehatan masih diletakkan pada urusan privat dan memiliki model-model tertentu sebagai legitimasi semisal Kyai atau gurunya untuk membenarkan kebiasaan yang mungkin tidak sehat, tapi dengan model tersebut hal tersebut tertutupi dengan prestasi yang diperoleh.
3. Peraturan-peraturan yang ada, baik dari pemerintah maupun dari internal institusi pondok pesantren tidak memberikan solusi alternatif, dan cenderung ambigu karena malah berkesan

berdampingan dengan komoditas rokok tersebut.

4. Faktor lingkungan dengan kultur kuat budaya merokok sangat mempengaruhi cara pandang santri terhadap perilaku merokok. Hal ini menjadi bertambah kuat karena dukungan produsen rokok dengan iklan-iklannya yang inten dan kreatif.

Kumpulan faktor di atas sangat besar pengaruhnya terhadap kebiasaan santri di dalam institusi pondok pesantren. Slogan dari pemerintah yang berbunyi "merokok membunuhmu" kelihatannya sama sekali tidak memberikan efek takut atau sekedar khawatir terhadap bahaya asap rokok terhadap kesehatan manusia. Bahkan kisah mistis yang dialami Kyai Mahrus Aly justru lebih dipercaya ketimbang petunjuk kesehatan dari dunia medis. Dalam candaan para santri perokok bahkan disebutkan bahwa "merokok menghidupkan", ini bertolak belakang sama sekali dengan jargon dari pemerintah dan medis di atas. Justru merokok dipandang sebagai bukti bahwa mereka masih hidup dengan kondisi sehat serta baik-baik saja. Mereka juga mengatakan bahwa jika sesudah sakit kemudian merokok, dan sudah bisa merasakan nikmatnya rokok berarti sudah sehat. Sangat kontras dengan kaidah-kaidan kesehatan dari dunia medis. Asap rokok yang seharusnya menjadi penyebab penyakit, justru malah menjadi alat ukur kesehatan di kalangan santri perokok.

Pengetahuan mengenai kesehatan sebagaimana definisi menurut WHO di atas sepertinya tidak lebih banyak dipahami dalam masyarakat, khususnya di kalangan santri Pondok Pesantren Lirboyo. Umumnya pengetahuan kesehatan ini sebatas hal-hal dasar saja yang sangat dekat dengan patologi fisik saja. Minimnya pengetahuan ini disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya pengetahuan mengenai kesehatan dari segi medis tidak sekuat pengetahuan tradisional masyarakat. Dalam kondisi tertentu justru terpelintir dari hal yang membahayakan menjadi hal yang dianggap menyelamatkan. Seperti tali tampar yang terdiri dari dua utas tali yang saling berputar dan memelintir serta menindih satu dengan lainnya. Kedua pengetahun ini akan terus saling memelintir (*twist of knowledge*) hingga tanpa jelas kapan selesainya. Jika ingin menyelesaikan dengan cepat, maka jalan satu-satunya adalah dengan memutus salah satu darinya sebagaimana usul Foucault. Akan tetapi hal ini sangatlah sulit dilakukan karena belum tentu punya kekuatan memutus dengan spontan dan cepat, kecuali revolusi, yang ini justru

akan menimbulkan masalah baru lagi.
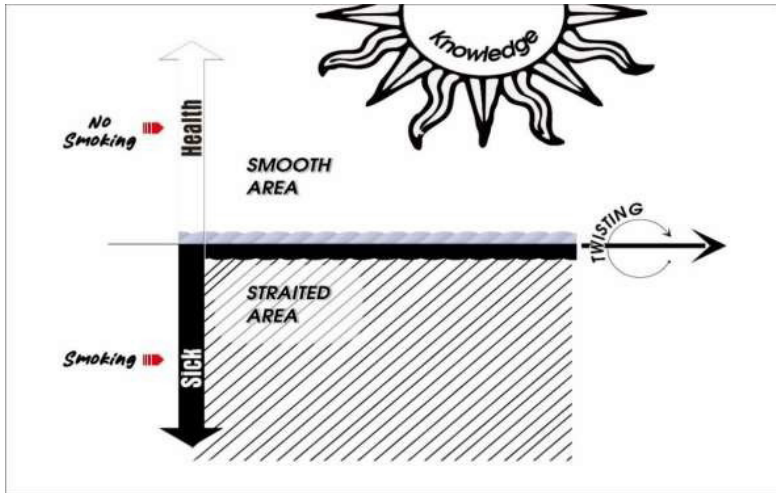
Gambar. 22. *Twist of Knowledge*

Solusi komunikatif Habermas mungkin cara terhalus untuk memediasi ketegangan antara kedua pengetahuan tersebut. Mendialogkan dua kutub berbeda tidaklah mudah karena banyak faktor yang saling bertolak belakang. Dalam konteks ini mungkin sangatlah sulit diterapkan, karena basis pengetahuan medis dan santri mungkin sama mengenai kebersihan, tapi definisi maupun paradigma mengenai hidup sehat memiliki perbedaan. Perilaku dalam aplikasi kebersihan senyatanya berbeda sama sekali, khususnya dalam konteks kebiasaan merokok di institusi pondok pesantren ini. Faktor paling mempengaruhi adalah ketiadaan hukum pasti mengenai rokok karena dasar dalil keagamaan yang dipegangi tidak secara mutlak memberikan penjelasan mengenai hukum larangan merokok.

Nalar keagamaan Islam kebanyakan jatuh pada dua ranah antara nalar *bayani* atau nalar *irfani* (Rasmuin 2019:82– 87). Nalar *bayani* merupakan bentuk ketundukan kepada otoritas teks-teks keagamaan (Al- Qur'an dan Al-Hadits) dengan sepenuhnya. Kebenaran diukur dari ada tidaknya dalil petunjuk di dalamnya. Kecenderungannya adalah membentuk karakter yang cenderung keras berdasar penafsiran tekstual. Sedangkan nalar *irfani* lebih dominan menggunakan pengetahuan mistis-spiritual dalam menjalankan suatu tindakan dalam hidup. Dalam konteks kesehatan

versus merokok, kedua nalar ini memberikan pengaruh kuat di kalangan santri Pondok Pesantren Lirboyo. Pengetahuan tentang kesehatan yang didapat dan kemudian dimanifestasikan dalam perilaku merokok yang lebih longgar dan tidak ada kesan memaksa. Hal inilah kemudian menjadikan rokok bukan lagi dipandang sesuatu yang begitu mengancam jiwa, karena dipandang tidak memiliki satu hal membahayakan sama sekali untuk kesehatan secara pasti.

Baik dalil agama dan dalil mistis spiritual tasawuf masih dalam ranah perdebatan dengan dasar yang sama-sama kuat. Pandangan tentang perilaku merokok sampai saat ini masih berpijak dengan kuat pada pengetahuan hukum *makruh* baik oleh kalangan perokok dan yang tidak merokok. Kaum perempuan muslim, khususnya di kalangan Pondok Pesantren Lirboyo tetap memegangi hukum rokok *makruh* dan dalam kesadaran pengetahuannya juga memaklumkan perilaku merokok sehingga implikasi psikologis dan nalar keagamaannya tidak begitu mempermasalahkan perilaku merokok di sekitarnya. Dalam konteks ini kelihatannya akan sulit menghilangkan perilaku merokok di kalangan santri, khususnya di Pondok Pesantren Lirboyo. Selain itu, budaya masyarakat mengenai perilaku merokok sangatlah kuat beserta dukungan produsen rokok yang terus mengembangkan inovasinya dam membuat produk-produk konsumsi baru. Dukungan kedua faktor tersebut menjadikan rokok menjadi konsumsi paling berpengaruh dalam budaya masyarakat, mulai dari budaya sehari-hari hingga ritual-ritual sakral. Jika demikian halnya, agaknya akan sulit sekali "perang" melawan rokok ini bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Perlawanan budaya, agama, ekonomi dan faktor kapital akan mengkristal dalam sebuah *assemblage* perikalu merokok secara kuat. Kuatnya aturan belum tentu bisa memberikan solusi kongkrit atas masalah rokok ini. Sebaliknya mengurai kumpulan faktor tersebut jelas tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Kesimpulan

Tulisan ini menyoroti dilema merokok di kalangan santri Pondok Pesantren Lirboyo yang menggambarkan benturan antara tradisi kuat dan upaya kesehatan modern. Meskipun merokok sering dipandang negatif dalam perspektif medis dan sebagian teologis, budaya merokok tetap mengakar karena didukung oleh struktur

sosial pesantren, relasi kuasa antara Kyai dan santri, serta pengaruh ekonomi dari industri rokok. Regulasi dan kampanye kesehatan sering kali tidak efektif karena tidak mampu menembus kuatnya legitimasi budaya dan keyakinan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa solusi terhadap masalah merokok tidak bisa hanya mengandalkan aturan dan sanksi, tetapi harus melibatkan pendekatan yang mengintegrasikan edukasi, dialog, dan transformasi budaya secara mendalam. Untuk mengatasi fenomena ini secara efektif, diperlukan kolaborasi yang melibatkan pesantren, pemerintah, dan komunitas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam perilaku dan kesadaran tentang kesehatan.

Daftar Pustaka

Afandi, Abdullah Khozin. 2012. "Konsep Kekuasaan Michel Faucault." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 2(1):131–49. doi: 10.15642/teosofi.2012.2.1.131-149.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. 1991. *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. X. England: Penguin Books.

Callahan, Daniel. 1973. "The WHO definition of'health." *Hastings Center Studies* 77–87.

Danaher, Geoff, Tony Schirato, dan Jen Webb. 2000. *Understanding Foucault*. Allen & Unwin.

Deleuze, Gilles, dan Felix Guattari. 1987. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*.

London: University of Minnesota Press.

Dhofier, Zamakhsyari. 2015. *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. IX. Jakarta: LP3ES.

Foucault, Michel. 1995a. *Discipline and Punish*. New York: Vintage BooksV.

Foucault, Michel. 1995b. *Discipline and Punish. The Birth of the Prison*. 2nd edition. Vintage Books.

Foucault, Michel. 2002. *The Archaeology of Knowledge*. 2nd ed. Routledge.

Gutting, Gary. 2007. *The Cambridge Companion to Foucault*. 2nd ed. Cambridge University Press.

Habermas, Jurgen. 1987. *Theory of Communicative Action*. Vol. vol 2. Boston: Beacon Press.

Hobbes, Thomas. 1651. *Leviathan*. Andrew Crooke.

Hobbes, Thomas. 1660. *Leviathan*.

Joseph, Novita. 2017. "Penyebab Remaja Memberontak Berdasarkan Usianya." *Hello Sehat*. Diambil 8 Agustus 2021 (https://hellosehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang-remaja/penyebab-usia-remaja-memberontak/).

Juynboll, G. H. A. 2008. *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*. 1 ed. Cambridge University Press.

Koplan, Jeffrey P., T. Christopher Bond, Michael H. Merson, K. Srinath Reddy, Mario Henry Rodriguez, Nelson K. Sewankambo, dan Judith N. Wasserheit. 2009. "Towards a common definition of global health." *The Lancet* 373(9679):1993–95.

Masyhari, Nanang. 2019. "Kyai Dan Santri Ponpes Lirboyo Kediri Dukung Pengendalian Rokok | Beritajatim.Com." Diambil 14 April 2021 (https://beritajatim.com/pendidikan- kesehatan/kyai-dan-santri-ponpes-lirboyo-kediri-dukung-pengendalian-rokok/).

Ng, Nawi, L. Weinehall, dan A. Öhman. 2007. "'If I Don't Smoke, I'm Not a Real Man'—Indonesian Teenage Boys' Views about Smoking." *Health Education Research* 22(6):794–804. doi: 10.1093/her/cyl104.

Rasmuin, Mr. 2019. "The Epistemology of Bayani, Burhani and Irfani 'Abid al Jabiri and It's Relevance in Islamic Education." *Al Ghazali* 2(1):78–91.

Saylor, Coleen. 2004. "The circle of health: a health definition model." *Journal of Holistic Nursing*

22(2):97–115.

Schacht, Joseph. 1979. *Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford University Press.

Setyawan, Agus. 2019. "Merokok Dalam Arena Dominasi Kapital Dan Religi: Suatu Kajian Teoritik." *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 2(2):115–24. doi: 10.5281/zenodo.3544201.

Setyawan, Agus, Pujo Semedi Hargo Yuwono, dan Abdul Wahid. 2021. "Santri, Cigarettes, and Power Relation: Soft Constructivism of Smoking Habit at Pesantren Lirboyo." *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 4(01):111–25.

BIOGRAFI PENULIS

M. Mas'ud Said

Lahir di Sidoarjo pada 8 Maret 1964, adalah Guru Besar Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang yang dikenal luas atas kontribusinya dalam pembenahan tatanan pemerintahan dan pengembangan kebijakan publik di Indonesia. Ia menyelesaikan studi doktoralnya di School of Political and International Studies, Flinders University, Australia melalui beasiswa AusAid. Aktif dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), Prof. Mas'ud Said menjabat sebagai Ketua Litbang PW NU Jawa Timur dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur periode 2018-2023, di mana ia berperan penting dalam pengembangan sumber daya intelektual NU dan penguatan kaderisasi di kalangan sarjana NU. Selain itu, ia juga menjadi anggota Dewan Pakar PP ISNU dan Ketua Dewan Ahli PC ISNU Kota Malang, berkontribusi dalam strategi pengembangan NU di tingkat wilayah dan pusat. Di luar perannya di NU, ia juga pernah menjadi Asisten Staf Khusus Presiden RI dan Staf Khusus Menteri Sosial RI, serta aktif di berbagai organisasi sosial, memperkuat peran NU dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Farhan

Farhan, lahir di Probolinggo pada 11 Desember 1984, merupakan sosok yang aktif dalam dunia pendidikan dan dakwah. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Probolinggo, ia kemudian melanjutkan studi di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sebelum meraih gelar S1 di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2008. Gelar S2-nya diraih di almamater yang sama pada 2012, diikuti dengan gelar doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2021, dengan fokus penelitian tentang pembinaan mualaf Tionghoa Muslim. Farhan juga aktif berorganisasi, mulai dari Gerakan Pramuka, IPNU Jawa Timur, hingga Komnasdik

Probolinggo, menunjukkan dedikasinya dalam pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Khabib Fajar Pratama

Lahir di Ponorogo kota reyog yang di lain sisi sering dikenal juga dengan sebutan kota santri. Sejak Tarbiyatul Athfal hingga Madrasah Aliyah ditempa di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar yang juga berada di desa tempatnya tinggal. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020 dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan studi masternya pada tahun 2023 di Universitas Airlangga, Surabaya dengan konsentrasi Media dan Komunikasi. Aktifitasnya saat ini ialah mengabdi di IAI Al-Azhar Menganti, Gresik. Sedang aktifitas lainnya salahsatunya ialah membantu pengelolaan LKSA Yayasan Husnul Khotimah di Kedungturi, Taman, Sidoarjo. Dapat bertegur sapa melalui email khabibfpratama@gmail.com.

Adi Ari Hamzah

Akademisi dan peneliti di bidang ilmu sosial yang merupakan alumni Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menempuh pendidikan, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik seperti penelitian dan seminar, khususnya di bidang studi agama, komunikasi Islam, dan dinamika sosial. Di UIN Sunan Kalijaga, ia mendapatkan pendidikan holistik yang mengintegrasikan studi Islam dengan kajian sosial dan budaya. Selain itu, Adi juga berperan aktif dalam organisasi-organisasi seperti PMII, ANSOR, ISNU, dan PC ISNU Ponorogo, di mana ia berkontribusi dalam pengembangan kebijakan publik serta strategi berbasis data untuk memecahkan isu-isu sosial yang kompleks.

Arik Dwijayanto

Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo. Ia memperoleh gelar MA dalam bidang Sejarah Asia Tenggara di Universiti Malaya pada tahun 2014 dan menyelesaikan Doktor program Internasional ITMS (Islamic Thought and Muslim Societies) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Minat penelitiannya mengenai Diaspora dan Migrasi Masyarakat Muslim di Asia Tenggara. Beberapa artikelnya terbit di Jurnal Internasional yang terindeks Scopus, WoS dan SINTA

2. Publikasinya meliputi: Nurturing Moderate Islam: Strategic Da'wah Communication in The Digital Era for Generation Z (2024); Cultural Identity of Diasporic Javanese Muslims of Ponorogo in Malaysia: Continuity and Change (2023); Student's Attachment to Social Media and the Challenges of Moderate Islamic Education (2022) Email: arikdj99@gmail.com.

Noval Setiawan

Lahir di Kebumen, 05 November 1996. Pendidikan Sekolah berada di Kebumen. Pendidikan formal terakhir S2 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019-2021. Sedangkan pendidikan S1 di IAIN Surakarta dengan jurusan yang sama yakni Komunikasi dan Penyiaran Islam pada tahun 2015-2019. Sedangkan pendidikan non formal di Ponpes Al-Hikmah Sraten, Gatak Sukoharjo tahun 2016-2019 kemudian melanjutkan lagi menimpa ilmu agama di Ponpes Al-Munawwir Krapyak Yogykarta. Organisasi yang di ikuti antara lain: HMJ KPI, Anggota PMII, JQH Al-Wustho dan wakil lurah Pondok. Pengalaman pekerjaan dimulai dari membuka Bimbel Les untulk anak sekolah SD-SMA, kemudian mengajar di SDIT Salsabila Al-Muthi'in Yogyakarta dan sekarang mengajar di IAI An-Nawawi Purworejo. Saya memiliki kesenangan dalam bidang jurnalistik dimana beberapa karya tulisan yang pernah terbitkan di jurnal kampus dengan fokus kajian dakwah dan komunikasi. Selain itu juga ada beberapa tulisan artikel opini yang terbit di website. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang signifikan di bidang jurnalistik, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkontribusi dalam beberapa penulis buku. Saya siap menghadapi tantangan baru dan berkontribusi dalam proyek-proyek inovatif karya di masa depan.

Fitah Husurur

Seorang mahasiswa Manajemen di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang sedang merintis karier profesional di dunia bisnis. Berbekal pendidikan formal dan pengalaman kerja di CV Karya Purabaya, Fitah telah mengembangkan kemampuan manajerial dan keterampilan operasional yang solid. Dengan semangat belajar dan dedikasi tinggi, ia terus berupaya mengintegrasikan ilmu akademis dengan praktik lapangan untuk berkontribusi secara nyata dalam

dunia bisnis. Fitah dapat dihubungi melalui email fitahhusurur@gmail.com atau di nomor 082242111566.

Edy M. Ya'kub

Seorang penulis dan jurnalis yang aktif di berbagai organisasi dan media. Saat ini, ia menjabat sebagai pengurus Biro Jaringan Media PW ISNU Jawa Timur (2024-2029) dan penasehat Majelis Alumni IPNU Jawa Timur (2024-2030). Edy adalah penulis buku "Kesalehan Digital" (Campustaka/Gramedia-2023) dan "Langgar Gipo ('Markas' Ulama-Santri)" (15/6/2024). Sebelumnya, ia berpengalaman sebagai redaktur di LKBN ANTARA Jatim (2023-2024) dan ANTARA Bali (2016-2023). Selain itu, ia juga terlibat sebagai anggota Tim Renovasi-Revitalisasi MBO PWNU Jatim (2023).

Muchammad Machrus Zaman

Sebagai bentuk kontribusi sebagai penulis dengan beberapa karya yakni Rekontruksi Dakwah era Revolusi Media: Studi Pergolakan Dakwah Front Pembela Islam, Nalar Kebangsaan Dalam Islam refleksi nilai al-Quran, Hadits, dan Sumber Islam Lainnya, Strategi Dakwah di Era Digital menakar peluang, tantangan dan solusinya, Dakwah Literasi Menyebarkan Ajaran Islam Melalui Tulisan serta Dakwah dan Nasionalisme. Lahir di Surabaya dengan *beackground* pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama di Jombang yakni Pesantren Darul Ulum Jombang. Menempuh pendidikan S1 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulunggaung dan S2 di kampus yang sama. Aktif di bidang literasi hingga menjadi *Speaker in International Conference Da'wah and Communication "Moderate Islam: Promoting Tolerance and Harmony in the Digital Era"*.

Ela Indah Dwi Syayekti

Alumni prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ponorogo tahun 2021, serta baru saja menyelesaikan pendidikan Magister pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis merupakan alumni PMII Rayon Farid Esack Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, yang menjadi cikal bakal baginya suka menulis serta berkecimpung di dunia filsafat dan feminis. Penulis dapat ditemui di ig@ela_indah_dwy

Wafiq Kamilatul Lailiyah

Adalah seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam dan aktif di Pondok Pesantren. Ia menekuni studi dan dakwah digital melalui berbagai platform, termasuk Majelis Sabilut Taubah, untuk mengimplementasikan amaliyah NU di era digital. Wafiq berfokus pada pengaruh besar digitalisasi dalam perubahan kultur warga Nahdlatul Ulama (NU), dengan harapan dapat memaksimalkan dampak positif teknologi dalam kehidupan beragama.

Muhammad Fadhlurrohman

Lahir di Tegal pada 29 Juni 1996, saat ini tinggal di Debong Tengah, Kota Tegal. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, setelah menyelesaikan studi S1 di Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya pernah mengikuti Diklatsar Banser Kota Tegal (2018) dan PKPNU Kota Tegal (2018). Saya memiliki kemampuan bahasa Arab dan Inggris yang baik, yang mendukung kegiatan akademis dan penelitian saya. Prestasi saya termasuk meraih Best Paper III pada 7th International Conference on Islamic Studies (ICIS) yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024), serta menerbitkan artikel ilmiah di Jurnal Tadibia Islamika: Journal of Holistic Islamic Education milik Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024). Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman ini, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan dan kontribusi saya dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan Nahdlatul Ulama (NU).

Kardi

Lahir di Sukoharjo pada 31 Oktober 1972. Beliau merupakan seorang akademisi dan pustakawan dengan jabatan Lektor dan golongan IV/b di IAIN Ponorogo. Memiliki NIP/NIDN 197210311999031002 / 2031107204, beliau menempuh pendidikan S1 di Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, Ponorogo dan Fak. Sastra Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S2 di MIP UGM Yogyakarta, serta menyelesaikan S3 di Studi Islam IPII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dr. Kardi pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Ponorogo pada 2012-2017 dan kini aktif sebagai Pustakawan Madya.

Beliau menikah dengan Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., dan dikaruniai dua anak, yaitu Muhammad Fawaizur Rahman, S.Kom., dan Hayyun Najwa Putri Hayati. Dr. Kardi dapat dihubungi melalui email kardi@iainponorogo.ac.id atau nomor HP 085258011876.

Mukhlas Habibi

Lahir di Wonogiri pada 7 April 1998, tumbuh dalam keluarga dengan latar belakang pendidikan agama; ayahnya adalah seorang guru agama dan ibunya ibu rumah tangga. Mukhlas menempuh pendidikan dasar di SD N 1 Bangunrejo, kemudian melanjutkan ke MTs dan MA Darul Huda Mayak Ponorogo. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan langsung melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Yogyakarta jurusan PAI. Aktif berorganisasi sejak mengikuti MAKESTA PAC IPNU-IPPNU Sukorejo pada 2016, ia kemudian menjabat sebagai sekretaris PR IPNU Bangunrejo dan ketua PAC IPNU Sukorejo periode 2017-2019. Mukhlas juga menjadi pengurus Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Ponorogo, relawan di NU Care-Lazisnu, PMI, dan BAZNAS Ponorogo, serta saat ini aktif sebagai pengurus PAC GP Ansor Sukorejo dan Sekretaris PC JRA Batoro Katong Ponorogo.

Muhammad Muchlish Huda

Menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 di bidang Islamic Studies. Selain mengajar, ia aktif sebagai peneliti mandiri dengan fokus pada isu sosial, pendidikan kritis, multikulturalisme, pesantren, dan advokasi pendidikan berbasis masyarakat. Karya-karyanya tersebar dalam buku, media digital, prosiding, dan jurnal ilmiah terakreditasi. Sebagai penulis buku "Pesantren dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jawa," ia juga terlibat dalam advokasi pendidikan melalui jaringan GusDurian dan berperan sebagai Sekretaris Umum PC ISNU Ponorogo. Ia menggagas Simposium Pemikiran Santri dan Khazanah Pesantren Nusantara (SIIR SANTREN), yang menjadi ajang tahunan penting bagi para santri dan akademisi.

Samsul Hadi

Lahir di Ponorogo pada 22 Mei 2000 dan tinggal di Dusun Medang, Desa Sampung. Berasal dari keluarga sederhana, ayahnya, Paimun, yang baru saja berpulang pada 22 Mei 2024, bekerja sebagai petani, dan ibunya, Suprantri, adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, Samsul dididik di lingkungan yang mengedepankan ilmu agama dan umum, menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan Pondok Pesantren Sabilul Huda Mandiro Ngariboyo Magetan. Saat berkuliah di IAIN Ponorogo, Samsul aktif di organisasi kemahasiswaan, khususnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dengan fokus pada nilai keadilan, moralitas, dan kepemimpinan berbasis kebangsaan dan keislaman. Setelah lulus, ia mengabdikan diri sebagai pendidik di SDN 1 Krebet Jambon Ponorogo dan SMP Unggulan Roudhotul Huda Lembeyan Magetan, mengajar mata pelajaran PAI dan literasi, dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci transformasi sosial.

K.A Rahman, Mulyadi, Firman Afrian Pratama, dan Agung Yusup

Dosen Mata Kuliah Agama di Universitas Jambi dengan latar belakang yang beragam. K.A Rahman dan Mulyadi berasal dari program studi Administrasi dan Manajemen Pendidikan, sedangkan Firman Afrian Pratama dan Agung Yusup berasal dari Pendidikan Bahasa Arab. Keberagaman akademik mereka memperkaya pembelajaran dan mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan dalam pendidikan agama, berkontribusi pada pembentukan mahasiswa yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas di Universitas Jambi.

Elsa Monica

Lahir di Ponorogo pada 5 November 2000, saat ini menempuh pendidikan pascasarjana di bidang Pendidikan Sains di Universitas Negeri Surabaya. Aktif berorganisasi di IPPNU sejak 2019, Elsa dikenal sebagai pribadi yang selalu terbuka terhadap kritik konstruktif, memandangnya sebagai motivasi untuk berkembang lebih baik. Ia memiliki semangat belajar yang tinggi serta komitmen dalam dunia pendidikan. Elsa dapat dihubungi melalui email: elsamonica228@gmail.com.

Sahila Nur Mahfudah

Lahir di Ponorogo pada 3 Maret 2005, saat ini sedang menempuh studi di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain fokus pada pendidikannya, Sahila juga aktif dalam organisasi IPPNU, di mana ia berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan sosial di kalangan pemuda. Sahila memegang teguh prinsip konsistensi dan ketekunan dalam mengejar mimpinya, percaya bahwa kerja keras dan komitmen adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Melalui aktivitas organisasi dan pendidikan, ia terus mengasah kemampuannya agar dapat berkontribusi lebih dalam dunia pendidikan dan sosial. Sahila dapat dihubungi melalui email: sahilanur335@gmail.com.

Muhamad Afif Effindi

Dosen pada Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Penulis aktif dalam berbagai organisasi yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama, mulai dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU Kabupaten Gresik Masa Khidmah 2013-2015, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU Kabupaten Gresik Masa Khidmah 2023-2025), serta asosiasi Program Studi Bidang Ilmu Komputer, yang bernama *Computer Society of* Nahdlatul Ulama (CSNU). Penulis merupakan salah seorang *awardee* Beasiswa Nahdlatul Ulama *Scholarship* (NUS) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh LAKPESDAM PBNU. Penulis dapat dihubungi melalui email: mafif.effindi@trunojoyo.ac.id.

Dedi Ardiansyah

Lahir di Desa Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada tanggal 20 Mei 1999. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN NO. 40/V Senyerang (2007-2012), kemudian melanjutkan ke MTs Far'ussa'adah Arabiyah Senyerang (2012-2015), kemudian melanjutkan ke MA Far'ussa'adah Arabiyah Senyerang (2015-2018). Pada tahun 2018 penulis melanjutkan setudinya luar pulau yaitu ke di IAIN Ponorogo Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (2018-2022) selain mejalani perkuliahan penulis juga mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Pada tahun 2022 setelah wisuda sarjana, penulis

melanjutkan studinya ke Pascasarjana IAIN Ponorogo Jurusan Pendidikan Agama Islam. Hingga saat ini penulis masih berkhidmah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

Afni Ma'rufah

Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui pengajaran dan penelitian. Selain aktif di kampus, ia juga terlibat dalam pengembangan kurikulum dan program studi serta berperan aktif dalam organisasi Fatayat NU Ponorogo, berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kegiatan sosial. Sebagai istri dari Khoirul Fathoni dan ibu dari dua anak, Ahmad Haidar dan Ahmad Haitsam, Afni berhasil menyeimbangkan karir dan keluarga, menunjukkan kepemimpinan yang kuat di berbagai aspek kehidupannya.

Anjar Kususiyanah

Dosen di IAIN Ponorogo, yang merupakan akademisi yang menekuni bidang hukum, khususnya hukum bisnis. Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Ponorogo pada tahun 2011, ia melanjutkan studi ke jenjang S2 di Universitas Merdeka Malang dan meraih gelar pada tahun 2014 dengan konsentrasi di hukum bisnis. Selama kariernya, Anjar telah aktif dalam berbagai penelitian yang mendalami aspek-aspek hukum bisnis, termasuk efektivitas regulasi, kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang, serta konstruksi hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia juga sering mengkaji isu-isu hukum terkait perlindungan konsumen dan praktik bisnis yang beretika. Di samping perannya sebagai akademisi, Anjar sangat berkomitmen dalam kegiatan sosial, khususnya di bidang literasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai program dan pelatihan, ia berusaha memperluas akses masyarakat terhadap pemahaman hukum, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap hukum, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan hukum di era modern.

M. Arwan I'tikaf

Lahir dan tinggal di Ponorogo, pendidikan Tk muslimat nu klaten gegeran, sdn gegeran 1 , mts albajuri klaten gegeran, man 2 ponorogo,

stain ponorogo, pascasarjana insuri ponorogo, pendidikan informal Maddin Masjid as salafiah klaten gegeran, ponpes, Ittihadul Ummah njarakan, ponpes roudlotul ihsan pethuk kediri, ponpes darusalam watucongol muntilan gunung pring magelang, Ohio english course ponorogo, aktifitas guru Ma nurul qur'an pakunden ponorogo, PC. ISNU ponorogo, ketua ika FTIK IAIN Ponorogo, ketua pemuda pancasila kec. Sukorejo, sekretaris nu desa karanglo lor, hobby kuliner, membaca, menulis, traveling. Motto ketaatan beribadah adalah anugerah, syukur atas setiap waktu yang bermanfaat.

Eko Priaji

Lahir di Ponorogo, 30 April 1989. Menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) dari Universitas Terbuka pada tahun 2024, dan melanjutkan Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik (S-2) di Perguruan Tinggi yang sama. Saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Sejak 2010, penulis aktif dalam organisasi ke-NU-an, dan pernah menjabat sebagai Ketua PAC IPNU Badegan (2012-2014), Sekretaris PAC GP Ansor Badegan (2016-2018), dan sekarang menjabat Ketua PAC ISNU Badegan. Penulis dapat dihubungi melalui email: radenabimanyu73@gmail.com atau Whatsapp di nomor 082234523949.

Roin Roiya Hanifah

Lahir di Ponorogo, 02 Mei 1996. Pernah nyantri sambil menempuh pendidikan formal di pondok pesantren 'Ainul Ulum pulung dibawah asuhan K.H Ahmad Sunani (2009 – 2014). Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Ponorogo pada Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan tahun 2018 dengan skripsi berjudul "Problematika pembelajaran Al Qur'an di Ma'had Al Jami'ah Ulil Anshar IAIN Ponorogo" disamping itu pernah menjadi Musrifah di Ma'had Al jami'ah ulil Abshar IAIN Ponorogo (2015 – 2018). Pendidikan pascasarjana ditempuh di INSURI Ponorogo konsentrasi Pendidikan Agama Islam selesai tahun 2020 dengan tesis berjudul "Implementasi pendidikan akhlak melalui kegiatan MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa) di MI Subulul Huda Klepu." Dan saat ini mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di MTs As Salam Sooko.

Ginanjar Prastyanto

Lahir di Banyuwangi pada 14 Juli 1989, adalah seorang akademisi yang saat ini menjabat sebagai Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, UIMSYA Blokagung Banyuwangi. Beliau menyelesaikan studi S1 di Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan meraih gelar S2 di bidang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Selain mengajar, Ginanjar aktif sebagai Anggota Divisi Riset PC ISNU Banyuwangi, di mana ia terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sosial dan keagamaan. Anda dapat menghubunginya melalui WhatsApp di nomor 081331955956 atau melalui email ginanjar@iaida.ac.id.

Abu Abas

Lahir di Ponorogo pada 3 Juli 1987, adalah seorang dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo yang memiliki latar belakang pendidikan S1 di STAIN Ponorogo jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab. Dengan pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan, Abu Abas pernah mengajar di berbagai lembaga seperti pesantren, madrasah, dan sekolah menengah, serta aktif dalam berbagai organisasi seperti GP Ansor dan NU Care-Lazisnu. Selain sebagai pendidik, ia juga aktif menulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan bahasa Arab, serta berkontribusi dalam pengembangan kurikulum dan metodologi pengajaran.

Kusnul Ciptanila Yuni K

Akrab disapa Cipta, adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang ekonomi syariah. Lulus S1 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, dan melanjutkan S2 di Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Ponorogo. Sebelum menjadi dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Cipta memiliki pengalaman kerja di dunia perbankan selama tiga tahun. Dengan keahlian di bidang ekonomi dan ekonomi syariah, ia aktif berkontribusi dalam pengajaran, penelitian, dan publikasi, serta sering menjadi narasumber dalam

seminar dan konferensi. Melalui karya-karyanya, Cipta berfokus pada mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata, serta memperkuat peran masyarakat dalam transformasi ekonomi modern.

Siti Masruroh

Lahir di Nganjuk pada 23 Oktober 1995, adalah dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, IAI Badrus Sholeh Kediri. Ia menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di bidang Ekonomi Islam, dengan fokus pada pengembangan ilmu agama dan ekonomi syariah. Sejak masa kuliah, Siti Masruroh aktif mengikuti olimpiade dan lomba karya tulis ilmiah, yang membawanya meraih beasiswa riset Baznas untuk skripsi pada tahun 2018. Saat ini, ia berkomitmen untuk menjadi dosen profesional dengan aktif menulis buku, jurnal, dan berpartisipasi dalam call for papers nasional dan internasional. Melalui kegiatan menulis, ia berharap dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam bidang keilmuan dan akademik.

Muhammad Fahim Sultoni

Lahir di Kota Probolinggo pada 4 April 1995, adalah seorang mahasiswa S2 di Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, dengan fokus studi pada Manajemen Pendidikan Islam. Sebagai bagian dari generasi muda yang berkomitmen pada pengembangan pendidikan Islam, Fahim terus mengasah kemampuannya dalam manajemen pendidikan dengan harapan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan Islam.

Intan Amalia Humala Ababil

Lahir di Kediri pada 4 Juni 2003, Ananda saat ini merupakan mahasiswa Fakultas Syariah di IAI Badrus Sholeh Kediri. Selain fokus pada studinya di bidang hukum Islam, ia juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan pendidikan, terutama di lingkungan pesantren. Aktivitasnya mencakup keterlibatan dalam diskusi-diskusi ilmiah serta pengembangan program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan di kalangan pemuda pesantren. Ananda juga terlibat dalam kegiatan sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan semangat untuk membangun sinergi antara ilmu syariah dan

kehidupan sosial. Melalui aktivitasnya, ia berusaha memadukan pengetahuan teoritis dan praktik dalam pengembangan hukum Islam serta menciptakan dampak positif bagi lingkungannya.

Fatihatul Anhar Azzulfa

Dosen di IAI Badrus Sholeh Kediri, lahir di Nganjuk pada 12 Maret 1997, menempuh pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya dan meraih gelar magister dengan predikat Cumlaude dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Mahfud Aziz Dhulkurnaen Husein

Lahir di Balairiam pada 16 Agustus 2003, adalah mahasiswa Fakultas Syariah di IAI Badrus Sholeh Kediri yang aktif berorganisasi dan memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri.

Abid Rohmanu

Abid Rohmanu adalah Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Ponorogo untuk periode 2021-2025. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris PW ISNU Jawa Timur periode 2023-2028, setelah sebelumnya menjadi Ketua PC ISNU Ponorogo periode 2018-2022. Abid juga aktif memimpin Yayasan Pendidikan Pesantren (YPP) Al-Jawahiriyyah Campurejo Sambit Ponorogo, yang menaungi lembaga pendidikan dari tingkat Play Group hingga Madrasah Aliyah.

Murdianto

Tokoh yang terlibat aktif dalam dinamika gerakan pemuda dan mahasiswa pada awal era Reformasi 1998. Ia pernah menjabat sebagai bagian dari Biro Kaderisasi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada periode 2005-2007, di mana ia berperan penting dalam membina dan mengembangkan kaderisasi di kalangan mahasiswa. Selain itu, Murdianto juga aktif di bidang pendidikan sebagai pengurus Bidang Pendidikan PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2023, berkontribusi dalam mengembangkan program pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Rinesti Witasari

Seorang dosen di Fakultas Tarbiyah, Institut Sunan Giri (INSURI) Ponorogo. Saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain mengajar, Rinesti memiliki minat yang mendalam dalam dunia tulis-menulis, terutama dalam bidang pendidikan. Kecintaannya pada literasi telah membawanya aktif berkontribusi dalam berbagai karya akademis serta publikasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pendidikan dasar.

Maratus Saudah

Lulus S1 di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Ponorogo tahun 2023. Saat ini adalah pengajar di Madin Hasan Abdullah. Pernah menjuarai KTIQ sebagai juara dua pada ajang Olimpiade Agama Sains dan Riset (OASE) II di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Ponorogo.

Afidatul Asmar

adalah seorang akademisi di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare serta menjabat sebagai Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan Vice Chairman of Laboratorium SDGs di IAIN Parepare. Selain aktif di kampus, ia terlibat dalam berbagai kegiatan eksternal, termasuk kolaborasi dengan PCINU Jerman dan sebagai anggota KONI Kota Parepare. Afidatul juga berkhidmat sebagai MABINKOM PMII IAIN Parepare, menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pengembangan masyarakat dan kolaborasi. Untuk membangun kerja sama dan relasi lebih lanjut, ia dapat dihubungi melalui email afidatul.asmar@gmail.com.

Abdul Azis Fatkhurrohman

Adalah seorang penulis asal Desa Bedrug, Pulung, Ponorogo, yang memiliki hobi merangkai kalimat dan menggali inspirasi dari kehidupan sehari-hari. Saat ini, ia tengah menyelesaikan studi magister di UIN Sunan Kalijaga, sambil aktif berkontribusi dalam berbagai badan otonom NU dan lembaga di tingkat ranting

maupun MWC. Dikenal atas dedikasinya, Abdul Azis juga dipercaya memimpin redaksi Buletin Wasatha, Aswaja NU Center, PCNU Ponorogo, di mana ia terus berperan dalam menyebarkan nilai-nilai keaswajaan melalui tulisannya.

Lukman Santoso

Seorang dosen tetap Ilmu Hukum di IAIN Ponorogo yang aktif dalam dunia akademik dan kepenulisan. Ia menempuh pendidikan S1 di FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto, dan Universitas Merdeka, menyelesaikannya pada tahun 2005 dan 2016. Gelar S2 diraihnya dari Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada 2012, dan ia melanjutkan studi doktoral di tempat yang sama, meraih gelar S3 pada 2022. Selain mengajar, Lukman aktif dalam penelitian di bidang hukum dan secara konsisten menerbitkan karyanya di berbagai media massa serta jurnal ilmiah. Beberapa buku karyanya antara lain "Hukum Perjanjian (Kontrak)" dan "Negara Hukum dan Demokrasi". Ia juga terlibat dalam berbagai organisasi, seperti ISNU, Lakpesdam, ICMI, dan MUI Ponorogo, serta sering terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan hukum di masyarakat. Karya-karyanya mencerminkan minatnya yang kuat dalam hukum, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kontak: lukmansantoso4@gmail.com.

Muhamad Zulkhoirian Syahri

Lahir di Tangerang pada 1 Juli 2003, adalah seorang santri di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Kedunglo, Jawa Timur, yang aktif menulis dan mengajar. Memiliki pengalaman sebagai Ketua Bagian Pengajaran OSAFA (2020-2021), pengajar di MTsN Pondok Pesantren Fathurrobbaaniy Cisoka (2021-2022), dan Bendahara Pondok Al-Ma'ruf Kedunglo (2023-2024). Saat ini, ia sedang menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Dwita Nurulita

Lahir di Pekalongan pada 9 Agustus 2000, merupakan seorang guru PAI di MA NU Hasan Muchyi Pagu Kediri. Aktif dalam organisasi mahasiswa, ia pernah menjabat sebagai Gubernur BEM-Fakultas Tarbiyah IAIT (2020-2021) dan sekarang melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Keduanya dikenal melalui

karya tulis mereka yang berfokus pada pendidikan, agama, dan perubahan sosial, serta aktif berkontribusi di lingkungan akademis dan organisasi.

Arifatul Mufitda

Lahir pada 22 Juli 2005 di Kediri, Jawa Timur, adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri dan santri di Pondok Pesantren Putri Al-Husna 1 Banjaran, Kota Kediri. Sebagai anak sulung dari tiga bersaudara, Arifatul menempuh pendidikan di SDN Jarak 1, SMPN 1 Plosoklaten, dan SMK Pawyatan Daha 1 Kota Kediri dengan jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga, sebelum melanjutkan studinya di UIT. Ia juga pernah meraih 3rd Smart Student Islamic Olympics di bidang Pendidikan Agama Islam pada 2022. Sementara itu,

Muh. Rijalul Fikri

Lahir di Cirebon, Jawa Barat, adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIT Lirboyo Kediri dan santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Ia menyelesaikan pendidikan formal di MI Tarbiyatul Wildan, MTsN Karang Sembung, dan MA Al Shigor, serta aktif mengikuti pendidikan non-formal di pesantren, menunjukkan komitmennya dalam menimba ilmu agama dan pendidikan.

Rojif Mualim

Seorang dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta, lahir di Wonogiri dan kini tinggal di Solo. Aktif dalam berbagai diskursus kajian Islam, pendidikan, kebudayaan, gender, dan seni, Rojif juga terlibat dalam organisasi NU sebagai Ketua Divisi Jurnalistik LTN NU, PCNU Kab. Sukoharjo. Selain mengajar, ia aktif menulis artikel di media dan jurnal ilmiah, serta berpartisipasi dalam konferensi internasional untuk memperluas wawasan dan jaringan. Rojif sering menjadi pemateri, narasumber, dan moderator di berbagai acara. Fotografi menjadi hobinya yang tidak hanya menangkap momen indah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan perspektif baru dalam seni dan pengetahuan. Baginya, menjadi dosen adalah tentang berkontribusi aktif dalam masyarakat melalui berbagai aktivitas dan minat.

Oga Sugianto

Lahir di Ponorogo pada 6 September 1998, adalah seorang pendidik berdedikasi yang berperan sebagai guru tetap di Yayasan Pondok Pesantren Ainul Ulum dan mengajar di SD Terpadu Ainul Ulum sejak 2019. Ia meraih gelar S1 dan S2 dari IAI Sunan Giri Ponorogo, di mana ia mengembangkan minat yang kuat dalam dunia pendidikan dan penelitian. Sebagai akademisi yang aktif, Oga telah menulis dan menerbitkan berbagai artikel ilmiah, termasuk kajian tentang penerapan pembelajaran blended learning di MI Ma'arif Mayak Ponorogo serta penelitian mengenai pengaruh budaya religius terhadap sikap spiritual peserta didik di SD Terpadu Ainul Ulum Pulung Ponorogo. Melalui karyanya, ia berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pengembangan pendidikan berbasis nilai dan inovasi.

Aishhsalma

Memiliki nama asli Salma Mawaddah Mas'udi, adalah seorang santri di Pondok Pesantren HM. Al-Mahrusiyah Lirboyo, Kediri, dan mahasiswa S1 jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Tribakti Kediri. Dikenal dengan kecintaannya pada menulis, ia aktif sebagai jurnalis di Elmahrusy Media dan terlibat dalam berbagai kegiatan literasi serta organisasi kampus seperti PMII. Sejak kecil, Aishhsalma sudah menunjukkan bakat menulis dengan memenangkan berbagai lomba dan terus berkontribusi dalam menulis artikel untuk simposium, prosiding, dan konferensi.

Rahmad Ikbal Devid

Lahir di Palembang, menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dan merupakan santri di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo. Ia aktif dalam kegiatan jurnalis pesantren dan berbagai simposium baik nasional maupun internasional, seperti MU'TAMAD 22 dan MULTAQO Ulama' Al Quran Nusantara. Selain itu, ia juga terlibat dalam Bahtsul Masail dan organisasi kepenulisan di pesantren, menunjukkan dedikasinya pada pengembangan ilmu dan dakwah.

Agus Setyawan

Lahir pada 25 Februari 1980 di Ponorogo, adalah seorang akademisi dengan latar belakang kuat dalam studi keislaman dan antropologi. Ia menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Jurusan Ushuluddin Prodi Tafsir Hadits STAIN Ponorogo pada tahun 2003, dan melanjutkan studi Strata-2 di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Agama dan Filsafat dengan konsentrasi Filsafat Islam, lulus pada tahun 2008. Dengan semangat yang tinggi untuk terus belajar, Agus memperoleh beasiswa Program 5000 Doktor Morascholarship dari Kemenag RI pada tahun 2016, yang memberinya kesempatan untuk menempuh studi Strata-3 di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Prodi Antropologi di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2022. Selain fokus pada studi akademis, Agus juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengajaran, serta berkontribusi dalam berbagai diskusi ilmiah terkait filsafat dan antropologi Islam.

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
CABANG PONOROGO
JAWA TIMUR

Karya ini lahir dari keprihatinan dan semangat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan peradaban dunia. Di era globalisasi, industrialisasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah diatasi. Isu-isu seperti radikalisme, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan pergeseran nilai-nilai tradisional menuntut respons yang bijaksana dan strategis.

Sebagai contoh, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga tahun 2022 terdapat peningkatan aktivitas radikalisme di media sosial, yang mencapai 600 ribu konten bermuatan ekstremisme. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Di bidang sosial ekonomi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada Maret 2022 mencapai 9,54%, setara dengan 26,16 juta orang. Angka ini mencerminkan perlunya upaya bersama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi.

Dalam hal lingkungan, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait deforestasi dan degradasi ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan bahwa deforestasi netto Indonesia tahun 2021 -2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Kerusakan lingkungan ini mengancam keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Buku ini menggali dan mengelaborasi visi kemanusiaan NU yang mengedepankan nilai-nilai universal Islam. Sejak didirikan pada tahun 1926, NU selalu menekankan pentingnya kemaslahatan umat secara global. Hal ini tercermin dalam tema Muktamar Satu Abad NU, "Merawat Jagat, Membangun Peradaban", yang menegaskan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

NU, meskipun berakar pada tradisionalisme, selalu menunjukkan sikap kosmopolitan dan inklusif. Misalnya, pada tahun 1926, NU melalui Komite Hijaz mengajukan permohonan kepada Raja Ibnu Saud untuk menjaga kebebasan bermadzhab di Tanah Suci. Meskipun mayoritas warga NU bermazhab Syafi'i, keterbukaan terhadap penganut mazhab lain selalu dijunjung tinggi, hal ini menunjukkan komitmen NU terhadap persatuan umat Islam.

Dalam era digital, NU berupaya memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan umat. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang, atau sekitar 77% dari total penduduk. Potensi ini dimanfaatkan oleh NU melalui berbagai program digital. Dalam upaya mendigitalisasi administrasi dan layanan, Nahdlatul Ulama (NU) meluncurkan beberapa platform digital terbaru, seperti Digdaya Persuratan NU, yang merupakan aplikasi untuk mempermudah pengelolaan surat-menyurat di lingkungan NU dengan fitur tanda tangan elektronik dan stempel digital (Digdaya NU). Selain itu, NU Online Super App menghadirkan berbagai fitur layanan digital, mulai dari berita keagamaan, informasi NU, hingga marketplace UMKM berbasis NU (NU Online). Kedua aplikasi ini merupakan bagian dari upaya besar NU dalam beradaptasi dengan era digital dan memfasilitasi umat.